PT Bank KB Bukopin Tbk

Strengthening a Solid Business Foundation



KB Bank

Laporan Tahunan 2023

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2023 KB BANK

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2023 KB Bank dengan tema **"Strengthening a Solid Business Foundation"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di tahun 2023 salah satu fokus dari KB Bank adalah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis serta untuk memastikan bahwa KB Bank terus tumbuh di masa mendatang.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan Tahunan KB Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 ini diterbitkan sesuai dengan kondisi Perseroan sepanjang tahun 2020 dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan 2023 ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang KB Bank dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian KB Bank pada 2023.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Laporan Tahunan 2023 ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan KB Bank dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Perseroan www.kbbank.co.id.



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan KB Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi KB Bank pada masa mendatang serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan tahunan ini memuat kata “KB Bank”, “Bank” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Bank KB Bukopin Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.



SEKAPUR SIRIH

"STRENGTHENING A SOLID BUSINESS FOUNDATION"

Untuk mencapai target tahun 2023, Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dibagi dalam 13 (tiga belas) strategi agenda dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Adapun tajuk strategi agenda tahun 2023 adalah "BISA" cerminan motivasi insan Perseroan untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan dengan tujuan meraih kemenangan bersama melalui 4 pilar yaitu *Boost Sales Performance, Innovation for Turnaround,Strengthening the quality of Assets, Advanced IT & Digital*.

Fase transformasi KB Bank yang diagendakan terus berlanjut mengikuti dinamika perkembangan bisnis yang ada, dimana KB Bank membagi dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan proyeksi waktu. Fase pertama yaitu membangun kembali dasar bisnis melalui pertumbuhan aset yang berkualitas, Fase kedua KB Bank diharapkan berada pada tahap yang lebih stabil untuk fokus pada segmen bisnis utama yaitu (ritel dan UMKM), serta fase ketiga KB Bank diharapkan sudah berada dalam tahap yang siap sepenuhnya "Menjadi Bank Terkemuka dan Dicintai di Indonesia".

KESINAMBUNGAN TEMA





2022

"Sustainable Transformation To Be Financial Star"

Dalam menghadapi kondisi iklim usaha yang masih penuh ketidakpastian di sepanjang tahun 2022, Bank KB Bukopin lebih berhati-hati dalam merealisasikan peran strategisnya di industri perbankan Indonesia. Direksi bersama Insan Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dibagi dalam 20 (dua puluh) stratejik agenda dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Hal tersebut selaras dengan transformasi yang dilakukan Bank sejak tahun-tahun sebelumnya.

Bank KB Bukopin memulai perjalanan transformasinya yang dimulai sejak Agustus 2020 yang ditandai dengan masuknya KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali. Transformasi yang dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap dimana pada tahap 1 dan 2 fokus transformasi pada penyelesaian masalah fundamental. Hingga saat ini proses transformasi masih berjalan yang memasuki pada tahap 3 dan 4 dengan fokus membangun fundamental yang kuat sebagai persiapan untuk pertumbuhan good bank kedepannya. Bank akan terus melakukan transformasi yang berpusat pada perubahan dan inovasi dengan aktif melibatkan karyawan dalam prosesnya.

2021

"Memperkuat Transformasi, Kokohkan Sinergi"

Seiring dengan cita-cita Bank KB Bukopin untuk menjadi Lembaga Keuangan Utama di Indonesia pada tahun 2025, maka Bank KB Bukopin perlu melakukan peningkatan kinerja di semua lini. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas pertumbuhan bisnis. Bank KB Bukopin meyakini bahwa peningkatan kualitas pertumbuhan bisnis menjadi pilar penting untuk memastikan keberlanjutan Bank KB Bukopin di masa mendatang.

Berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2021 dituangkan dalam bentuk 12 (duabelas) Kebijakan Strategis yang kami lakukan dengan komitmen tinggi dan konsistensi. Keduabelas Kebijakan Strategis tersebut yakni fokus pada bisnis ritel, penguatan likuiditas, peningkatan kualitas kredit, rencana penambahan modal, ekspansi pada segmen unggulan, pengembangan fee based income, melakukan upaya efisiensi, penguatan point of sales, pengembangan teknologi informasi, penguatan SDM, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang berkualitas serta penguatan peran sistem pengendalian internal.





2020

“Menempuh Babak Baru dengan Optimisme”

Wabah virus COVID-19 dengan cepat mengganggu sektor bisnis dan aktivitas konsumen secara global seiring dengan dampak kesehatannya. Dengan tantangan dan krisis global dan nasional ke depan, kami telah menyiapkan beberapa strategi baik yang sifatnya segera maupun jangka panjang. Kolaborasi strategis kami dengan KB Kookmin Bank di tahun ini telah memberikan kami optimisme dalam memulai babak baru dalam rangka memberikan kinerja yang lebih baik dan nilai tambah yang lebih banyak bagi para pemangku kepentingan.

Terlepas dari dampak COVID-19, pada tahun 2020, kami berfokus pada tiga hal utama sebagai bagian dari proses transformasi kami termasuk membangun fundamental yang kuat dengan memperkuat kapabilitas inti kami dan memperluas pasar, memperluas bisnis utama kami, dan menangkap pasar baru melalui penggunaan perbankan digital. Dengan proses transformasi yang sedang berlangsung, kami yakin dan optimis bahwa babak baru ini akan membawa kami ke arah dan peningkatan yang lebih baik lagi.

2019

“Memperkuat Sinergi, Memperkokoh Fondasi Bisnis”

Persaingan industri keuangan yang semakin ketat dan geliat industri teknologi finansial yang telah memasuki babak baru, mendorong Bank Bukopin untuk menetapkan strategi dengan memperkuat sinergi untuk memacu pertumbuhan di sektor Ritel.

Sepanjang tahun 2019, seluruh lini bisnis Bank dengan komitmen penuh dan konsistensi bahu-membahu memperkuat sinergi sebagai bagian dari program jangka panjang Bank. Penguatan sinergi dan pengokohan fondasi bisnis bertujuan agar Bank memiliki resiliensi dalam menghadapi setiap perkembangan dan tantangan zaman.

PENCAPAIAN KUNCI 2023

KINERJA SEGMEN KREDIT

Rp16,63 triliun
UMKM

Rp12,46 triliun
CONSUMER

Rp21,33 triliun
KOMERSIAL

Rp49,42 Triliun
TOTAL KREDIT

KINERJA SEGMEN DANA

Rp30,01 triliun
RITEL

Rp14,78 triliun
KOMERSIAL

Rp44,79 Triliun
TOTAL DANA TERHIMPUN

KINERJA KEUANGAN

Rp5,95 triliun
KAS DAN SETARA KAS

Rp84,31 triliun
ASET

25,80%
EKUITAS

Di Tahun 2023, total ekuitas sebesar Rp14,11 triliun, tumbuh 25,80% atau Rp2,89 triliun dibandingkan total ekuitas tahun 2022 sebesar Rp11,22 triliun.

17,75%
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Di akhir tahun buku periode 2023, jumlah pendapatan bunga dan syariah Bank tercatat sebesar Rp4,86 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp733 miliar dibandingkan capaian tahuan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,13 triliun.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

"Baik"
Peringkat 2

Pada Tahun 2023, berdasarkan temuan dan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, penerapan *good corporate governance* di Bank KB Bukopin secara umum adalah "Baik"

REBRANDING
KB BANK

Di tahun 2024, PT Bank KB Bukopin Tbk resmi mengubah nama merek dan logo Bank menjadi KB Bank. Perubahan ini sekaligus melengkapi perjalanan transformasi Perseroan sejak tahun 2021, terus berkembang serta memperkuat posisinya sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Meskipun demikian, perubahan ini tidak memengaruhi nama legal perusahaan yang tetap PT Bank KB Bukopin Tbk.

Perubahan nama merek dan logo menjadi KB Bank merupakan bagian dari strategi Bank yang bertujuan untuk memperkuat *branding* serta memadukan "Korea Best" dengan keunggulan Indonesia, berpegang pada transparansi, kepercayaan, dan integritas, sehingga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk solusi kebutuhan layanan perbankan di Indonesia.

DAFTAR ISI

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2023 KB BANK	2
SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB	3
PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK	4
SEKAPUR SIRIH	5
KESINAMBUNGAN TEMA	6
PENCAPAIAN KUNCI 2023	8
REBRANDING KB BANK	10
DAFTAR ISI	9

1 Ikhtisar Data Keuangan Penting

IKHTISAR KEUANGAN	14
IKHTISAR OPERASIONAL	20
IKHTISAR SAHAM	21
AKSI KORPORASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERUBAHAN PADA SAHAM	22
PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING)	22
INFORMASI MENGENAI OBLIGASI SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI YANG MASIH BEREDAR	24
PERISTIWA PENTING	26

2 Laporan Manajemen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS	33
LAPORAN DIREKSI	39
PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN	46
PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN	47

3 Profil Perusahaan

IDENTITAS BANK	50
RIWAYAT SINGKAT BANK	51
KETERANGAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM	53
JEJAK LANGKAH BANK	54
KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI	56
INFORMASI MAKNA LOGO BANK	57
BIDANG USAHA	58
JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI BANK	63
VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA BANK	64
STRUKTUR ORGANISASI	66
PROFIL DEWAN KOMISARIS	68
PROFIL DEWAN DIREKSI	74
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF SENIOR	80
DEMOGRAFI KARYAWAN	83
INFORMASI KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM	86
KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM	92
KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA	96
SUSPENSI SAHAM BANK	97
STRUKTUR GRUP BANK	97
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI	98
INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	98
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	100
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI	102
INFORMASI PADA WEBSITE BANK	102
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN	105

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan 4

TINJAUAN UMUM	118
TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA	124
PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN OPERASI	143
PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN GEOGRAFIS	145
TINJAUAN KEUANGAN	147
KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG	157
RASIO KEUANGAN	160
STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL	162
IKATAN YANG MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL	165
REALISASI INVESTASI BARANG MODAL	166
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	167
PROSPEK USAHA	168
PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN	170



ASPEK PEMASARAN	171
KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN	173
INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)	174
INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	175
INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL	177
INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/ PIHAK BERELASI	178
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN	182
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN	182
KOMITMEN DAN KONTINJENSI	183
DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI	185
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN	186
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA	187
ASPEK PERPAJAKAN	188
DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK	189
LARANGAN, BATASAN DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA	190
KINERJA ENTITAS ANAK	191
LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN	192

5 Fungsi Penunjang Bisnis

STRUKTUR PERMODALAN BANK DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	210
TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA	290

6 Tata Kelola Perusahaan

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	299
PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	308
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	323
DEWAN KOMISARIS	337
KOMISARIS INDEPENDEN	345
DIREKSI	349
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS	373
KOMITE AUDIT	375
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	383
KOMITE PEMANTAU RISIKO	389
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN	395
KOMITE DI BAWAH DIREKSI	398
SEKRETARIS PERUSAHAAN	404
SATUAN KERJA AUDIT INTERN	411
AKUNTAN PUBLIK	417
MANAJEMEN RISIKO	419
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	432
FUNGSI KEPATUHAN	434
ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, DAN PPPSPM)	438
PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN	440
PERKARA PENTING	441
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	444
KODE ETIK	446
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN SOSIALISASINYA	448
PENGENDALIAN GRATIFIKASI	448
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PERUSAHAAN	449
PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM DAN OBLIGASI BANK KB BUKOPIN	449
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK	450
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT	450
PERLINDUNGAN NASABAH, ANTI FRAUD DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	451
TRANSPARANSI PRAKTIK	459
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE KB BANK TAHUN 2023	460

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 7

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	468

Laporan Keuangan 8



1

Ikhtisar Data Keuangan Penting


KB

IKHTISAR KEUANGAN

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	2021
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga dan Syariah			
Pendapatan bunga	4.374.694	3.721.413	3.919.306
Pendapatan syariah	486.942	407.257	298.309
Jumlah pendapatan bunga dan Syariah	4.861.636	4.128.670	4.217.615
Beban bunga dan Syariah			
Beban bunga	(3.746.710)	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban syariah	(306.044)	(250.792)	(218.805)
Jumlah Beban bunga dan Syariah	(4.052.754)	(3.079.167)	(3.388.098)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	808.882	1.049.503	829.517
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	333.732	323.340	419.959
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	(8.899)	13.082	19.498
Keuntungan selisih kurs - neto	29.265	31.815	(423.525)
Lain-lain	102.429	131.272	135.233
Jumlah pendapatan operasional lainnya	456.527	499.509	151.165
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.537.792)	(3.948.482)	(1.051.148)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto	(269.055)	(81.325)	(95.606)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5.235	(1.919)	107.115
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	1.999	(2.272)	24.968
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155.384	(147.542)	(12.683)
Beban operasional lainnya			
Umum dan administrasi	(1.371.594)	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(809.976)	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(98.812)	(118.790)	(79.537)
Jumlah beban operasional lainnya	(2.280.382)	(2.424.240)	(3.043.349)
Laba (rugi) Operasional	(6.659.202)	(5.056.768)	(3.090.021)
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	(128.185)	(88.888)	(54.004)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(6.787.387)	(5.145.656)	(3.144.025)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan			
- Kini	-	-	(525)
- Penyesuaian pajak tahun lalu	-	-	-
- Tangguhan	731.684	113.152	842.271
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	731.684	113.152	841.746
Laba (rugi) Tahun Berjalan	(6.055.703)	(5.032.504)	(2.302.279)
Penghasilan Komprehensif Lain:			

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	2021
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	8.640	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	(1.756)	77.837	17.211
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.900)	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.330	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.392)	15.429	(20.542)
Penghasilan komprehensif lain– neto	9.922	43.205	3.135
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	(6.045.781)	(4.989.299)	(2.299.144)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
- Pemilik entitas induk	(6.024.463)	(4.984.356)	(2.279.110)
- Kepentingan non-pengendali	(21.318)	(4.943)	(20.034)
	(6.045.781)	(4.989.299)	(2.299.144)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
- Pemilik entitas induk	(6.024.463)	(4.984.356)	(2.279.110)
- Kepentingan non-pengendali	(21.318)	(4.943)	(20.034)
	(6.045.781)	(4.989.299)	(2.299.144)
Laba per saham			
- Dasar/dilusian (nilai penuh)	(61)	(74)	(34)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(6.034.077)	(5.027.460)	(2.282.245)
Rata-rata tertimbang jumlah saham dasar	98.277.584.070	67.887.540.178	67.887.540.178

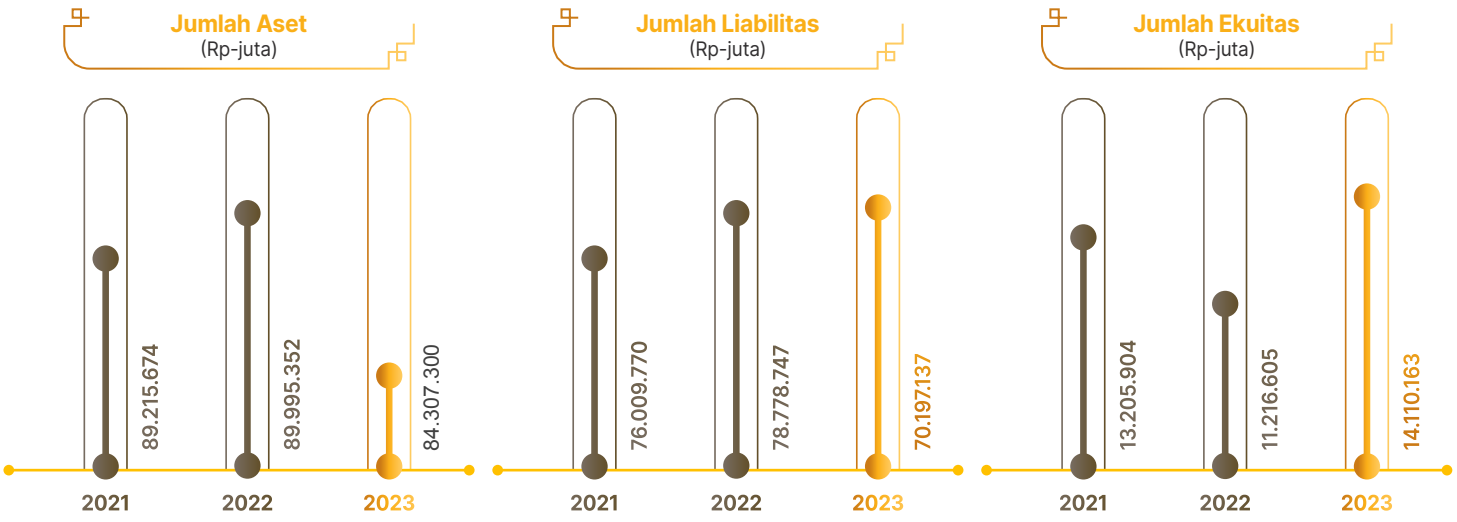
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Kas	289.184	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain	342.881	744.059	1.397.457
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(89)	(370)
Giro pada bank lain – neto	342.581	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	12.180.830	12.441.918
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.133.567	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga			
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	3.362.099	1.512.903
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.067.387	588.835	1.521.457
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.145.932	8.059.020	5.248.704
	17.536.249	12.009.954	8.283.064
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(109)	(76)	(125)
Surat-surat berharga – neto	17.536.140	12.009.878	8.282.939
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.572.152	-	110.400
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	2.572.152	-	110.400
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo)		-	-
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) – neto	-	-	-
Tagihan derivatif	3.040	9.254	9.898
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	49.418.616	50.583.434	58.512.087
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582.834)	(1.626.676)	(4.661.814)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	45.835.782	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	130.964	17.135	5.352
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.646.734	4.686.955	4.808.776
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.413.059)	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.233.675	3.396.202	3.497.330
Aset pajak tangguhan – neto	2.670.543	1.942.151	1.819.232
Aset tak berwujud	635.815	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(350.230)	(283.055)	(282.748)
Aset tak berwujud - neto	285.585	201.994	202.196
Aset lain-lain – neto	6.068.453	5.872.414	4.977.990
Jumlah Aset	**84.307.300**	**89.995.352**	**89.215.674**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas segera	431.402	388.522	289.291

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Simpanan nasabah	44.789.143	51.962.370	55.822.776
Giro	3.177.648	3.577.927	3.314.752
Tabungan	6.873.184	6.955.784	8.796.917
Deposito	34.738.311	41.428.659	43.711.107
Simpanan dari bank lain	7.886.721	10.381.375	9.652.068
Giro dan Tabungan	37.021	112.385	131.805
Deposito berjangka dan Interbank call money	7.849.700	10.268.990	9.520.263
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	219.631	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	808	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	132.577	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima	11.704.492	11.200.131	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	64.635	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.570.140	1.367.530	1.573.323
Jumlah Liabilitas	**70.197.137**	**78.778.747**	**76.009.770**
Ekuitas			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	-	3.000.000	-
Surplus revaluasi aset	1.603.893	1.605.649	1.527.812
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	7.563	2.625	57.330
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	(14.700.914)	(8.673.269)	(3.665.882)
Sub jumlah	**14.136.309**	**11.221.433**	**13.205.688**
Kepentingan non-pengendali	(26.146)	(4.828)	216
Jumlah Ekuitas	**14.110.163**	**11.216.605**	**13.205.904**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**84.307.300**	**89.995.352**	**89.215.674**



RASIO-RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENTING LAINNYA

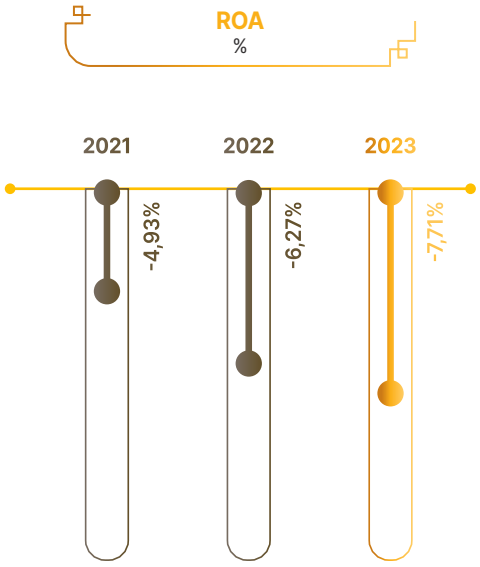
Dalam %

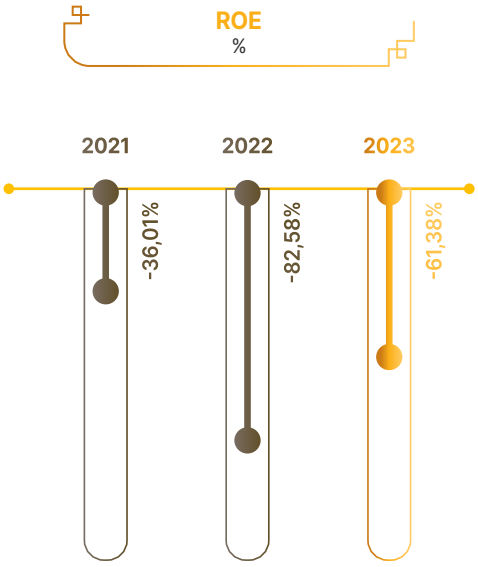
Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Permodalan			
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit	28,50%	20,13%	22,11%
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	28,37%	20,01%	21,79%
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	27,17%	19,19%	20,53%
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	27,05%	19,08%	20,26%
Aset Tetap - neto terhadap Modal inti	38,51%	55,45%	34,64%
Aset Produktif			
Aset produktif dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	6,37%	6,92%	10,79%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	6,27%	4,09%	8,75%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	4,80%	1,93%	6,35%
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan – kotor	9,56%	6,56%	10,66%
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan – neto	4,87%	4,84%	4,91%
Rentabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)	-7,71%	-6,27%	-4,93%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	-61,38%	-82,58%	-36,01%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	0,78%	1,17%	1,00%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	223,24%	226,22%	171,20%
Rasio Laba (Rugi) terhadap pendapatan bunga	-124,56%	-121,89%	-54,59%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	-7,18%	-5,59%	-2,58%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Ekuitas	-42,92%	-44,87%	-17,43%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	83,26%	87,54%	85,20%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	497,49%	702,34%	575,57%
Likuiditas			
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR)	113,18%	98,48%	106,46%
Kepatuhan (Compliance)			
Persentase pelanggaran BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait*	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM):			
GWM Utama Rupiah			
GWM Harian	7,05%	8,53%	3,50%
GWM Rata-rata	7,37%	8,53%	3,52%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h GWM Sekunder	35,08%	13,87%	15,80%
GWM konvensional valuta asing	4,02%	4,02%	4,01%
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,62%	1,59%	0,82%

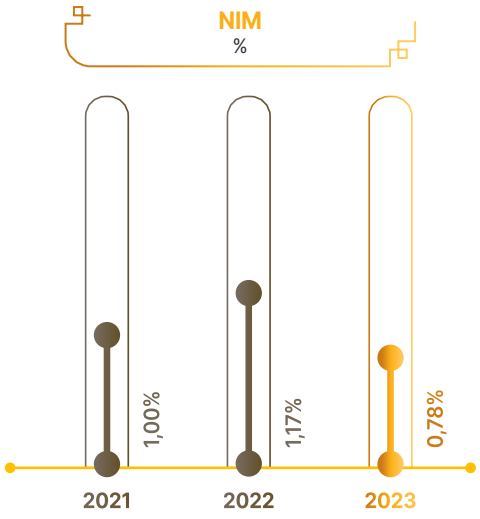
Dalam %

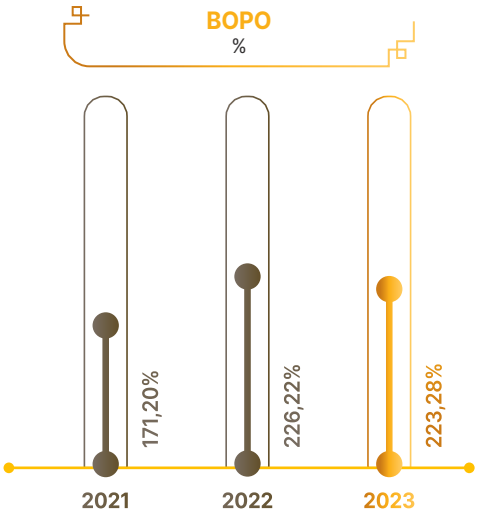
Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pertumbuhan			
Rasio pertumbuhan aset	-6,32%	0,87%	11,61%
Rasio pertumbuhan liabilitas	-10,89%	3,64%	6,35%
Rasio pertumbuhan ekuitas	25,80%	-15,06%	55,98%
Rasio pertumbuhan pendapatan bunga dan Syariah – bersih	-22,93%	26,52%	39,76%
Rasio pertumbuhan pendapatan operasional lainnya	-8,60%	230,44%	-85,33%
Rasio pertumbuhan beban operasional lainnya	-5,93%	-20,34%	8,70%
Rasio pertumbuhan laba operasional	31,69%	63,65%	-21,79%
Rasio pertumbuhan laba bersih	20,33%	118,59%	-29,34%

*)Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak penurunan modal inti yang dialami oleh Bank. Pelampauan BMPK ini telah diselesaikan sesuai Surat Bank No. 04380/DIR/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.









IKHTISAR OPERASIONAL

SEGMEN KREDIT

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
UMKM	15.633	18.397	26.400
Konsumer	12.458	13.474	13.467
Komersial	21.328	18.712	18.645
TOTAL	49.419	50.583	58.512

SEGMEN DANA

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ritel	30.008	37.889	39.439
Komersial	14.781	14.074	16.383
TOTAL	44.789	51.962	55.823

SEGMEN FEEBASED

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

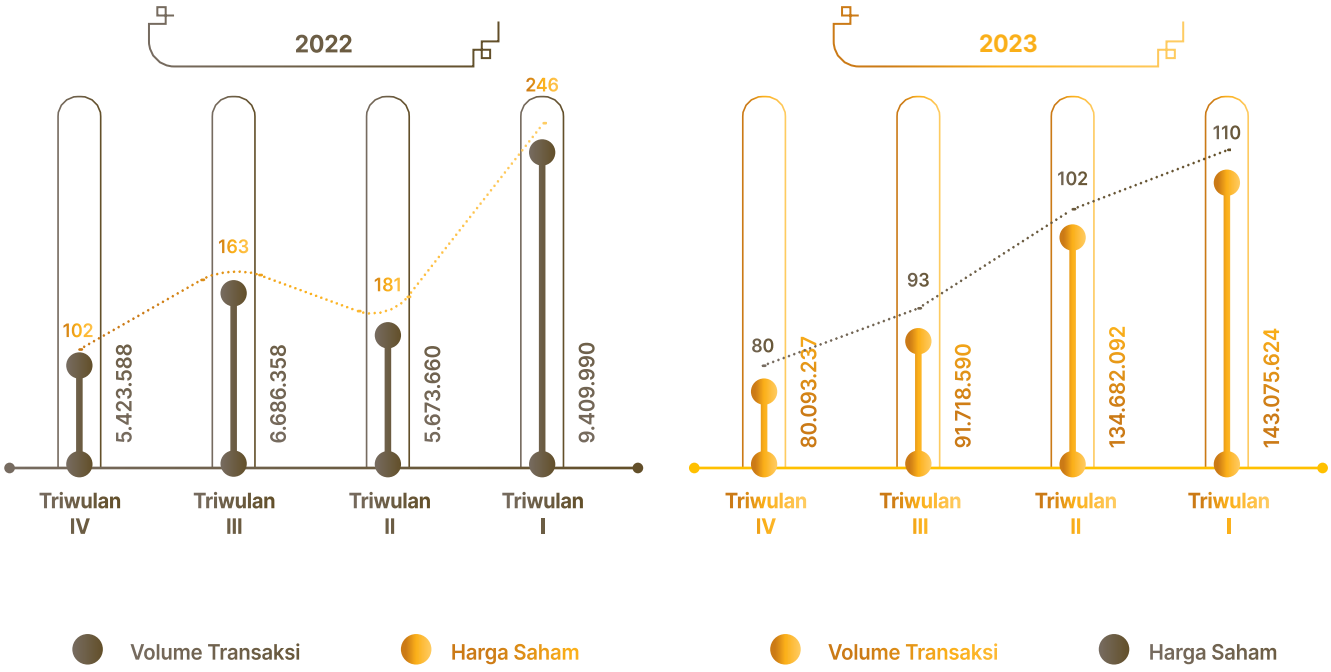
Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Public Service	83	137	147
E-Channel	20	20	24
Kartu kredit & Merchant	38	50	63
Trade Finance	8	7	6
Bank Garansi	8	16	21
Lainnya	280	224	255
TOTAL	436	453	516

IKHTISAR
SAHAM

TRANSAKSI SAHAM KB BANK 2022-2023

2023	Harga per Saham (Rp)			Beredar (dalam Lembar Saham)	Volume Transaksi (dalam Ribuan Unit)	Kapitalisasi Pasar Rata-Rata (Rp Juta)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
Triwulan IV	94	72	80	187.887.539.870	80.093.237	15.415.763
Triwulan III	115	92	93	187.887.539.870	91.718.590	18.910.018
Triwulan II	118	92	102	187.887.539.870	134.682.092	19.001.981
Triwulan I	140	100	110	67.887.540.178	143.075.624	7.899.044

2022	Harga per Saham (Rp)			Beredar (dalam Lembar Saham)	Volume Transaksi (dalam Ribuan Unit)	Kapitalisasi Pasar Rata-Rata (Rp Juta)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
Triwulan IV	167	98	102	67.887.540.178	5.423.588	8.282.280
Triwulan III	216	160	163	67.887.540.178	6.686.358	12.174.499
Triwulan II	248	179	181	67.887.540.178	5.673.660	13.600.137
Triwulan I	302	228	246	67.887.540.178	9.409.990	17.831.794



AKSI KORPORASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERUBAHAN PADA SAHAM

Di tahun 2023, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 02441/DIR/II/2023 tanggal 10 Februari 2023. Bank telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VII sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Akta No. 109/2022), yang pada intinya menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan PUT VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham.

Bank melakukan PUT VII dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Bank atas sebanyak-banyaknya sebesar 119.999.999.692 saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- per saham yang ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). HMETD dibagikan kepada para pemegang saham Bank yang tercatat pada tanggal 17 Mei 2023 dimana setiap pemilik 100.000.000 saham lama Bank memperoleh 176.762.922 HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham. Dengan demikian, Bank memperoleh dana Rp11.999.999.969.200,-.

Setelah PUT VII, jumlah saham yang dicatatkan oleh Bank di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 186.008.664.458 saham atau mewakili 99,00% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Bank sesudah PUT VII dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1,878,875,412 saham atau mewakili 1,00% saham Bank yang tidak dicatatkan. Bank telah memenuhi kewajiban untuk tidak mencatatkan saham di BEI sekurang-kurangnya 1,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Bank sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 29/1999 dan Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum (POJK No. 41/2019).

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Hingga 31 Desember 2023, Bank tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Bank mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak dari penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*), yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.


KB Bank

INFORMASI MENGENAI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI YANG MASIH BEREDAR

RINCIAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN BANK DAN MASIH BEREDAR

Nama Efek	Nama Bursa	Tanggal Terbit	Tenor (bulan)	Mata Uang	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	Bursa Efek Indonesia	28 Februari 2017	84	Rp	
Obligasi Senior Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	Bursa Efek Indonesia	09 September 2021	36	Rp	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	Bursa Efek Indonesia	09 September 2021	60	Rp	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	Bursa Efek Indonesia	09 September 2021	84	Rp	

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Di tahun 2023, Bank tidak menerbitkan *Medium Term Note* (MTN) atau pendanaan berbentuk utang lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya pada Laporan Tahunan ini.

	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Peringkat Efek *Rating*		Wali Amanat	Status sampai dengan 31 Desember 2023
				2023	2022		
	1.405.000	28 Februari 2024	11%	idAA (PEFINDO)	idA- (Pefindo)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Outstanding*
	1.000.000	9 September 2024	6,25%	AAA(idn) (Fitch *Rating*)	idAAA (Fitch *Rating*)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Outstanding*
	315.000	9 September 2026	8%	AA(idn) (Fitch *Rating*)	idAA (Pefindo)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Outstanding*
	685.000	9 September 2028	8,9%	AA(idn) (Fitch *Rating*)	idAA (Pefindo)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Outstanding*

PERISTIWA PENTING

JANUARI 2023



KB Bank Siap Menerapkan New Generation Bank System Seperti Kookmin Bank Korea

KB Bank menyatakan keseriusannya dalam bertransformasi membangun teknologi informasi. Hal ini selaras dengan induk KB *Financial Group Inc* (KBFG) yang terkenal sebagai bank retail dengan sistem robotik dan operasi digitalnya yang kuat. Maka, tanpa harus menjadi bank digital, bank terbesar di Korea Selatan tersebut juga menginginkan KB Bank siap menerapkan *New Generetion Bank System* seperti Kookmin Bank Korea.

JANUARI 2023



Dilengkapi Chip, Fuel Card 3.0 Bukopin Khusus untuk Beli Solar Terjamin Lebih Aman

KB Bank sudah memberlakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Batam menggunakan *Fuel Card* 3.0. Dalam uji coba perdananya di SPBU Bundaran Madani, Batam Center, transaksi menggunakan *Fuel Card* lebih praktis dan cepat.

FEBRUARI 2023



Siap Right Issue, KB Bank Segera Naik Kelas

PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) nyatakan siap gelar penawaran umum terbatas (PUT) VII melalui skema rights issue dengan menerbitkan hingga Rp120 miliar saham baru. PUT merupakan salah satu strategi yang diterapkan Bank untuk raih kinerja lebih baik dari tahun ke tahun, melalui penambahan modal. Hal ini tentu menjadi salah satu hal penting dan strategis dalam mengembangkan bisnis yang akan datang sehingga Bank mampu mengintegrasikan langkah-langkah bisnis ke depannya.

FEBRUARI 2023



Sinarmas Asset Managment Gandeng KB Bank, Perluas Akses Investasi Reksa Dana

PT Bank KB Bukopin mengumumkan kerja sama strategis dengan PT Sinarmas Asset Management (Sinarmas AM). Sinarmas AM merupakan salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa keuangan yang berkualitas dan terpercaya, dalam rangka menghadirkan solusi investasi kepada masyarakat.

MARET 2023



Kolaborasi KB Bank dan UOB AM Hadirkan Reksadana

PT Bank KB Bukopin mengumumkan kerja sama strategis dengan PT Sinarmas Asset Management (Sinarmas AM). Sinarmas AM merupakan salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa keuangan yang berkualitas dan terpercaya, dalam rangka menghadirkan solusi investasi kepada masyarakat.

MARET 2023



Pelopor KUR Sistem Digital, KB Bank Gandeng PT Inti Persero

PT Bank KB Bukopin Tbk ("KB Bank") kembali terwujud melalui kerjasama dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia - Persero ("PT INTI"). Kerjasama dilakukan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat ("KUR") kepada para pelaku UMKM khususnya petani dengan menggunakan media digital (*Marketplace*) melalui platform layanan Blockchain yang merupakan produk asli dalam negeri.

MARET 2023



KB Bank Jalin Kerjasama Dengan PT Inka Multi Solusi

KB Bank terus memperkuat kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak usahanya dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang kian kompleks. KB Bank secara resmi menjalin kerjasama dengan PT INKA Multi Solusi ("PT IMS") untuk proyek pemesanan kereta, pertashop, dan ev bus.

APRIL 2023



KB Bank Berkolaborasi dengan 'Smart Move' Sinarmas Land

KB Bank resmi menjadi salah satu bank yang telah bekerja sama dengan Sinarmas Land dalam memfasilitasi sekaligus mempermudah pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat lewat program '*Smart Move*'.

APRIL 2023



KB Bank Raup Pendapatan Bunga Bersih Rp 1.04 Trilliun pada 2022

KB Bank berhasil membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Rp1,04 triliun pada 2022, tumbuh 26,51% secara tahunan (*year-on-year*/yoy). Berdasarkan laporan keuangan, dikutip Senin (10/4/2023), pertumbuhan pendapatan bunga bersih perseroan didorong oleh adanya penyusutan beban bunga 9,11 persen yoy menjadi Rp3,07 triliun. Dengan begitu, BBKP mencatatkan peningkatan margin bunga bersih (*net interest margin*/NIM) 17 basis poin (bps) menjadi 1,17 persen per 31 Desember 2022.

MEI 2023



Kemitraan KB Bank dan Indika Energy, untuk Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia

KB Bank dan PT Indika Energy berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem *electric vehicles* (EV) di Indonesia. Kolaborasi tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) ini bertujuan untuk mendukung Indonesia mendorong transportasi berkelanjutan dan untuk lebih meningkatkan upaya negara untuk mengurangi jejak karbonnya melalui Pembiayaan ESG.

JUNI 2023



Makin Perkokoh Investasi di Indonesia, KB Kookmin Bank Pertahankan Kepemilikan sebagai Pemegang Saham Pengendali di KB Bank (BBKP)Melalui Right Issue

Investor Asing Beli Mayoritas Saham Baru dalam Rights Issue BBKP Jakarta, 2 Juni 2023 Bank KB Kookmin memperkokoh investasi di Indonesia dengan mempertahankan kepemilikan saham di PT Bank KB Bukopin, Tbk (BBKP) pada kisaran 67% melalui rights issue yang telah terlaksana tuntas pada tanggal 31 Mei 2023. Dalam penggalangan dana senilai Rp11,99 triliun yang digelar KB Bank melalui *rights issue* ini, KB Kookmin menyuntikkan Rp8,02 triliun untuk membeli sekitar Rp80,2 miliar saham baru yang diterbitkan. *Rights issue* ini digelar sesuai ketentuan pasar modal Indonesia, sehingga semua pemegang saham diberi kesempatan yang adil dan setara untuk membeli saham baru yang diterbitkan supaya nilai kepemilikan sahamnya di KB Bank tetap sama alias tidak terdilusi.

JUNI 2023



Gelar RUPST, KB Bank Tunjukkan Pertumbuhan Kinerja yang Solid Sepanjang Tahun 2022

KB Bank sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya. KB Bank berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang tahun 2022 lewat strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses optimalisasi digital.

JULI 2023



Sponsori Konser K-Pop SMTOWN, KB Bank Gelar Presale dan Program Menarik Untuk Nasabah

Jakarta, 24 Juli 2023 - KB Bank dengan bangga mengumumkan secara resmi menjadi sponsor Konser SMTOWN LOVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA' yang akan menampilkan idola K-Pop yang berada di bawah naungan SM *Entertaiment*. Konser yang akan diselenggarakan di stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 September 2023 ini akan menghadirkan TVXQ!, SUPER JUNIOR, Red Velvet, NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa, dan grup pendatang baru. Mereka akan berkumpul di GBK untuk menunjukkan penampilan F istimewa kepada para penggemar di Indonesia.

AGUSTUS 2023



KB Bank Raih 3 Penghargaan GRC & Performance Excellence Awards 2023

KB Bank berhasil menyabet 3 (tiga) penghargaan bergengsi di ajang GRC *and Performance Excellence Award* 2023, sebagai apresiasi atas implementasi Governance, *Risk and Compliance* (GRC) yang telah diterapkan perseroan. Apresiasi tersebut merupakan pengakuan atas komitmen perseroan dalam peningkatan pengawasan proses bisnis maupun operasional, guna menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

SEPTEMBER 2023



KBstar', Mobile Banking yang Serba Bisa Persembahan KB Bank, Ini Kelebihannya!

KB Bank semakin fokus mendorong transformasi digital dengan serangkaian inovasi layanan. Hal ini merupakan wujud konsistensi KB Bank untuk terus menyediakan layanan terbaik bagi nasabah. Untuk itu, sebagai bagian dari inovasi layanan b KB Bank meluncurkan *Mobile Banking* 'KBstar' untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital nasabah.

SEPTEMBER 2023



Rayakan Hari Pelanggan Nasional, KB Bank Berikan Tiket Konser SMTOWN LIVE 2023 Kepada Nasabah

Jakarta, 4 September 2023 - Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (HPN), KB Bank memberikan apresiasi dengan memberikan tiket Konser SMTOWN. SMTOWN LIVE 2023 tanpa diundi kepada seluruh nasabah yang sudah mengikuti program *Lucky Draw*. Momentum HPN menjadi waktu yang tepat bagi perseroan untuk berbagi kebahagiaan kepada nasabah loyal KB Bank untuk bersama-sama menyaksikan konser 'SMTOWN LIVE 2023 SMCU 2023 SMCU PALACE @JAKARTA with KB Bank.

OKTOBER 2023



Komitmen Terapkan ESG, KB Bank Salurkan Kredit Hijau Rp 309 Miliar ke Anak Usaha Indika Energy

Jakarta, 2 Oktober 2023 – KB Bank terus mewujudkan komitmennya dalam penerapan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan pilar *Environment, Social*, dan *Governance* (ESG). Hal ini dilakukan perseroan dengan memacu laju portofolio hijau yang bergerak pada sektor energi terbarukan, produk eko-efisien, serta transportasi ramah lingkungan atau *Electric Vehicle* (EV). Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyaluran Kredit Hijau Rp309 Miliar ke Anak Usaha Indika *Energy*.

OKTOBER 2023



Sukses Mengesankan! Bank KB Bukopin Salurkan Pembiayaan Pre-Order Mobil Hyundai Melebihi Rp2,9 Triliun

Jakarta – 11 Oktober 2023, KB Bank umumkan telah berhasil melewati target dengan menyalurkan pembiayaan *pre-order* (PO) kendaraan Hyundai dengan total lebih dari Rp2,9 triliun selama periode Januari - September 2023. Jumlah mobil yang telah didanai mencapai 5.400 unit, menandakan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp377 miliar dan jumlah mobil 1.124 unit.

NOVEMBER 2023



KB Bank Salurkan Kredit Sindikasi Rp 2.5 Triliun untuk Pembuatan 612 Kereta PT INKA

Jakarta, 6 November 2023 – KB Bank berkomitmen untuk terus mendukung sektor transportasi, sub-sektor produksi sarana perkeretaapian, melalui pembiayaan dengan skema sindikasi. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, KB Bank bersama 4 (empat) bank lainnya memberikan fasilitas kredit Rp 2,5 triliun kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA (Persero) untuk modal kerja pengadaan 612 Unit Kereta *New Generation* untuk Program Replacement Tahun 2023-2026.

NOVEMBER 2023



KB Bank Alihkan Seluruh Layanan Digital Banking ke Aplikasi KBstar pada 30 November 2023

Jakarta, 14 November 2023 - KB Bank akan mengalihkan seluruh layanan *digital banking* dan SMS banking ke aplikasi digital banking KBstar pada 30 November 2023. Dengan demikian, pada akhir November 2023, KB Bank *Mobile Banking*, Wokee dan SMS Banking akan dinonaktifkan. Nasabah tetap dapat berinteraksi melalui KB Bank kapan pun dan dimana pun melalui aplikasi KBstar yang dapat diunduh di *Google Play Store* maupun *App Store*.

DESEMBER 2023



Peduli Pendidikan di Indonesia, KB Bank Dukung Penuh Pembangunan Perpustakaan Multikultural di Bekasi

Jakarta, 7 Desember 2023 – KB Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui kegiatan usaha dan layanan perbankan, tetapi juga melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun CSR yang dilakukan perseroan berfokus pada bidang prioritas yaitu pendidikan, sosial, dan lingkungan yang mengacu pada *Sustainable Development Goals*.

DESEMBER 2023



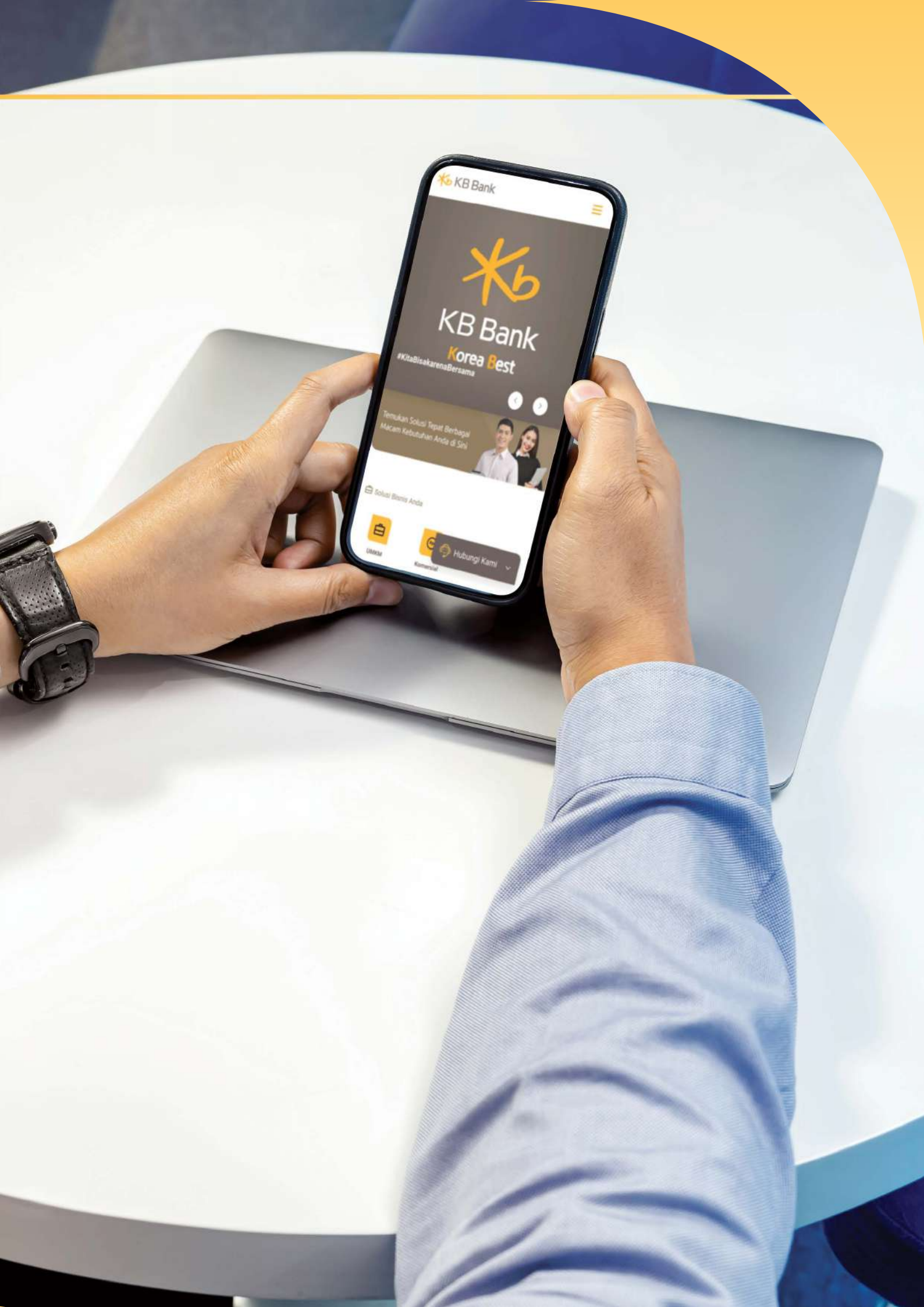
Gelar Paparan Publik, KB Bank Optimistis Raih PPOP Positif di Tahun 2024

Jakarta, 27 Desember 2023 – KB Bank gelar Paparan Publik Tahun 2023 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 dengan menggunakan mekanisme Virtual Webinar. Adapun materi yang disampaikan yaitu langkah strategis Perseroan di tahun 2024, transformasi digital, dan kinerja di tahun 2023 termasuk perkembangan menuju *turnaround*.



2

Laporan Manajemen


KB Bank
KB Bank
Korea Best
#KitaBisakarenaBersama
Temukan Solusi Tepat Berbagai Macam Kebutuhan Anda di Sini
Solusi Bisnis Anda
UMKM
Komersial
Hubungi Kami



Komisaris Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk.

Jerry Marmen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,,

Dalam kesempatan ini, ijinkan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan-Nya kepada kita semua sehingga PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) dapat mengarungi tahun 2023 dengan capaian optimal kendati dihadapkan dengan berbagai tantangan. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Bank untuk membuktikan kemampuannya dalam rangka mewujudkan visinya "Menjadi Lembaga Keuangan Pilihan Utama di Indonesia".

PERSPEKTIF MAKRO EKONOMI

Seperti dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merilis bahwa Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Januari 2024 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Indikator perekonomian menunjukkan moderasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di negara Uni Eropa dan Tiongkok. Perlambatan pertumbuhan ekonomi mendorong inflasi turun mendekati target inflasi sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif. Di AS, The Fed mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar *75 bps* di 2024 dengan pasar menilai ekonomi AS masih cukup *resilient* dan diperkirakan tidak akan mengalami resesi.

Namun demikian, pasar masih mencermati perkembangan geopolitik ke depan, seperti eskalasi ketegangan di laut merah imbas dari konflik Palestina-Israel, serta penyelenggaraan pemilihan umum yang mencakup 50 persen populasi dunia terutama di beberapa negara utama seperti AS, Uni Eropa, India, dan Taiwan.

Di sisi lain, seperti dikutip dari Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan dalam kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah pada akhir tahun dan percepatan penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bank Indonesia juga menyatakan inflasi menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoy) menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,51% (yoy) sehingga berada dalam kisaran 3,0±1%. Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* serta sinergi erat kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sementara itu, Bank Indonesia juga menyatakan bahwa kredit perbankan pada 2023 tetap baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada 2023 mencapai 10,38% (yoy), berada dalam kisaran atas prakiraan Bank Indonesia 9-11%. Dari sisi permintaan, peningkatan kredit tersebut sejalan dengan kinerja positif korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didorong oleh *risk appetite* perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang terjaga baik, termasuk dampak positif dari kebijakan likuiditas Bank Indonesia seperti Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

FUNGSI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Dewan Komisaris yaitu untuk memperkuat fungsi pengawasan bagi pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi Bank.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dilakukan dalam hubungan kerja yang saling menghormati. Sepanjang 2023 telah dilakukan 10 (sepuluh) kali rapat dengan Direksi mendiskusikan berbagai hal sehubungan dengan bisnis operasional Bank. Dalam rapat tersebut ada kalanya melibatkan pejabat Bank yang terkait dengan materi rapat. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan langsung secara berkala demi memastikan kecukupan pengawasan serta meninjau kesesuaian proses dan hasil kerja dengan kualifikasi yang ditetapkan. Tidak hanya dalam forum rapat, fungsi pengawasan juga dilakukan dengan komunikasi dengan Direksi yang terbuka dan dari waktu ke waktu mengingat bisnis Bank yang sangat dinamis.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Bank. Iklim usaha yang begitu dinamis di sepanjang tahun 2023 merupakan tantangan tersendiri bagi KB Bank, namun Dewan Komisaris cukup mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil oleh Direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi mampu

menghadirkan kinerja yang baik sesuai anggaran dasar Bank dan tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global dan fundamental Bank yang belum normal, maka Bank perlu bertindak secara aktif dengan memastikan semua strategi dan program dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai target untuk mengantisipasi krisis yang akan datang. Saat ini, KB Bank memiliki kekurangan infrastruktur dasar dan *manpower* untuk menerapkan strategi baru. Menindaklanjuti hal tersebut, Bank memerlukan '*Deep Change*' untuk memulihkan dan memperbaharui Fundamental yang seharusnya dimiliki perbankan. *Deep Change* akan membuka jalan bagi visi PT Bank KB Bukopin Tbk untuk menjadi Top 10 bank di Indonesia.

Untuk mencapai target tahun 2023, telah ditetapkan langkah-langkah strategis yang dibagi dalam 13 (tiga belas) strategi agenda dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Adapun tajuk strategik agenda tahun 2023 adalah "BISA" cerminan motivasi insan PT Bank KB Bukopin Tbk untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan dengan tujuan meraih kemenangan bersama melalui 4 pilar yaitu *Boost Sales Performance*, *Innovation for Turnaround*, *Strengthening the quality of Assets*, *and Advanced IT & Digital*.

Pada Rencana Bisnis Bank tahun 2023, Bank fokus membangun *brand image* untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat yang sempat menurun akibat isu negatif di tahun 2020 serta memberikan keyakinan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk dapat kembali menjadi mitra bisnis masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi domestik, Bank juga akan mengoptimalkan jaringan internasional yang dimiliki KB Kookmin melalui Korean Desk untuk menjaring perusahaan-perusahaan Korea yang akan berinvestasi di Indonesia.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas Bank serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di tengah kondisi yang penuh tantangan di tahun 2023. Parameter penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan meninjau dan mempertimbangkan pencapaian yang telah diraih pada akhir tahun. Efisiensi dan optimalisasi anggaran telah berjalan dengan baik. Di sisi lain, Dewan Komisaris senantiasa mengajak untuk tetap berinovasi dan bangkit menghadapi tantangan. Dewan Komisaris senantiasa mengevaluasi apakah kebijakan strategis yang diambil oleh direksi dapat mendukung pencapaian kinerja keuangan bank di tengah-tengah tantangan eksternal yang ada.

Dewan Komisaris memberikan apresiasinya terhadap kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah diperlihatkan Direksi di sepanjang tahun 2023, serta mengapresiasi upaya Direksi dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian usaha telah sesuai dengan target rencana bisnis Bank dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat pada tahun 2023 Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan Perseroan dengan baik.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Seperti dikutip dari laporan yang dirilis Bank Indonesia, inflasi tahun 2024 diprakirakan berada dalam rentang sasaran 2,5+1%. Prakiraan ini utamanya didorong oleh permintaan domestik yang diprakirakan akan terus membaik secara gradual, dampak harga global ke domestik yang terbatas, serta ekspektasi inflasi dan nilai tukar yang terjaga.

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2024 masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama iklim ketidakpastian iklim ekonomi. Untuk itu, Dewan Komisaris memberikan arahan strategis melalui rencana bisnis Bank yang memuat rancangan umum hal-hal yang akan dicapai KB Bank secara bertahap, termasuk diantaranya adalah target pendapatan usaha, proses operasional yang efisien, serta kualitas SDM yang unggul. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan secara berkala supaya bisa menilai pencapaian manajemen dalam mengantisipasi prospek usaha di masa mendatang.

Dewan Komisaris telah mengkaji Rencana Bisnis Bank 2024 yang telah disusun Direksi dan berpendapat bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah realistis, dengan target yang mendorong pertumbuhan bisnis Bank dengan rencana strategis yang tepat untuk pencapaian target tersebut. Dewan Komisaris mengingatkan kembali bahwa salah satu kunci pencapaian rencana bisnis tersebut adalah sinergi dan tekad dari segenap insan Bank untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus menjalankan tata kelola Bank yang baik dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris berharap agar segenap Insan Bank senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi usaha berkelanjutan. Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana bisnis Bank, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan KB Bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG

Dewan Komisaris meyakini bahwa kunci utama untuk mempertahankan keberlangsungan pertumbuhan Bank tidak hanya pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah, tetapi juga pada penerapan pengelolaan kinerja yang efektif dan menerapkan prinsip dasar GCG, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam menghadapi kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, KB Bank mengakui pentingnya optimalisasi peran serta dari pengurus dan karyawan dalam mengungkapkan pelanggaran. Sebagai bagian dari strategi Anti Fraud dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), KB Bank mengembangkan *Whistleblowing System* (WBS) untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris turut terlibat dalam pengawasan implementasi pelaporan *fraud* yang telah berjalan, meliputi prosedur pencegahan, deteksi dan identifikasi, investigasi dan pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan WBS melalui rapat internal maupun gabungan antar Dewan Komisaris, Direksi maupun komite di bawah supervisi Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anti Fraud & Special Investigation Department dan setiap Unit Kerja Terkait senantiasa melakukan sosialisasi tentang Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System* dalam setiap kesempatan sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai langkah pencegahan, Anti Fraud & Special Investigation Department secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan KB Bank. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi kejahatan finansial. Melalui pendekatan ini, KB Bank berupaya untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengidentifikasi dan mencegah potensi *fraud* dalam lingkungan kerja.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris KB Bukopin dibantu oleh Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Semua komite di tingkat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di tingkat Dewan Komisaris KB Bank mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan *best practices* yang ditinjau ulang secara berkala.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan meningkatkan peran aktif untuk memastikan adanya tindak perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Sementara itu, Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas proses manajemen risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada Bank. Hingga saat ini Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Di sisi lain, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan dibentuk dengan tujuan utama untuk mendukung Dewan Komisaris dalam mengevaluasi implementasi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan. Salah satu fokus utamanya adalah menilai kecukupan pengendalian internal serta pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi di seluruh lapisan perusahaan.

Komite ini bertugas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Perseroan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa proses pengendalian internal telah dijalankan dengan efektif. Selain itu, Komite ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi kepatuhan diintegrasikan secara efisien dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Dengan pendekatan ini, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan berperan penting dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan standar yang berlaku, serta memastikan bahwa sistem pengendalian internal beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Ini membantu meminimalkan risiko-risiko terkait kepatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi perusahaan secara keseluruhan.

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif yang dilihat dari penilaian pencapaian kinerja masing-masing komite. Informasi penilaian pencapaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2023, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Jerry Marmen	Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Nanang Supriyatno	Komisaris	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Sukriansyah Latief	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 22 Desember 2020	2020-RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi di bidangnya masing-masing yang memadai serta mampu menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

PENUTUP

Melihat perkembangan kondisi makro ekonomi serta pertumbuhan iklim usaha di Indonesia, Dewan Komisaris memiliki optimisme bahwa KB Bank akan mampu mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun mendatang. Atas seluruh capaian KB Bank selama tahun 2023, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, nasabah, mitra bisnis, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam mendukung kelangsungan usaha KB Bank.

Jakarta, 31 Mei 2024



Jerry Marmen
Komisaris Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk.


KB Bank



Direktur Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk.

Woo Yeul Lee

LAPORAN DIREKSI

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas nama Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank), perkenankan saya menyampaikan Laporan Tahunan KB Bank tahun buku 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap Para Pemegang Saham. Perlu kami sampaikan bahwa Bank terus mengoptimalkan kinerjanya dalam meraih hasil yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Capaian Bank di tahun 2023, seperti yang tertuang dalam laporan tahunan ini, merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Bank secara berkelanjutan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Manajemen KB Bank untuk menyampaikan pengelolaan Bank di tahun buku 2023.

ANALISA MAKROEKONOMI

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan dan peluang dalam dinamika ekonomi global dan nasional. Pada skala global, beberapa negara, terutama Uni Eropa dan Tiongkok, mengalami moderasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong adopsi kebijakan moneter yang lebih akomodatif untuk mengatasi perubahan ini. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak secara global. Amerika Serikat (AS) masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19, dan Eropa kondisi ekonominya masih melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Di sisi, lain prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah seperti yang disampaikan oleh lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Di tengah disrupsi lingkungan global di sepanjang 2023, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia relatif tangguh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.

Meskipun terdapat tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan moneter di beberapa negara, pasar keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang positif. Penurunan volatilitas di pasar saham, surat utang, dan nilai tukar mencerminkan stabilitas yang semakin kuat. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang solid untuk tahun 2023, Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan global, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dunia.

TINJAUAN MAKRO INDUSTRI

Seperti dikutip dari Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV yang dirilis Bank Indonesia, menyatakan bahwa kredit perbankan pada 2023 tetap baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada 2023 mencapai 10,38% (yoy), berada dalam kisaran atas prakiraan Bank Indonesia 9-11%. Dari sisi permintaan, peningkatan kredit tersebut sejalan dengan kinerja positif korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didorong oleh *risk appetite* perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang terjaga baik, termasuk dampak positif dari kebijakan likuiditas Bank Indonesia seperti KLM dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja, masing-masing sebesar 12,26% dan 10,05%.

Bank Indonesia juga menyatakan bahwa ketahanan perbankan tetap kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% pada November 2023. Likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Desember 2023 yang terjaga tinggi pada 28,73%. Terjaganya likuiditas perbankan sejalan dengan masih tingginya penempatan perbankan pada surat berharga yang tergolong likuid dan implementasi KLM. Kapasitas likuiditas perbankan (*lending capacity*) juga didukung oleh penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market* melalui antara lain perdagangan SRBI di pasar sekunder, yang memberikan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas. Sementara itu, rasio kredit bermasalah perbankan (*Non-Performing Loan*/NPL) tercatat rendah, sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto).

Di sisi lain, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada tahun 2023, nilai transaksi *digital banking* tercatat Rp58.478,24 triliun atau tumbuh sebesar 13,48% (yoy) dan diproyeksikan meningkat 9,11% (yoy) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada tahun 2024. Sementara nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 43,45% (yoy) sehingga mencapai Rp835,84 triliun dan diproyeksikan meningkat 25,77% (yoy) hingga mencapai Rp1.051,24 triliun pada tahun 2024. Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 130,01% (yoy) dan mencapai Rp229,96 triliun, dengan jumlah pengguna 45,78 juta dan jumlah *merchant* 30,41 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp8.178,69 triliun atau turun sebesar 0,81% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2023 meningkat 7,33% (yoy) sehingga menjadi Rp1.101,75 triliun.

PERANAN DIREKSI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN STRATEGIS BANK

Dalam menjalani perannya sebagai pengurus Bank, Direksi beserta jajaran senantiasa melakukan mitigasi usaha dan menerapkan kebijakan-kebijakan strategis demi hasil yang optimal. Dalam menghadapi ketidak pastian kondisi iklim usaha di sepanjang tahun 2023, Bank telah menetapkan kebijakan dan rencana strategis untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan strategis merupakan fungsi kunci yang membantu menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan tujuan yang sama yang telah ditetapkan maka sebagai panduan dalam membuat kebijakan dan aturan serta arah dan tujuan Bank kedepannya untuk kepentingan Perusahaan maupun karyawan.

Bank memiliki visi menjadi "Lembaga Keuangan Pilihan Utama di Indonesia", untuk mencapai visi tersebut KB Bank sebagai pemegang saham pengendali mendukung transformasi Bank untuk mencapai aspirasi tersebut. Dukungan tidak hanya dalam aspek finansial namun juga dari sisi bisnis, IT dan aspek lainnya. Bank memahami untuk mencapai visi tersebut perlu dibangun pondasi yang kuat dengan komitmen perubahan dari semua insan di KB Bank.

Direksi bersama segenap insan Bank telah membuat *guideline* untuk mencapai target dari rencana strategi yang telah ditetapkan, oleh karena itu Bank telah menentukan langkah-langkah strategis yang terbagi dalam tigabelas (13) agenda strategis sebagai fondasi utama dalam mencapai aspirasi Bank dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Adapun tajuk stratejik agenda tahun 2023 adalah "BISA" yang bermakna Bank ingin mencapai kemajuan bersama melalui perubahan mendasar dengan 4 pilar utama yaitu *Boost Sales Performance, Innovation for Turnaround, Strengthening the Quality of Assets, Advanced IT* dan *Digital*.

Fase transformasi Bank yang diagendakan terus berlanjut mengikuti dinamika perkembangan bisnis yang ada, dimana Bank membagi dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan proyeksi waktu. Fase pertama (2022-2023) yaitu membangun kembali dasar bisnis melalui pertumbuhan aset yang berkualitas, Fase kedua (2024-2025) Bank diharapkan berada pada tahap yang lebih stabil untuk fokus pada segmen bisnis utama yaitu ritel dan UMKM, serta fase ketiga (2026-dst) Bank diharapkan sudah berada dalam tahap yang siap sepenuhnya menjadi institusi keuangan pilihan di Indonesia. Bank akan fokus membangun brand image dan memberikan keyakinan keyakinan bahwa KB Bank dapat kembali menjadi mitra bisnis masyarakat Indonesia. Tidak hanya berfokus pada jaringan domestik, Bank juga akan mengoptimalkan jaringan internasional yang dimiliki KB Kookmin melalui Korean Desk untuk menjaring perusahaan-perusahaan korea yang akan berinvestasi di Indonesia untuk menjadikan KB Bank sebagai mitra dalam menyediakan kebutuhan layanan keuangannya.

TANTANGAN DAN SOLUSI PENANGANAN KENDALA

Di tahun 2023, Bank masih dihadapkan dengan perlambatan ekonomi global, ketegangan geo politik dan inflasi yang berdampak pada ekonomi, pertumbuhan bisnis, dan penetrasi pasar. Selain itu tren kenaikan suku bunga terus berlanjut yang akan berdampak pada meningkatnya beban pendanaan, menekan margin serta meningkatkan risiko kredit. Berakhirnya relaksasi Covid-19 pada tahun 2024, memunculkan kekhawatiran akan bertambahnya *bad loan*. Bank telah mulai melakukan tindakan preventif dan persiapan untuk menghadapi hal tersebut dengan mengelola debitur restrukturisasi dan debitur yang perlu dipercepat proses lelang agunannya dengan tetap mempertimbangkan rasio pengembalian yang baik dengan tetap memperhatikan dampak negatif pada permodalan.

Bank berfokus pada pertumbuhan kredit baru yang berkualitas dengan membangun kerjasama dengan mitra-mitra strategis Perseroan seperti *personal loan, mortgage, auto loan*, dan perusahaan besar lainnya, diantaranya dengan PT Inka Persero melalui skema pembiayaan sindikasi, dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) untuk pemasaran dan penyaluran KPR, dan beberapa perusahaan lainnya.

Partnership dengan mitra strategis Bank juga dilakukan untuk memperkuat sinergi One KBFG di industri keuangan diantaranya melalui kerjasama di bidang sekuritas pasar modal dengan KB Valbury, pembiayaan kendaraan bermotor dengan Sunindo Kookmin Best Finance, layanan multifinance dan Co-Location dengan KB Finansia Multi Finance dimana kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan keuangan yang lengkap untuk nasabah. Melalui berbagai kerja sama dengan perusahaan afiliasi KBFG diharapkan dapat mendorong KB Bank untuk memberikan layanan yang terintegrasi kedepan dengan *one stop financial service*.

Selain itu Bank terus memperkuat permodalan aksi korporasi pada Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII pada triwulan kedua 2023 dengan perolehan dana sebesar Rp11,99 triliun. Dengan membaiknya dan menguatnya posisi permodalan tentunya akan mempermudah Bank dalam menopang aktivitas usaha dan ekspansi bisnis bank ke berbagai sektor baru untuk menciptakan peluang bisnis yang baru *profitable* dan sehat yang dapat mendukung pertumbuhan Bank berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya *net interest income Bank*.

KINERJA TAHUN 2023 DAN PERBANDINGANNYA TERHADAP TARGET

Sepanjang tahun 2023, Bank melakukan penyesuaian terhadap target Bank sebanyak 2 (dua) kali yakni pada periode bulan Maret dan Juni 2023. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi internal, kondisi makro, dan proyeksi pasar ke depan sehingga Bank melakukan penyesuaian pertumbuhan bisnis dimana aspek kualitas kredit menjadi faktor dominan yang berdampak pada semua aspek keuangan di tahun 2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2023, Bank merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Kredit
   Pada tahun 2023, *New Loan net* tumbuh dari Rp 6.313 milliar di tahun 2022 menjadi Rp 6.691 milliar di tahun 2023. Selain itu Bank terus memperbaiki kualitas kreditnya yang ditunjukkan dengan menurunnya LAR dari 49,9% di tahun 2022 menjadi 39,77% ditahun 2023.
2. *Other Operating Income*
   Selama tahun 2023, Jumlah pendapatan operasional lainnya meningkat dari Rp279 milliar di tahun 2022 menjadi Rp583 milliar di 2023. Kenaikan pendapatan operasional lainnya didorong oleh tumbuhnya *fee based income* bank.
3. PPOP
   Selama tahun 2023, kinerja PPOP (*Pre Provision Operating Profit*) atau Laba Operasional sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sudah membaik dimana di tahun 2023 sebesar negatif Rp791 miliar, namun sudah lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar negatif Rp1.047 milar. Perbaikan PPOP tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan bunga bersih seiring dengan penyaluran kredit baru – net yang mencapai Rp6,7 triliun. Upaya perbaikan PPOP juga didukung oleh penurunan Biaya *Overhead* yang bersumber dari pelaksanaan inisiatif *cost hunt* dan restrukturisasi cabang.
4. Efisiensi Biaya
   Di tahun 2023, Bank melanjutkan inisiatif *cost reduction* melalui efisiensi pada biaya overhead. Peningkatan biaya overhead selaras dengan strategi pertumbuhan dan penghematan biaya. Keberhasilan bank dalam efisiensi tercermin pada biaya terkendali dengan tetap terjaga di kisaran CAGR 2% sejak tahun 2022. Biaya terkait *channel* menurun setelah tahun 2023 selaras dengan strategi optimalisasi *channel* dan pertumbuhan aset.

GAMBARAN TENTANG PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diprakirakan sebesar 2,0% dan meningkat menjadi 3.5% pada 2024. Inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan moneter. Perkembangan tersebut mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate (FFR) AS, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin tinggi, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia. Tren peningkatan kebijakan suku bunga di berbagai negara yang masih belum usai, namun demikian Fed rate diproyeksikan menurun dalam 1 tahun kedepan dan sejalan dengan hal tersebut proyeksi suku bunga acuan (BI7DRR) juga diproyeksikan menurun. Pemerintah terus berupaya dalam elaborasi ketentuan dan kebijakan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun Pemilihan Umum (Pemilu), seperti periode sebelumnya diproyeksikan bahwa Pemilu akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor utamanya pada UMKM dan Konsumsi. Proyeksi perekonomian nasional yang cukup positif ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pertumbuhan industri perbankan nasional.

Untuk mencapai sasaran keuangan di tahun 2024, Bank berkomitmen untuk terus melakukan perubahaan yaitu salah satunya adalah dengan fokus pada *loan portfolio improvement* dan *deposit portfolio advancement* sebagai upaya Bank dalam meningkatkan kinerja di semua lini, sehingga diharapkan mampu memperbaiki PPOP yang diproyeksikan akan *turn around* di tahun 2024 dan dapat membukukan *profit* di tahun 2025. Adapun upaya *loan portfolio improvement* dan *deposit portfolio advancement* akan dilakukan melalui:

1. Bank akan melakukan langkah-langkah penyelesaian *bad loan* melalui penurunan LAR dan memperkuat fungsi manajemen DPD dengan menargetkan penurunan LAR di 2024 dibawah 25%. Bank akan memaksimalkan nilai *recovery* dari *bad loan* dan meminimalisir biaya kredit melalui pengoptimalan *collection* dan manajemen DPD serta melalui penjualan secara *bulk* di 2024. Untuk menekan *NPL gross* di 2024 dibawah 10%, Bank akan mengelola debitur restrukturisasi dan debitur yang perlu dipercepat proses lelang agunannya dengan tetap mempertimbangkan rasio pengembalian yang baik. Selain itu Bank akan menjaga CAR di angka 18%-19%.
2. Pada aspek pertumbuhan bisnis, Bank menargetkan pertumbuhan kredit baru di tahun 2024 mencapai Rp 8,5 triliun. Segmen *wholesale* masih menjadi *size driver* dengan komposisi alokasi kredit baru sebesar 44%, diikuti segmen retail sebesar 33% dan segmen MSME 23%. Bank akan memperdalam bisnis *wholesale* dan *anchor-linked SME & Retail* serta akan mengeksplor segmen bisnis baru.

Bank akan mendorong pertumbuhan kredit baru melalui produk-produk baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, program stimulus untuk penjualan, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis, membangun ekosistem digital untuk menarik lebih banyak nasabah dan *asset liability management* yang kompetitif. Pada aspek dana pihak ketiga, di tahun 2024 dana pihak ketiga akan tumbuh dengan target LDR dijaga di 100% sehingga meminimalisir *excess fund*. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan CASA dengan rasio target diatas 25% dengan membangun *customer base* yang kuat, sehingga dapat menurunkan *cost of fund*.

3. Bank akan melanjutkan inisiatif *cost reduction* melalui efisiensi pada biaya *overhead*. Peningkatan biaya *overhead* selaras dengan strategi pertumbuhan dan penghematan biaya.

Rasio keuangan terutama dari sisi kualitas kredit akan menunjukkan perbaikan seiring dengan rencana Bank untuk menyelesaikan *bad loan* melalui *bulk sale,* perbaikan struktur dana pihak ketiga melalui peningkatan CASA untuk memperkuat likuiditas, dan upaya *cost reduction* melalui efisiensi pada biaya overhead. Selain itu, diharapkan perbaikan kualitas kredit meningkat yang diimbangi dengan pertumbuhan kredit yang sehat sehingga secara signifikan dapat memperbaiki tingkat profitabilitas yang dicerminkan oleh rasio NIM agar Bank dapat bertumbuh secara berkelanjutan kedepannya.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank meyakini bahwa kunci utama untuk mempertahankan keberlangsungan pertumbuhan bank tidak hanya pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah, tetapi juga pada penerapan pengelolaan kinerja yang efektif dan menerapkan prinsip dasar GCG. Penerapan prinsip dasar GCG dituangkan dalam nilai-nilai budaya Bank yang disebut ICCAN yaitu *Integrity, Competent, Care, Accountable, Never Give Up* yang menjadi panduan bagi manajemen dan karyawan dalam bekerja dan berperilaku. Budaya perusahaan tersebut diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai dengan norma. Dengan pendekatan tersebut selain tertuang dalam kebijakan dan prosedur juga menjadi suatu disiplin (soft skills) yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Bank mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:

1. *Governance Structure*, bertujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
2. *Governance Process* bertujuan agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan output yang memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas.

Langkah-langkah ini menggarisbawahi tekad Bank KB Bank untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dan setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip etika, integritas, dan kepatuhan hukum, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2023, berdasarkan temuan dan hasil analisis *self assessment*, penerapan good *corporate governance* di KB Bank secara umum adalah "BAIK", sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *good corporate governance* secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Dengan demikian, peringkat GCG KB Bank adalah Peringkat 2 (dua).

PENILAIAN TERHADAP KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan fungsi kepengurusannya, Direksi Bank dibantu oleh 5 (lima) komite, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pengarah Teknologi, Komite Restrukturisasi Kredit, dan Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah. Pada tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite yang dibentuk telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kinerja komite-komite dalam mencapai tujuan mereka, serta efektivitas proses kerja dan kontribusinya terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komite-komite ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis yang strategis.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 31 Januari 2023, yang memberhentikan dengan hormat Jim Bum Kim selaku Direktur Bank, dan mengangkat Jung Ho Han sebagai Direktur Bank yang baru. Adapun komposisi dan susunan Direksi yang menjabat per 31 Desember 2023, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa 25 Mei 2022	2022-RUPS Tahun Buku 2024
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2022-RUPS Tahun Buku 2023
Helmi Fahrudin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahun Buku 2024
Dodi Widjajanto	Direktur	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2020-RUPS Tahun Buku 2024
Seng Hyup Shin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2021-RUPS Tahun Buku 2024
Yohanes Suhardi	Direktur	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2021-RUPS Tahun Buku 2023
Young Eun Moon	Direktur	RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2022	2022-RUPS Tahun Buku 2024
Henry Sawali	Direktur	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahun Buku 2023
Jung Ho Han	Direktur	RUPS Luar Biasa 31 Januari 2023	2023-RUPS Tahun Buku 2025

STRUKTUR ORGANISASI BANK DI 2023

Di tahun 2023, Bank melakukan penyesuaian struktur organisasi untuk penajaman fungsi dalam upaya mendukung strategi bisnis yaitu peningkatan dana, kredit yang berkualitas dan peningkatan *feebased income* serta digitalisasi pada proses bisnis Bank. Dalam penyelarasan tersebut, Bank juga berkomitmen untuk melakukan peninjauan atas produktivitas karyawan Bank. Dengan demikian diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pertumbuhan bisnis yang diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan serta penguatan fungsi pengendalian internal, sehingga bisnis kedepan diharapkan dapat bertumbuh dengan kualitas dan *performance* yang baik.

AKTIVITAS UTAMA BANK DI 2023

Di tahun 2023 Bank memprioritaskan untuk *restore* dan *recovery* fungsi dan fundamental Bank sehingga Bank dapat menyamai Bank lainnya dan mengimplementasikan strategi-strategi baru. Selain itu, komitmen dari seluruh lapisan karyawan untuk bertumbuh serta perbaikan yang berkelanjutan baik dari sistem, prosedur, tata kelola perusahaan sangat diperlukan pada fase ini. Perbaikan kualitas aset yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja bisnis Bank pada periode-periode sebelumnya. Penyelesaian kredit bermasalah akan berdampak pada penurunan asset Bank secara total. Bank akan melakukan pengoptimalan *collection* melalui penguatan fungsi *special asset management* dan manajemen *day past due* (DPD).

Di tahun 2023 Bank juga memfokuskan pertumbuhan bisnis bank pada segmen yang memberikan dampak yang besar bagi bank. Selain itu Bank sedang melakukan persiapan untuk berekspansi ke segmen yang baru, membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan, dan bersinergi dengan afiliasi KBFG dan dan perusahaan anak untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dari segi percepatan bisnis, Bank sedang melakukan peningkatan infrastruktur TI dan digital melalui proyek SHINE yang akan selesai di akhir tahun 2024. Untuk meningkatkan *customer base* untuk memperkuat struktur Dana Pihak Ketiga dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah melalui berbagai produk, media/platform, layanan dan perbankan digital yang inovatif, di akhir tahun 2023 Bank telah meluncurkan aplikasi *mobile banking* yaitu KBStar yang ditargetkan dapat meningkatkan DPK terutama pada segmen ritel dan individu serta diharapkan menjadi mesin utama Bank dalam mendapatkan CASA. Kedepannya, Bank akan memulai untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah dan memenuhi kebutuhan produk dan layanan nasabah melalui *digital channel* serta membentuk ekosistem digital sehingga dapat memperkuat *positioning Bank* dalam industri perbankan.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi dalam dunia perbankan saat ini menjadi hal utama yang diharapkan dapat membantu dalam proses bisnis bank. Hal ini tercermin dengan makin berkembangnya sektor *Online/Digital Banking* dengan melakukan *Full Scales Digital Transformation* yang setidaknya mencakup *channels, products, services* dan *customer*. Dengan adanya tren bisnis di sektor tersebut dan didukung oleh teknologi-teknologi yang ada, di tahun 2023 KB Bank sedang menjalankan inisiatif transformasi untuk membangun kembali *core banking*, digital, sistem informasi, sistem-sistem pendukung dan infrastruktur IT dengan harapan dapat bersaing dengan competitor dan dapat berkolaborasi dengan ekosistem yang ada.

Disamping itu, dengan inisiatif transformasi tersebut dapat memberikan pengalaman dan kemudahan bagi nasabah, memperbesar *Market-Size*, memperluas cakupan segmen nasabah dan mampu meningkatkan profitabilitas serta melakukan *Cost Efficiency* dengan menekan biaya operasional. Di tahun 2023 Bank telah meluncurkan aplikasi mobile banking yaitu KBStar yang ditargetkan dapat meningkatkan DPK terutama pada segmen ritel dan individu serta diharapkan menjadi mesin utama Bank dalam mendapatkan CASA.

Dalam tiga tahun kedepan arah dan fokus dari Teknologi informasi KB Bank adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2024 - Penyelesaian SHINE Project
   Bank akan memfokuskan untuk penyelesaian SHINE Project termasuk pengoperasian Sistem Proyek SHINE dan Stabilisasi sistem SHINE serta meminimalkan pengembangan di luar proyek SHINE, kecuali untuk kebutuhan regulasi, audit, dan pemenuhan kebutuhan strategis

2. Tahun 2025 - Memperkuat Kemampuan Pengoperasian Sistem Secara Mandiri
   Di tahun 2025 Bank akan memperkuat kemampuan pengoperasian sistem dengan memprioritaskan pelatihan reguler dan program pendidikan kepada karyawan, meningkatkan proses operasi sistem untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja serta melakukan otomatisasi tugas-tugas pengoperasian sistem untuk meningkatkan produktivitas
3. Tahun 2026 - Memaksimalkan Pengembangan *In-house*
   Pada tahun 2026, Bank akan mempercepat inovasi bisnis dengan kemampuan teknologi yang sudah terakumulasi, meningkatkan kolaborasi dengan mitra pihak ketiga melalui *open system* dan membangun ekosistem untuk memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*

JENIS PRODUK DAN JASA YANG DITAWARKAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, pasal 3 ayat 1 Bank bergerak di industri jasa perbankan. Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan terbagi menjadi tiga(3) segmen yakni segmen Ritel, segmen UMKM dan segmen Komersial. Segmen Ritel dan UMKM Perseroan ini didukung oleh segmen Komersial sebagai penyeimbang. Keseluruhan segmen tersebut didukung oleh Perbankan Internasional, *Treasury*, dan layanan berbasis *fee*.

Masing-masing bisnis tersebut terdiri dari aktivitas penyaluran kredit, penghimpunan dana, peningkatan *fee based income* dan aktivitas layanan lainnya yang semua dilakukan sesuai dengan *value* yang telah ada. Bisnis Perseroan ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, teknologi informasi yang terkini serta manajemen risiko dan kepatuhan yang handal.

JARINGAN KERJA DAN MITRA USAHA

Di tahun 2023, jaringan kerja KB Bank terdiri dari 1 kantor pusat operasional, 29 kantor cabang, 143 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional, dan 11 ATM Bukopin. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM Prima dan ATM Bersama di seluruh Tanah Air. Seluruh kantor KB Bank telah terhubung dalam satu jaringan *real time online*.

Sepanjang 2023, KB Bank juga terus memperkuat posisi sebagai mitra keuangan yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi di Indonesia diantaranya melalui:

1. Pembiayaan Sindikasi dengan 4 Bank lainnya senilai Rp2,5 triliun kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA (Persero) untuk modal kerja pengadaan 612 Unit Kereta New Generation untuk Program Replacement Tahun 2023-2026.
2. Pembiayaan sejumlah senilai USD 20 juta, atau lebih dari Rp309 miliar kepada PT Energi Makmur Buana (INVI), yang merupakan anak usaha dari PT Indika Energy. Fasilitas kredit tersebut diberikan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik komersional Nasional.
3. Kolaborasi inovatif dengan Pemerintah Kota Batam khususnya melalui implementasi *Fuel Card* 3.0 untuk penyederhanaan transaksi di stasiun pengisian bahan bakar.

Dengan terciptanya kerjasama antara KB Bank dengan berbagai mitra menandakan Bank terus berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Bank terus memperkuat sinergi One KBFG di industri keuangan diantaranya melalui kerjasama di bidang sekuritas pasar modal dengan KB Valbury, pembiayaan kendaraan bermotor dengan Sunindo Kookmin Best Finance, layanan *multifinance* dan *Co-Location* dengan KB Finansia Multi Finance dimana kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan keuangan yang lengkap untuk nasabah. Melalui berbagai kerja sama dengan perusahaan afiliasi KBFG diharapkan dapat mendorong KB Bank untuk memberikan layanan yang terintegrasi kedepan dengan *one stop financial service*.

KEPEMILIKAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM DALAM KELOMPOK USAHA BANK

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris KB Bank mengungkapkan bahwa tidak satupun anggota yang memiliki saham, baik dalam Perseroan atau bahkan pada bank dan perusahaan lainnya sesuai dengan aturan OJK yang tertera dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sementara itu, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank. Adapun pada tahun 2023, Bank telah melaporkan 16 (enam belas) transaksi pembelian dan/atau penjualan saham Bank yang dimiliki oleh Direksi kepada regulator. Uraian terkait bisa disimak pada bab Profil Perusahaan pada sub judul "Pembelian/ Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi".

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI PADA BANK DAN KELOMPOK USAHA BANK DI TAHUN BERJALAN

Di tahun 2023, dalam rangka memperkuat permodalan, KB Bank melakukan aksi korporasi melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII pada triwulan kedua 2023 dengan perolehan dana sebesar Rp11,99 triliun. Hal ini penting dilakukan untuk percepatan dalam menyelesaikan sisa *non-performing asset* secara tepat waktu sehingga struktur permodalan menjadi kuat dan meningkatkan *soundness Bank* mengingat akan berakhirnya stimulus relaksasi covid19 di tahun 2024. Selain itu, penggunaan modal juga akan difokuskan untuk mendukung permodalan perusahaan anak dimana pada tahun 2023 KB Bank telah melakukan *capital injection* sebesar Rp1,3 triliun ke Bank KB Bukopin Syariah dan KB Bukopin Finance yang dimana modal yang diberikan akan dikelola dengan hati-hati dan digunakan secara produktif untuk ekspansi bisnis serta mempercepat akumulasi modal melalui pertumbuhan organik.

HAL-HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI PADA MASA MENDATANG

Perkembangan usaha Bank terkait dengan dinamika perekonomian yang di masa mendatang tergantung pada dinamika yang terjadi di tahun berjalan. Secara material, Bank belum dapat menyampaikan hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK

Untuk membangun SDM yang unggul dan dapat berkompetisi pada era perubahan saat ini, Bank terus memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menambah pengetahuan dan kompetensi dari setiap karyawan. Selain itu, Bank juga menjalankan sistem Penilaian Kinerja yang berbasis pada KPI masing-masing individu dan distribusi normal. Dengan sistem ini, maka setiap karyawan harus memberikan kontribusi terbaiknya. Bagi karyawan dengan kinerja yang masih dibawah ekspektasi yang ditentukan, Bank akan memberikan pengembangan bagi karyawan tersebut secara spesifik untuk memastikan karyawan mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan Bank agar tetap bertahan dan berkompetisi di industri.

APRESIASI

Melalui kesempatan ini, izinkan saya mewakili segenap Direksi untuk mengucap syukur bahwa Bank bisa menjalani tahun 2023 dengan hasil yang optimal. Bank tidak akan dapat meraih berbagai pencapaian ini tanpa dukungan, upaya, dan dedikasi karyawan serta arahan dari Dewan Komisaris. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada nasabah dan mitra usaha, atas dukungan, kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Kepada seluruh Insan Bank, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah ditunjukkan. Kami menghimbau bagi seluruh insan Bank untuk meneguhkan semangat dalam berprestasi, sehingga Bank bisa terus berkiprah, berkontribusi, membangun kapasitas, kapabilitas serta berinovasi untuk menjadi salah satu yang terdepan di Indonesia.

Jakarta, 31 Mei 2024



Woo Yeul Lee
Direktur Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk.

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk Tahun Buku 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan") tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Mei 2024

DEWAN KOMISARIS

Jerry Marmen
Komisaris Utama

Nanang Supriyatno
Komisaris

Hae Wang Lee
Komisaris Independen

Tippy Joesoef
Komisaris Independen

Stephen Liestyo
Komisaris Independen

Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen

Eugene K Galbraith
Komisaris Independen

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan
PT Bank KB Bukopin Tbk Tahun Buku 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan") tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Mei 2024

DIREKSI

Woo Yeul Lee
Direktur Utama

Robby Mondong
Wakil Direktur Utama

Helmi Fahrudin
Direktur

Dodi Widjajanto
Direktur

Yohanes Suhardi
Direktur

Henry Sawali
Direktur

Young Eun Moon
Direktur

Jung Ho Han
Direktur



3

PROFIL PERUSAHAAN


KB Bank

IDENTITAS BANK

Nama Perusahaan	PT Bank KB Bukopin Tbk
Nama Panggilan	KB Bank
Jenis/Badan Hukum Perusahaan	Perusahaan Terbuka
Bidang Usaha	Jasa Perbankan
Tanggal Pendirian	10 Juli 1970
Dasar Hukum Pendirian	Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/ Dirjen/ Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama.
Perubahan Nama	PT Bank KB Bukopin, Tbk – Disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Desember 2020, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No. 12 No. AHU-0085571. AH.01.02.
Kepemilikan Saham	• KB Kookmin Bank 66,88% • STIC Eugene Star Holdings 16,98% • Publik / Masyarakat 16,14%
Modal Dasar	Rp21.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp18.999.999.969.200,-
Tanggal IPO	10 Juli 2006
Kode Saham & Obligasi	BBKP
Nama Bursa	Bursa Efek Indonesia
SWIFT Code	BBUKIDJA
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2023	2.618 orang
Sekretaris Perusahaan	Yocky Eko Wicaksono per 31 Desember 2023
Entitas Anak	PT Bank KB Bukopin Syariah PT KB Bukopin Finance
Alamat Kantor Pusat	Gedung KB Bank Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770 Telepon: +6221-7988266, 7989837 Fax: +6221-7980625, 7980238, 7980244
Kontak Alamat	Sekretaris Perusahaan Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770 Telepon: +6221 7988266, 7989837 Fax: +6221-7986355 Email: corsec@kbbank.co.id
Media Sosial	Youtube: KB Bank Facebook: KB Bank Instagram: kbbukopin Twitter : kbbank_id

RIWAYAT SINGKAT
BANK



PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Sejak awal pendiriannya, Bank memfokuskan diri pada segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari segi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank telah mengembangkan usahanya ke segmen Ritel dan Konsumer sejak terbitnya izin Menteri Keuangan tanggal 16 Maret 1971. Bisnis Ritel Bank berkembang seiring dengan bisnis Komersial sebagai penyeimbang, dengan berbagai produk dan layanan jasa yang ditawarkan sebagaimana Anggaran Dasar terakhir. Anggaran Dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan seiring waktu dan perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 November 2022 No. 108 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-0090647.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank KB Bukopin Tbk. dan sesuai dengan susunan terakhir anggota Direksi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31 Januari 2023 No. 77, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 10 Februari 2023 No. AHU-AH.01.09-0088669 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Bukopin Tbk.

Bank juga beberapa kali mengubah status badan hukum hingga akhirnya menjadi Perusahan Terbuka pada tahun 2006. Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada 10 Juli 2006, Bank terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan Perbankan yang komprehensif pada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.

KB Bank juga merupakan pemegang saham pada PT Indo Trans Buana Multi Finance yang bergerak dalam bidang kegiatan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multi guna untuk kemudian mengubah nama perusahaan tersebut menjadi PT Bukopin Finance pada tahun 2008 sebagai pemegang saham pengendali dan utama. Pada tahun yang sama KB Bank melakukan upaya pengembangan bisnis perusahaan dengan melakukan akuisisi atas PT Bank Perserikatan Indonesia yang telah berada di bawah asistensi KB Bank selama 3 tahun. Dalam melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin.

Seiring dengan perkembangan industri bisnis perbankan, KB Bank terus melakukan inovasi dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang tidak dimiliki oleh kompetitornya seperti Flexy Bill, Flexy Gas dan Flexy Health yang semakin memperkuat posisi KB Bank dalam persaingan bisnis Perbankan di Indonesia.

Pada tahun 2018, KB Bank memulai sinergi dengan KB Kookmin Bank melalui aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV yang menjadikan KB Kookmin Bank memiliki 22% saham Perseroan. Hingga laporan ini diterbitkan, KB Kookmin Bank telah sah menjadi Pemegang Saham Utama dengan porsi 67%.

KB Kookmin Bank.co,Ltd. atau Kookmin Bank merupakan salah satu Bank di Korea Selatan yang tumbuh sebagai lembaga keuangan terkemuka yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat dan bisnis. KB Kookmin Bank merupakan bagian dari grup konglomerasi keuangan terbesar di Korea Selatan, KB Financial Group (KBFG). Grup ini didirikan pada tahun 2008 untuk melayani klien dengan lebih baik, memungkinkan pertumbuhan, dan memberikan nilai dalam lingkungan keuangan yang berubah dengan cepat.
KB Financial Group memiliki 12 anak perusahaan yakni: KB Kookmin Bank, KB Securities, KB Insurance, KB Kookmin Card, KB Life Insurance, KB Asset Management, KB Capital, KB Real Estate Trust, KB Savings Bank, KB Investment, KB Data Systems dan KB Credit Information. Dengan produk dan layanan yang komprehensif, jaringan KBFG telah tersebar di berbagai negara di antaranya : Tiongkok, Jepang, Hongkong, Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, Singapura, Laos, India, Indonesia, New York, London, dan New Zealand.

Dengan hadirnya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali KB Bank, pada tahun 2021 KB Bank resmi merubah nama Perusahaan menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk atau biasa disebut KB Bank.

Hingga akhir tahun 2023, KB Bank beroperasi di 24 provinsi, memiliki 1 kantor pusat operasi, 29 kantor cabang, 143 kantor cabang pembantu dan 1 kantor fungsional.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM

Bank Umum Koperasi Indonesia	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970.
Bank Hukum Koperasi (Bukopin)	Disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970
Bank Bukopin	Disahkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi No. 06/KPTS/BLK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990
Perseroan Terbatas Tertutup (PT Bank Bukopin Tbk)	Akta Notaris No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta Notaris No. 118 tanggal 28 Mei 1993.
Perusahaan Terbuka PT Bank Bukopin, Tbk	Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6 November KEP.DGS/2004 tanggal 19 April 2004.
PT Bank KB Bukopin, Tbk	Disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Desember 2020, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No. 12 No. AHU-0085571.AH.01.02

JEJAK LANGKAH BANK

1970

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) didirikan dengan badan hukum koperasi.

1989

- Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin.
- Menerbitkan Obligasi pertama kali.

1993

Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Bukopin Tbk.

2003

Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah.

2006

- Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO (*Initial Public Offering*). Sehingga nama perusahaan menjadi PT Bank Bukopin Tbk.
- Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73%.
- Akuisisi saham PT Bukopin Finance (sebelumnya PT Indo Trans Buana Multifinance).

2008

- Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin menjadi 65,44%.
- Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah.

2009

- Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I.
- *Spin off* unit usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin sehingga Bank Bukopin memiliki 65,4%.

2010

- Pertama kali diluncurkan dan disosialisasikan budaya PRIDE (*Professionalism, Respect Other, Integrity, Dedicated to Customer, dan Excellence*) di internal Perseroan.

2011

- Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II.
- Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%.

2012

- *Issuance of Continuous Subordinated Bonds I Phase I of Bank Bukopin 2012.*

2013

- Penawaran Umum Terbatas (PUT) III.

2014

- Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%.

2015

- PT Bosowa Corporindo menjadi pemegang saham pengendali.
- Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015.
- Peningkatan kepemilikan pada PT Bank Syariah Bukopin menjadi sebesar 89,07%.

2016

- Peningkatan kepemilikan pada PT Bank Syariah Bukopin menjadi sebesar 90,67%, dan Bukopin Finance menjadi 96,06%.
- Penerbitan Medium Term Notes I Bank Bukopin tahun 2016 Seri B.
- Penerbitan Medium Term Notes Bank Bukopin tahun 2016.

2017

- Menginisiasi pendirian BNV Labs sebagai inkubator *startup* di bidang *fintech*.
- Meluncurkan tabungan digital Wokee untuk memperkuat bisnis Perseroan pada segmen perbankan digital.
- Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II tahun 2017.

2018

- Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- KB Kookmin Bank menjadi salah satu pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 22%.
- Bank Bukopin meluncurkan layanan Flexy Bill bekerja sama dengan PLN untuk memfasilitasi pembayaran listrik para pelaku usaha.

2019

- Peluncuran Visi Misi dan Budaya Perusahaan baru yaitu I CAN (*Integrity, Competent, Care, Accountable, Never Give Up*).
- Peluncuran layanan *Virtual Interactive Online Assistant* atau VIOLA
- Melengkapi lini produk fasilitas dana talangan Flexy Bill dengan Flexy Gas, Flexy Health dan Invoice Financing.

2020

- Perseroan melaksanakan aksi korporasi dalam rangka memperkuat permodalan, yaitu Penawaran Umum Terbatas V dan *Private Placement*.
- KB Kookmin Bank menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 67,00%.
- Perubahan nama dan logo Perseroan sebagai bagian dari proses transformasi menjadi KB Bukopin.

2021

- Perseroan secara resmi mendapat hak dan ijin dari Regulator terkait dengan perubahan *brand identity*.
- Perseroan menggunakan *brand identity* terbaru dengan nama PT Bank KB Bukopin Tbk penggunaan logo KB Star.
- Pelaksanaan Aksi Korporasi dalam rangka penguatan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan penerbitan Obligasi.

2022

- Dimulainya proyek *Next Generation Banking System* (NGBS) dengan bekerjasama dengan Ernest and Young (EY) Indonesia sebagai PMO dan DXC sebagai master kontraktor

2023

- PT Bank KB Bukopin, Tbk (BBKP) telah menyelesaikan rights issue pada tanggal 31 Mei 2023, dengan perolehan dana Rp 11,9 triliun. Adapun pembeli *right issue* terbesar adalah Bank KB Kookmin senilai Rp 8,02 triliun atau 80,2 miliar saham.
- KB Bank meluncurkan *Mobile Banking* 'KBstar' untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital nasabah.

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Nama Organisasi	Status Anggota
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota
PERBANAS	Anggota
Lembaga Penjamin Simpanan	Anggota
Jaringan PRIMA	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LASP)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota



INFORMASI MAKNA
LOGO BANK





Logo sebagai sarana identitas yang mencerminkan karakter, produk dan jasa sebuah perusahaan sehingga dapat menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada publik, di mana sebuah logo memiliki banyak elemen berupa bentuk, warna, garis dan jenis yang keseluruhannya saling mendukung untuk mempengaruhi pemikiran, pandangan atau pendapat publik terhadap perusahaan serta mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

SIMBOL

- Simbol KB mencerminkan ambisi perusahaan untuk menjadi brand finansial yang terkemuka di Industri Keuangan Tanah Air dengan memperkuat branding "Korea Best".
- Simbol Star-b yang mengandung makna bintang, menunjukkan perspektif orientasi masa depan KB Financial Group dan keinginan yang tinggi untuk melesat ke kelas dunia.

VISUALISASI

- Warna kuning pada logo Perseroan melambangkan kesegaran baru yang dibawa oleh KB Kookmin Bank.
- Teknologi terbaru dan dukungan jaringan global menjadi modal Bank KB Bank menyediakan layanan finansial terbaik bagi Indonesia.

BIDANG USAHA

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, pasal 3 ayat 1 Bank bergerak di industri jasa perbankan.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun 2023

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir	Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun 2023	
	Sudah Dijalankan	Belum Dijalankan
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya	√	-
Memberikan Kredit	√	-
Menerbitkan surat pengakuan utang	√	-
• Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya • Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud • Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud • Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah • Sertifikat Bank Indonesia (SBI) • Obligasi • Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun • Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun	√	-
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah	√	-
Menempatkan dana pada, meminjam dana hari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya	√	-
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga	√	-
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga	√	-
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak	√	-
Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek	√	-
Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya	√	-
Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat	√	-
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	√	-
Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	√	-
Melakukan kegiatan pernyataan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	√	-
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	√	-

Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan terbagi menjadi tiga (3) segmen yakni segmen Ritel, segmen UMKM dan segmen Komersial. Segmen Ritel dan UMKM Perseroan ini didukung oleh segmen Komersial sebagai penyeimbang. Keseluruhan segmen tersebut didukung oleh Perbankan Internasional, *Treasury*, dan layanan berbasis fee.

Masing-masing bisnis tersebut terdiri dari aktivitas penyaluran kredit, penghimpunan dana, peningkatan *fee based income* dan aktivitas layanan lainnya yang semua dilakukan sesuai dengan *value* yang telah ada. Bisnis Perseroan ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, teknologi informasi yang terkini serta manajemen risiko dan kepatuhan yang handal.

PRODUK DAN JASA BANK

Kegiatan usaha Bank meliputi produk segmen Ritel, UMKM dan Komersial, yang terdiri dari berbagai produk dan layanan yakni produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan yang dijelaskan sebagai berikut:

Simpanan

Produk simpanan terbagi dari produk Giro, Tabungan dan Deposito, antara lain:

1. Produk Giro yang disediakan Perseroan kepada nasabah adalah sebagai berikut :
   - Giro Bukopin Rupiah; dan
   - Giro Bukopin Valas.

2. Produk Tabungan yang disediakan Perseroan kepada nasabah adalah sebagai berikut :
   - Tabungan Siaga KB Bukopin;
   - Tabungan Siaga KB Bukopin Kerjasama;
   - Tabungan Siaga KB Bukopin Rencana;
   - Tabungan Siaga KB Bukopin Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha);
   - Tabungan Siaga KB Bukopin Premium;
   - Tabungan KB Bukopin Siaga Valas;
   - Tabungan Siaga KB Bukopin Pensiunan;
   - Tabungan SIMPEL;
   - Tabungan Digital Wokee; dan
   - TabunganKu.

3. Produk Deposito yang disediakan Perseroan kepada nasabah adalah sebagai berikut :
   - Deposito Bukopin Rupiah;
   - Deposito Bukopin Valas;
   - Deposito Merdeka; dan
   - Deposito *on Call*.

Pinjaman

Produk Pinjaman terbagi berdasarkan segmen, antara lain :

RITEL

Produk pinjaman Ritel yang disediakan Perseroan kepada Calon Debitur adalah sebagai berikut :

1. Kredit Pensiunan
2. Kredit Masa Pra Pensiun (MPP);
3. Kredit Pemilikan Mobil;
4. Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen;
5. Kredit Serba Guna (KSG);
6. *Back to Back Loan*;
7. Kartu Kredit; dan
8. Produk Kredit PNS Aktif Channeling BPR.

UMKM

Produk pinjaman UMKM yang disediakan Perseroan kepada Debitur atau Calon Debitur diantaranya:

A. Product Generik:
   1. Kredit Investasi (KI)
   2. Kredit Modal Kerja (KMK)

B. Produk Program:
   1. Equipment Financing
   2. SME Mortgage
   3. Supply Chain Financing yang terdiri dari Dealer Financing, Vendor Financing, Distributor Financing
   4. Pinjaman Rekening Koran (PRK)
   5. Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
   6. Pembiayaan Channeling SKBF Fleet
   7. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   8. Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra
   9. Produk Non Cash Loan : Bank Garansi, L/C dan SKBDN

KOMERSIAL

Produk pinjaman komersial yang disediakan Perseroan kepada Calon Debitur adalah sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja;
2. Kredit Investasi; dan
3. Kredit Sindikasi.

JASA LAINNYA

Fee Based Income

Kegiatan *Fee Based Income* bersumber dari aktivitas jual beli (trading) produk *Treasury, Public Services, Trade Finance,* Bank Garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, Cash Management, Fee* Kartu Kredit, Jasa Kustodian, Jasa Manajemen Pengelolaan dan IT Swamitra dan Public Utilities. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Perseroan juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *Wealth Management*. Rincian terkait layanan *Fee Based Income* diuraikan sebagai berikut.

Jasa *Trade Finance*
Layanan yang diberikan Perseroan dalam membantu nasabah guna mengatasi hambatan-hambatan transaksi dengan pihak luar negeri ataupun domestik/dalam negeri karena adanya perbedaan ketentuan pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar Negara. Berbagai produk layanan *trade finance* diantaranya adalah:

1. *Import Services*, berupa penerbitan *Letter of Credit* (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) *Sight*, LC/SKBDN *Usance*, LC/SKBDN butuh konfirmasi, *Usanse* atau *Usance Payable at Sight* dan LC/SKBDN butuh konfirmasi, *Usanse* atau *Usance Payable at Usance*;
2. *Documentary Collection*, berupa *Inward Collection Delivery Document Against Payment* dan *Outward Collection Delivery Documents Against Acceptance*;
3. *Export Services*, berupa *Assignment of Proceeds*, Diskonto Wesel LC/SKBDN dan Negosiasi Wesel LC/Diskonto;
4. *Correspondent Banking and Financial Institutions*, berupa *Asset Sales Trade Finance* dan *Banker's Acceptance*;
5. Guarantee, berupa *Demand Guarantee, Shipping Guarantee* dan *Standby Letter of Credit* (SBLC).

Bank Garansi
Fasilitas jaminan yang diterbitkan Perseroan yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji. Terdapat beberapa jenis fasilitas bank garansi, diantaranya jaminan penawaran (*Bid Bond*), jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*), jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*), jaminan SP2D.

Kontra Bank Garansi
Fasilitas penjamin oleh pihak ketiga (lembaga penjamin kredit) terhadap bank garansi yang diterbitkan Perseroan.

Bank Garansi Khusus
Fasilitas yang diberikan Perseroan dengan menerbitkan bank garansi atas permintaan tertulis dari kontraktor rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Remittance
Layanan Perseroan yang disediakan untuk menerima dan/atau mengirim uang dari dan ke berbagai penjuru dunia dengan didukung Bank Koresponden yang tersebar di berbagai Negara.

Trading Treasury (Jual Beli Valuta Asing dan Surat Berharga)
Perseroan melayani jual beli valuta asing baik dalam bentuk *Telegraphic Transfer* (TT) dan bank notes serta kontrak *swap* dan *forward*. Selain itu Perseroan juga melayani jual beli surat berharga baik surat utang pemerintah ataupun obligasi korporasi dalam Rupiah dan Valas. Transaksi dilakukan sebagai bagian dari pelayanan, serta dilakukan dengan bank lain sebagai bagian penting dari optimalisasi pendapatan jual beli bagi bank dalam rangka *proprietary trading* (jual beli valas dan surat berharga dengan bank lain dan sekuritas).

Layanan Penerima Pembayaran Terkait *Public Service*
Layanan penerimaan pembayaran dari masyarakat antara lain untuk pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, tagihan lainnya yang didasari adanya kerjasama Perseroan dengan perusahaan lain.

Electronic Banking (ATM, Internet Banking dan SMS Banking)
Jasa pembayaran tagihan yang dapat dilakukan melalui berbagai jaringan distribusi yang meliputi ATM, SMS *Banking*, *Internet Banking* dan *Phone Banking*, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapanpun dan di mana nasabah berada.

Jasa Kustodi
Jasa yang diberikan berupa kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Jasa ini diberikan berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tanggal 3 Juli 2006. Layanan yang diberikan melalui produk ini adalah layanan penyimpanan surat berharga, penyelesaian transaksi, corporate action, perwakilan dengan kuasa (proxy) dan layanan kustodian reksadana.

Wali Amanat
Jasa yang diberikan Perseroan untuk bertindak mewakili kepentingan investor pemegang efek bersifat utang. Jasa wali amanat Perseroan di antaranya jasa wali amanat, jasa agen jaminan, jasa agen pembayar dan jasa agen rekening penampung.

Jasa *Arranger* dan Keagenan Kredit Sindikasi
Jasa *arranger* dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersamasama (sindikasi) oleh beberapa bank. Adapun jasa keagenan memberikan layanan untuk proses pencairan kredit sindikasi (*disbursement*) dan pemenuhan semua kewajiban nasabah kepada bank serta proses administrasi kredit termasuk penyimpanan dan pengikatan dokumen jaminan sampai kredit sindikasi tersebut dinyatakan selesai.

Modul Penerimaan Setoran Negara (MPN)
Perseroan telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menyediakan jasa penerimaan setoran Negara (pajak dan non pajak) secara *online*. Perseroan tidak mengenakan biaya

untuk jasa tersebut, namun memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

Layanan Melalui Sistem *Host to Host*

Perseroan telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menyediakan jasa penerimaan setoran Negara (pajak dan non pajak) secara *online*. Perseroan tidak mengenakan biaya untuk jasa tersebut, namun memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

Penjualan Reksadana

Perseroan dapat bertindak sebagai Agen Penjual produk reksadana dan memperoleh komisi atas nilai aset bersih dari reksadana yang dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

Penjualan *Bancassurance*

Perseroan bekerjasama dengan PT AIA Financial dalam penjualan *Bancassurance* dengan model penjualan Referensi kepada seluruh nasabah Perseroan dengan 2 (dua) pola penjualan yaitu pola *Inbranch* yang dilakukan oleh Cabang Perseroan yang ditunjuk dan pola *telemarketing* yang dilakukan oleh *Telesales Marketing* PT AIA Financial.

Penjualan Obligasi Negara

Perseroan sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Retail (ORI) mulai dari seri 001 di tahun 2006 sampai seri 012 di tahun 2016 dan Agen penjual Saving Bond Retail (SBR) seri 01.

Bukopin Prioritas

Bukopin Prioritas ditujukan untuk nasabah dengan saldo simpanan di atas Rp500 juta. Untuk setiap nasabah Bukopin Prioritas dilayani oleh seorang *Relationship Officer* yang membantu nasabah dalam mengelola asetnya. Jasa yang ditawarkan Bukopin Prioritas meliputi pengelolaan nasabah yang dikemas dalam suatu perencanaan keuangan yang terarah serta dapat meningkatkan keuntungan dan rasa aman bagi nasabah.

Jasa Kerjasama Swamitra

Perseroan sebagai pengelola Swamitra yang merupakan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melalui penyediaan dukungan operasional berupa logo, sistem manajemen, sistem teknologi (Swasys dan SIKM), sistem operasional dan sebagainya. Atas pemberian dukungan tersebut, Perseroan memperoleh jasa pengelolaan, jasa kemitraan dan jasa manajemen.

Perbankan Internasional

Layanan Perbankan Internasional menjadi salah satu bisnis andalan Perseroan. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan bisnis Perbankan Internasional terus ditingkatkan guna memperoleh kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam bertransaksi ekspor, impor, dan transfer valas yang kian tahun semakin bertambah. Dengan semakin meningkatnya reputasi, Perseroan semakin dapat menggalang kerjasama dengan berbagai bank koresponden di dalam maupun luar negeri dengan jumlah hampir mencapai 600 bank koresponden yang tersebar di berbagai kota besar maupun pusat perdagangan di berbagai belahan dunia di Asia, Amerika, Eropa dan Afrika.

Segmentasi bisnis Perbankan Internasional nasabah perorangan maupun badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

1. Eksportir dan importir;
2. BUMN dan afiliasinya;
3. Badan usaha non BUMN (BUMD, PMA, Group Swasta Nasional);
4. Individu/perorangan nasabah transfer valas.

Segmen ini memiliki skala usaha yang berorientasi transaksi perdagangan ekspor impor maupun dalam perdagangan dalam negeri.

Treasury

Tugas utama *Treasury* adalah mengelola likuiditas Perseroan. Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam rangka penerapan regulasi perbankan sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) serta secara simultan melakukan optimalisasi profil likuiditas Perseroan. Divisi Treasury dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukungnya. Koordinasi yang dilakukan antara lain memonitor mutasi dana nasabah dan data keuangan internal Bank, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan strategi pengelolaan likuiditas harian.

Peran sebagai pengelola likuiditas dijalankan secara simultan dengan peran sebagai *profit center*, yaitu optimalisasi pendapatan bunga dari transaksi pasar uang dan pasar modal, serta pendapatan non bunga *(fee based income)* dari transaksi jual beli valuta asing dan surat berharga. Transaksi dilakukan terutama dengan *counterparty* yang terdiri dari BI, bank umum lainnya, sekuritas, dan *money broker*. Transaksi dengan nasabah dilakukan sebagai bagian dari pelayanan Bank kepada masyarakat, terutama terkait dengan transaksi jual beli valuta asing, surat berharga, serta layanan jasa kustodian dan wali amanat.

Produk dan Jasa *Treasury* yang ditawarkan kepada nasabah antara lain:
1. Transaksi jual beli forex (*Value Today, Tom, Spot, Forward, Swap*);
2. Deposit on Call (DOC);
3. Transaksi jual beli Obligasi (pemerintah dan korporasi);
4. Jasa Kustodi (administrasi surat berharga nasabah);
5. Jasa Wali Amanat.

INOVASI BISNIS

1. *One* KBFG
   KB Bank memperkuat *partnership* dengan mitra strategis perusahaan afiliasi KB Financial Group di sektor keuangan diantaranya melalui kerjasama di bidang sekuritas pasar modal dengan KB Valbury, pembiayaan kendaraan bermotor dengan Sunindo Kookmin Best Finance, layanan *multifinace* dan Co-Location dengan KB Finansia Multi Finance di mana kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan keuangan yang lengkap untuk nasabah. Melalui berbagai kerja sama dengan perusahaan afiliasi KBFG diharapkan dapat mendorong KB Bank untuk memberikan layanan yang terintegrasi ke depan dengan *one stop financial service*.

2. *Social Bond*
   KB Bank menjadi pionir obligasi sosial Bank swasta di Indonesia di mana KB Bank mendapatkan kepercayaan sebagai bank pertama di Indonesia yang mendapatkan *social bond* senilai US$300 juta atau setara Rp4,41 triliun dari anggota Grup Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC). Obligasi sosial tersebut didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari Covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial, seperti UMKM, perumahan terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sebagai komitmen Bank untuk mendukung Sosial dan Lingkungan, KB Bank juga membentuk unit *Environmental*, *Social*, dan *Government* (ESG) untuk meningkatkan kerjasama dan mendukung implementasi ESG di KB Bank.

3. *Supply Chain*
   Bank mendorong pengembangan bisnis *Supply Chain Financing* untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank dengan membangun dan memelihara hubungan dengan perusahaan besar sebagai *Anchor* dan *Spokes* (*Dealer/Supplier*). Bank telah meluncurkan produk *Dealer Financing* pada Februari 2022 dan dalam tahap pengembangan untuk produk *Vendor Financing*

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI BANK

Jaringan bisnis dan wilayah operasi Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jenis Kantor	2023	2022	2021	2020	2019
Kantor Pusat Operasional	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	29	41	42	42	42
Kantor Cabang Pembantu	143	231	310	173	176
Kantor Fungsional	1	3	4	9	9
Kantor Kas *)	-	-	-	169	156
Payment Point *)	-	-	-	25	25
ATM	11	359	673	850	834

*) Penyesuaian POJK 12 bahwa per Oktober 2021 tidak terdapat status Kantor Kas dan Payment Point



VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA BANK

Bank telah menetapkan visi dan misi yang dijadikan acuan bagi arah pengembangan usaha. Visi dan Misi Perusahaan tersebut ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No. SKEP/001/D.KOM/VII/2013 tentang Penyempurnaan Visi dan Misi PT Bank Bukopin Tbk, tertanggal 9 Juli 2013 dan SK Direksi No. SKEP/634/DIR/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang telah diubah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 1092 tanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut:

Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Pilihan Utama di Indonesia.

Misi

Memahami dan Memberi Solusi kepada Nasabah.

REVIEW ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan *review* atas Visi dan Misi yang telah ditetapkan Perseroan. *Review* tersebut dilakukan untuk memastikan Visi dan Misi Perusahaan masih relevan dengan perkembangan bisnis, kebutuhan pemangku kepentingan dan arah persaingan antar pelaku usaha jasa keuangan. Manajemen telah melakukan *review* atas visi dan misi Bank dengan memperhatikan perkembangan organisasi dan manajemen memandang perlu adanya pembaharuan atas visi dan misi saat ini.

NILAI BUDAYA BANK

Budaya KB Bank merupakan nilai dan falsafah yang diyakini dapat menjadi landasan dan acuan untuk mencapai tujuan. Adapun nilai-nilai Perusahaan I CAN yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 1092 Tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

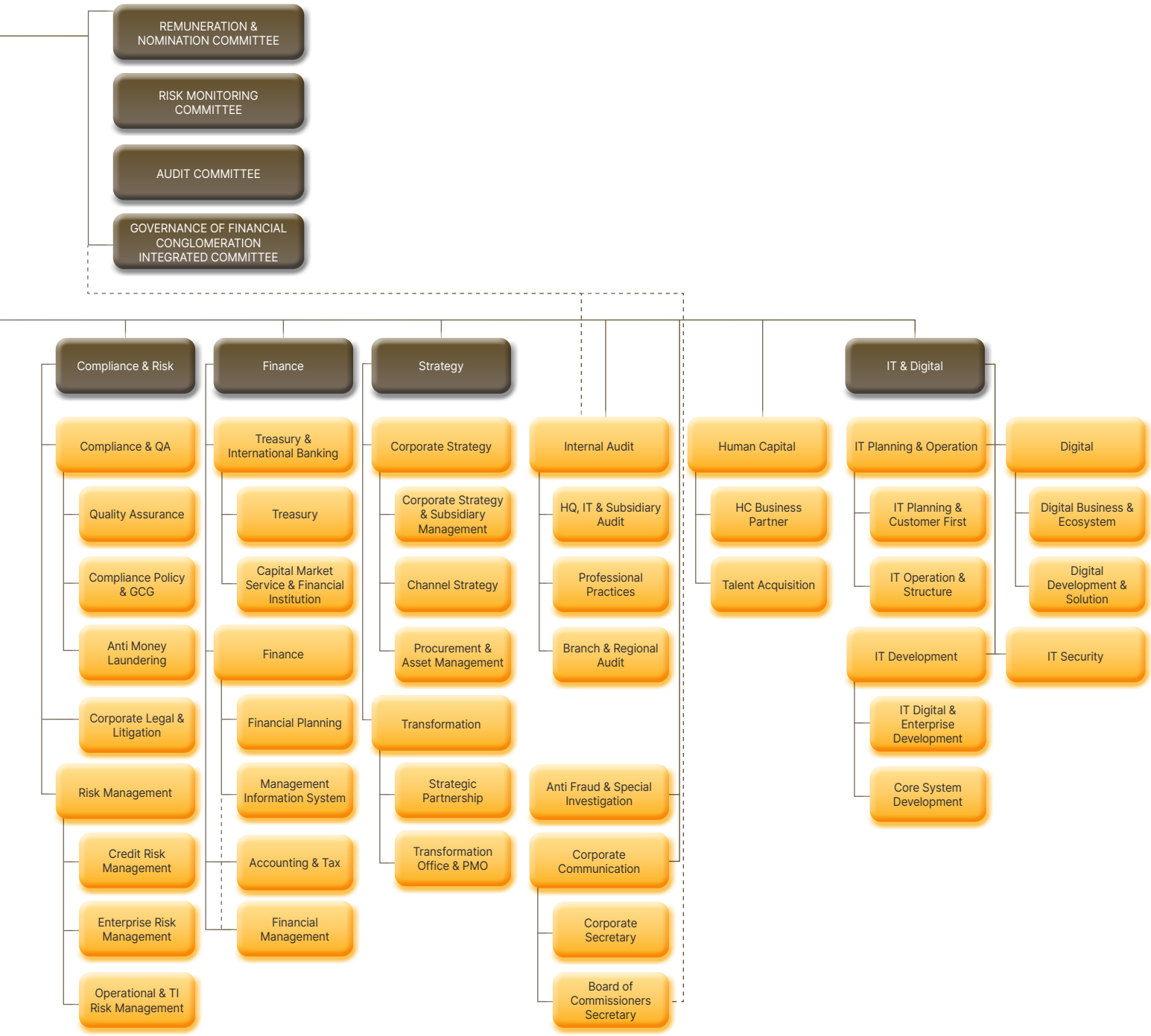
***Integrity* (Integritas)**	Diartikan sebagai mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan komitmen untuk membangun kepercayaan Nasabah. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Jujur • Disiplin dan Berkomitmen
***Competent* (Kompeten)**	Diartikan sebagai cakap dalam melaksanakan tugas dan melakukan perbaikan terus-menerus untuk selalu menjadi yang terbaik. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Cepat belajar • Peningkatan dan perbaikan berkesinambungan
***Care* (Peduli)**	Diartikan sebagai peduli dan sinergi untuk kemajuan bersama. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Tulus/empati & peduli • Sinergi/kerjasama
***Accountable* (Akuntabilitas)**	Diartikan sebagai bertanggung jawab penuh dan menguasai pekerjaan untuk mencapai hasil terbaik. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Bertanggung jawab • Menguasai tugas
***Never Give Up* (Tidak Pernah Menyerah)**	Diartikan sebagai mampu berpikir "*out of the box*" dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai hasil terbaik. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Pantang menyerah • Berpikir "*out of the box*"

Nilai-nilai budaya Bank I CAN tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan di Perseroan untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bank per 31 Desember 2023, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0020 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 beserta adendumnya sebagaimana terlampir di bawah ini.




REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE
RISK MONITORING COMMITTEE
AUDIT COMMITTEE
GOVERNANCE OF FINANCIAL CONGLOMERATION INTEGRATED COMMITTEE
Compliance & Risk
Compliance & QA
Quality Assurance
Compliance Policy & GCG
Anti Money Laundering
Corporate Legal & Litigation
Risk Management
Credit Risk Management
Enterprise Risk Management
Operational & TI Risk Management
Finance
Treasury & International Banking
Treasury
Capital Market Service & Financial Institution
Finance
Financial Planning
Management Information System
Accounting & Tax
Financial Management
Strategy
Corporate Strategy
Corporate Strategy & Subsidiary Management
Channel Strategy
Procurement & Asset Management
Transformation
Strategic Partnership
Transformation Office & PMO
Internal Audit
HQ, IT & Subsidiary Audit
Professional Practices
Branch & Regional Audit
Anti Fraud & Special Investigation
Corporate Communication
Corporate Secretary
Board of Commissioners Secretary
Human Capital
HC Business Partner
Talent Acquisition
IT & Digital
IT Planning & Operation
IT Planning & Customer First
IT Operation & Structure
IT Development
IT Digital & Enterprise Development
Core System Development
Digital
Digital Business & Ecosystem
Digital Development & Solution
IT Security

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 24 Januari 2024. Adapun profil Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2023 dan yang menjabat sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.



Jerry Marmen **Komisaris Utama**	
Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2021-RUPS Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Doctor of Philosophy at the* Australian National University pada tahun 2012
Riwayat Pekerjaan	• Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi (2019-sekarang) • Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan(TRK) (2021-sekarang) • Komisioner Pengawas LSP-BSMR, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2021-2022) • Komite Kebijakan Risiko/Komite Pemantau Risiko, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2019-2021) • Chief & Senior Consultant PT. Strategic Development Group (2018-2021) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) (2018-2021) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) (2012-2018) • Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PT Informasi Kredit Indonesia (2014-2019) • Direktur Utama PT Risk Frontier (2012-2021) • Vice Rector Perbanas School of Economics (PERBANAS Institute) (2000-2003)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada





Seng Hyup Shin*) Wakil Komisaris Utama	
Usia	53 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2021-RUPS Luar Biasa Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 57 tanggal 24 Januari 2024 (Periode 2024-RUPS Tahun 2027)
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor of Administration* di bidang *Administration*, KyungPook National University (1995) • *Master of Administration* di bidang *Administration*, KyungPook National University (1997)
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Keuangan KB Bank (2020-2024) • Team Manager, KB Financial Group • (2014-2016) • Senior Deputy General Manager, KB Financial Group (2017) • General Manager, KB Financial Group (2018- 2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	• Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5 • Sertifikasi Treasury Lv. Advance
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	2.300.000 (0,0012241%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama per 24 Januari 2024, dan efektif menjabat sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Nam Hoon Cho*) Wakil Komisaris Utama (Independen)	
Usia	56 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Seoul, Korea Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 27 tanggal 8 Desember 2021 (Periode 2021-RUPS Luar Biasa Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Bachelor of Economics* at Sungkyunkwan University pada tahun 1994
Riwayat Pekerjaan	• Global Business Group - Head of Global Business Group KB Kookmin Bank (2021-sekarang) • Global Strategy Department - Chief Global Strategy Officer KB Financial Group (2018-2020) • Global Business Department - Managing Director KB Securities (2016-2018) • Management Support Dept. - Managing Director KB Investment & Securities (2015-2016) • Global Sales Department - Managing Director Daewoo Securities (2013-2015)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 1 Komisaris
Rangkap Jabatan	Global Business Group - Head of Global Business Group KB Kookmin Bank (2021-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama per 24 Januari 2024





Nanang Supriyatno Komisaris	
Usia	54 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (periode 2020-RUPS Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Utama PT Satu Gen Indonesia (2020-Sekarang) • Deputy Chief Executive Officer PT Bosowa Property Group (2017-2022) • Direktur Internal Audit Bosowa Group (2013-2022) • Direktur Utama PT Bosowa Beton Indonesia (2015-2018) • Direktur Risk Management PT Semen Bosowa Maros (2015-2017) • Recovery dan Restrukturisasi problem loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1994-2013)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 1 Komisaris
Rangkap Jabatan	Direktur Utama PT Satu Gen Indonesia (2020-Sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Tippy Joesoef Komisaris Independen	
Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 13 tanggal 22 Desember 2020 (periode 2020-RUPS Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB) pada tahun 1990
Riwayat Pekerjaan	• Independent Audit Committee, American International Assurance (AIA) Financial (2019-Present) • Chief GRC, Fazz Financial Group (2019-2022) • Executive Director- Country Risk Management Head, UOB Indonesia (2013-2016) • SVP Global Consumer Group, Citibank NA (2013) • SVP Risk Management, Bank Danamon (2011-2012) • Head of Country Operational Risk Management, Basel 2 and Enterprise Risk Management – Maybank (2005-2011) • Head of Compliance for Consumer & Commercial Banking, ABN AMRO Bank (1999-2005) • Credit Operations Manager, Standard Chartered Bank (1991-1999)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 4
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada





Hae Wang Lee Komisaris Independen	
Usia	55 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (periode 2020-RUPS Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Hukum dari Yonsei University pada tahun 1991 • Magister di bidang Hukum dari Yonsei University pada tahun 1998
Riwayat Pekerjaan	• Member of Board of Directors Korean Association of Indonesia (2020-sekarang) • President Director LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang) • Foreign Lawyer MR&Partners Law Firm at Jakarta (2015-2019) • Lawyer at APEX LLC Head of Jakarta Apex Office (2011-2014) • Lawyer at Law Firm C&K, LEX, APEX (2006-2011)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 2 Komisaris
Rangkap Jabatan	• Member of Board of Directors Korean Association of Indonesia (2020-sekarang) • President Director LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Stephen Liestyo Komisaris Independen	
Usia	60 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (Periode 2021-RUPS Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	S2 *International Marketing*, IPMI International Business School, Jakarta pada tahun 2002
Riwayat Pekerjaan	• Presiden Komisaris PT Sol Mitra Fintec, Januari 2016 - Juli 2021 • Presiden Komisaris PT Prismalink International, Januari 2014 - Agustus 2021 • Komisaris Independen PT. KiosOn Komersial Indonesia, Februari 2018 - April 2019 • Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), April 2010 - April 2015 • Direktur Konsumer Banking PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, April 2009 - Januari 2013 • Komisaris BCA Finance (2000-2009)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 2
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Sukriansyah S. Latief Komisaris Independen	
Usia	54 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 8 Desember 2021 (Periode 2021-RUPS Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Doctor of Law*, Universitas Hasanudin pada tahun 2009
Riwayat Pekerjaan	• Special Staff of Vice President Vice President's Palace (2019-sekarang) • Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2022) • Komisaris PT Media Fajar Holding Company (2015- 2022) • Pengajar di Fajar Educational Foundation of Ujungpandang (1998-sekarang) • Komisaris PT Pelindo IV Makassar (2021)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 2
Rangkap Jabatan	• Special Staff of Vice President Vice President's Palace (2019-sekarang) • Pengajar di Fajar Educational Foundation of Ujungpandang (1998-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Eugene K Galbraith Komisaris Independen	
Usia	71 Tahun
Kewarganegaraan	Amerika Serikat
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 8 Desember 2021 (Periode 2021-RUPS Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Phd Anthropology Economics* dari Johns Hopkins University pada Tahun 1983
Riwayat Pekerjaan	• Director PT Sarana Menara Nusantara (2020-sekarang) • Senior Advisor Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapore (2019-2021) • Senior Advisor, McKinsey and Company (2019-2021) • Deputy President Director Bank Central Asia [IDX: BBCA] (2011-2019) • President Commissioner Bank Central Asia [IDX: BBCA] (2002-2011) • Deputy President Commissioner Bank OCBC NISP (1998-2006)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 1 Komisaris
Rangkap Jabatan	Director PT Sarana Menara Nusantara (2020-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Selama menjabat, semua Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku serta telah dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Komisaris Independen.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Namun demikian, sejak berlakunya Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tidak terdapat Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.

PROFIL DEWAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, terdapat satu kali perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 31 Januari 2023, dan sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 24 Januari 2024. Adapun profil Direksi yang menjabat per 31 Desember 2023 dan yang menjabat sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.



Woo Yeul Lee **Direktur Utama**	
Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPSLB No.37 Tanggal 25 Mei 2022 (Periode 2022-RUPS Tahun 2025)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang *Agricultural Economics* dari Korea University pada tahun 1998 • *Master of International Economics* dari Korea University tahun 1990
Riwayat Pekerjaan	• Senior Executive Vice President & Chief Information Technology Officer KB Financial Group (2020) • Senior Executive Vice President & Chief Human Resource Officer KB Financial Group (2021) • Senior Executive Vice President & Chief Strategy Officer KB Financial Group (2022)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	8.500.000 (0,0045240%)
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada





Robby Mondong Wakil Direktur Utama	
Usia	55 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (periode 2021-Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• *Degree in Finance and Banking*, National University San Diego CA USA (1992) • *MBA Degree in Marketing*, Woodbury University Burbank CA USA (1993)
Riwayat Pekerjaan	• SEVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk Agustus 2019 – Juni 2021 • EVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk Oktober 2015 - Agustus 2019 • SVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk Juni 2013 - September 2015
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	1.107.000 (0,0005892%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Helmi Fahrudin Direktur Operasi	
Usia	48 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta keputusan RUPS No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2021-Tahun 2025
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Diploma (D-3) di bidang Ekonomi Akuntansi, STIE Yogyakarta, (1997) • Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia, (2003)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahnaan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk, (2018-2019) • Kepala SKAI (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020) • Anggota Dewan Pengawas, Dana Pensiun Bank Bukopin (2016-2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	482.951 (0,0002570%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada





Dodi Widjajanto Direktur	
Usia	57 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2020-RUPS Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, (1990) • Magister Manajemen di bidang Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, (2002)
Riwayat Pekerjaan	• General Manager Kantor Cabang Hongkong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Hongkong (2016-2018) • Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang (2018-2020) • Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung (2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	1.000.088 (0,0005323%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Yohanes Suhardi Direktur	
Usia	58 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (Periode 2021-RUPS Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi, Manajemen, Universitas Tarumanegara (1998) • *MBA Degree in Finance*, Oklahoma University, USA, (1990)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris, PT Sahabat Financial Keluarga (2014-2021) • EVP National Head SME Banking, PT Bank Permata Tbk (2013-2021) • SVP National Head SME Credit, PT Bank Permata Tbk (2007-2013) • VP Commercial & Corporate Team Leader, PT Bank OCBC Indonesia (2004-2007)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	574.800 (0,0003059%)
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada





Henry Sawali Direktur	
Usia	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2021-RUPS Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor Degree in Finance*, California State University – Fresno (1986) • *Masters Degree in Business Administration*, National University of San Diego USA (1992)
Riwayat Pekerjaan	• Head of Commercial and MSME Banking Credit PT Bank CIMB Niaga Tbk (2017-2022) • Senior Manager – SCO for Indonesia PT Bank ANZ Indonesia (2016-2017) • Senior Vice President – Head of Corporate Credit Risk, PT Bank OCBC NISP Tbk (2010-2016)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	200.000 (0,0001064%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Young Eun Moon*) Direktur IT	
Usia	58 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Seoul, Korea Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2022-RUPS Tahun 2025)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor in Public Administration*, Yonsei University (1992) • *Master of Public Administration,* Yonsei University, Korea (1993)
Riwayat Pekerjaan	• General Manager (Digital Strategy Department KB Kookmin Bank (2018-2019) • General Manager (Future IT Implementation Department KB Kookmin Bank (2019) • CISO / Managing Director (Information Security Division) KB Kookmin Bank (2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Efektif menjabat sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.





Jang Hyuk Im *) Direktur	
Usia	48 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 57 tanggal 24 Januari 2024 (Periode 2024-RUPS Tahun 2027)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Master of Business Administration*, Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002)
Riwayat Pekerjaan	• Director, Investment Banking Group, KB Securities Co., Ltd (2021-2023) • Team Head, Financial Planning Department, KB Financial Group (2016-2021) • Senior Vice President, Strategic Planning Department, Hyundai Securities (2014-2016)
Sertifikasi yang Dimiliki	-
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Diangkat sebagai Direktur Bank per 24 Januari 2024, dan efektif menjabat sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Jung Ho Han*) Direktur	
Usia	52 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 77 tanggal 31 Januari 2023 (Periode 2023- RUPS Tahun 2026)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Master of Science Management Engineering*, Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002)
Riwayat Pekerjaan	• Chief Financial Officer / General Manager, KB Securities Co., Ltd. (2017-2022) • Team Leader / Associate/Senior Deputy General Manager, KB Financial Group Inc. (2008-2017) • Associate of Strategic Planning Department / Branch, KB Kookmin Bank (1999-2006)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Diangkat sebagai Direktur Bank per 31 Januari 2023 dan efektif menjabat sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.





Jim Bum Kim* Direktur	
Usia	54 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Seoul, Korea Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 70 Tanggal 29 Maret 2022 (Periode 2022-RUPS Tahun 2025)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Bachelor in Economics*, Hankuk University of Foreign Studies (1996) *MBA Finance & Investment*, George Washington University, USA (1998)
Riwayat Pekerjaan	Deputy General Manager of Corporate Banking KB Kookmin Bank in Jongro Branch (2018) Team Head of Corporate Banking in Branch KB Kookmin Bank (2021) General Manager, Global Business Department KB Kookmin Bank (2022)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 31 Januari 2023

Seng Hyup Shin*) Direktur Keuangan	
Usia	53 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode Tahun Buku 2020-RUPS Luar Biasa Tahun 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	*Bachelor of Administration di bidang Administration*, KyungPook National University (1995) *Master of Administration di bidang Administration*, KyungPook National University (1997)
Riwayat Pekerjaan	Team Manager, KB Financial Group (2014-2016) Senior Deputy General Manager, KB Financial Group (2017) General Manager, KB Financial Group (2018- 2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	- Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5 - Sertifikasi Treasury Lv. Advance
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	2.300.000 (0,0012241%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan per 24 Januari 2024, dikarenakan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank per 24 Januari 2024

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF SENIOR



LILIK PANGESTU
SAM I DIVISION HEAD

Usia: 58 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 1 Oktober 2023
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: National University



IRAWAN BARNAS
SAM II WHOLESALE DIVISION HEAD

Usia: 50 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 1 Oktober 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ : Universitas. Padjadjaran



BUDHI DHARMA
SAM III WHOLESALE DIVISION HEAD

Usia: 51 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 16 September 2020
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Institut Pertanian Bogor



DRS. RIDWAN W. JULIANTO
SAM IV SME DIVISION HEAD

Usia: 56 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 28 Agustus 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Universitas Padjadjaran



HANDOJO WIDODO
SAM V RETAIL DIVISION HEAD

Usia: 58 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 29 September 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Universitas Surabaya



HAN MING
PLT. CREDIT UNDERWRITING DIVISION HEAD
Usia: 39 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 1 Oktober 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Universitas Kristen Maranatha



GAMARIDHA AKHIRUL AR
PLT. HUMAN CAPITAL DIVISION HEAD
Usia: 42 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 27 Februari 2023
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Universitas Katolik Parahyangan



ROBY ENDRAMA PURBA
INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD

Usia: 43 tahun
Domisili: Tangerang Selatan, Banten
Menjabat sejak: 01 Feb 2022
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ : Universitas Airlangga



STEVEN EDWARD RIRIHENA
SALES DISTRIBUTION DIVISION HEAD

Usia: 43 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak 1 November 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Universitas Sanata Dharma



FEISEL MARTHA
WHOLESALE BUSINESS DIVISION HEAD
Usia: 57 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 1 September 2021
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ : Institute Of Business Law And Management



TUTWURI ANGGARWANI. K
INTERNAL CONTROL DIVISION HEAD
Usia: 49 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 1 Desember 2020
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Universitas Pancasila



ZICO HERNAWAN
CONSUMER PRODUCT DIVISION HEAD
Usia: 39 tahun
Domisili: Jakarta Timur
Menjabat sejak: 01 Jul 2022
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Institut Pertanian Bogor



HUSNUL KHATIMAH
PLT.MSME PRODUCT & BUSINESS SUPPORT DIVISION HEAD
Usia: 44 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak: 23 Juni 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Institut Teknologi Bandung



AGUSTINUS IWAN CHRISTANTO
CORPORATE STRATEGY DIVISION HEAD
Usia: 53 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak 16 September 2020
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Universitas Airlangga, Surabaya



HARIS BUDIMAN
IT DEVELOPMENT DIVISION HEAD

Usia: 41 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak 16 September 2020
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Institut Pertanian Bogor



DICKY PRIHANTANA SAR
SERVICE TRANSACTION DIVISION HEAD
Usia: 54 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak 16 September 2020
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Universitas Lambung Mangkurat



I GUSTI AYU N. RAI
REGIONAL HEAD I

Usia: 47 tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak 1 Oktober 2021
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Universitas. Katolik Widya Mandala Surabaya



DAVID SURYANA DIPUTRA
REGIONAL HEAD II

Usia: 52 tahun
Domisili: Semarang
Menjabat sejak 1 November 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibek Pangkal Pinang, Gerunggang



VICTOR PANDAPOTAN MARPAUNG
REGIONAL HEAD III

Usia: 49 tahun
Domisili: Medan
Menjabat sejak 27 Februari 2023
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Universitas Prasetiya Mulya



DIDI SUDIRA
REGIONAL HEAD IV

Usia: 49 tahun
Domisili: Surabaya
Menjabat sejak 1 November 2023
Pendidikan terakhir: Sarjana S.1
Univ : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP, Bandung



EKO BRAMANTYO
FINANCE DIVISION HEAD

Usia: 50 tahun
Domisili: Jakarta Timur
Menjabat sejak 16 Nov 2022
Pendidikan terakhir: Pasca Sarjana S.2
Univ: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



KANGHYEON LEE
DIGITAL DEVELOPMENT & SOLUTION DEPARTMENT HEAD

Usia: 43 Tahun
Domisili: Jakarta
Menjabat sejak 1 Oktober 2022
Pendidikan terakhir: *Bachelor of Business Administration*
Univ : Hanyang University

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2023, KB Bank memiliki karyawan sejumlah 2.618 orang, mengalami penurunan sebesar 22,41% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2022 yang berjumlah sebanyak 3.374 orang karyawan. Adanya penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya penutupan kantor dan pengunduran diri karyawan atas permintaan sendiri.

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Organisasi

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Level Organisasi Periode 2022-2023 (dalam satuan orang)

Level Organisasi	2023				2022			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
Division Head EVP SVP	15	2	17	0.65%	10	3	13	0,39%
Regional Head SVP REG BISNIS	3	1	4	0.15%	5	1	6	0,18%
Dept Head VP	53	10	63	2.41%	51	8	59	1,75%
Branch Manager	29	6	35	1.34%	51	6	57	1,69%
Manager	296	122	418	1.34%	325	131	456	13,52%
Coordinator	108	112	220	8.40%	142	145	287	8,51%
Officer	430	317	747	28.53%	590	408	998	29,58%
Clerical	570	544	1.114	42.55%	680	801	1.481	43,89%
Non Staff	0	0	0	0	17	0	17	0,50%
Total	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**	**1.871**	**1.503**	**3.374**	**100,00%**

Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2022-2023 (dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2023				2022			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
SMA	8	6	14	0.53%	34	15	49	1,45%
Diploma - Sarjana	1.375	1.057	2.432	92.90%	1.727	1.448	3.175	94,10%
Pasca Sarjana - Doktoral	121	51	172	6.57%	110	40	150	4,45%
Total	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**	**1.871**	**1.503**	**3.374**	**100,00%**

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Periode 2022-2023 (dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2023				2022			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
Karyawan Tetap	1.247	917	2.164	82.66%	1.597	1.236	2.833	83,97%
Karyawan Tidak Tetap (Kontrak)	257	197	454	17.34%	274	267	541	16,03%
Total	1.504	1.114	2.618	100,00%	1.871	1.503	3.374	100,00%

Jumlah Karyawan berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Rentang Usia Periode 2022-2023 (dalam satuan orang)

Rentang Usia	2023				2022			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
20-24 Tahun	73	100	173	6.61%	54	92	146	4,33%
25-29 Tahun	258	322	580	22.15%	330	460	790	23,41%
30-34 Tahun	386	264	650	24.83%	490	390	880	26,08%
35-39 Tahun	341	188	529	20.21%	431	246	677	20,07%
40-44 Tahun	238	142	380	14.51%	299	176	475	14,08%
45-49 Tahun	123	79	202	7.72%	155	102	257	7,62%
50-54 Tahun	75	18	93	0.04%	95	22	117	3,47%
>55 Tahun	10	1	11	0.004%	17	15	32	0,95%
Total	1.504	1.114	2.618	100,00%	1.871	1.503	3.374	100,00%

Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja Periode 2022-2023
(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2023				2022			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
<5 Tahun	576	508	1.084	41.41%	657	680	1.337	39,63%
> 5-10 Tahun	370	241	611	23.34%	588	404	992	29,40%
> 10-15 Tahun	299	161	460	17.57%	314	160	474	14,05%
> 15-20 Tahun	133	106	239	9.13%	162	137	299	8,86%
> 20-25 Tahun	77	66	143	5.46%	96	86	182	5,39%
> 25-30 Tahun	35	23	58	2.22%	30	15	45	1,33%
>30 Tahun	14	9	23	0.88%	24	21	45	1,33%
Total	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**	**1.871**	**1.503**	**3.374**	**100,00%**

> **Uraian lengkap terkait pengelolaan dan pengembangan Insan Bank, tersaji lengkap di Bab Fungsi Penunjang Bisnis pada Laporan Tahunan ini**

INFORMASI KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Kepemilikan Saham KB Bank per 1 Januari 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
PEMODAL NASIONAL			
Perorangan Indonesia	75.636	14.316.482.238	21,08%
Koperasi	30	906.878.839	1,33%
Yayasan	2	2.390.800	0,00%
Dana Pensiun	11	11.439.691	0,01%
Asuransi	4	4.358.399	0,00%
Bank	2	19.622.220	0,02%
Perseroan Terbatas	133	3.141.237.366	4,62%
Lembaga Pemerintah	1	53.156.000	0,07%
Reksadana	4	5.400.066	0,00%
SUBTOTAL	**75.823**	**18.461.005.589**	**27,19%**
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	90	74.567.295	0,10%
Badan Usaha Asing	98	49.351.967.294	72,80%
SUBTOTAL	**188**	**49.426.534.589**	**72,81%**
TOTAL	**76.011**	**67.877.540.178**	**100%**

Kepemilikan Saham KB Bank per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
PEMODAL NASIONAL			
Perorangan Indonesia	73.808	18.642.139.484	9,92%
Koperasi	30	905.628.839	0,48%
Yayasan	3	4.621.314	0,00%
Dana Pensiun	9	18.236.042	0,01%
Asuransi	4	11.702.999	0,01%
Bank	2	19.662.220	0,01%
Perseroan Terbatas	145	4.412.078.401	2,35%
Reksadana	4	35.541.900	0,02%
SUBTOTAL	**74.005**	**24.049.611.199**	**12,80%**
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	83	119.260.685	0,06%
Badan Usaha Asing	97	163.718.667.986	87,14%
SUBTOTAL	**180**	**163.837.928.671**	**87,20**
TOTAL	**74.185**	**187.887.539.870**	**100%**

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar KB Bank per 1 Januari 2023

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	67,00%	Badan Usaha Asing
PT Jasa Investindo	1.164.017.200	1,71%	Perseroan Terbatas
Bank of Singapore Limited	947.805.600	1,39%	Badan Usaha Asing
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	678.875.412	1,00%	Perseroan Terbatas
Koperasi Perkayuan APKINDO - MPI (KOPKAP INDO)	460.783.125	0,67%	Koperasi
General Resources Asia Limited	436.038.500	0,64%	Badan Usaha Asing
New Luck Holdings Limited	432.195.995	0,63%	Badan Usaha Asing
JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS	379.082.900	0,55%	Badan Usaha Asing
PPA Investasi Efek (AFS)	360.093.219	0,53%	Perseroan Terbatas
Koperasi Simpan Pinjam Jasa	347.476.000	0,51%	Koperasi
JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	347.224.881	0,51%	Badan Usaha Asing
Nurwati B.	194.290.600	0,28%	Perorangan Indonesia
PT Oentung Karya Bersama	172.279.156	0,25%	Perseroan Terbatas
Alex Lissan	172.150.000	0,25%	Perorangan Indonesia
Heru Budihartono	170.440.900	0,25%	Perorangan Indonesia
Eddy Hutarso	153.647.900	0,22%	Perorangan Indonesia
Diana Sumawi	149.000.000	0,21%	Perorangan Indonesia
JPMCB NA RE-VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY	138.459.459	0,20%	Badan Usaha Asing
Citibank New York S/A Emerging Markets Core Equity Portfolio Of DFA INV Dimension	134.869.788	0,19%	Badan Usaha Asing
PT Berlian Tambang Indonesia	115.518.500	0,17%	Perseroan Terbatas

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar KB Bank per 31 Desember 2023

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	66,88%	Badan Usaha Asing
STIC Eugene Star Holding Inc	31.900.000.000	16,98%	Badan Usaha Asing
PT Jasa Investindo	1.164.017.200	0,62%	Perseroan Terbatas
JPMCB NA RE - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	1.049.160.910	0,56%	Badan Usaha Asing
Bank of Singapore Limited	947.805.600	0,50%	Badan Usaha Asing
JPMCB NA RE-Vanguard Total International Stock Index Fund	939.060.826	0,50%	Badan Usaha Asing

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar KB Bank per 31 Desember 2023

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Status
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	678.875.412	0,35%	Perseroan Terbatas
KB Finansia Multi Finance, PT	540.000.000	0,29%	Perseroan Terbatas
Koperasi Perkayuan APKINDO-MPI (KOPKAP INDO)	460.783.125	0,25%	Koperasi
JPMCB NA RE-Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International	443.073.760	0,24%	Badan Usaha Asing
General Resources Asia Limited	436.038.500	0,23%	Badan Usaha Asing
New Luck Holdings Limited	432.195.995	0,23%	Badan Usaha Asing
Heru Budihartono	370.440.900	0,20%	Perorangan Indonesia
PPA Investasi Efek (AFS)	360.093.219	0,19%	Perseroan Terbatas
KB Valbury Sekuritas, PT	360.000.000	0,19%	Perseroan Terbatas
Koperasi Simpan Pinjam Jasa	347.476.000	0,18%	Koperasi
JPMCB NA RE - Blackrock INST TR CO N A Investment FDS For Employee Benefit Trust	305.864.844	0,16%	Badan Usaha Asing
BNYM RE VANGUARD FTSE ALL-WRLD EX-US SML	279.239.673	0,15%	Badan Usaha Asing
Alex Lissan	217.500.000	0,12%	Perorangan Indonesia
DRH. Allen Marbun	200.338.986	0,11%	Perorangan Indonesia

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM 5% ATAU LEBIH

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih Saham Bank per 1 Januari 2023

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	67,00%	Badan Usaha Asing

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih Saham Bank per 31 Desember 2023

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	66,88%	Badan Usaha Asing
STIC Eugene Star Holdings Inc.	31.900.000.000	16,98%	Badan Usaha Asing

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN KURANG DARI 5%

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Saham Bank per 1 Januari 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Perorangan Indonesia	75,636	14.316.482.238	21,08%
Koperasi	30	906.878.839	1,33%
Yayasan	2	2.390.800	0,00%
Dana Pensiun	11	11.439.691	0,01%
Asuransi	4	4.358.399	0,00%
Bank	2	19.622.220	0,02%
Perseroan Terbatas	133	3.141.237.336	4,62%
Lembaga Pemerintah	1	53.156.000	0,07%
Reksadana	4	5.400.066	0,00%
Sub Total	75,823	18.461.005.589	27,13%
ASING			
Perorangan Asing	90	74.567.295	0,10%
Badan Usaha Asing	97	3,867,105,481	5,80%
Sub total	187	3,941,672,776	5,90%
Total	76,010	22,402,678,365	33%

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Saham Bank per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Perorangan Indonesia	73.808	18.642.139.484	9,92%
Koperasi	30	905.628.839	0,48%
Yayasan	3	4.621.314	0,00%
Dana Pensiun	9	18.236.042	0,01%
Asuransi	4	11.702.999	0,01%
Bank	2	19.662.220	0,01%
Perseroan Terbatas	145	4.412.078.401	2,35%
Reksadana	4	35.541.900	0,02%
Sub Total	74.005	24.049.611.199	12,80%
ASING			
Perorangan Asing	83	119.260.685	0,06%
Badan Usaha Asing	95	6.162.931.035	3,28%
Sub total	178	6.282.191.720	3,34%
Total	74.183	30.331.802.919	16,14%

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank per 1 Januari 2023

Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Helmi Fahrudin	Direktur	174.500	0,0002570
Yohanes Suhardi	Direktur	207.700	0,0003059

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank per 31 Desember 2023

Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	8.500.000	0,00452
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	1.107.000	0,00058
Helmi Fahrudin	Direktur	482.951	0,00025
Yohanes Suhardi	Direktur	574.800	0,00030
Seng Hyup Shin	Direktur	2.300.000	0,00122
Dodi Widjajanto	Direktur	1.000.088	0,00053
Henry Sawali	Direktur	200.000	0,00010

PEMBELIAN/PENJUALAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank. Adapun pada tahun 2023, Bank telah melaporkan 16 (enam belas) transaksi pembelian dan/atau penjualan saham Bank yang dimiliki oleh Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar)	Jumlah Pembelian/ Penjualan (lembar)	Harga Saham (Rp)	Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar)	Tanggal Transaksi	Pelaporan
1	Dodi Widjajanto	Direktur	Pembelian	0	100.000	114	100.000	5 Januari 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 00452/SKPR/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.
2	Dodi Widjajanto	Direktur	Pembelian	100.000	200.000	114	300.000	9 Januari 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 00453/SKPR/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.
3	Henry Sawali	Direktur	Pembelian	0	100.000	122	100.000	1 Februari 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 02124/SKPR/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.
4	Henry Sawali	Direktur	Pembelian	100.000	100.000	123	200.000	1 Februari 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 02124/SKPR/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar)	Jumlah Pembelian/ Penjualan (lembar)	Harga Saham (Rp)	Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar)	Tanggal Transaksi	Pelaporan
5	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Pembelian	0	2.500.000	119	2.500.000	1 Maret 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 03512/SKPR/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.
6	Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Pembelian	0	400.000	112	400.000	6 Maret 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 03552/SKPR/III/2023 tanggal 7 Maret 2023.
7	Seng Hyup Shin	Direktur	Pembelian	0	800.000	102	800.000	15 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06332/SKPR/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
8	Yohanes Suhardi	Direktur	Pembelian	207.700	367.100	100	574.800	23 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06512/SKPR/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.
9	Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Pembelian	400.000	707.000	100	1.107.000	23 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06561/SKPR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
10	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Pembelian	2.500.000	4.419.073	100	6.919.073	25 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06580/SKPR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
11	Seng Hyup Shin	Direktur	Pembelian	800.000	1.414.103	100	2.214.103	25 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06575/SKPR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
12	Helmi Fahrudin	Direktur	Pembelian	174.500	308.451	100	482.951	26 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06579/SKPR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
13	Dodi Widjajanto	Direktur	Pembelian	300.000	530.288	100	830.288	26 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06578/SKPR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
14	Dodi Widjajanto	Direktur	Pembelian	830.288	169.800	101	1.000.088	26 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06578/SKPR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
15	Seng Hyup Shin	Direktur	Pembelian	2.214.103	85.897	100	2.300.000	30 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06777/SKPR/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023.
16	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Pembelian	6.919.073	1.580.927	100	8.500.000	30 Mei 2023	Telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 06730/SKPR/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

Daftar Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

No.	Tanggal	Aksi Korporasi	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor		
						Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
1	30 Juni 2006	*Initial Public Offering*	100	350	843.765.500	5.603.765.550	84.376.550.000	295.317925.000
2	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2007	MSOP	100	370	47.864.000	5.651.629.550	47.864.000.000	17.709.680.000
3	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2007	MSOP	100	370	39.370.500	5.691.000.050	39.370.500.000	14.567.085.000
4	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2008	MSOP	100	370	740.500	5.691.740.550	740.500.000	273.985.000
5	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2008	MSOP	100	370	780.500	5.692.521.050	780.500.000	288.785.000
6	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2009	MSOP	100	370	7.156.500	5.699.677550	7.156.500.000	2.647905.000
7	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2009	MSOP	100	370	1.092.000	5.700.769.550	1.092.000.000	404.040.000
8	26 November 2009	Penawaran Umum Terbatas I	100	415	286.050.768	5.986.820.318	28.605.076.800	118.711.068.720
9	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2010	MSOP	100	370	129.687500	6.116.507.818	129.687500.000	47.984.375.000
10	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2010	MSOP	100	370	16.254.500	6.132.762.318	16.254.500.000	6.014.165.000
11	26 Januari 2011	Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)	100	520	1.787.960.495	7.920.722.813	178.796.049.500	929.739.457.400
12	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2011	MSOP	100	370	12.705.000	7.933.427.813	12.705.000.000	4.700.850.000
13	30 hari bursa sejak tanggal 01 November 2011	MSOP	100	370	269.000	7.933.696.813	269.000.000	99.530.000

Daftar Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

No.	Tanggal	Aksi Korporasi	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor		
						Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
14	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2012	MSOP	100	370	14.346.000	7.948.042.813	14.346.000.000	5.308.020.000
15	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2012	MSOP	100	370	680.500	7.948.723.313	680.500.000	251.785.000
16	30 hari bursa sejak tanggal 2 Januari 2013	MSOP	100	370	352.500	7.949.075.813	352.500.000	130.425.000
17	30 hari bursa sejak tanggal 25 Mei 2013	MSOP	100	370	9.954.500	7.959.030.313	9.954.500.000	3.683.165.000
18	07 Januari 2014	Penawaran Umum Terbatas III (PUT III)	100	660	1.106.252.141	9.065.282.454	110.625.214.100	730.126.413.000
19	27 Juli 2018	Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV	100	570	2.565.288.316	11.651.908.748	256.528.831.600	1.462.214.340.120
20	30 Juli 2020	Penawaran Umum Terbatas (PUT) V	100	180	4.660.763.499	16.312.672.247	466.076.349.900	838.937.429.820
21	21 September 2020	*Private Placement*	100	190	16.360.578.947	32.673.251.194	1.636.057.894.700	3.108.509.999.930
22	2 Desember 2021	Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI	100	200	35.214.288.984	67.887.540.178	7.000.000.000.000	7.042.857.796.800
23	4 Mei 2023	Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII	100	100	119.999.999.692	187.887.539.870	18.999.999.969.200	11.999.999.969.200

Kronologi Penerbitan Saham

Pada bulan Juli 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga jual Rp350 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran Umum Saham Perdana saham Seri B kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAMLK melalui surat No. S-825/BL/2006 tanggal 30 Juni 2006. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006 dan pada saat yang bersamaan sebanyak 99% saham Bank juga dicatatkan. Seluruh saham kelas A sebesar 0,31% dan saham kelas B sebesar 0,69% yang dimiliki oleh Kopelindo dan Kopkapindo masing-masing secara proporsional tidak dicatatkan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 7548/DIR/X/2009 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan sebanyak 286.050.768 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp415 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAMLK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui surat No. S-10319/BL/2009 tanggal 26 November 2009. Pada tanggal 26 November 2009, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan 10 Desember 2009. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp118,71 miliar (untuk 286.050.768 saham biasa kelas B), di mana sebesar Rp62,95 miliar (untuk 151.699.698 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp55,76 miliar (untuk 134.351.070 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog yang bertindak sebagai pembeli siaga (*standby buyer*) dengan proporsi masing-masing sebesar 89,83% dan 10,17%. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini telah diterima oleh Bank pada bulan Desember 2009.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 11754/DIR/XII/2010 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan sebanyak 2.051.366.765 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp520 (nilai penuh) per saham.

Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II melalui surat No. S-771/BL/2011 tanggal 26 Januari 2011. Pada tanggal 26 Januari 2011, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas II dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2011-17 Februari 2011. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp929,74 Miliar (untuk 1.787.960.495 saham biasa kelas B), di mana sebesar Rp921,10 miliar (untuk 1.771.342.921 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp8,6 miliar (untuk 16.617.574 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBJ) dan Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II ini telah diterima oleh Bank pada bulan Februari 2011.

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 13308/DIR/X/2013 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.659.505.614 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp660 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III melalui surat No. S-424/D.04/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pada tanggal 11-13 Desember 2013, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013-7 Januari 2014. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III sebesar Rp730,13 miliar (untuk 1.106.252.141 saham biasa kelas B), dari nilai tersebut sebesar Rp9.29 miliar (untuk 14.076.556 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat, sebesar Rp343.41 miliar (untuk 520.319.150 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan sebesar Rp377,42 miliar (untuk 571.856.435 saham biasa kelas B) dari PT Bosowa Corporindo. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas III ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp587,49 miliar dan hingga tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp730,13 miliar.

Pada tanggal 4 Mei 2018, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 06529/DIR/V/2018 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.565.288.316 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp570 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV melalui surat No. S-92/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas IV dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018-25 Juli 2018. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV sebesar Rp1.462 miliar, dari nilai tersebut sebesar Rp1.460 miliar diperoleh dari KB Kookmin Bank sebagai *standby buyer*, sebesar Rp1,3 miliar diperoleh dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp1.462.214.340.120.

Pada tanggal 24 Oktober 2019, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham yang ditawarkan adalah sebanyakbanyaknya 4.660.763.499 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp838.937.429.820 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI ("PUT V").

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"). Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020, Perseroan telah melakukan PMTHMETD sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp190 (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah PMTHMETD sebesar Rp3.108.509.999.930 (tiga triliun seratus delapan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI.

Pada tanggal 8 November 2021 Bank telah mendapatkan Pernyataan Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PUT VI sendiri telah menerbitkan 35.214.288.984 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (seratus) persaham.

Pada tanggal 30 November 2022 Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Kemudian di tahun 2023, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 02441/DIR/II/2023 tanggal 10 Februari 2023. Bank telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VII sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Akta No. 109/2022), yang pada intinya menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan PUT VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham.

Bank melakukan PUT VII dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Bank atas sebanyak-banyaknya sebesar 119.999.999.692 saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- per saham yang ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). HMETD dibagikan kepada para pemegang saham Bank yang tercatat pada tanggal 17 Mei 2023 di mana setiap pemilik 100.000.000 saham lama Bank memperoleh 176.762.922 HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham. Dengan demikian, Bank memperoleh dana Rp11.999.999.969.200,-.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Nama Obligasi dan Sukuk	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor (Tahun)	Kupon	Mata Uang	Nominal (dalam Rp miliar)	Rating	
							2023	2022
Penerbitan Obligasi	31 Mei 1989	25 Mei 1994	6	-	Rupiah	30	-	-
Obligasi Seri A Bank Bukopin II Tahun 2003	30 Juni 2003	10 Juli 2008	5	-	Rupiah	319	*	*
Obligasi Subordinasi Seri B Bank Bukopin Tahun 2003	30 Juni 2003	10 Juli 2008	10	-	Rupiah	236	*	*
Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003	30 Juni 2003	10 Juli 2008	6	-	Rupiah	45	*	*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012	6 Maret 2012	6 Maret 2019	7	9,25% p.a	Rupiah	1.500	*	*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	30 Juni 2003	30 Juni 2022	7	12% p.a	Rupiah	400	*	*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	28 Februari 2017	28 Februari 2024	7	11% p.a	Rupiah	1.405	idAA (Pefindo)	idAA (Pefindo)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021	9 September 2021	9 September 2024	3	6,25% p.a	Rupiah	1.000	idnAAA (Fitch Ratings)	idnAAA (Fitch Ratings)
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 SERI A	9 September 2021	9 September 2026	5	8% p.a	Rupiah	315	idnAA (Fitch Ratings)	idnAA (Fitch Ratings)
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 SERI B	9 September 2021	9 September 2028	7	8,90% p.a	Rupiah	685	idnAA (Fitch Ratings)	idnAA (Fitch Ratings)

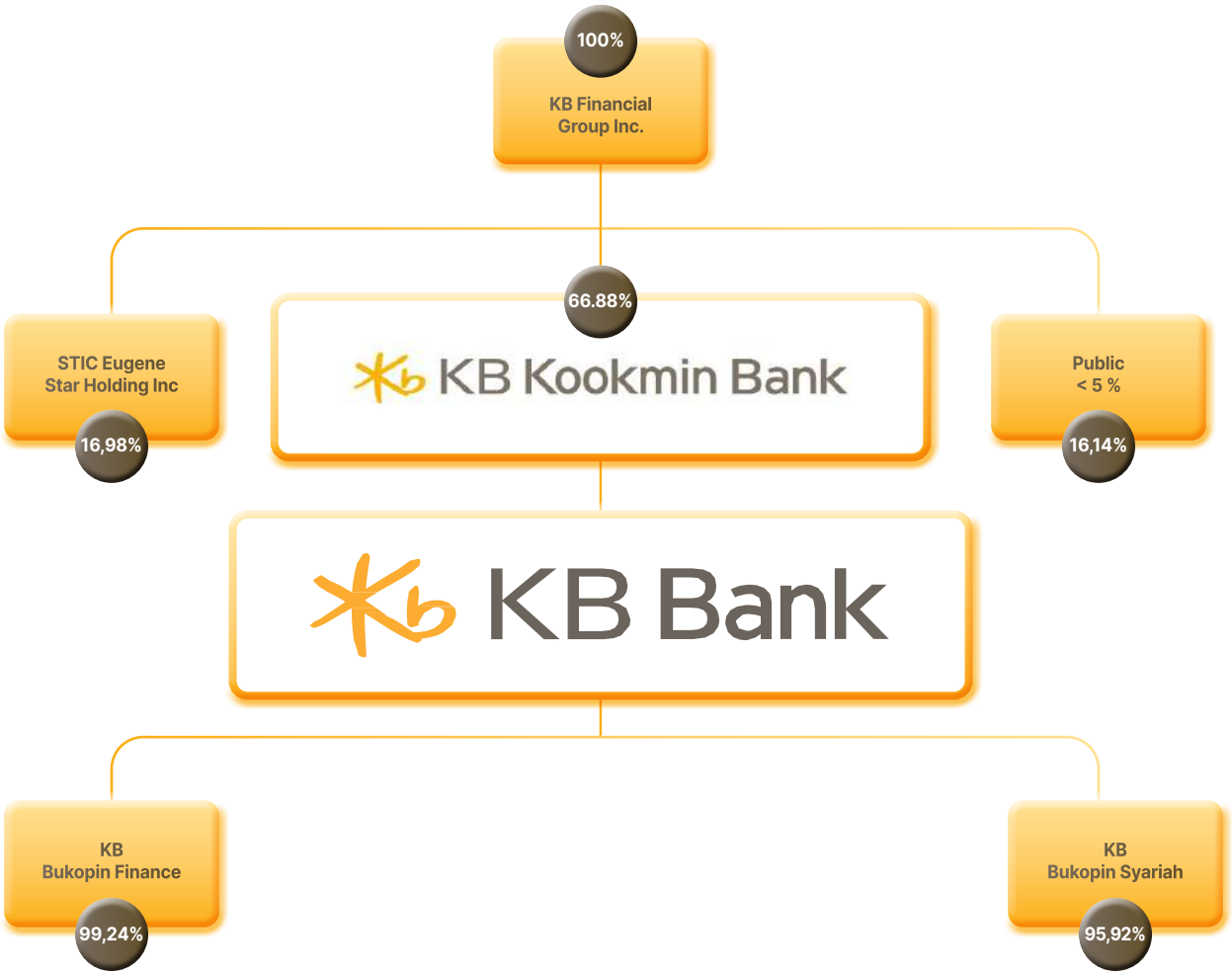
*) Sudah Lunas

SUSPENSI
SAHAM BANK

Sepanjang tahun 2023, tidak ada saham Bank yang ditangguhkan, sehingga informasi terkait hal tersebut tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

STRUKTUR
GRUP BANK

Struktur Grup Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut :



INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali KB Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd., perusahaan perbankan asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group, salah satu grup keuangan terbesar di Korea Selatan. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. Saham KB Financial Group tercatat di Korea Exchange (KRX) sejak 10 Oktober 2008 dan di New York Stock Exchange (NYSE) sejak 29 September 2008. Total aset KB Financial Group per 31 Desember 2019 mencapai KRW789,6 triliun (atau sekitar Rp9.326 triliun). Perusahaan itu telah mengembangkan sayapnya ke pasar global dengan jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, Kookmin melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia.

INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Uraian Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

No.	Nama Entitas Anak	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham Perseroan (%)	Status
1	PT KB Bukopin Finance	1983	1994	Pembiayaan	99,24%	Beroperasi
2	PT Bank KB Bukopin Syariah	1990	2008	Perbankan berbasis prinsip Islami	95,92%	Beroperasi

PROFIL ENTITAS ANAK

PT KB Bukopin Finance

Pendirian PT KB Bukopin Finance (KB Bukopin Finance) tidak terlepas dari sejarah berdirinya PT Leasing Indo Corporation berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 Maret 1983 yang di buat di hadapan Tan A. Sioe, S.H., Notaris di Semarang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5233.HT.01.01. TH83 tanggal 29 Juli 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26, beserta Tambahan No. 432 tanggal 1 April 1986. KB Bukopin Finance memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. 66/KMK.017/1994 tertanggal 5 Maret 1994.

Anggaran Dasar KB Bukopin Finance mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan nama menjadi PT Indo Trans Buana Multi Finance sesuai Akta No. 99 tanggal 3 Mei 1991 dan masuknya PT Bank Bukopin sebagai Pemegang Saham sesuai Akta No. 181 tanggal 26 Desember 1994. Selanjutnya sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Mei 2008 telah disetujui perubahan nama dari PT Indo Trans Buana Multi Finance menjadi PT Bukopin Finance yang tercantum dalam Akta Notaris Amastasia Dau, SH dengan Akta No. 1 tanggal 9 Juni 2008.

Maksud dan tujuan pendirian KB Bukopin Finance sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal yang merujuk kepada POJK No. 29/2014 meliputi; Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna.

Kepemilikan saham KB Bukopin dalam PT Bukopin Finance sebesar 99,24 % dengan susunan kepengurusan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sunaryono
Komisaris: Agustinus Iwan Christanto

Direksi

Direktur Utama : Hendra Gunawan
DIrektur Operasi : Raden Ari Priyadi
Direktur Bisnis : Fajar Satritama

PT Bank KB Bukopin Syariah

PT Bank KB Bukopin Syariah (selanjutnya disebut KB Bukopin Syariah) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang bermula dengan diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank KB Bukopin, Tbk., secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, di mana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) No. 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin di mana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2021 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 96 (sembilan puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

Kepemilikan saham KB Bank dalam PT Bank KB Bukopin Syariah sebesar 95,92% dengan susunan kepengurusan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Mustafa Abubakar
Komisaris: Deddy SA Kodir
Komisaris Independen: Abdul Mu'ti

Direksi
Direktur Utama : Koko Tjatur Rachmadi
DIrektur Bisnis : Agus Suhendro
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Adil Syahputra

Dewan Pengawas Syariah
Ketua : H. Ikhwan Abidin Basri, MA
Anggota : Prof. DR. H. Syamsul Anwar, MA.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor Akuntan Publik (KAP)	
Nama KAP	KAP Mirawati Sensi Idris (Firma anggota dari jaringan Moore Indonesia)
Alamat	Intiland Tower Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta, Jakarta Pusat
Akuntan Publik	Denny Susanto
Periode Penugasan	2023
Jasa Audit yang Diberikan	Audit Laporan Keuangan Konsolidasi
Biaya Jasa Audit	Rp2.430.000.000,-
Jasa Non-Audit yang Diberikan	-

*) pada tanggal 12 April 2024 Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi atas Penggantian Akuntan yang sedang diberikan tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik yaitu Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti adalah AP Denny Sunanto dari KAP Mirawati Sensi Idris (Firma anggota dari jaringan Moore Indonesia), dari sebelumnya adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Akuntan Publik Tjhin Silawati

Biro Administrasi Efek	
Nama Lembaga	Datindo Entrycom
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta Pusat
Periode Penunjukan	Selama tahun 2023
Jasa yang Diberikan	Pencatatan Administrasi Saham

Lembaga Pemeringkat	
Nama Lembaga	Fitch Ratings Indonesia
Alamat	DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav 3-5, RT.11/RW.4, Kuningan, Karet, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Periode Penunjukan	2023 - 2026
Jasa yang Diberikan	Rating Perusahaan

Wali Amanat	
Nama Lembaga	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat	International Banking & Financial Institutions Group Plaza Mandiri Lt 22 Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190
Surat Penunjukan	No.03817/DIR/III/2021
Periode Penunjukan	1 Maret 2021
Jasa yang Diberikan	Wali Amanat PUB Obligasi Senior dan Subordinasi PT Bank Bukopin Tbk Tahun 2021
Biaya Jasa	Rp. 100.000.000

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham	
Nama Lembaga	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, Jakarta Selatan
Periode	Selama tahun 2023
Jasa yang Diberikan	Jasa Perdagangan dan Pencatatan Saham

Konsultan Hukum	
Nama Lembaga	Imran Muntaz & co
Alamat	Office 8 Building 35th Floor Zone G, SCBD Lot 28, Jl. Jend. sudirman kav 52-53, Senayan, Jakarta Selatan
Periode Penunjukan	Selama tahun 2023
Jasa yang Diberikan	Dukungan pelaksanaan aksi korporasi

Notaris	
Nama Lembaga	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Alamat	Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend Sudirman Kav 60 Jakarta Selatan
Periode Penunjukan	Selama tahun 2023
Jasa yang Diberikan	Dukungan pelaksanaan aksi korporasi

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2023

Tanggal	Nama Penghargaan	Kategori	Diberikan Oleh
Nasional			
Juni 27th,2023	Indonesia Top Banking CEO Award 2023	10 TOP Banking CEO 2023	The Iconomic
Agustus 30th, 2023	GRC & Performance Excellence Award 2023	The Best GRC For IT/Digital Transformation 2023 Category - Banking Industries	Business News Indonesia
Agustus 30th, 2023	GRC & Performance Excellence Award 2023	The Best CEO For GRC Excellence 2023 The Best GRC For Corporate Governance & compliance 2023	Business News Indonesia
September 18th, 2023	The 14th IICD Corporate Governance Conference And Award	Top 50 mid Capitalization Public Listed Company	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Desember 5th,2023	Infobank Top CEO 2023	Top 100 CEO 2023 (Woo Yeul Lee)	Infobank

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2023

Nama Sertifikasi	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku	Diberikan oleh
ISO 27001	IT Security Management Systems	Mei 2024	Bureau Veritas Indonesia

INFORMASI PADA *WEBSITE* BANK

Penerapan keterbukaan informasi di Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Perusahaan Publik dan Emiten. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perusahaan diwajibkan memuat informasi yang dipersyaratkan dan senantiasa dimutakhirkan secara berkala dari tahun ke tahun dengan memperhatikan 4 (empat) bagian utama informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan, yaitu:

1. Informasi umum emiten atau perusahaan publik;
2. Informasi bagi pemodal atau *investor*;
3. Informasi tata kelola perusahaan;
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Website Perusahaan biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan, dengan desain penyajian yang menarik, tampil dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdapat logo Perusahaan sebagai identitas dan sistem navigasi yang simpel sehingga memudahkan pengunjungnya dalam mencari informasi. Data dan informasi yang ditampilkan senantiasa diperbaharui setiap kali ada perubahan, selain untuk memenuhi ketentuan peraturan juga menerapkan prinsip GCG.

Dengan tersedianya *website* Bank sebagai sarana keterbukaan informasi tentang Perusahaan, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas serta tentunya Pemegang Saham.
Informasi yang disajikan didalam *website* Bank antara lain:

Beranda	Kategori	Keterangan
Perorangan	Simpanan	Menginformasikan berbagai produk simpanan yang dikeluarkan oleh KB Bank serta keunggulan dari masing-masing produk
	Pinjaman	Memberi informasi akan berbagai kredit/pinjaman bagi para nasabah
	Kartu Kredit	Berbagai jenis produk kartu kredit, promo dan katalog belanja ditampilkan di halaman ini disertai aplikasi secara *online* dan sentra layanan untuk kartu kredit
	Wealth Management	Menampilkan informasi lengkap mengenai berbagai produk investasi dari KB Bank, Reksadana, Bancassurance dan Surat Berharga melalui partner Trimegah.
	Layanan	Menginformasikan fitur dan keunggulan dan kartu debit, informasi lengkap KB Bank Prioritas, E-Banking, Bukopin Kirim Uang, *Safe Deposit* Box Bukopin dan lainnya
Bisnis	Menginformasikan berbagai keunggulan dan kemudahan dalam memiliki produk dan mendapatkan layanan dari KB Bank baik secara langsung maupun *online* tanpa perlu mendatangi kantor/Bank Bukopin di mana pun nasabah berada	
Perorangan	Akan langsung terhubung ke situs Bank Syariah Bukopin yang menampilkan informasi akan profil perusahaan, manajemen, produk dan jasa, laporan dan alamat yang bisa dihubungi	• Situs KB Bank juga menampilkan informasi mengenai Bank KB Bukopin Syariah sebagai anak perusahaan yang berkegiatan perbankan berdasarkan prinsip hukum Islam. Menampilkan berbagai produk dan pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin. • Memberikan informasi mengenai sistem syariah yang dijalankan oleh Bank KB Bukopin Syariah mulai dari Penghimpunan dana, Pembiayaan dan Jasa serta juga menampilkan informasi kepada masyarakat akan perbedaan dari Bank Konvensional dengan Bank Syariah sehingga masyarakat dapat memilih dan menentukan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan • Menampilkan pertanyaan yang paling umum ditanyakan mengenai perbankan syariah dengan disertai jawaban sehingga masyarakat tidak merasa ragu akan produk dan layanan dalam perbankan syariah • Menampilkan semacam kamus akan berbagai istilah dalam perbankan syariah. Menampilkan susunan manajemen, Profil Perusahaan, produk dan layanan jasa berbasis syariah, Lowongan pekerjaan serta berita-berita terkini yang dimiliki Bank KB Bukopin Syariah
Tentang KB Bank	Profil KB Bank	Menampilkan riwayat singkat akan pendirian KB Bank, Visi Misi yang dimiliki, segmen bisnis yang digeluti, Budaya Perusahaan, Informasi tentang anak perusahaan, Berbagai penghargaan yang diterima Bank, informasi lembaga profesi penunjang yang bekerjasama dengan KB Bank, daftar bank koresponden yang dimiliki serta alamat, nomor telepon, email dan cara nasabah dan masyarakat dapat menghubungi Bank selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu
	Manajemen Perusahaan	Menampilkan foto dan informasi singkat mengenai Dewan Komisaris, Direksi, pejabat Komite, Sekretaris Perusahaan serta struktur organisasi terkini yang dimiliki oleh KB Bank.
	Hubungan Investor	• Memberikan informasi singkat mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, RUPS yang pernah diselenggarakan, riwayat aksi korporasi yang pernah dilakukan, informasi akan saham dan obligasi Bank • Selain hal-hal tersebut, halaman ini juga menampilkan berbagai informasi tambahan sebagai bagian dari keterbukaan KB Bank terhadap masyarakat akan prospektus, *public expose*, kalender acara untuk *investor* dan nomor kontak yang bisa dihubungi bila ada yang berminat menjadi investor di KB Bank

Beranda	Kategori	Keterangan
	Tanggung Jawab Sosial	Situs ini menampilkan kebijakan perusahaan akan tanggung jawab sosial yang dimiliki serta pelaksanaannya. Foto serta informasi singkat ditampilkan agar masyarakat dan para *stakeholder* mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KB Bank sebagai bukti ketaatan peraturan dan tanggung jawab kepada *stakeholder* dan lingkungan sosial kemasyarakatan
	Tata Kelola Perusahaan	Menginformasikan mengenai penerapan GCG Bank disertai dengan berbagai pedoman dan kebijakan yang dimiliki sebagai bentuk komitmen Bank untuk senantiasa meningkatkan penerapan GCG dari tahun ke tahun untuk menjadi semakin baik
	Info Terbaru	Halaman ini menampilkan informasi terkini dari KB Bank akan nilai kurs mata uang, promo yang sedang digelar, suku bunga berita singkat dan pengumuman dari KB Bank
	Jaringan	Memberikan informasi mengenai alamat kantor dan lokasi ATM KB KB Bank di seluruh Indonesia
Karir	Info Karir dan Lowongan Pekerjaan	Informasi mengenai lowongan yang sedang dibuka di KB Bank sehingga masyarakat dapat mengakses langsung
E-Form CS dan Teller	Menghubungkan langsung ke situs elektronik *form* KB Bank	Informasi mengenai lowongan yang sedang dibuka di KB Bank sehingga masyarakat dapat mengakses langsung

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Dewan Komisaris				
Tippy Joesoef	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) Audit *Skill*	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Hae Wang Lee	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT *Skill*)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Stephen Liestyo	*Technical Competency.*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta, 21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp(*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) (Audit *Skill*)	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Nanang Supriyatno	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Eugene K Galbraith	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Jerry Marmen	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta, 21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Nam Hoon Cho	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Sukriansyah	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Direksi				
Dodi Widjajanto	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Technical Competency	*Workshop* Fgd – Sme(*Credit Skill*)	Jakarta, 20/10/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Han Jung Ho	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Certification Competency	Smr Lv V Dir (Pembekalan) (*Risk Management Skill*)	Jakarta, 21/02/2023	Bsmr
	Certification Competency	Smr Lv V Dir (Ujian)) (*Risk Management Skill*)	Jakarta, 24/02/2023	Bsmr
	Soft Competency	Kursus B. Indonesia (*Self Development Skill*)	Jakarta, 1-31/02/2023	Bintera Global Indonesia
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
Helmi Fahrudin	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Workshop* Serikat Pekerja Dg Dpc (*Self Development Skill*)	Jakarta, 10/02/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Certification Competency	*Refreshment* Smr Level 1-5 (*Risk Management Skill*)	Jakarta, 04-06/09/2023	Bsmr
	Technical Competency	*Workshop* Rbb (*Business Development Skill*)	Jakarta, 09/09/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	Perpanjangan Keanggotaan Iai (*Operation Skill*)	Jakarta, 31/01/2023	Iai
	Technical Competency	*Workshop* Bisnis *Operation* & Sinergi Reg I & Ii(*Operation Skill*)	Jakarta, 06/01/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Bisnis *Operation* & Sinergi Reg Iv(*Operation Skill*)	Jakarta, 09/01/2023	Internal House (Diklat
Henry Sawali	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Fgd – Sme(*Credit Skill*)	Jakarta. 20/10/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Robby Mondong	*Technical Competency*	*Workshop Strategic* Th 2023 (*HR Skill*)	Jakarta. 01/02/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Rbb (*Business Development Skill*)	Jakarta, 09/09/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Workshop* Bisnis *Operation* & Sinergi Reg I & Ii(*Operation Skill*)	Jakarta, 06/01/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Bisnis *Operation* & Sinergi Reg IV (*Operation Skill*)	Jakarta, 09/01/2023	Internal House (Diklat)
Shin Seng Hyup	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
Woo Yeoul Lee	*Technical Competency*	*Course* Bahasa *For Ceo (Self Development Skill)*	Jakarta, 01/01/2023-31/03/2023	Bintera Global Indonesia
	Technical Competency	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Workshop* Serikat Pekerja Dg Dpc (*Self Development Skill*)	Jakarta, 10/02/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta, 21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill)*	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
Yohanes Suhardi	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Certification Competency	*Refreshment* Smr Level 1-5 (*Risk Management Skill*)	Jakarta, 04-06/09/2023	Bsmr
	Technical Competency	*Workshop* Rbb (*Business Development Skill*)	Jakarta, 09/09/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Fgd – Sme(*Credit Skill*)	Jakarta. 20/10/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Young Eun Moon	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Certification Competency	Smr Lv V Dir (Pembekalan) (*Risk Management Skill*)	Jakarta, 21/02/2023	Bsmr
	Certification Competency	Smr Lv V Dir (Ujian)	Jakarta, 24/02/2023	Bsmr
	Soft Competency	Kursus B. Indonesia (*Self Development Skill*)	Jakarta, 1-31/02/2023	Bintera Global Indonesia
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
Komite Audit				
Stephen Liestyo	*Technical Competency.*	Kick Off Shine Project (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarat, 21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) (Audit *Skill*)	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Nanang Supriyatno	*Managerial Competency*	*Workshop Board of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
Eugene K Galbraith	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Ir.Dewi A.Sah Bandar,Mm	*Managerial Competency*	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Jacobus Sindu Adisuwono	*Technical Competency*	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta,21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Komite Remunerasi Dan Nominasi				
Hae Wang Lee/ Commissioner	*Technical Competency*	Kick Off Shine Project (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Tippy Joesoef/ Commissioner	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) Audit *Skill*	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Jerry Marmen	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta, 21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner (Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Sukriansyah S. Latief	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner (Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Nanang Supriyatno/ Commissioner	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner (Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Nam Hoon Cho	*Technical Competency*	Kick Off Shine Project (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Gamaridha Akhirul Ar	*Technical Competency*	*Workshop* Serikat Pekerja Dg Dpc (*Self Development Skill*)	Jakarta, 10/02/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop Strategic* Th 2023 (*HR Skill*)	Jakarta, 1/02/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Profile Assessment (Self Development Skill)*	Jakarta, 16/03/2023	And
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop Collective Labour (Self Development Skill)*	Jakarta, 5/07/2023	Internal House (Diklat)
	Certification Competency	*Management* Umum Dana Pensiun (*HR Skill*)	Jakarta, 15/06/2023	Asosiasi Dapen Indonesia
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* Rbb (*Business Development Skill*)	Jakarta,9/09/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop Human Capital* (*HC Skill*)	Jakarta,28/10/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (*Compliance Skill*)	Jakarta,12/10/2023	Pt.Xynexis International
Komite Pemantau Risiko				
Tippy Joesoef/ Commissioner	*Technical Competency*	Kick Off Shine Project (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) Audit *Skill*	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board of Commissioner (Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Stephen Liestyo	*Technical Competency.*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta,22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta,21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta,10/10/2023	Fkdkp
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) (Audit *Skill*)	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Jerry Marmen	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta,22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	Wks *Profile & Organization* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta,21/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Nam Hoon Cho	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Rahardja Alimhamzah	*Managerial Competency*	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Togar Natigor Siregar	*Technical Competency*	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Komite Tata Kelola Terintegrasi				
Sukriansyah S. Latief	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,8/11/2023	Internal House (Diklat)
Tippy Joesoef/ Commissioner	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Fun Walk* Kb Bukopin (*Self Development Skill*)	Jakarta, 11/03/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) Audit *Skill*	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Eugene K Galbraith/ Commissioner	*Managerial Competency*	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)
Hae Wang Lee/ Commissioner	*Technical Competency*	*Kick Off Shine Project* (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Managerial Competency	*Workshop* BoC dan BoD *Sustainable Transformation (Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner(Business Development Skill)*	Jakarta,08/11/2023	Internal House (Diklat)

Nama Dan Jabatan	Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Sekretaris Perusahaan				
Yocky Eko Wicaksono	*Technical Competency*	Kick Off Shine Project (IT Skill)	Jakarta, 22/02/2023	Dxc
	Technical Competency	*Workshop Annual Report (Corsec) (Ga & Administration Skill)*	Jakarta, 03-04/04/2023	Inkmark
	Managerial Competency	*Workshop Boc Dan Bod Sustainable Transformation(Business Development Skill)*	Jakarta,18/07/2023	Internal House (Diklat)
	Certification Competency	*Refreshment Smr Level 1-5 (Risk Management Skill)*	Jakarta, 04-06/09/2023	Bsmr
	Technical Competency	*Webinar* Fkdkp (*Compliance Skill*)	Jakarta, 10/10/2023	Fkdkp
	Technical Competency	*Training Budget Expense Pic Allocation* (IT Skill)	Jakarta, 26/10/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Training Ngbs-Be Budget Trf & App Batch* 2 25 Oktober (*IT Skill*)	Jakarta, 26/10/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Training* Icofr (*Financial Skill*)	Jakarta, 21/11/2023	Pwc, Deloitte & Kookmin
	Managerial Competency	*Workshop Board Of Commissioner (Business Development Skill)*	Jakarta, 08/11/2023	Internal House (Diklat)
Kepala Satuan Kerja Audit *Intern*				
Roby Endrama Purba	*Technical Competency*	*Sharing Session* Skai (Audit *Skill*)	Jakarta, 11/08/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Bisnis *Operation* & Sinergi Reg Iv(*Operation Skill*)	Jakarta, 09/01/2023	Internal House (Diklat
	Technical Competency	*Sharing Session Compliance & Risk Group*	Jakarta, 15/06/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Skai	Jakarta,09/06/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Sharing Session* Skai Oktober	Jakarta, 06/10/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*E Learning Anti Fraud* Th 2023 (*Risk Management Skill*)	Januari, 23/10/2023 - 03/11/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*E Learning* Apu Ppt Tahun 2023(Compliance Skill)	Jakarta, 23/10/2023 - 03/11/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	*Workshop* Skai (Rka) Audit *Skill*	Jakarta,10/11/2023	Internal House (Diklat)
	Technical Competency	Smnr Nasional Internal Audit 2023	Jakarta, 06/12/2023 - 07/12/2023	Ypia


KB Bank



4

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan



TINJAUAN UMUM

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan dan peluang dalam dinamika ekonomi global dan nasional. Pada skala global, beberapa negara, terutama Uni Eropa dan Tiongkok, mengalami moderasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong adopsi kebijakan moneter yang lebih akomodatif untuk mengatasi perubahan ini. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak secara global. Amerika Serikat (AS) masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya excess saving yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19, dan Eropa kondisi ekonominya masih melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh core inflation yang masih tinggi.

Di sisi, lain prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah seperti yang disampaikan oleh lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Sementara berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Keuangan pada 15 Desember 2023, tercatat bahwa dari sisi kegiatan manufaktur terlihat 69,6% negara berada di zona kontraksi seperti AS, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sementara 30% lainnya berada di zona ekspansi termasuk Indonesia.

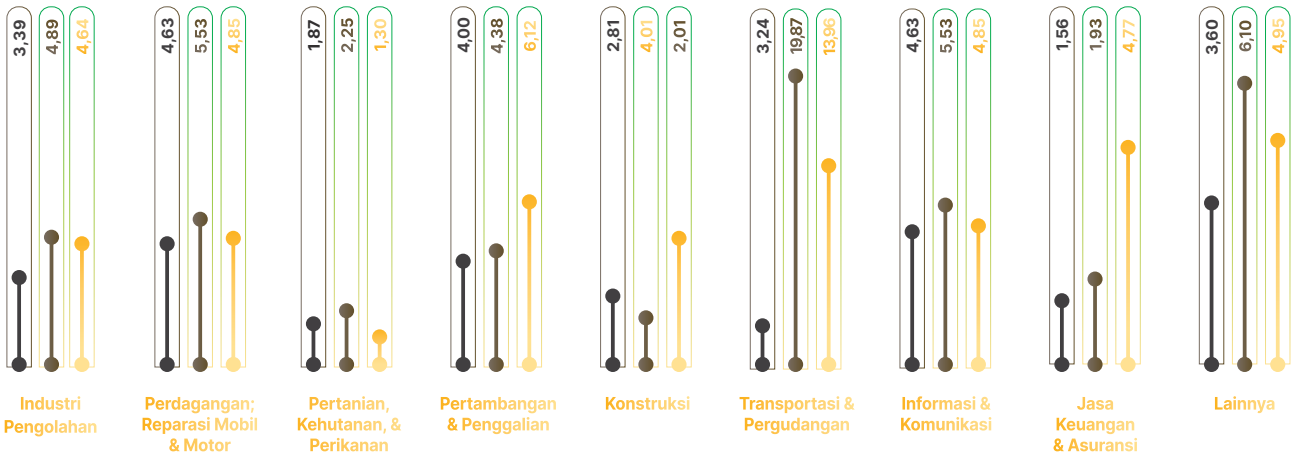
Selain itu, pasar masih mencermati perkembangan geopolitik ke depan, seperti eskalasi ketegangan di laut merah imbas dari konflik Palestina-Israel, serta penyelenggaraan pemilihan umum yang mencakup 50% populasi dunia terutama di beberapa negara utama seperti AS, Uni Eropa, India, dan Taiwan.

Secara umum sentimen di pasar keuangan gobal cenderung positif pada Desember 2023 didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) dan narasi soft landing di AS, sehingga mendorong kembalinya aliran dana masuk ke Emerging Markets (EM) dan penguatan pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan Indonesia. Volatilitas baik di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar juga terpantau menurun. Hal ini mencerminkan stabilitas yang mulai menguat di pasar keuangan global.

Meskipun demikian, situasi geopolitik yang kompleks dan perubahan cepat dalam kebijakan moneter masih menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar. Dalam menghadapi tahun-tahun mendatang, pemantauan terhadap perkembangan ini akan menjadi kunci dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang di pasar global.

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Di tengah disrupsi lingkungan global di sepanjang 2023, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia relatif tangguh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.



Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,67%; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,94%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,53%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,52%; serta Konstruksi sebesar 9,92%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,58%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat didukung oleh sejumlah faktor. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy), dipengaruhi oleh mobilitas yang meningkat, daya beli yang stabil, dan tingginya keyakinan konsumen. Sementara itu, pertumbuhan investasi mencapai 5,77% (yoy), didorong oleh pembangunan infrastruktur Pemerintah. Meski ekspor barang mengalami kontraksi sebesar 4,26% (yoy), ekspor jasa, terutama dari sektor pariwisata, tetap tumbuh kuat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang tetap solid terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Di sisi lain, penguatan nilai tukar Rupiah berlanjut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Data Bank Indonesia mencatat nilai tukar Rupiah pada 20 Desember 2023 menguat secara rata-rata sebesar 0,44% dibandingkan dengan perkembangan pada November 2023. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah menguat 0,37% dibandingkan dengan level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan Peso Filipina, Rupee India, dan Baht Thailand yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,05%, 0,53%, dan 0,85%. Di samping kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, berlanjutnya apresiasi nilai tukar Rupiah didorong oleh masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta tetap positifnya prospek ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia tetap akan mewaspadai sejumlah risiko yang mungkin muncul dan memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Strategi operasi moneter pro-market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI dioptimalkan guna meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran masuk modal asing dari luar negeri. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Meskipun terdapat tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan moneter di beberapa negara, pasar keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang positif. Penurunan volatilitas di pasar saham, surat utang, dan nilai tukar mencerminkan stabilitas yang semakin kuat. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang solid untuk tahun 2023, Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan global, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dunia.

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN

Seperti dikutip dari Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV yang dirilis Bank Indonesia, menyatakan bahwa kredit perbankan pada 2023 tetap baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada 2023 mencapai 10,38% (yoy), berada dalam kisaran atas prakiraan Bank Indonesia 9-11%. Dari sisi permintaan, peningkatan kredit tersebut sejalan dengan kinerja positif korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didorong oleh risk appetite perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang terjaga baik, termasuk dampak positif dari kebijakan likuiditas Bank Indonesia seperti KLM dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja, masing-masing sebesar 12,26% dan 10,05%.

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kinerja sektor Pengangkutan, Jasa Sosial, Perdagangan, dan Listrik, Gas, Air. Pembiayaan syariah pada Desember 2023 juga tumbuh sebesar 15,80% (yoy), sementara pertumbuhan kredit UMKM mencapai 8,03% (yoy). Ke depan, pertumbuhan kredit diprakirakan meningkat dalam kisaran 10-12% pada 2024, sejalan dengan tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Indonesia akan terus menjaga efektivitas implementasi KLM dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga dan perbankan, serta pelaku usaha untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan pada sektor-sektor berdaya ungkit besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia juga menyatakan bahwa ketahanan perbankan tetap kuat. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% pada November 2023. Likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Desember 2023 yang terjaga tinggi pada 28,73%. Terjaganya likuiditas perbankan sejalan dengan masih tingginya penempatan perbankan pada surat berharga yang tergolong likuid dan implementasi KLM. Kapasitas likuiditas perbankan (lending capacity) juga didukung oleh penguatan strategi operasi moneter yang pro-market melalui antara lain perdagangan SRBI di pasar sekunder, yang memberikan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas. Sementara itu, rasio kredit bermasalah perbankan (Non-Performing Loan/NPL) tercatat rendah, sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto).

Secara keseluruhan, ketahanan perbankan yang kuat tersebut didukung oleh kemampuan bayar korporasi dan rumah tangga yang tetap baik, sejalan dengan kinerja korporasi dan ekspektasi penghasilan rumah tangga yang terus membaik. Hasil stress-test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian ke depan. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko tersebut yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada tahun 2023, nilai transaksi digital banking tercatat Rp58.478,24 triliun atau tumbuh sebesar 13,48% (yoy) dan diproyeksikan meningkat 9,11% (yoy) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada tahun 2024. Sementara nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 43,45% (yoy) sehingga mencapai Rp835,84 triliun dan diproyeksikan meningkat 25,77% (yoy) hingga mencapai Rp1.051,24 triliun pada tahun 2024. Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 130,01% (yoy) dan mencapai Rp229,96 triliun, dengan jumlah pengguna 45,78 juta dan jumlah merchant 30,41 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp8.178,69 triliun atau turun sebesar 0,81% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2023 meningkat 7,33% (yoy) sehingga menjadi Rp1.101,75 triliun.

Kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik didukung kondisi likuiditas yang memadai. Transaksi BI-FAST dan BI-Real Time Gross Settlement (RTGS) terus meningkat dimana BI-FAST tercatat masih menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan transfer dana. Stabilitas sistem pembayaran yang baik tecermin dari tidak terdapatnya reject transaksi BI-RTGS dan BI-Scripless Securities Settlement System (SSSS) yang terkait dengan permasalahan likuiditas. SPBI juga berjalan baik karena didukung oleh kelancaran sisi operasional, tecermin dari system availability yang tetap terjaga 100%. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang Rupiah ke daerah Terluar, Terdepan, Terpencil (3T) serta kegiatan Kas Keliling, Kas Titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

POSISI KB BANK DI INDUSTRI PERBANKAN

Aspirasi Bank KB Bank yaitu "Menjadi Lembaga Keuangan Utama di Indonesia". KB Bank bercita-cita untuk menjadi salah satu Bank paling sukses dan dapat menciptakan nilai tambah di Indonesia diantaranya dengan pertumbuhan kredit yang sehat dan struktur keuangan yang profitable, menjadi Bank pemain digital yang terkemuka untuk segmen Ritel dan UKM, serta menjadi Bank pilihan utama untuk kredit segmen wholesale dan segmen bisnis korean link. KB Bank senantiasa mempertahankan posisinya di industi perbankan Indonesia sebagaimana uraian di bawah ini:

Posisi KB Bank Berdasarkan Kinerja di Industri Perbankan Indonesia

(Dalam Miliar Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	KB BANK	INDUSTRI
Indikator utama (Growth)		
Aset	84.307	11.765.838
Kredit	49.419	7.186.935
DPK	44.789	8.457.929
1. Giro	3.178	2.662.550
2. Tabungan	6.873	2.669.183
3. Deposito	34.738	3.126.196
Ekuitas	14.110	1.759.622
Laba Sebelum Pajak	(6.787)	304.445
Laba Setelah Pajak	(6.056)	243.326
Pendapatan Bunga	4.862	977.001
Beban Bunga	(4.053)	447.336
Rasio Keuangan (Posisi)		
NIM	0,78%	4,81%
ROA	-7,71%	2,74%
CASA	23,39%	63,04%
CAR	27,05%	27,65%
LDR	113,18%	83,83%
BOPO	223,28%	78,92%
NPL gross	9,70%	2,19%

Posisi KB Bank Terhadap Peers Group

Peringkat	Aset	Kredit	DPK	Laba Setelah Pajak
	Bank	Bank	Bank	Bank
1	Bank	KB Bank	Bank	Bank
2	KB Bank	Bank	Bank	Bank
3	Bank	Bank	Bank	Bank
4	Bank	Bank	KB Bank	Bank
5	Bank	Bank	Bank	Bank
6	Bank	Bank	Bank	Bank
7	Bank	Bank	Bank	Bank
8	Bank	Bank	Bank	Bank
9	Bank	Bank	Bank	KB Bank

STRATEGI BANK 2023

Bank telah menyusun rencana bisnis Tahun 2023-2025 yang telah dilakukan revisi pada Juni 2023, namun demikian dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya fundamental Bank, maka Bank perlu bertindak secara aktif menanggapi krisis yang akan datang. Apabila Bank tidak dapat merespon dengan cepat dan tepat, maka terdapat risiko "Bank Tidak Dapat Bertahan dan Terganggu Kelangsungan Usahanya". Menindaklanjuti hal tersebut, Bank menetapkan fokus utamanya pada langkah aktif untuk menyelesaikan akar permasalahan internal dan krisis eksternal melalui "Fundamental Deep Change", melalui:

1. Pengelolaan modal dengan memaksimalkan pemulihan kredit bermasalah,
2. Membangun Landasan untuk Pertumbuhan Masa Depan yang Berkelanjutan
3. Fokus pada Bisnis Inti dan Peningkatan Profitabilitas
4. Inovasi dan Perubahan Organisasi/Manpower/Outlet

Untuk mencapai target tahun 2023, telah ditetapkan langkah-langkah strategis yang dibagi dalam 13 (tiga belas) strategi agenda dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Adapun tajuk strategik agenda tahun 2023 adalah "BISA" cerminan motivasi insan KB Bank untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan dengan tujuan meraih kemenangan bersama melalui 4 pilar yaitu Boost Sales Performance, Innovation for Turnaround, Strengthening the quality of Assets, Advanced IT & Digital.

Bank memiliki rencana transformasi yang terstruktur dalam tiga tahap sesuai proyeksi waktu yang telah ditetapkan. Fase pertama (2022-2023) bertujuan untuk membangun kembali fondasi bisnis dengan fokus pada pertumbuhan aset yang berkualitas. Pada fase kedua (2024-2025), Bank akan memasuki tahap stabilitas yang lebih kokoh dan akan menitikberatkan pada segmen bisnis utamanya, yaitu ritel dan UMKM. Fase ketiga (2026-dst) menargetkan Bank akan menjadi institusi keuangan pilihan di Indonesia secara keseluruhan.

Pada rencana bisnis tahun 2023, Bank akan memberi fokus pada pembangunan citra merek untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat menurun akibat isu negatif pada tahun 2020. Bank juga akan menegaskan kepada masyarakat bahwa KB Bank kembali siap menjadi mitra bisnis yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Selain memperkuat posisinya di pasar domestik, Bank akan mengoptimalkan jaringan internasional melalui Korean Desk KB Kookmin untuk menarik perusahaan-perusahaan Korea yang berminat berinvestasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjadikan KB Bank sebagai mitra utama dalam menyediakan layanan keuangan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan perubahan rencana bisnis tersebut, Bank berkomitmen untuk terus melakukan perubahan yaitu salah satunya adalah dengan fokus pada "improve the performance" pada peningkatan kinerja di semua bidang sebagai bagian dari upaya meningkatkan PPOP yang diproyeksikan masih negatif pada tahun 2023, dengan harapan akan membaik di tahun 2024. Adapun upaya improve the performance akan dilakukan melalui:

1. Pertumbuhan Kredit: Bank akan meningkatkan target pertumbuhan kredit baru di tahun 2023 menjadi Rp10 Triliun, dengan penekanan pada kredit wholesale sebagai pendorong utama (62%), diikuti oleh kredit ritel (25%) dan kredit UMKM (13%). Bank akan memanfaatkan sinergi antar segmen bisnis untuk membangun ekosistem bisnis yang optimal, dengan fokus pada kualitas kredit.
2. Peningkatan Dana: Bank akan mengarahkan pertumbuhan pada peningkatan CASA (Current Account Savings Account) dengan target pertumbuhan sebesar Rp11,38 Triliun di tahun 2023. Program dana ini bertujuan untuk menarik nasabah baru yang berkualitas, dengan total DPK ditargetkan mencapai Rp47,9 Triliun pada Desember 2023.
3. Reduksi Biaya: Bank akan fokus pada pengurangan biaya terkait optimalisasi outlet, dengan penutupan sejumlah cabang yang mengalami PPOP negatif. Sebanyak 36% dari cabang akan ditutup, termasuk kantor cabang utama. Selain itu, Bank akan melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap, dengan sekitar 900 karyawan terdampak dari inisiatif ini, yang mewakili 27% dari total karyawan per Desember 2022.

4. Bank menyadari pentingnya memperhatikan berbagai aspek operasional, bisnis, nasabah, dan reputasi dalam pelaksanaan inisiatif ini. Meskipun menyadari dampak yang mungkin terjadi, Bank yakin langkah ini penting untuk memastikan kelangsungan usahanya. Seluruh manajemen berkomitmen untuk menjalankan proses rencana strategis ini dengan bijaksana.

Bank berkomitmen pada penyesuaian rencana bisnis dengan fokus pada peningkatan kualitas aset, untuk mencapai standar industri perbankan nasional. Dalam menghadapi masalah kredit bermasalah yang signifikan, Bank akan mengambil langkah-langkah perbaikan yang mencakup:

1. Penguatan Organisasi SAM: Bank akan memperkuat organisasi Special Asset Management (SAM) yang akan difokuskan pada penanganan kredit bermasalah melalui upaya koleksi yang intensif.
2. Penyehatan Melalui Restrukturisasi: Bank akan melakukan restrukturisasi kredit yang bermasalah, mengelola DPD (Days Past Due), mempercepat penyelesaian melalui litigasi/non-litigasi, Asset Yield Deterioration Allowance (AYDA), dan Write Off.
3. Target Kinerja: Bank menargetkan untuk menurunkan rasio NPL Net menjadi <4% dan NPL Gross <7,99% pada tahun 2023, sehingga dapat bersaing dengan bank lain. Untuk mencapai target ini, Bank akan mengimplementasikan Asset Backed Securities (ABS) dan Sukuk, serta melakukan optimalisasi koleksi LAR, disiplin manajemen DPD, serta offset dan penjualan AYDA secara berkelanjutan.

Bank juga memperhatikan strategi permodalan yang tepat. Pada tahun 2023, Bank mengoptimalkan modal melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII, mengumpulkan dana sebesar Rp11,99 triliun. Hal ini diperlukan karena modal inti Bank terus menurun akibat penyelesaian kredit bermasalah dan dampak berakhirnya stimulus Covid-19. Penggunaan modal difokuskan pada mendukung anak perusahaan, dengan rencana menyuntikkan modal sebesar Rp1,3 triliun ke Bank KB Bukopin Syariah dan KB Bukopin Finance. Bank memandang penting untuk mengelola modal dengan hati-hati untuk ekspansi bisnis dan pertumbuhan organik. Perbaikan kualitas kredit akan tercermin dalam rasio keuangan, terutama melalui penjualan kredit melalui skema ABS dan Sukuk, perbaikan struktur biaya dana DPK, dan peningkatan efisiensi biaya melalui transparansi biaya. Dengan demikian, Bank berharap meningkatkan profitabilitas, tercermin dari rasio NIM (Net Interest Margin).

ARAH KEBIJAKAN BANK

Bank memiliki visi menjadi "Lembaga Keuangan Pilihan Utama di Indonesia", untuk mencapai visi tersebut KB Kookmin sebagai pemegang saham pengendali mendukung transformasi Bank untuk mencapai aspirasi tersebut. Dukungan tidak hanya dalam aspek finansial namun juga dari sisi bisnis, IT dan aspek lainnya. Bank memahami untuk mencapai visi tersebut perlu dibangun pondasi yang kuat dengan komitmen perubahan dari semua insan di KB Bank, dan waktu yang dibutuhkan tidaklah singkat. Berikut adalah target jangka pendek dan menengah serta target jangka panjang yang ditetapkan untuk mencapai aspirasi arah dan tujuan perusahaan:

Short/ Mid Term Target	Long Term Target
Win back market trust Quick clean up bad asset	Transformation into a high profitable Bank
Revisi Rencana Bisnis PT Bank KB Bukopin Tbk Tahun 2023~2025	
Build digital infra through NGBS Scale up business capacity and capabilities Aggressive cost reduction	Build KB Financial Comprehensive Financial Platform Top Bank in asset quality by complating normalization of bad loan

Bank telah menetapkan tujuan jangka pendek dan menengah untuk membangun kembali dasar bisnis melalui pertumbuhan aset berkualitas dan perbaikan infrastruktur teknologi. Fokus pada pengembangan aspek digital untuk meningkatkan daya jual dengan serangkaian produk digital yang memenuhi kebutuhan nasabah.

Dalam aspek kredit, Bank akan lebih fokus pada segmen bisnis utama, termasuk corporate/wholesale sebagai driver utama, serta segmen ritel dan UMKM yang terhubung. Pertumbuhan kredit akan difokuskan pada segment wholesale/Korean Desk sebagai fondasi untuk membangun ekosistem bisnis yang stabil di masa depan. Langkah-langkah dan arah kebijakan Bank dibagi menjadi 3 fase yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Fase 1 (2022 - 2023) – Rebuild Foundations:

1. Analisis Root Cause: Bank memprioritaskan pertumbuhan pada bisnis yang telah dipahami dan memberikan dampak besar melalui identifikasi melalui analisis penyebab akar masalah. Area-area strategis yang menjadi prioritas untuk perbaikan segera diidentifikasi, termasuk tata kelola, sistem, prosedur, dan strategi bisnis.
2. Kembalikan Kepercayaan Pasar: Langkah strategis Bank adalah mengembalikan kepercayaan pasar untuk mencapai percepatan pertumbuhan khususnya pada bisnis yang berkualitas baik, meskipun dengan margin yang mungkin lebih rendah.
3. Perbaikan Kualitas Aset: Bank meyakini bahwa penyelesaian kredit bermasalah akan menurunkan total aset Bank, namun menganggap bahwa menjadi bank yang «kecil tapi kuat» merupakan awal dari kebangkitan di masa depan.
4. Penguatan Modal: Rencana penguatan modal dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis baru dan sebagai buffer dari langkah-langkah strategis dalam percepatan perbaikan kualitas aset melalui rencana aksi korporasi di tahun 2023.
5. Dukungan Infrastruktur TI dan Digital: Untuk mendukung percepatan bisnis, Bank memperkuat digitalisasi melalui digital channel yang sudah ada. Bank juga berencana untuk memperkuat sistem TI untuk membentuk lingkungan digital dan memperkuat posisi di industri perbankan Indonesia.

Fase 2 (2024-2025) – Focused Bank:

1. Peningkatan Fokus Bisnis: Bank mengarahkan fokusnya pada pertumbuhan bisnis «good Bank» di segmen MSME dan Retail setelah melewati fase rebuild. Transformasi digital mendukung pertumbuhan agresif pada segmen retail dengan proses yang lebih efisien. Bank berencana mengembangkan produk Retail sebagai mesin pertumbuhan di masa depan.
2. Implementasi Proses Bisnis: Proses bisnis yang terstandarisasi dan terpusat akan diimplementasikan melalui digitalisasi Project SHINE dan Business Process Restructuring (BPR).
3. Membangun Ekosistem Digital: Bank memiliki target jangka menengah untuk membangun ekosistem berbasis platform digital setelah mempersiapkan diferensiasi daya saingnya. Optimalisasi pengelolaan risiko dan pemanfaatan proses digital akan menjadi fokus untuk meningkatkan manajemen risiko. Integritas dari seluruh elemen internal Bank diperlukan untuk mencapai aspirasi yang ditetapkan.

Tujuan Jangka Panjang:

Aspirasi KB Bank adalah menjadi Lembaga Keuangan Utama di Indonesia, dengan cita-cita untuk mengubah KB Bank menjadi salah satu bank yang paling sukses dan menciptakan nilai tambah di Indonesia. Fokus utama mencakup:

1. Pertumbuhan Kredit Sehat: Bank berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan kredit yang sehat dan struktur keuangan yang menguntungkan.
2. Pemimpin Digital di Segmen Ritel dan UKM: Bank bertujuan untuk menjadi bank pemimpin dalam layanan digital untuk segmen ritel dan UKM.
3. Pilihan Utama untuk Segmen Wholesale dan Bisnis Indonesia-Korea: Bank ingin menjadi bank pilihan utama untuk kredit di segmen wholesale dan bisnis antara Indonesia dan Korea.

Melalui transformasi fundamental yang telah dilakukan, Bank menetapkan target jangka panjang untuk menjadi Bank Menengah dengan kapasitas global melalui pertumbuhan yang stabil. Bank berharap melewati fase rebuild dan membangun ekosistem bisnis yang kuat dengan dukungan digitalisasi layanan perbankan. Bank berharap bisa tumbuh secara berkelanjutan melalui fase turn around, dengan strategi bisnis yang bertransformasi dari struktur biaya rendah menjadi bank yang sangat menguntungkan. Pertumbuhan akan diprioritaskan pada semua segmen bisnis, dengan peningkatan pangsa pasar yang diimbangi dengan membangun kapabilitas dan penawaran produk baru untuk menangkap peluang pasar yang lebih besar. Bank akan merancang value proposition pada digital banking untuk semua segmen dan membangun platform keuangan yang komprehensif.

Untuk mencapai aspirasi Bank tersebut, terdapat 4 (empat) strategi utama yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian Bank, yakni:

1. *Good Bank*
   Mengembalikan kepercayaan pasar dengan menciptakan fundamental dan profit Bank yang berkelanjutan berdasarkan perluasan pangsa pasar dan bisnis, diantaranya dengan mengembangkan produk baru, proses, kompetensi penjualan, budaya etika berorientasi pelanggan
2. *Bad Bank*
   Maksimalkan nilai dengan meningkatkan aktivitas collection dan penjualan kredit, clean up bad asset menggunakan sumber dari profit good bank.
3. *Cost Efficiency*
   Dilakukan dengan menghilangkan biaya yang tidak efisien melalui inisiatif program ProX, meningkatkan transparansi, mengoptimalkan channel strategy, dan produktivitas SDM
4. Pemanfaatan Modal
   Penggunaan modal baru secara efektif untuk kredit baru dan investasi masa depan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Segmen usaha adalah kelompok aset dan operasi yang menawarkan barang atau jasa dengan risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda dari segmen lainnya. KB Bank membagi segmen usaha berdasarkan peraturan kebijakan akuntansi menjadi Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Bank menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), yang mengatur pengungkapan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi di mana Bank beroperasi.

KB Bank melakukan kegiatan usaha seperti penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan penyediaan jasa perbankan melalui pengembangan produk dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Dalam industri jasa perbankan, produksi merujuk pada hasil dari kegiatan pemasaran produk dan jasa yang dilakukan oleh bank. Dalam laporan ini, akan dijelaskan kinerja produksi dari Bank sebagai entitas utama. Kinerja Segmen Konvensional dan Segmen Syariah sebagai Entitas Anak akan disajikan dalam bagian analisis dan pembahasan manajemen dalam laporan tahunan ini.

Secara keseluruhan, segmen KB Bank terbagi menjadi Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Segmen Operasi terdiri dari kelompok Konvensional, Pembiayaan, dan Syariah. Sementara itu, KB Bank melaporkan Segmen Geografis berdasarkan daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain.

SEGMEN OPERASI

SEGMEN PERBANKAN KONVENSIONAL

Perbankan Konvensional terdiri dari produk Kredit, Produk Dana dan Jasa Lainnya.

Produk Kredit

Produk kredit yang ditawarkan oleh KB Bank terdiri dari produk kredit Ritel, kredit UMKM dan kredit Komersial.

Kredit Ritel

1. Kredit Ritel
   a. Kredit Pensiunan
      KB Bank memberikan kesempatan pinjaman modal usaha bagi para pensiunan atau janda/duda pensiunan penerima uang pensiun bulanan untuk tetap menjadi tenaga produktif melalui kredit pensiunan. Keunggulan dari produk kredit pensiunan ialah pinjaman ini dapat dijadikan modal usaha, proses pengurusan cepat dengan syarat yang mudah dan suku bunga yang ditawarkan kompetitif. Selain itu juga produk ini menawarkan perlindungan optimal melalui cover asuransi. Fitur yang ditawarkan produk ini di antaranya plafond yang ditawarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp300 juta, jangka waktu yang diberikan mulai 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau usia maksimal saat kredit lunas yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun.
   b. Kredit Masa Pra Pensiun (MPP)
      Merupakan Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa Persiapan Pensiun atau 2 (dua) tahun sebelum pensiun. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai persiapan masa depan dalam menghadapi masa pensiun dengan perlindungan optimal melalui asuransi. Kredit ini dapat diangsur sebelum dan sesudah masa pensiun dengan suku bunga kompetitif. Persyaratan yang ditawarkan cukup mudah dan dengan proses yang cepat. Plafond yang ditawarkan mulai Rp1 juta sampai dengan Rp300 juta dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun.
   c. Kredit Pemilikan Mobil
      Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilikan kendaraan roda empat baik mobil baru maupun mobil bekas dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.
   d. Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen
      Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dalam pemilikan, renovasi dan/atau meningkatkan daya guna rumah/apartemen dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.
   e. Kredit Serbaguna (KSG)
      Fasilitas pinjaman kepada nasabah yang merupakan karyawan suatu perusahaan yang memiliki fasilitas payroll dari KB Bank untuk memenuhi keperluan multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya rumah sakit, perjalanan wisata, pembelian peralatan rumah tangga, dan keperluan konsumtif lainnya.
   f. Kredit Back to Back
      Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan agunan dalam bentuk tabungan/deposito/giro.
   g. Kartu Kredit
      Untuk keperluan belanja atau kebutuhan tunai, KB Bank menawarkan Kartu Kredit VISA, MASTERCARD dan private label (KB Bukopin Card) yang memberikan banyak kemudahan dan sekaligus keuntungan bagi konsumen. Kartu Kredit KB Bank memberikan suku bunga yang ringan dan kompetitif dengan tidak membedakan transaksi belanja maupun tarik tunai. Saat ini KB Bank menawarkan beberapa jenis kartu kredit, di antaranya:
      i) Kartu Kredit Infinite;
      ii) Kartu Kredit Platinum;
      iii) Kartu Kredit Gold;
      iv) Kartu Kredit Classic;

v) Business Card;
vi) Private label KB Bukopin card.

h. Kredit PNS Aktif Channeling BPR
Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dapat memanfaatkan pinjaman dana dari KB Bank untuk membuka usaha/ peluang bisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya melalui Pinjaman PNS aktif dari Bank KB Bank yang bekerjasama dengan BPR Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota di seluruh Indonesia. Keunggulan dari produk ini mampu menjangkau nasabah hingga pelosok sesuai dengan lokasi BPR berada. Kredit ini dapat dijadikan sebagai modal usaha dengan proses cepat dan syarat mudah disertai perlindungan optimal melalui jaminan asuransi. Fitur yang ditawarkan oleh produk ini berupa plafond mulai Rp1 juta sampai dengan Rp200 juta dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun atau pada saat kredit lunas maksimal memasuki usia pensiun.

Kredit UMKM

Produk UMKM yang diberikan oleh KB Bank terdiri dari 2 (dua) segmen yaitu Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kredit Mikro

1. Kredit UKM
Produk kredit pada segmen UKM terdiri dari produk Cash Loan dan Non Cash Loan.
Produk Cash Loan antara lain produk yaitu produk generik yaitu Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan produk program atau produk turunan dari produk generik
   a. Produk Generik
      i) Kredit Modal Kerja (KMK)
      Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pengadaan aktiva lancar dan/atau mengganti hutang dagang, membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnis debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 (satu) tahun.
      ii) Kredit Investasi (KI)
      Merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap dan/atau untuk membiayai kebutuhan barang modal antara lain dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, proyek baru, take over dan refinancing dengan jangka waktu pengembalian antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang memiliki product turunan yakni

   b. Produk Program
      i) Equipment Finance
      Skema pembiayaan kredit investasi pembelian equipment untuk mendukung kegiatan operasional nasabah dalam melakukan ekspansi bisnis dimana agunan utama yang dijaminkan adalah agunan asset yang dibiayai
      ii) SME Mortgage
      Kredit yang diberikan kepada perusahaan MSME untuk tujuan Investasi atau kepemilikan Tempat usaha, Ruko/Rukan, gudang, SOHO (Small Office Home Office), Office Space untuk ditempati /sebagai sarana usaha produktif milik debitur.
      iii) Supply Chain Financing
      Supply Chain Financing merupakan sebuah pembiayaan modal kerja kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya dengan membeli stok barang dari para pemasok, diantaranya adalah :
      - Dealer Financing
        Skema penyediaan dana kepada Dealer yang sudah berkerjasama dengan Principal dalam pembelian barang yang diproduksi/disediakan oleh principal
      - Vendor Financing
        Vendor Financing merupakan kerja sama dengan Anchor untuk memberikan fasilitas kredit kepada Supplier yang direkomendasikan oleh Anchor dengan dasar tagihan yang telah efektif, yang memiliki tujuan untuk menjembatani umur piutang dari Supplier.
      - Distributor Financing
        Program kerja sama dengan Anchor untuk memberikan fasilitas kredit kepada Distributor yang direkomendasikan oleh Anchor khusus untuk transaksi yang melibatkan pembelian barang dari Anchor
      iv) Pinjaman Rekening Koran (PRK)
      Fasilitas Kredit yang diberikan Bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (operasional) dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang, dimana penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan warkat (cek/bilyet giro) selama jangka waktu kredit
      v) BPR Financing
      Skema pembiayaan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan hasil penarikan dari bank diteruskan kepada end user
      vi) Pembiayaan Channeling SKBF Fleet
      Skema pembiayaan kredit investasi pembelian kendaraan penumpang (roda empat) atau mobil

pick up (roda empat) untuk mendukung kegiatan operasional nasabah dalam melakukan ekspansi bisnis menggunakan pola channeling melalui Sunindo Kookmin Best Finance (SKBF), dimana agunan utama yang dijaminkan adalah agunan asset yang dibiayai.

Pertumbuhan layanan financial technology (fintech) di Indonesia bisa dibilang sangat pesat, di mana setiap tahunnya ada saja lembaga pembiayaan baru yang bermunculan guna membantu memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat. Sederhananya, fintech adalah sebuah layanan yang bergerak di bidang jasa keuangan berbasis teknologi, sehingga KB Bank pun turut serta dalam pembiayaan fintech ini melalui kerjasama dengan Peer to Peer.

a. Peer to Peer
   P2P Lending merupakan platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman dana/calon debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan pinjaman/kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebib mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional.

Produk Non Cash Loan antara lain yaitu produk Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Bank Garansi/SBLC/Demand Guarantee.

1. Letter of Credit (L/C)
   Merupakan suatu instrumen atau janji tertulis yang diterbitkan oleh suatu Bank (issuing Bank) atas permintaan dan instruksi tertulis Debitur/nasabah (applicant).
2. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
   lazim dikenal sebagai "Letter of Credit" (SKBDN) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (applicant) yang mengikat Bank pembuka.
3. Bank Garansi
   Merupakan suatu pemberian janji dengan persyaratan dan ketentuan tertentu yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian Bank garansi antara Bank dengan Debitur/ Principal yang menyatakan bahwa atas permintaan Principal, untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, Bank akan membayar kewajiban Principal kepada Obligee, apabila Principal melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Obligee.

2. Kredit Mikro
   a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
      Merupakan produk kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.
   b. Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra
      Swamitra adalah nama suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Perseroan dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga USP memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal Tidak Tetap (MTT) merupakan fasilitas kredit yang diberikan KB Bank kepada Koperasi untuk dipergunakan sebagai modal kerja kegiatan usaha simpan pinjam swamitra.

Kredit Komersial

Kredit Komersial merupakan kredit yang diberikan dengan limitasi kredit di atas Rp15 M. Produk kredit pada segmen komersial terdiri dari 3 (tiga) produk yaitu produk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Sindikasi.

1. Kredit Modal Kerja
   Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 (satu) tahun. Fasilitas ini membantu nasabah dalam memperbaiki likuiditas memenuhi kebutuhan dana dalam rangka menunaikan kewajibannya dan/atau menjalankan operasional harian perusahaan dalam waktu dekat.
2. Kredit Investasi
   Merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur guna membiayai pengadaan aktiva tetap/sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapat menunjang kelancaran usaha, mengolah/menghasilkan suatu barang atau jasa, dan pengembalian kredit tersebut berasal dari operasionalisasi dan/atau komersialisasi proyek tersebut dengan jangka waktu pengembalian antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
3. Kredit Sindikasi
   Merupakan pembiayaan kepada debitur yang dilakukan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk membiayai suatu proyek.

Profitabilitas Produk Kredit

Pada tahun 2023, total kredit KB Bank mencapai Rp49,42 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,30% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp50,58 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan strategi Perusahaan untuk mengurangi portofolio berkualitas rendah, yaitu mengurangi LAR melalui berbagai skema meliputi penagihan secara intensif, penjualan portofolio dan hapus buku. Perusahaan terus berproses membersihkan bad loan untuk menjadi clean bank. Disamping itu juga perusahaan melakukan ekspansi kredit yang tumbuh solid sepanjang tahun 2023. Realisasinya penyaluran kredit baru tumbuh 6,0% menjadi Rp 6,7 triliun per Desember 2023 dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY). Pertumbuhan kredit baru KB Bank terlihat di semua segmen, tetapi pertumbuhan tertinggi berasal dari segmen korporasi yang menyumbang 73% atau sebesar Rp4,9 Triliun terhadap total kredit baru Perseroan. Kredit UKM berkontribusi 7%, sementara segmen ritel sebesar 20%. Penyaluran kredit yang ditopang pada segmen bisnis korporasi ini merupakan strategi KB Bank untuk memaksimalkan ekspansi kredit sekaligus meningkatkan kualitas aset serta membuat biaya dana bisa tetap terkendali. Pertumbuhan kredit baru dan perbaikan kualitas aset yang dilakukan perusahaan hingga Desember 2023 tersebut, diiringi dengan peningkatan pendapatan bunga 17,8% YoY menjadi Rp 4,1 triliun pada periode Januari-Desember 2023.

Kinerja Produk Kredit

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit UMKM	15.633	31,63%	18.397	36,37%	(2.763)	-15,02%
Kredit Konsumer	12.458	25,21%	13.474	26,64%	(1.017)	-7,55%
Kredit Komersial	21.328	43,16%	18.712	36,99%	2.615	13,98%
TOTAL	**49.419**	**100,00%**	**50.583**	**100,00%**	**(1.165)**	**-2,30%**

Kinerja Produk Kredit Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit Pensiunan	8.330	66,87%	8.890	65,98%	(560)	-6,29%
Kredit Masa Pra Pensiun	1.215	9,75%	842	6,25%	373	44,30%
Kredit Pemilikan Mobil	185	1,49%	204	1,51%	(19)	-9,24%
Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen	1.363	10,94%	1.709	12,68%	(346)	-20,26%
Kredit Serba Guna (KSG)	1	0,01%	4	0,03%	(3)	-71,70%
Back to Back	22	0,17%	125	0,93%	(103)	-82,69%
Kartu Kredit	457	3,67%	531	3,94%	(74)	-13,95%
Lainnya	885	7,10%	1.169	8,68%	(285)	-24,35%
Jumlah	**12.458**	**100,00%**	**13.474**	**100,00%**	**(1.017)**	**-7,55%**

Pada tahun 2023, terjadi Penurunan kinerja kredit ritel sebesar 7,55%, atau sebesar Rp1,01 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya, yakni total kredit ritel tercatat sebesar Rp13,47 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini dipicu oleh Penurunan ini dipicu oleh penurunan pada produk kredit pensiunan dan Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen.

Kartu Kredit

KB Bank telah menekuni Bisnis Kartu Kredit sejak tahun 2003, menjadikannya salah satu segmen usaha yang telah mapan. Bisnis ini masih menjadi pilihan menjanjikan dengan prospek yang cerah dalam menyediakan layanan yang memudahkan kebutuhan nasabah. Dengan Kartu Kredit KB Bukopin VISA, MASTERCARD, dan private label (KB Bukopin Card), nasabah dapat menikmati kemudahan belanja dan penarikan tunai. Keuntungan lainnya adalah suku bunga yang ringan dan kompetitif, yang berlaku untuk semua jenis transaksi, baik belanja maupun penarikan tunai. Saat ini Perseroan menawarkan beberapa jenis kartu kredit, di antaranya:

1. Kartu Kredit Infinite;
2. Kartu Kredit World
3. Kartu Kredit Platinum;
4. Kartu Kredit Business Card
5. Kartu Kredit Customized Card
6. Kartu Kredit Gold;
7. Kartu Kredit Classic;
8. Private label KB Bukopin Card

Kinerja Bisnis Kartu Kredit

Perseroan merupakan salah satu bank yang memiliki izin sebagai penerbit dan penerima pembayaran kartu di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga diberi izin untuk menerbitkan kartu private label yang dikenal sebagai KB Bukopin Card. Dengan dukungan izin dan infrastruktur saat ini, bisnis kartu kredit Perseroan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pada tahun 2023, Perseroan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis kartu kredit dan penerima pembayaran, dengan menerapkan strategi berikut ini:

1. Kartu Kredit Premium untuk Nasabah Prioritas.
2. Kartu Komersial untuk Mitra Strategis, Nasabah Corporate dan Payroll.
3. Internal karyawan KB Bank.

Kinerja Bisnis Kartu Kredit 2022-2023

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Selisih	Persentase (%)
Jumlah pemegang kartu	553.842	569.120	-15.278	-2,68%
Pengguna kartu (Rp miliar)	623	779	-156	-20%.
Kredit yang Diberikan (Rp miliar)	457	531	-74.	-13.94%
Feebase Kartu Kredit (Rp miliar)	38	45	-7	-15.55%
Sales Volume Merchant (Rp miliar)	359	480	-121	-25,21%
Feebase Merchant (Rp miliar)	4	6	-2	-33.33%

Kredit UMKM

Kinerja Produk Kredit UMKM

(Dalam miliar rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit UKM	14.609	93,45%	17.150	93,22%	(2.541)	-14,81%
Kredit Mikro	1.024	6,55%	1.247	6,78%	(223)	-17,86%
Jumlah	**15.633**	**100,00%**	**18.397**	**100,00%**	**(2.763)**	**-15,02%**

Pada tahun 2023, kinerja kredit UMKM menunjukkan penurunan sebesar 15,02% atau sekitar Rp2,76 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni total kredit UMKM tercatat sebesar Rp18,40 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh oleh strategi perusahaan untuk mengurangi portofolio berkualitas buruk yaitu mengurangi LAR.

Kredit UKM

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit Modal Kerja	5.000	34,23%	7.032	41,00%	(2.032)	-28,89%
Kredit Investasi	2.762	18,91%	3.805	22,19%	(1.043)	-27,40%
Equipment Financing	125	0,85%	182	1,06%	(57)	-31,38%
Dealer Financing	640	4,38%	365	2,13%	275	75,21%
Lainnya	6.082	41,63%	5.766	33,62%	316	5,48%
Jumlah	**14.609**	**100,00%**	**17.150**	**100,00%**	**(2.541)**	**-14,81%**

Pada tahun 2023, total kredit UKM tercatat sebesar Rp14,61 triliun, mengalami penurunan sebesar 14,81% atau sekitar Rp2,54 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya total kredit UKM mencapai Rp17,15 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan ini disebabkan oleh strategi perusahaan untuk mengurangi portofolio kredit eksisting berkualitas buruk yaitu mengurangi LAR.

Kredit Mikro

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
KUR	110	10,74%	106	9%	4	3,77%
Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra	914	89,26%	1.141	91%	(227)	-19,89%
Jumlah	**1.024**	**100%**	**1.247**	**100%**	**(223)**	**-17,85%**

Hingga akhir tahun 2023, Jumlah Kredit Mikro sebesar Rp 1,02 triliun turun 17,85 % atau sebesar Rp223 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1,25 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan ini disebabkan karena fokus bisnis untuk mengurangi LAR pada kredit Swamitra.

Fee based Income Non Cash Loan

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Trade Finance	7.070	62%	1,682	13%	435	4%
Bank Garansi	11.398	38%	10,963	87%	5.388	320%
Jumlah	**18.468**	**100%**	**12,645**	**100%**	**5.823**	**46%**

Hingga akhir tahun 2023, Jumlah Fee Based income Non Cash loan sebesar Rp 18.468 miliar, naik 46 % atau sebesar Rp 5,82 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 12,64 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh transaksi trade finance yang lebih aktif dibandingkan tahun 2022.

Kredit Komersial

Adapun uraian kinerja masing-masing produk selama periode tahun buku adalah sebagai berikut.

Kinerja Produk Komersial

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit Modal Kerja	10.128.	47,39%	10.410	55,63%	282.	97,29%.
Kredit Investasi	6.6890	31,30%	6.918	36,97%	229	96,69%
Kredit Sindikasi	4.554	21,31%	1.384	7,39%	3.170	329,06%
Jumlah	**21.371**	**100,00%**	**18.712**	**100,00%**	**2.659**	**114,21%**

Pada tahun 2023, jumlah kredit komersial tercatat sebesar Rp21,73 triliun, naik 114,21% atau Rp2,66 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp18,71 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh kredit sindikasi yang mulai tumbuh.

Kredit Wholesale/Komersial

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Koreanlink	4.242	19,89%	1.927	10,30%	2.316	120,18%
Non-Korea	17.085	80,11%	16.785	89,70%	300	1,79%
Jumlah	**21.328**	**100,00%**	**18.712**	**100,00%**	**2.615**	**13,98%**

Pada tahun 2023, jumlah kredit wholesale atau komersial tercatat sebesar Rp21,33 triliun, naik 13,98% atau Rp2,62 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp18,71 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh Kenaikan ini terutama di picu oleh peningkatan kredit pada segmen koreanlink. Realisasinya penyaluran kredit baru koreanlink tumbuh 54,7% menjadi Rp 2,3 triliun per Desember 2023 dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY). KB Bank terus melakukan transformasi di bawah pemegang saham pengendali baru asal Korea Selatan (Korsel), yakni Kookmin Bank dengan terus membuka peluang bisnis baru. Salah satu peluang bisnis yang dijajaki KB Bank setelah menjadi bagian dari KB Financial Group (KBFG) adalah Korean Link. Dibentuk pada November 2020, Korean Link bertujuan untuk membuka potensi kerjasama baru dengan perusahaan-perusahaan asal Korsel yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, serta perusahaan swasta nasional yang dimiliki atau terafiliasi dengan perusahaan asal Korsel.

Per Desember 2023, portofolio pinjaman Korean Link telah mencapai Rp 4,2 triliun dan portofolio pendanaan lebih dari Rp 5 triliun. Angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan selama tiga tahun keberadaan Korean Link.

Produk Dana

Produk dana yang ditawarkan Perseroan terdiri dari produk dana Ritel dan Komersial.

1. Ritel Segmen
   Bisnis pendanaan UMKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Ritel. Perubahan ini membawa dampak positif untuk Perseroan karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga marketing funding. Potensi dan penawaran funding tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha). Target utama dari kegiatan usaha funding Ritel adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen mass affluent (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis funding Ritel juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan dalam penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra KB Bank. Produk dana pada bisnis Ritel diuraikan sebagai berikut:
   a. Giro
   b. Simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan kartu ATM (perorangan), cek, bilyet giro, atau surat perintah lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Jenis giro yang disediakan KB Bank kepada nasabah yaitu:
      - Giro Umum
        Simpanan dalam mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan.
      - Giro Valas
        Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

   c. Tabungan
      Beragam produk tabungan disediakan untuk melayani kebutuhan nasabah, baik yang bertujuan untuk transaksi rumah tangga sehari-hari maupun investasi untuk mengoptimalkan pendapatan bunga tabungan, disisi lain dapat juga dimanfaatkan untuk perencanaan kebutuhan dana yang akan datang, untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan ibadah. Jenis tabungan yang disediakan KB Bank kepada nasabah yaitu:
      - Tabungan Siaga KB Bukopin
        Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro atau setaranya.
      - Tabungan Siaga KB Bukopin
        Kerjasama Tabungan yang dirancang khusus untuk kerjasama PT Bank KB Bukopin Tbk dan perusahaan dalam rangka payroll (penampungan pembayaran gaji karyawan) atau kerjasama lainnya yang mempunyai karakteristik berupa pembukaan tabungan secara kolektif.
      - Tabungan Siaga KB Bukopin Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha)
        Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Tabungan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memantau transaksi-transaksi bisnisnya tercetak di dalam buku tabungan. Layanan yang diberikan kepada pemegang rekening tabungan bisnis sangat menarik, antara lain adalah tersedianya kartu ATM, e-banking, dan fasilitas pemindahan dana secara otomatis dari tabungan ke giro atau sebaliknya (SiAgamatic).
      - Tabungan Siaga KB Bukopin Premium
        Tabungan berbunga setara deposito yang memiliki beragam layanan, kemudahan, dan keleluasaan.
      - Tabungan Rencana KB Bukopin
        Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna memenuhi keperluan yang akan datang dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya dan hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
      - Tabungan Siaga KB Bukopin Dollar
        Tabungan dalam bentuk valuta asing untuk kebutuhan transaksi nasabah.
      - Tabunganku
        Tabungan yang merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk individu tanpa dikenakan biaya administrasi.
      - Tabungan Siaga Pensiunan
        Tabungan yang ditujukan untuk menghimpun dana dari para pensiunan termasuk pembayaran uang pensiun.
      - Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar)
        Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
      - Tabungan Digital Wokee
        Tabungan perorangan yang berbasis elektronik yang dapat digunakan sebagai rekening transaksi tanpa kartu, dengan menggunakan basis aplikasi digital yang di dalamnya terdapat beragam fitur yang dapat diakses untuk melakukan berbagai transaksi.

   d. Deposito
      Produk deposito yang dikembangkan KB Bank adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah untuk produk simpanan yang berjangka waktu tertentu dan memberikan tingkat bunga yang lebih menarik dibanding giro dan tabungan. Pada segmen bisnis Ritel, KB Bank menyediakan produk deposito sebagai berikut:
      - Deposito Umum
        Simpanan berjangka bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dalam valuta rupiah.

- Deposito Valas
  Simpanan berjangka dalam valuta asing bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian.
- Deposito Merdeka
  Simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun menurut perjanjian antara nasabah dan pihak Perseroan, dengan nilai tambah bebas biaya penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo.
- Deposito Online
  Simpanan berjangka bagi nasabah perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjan dalam valuta rupiah dan hanya dapat di akses secara online.

2. Komersial
   Bisnis dana Komersial merupakan segmen penyeimbang dalam pertumbuhan dana pihak ketiga dan kebutuhan likuiditas Perseroan. Bisnis dana Komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta nasional dengan menetapkan strategi follow the money serta peningkatan loyalitas deposan dengan kerjasama operasional perbankan sebagai underlying penempatan dana. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah la yanan yang terintegrasi seperti cash management, layanan pembayaran host to host (H2H), virtual account dan layanan transaksional lainnya. Sumber dana bisnis Komersial berasal dari produk giro dan deposito dengan suku bunga yang kompetitif. Rincian terkait produk dana bisnis Komersial diuraikan sebagai berikut:
   a. Giro
      - Giro Umum
        Simpanan dalam mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan.
      - Giro Valas
        Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.
   b. Deposito
      - Deposito KB Bukopin Rupiah
        Simpanan berjangka bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dalam valuta rupiah.
      - Deposito Valas
        Simpanan berjangka dalam valuta asing bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian.
      - Deposito on Call
        Simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.

Produktivitas Produk Dana

Hingga akhir tahun 2023, jumlah total rekening yang dihimpun oleh Bank adalah sebanyak 544.626 unit, mengalami penurunan sebesar 1.306.018 unit atau turun 70,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1.850.458 unit rekening.

Jumlah Rekening Produk Dana

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Ritel	542.626	99,67%	1.848.589	99,90%	(1.305.963)	-70,65%
Komersial	1.814	0,33%	1.869	0,10%	(55)	-2,94%
Jumlah	**544.440**	**100,00%**	**1.850.458**	**100,00%**	**(1.306.018)**	**-70,58%**

Di sisi lain, KB Bank pada tahun 2023 berhasil menghimpun dana sebesar Rp44,79 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,80% atau Rp7,17 triliun dari tahun 2022 yang mencapai Rp51,96 triliun.

Jumlah Dana Produk Dana

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Ritel	30.008	67,00%	37.579	72,32%	(7.571)	-20,15%
Komersial	14.781	33,00%	14.383	27,68%	398	2,76%
Jumlah	**44.789**	**100,00%**	**51.962**	**100,00%**	**(7.173)**	**-13,80%**

Dana Ritel

Segmen pendanaan bisnis Ritel dihimpun dari berbagai produk tabungan, giro, dan deposito yang ditawarkan baik kepada perorangan maupun badan usaha. Berikut adalah gambaran kinerja produk dana Ritel Perseroan:

Jumlah Rekening Dana Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (unit)	Komposisi (%)	Jumlah (unit)	Komposisi (%)	Nominal (unit)	Persentase (%)
Giro	13.650	2,52%	15.125	0,82%	(1.475)	-9,75%
Tabungan	512.298	94,41%	1.809.453	97,88%	(1.297.155)	-71,69%
Deposito	16.678	3,07%	24.011	1,30%	(7.333)	-30,54%
Jumlah	**542.626**	**100,00%**	**1.848.589**	**100,00%**	**(1.305.963)**	**-70,65%**

Pada tahun 2023, jumlah rekening dana pihak ketiga di segmen dana Ritel KB Bank mengalami penurunan sebesar 70,65%, atau turun 1.305.963 unit rekening, dari 1.848.589 unit rekening pada tahun 2022 menjadi 542.626 unit rekening pada tahun 2023. Penurunan terutama pada Tabungan dikarenakan di tahun 2023, Bank melakukan review terhadap rekening yang ada untuk fokus kepada rekening berkualitas. Dimana, Bank melakukan deepening ke nasabah untuk dapat melakukan penambahan dana ataupun bertransaksi. Untuk kemudian dilakukan penutupan rekening mempertimbangkan masih adanya rekening yang tetap tidak aktif dan memiliki saldo nol.

Jumlah Dana Pihak Ketiga Segmen Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro	1.763	5,88%	2.537	6,75%	(774)	-30,50%
Tabungan	5.056	16,85%	6.647	17,69%	(1.591)	-23,93%
Deposito	23.189	77,28%	28.396	75,56%	(5.206)	-18,34%
Jumlah	**30.008**	**100,00%**	**37.579**	**100,00%**	**(7.571)**	**-20,15%**

Pada tahun 2023, Segmen Ritel KB Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp30,01 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 20,15% atau turun Rp7,57 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp37,58 triliun. Secara nominal, penurunan terbesar terjadi pada produk deposito yang turun sebesar Rp5,21 triliun atau turun 18,34%. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang melakukan pencairan deposito dampak dari adanya penutupan beberapa outlet / kantor cabang KB Bank selama periode 2023.

Giro

Hingga akhir tahun 2023, jumlah rekening produk giro pada segmen dana Ritel KB Bank mencapai 13.570 unit. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1.555 unit atau sekitar -10.28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatat 15.125 unit pada tahun 2022.

Jumlah Rekening Giro Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)
Giro Umum	13.127	96,17%	14.537	96,11%	(1.410)	-9,70%
Giro Valas	523	3,83%	588	3,89%	(65)	-11,05%
Jumlah	**13.650**	**100,00%**	**15.125**	**100,00%**	**(1.475)**	**-9,75%**

Jumlah Dana Giro Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro Umum	1.722	97,63%	2.419	95,33%	(697)	-28,82%
Giro Valas	42	2,37%	119	4,67%	(77)	-64,79%
Jumlah	**1.763**	**100,00%**	**2.537**	**100,00%**	**(774)**	**-30,50%**

Pada tahun 2023, total dana dari produk giro pada segmen dana Ritel KB Bank mencapai Rp1,76 triliun. Terjadi penurunan sebesar 30,50% atau turun Rp774 miliar dari tahun sebelumnya yang mencatatkan sejumlah Rp2,54 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume pada produk giro valas.

Tabungan

Hingga akhir tahun 2023, jumlah rekening produk tabungan pada segmen dana Ritel mengalami penurunan sebesar 71,69%, atau turun sebanyak 1.297.155 unit rekening dari total 1.809.453 unit rekening pada tahun 2022 menjadi 512.298 unit rekening pada tahun 2023. Penurunan ini dikarenakan di tahun 2023, Bank melakukan review terhadap rekening yang ada untuk fokus kepada rekening berkualitas. Dimana, Bank melakukan deepening ke nasabah untuk dapat melakukan penambahan dana ataupun bertransaksi. Untuk kemudian dilakukan penutupan rekening mempertimbangkan masih adanya rekening yang tetap tidak aktif dan memiliki saldo nol.

Jumlah Rekening Tabungan Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)
SiAga KB Bukopin	922	18,23%	1.018	15,32%	(96)	-9,43%
SiAga KB Bukopin Kerjasama	207	4,09%	271	4,07%	(64)	-23,60%
SiAga KB Bukopin Rencana	85	1,68%	116	1,74%	(31)	-26,58%
SiAga KB Bukopin Bisnis Perorangan	487	9,63%	636	9,56%	(148)	-23,35%
SiAga KB Bukopin Bisnis Badan Usaha	942	18,64%	848	12,76%	94	11,11%
SiAga KB Bukopin Premium	1.433	28,35%	2.370	35,66%	(937)	-39,54%
SiAga KB Bukopin Valas	54	1,06%	115	1,73%	(61)	-53,32%
SiAga KB Bukopin Pensiun	344	6,80%	345	5,19%	(1)	-0,41%
SIMPEL	3	0,05%	2	0,04%	0	3,82%
Tabungan Rakyat	0	0,00%	0	0,00%	0	20,03%
Wokee	15	0,29%	17	0,26%	(3)	-16,19%
TabunganKu	87	1,73%	211	3,17%	(123)	-58,56%
Tabungan Lainnya	478	9,45%	698	10,50%	(220)	-31,51%
Jumlah	**5.056**	**100,00%**	**6.647**	**100,00%**	**(1.591)**	**-23,93%**

Jumlah Dana Produk Tabungan Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
SiAga KB Bukopin	65.924	12,87%	508.839	28,12%	(442.915)	-87,04%
SiAga KB Bukopin Kerjasama	53.385	10,42%	672.312	37,16%	(618.927)	-92,06%
SiAga KB Bukopin Rencana	5.187	1,01%	6.947	0,38%	(1.760)	-25,33%
SiAga KB Bukopin Bisnis Perorangan	8.463	1,65%	19.868	1,10%	(11.405)	-57,40%
SiAga KB Bukopin Bisnis Badan Usaha	7.194	1,40%	5.933	0,33%	1.261	21,25%
SiAga KB Bukopin Premium	1.488	0,29%	2.246	0,12%	(758)	-33,75%
SiAga KB Bukopin Valas	283	0,06%	295	0,02%	(12)	-4,07%
SiAga KB Bukopin Pensiun	190.276	37,14%	176.634	9,76%	13.642	7,72%
SIMPEL	32.705	6,38%	30.721	1,70%	1.984	6,46%
Tabungan Rakyat	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Wokee	98.671	19,26%	72.885	4,03%	25.786	35,38%
TabunganKu	48.722	9,51%	293.175	16,20%	(244.453)	-83,38%
Tabungan Lainnya	-	0,00%	19.598	1,08%	(19.598)	-100,00%
Jumlah	**512.298**	**100,00%**	**1.809.453**	**100,00%**	**(1.297.155)**	**-71,69%**

Pada tahun 2023, jumlah dana produk tabungan pada segmen dana Ritel mencapai Rp5,06 triliun, mengalami penurunan sebesar 23,93% atau minus Rp1,59 triliun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp6,65 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan dana yang besar pada nasabah tabungan premium.

Deposito

Hingga akhir tahun 2023, jumlah rekening produk deposito pada segmen dana Ritel mengalami penurunan sebesar -30,54% atau turun sebanyak 7.333 unit rekening dari 24.011 unit rekening pada tahun 2022 menjadi 16.678 unit rekening pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pencairan deposito yang dilakukan oleh nasabah yang merupakan juga dampak dari adanya penutupan outlet yang terjadi pada semester 1 tahun 2023

Jumlah Rekening Produk Deposito Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah	Komposisi (%)	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)
Deposito Umum	11,539	70.97%	14,004	58,32%	(2,465)	-17.60%
Deposito Valas	254	1.56%	269	1,12%	(15)	-5.58%
Deposito Merdeka	4,466	27.47%	7,533	31,37%	(3,067)	-40.71%
Deposito Badan Usaha			2,195	9,14%		
Deposito on Call (DOC)		0.00%	10	0,04%		
Jumlah	**16,259**	**100.00%**	**24,011**	**100,00%**	**(7,752)**	**-32.29%**

Jumlah Dana Produk Deposito Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Deposito Umum	14.447	62,30%	15.123	53,26%	(677)	-4,47%
Deposito Valas	984	4,25%	718	2,53%	267	37,20%
Deposito Merdeka	348	1,50%	617	2,17%	(269)	-43,62%
Deposito Badan Usaha	6.771	29,20%	11.804	41,57%	(5.033)	-42,64%
Deposito on Call (DOC)	639	2,76%	134	0,47%	505	377,72%
Jumlah	**23.189**	**100,00%**	**28.396**	**100,00%**	**(5.206)**	**-18,34%**

Pada tahun 2023, jumlah dana produk deposito pada segmen dana Ritel tercatat sebesar Rp23,19 triliun, mengalami penurunan sebesar 18,34% atau minus Rp5,21 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp28,40 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan fokus bank untuk mengurangi komposisi deposito dan lebih meningkatkan CASA.

Dana Komersial

Dalam segmen bisnis Komersial, Perseroan menawarkan dua jenis produk dana simpanan kepada nasabah Komersial, yaitu Giro dan Deposito. Perseroan secara aktif memanfaatkan potensi dari jaringan perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia untuk menggalakkan pertumbuhan dana komersialnya. Berikut adalah rincian kinerja produk dana Komersial yang berhasil dihimpun oleh segmen bisnis Komersial Perseroan:

Jumlah Rekening Dana Komersial

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah	Komposisi (%)	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)
Giro	1.135	62,57%	1.156	61,85%	(21)	-1,82%
Giro Umum	945	52,09%	982	52,54%	(37)	-3,77%
Giro Valas	190	10,47%	174	9,31%	16	9,20%
Tabungan	132	7,28%	47	2,51%	85	180,85%
Deposito	547	30,15%	666	35,63%	(119)	-17,87%
Deposito Rupiah	510	28,11%	612	32,74%	(102)	-16,67%
Deposito Valas	29	1,60%	16	0,86%	13	81,25%
Deposito on Call (DOC)	8	0,44%	38	2,03%	(30)	-78,95%
Jumlah	**1.814**	**100,00%**	**1.869**	**100,00%**	**(55)**	**-2,94%**

Pada tahun 2023, jumlah rekening produk pada segmen dana Komersial turun sebesar 2,94% atau 55 unit rekening dari 1.869 unit pada tahun 2022 menjadi 1.814 unit pada tahun 2023. Meskipun demikian, Perseroan juga berhasil meningkatkan jumlah nasabah korporasi sebesar 101,17% dari 1.000 nasabah pada tahun 2022 menjadi 1.017 nasabah pada tahun 2023. Selain itu, Perseroan juga memaparkan kinerja berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada produk dana Komersial, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah Dana Komersial

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro	1.414	9,57%	1.041	7,24%	374	35,89%
Giro Umum	1.005	6,80%	762	5,30%	243	31,84%
Giro Valas	410	2,77%	279	1,94%	131	46,95%
Tabungan	1.817	12,30%	309	2,15%	1.508	487,62%
Deposito	11.549	78,14%	13.033	90,61%	(1.484)	-11,39%
Deposito Rupiah	8.787	59,45%	9.900	68,83%	(1.112)	-11,24%
Deposito Valas	2.466	16,68%	2.437	16,94%	29	1,19%
Deposito on Call (DOC)	296	2,00%	697	4,84%	(401)	-57,51%
Jumlah	14.781	100,00%	14.383	100,00%	398	2,76%

Pada tahun 2023, jumlah dana pada segmen dana Komersial mencapai Rp14,78 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,76% atau Rp398 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp14,38 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada produk CASA yaitu giro dan Tabungan.

Fee Based Income

Kegiatan Fee Based Income Perseroan bersumber dari berbagai aktivitas, termasuk jual beli (trading) produk Treasury, layanan Public Services, Trade Finance, Bank Garansi, dan jasa keagenan. Selain itu, terdapat peningkatan layanan fasilitas e-banking, cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan dan IT Swamitra, serta public utilities. Seiring dengan perkembangan layanan perbankan, Perseroan juga mulai menyediakan produk-produk investasi dan layanan wealth management kepada nasabahnya.

Rincian terkait layanan fee based income diuraikan sebagai berikut:

Layanan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Layanan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menjadi salah satu bisnis andalan Perseroan. Peningkatan kualitas pelayanan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pengembangan terus ditingkatkan guna memperoleh kepercayaan dan kepuasan Nasabah dalam menggunakan Jasa Wali Amanat ataupun Kustodian Bank KB Bukopin. Dengan adanya penyediaan jasa Wali Amanat dan Penjualan Kustodian, maka dapat meningkatan fee based income Perseroan.

Rincian kinerja Wali Amanat dan Kustodian diuraikan sebagai berikut :

Fee Based Income Wali Amanat Bank Bukopin

No	Periode	Kumulatif Fee Based Income
1	Jan-23	1.524.081.750
2	Feb-23	2.594.715.000
3	Mar-23	3.958.662.880
4	Apr-23	4.633.464.930
5	May-23	5.276.323.180
6	Jun-23	5.700.391.430
7	Jul-23	6.717.075.430
8	Aug-23	8.027.223.630
9	Sep-23	9.416.558.630
10	Oct-23	10.488.008.630
11	Nov-23	13.023.266.380
12	Dec-23	14.443.667.380

Fee Based Income Kustodian Bank Bukopin

No	Periode	Kumulatif Fee Based Income
1	Jan-23	379.976.953
2	Feb-23	839.765.119
3	Mar-23	1.149.756.856
4	Apr-23	1.404.439.020
5	May-23	1.837.470.994
6	Jun-23	2.131.733.996
7	Jul-23	2.415.265.654
8	Aug-23	2.808.602.970
9	Sep-23	3.106.924.108
10	Oct-23	3.428.567.989
11	Nov-23	4.071.605.179
12	Dec-23	4.313.178.868

Dengan dukungan dari Pemegang Saham Mayoritas, Kookmin Bank Seoul, Perseroan semakin memperkuat reputasinya. Hal ini tercermin dalam semakin banyaknya kerjasama dengan hampir 600 bank koresponden, baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini mendukung perluasan bisnis Perseroan, termasuk dalam pengiriman uang antar negara (remittance), perdagangan ekspor-impor, serta transaksi lainnya untuk peningkatan fee based income. Produk Lembaga Keuangan & Bank Koresponden Perseroan mencakup penerbitan Demand Guarantee, Rekening Vostro IDR KB Bukopin, transaksi Rediskonto Wesel, dan Banker's Acceptance.

KB Bukopin *Trade Finance*

KB Bukopin Trade Finance merupakan produk pembiayaan perdagangan yang disediakan oleh Perseroan untuk mendukung transaksi jual-beli barang antara penjual (seller) dan pembeli (buyer), baik di dalam negeri maupun lintas negara. Produk ini mencakup layanan Ekspor, Impor, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi, Standby L/C, dan Flexy Bill. Berikut adalah rincian kinerja produk KB Bukopin Trade Finance.

Jumlah Transaksi KB Bukopin Trade Finance

(dalam jumlah transaksi)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah	Komposisi (%)	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)
Export Service	153	0,64%	71	0,23%	82	115,49%
Import Service	115	0,48%	79	0,25%	36	45,57%
Remittance	23.529	98,87%	30.945	99,52%	-7.416	-23,97%
Jumlah	**23.764**	**100%**	**31.095**	**100%**	**-7.298**	**-23,47%**

Kinerja KB Bukopin *Trade Finance*

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Export Service	2.026	24,00%	116	1,66%	1.910	1646,55%
Import Service	1.406	16,66%	1.239	17,69%	167	13,48%
Remittance	5.009	59,34%	5.648	80,65%	- 639	-11,31%
Jumlah	**8.441**	**100,00%**	**7.003**	**100%**	**1.438**	**20,53%**

Treasury

Pengelolaan likuiditas dilakukan Perseroan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sambil mengoptimalkan profit. Treasury berkoordinasi dengan unit bisnis dan pendukung untuk memantau cash flow harian, termasuk mutasi dana nasabah besar dan tren harian, guna merancang strategi pengelolaan likuiditas harian.

Sebagai pengelola likuiditas, Perseroan berperan sebagai profit center dengan mengoptimalkan pendapatan bunga dan fee based income. Transaksi melibatkan Bank Indonesia, bank umum, sekuritas, dan money broker. Fokusnya adalah pada transaksi jual beli valuta asing untuk meningkatkan fungsi treasury sebagai profit center. Produk dan jasa treasury yang ditawarkan kepada nasabah termasuk:

1. Transaksi jual beli forex (value today, tom, spot, forward, swap);
2. Deposit on Call (DOC);
3. Transaksi jual beli obligasi (pemerintah dan korporasi);

Volume Transaksi Treasury

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pasar Uang	242.148.600	70.98%	268.072.767	71.00%	(25.924.167)	-9,67%
Valuta Asing	88.405.596	25.91%	96.029.447	25.43%	(7.623.851)	-7,94%
Surat Berharga	10.610.727	3.11%	13.446.533	3.56%	(2.835.806)	-21,09%
Jumlah Volume Transaksi Treasury	**341.164.923**	**100%**	**377.548.747**	**100%**	**(36.383.824)**	**-9,64%**

Pendapatan Bunga Treasury

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Komposisi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan Bunga dari Bank Indonesia	213.933	22.01%	127.436	20.22%	86.497	67,87%
Pendapatan Bunga dari Bank Lain	78.925	8.12%	44.150	7.00%	34.775	78,77%
Pendapatan Bunga Obligasi	679.262	69.87%	458.741	72.78%	220.521	48,07%
Jumlah Pendapatan Bunga Treasury	**972.120**	**100%**	**630.327**	**100.00%**	**341.793**	**54,22%**

Pendapatan Non Bunga Treasury

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp-juta)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Komposisi (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%)
Transaksi Valas	12.979	52.51%	14.546	26.62%	(1.567)	-10,77%
Transaksi Surat Berharga dan Reksadana	11.740	47.49%	40.100	73.38%	(28.360)	-70,72%
Jumlah Pendapatan Bunga Treasury	**24.719**	**100%**	**54.646**	**100.00%**	**(29.927)**	**-54,77%**

Jasa dan Layanan Lainnya

Jasa dan layanan lainnya yang ditawarkan Perseroan di tahun 2023 mencakup Bisnis Kartu, E-Banking, KB Bukopin Prioritas, KB Bukopin Cash Management, Modul Penerimaan Negara, dan Jasa Perbankan Lainnya.

Bisnis Kartu

Kinerja Produk Bisnis Kartu

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)
Kartu Kredit Bukopin	907.838	623	1.009.170	779	-101.332	-156

E-Banking

Kinerja Produk E-Banking

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)
ATM	1.470.465	1.043.231	4.093.842	2.844.245	(2.623.377)	(1.801.014)
SMS *Banking*	51.191	52.206	134.330	111.417	(83.139)	(59.211)
Internet Banking	9.225	103	138.665	5.970	(129.440)	(5.867)

Bukopin Proritas

Kinerja Bukopin Proritas

(dalam Miliar Rupiah, kecuali jumlah nasabah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	DPK (Rp)	Nasabah	DPK (Rp)	Nasabah	Nominal (Rp)	Nasabah
Bukopin Prioritas	7.250	3.073	7.669	4.129	409	1.056

Bukopin Cash Management

Kinerja Bukopin Cash Management

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)
Bukopin *Cash Manajement* (BCM)	3.791	800	3.744	542	47	259

Modul Penerimaan Negara (MPN)

Kinerja Modul Penerimaan Negara (MPN)

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)
Modul Penerimaan Negara (MPN	11.297	1.565	30.325	1.704	(19.028)	(139)

Jasa Perbankan Lainnya

Kinerja Jasa Perbankan Lainnya

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)	Jumlah Transaksi	Nominal (Rp)
Listrik Prabayar (Prepaid)	33.057.890	3.289	41.201.013	4.754	(8.143.123)	(1.465)
Virtual Account Giro Bukopin	4.556	14	119.687	863	(115.131)	(849)
EDC	25.117	20	134.121	481	(109.004)	(461)

SEGMEN PEMBIAYAAN

Pada segmen Pembiayaan, produk dan jasa berasal dari KB Bukopin Finance, mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna.

Produktivitas Segmen Pembiayaan

Produk pembiayaan on balance sheet mengalami kenaikan sebesar Rp19,14 miliar, dari Rp200,96 miliar di tahun 2022 menjadi Rp220,10 miliar di tahun 2023. Sementara itu, produk pembiayaan joint financing justru mengalami penurunan sebesar Rp80,62 miliar, dari Rp650,47 miliar di tahun 2022 menjadi Rp569,85 miliar di tahun 2023.

Rincian terkait kinerja produk pembiayaan on balance sheet dan joint financing, diuraikan sebagai berikut:

Kinerja Produk Pembiayaan (On Balance Sheet)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pembiayaan Investasi	146.330	66,49%	99.697	49,61%	46.633	46,78%
Pembiayaan Modal Kerja	29.707	13,50%	4.440	2,21%	25.267	569,08%
Pembiayaan Multiguna	40.288	18,30%	86.604	43,10%	(46.315)	-53,48%
Pembiayaan Jual Beli (Syariah)	3.769	1,71%	10.219	5,09%	(6.450)	-63,11%
Jumlah	**220.095**	**100,00%**	**200.960**	**100,00%**	**19.136**	**9,52%**

Kinerja Produk Pembiayaan (Joint Financing)

Kinerja Produk Pembiayaan (Joint Financing)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pembiayaan Investasi	354.581	62,22%	425.342	65,39%	(70.761)	-16,64%
Pembiayaan Modal Kerja	294	0,05%	787	0,12%	(493)	-62,69%
Pembiayaan Multiguna	189.123	33,19%	216.792	33,33%	(27.669)	-12,76%
Pembiayaan Jual Beli (Syariah)	25.852	4,54%	7.551	1,16%	18.301	242,36%
Jumlah	**569.849**	**100,00%**	**650.472**	**100,00%**	**(80.623)**	**-12,39%**

SEGMEN SYARIAH

Produk dan jasa yang disediakan dalam segmen pembiayaan berasal dari divisi Bank KB Bukopin Syariah, anak perusahaan Perseroan. Produk yang tersedia meliputi berbagai macam pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, produk pendanaan yang sesuai dengan aturan syariah, serta berbagai layanan lainnya yang diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produktivitas Segmen Syariah

Produktivitas segmen Syariah meliputi produk pembiayaan, produk pendanaan, dan fee based income disajikan sebagai berikut:

Produk Pembiayaan

Pada tahun 2023, segmen pembiayaan syariah Bank mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp 5,63 triliun, naik sebesar Rp463 miliar atau sekitar 8,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,17 triliun. Berikut adalah rincian kinerja produk pembiayaan syariah Bukopin:

Kinerja Produk Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pertanian	157.705	2,79%	24.517	0,47%	133.188	543,25%
Pertambangan	97.617	1,72%	100.669	1,95%	(3.052)	-3,03%
Manufaktur	409.679	7,24%	88.650	1,72%	321.029	362,13%
Tenaga listrik	289.156	5,11%	283.411	5,48%	5.745	2,03%
Konstruksi	255.092	4,51%	317.120	6,14%	(62.028)	-19,56%
Perdagangan	1.256.280	22,19%	1.368.728	26,48%	(112.448)	-8,22%
Transportasi	510.052	9,01%	480.415	9,30%	29.637	6,17%
Jasa Dunia Usaha	487.534	8,61%	706.870	13,68%	(219.336)	-31,03%
Jasa Sosial	1.854.148	32,75%	1.179.313	22,82%	674.835	57,22%
Lain-lain	344.522	6,09%	618.453	11,97%	(273.931)	-44,29%
Jumlah	**5.661.785**	**100,00%**	**5.168.146**	**100,00%**	**493.639**	**9,55%**

Produk Pendanaan

Pada tahun 2023, jumlah rekening pendanaan syariah Bank mencapai 22.496 unit, mengalami kenaikan sebanyak 12.758 unit rekening atau sekitar 5,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 216.738 unit rekening.

Kinerja Produk Dana Pihak Ketiga

(dalam unit rekening)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah	Komposisi (%)	Jumlah	Komposisi (%)	Selisih	Persentase (%)
Giro	6.249	2,72%	5.846	2,70%	403	6,89%
Tabungan	219.818	95,78%	207.436	95,71%	12.382	5,97%
Deposito	3.429	1,49%	3.456	1,59%	(27)	-0,78%
Jumlah	**22.496**	**100,00%**	**216.738**	**100,00%**	**12.758**	**5,89%**

Selama tahun 2023, total dana yang tercatat dalam segmen Pendanaan mencapai Rp6,01 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp416,73 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,59 triliun.

Kinerja Produk Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro	459.743	7,65%	647.138	11,58%	-187.395	-28,96%
Tabungan	477.692	7,95%	471.637	8,44%	6.055	1,28%
Deposito	5.068.360	84,39%	4.470.295	79,98%	598.065	13,38%
Jumlah	**6.005.795**	**100,00%**	**5.589.070**	**100,00%**	**416.725**	**7,46%**

Fee Based Income

Selama tahun 2023, fee based income Perseroan mencapai Rp32,73 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp17,31 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp50,04 miliar.

Fee Based Income

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	Komp.	31 Desember 2022	Komp.	Pertumbuhan	Persentase
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	Rp	%
Bank Garansi	4.221	12,90%	22.712	45,38%	-18.491	-81,41%
Adm-Pembiayaan	18.466	23,42%	17.230	34,43%	1.236	7,18%
Jasa Nasabah	1.512	4,62%	1.614	3,23%	-102	-6,31%
Adm-DPK	2.573	7,86%	2.540	5,08%	33	1,32%
PLN	2.363	7,22%	2.955	5,90%	-592)	-20,04%
Bancassurance	514	1,57%	568	1,14%	-54	-9,59%
FBI-ATM	308	0,94%	353	0,71%	-45	-12,88%
Pengelolaan Aset Sales	327	1,00%	286	0,57%	41	14,49%
Gadai Emas	11	0,03%	15	0,03%	-4	-28,35%
Sindikasi	1	0,00%	5	0,01%	-4	-79,00%
Telekomunikasi	12	0,04%	25	0,05%	-13	-51,46%
FBI-Lainnya	2.423	7,40%	1.740	3,48%	683	39,27%
TOTAL	**32.731**	**100,00%**	**50.043**	**100,00%**	**-17.312**	**-34,59%**

SEGMEN GEOGRAFIS

Segmen Geografis KB Bank dibedakan berdasarkan wilayah ekonomi, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dalam menghasilkan layanan perbankan.

Produktivitas Segmen Geografis

Produktivitas segmen Geografis meliputi kredit yang diberikan dan simpanan nasabah yang disajikan sebagai berikut:

Kredit yang Diberikan

Kinerja Operasional Segmen Geografis

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jawa	40.813	82,59%	40.874	80,81%	(62)	-0,15%
Sumatera	3.130	6,33%	3.587	7,09%	(457)	-12,75%
Kalimantan	983	1,99%	1.307	2,58%	(324)	-24,78%
Lain -Lain	4.494	9,09%	4.815	9,52%	(322)	-6,68%
Jumlah	**49.419**	**100,00%**	**50.583**	**100,00%**	**(1.165)**	**-2,30%**

Simpanan Nasabah

Kinerja Operasional Segmen Geografis

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jawa	37.960	84,75%	44.517	85,67%	(6.557)	-14,73%
Sumatera	2.488	5,56%	3.129	6,02%	(641)	-20,48%
Kalimantan	2.333	5,21%	2.480	4,77%	(147)	-5,94%
Lain -Lain	2.008	4,48%	1.836	3,53%	172	9,36%
Jumlah	**44.789**	**100,00%**	**51.962**	**100,00%**	**(7.173)**	**-13,80%**

PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN OPERASI

Berikut adalah informasi pendapatan, profitabilitas, dan posisi keuangan Bank dan Entitas Anak berdasarkan Segmen Operasi.

PENDAPATAN BUNGA KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bunga Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	4.355.568	89,70%	3.677.797	89,37%	677.771	18,43%
Pembiayaan	12.935	0,27%	30.275	0,74%	(17.340)	-57,27%
Syariah	486.942	10,03%	407.257	9,90%	79.685	19,57%
Total sebelum Eliminasi	4.855.445	100,00%	4.115.329	100,00%	740.116	17,98%
Eliminasi	6.191		13.341		(7.150)	-53,59%
Pendapatan Bunga Konsolidasian	4.861.636		4.128.670		732.966	17,75%

LABA (RUGI) OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	(6.088.071)	91,41%	(4.987.160)	98,51%	(1.100.911)	22,07%
Pembiayaan	(17.443)	0,26%	(1.687)	0,03%	(15.756)	933,97%
Syariah	(554.401)	8,32%	(73.945)	1,46%	(480.456)	649,75%
Total sebelum Eliminasi	(6.659.915)	100,00%	(5.062.792)	100,00%	(1.597.123)	31,55%
Eliminasi	713		6.024		(5.311)	-88,16%
Laba (Rugi) Operasional	(6.659.202)		(5.056.768)		(1.602.434)	31,69%

LABA (RUGI) BERSIH KONSOLIDASIAN

Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	(5.510.780)	90,99%	(4.966.957)	98,58%	(543.823)	10,95%
Pembiayaan	(18.571)	0,31%	(2.941)	0,06%	(15.630)	531,45%
Syariah	(527.065)	8,70%	(68.630)	1,36%	(458.435)	667,98%
Total sebelum Eliminasi	(6.056.416)	100,00%	(5.038.528)	100,00%	(1.017.888)	20,20%
Eliminasi	713		6.024		(5.311)	-88,16%
Laba (rugi) bersih konsolidasian	**(6.055.703)**		**(5.032.504)**		**(1.023.199)**	**20,33%**

TOTAL ASET KONSOLIDASIAN

Total Aset Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	78.842.594	90,39%	84.703.740	91,93%	(5.861.146)	-6,92%
Pembiayaan	459.661	0,53%	424.491	0,46%	35.170	8,29%
Syariah	7.920.474	9,08%	7.013.225	7,61%	907.249	12,94%
Total sebelum Eliminasi	87.222.729	100,00%	92.141.456	100,00%	(4.918.727)	-5,34%
Eliminasi	(2.915.429)		(2.146.104)		(769.325)	35,85%
Total aset konsolidasian	**84.307.300**		**89.995.352**		**(5.688.052)**	**-6,32%**

TOTAL LIABILITAS KONSOLIDASIAN

Total Liabilitas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	64.080.008	89,95%	73.377.904	91,63%	(9.297.896)	-12,67%
Pembiayaan	10.277	0,01%	299.351	0,37%	(289.074)	-96,57%
Syariah	7.151.658	10,04%	6.399.153	7,99%	752.505	11,76%
Total sebelum Eliminasi	71.241.943	100,00%	80.076.408	100,00%	(8.834.465)	-11,03%
Eliminasi	(1.044.806)		(1.297.661)		252.855	-19,49%
Total liabilitas konsolidasian	**70.197.137**		**78.778.747**		**(8.581.610)**	**-10,89%**

PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN GEOGRAFIS

KB Bank membagi segmen usaha berdasarkan peraturan kebijakan akuntansi menjadi Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Berikut merupakan informasi yang berkaitan dengan pendapatan, profitabilitas, dan posisi keuangan Bank dan Entitas Anak berdasarkan segmen usaha.

PENDAPATAN BUNGA KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bunga Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	3.381.976	69,65%	2.528.513	61,44%	853.463	33,75%
Jawa selain Jabodetabek	654.485	13,48%	756.328	18,38%	(101.843)	-13,47%
Sumatera	324.025	6,67%	322.090	7,83%	1.935	0,60%
Kalimantan	90.653	1,87%	94.924	2,31%	(4.271)	-4,50%
Lain-lain	404.306	8,33%	413.474	10,05%	(9.168)	-2,22%
Total sebelum eliminasi	4.855.445	100,00%	4.115.329	100,00%	740.116	17,98%
Eliminasi	6.191		13.341		(7.150)	-53,59%
Pendapatan Bunga Konsolidasian	**4.861.636**		**4.128.670**		**732.966**	**17,75%**

LABA (RUGI) OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	(4.450.328)	66,82%	(3.794.169)	74,94%	(656.159)	17,29%
Jawa selain Jabodetabek	(1.513.717)	22,73%	(1.127.194)	22,26%	(386.523)	34,29%
Sumatera	(265.686)	3,99%	(55.249)	1,09%	(210.437)	380,89%
Kalimantan	(88.722)	1,33%	(185.371)	3,66%	96.649	-52,14%
Lain-lain	(341.468)	5,13%	99.191	-1,96%	(440.659)	-444,25%
Total sebelum eliminasi	(6.659.921)	100,00%	(5.062.792)	100,00%	(1.597.129)	31,55%
Eliminasi	713		6.024		(5.311)	-88,16%
Laba (rugi) operasional konsolidasian	**(6.659.208)**		**(5.056.768)**		**(1.602.440)**	**31,69%**

LABA (RUGI) BERSIH KONSOLIDASIAN

Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	(4.067.817)	67,17%	(4.113.729)	81,65%	45.912	-1,12%
Jawa selain Jabodetabek	(1.349.764)	22,29%	(803.558)	15,95%	(546.206)	67,97%
Sumatera	(269.318)	4,45%	(59.267)	1,18%	(210.051)	354,41%
Kalimantan	(88.786)	1,47%	(185.592)	3,68%	96.806	-52,16%
Lain-lain	(280.731)	4,64%	123.617	-2,45%	(404.348)	-327,10%
Total sebelum eliminasi	(6.056.416)	100,00%	(5.038.529)	100,00%	(1.017.887)	20,20%
Eliminasi	713		6.024		(5.311)	-88,16%
Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian	**(6.055.703)**		**(5.032.505)**		**(1.023.198)**	**20,33%**

TOTAL ASET KONSOLIDASIAN

Total Aset Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	61.507.271	70,52%	63.059.098	68,44%	(1.551.827)	-2,46%
Jawa selain Jabodetabek	11.298.679	12,95%	14.157.351	15,36%	(2.858.672)	-20,19%
Sumatera	5.807.490	6,66%	6.122.616	6,64%	(315.126)	-5,15%
Kalimantan	1.492.026	1,71%	1.716.400	1,86%	(224.374)	-13,07%
Lain-lain	7.117.263	8,16%	7.085.991	7,69%	31.272	0,44%
Total sebelum eliminasi	87.222.729	100,00%	92.141.456	100,00%	(4.918.727)	-5,34%
Eliminasi	(2.915.429)		(2.146.104)		(769.325)	35,85%
Total aset konsolidasian	**84.307.300**		**89.995.352**		**(5.688.052)**	**-6,32%**

TOTAL LIABILITAS KONSOLIDASIAN

Total Liabilitas Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2023		2022		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	39.617.023	55,61%	44.640.738	55,75%	(5.023.715)	-11,25%
Jawa selain Jabodetabek	14.171.176	19,89%	18.023.304	22,51%	(3.852.128)	-21,37%
Sumatera	6.251.866	8,78%	6.724.622	8,40%	(472.756)	-7,03%
Kalimantan	3.033.770	4,26%	3.250.300	4,06%	(216.530)	-6,66%
Lain-lain	8.168.108	11,47%	7.437.444	9,29%	730.664	9,82%
Total sebelum eliminasi	71.241.943	100,00%	80.076.408	100,00%	(8.834.465)	-11,03%
Eliminasi	(1.044.806)		(1.297.661)		252.855	-19,49%
Total liabilitas konsolidasian	**70.197.137**		**78.778.747**		**(8.581.610)**	**-10,89%**

TINJAUAN KEUANGAN

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris (Moore Global) yang mendapat opini "Disajikan Secara Wajar (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian)".

Penyajian dan penungkapan Laporan Keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Pembahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

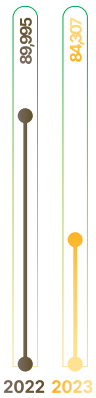
(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Pertumbuhan Rp	Pertumbuhan %
ASET				
Kas	289	524	(235)	-44,85%
Giro pada Bank Indonesia	3.206	4.140	(935)	-22,58%
Giro pada bank lain – neto	343	744	(401)	-53,95%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.134	12.181	(10.047)	-82,48%
Surat-surat berharga – neto	17.536	12.010	5.526	46,01%
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	2.572	-	2.572	n.a
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo)	-	-	-	n.a
Tagihan derivatif	3	9	(6)	-67,15%
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	45.836	48.957	(3.121)	-6,37%
Tagihan akseptasi	131	17	114	664,31%
Penyertaan saham	0	0	-	0,00%
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.234	3.396	(163)	-4,79%
Aset pajak tangguhan – neto	2.671	1.942	728	37,50%
Aset tak berwujud - neto	286	202	84	41,38%
Aset lain-lain – neto	6.068	5.872	196	3,34%
TOTAL ASET	**84.307**	**89.995**	**(5.688)**	**-6,32%**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	431	389	43	11,04%
Simpanan nasabah	44.789	51.962	(7.173)	-13,80%
Giro	3.178	3.578	(400)	-11,19%
Tabungan	6.873	6.956	(83)	-1,19%
Deposito	34.738	41.429	(6.690)	-16,15%
Simpanan dari bank lain	7.887	10.381	(2.495)	-24,03%

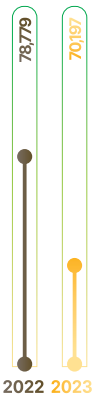
(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Pertumbuhan Rp	Pertumbuhan %
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	220	-	220	n.a
Liabilitas derivatif	1	12	(11)	-93,41%
Liabilitas akseptasi	133	17	115	664,31%
Pinjaman yang diterima	11.704	11.200	504	4,50%
Surat berharga yang diterbitkan	3.398	3.393	5	0,14%
Utang pajak	65	56	8	14,41%
Liabilitas lain-lain	1.570	1.368	203	14,82%
TOTAL LIABILITAS	**70.197**	**78.779**	**(8.582)**	**-10,89%**
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000	7.000	12.000	171,43%
Tambahan modal disetor	8.226	8.286	(61)	-0,73%
Uang muka setoran modal	-	3.000	(3.000)	-100,00%
Surplus revaluasi aset	1.604	1.606	(2)	-0,11%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	8	3	5	188,11%
Saldo laba	(14.701)	(8.673)	(6.028)	69,50%
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**14.136**	**11.221**	**2.915**	**25,98%**
Kepentingan non-pengendali	**(26)**	**(5)**	**(21)**	**441,55%**
TOTAL EKUITAS	**14.110**	**11.217**	**2.894**	**25,80%**
TOTAL LIABILITAS dan EKUITAS	**84.307**	**89.995**	**(5.688)**	**-6,32%**

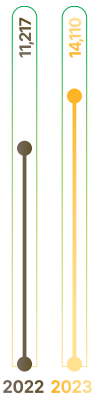
Jumlah Aset
(dalam miliar rupiah)



Jumlah Liabilitas
(dalam miliar rupiah)



Jumlah Ekuitas
(dalam miliar rupiah)



Pada tahun 2023, KB Bank mencatat total aset sebesar Rp84,31 triliun, menunjukkan penurunan sebesar 6,32% atau sebesar Rp5,69 triliun dibandingkan dengan total aset pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp89,99 triliun. Penyusutan aset ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pada penempatan pada pada Bank Indonesia dan bank lain dan kredit yang diberikan.

ASET KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Kas	289	524	(235)	-44,85%
Giro pada Bank Indonesia	3.206	4.140	(935)	-22,58%
Giro pada bank lain – neto	343	744	(401)	-53,95%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.134	12.181	(10.047)	-82,48%
Surat-surat berharga – neto	17.536	12.010	5.526	46,01%
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	2.572	-	2.572	n.a
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo)	-	-	-	n.a
Tagihan derivatif	3	9	(6)	-67,15%
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	45.836	48.957	(3.121)	-6,37%
Tagihan akseptasi	131	17	114	664,31%
Penyertaan saham	0	0	-	0,00%
TOTAL	**72.049**	**78.583**	**(6.534)**	**-8,31%**

Per 31 Desember 2023, jumlah aset keuangan Bank mencapai Rp70,05 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp6,53 triliun atau turun 8,31% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,58 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto sebesar Rp10,05 triliun serta penurunan pada Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto sebesar Rp3,12 miliar. Selain itu terdapat kenaikan pada Surat-surat berharga – neto sebesar 5,53 triliun dan Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto sebesar 2,57 triliun.

ASET NON KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.234	3.396	(163)	-4,79%
Aset pajak tangguhan – neto	2.671	1.942	728	37,50%
Aset tak berwujud - neto	286	202	84	41,38%
Aset lain-lain – neto	6.068	5.872	196	3,34%
Jumlah Aset Non Keuangan	**12.258**	**11.413**	**845**	**7,41%**

Per 31 Desember 2023, total aset non-keuangan yang dimiliki oleh Bank mencapai Rp12,26 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp845 miliar atau naik 7,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,41 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan di aset pajak tangguhan-neto sebesar Rp728 miliar, aset tak berwujud-neto sebesar Rp84 miliar dan aset lain-lain – neto sebesar Rp196 miliar.

LIABILITAS

Hingga 31 Desember 2023, total liabilitas Bank mencapai Rp70,20 triliun, menunjukkan penurunan sebesar Rp8,58 triliun atau 10,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp78,80 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan simpanan nasabah yang sebesar Rp7,17 triliun dan penurunan simpanan bank lain sebesar Rp2,49 triliun.

Liabilitas Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Liabilitas segera	431	389	43	11,04%
Simpanan nasabah	44.789	51.962	(7.173)	-13,80%
Giro	3.178	3.578	(400)	-11,19%
Tabungan	6.873	6.956	(83)	-1,19%
Deposito	34.738	41.429	(6.690)	-16,15%
Simpanan dari bank lain	7.887	10.381	(2.495)	-24,03%
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	220	-	220	n.a
Liabilitas derivatif	1	12	(11)	-93,41%
Liabilitas akseptasi	133	17	115	664,31%
Pinjaman yang diterima	11.704	11.200	504	4,50%
Surat berharga yang diterbitkan	3.398	3.393	5	0,14%
Liabilitas lain-lain	1.570	1.368	203	14,82%
Jumlah Liabilitas Keuangan	**70.133**	**78.722**	**(8.590)**	**-10,91%**

Per 31 Desember 2023, jumlah liabilitas keuangan KB Bank mencapai Rp70,13 triliun, menandai penurunan sebesar Rp8,59 triliun atau turun 10,91% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,72 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan simpanan nasabah yang sebesar Rp7,17 triliun dan penurunan simpanan bank lain sebesar Rp2,49 triliun.

Liabilitas Non Keuangan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Utang pajak				
Pajak penghasilan - Pasal 29	-	-	-	n.a
Pajak penghasilan Lainnya:				
Pasal 23 dan 4(2)	38.148	37.168	980	2,64%
Pasal 21	7.670	5.211	2.459	47,19%
Pajak Pertambahan Nilai	6.006	4.456	1.550	34,78%
Lain-lain	12.811	9.661	3.150	32,61%
TOTAL	**64.635**	**56.496**	**8.139**	**14,41%**

Hingga 31 Desember 2023, jumlah liabilitas non-keuangan Bank tercatat sebesar Rp64,64 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp8,14 triliun atau naik 14,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,50 triliun. Peningkatan tersebut terutama terdapat pada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp1,55 miliar, pajak pasal 21 sebesar Rp2,46 triliun serta pajak lain-lain sebesar Rp3,15 miliar.

EKUITAS

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000	7.000	12.000	171,43%
Tambahan modal disetor	8.226	8.286	(61)	-0,73%
Uang muka setoran modal	-	3.000	(3.000)	-100,00%
Surplus revaluasi aset	1.604	1.606	(2)	-0,11%
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	8	3	5	188,11%
Saldo rugi	(14.701)	(8.673)	(6.028)	69,50%
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	14.136	11.221	2.915	25,98%
Kepentingan non-pengendali	(26)	(5)	(21)	441,55%
Jumlah Ekuitas	**14.110**	**11.217**	**2.894**	**25,80%**

Pada akhir tahun 2023, ekuitas Bank mencapai Rp14,11 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp2,89 triliun atau naik 25,80% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,22 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp12 triliun, disisi lain terdapat kenaikan kerugian sebesar Rp6 triliun dan penurunan uang muka setoran modal sebesar Rp3 triliun di tahun 2023.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan Bunga dan Syariah	4.862	4.129	733	17,75%
Beban Bunga dan Syariah	(4.053)	(3.079)	(974)	31,62%
Pendapatan Bunga dan Syariah – Neto	809	1.050	(241)	-22,93%
Pendapatan operasional lainnya	457	500	(43)	-8,60%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.538)	(3.948)	(1.589)	40,25%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto	(269)	(81)	(188)	230,84%
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5	(2)	7	-372,80%
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	2	(2)	4	-187,98%
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155	(148)	303	-205,32%
Beban operasional lainnya	(2.280)	(2.424)	144	-5,93%
Rugi Operasional	(6.659)	(5.057)	(1.602)	31,69%
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	(128)	(89)	(39)	44,21%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(6.787)	(5.146)	(1.642)	31,91%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	732	113	619	546,64%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(6.056)	(5.033)	(1.023)	20,33%
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.034)	(5.027)	(1.007)	20,02%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	(22)	(5)	(17)	328,75%
Penghasilan komprehensif lain– neto	10	43	(33)	-77,04%
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	**(6.046)**	**(4.989)**	**(1.056)**	**21,17%**
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.024)	(48.984)	(1.040)	20,87%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	(21)	(5)	(16)	331,28%
Laba (Rugi) per saham Dasar/dilusian (nilai penuh)	(61)	(74)	13	-17,57%

PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan bunga dan Syariah	4.862	4.129	733	17,75%
Pendapatan bunga	4.375	3.721	653	17,55%
Kredit yang diberikan	3.120	2.960	161	5,42%
Surat-surat berharga	929	551	378	68,56%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	172	142	30	21,32%
Giro pada Bank Indonesia	28	22	6	27,73%
Giro pada bank lain	1	0	1	326,64%
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	123	46	77	167,78%
Pendapatan Tagihan lainnya	0	0	0	75,19%
Pendapatan Syariah	487	407	80	19,57%
Beban bunga dan Syariah	(4.053)	(3.079)	(974)	31,62%
Beban Bunga	(3.747)	(2.828)	(918)	32,47%
Giro	(37)	(38)	0	-1,22%
Tabungan	(193)	(240)	47	-19,57%
Deposito berjangka	(1.871)	(1.489)	(381)	25,60%
Surat berharga yang diterbitkan	(308)	(332)	24	-7,27%
Simpanan dari bank lain	(442)	(255)	(187)	73,47%
Pinjaman yang diterima	(891)	(447)	(444)	99,19%
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(5)	(27)	22	-83,21%
Beban Syariah	(306)	(251)	(55)	22,03%
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	809	1.050	(241)	-22,93%

*) di bawah Rp500 juta

Pada tahun 2023, jumlah pendapatan bunga dan syariah-neto Bank mengalami penurunan sebesar Rp241 miliar atau turun sebesar 22,93% dari tahun sebelumnya Rp1.050 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp809 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini dipicu oleh kenaikan beban bunga dan syariah sebesar 31,62% atau Rp974 miliar yang belum dapat di imbangi dengan kenaikan pendapatan bunga dan syariah yang sebesar Rp733 milar atau tumbuh 17,75%.

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan Operasional Lainnya	457	500	(43)	-8,60%
Provisi dan komisi lainnya	334	323	10	3,21%
Jasa administrasi	72	82	(10)	-11,73%
Imbalan jasa	174	164	11	6,43%
Komisi merchant	6	8	(3)	-31,57%
Lain-lain	81	69	12	17,49%
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	(9)	13	(22)	-168,02%
Keuntungan selisih kurs - neto	29	32	(3)	-8,02%
Lain-lain	102	131	(29)	-21,97%
Beban Operasional Lainnya	**(7.925)**	**(6.606)**	**(1.319)**	**19,96%**
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.538)	(3.948)	(1.589)	40,25%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto	(269)	(81)	(188)	230,84%
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5	(2)	7	-372,80%
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	2	(2)	4	-187,98%
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155	(148)	303	-205,32%
Umum dan administrasi	(1.372)	(1.571)	199	-12,69%
Gaji dan tunjangan karyawan	(810)	(734)	(76)	10,29%
Premi program penjaminan pemerintah	(99)	(119)	20	-16,82%
Pendapatan (beban) Operasional Lainnya - neto	**(7.468)**	**(6.106)**	**(1.362)**	**22,30%**

Pada tahun 2023, jumlah pendapatan (beban) operasional lainnya - neto Bank mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp1,36 triliun atau naik sebesar 22,30% dari tahun sebelumnya minus Rp6,11 triliun menjadi minus Rp7,47 triliun. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan-neto sebesar Rp1,59 triliun atau 40,25%.

LABA (RUGI) OPERASIONAL

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	809	1.050	(241)	-22,93%
Pendapatan operasional lainnya	457	500	(43)	-8,60%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.538)	(3.948)	(1.589)	40,25%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto	(269)	(81)	(188)	230,84%
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5	(2)	7	-372,80%
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	2	(2)	2	-187,98%
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155	(148)	303	-205,32%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Beban operasional lainnya	(2.280)	(2.424)	144	-5,93%
Laba (rugi) Operasional	(6.659)	(5.057)	(1.602)	31,69%

Pada tahun 2023, jumlah rugi operasional Bank mencapai Rp6,66 triliun, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp1,60 triliun atau naik sekitar 31,69% dari tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi sebesar Rp5,06 triliun. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan-neto sebesar Rp1,59 triliun atau 40,25% sebagai bagian dari langkah strategis perbaikan kualitas aset rendah.

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL-NETO

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Keuntungan dari penjualan agunan yang diambil alih	(6)	(25)	19	-77,18%
Keuntungan (Kerugian) dari penjualan aset tetap	(6)	2	(7)	-444,62%
Lain-lain - neto	(117)	(66)	(51)	77,84%
Pendapatan (beban) Non Operasional Lainnya - neto	(128)	(89)	(39)	44,21%

Pendapatan (beban) Non operasional-neto Bank di tahun 2023 tercatat sebesar minus Rp128 miliar mengalami peningkatan beban sebesar Rp39 miliar atau naik 44,21% dari tahun sebelumnya sebesar minus Rp89 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan kerugian dari pos lain-lain - neto.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Laba (Rugi) Operasional	(6.659)	(5.057)	(1.602)	31,69%
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	(128)	(89)	(39)	44,21%
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(6.787)	(5.146)	(1.642)	31,91%

Pada tahun 2023, KB Bank membukukan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp6,79 triliun, kerugian tersebut naik sebesar 31,91% atau sebesar Rp1,64 triliun dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2022 sebesar Rp5,15 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan-neto.

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Kini	-	-	-	n.a
Tangguhan	732	113	619	546,64%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	732	113	619	546,64%

Pada tahun 2023, manfaat (beban) pajak penghasilan Bank tercatat sebesar Rp732 miliar, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp619 miliar atau sebesar 546,64% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp113 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban pajak tangguhan sebesar Rp619 miliar.

RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.034.077)	(5.027.460)	(1.006.617)	20,02%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	(21.626)	(5.044)	(16.582)	328,75%
Rugi Tahun Berjalan	(6.055.703)	(5.032.504)	(1.023.199)	20,33%

Rugi Tahun Berjalan di tahun 2023 tercatat sebesar minus Rp6,06 triliun mengalami kenaikan rugi sebesar Rp1,02 triliun atau naik 20,33% dari tahun sebelumnya tercatat rugi sebesar Rp5,03 triliun. Kenaikan kerugian ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan-neto.

RUGI KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	8.640	25.736	(17.096)	-66,43%
Perubahan surplus revaluasi aset	(1.756)	77.837	(79.593)	-102,26%
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.900)	(5.663)	3.763	-66,45%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.330	(70.134)	76.464	-109,03%
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.392)	15.429	(16.821)	-109,02%
Penghasilan (Rugi) komprehensif lain– neto	**9.922**	**43.205**	**(33.283)**	**-77,04%**

Pada tahun 2023, KB Bank mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp9,92 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencatat keuntungan sebesar Rp43,21 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada pos pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti dan penurunan pos perubahan surplus revaluasi aset.

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.024.463)	(4.984.356)	(1.040.107)	20,87%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	(21.318)	(4.943)	(16.375)	331,28%
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	**(6.045.781)**	**(4.989.299)**	**(1.056.482)**	**21,17%**

Pada tahun 2023, Bank mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp6,05 triliun, jumlah tersebut mengalami kenaikan kerugian sebesar Rp1,06 triliun atau naik 21,17% dari tahun sebelumnya yang mencatat rugi sebesar Rp4,99 triliun. Penyebab utama kenaikan kerugian tersebut adalah kenaikan kerugian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk sebesar 20,87%

RUGI PER SAHAM DASAR/DILUSIAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(6.034.077)	(5.027.460)	(1.006.617)	20,02%
Rata-rata tertimbang jumlah saham dasar	98.277.584.070	67.887.540.178	30.390.043.892	44,77%
Rugi per saham Dasar/dilusian (nilai penuh)	**(61)**	**(74)**	**13**	**-17,57%**

Pada tahun 2023, KB Bank mencatatkan rugi per saham dasar/Basic Earnings per Share (EPS) sebesar Rp61,- per lembar saham, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat rugi sebesar Rp74,- per lembar saham. Penurunan kerugian ini disebabkan oleh kenaikan kerugian tahun berjalan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(10.165.808)	(259.228)	(9.906.580)	3.821,57%
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(11.595.208)	(6.783.280)	(4.811.928)	70,94%
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	9.663.331	9.397.053	266.278	2,83%
Penurunan neto kas dan setara kas	(12.097.685)	2.354.545	(14.452.230)	-613,80%
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	492.085	(422.197)	914.282	-216,55%
Kas dan setara kas awal tahun	17.559.551	15.627.203	1.932.348	12,37%
Kas dan setara kas akhir tahun	5.953.951	17.559.551	(11.605.600)	-66,09%

Pada tahun akhir tahun buku periode 2023, jumlah kas dan setara kas Bank tercatat sebesar Rp5,95 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp11,61 triliun dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas pada awal tahun yang sebesar Rp17,56 triliun. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan sebesar 10,03 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pada tahun 2023, KB Bank mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar minus Rp10,17 triliun, mengalami kenaikan sebesar 3.821,57% dibanding posisi tahun 2022 yang sebesar minus Rp259 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dari arus kas liabilitas aktivitas operasi yaitu deposito berjangka sebesar Rp6,69 triliun dan simpanan dari bank lain sebesar Rp2,49 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pada tahun 2023, KB Bank mencatat arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp11,60 triliun, mengalami kenaikan sebesar 70,94 atau sebesar Rp4,81 triliun dibanding posisi tahun 2022 yang sebesar minus Rp6,78 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp60,35 triliun dan Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual/diukur pada nilai wajar/melalui penghasilan komprehensif lain dan dimiliki hingga jatuh tempo/diukur pada biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp20,80 triliun yang dimbangi dengan Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo sebesar Rp11,73 triliun. dan Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo sebesar Rp57,78 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di tahun 2023 adalah sebesar Rp9,66 triliun, naik sebesar Rp266,27 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp9,40 triliun. Peningkatan ini berasal dari penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas VII sebesar Rp8,94 triliun, disisi lain terdapat penurunan dari penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp7,64 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang atau memenuhi kewajibannya diukur melalui beberapa rasio keuangan yang mencakup likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Terkait likuiditas, pada tahun 2023, Perseroan menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 113,18%, naik dari 98.48%% pada tahun 2022. Untuk solvabilitas, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank mencapai 27,05%, melebihi batas minimal regulator sebesar 12,5%, yang menandakan kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko kredit, pasar, dan operasional. Rasio rentabilitas mencakup ROA -7,71%, ROE -61,38%, NIM 0,78%, dan BOPO 223,24%. ROA, NIM, dan BOPO mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sementara ROE justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Rentabilitas Bank pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan
			%
Imbal hasil aset (ROA)	-7,71%	-6,27%	-1,44%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	-61,38%	-82,58%	21,20%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	0,78%	1,17%	-0,39%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	223,28%	226,22%	-2,94%

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin berbagai kewajiban bank umum, termasuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan lainnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008. Sebelumnya, batas maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 adalah Rp100 juta, yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp2 miliar berdasarkan peraturan tersebut. Pada tanggal 13 Januari 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 menetapkan Lembaga Penjaminan Simpanan sebagai Perusahaan Pemerintah, menggantikan peran undang-undang sebelumnya. Hal ini menjadi landasan hukum untuk menetapkan perlindungan simpanan nasabah bank.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utangnya dapat dilihat dari peringkat surat utang atau obligasi yang diterbitkannya. Obligasi tersebut dinilai oleh lembaga pemeringkat seperti Pefindo untuk menentukan tingkat kelayakannya. Kualitas sebuah obligasi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya saat jatuh tempo, serta membayar bunga atau kuponnya sesuai dengan yang dijanjikan selama masa berlakunya obligasi tersebut. Obligasi yang diterbitkan biasanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kemampuan Membayar Utang Dari Efek-efek Yang Diterbitkan

Uraian	Peringkat		
	2023	2022	2021
Obligasi			
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2015	-	-	idA- (Pefindo)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017	idAA (Pefindo)	idA- (Pefindo)	idA- (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	idnAAA (Fitch Ratings)	idnAAA (Fithc)	-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	idnAA (Fitch Ratings)	idAA (Pefindo)	-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	idnAA (Fitch Ratings)	idAA (Pefindo)	-

Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
PEFINDO	idA+	Obligor dengan peringkat idA memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya. Namun, Obligor agak lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari perubahan keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan Obligor berperingkat lebih tinggi. Tanda Plus (+) menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat di dalam kategori peringkat masing-masing.
	idA	Mengindikasikan bahwa kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi.
	idAA	Obligor dengan peringkat idAA berbeda dari obligor dengan peringkat tertinggi hanya pada tingkat yang kecil, dan memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jangka waktu komitmen keuangan relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.
	idBBB	Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan dengan obligasi Indonesia lainnya. Namun, kondisi ekonomi yang merugikan atau keadaan yang berubah lebih mungkin menyebabkan melemahnya kapasitas Obligor untuk memenuhi komitmen keuangannya.
Fitch Rating	AAA	Peringkat Nasional jangka panjang 'AAA' merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala peringkat Nasional. Peringkat ini diberikan kepada emiten dengan ekspektasi gagal bayar yang paling rendah dibandingkan emiten lainnya yang serupa.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kualitas kredit konsolidasian yang diberikan berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Kolektibilitas Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2023 (Konsolidasian)						
Keterangan	**Lancar**	**Dalam Perhatian Khusus**	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**	**Jumlah**
Rupiah:						
Modal kerja	12.700.942	2.778.896	86.298	27.551	1.385.015	16.978.702
Investasi	12.421.537	955.853	45.904	15.666	1.036.580	14.475.540
Konsumsi	10.407.855	444.975	76.048	117.965	1.699.974	12.746.817
Program pemerintah	98.757	1.035	-	1.306	4.044	105.142
Sindikasi	3.544	122	-	221	39	3.926
Direksi dan karyawan	76.516	-	-	-	2.152	78.668
Bank lain	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Rupiah	35.709.151	4.180.881	208.250	162.709	4.127.804	44.388.795
Cadangan kerugian penurunan nilai	(591.000)	(752.511)	(44.807)	(56.860)	(2.069.484)	(3.514.662)
Neto	35.118.151	3.428.370	163.443	105.849	2.058.320	40.874.133
Mata Uang Asing:						
Modal kerja	3.355.300	-	-	-	13.821	3.369.121
Investasi	1.658.515	-	-	-	-	1.658.515
Konsumsi	2.185	-	-	-	-	2.185
Sindikasi	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Mata Uang Asing	5.016.000	-	-	-	13.821	5.029.821

Kolektibilitas Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2023 (Konsolidasian)						
Keterangan	**Lancar**	**Dalam Perhatian Khusus**	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**	**Jumlah**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.311)	-	-	-	(3.861)	(68.172)
Neto	4.951.689	-	-	-	9.960	4.961.649
Jumlah	**40.069.840**	**3.428.370**	**163.443**	**105.849**	**2.068.280**	**45.835.782**
Komposisi	87,42%	7,48%	0,36%	0,23%	4,51%	100,00%

Kolektibilitas Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2022 (Konsolidasian)						
Keterangan	**Lancar**	**Dalam Perhatian Khusus**	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**	**Jumlah**
Rupiah:						
Modal kerja	17.577.102	537.385	221.593	116.896	398.519	18.851.495
Investasi	12.967.929	282.237	132.377	137.770	266.396	13.786.709
Konsumsi	11.421.325	475.524	61.644	117.794	1.901.237	13.977.524
Program pemerintah	60.032	1.085	272	41	11.193	72.623
Sindikasi	539.090	-	-	-	-	539.090
Direksi dan karyawan	76.210	-	-	-	-	76.210
Bank lain	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Rupiah	42.641.688	1.296.230	415.887	372.500	2.577.344	47.303.651
Cadangan kerugian penurunan nilai	(520.251)	(93.532)	(60.615)	(113.253)	(787.417)	(1.575.069)
Neto	42.121.437	1.202.698	355.272	259.247	1.789.929	45.728.584
Mata Uang Asing:						
Modal kerja	1.573.816	-	-	-	33.384	1.607.200
Investasi	476.531	-	-	-	-	476.531
Konsumsi	2.306	-	-	-	-	2.306
Sindikasi	1.193.746	-	-	-	-	1.193.746
Sub Jumlah Mata Uang Asing	3.246.399	-	-	-	33.384	3.279.783
Cadangan kerugian penurunan nilai	(42.284)	-	-	-	(9.325)	(51.609)
Neto	3.204.115	-	-	-	24.059	3.228.174
Jumlah	**45.325.552**	**1.202.698**	**355.272**	**259.247**	**1.813.988**	**48.956.758**
Komposisi	**92,58%**	**2,46%**	**0,73%**	**0,53%**	**3,71%**	**100,00%**

RASIO KEUANGAN

Berikut adalah rasio-rasio keuangan dan rasio penting lainnya dari Perusahaan untuk tahun buku 2022 sampai dengan tahun 2023.

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

(Dalam Persentase, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PERMODALAN		
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit	28,50%	20,13%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	28,37%	20,01%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	27,17%	19,19%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	27,05%	19,08%
Aset Tetap - neto terhadap Modal inti	38,51%	55,45%
ASET PRODUKTIF		
Aset produktif dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	6,27%	6,92%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	6,37%	4,09%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	4,80%	1,93%
NPL Gross	9,56%	6,56%
NPL Nett	4,87%	4,84%
PROFITABILITAS		
ROA	-7,71%	-6,27%
ROE	-61,38%	-82,58%
NIM	0,78%	1,17%
BOPO	223,28%	226,22%
Rasio Laba (Rugi) terhadap pendapatan bunga	-124,56%	-121,89%
Rasio Laba (Rugi) terhadap jumlah Aset	-7,18%	-5,59%
Rasio Laba (Rugi) terhadap jumlah Ekuitas	-42,92%	-44,87%
Rasio Liabilitas terhadap jumlah Aset	83,26%	87,54%
Rasio Liabilitas terhadap jumlah Ekuitas	497,49%	702,34%
LIKUIDITAS		
LDR	113,18%	98,48%
KEPATUHAN		
Persentase pelanggaran BMPK		
Pihak terkait	-	-
Pihak tidak terkait	-	-
Persentase pelampauan BMPK		
Pihak terkait	-	-
Pihak tidak terkait*	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM):		
GWM Utama Rupiah		
GWM Harian	7,05%	8,53%

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

(Dalam Persentase, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
GWM Rata-rata	7,37%	8,53%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h GWM Sekunder	35,08%	13,87%
GWM konvensional valuta asing	4,02%	4,02%
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,62%	1,59%

*)Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak penurunan Modal Inti yang dialami oleh Bank. Pelampauan BMPK ini telah diselesaikan sesuai Surat Bank No.04380/DIR/III/2021 tanggal 8 Maret 2022
*) Per 31 Desember 2019 terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dikarenakan adanya perubahan peraturan, dimana peraturan sebelumnya berdasarkan PBI No.7/3/PBI/2005 dan No.8/13/PBI/2008 telah diperbaharui dengan POJK NO.32/POJK.03/2018 tentang BMPK bagi Bank Umum. Pelampauan BMPK yang terjadi berkaitan dengan batas maksimum penjaminan kredit dalam rangka Teknik Manajemen Risiko Kredit (MRK). Per Maret 2020, pelampauan BMPK ini telah dapat diselesaikan.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Selain itu, Perseroan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kebijakan Perseroan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Struktur Modal Perusahaan

Komposisi struktur modal yang diterapkan Perseroan bertujuan agar dapat memaksimalkan nilai melalui komposisi struktur modal yang optimal. Adapun komposisi struktur modal di tahun 2023 dan perbandingannya di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan Perseroan 2023-2022

Komponen Modal	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
A. MODAL INTI (Tier 1)	**7.847.606**	**9.813.056**	**5.726.315**	**6.750.289**
1. Modal Inti Utama (CET 1)	7.847.606	9.813.056	5.726.315	6.750.289
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi Treasury Stock)	19.000.000	19.000.000	7.000.000	7.000.000
1.2 Cadangan Tambahan Modal	(5.726.387)	(6.230.802)	2.087.734	1.894.449
1.2.1 Faktor Penambah	9.792.829	10.001.143	12.848.917	12.895.444
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya	1.567.062	1.775.376	1.562.489	1.609.016
1.2.1.1.1 Selisih Lebih Penjabaran Laporan Keuangan				
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9.696	171.483	3.367	3.367
1.2.1.1.3 Saldo Surplus revaluasi aset tetap	1.557.366	1.603.893	1.559.122	1.605.649
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)	8.225.767	8.225.767	11.286.428	11.286.428
1.2.1.2.1 Agio	8.225.767	8.225.767	8.286.428	8.286.428
1.2.1.2.2 Cadangan umum				
1.2.1.2.3 Laba tahun - tahun lalu				
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan				
1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-	3.000.000	3.000.000
1.2.1.2.6 Lainnya				
1.2.2 Faktor Pengurang	(15.519.216)	(16.231.945)	(10.761.183)	(11.000.995)

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan Perseroan 2023-2022

Komponen Modal	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya				
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan				
1.2.2.1.2 Potensi Kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual				
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)	(15.519.216)	(16.231.945)	(10.761.183)	(11.000.995)
1.2.2.2.1 Disagio	-	-		
1.2.2.2.2 Rugi tahun - tahun lalu	(8.662.180)	(8.830.450)	(3.692.200)	(3.802.989)
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan	(5.510.779)	(6.034.384)	(4.969.980)	(5.027.461)
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	(367.039)	(254.447)	(1.447.325)	(1.459.545)
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book				
1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk	(979.218)	(1.112.664)	(651.678)	(711.000)
1.2.2.2.7 Lainnya				
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan				
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1)	(5.426.007)	(2.956.142)	(3.361.419)	(2.144.160)
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	(2.558.815)	(2.670.542)	(1.858.834)	(1.942.151)
1.4.2 Goodwill	-	(189.482)		(189.482)
1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	(95.241)	(96.103)	(11.199)	(12.512)
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	(2.206.951)	(15)	(926.386)	(15)
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi				
1.4.6 Eksposur sekuritisasi				
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya	(565.000)	-	(565.000)	
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT I dan/atau Tier 2 pada bank lain	(565.000)	-	(565.000)	
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lan yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,atau hibah wasiat				
1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non Delivery Versus Payment				
1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)				
2. Modal Inti Tambahan (AT - 1)				
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1				
2.2 Agio/Disagio				
2.3 Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain				

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan Perseroan 2023-2022

Komponen Modal			31 Desember 2023		31 Desember 2022	
			INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
	2.3.1	Penempatan dana pada instrumen AT I dan/atau Tier 2 pada bank lain				
	2.3.2	Kepemilikan silang pada entitas lan yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,atau hibah wasiat				
B.	**MODAL PELENGKAP (Tier 2)**		**4.317.559**	**4.392.073**	**4.778.737**	**4.788.685**
	1.	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	3.798.018	3.848.018	4.234.609	4.234.609
	2.	Agio/disagio				
	3.	Cadangan Umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	519.541	544.055	544.128	554.076
	4.	Faktor pengurang modal pelengkap 1)				
		4.1 Sinking Fund				
		4.2 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain 2)				
		4.3 Kepemilikan silang pada entitas lan yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,atau hibah wasiat				
TOTAL MODAL			**12.165.165**	**14.205.129**	**10.505.052**	**11.538.974**
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
	ATMR RISIKO KREDIT 3)		42.683.771	48.289.880	52.182.469	55.820.223
	ATMR RISIKO PASAR		197.195	197.195	317.510	317.510
	ATMR RISIKO OPERASIONAL		2.098.314	2.344.395	2.547.386	3.068.047
	TOTAL ATMR		44.979.280	50.831.470	55.047.365	59.205.780
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISKO			10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
RASIO KPMM						
	Rasio CET 1 (%)		17,45%	19,31%	10,40%	11,40%
	Rasio Tier 1 (%)		17,45%	19,31%	10,40%	11,40%
	Rasio Tier 2 (%)		9,60%	8,64%	8,68%	8,09%
	Rasio KPMM (%)		27,05%	27,95%	19,08%	19,49%
CET 1 UNTUK BUFFER (%)			11,45%	13,31%	-0,09%	-0,14%
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)			2,500%	2,500%	2,500%	2,500%
	Capital Conservation Buffer (%)		2,500%	2,500%	2,500%	2,500%
	Countercyclical Buffer (%)		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Capital Surcharge untuk bank sistemik (%)		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank, maka KB Bank memiliki kewajiban untuk mengelola permodalan. Hal tersebut tidak serta merta dikarenakan sifat bisnis Perseroan yang wajib memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan juga nilai tambah serta manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Struktur permodalan Perseroan merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri, yaitu ekuitas Perseroan, dengan penggunaan modal eksternal, yaitu liabilitas Perseroan. Modal eksternal dapat berbentuk pinjaman/hutang bank, hutang usaha maupun jenis pinjaman yang lain. Sementara itu ekuitas didapatkan dari penempatan modal, penghasilan komprehensif tahunan.

Dalam pengelolaan struktur permodalan, Bank menerapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Memanfaatkan modal secara efisien untuk pertumbuhan bisnis, khususnya pembiayaan baru dan investasi masa depan (New Generation Banking System, Pengembangan Outlet, dll)
2. Pencadangan kerugian kredit untuk upaya penyelesaian kredit bermasalah akan berasal dari perolehan pendapatan dari upaya Turn-around (keuntungan sendiri)
3. pengelolaan ATMR dan capital charges (pengelolaan faktor pengurang modal melalui retaksasi jaminan) serta penyelesaian kredit bermasalah serta AYDA

IKATAN YANG MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Sepanjang tahun 2023, Bank tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal. Dengan demikian, informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2023, KB Bank melanjutkan strategi investasi dalam barang modal untuk meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah di masa depan. Berikut adalah realisasi investasi barang modal Bank untuk tahun 2022 dan 2023:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Pertumbuhan Rp	Pertumbuhan %
Tanah	8.175	12.826	(4.651)	-36,26%
Bangunan	5.561	10.868	(5.307)	-48,83%
Perabotan dan peralatan kantor	14.084	22.677	(8.593)	-37,89%
Kendaraan bermotor	26.749	1.394	25.355	1818,32%
Prasarana bangunan	351	4.970	(4.619)	-92,94%
Aset dalam konstruksi	5.846	4.485	1.361	30,35%
Jumlah Belanja Modal	**60.766**	**57.220**	**3.546**	**6,20%**
Arus Kas Pembayaran untuk Belanja Modal	60.766	57.220	3.546	6,20%

Per 31 Desember 2023, realisasi investasi barang modal Perusahaan tercatat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp57,22 miliar di tahun 2022 menjadi Rp60,77 miliar di tahun 2023.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2023 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 20 Mei 2024.

1. Asset Bulk Sales
   Asset Bulk Sales merupakan skema dari rangkaian transaksi yang terdiri dari:
   a. Penjualan Kredit
      Bank melakukan penjualan kredit kepada TLDC PTE LTD dengan total baki debet Rp2.868.932 yang dibeli dengan harga Rp1.621.790 pada 28 Maret 2024.
   b. Akuisisi Private Bond
      Bank telah melakukan pembelian private bond dari TLDC PTE LTD dengan nominal sebesar USD106 juta pada 28 Maret 2024 dengan jangka waktu 5 tahun dan Bunga floating berdasarkan US Treasury Bills 5y + margin variabel 0,8% (tahun ke-1 & tahun ke-2)/0,9% (tahun ke-3)/1% (tahun ke 4 & tahun ke-5).

2. Pinjaman yang Diterima
   Berdasarkan dokumen Perjanjian Pinjaman pada tanggal 1 April 2024, fasilitas pinjaman diterima oleh PT Bank KB Bukopin Tbk dari The Korea Development Bank, cabang Singapura dengan nominal USD300.000.000.

PROSPEK USAHA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Januari 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital.

Merujuk data dari Survei Perbankan yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan bahwa penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru triwulan IV 2023 sebesar 96,1%, lebih tinggi dari 95,4% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit baru yang meningkat terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit konsumsi. Peningkatan terindikasi terjadi pada kredit modal kerja (SBT 93,5%) dan kredit investasi (SBT 85,0%).

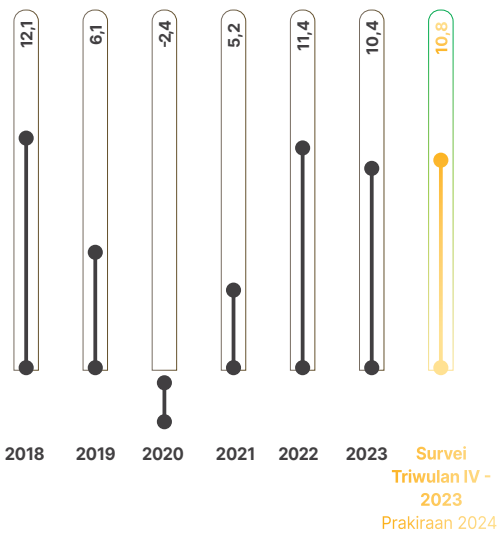
Sementara itu, kredit konsumsi (SBT 79,3%) terindikasi tumbuh positif didorong oleh Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang terindikasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kredit multiguna, kartu kredit, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) terindikasi tumbuh terbatas.

Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru tertinggi terutama terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SBT 85,9%), diikuti oleh sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (SBT 84,8%), serta sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (SBT 66,8%).

Secara triwulanan (qtq), penyaluran kredit baru pada triwulan I 2024 diprakirakan tumbuh positif meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru triwulan I 2024 yang sebesar 44,6%, tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan SBT 96,1% pada triwulan sebelumnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan pola historis realisasi pertumbuhan kredit baru. Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan I 2024 adalah kredit modal kerja, diikuti oleh kredit investasi dan kredit konsumsi.

Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran KPR/ KPA masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh kredit multiguna dan KKB. Berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan I 2024 diprioritaskan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Perantara Keuangan. Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit pada 2023 sebesar 10,4% (yoy) meski tidak setinggi realisasi pertumbuhan pada 2022 sebesar 11,4% (yoy).

Prakiraan Pertumbuhan Kredit

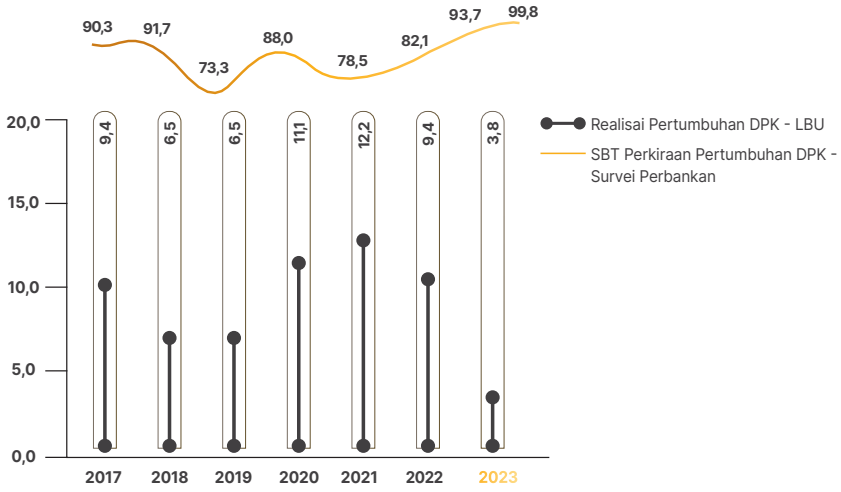


Sumber : Bank Indonesia

Di sisi lain, kebijakan penyaluran kredit pada triwulan I 2024 diprakirakan sedikit lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) triwulan I 2024 yang bernilai positif sebesar 0,3%. Standar penyaluran kredit yang lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya diprakirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali KPR/KPA. Mayoritas aspek kebijakan penyaluran kredit diprakirakan mengetat dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya perjanjian kredit dan agunan. Sementara itu, kebijakan plafon kredit diprakirakan lebih longgar. Adapun kebijakan suku bunga kredit dan biaya persetujuan kredit diprakirakan tetap longgar.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan I 2024 diprakirakan melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan tersebut terindikasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 16,1%, lebih rendah dibandingkan 93,7% pada triwulan sebelumnya, sesuai pola historisnya. Perlambatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis kategori instrumen, yakni giro, tabungan, dan deposito dengan SBT masing-masing sebesar 16,4%; 58,4%; dan 6,3%. Pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2024 diprakirakan tinggi. Hal ini tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun 2024 yang tercatat positif sebesar 99,8%, lebih tinggi dibandingkan SBT 93,7% pada tahun sebelumnya.

Prakiraan Pertumbuhan DPK



Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan uraian makro industri di atas, serta mempertimbangkan iklim perekonomian global dan internal Bank, maka Bank senantiasa aktif melakukan mitigasi dalam rangka menjawab tantangan yang akan datang. Untuk mencapai sasaran keuangan di tahun 2024, Bank berkomitmen untuk terus melakukan perubahaan yaitu salah satunya adalah dengan fokus pada loan portfolio improvement dan deposit portfolio advancement sebagai upaya Bank dalam meningkatkan kinerja di semua lini, sehingga diharapkan mampu memperbaiki PPOP yang diproyeksikan akan turn around di tahun 2024 dan dapat membukukan profit di tahun 2025. Adapun upaya loan portfolio improvement dan deposit portfolio advancement akan dilakukan melalui:

1. Bank akan melakukan langkah langkah penyelesaian bad loan melalui penurunan LAR dan memperkuat fungsi manajemen DPD dengan menargetkan penurunan LAR di 2024 dibawah 25%. Bank akan memaksimalkan nilai recovery dari bad loan dan meminimalisir biaya kredit melalui pengoptimalan collection dan manajemen DPD serta melalui penjualan secara bulk di 2024. Untuk menekan NPL gross di 2024 dibawah 10%, Bank akan mengelola debitur restrukturisasi dan debitur yang perlu dipercepat proses lelang agunannya dengan tetap mempertimbangkan rasio pengembalian yang baik. Selain itu Bank akan menjaga CAR di angka 18%-19%.
2. Pada aspek pertumbuhan bisnis, Bank menargetkan pertumbuhan kredit baru di tahun 2024 mencapai Rp 8,5 triliun. Segmen wholesale masih menjadi size driver dengan komposisi alokasi kredit baru sebesar 44%, diikuti segmen retail sebesar 33% dan segmen MSME 23%. Bank akan memperdalam bisnis wholesale dan anchor-linked SME & Retail serta akan mengeksplor segmen bisnis baru. Bank akan mendorong pertumbuhan kredit baru melalui produk-produk baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, program stimulus untuk penjualan, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis, membangun ekosistem digital untuk menarik lebih banyak nasabah dan asset liability management yang kompetitif. Pada aspek dana pihak ketiga, di tahun 2024 dana pihak ketiga akan tumbuh dengan target LDR dijaga di 100% sehingga meminimalisir excess fund. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan CASA dengan rasio target diatas 25% dengan membangun customer base yang kuat, sehingga dapat menurunkan cost of fund.
3. Bank akan melanjutkan inisiatif cost reduction melalui efisiensi pada biaya overhead. Peningkatan biaya overhead selaras dengan strategi pertumbuhan dan penghematan biaya.

Rasio keuangan terutama dari sisi kualitas kredit akan menunjukkan perbaikan seiring dengan rencana Bank untuk menyelesaikan bad loan melalui bulk sale, perbaikan struktur dana pihak ketiga melalui peningkatan CASA untuk memperkuat likuiditas, dan upaya cost reduction melalui efisiensi pada biaya overhead. Selain itu, diharapkan perbaikan kualitas kredit meningkat yang diimbangi dengan pertumbuhan kredit yang sehat sehingga secara signifikan dapat memperbaiki tingkat profitabilitas yang dicerminkan oleh rasio NIM agar Bank dapat bertumbuh secara berkelanjutan kedepannya.

PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Pada awal tahun 2022, Bank telah menyusun dan menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dan telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi, baik dari sektor perekonomian maupun industri perbankan di Indonesia. Adapun pencapaian Perusahaan atas target 2022 yang telah ditetapkan serta proyeksi untuk tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Realisasi terhadap Target 2023

(dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Realisasi 2023	RBB 2023	Pencapaian
POSISI KEUANGAN			
Total Aset	78.842.594	94.497.168	83,43%
Kredit yang diberikan	44.183.228	47.924.035	92,19%
Total Simpanan Nasabah	39.036.634	47.924.035	81,46%
Total Ekuitas	14.762.721	16.371.058	90,18%
LABA/RUGI			
Pendapatan Bunga Bersih	609.196	994.961	61,23%
Pendapatan Operasional Selain bunga	590.352	473.181	124,76%
Beban Operasional Selain bunga	(2.040.106)	(2.265.696)	111,06%
(Beban) Pemulihan CKPN	(5.247.514)	(3.804.569)	72,50%
Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih	(125.498)	(363.069)	289,30%
Rugi Bersih	(5.510.781)	(3.872.850)	70,28%

Proyeksi 2024 terhadap Realisasi 2023

(dalam Miliar Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Realisasi 2023	RBB 2024
POSISI KEUANGAN		
Total Aset	78.842.594	81.154.890
Kredit yang diberikan	44.183.228	43.227.625
Total Simpanan Nasabah	39.036.634	43.512.323
Total Ekuitas	14.762.721	11.479.386
LABA/RUGI		
Pendapatan bunga - neto	609.196	1.208.478
Pendapatan Operasional Selain Bunga	590.352	644.235
Beban Operasional Selain Bunga	(2.040.106)	(2.130.023)
(Beban) Pemulihan CKPN	(5.247.514)	(4.079.682)
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	(125.498)	(747.171)
Laba Bersih	(5.510.781)	(3.981.247)
RASIO KEUANGAN POKOK		
NIM	0,78%	1,55%
CAR	27,05%	18,30%
NPL-Net	4,95%	4,78%

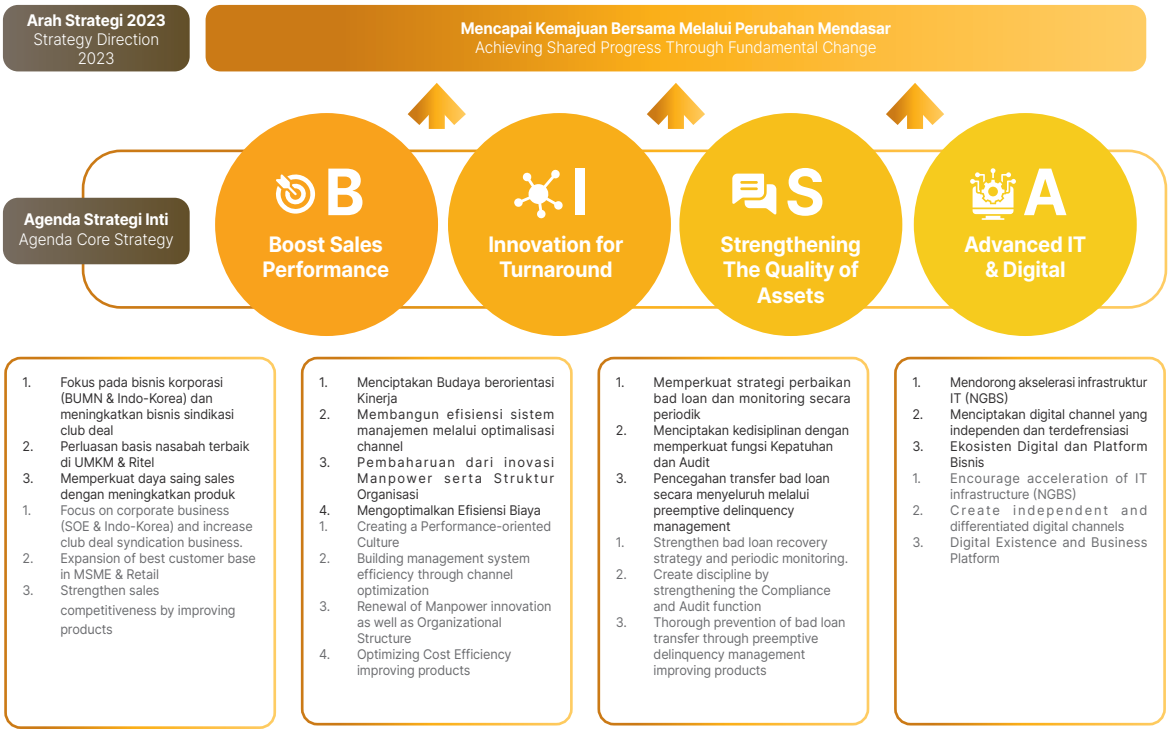
ASPEK PEMASARAN

Aspek pemasaran adalah faktor kunci bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan dari aspek pemasaran adalah untuk memetakan pangsa pasar guna mendukung perkembangan bisnis perusahaan, serta menganalisis kebutuhan pasar agar strategi pemasaran yang tepat dapat ditetapkan sesuai dengan permintaan pasar. Berikut adalah strategi pemasaran dilakukan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

STRATEGI MANAJEMEN

Berdasarkan kondisi terkini baik dari sisi internal maupun eksternal, dan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bank mengidentifikasi 3 tahapan yang menjadi kunci keberhasilan proses transformasi fokus pada area utama, mempersiapkan strategi turn around dan meningkatkan kapabilitas bisnis Bank dimasa yang akan datang. Untuk mendukung pertumbuhan yang telah ditargetkan tersebut, terdapat 4 (empat) pilar yang perlu dicapai, yaitu :

1. *Boost Sales Performance*
   Aspirasi untuk mengembalikan kejayaan KB Bank hanya dapat dilakukan melalui pertumbuhan bisnis yang cepat dan berkualitas (improving the performance). Sinergi antara masing-masing segmen diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat bagi Bank dimana segmen wholesale sebagai anchor akan memberikan peluang masuknya bisnis MSME dan Retail untuk memenuhi seluruh kebutuhan layanan jasa keuangan nasabah. Produk yang berbeda dan kompetitif diperlukan sehingga pengembangan produk dituntut dapat dengan cepat merespon kebutuhan nasabah. Bank perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal penyaluran pembiayaan korporasi terutama pada layanan Investment Banking (IB) Proses yang cepat didukung dengan pengembangan digital diharapkan menjadi pembeda produk dan layanan Bank dengan peers.
2. *Innovation*
   Inovasi yang sejalan dengan strategi bisnis didorong selain untuk dapat memberikan value added bagi nasabah tetapi juga sebagai upaya efisiensi Bank dengan memangkas rantai bisnis proses yang tidak perlu. Inovasi digital didorong sebagai upaya penghematan bank dimasa yang akan datang dengan simplifikasi proses dan mengurangi proses manual sejalan dengan strategi optimalisasi outlet & manpower.
3. Penguatan Kualitas Asset
   Pencegahan penurunan kualitas kredit melalui DPD manajemen, implementasi ABS dan SUKUK serta secara berkelanjutan melaksanakan optimalisasi pada aktivitas collection LAR dan penjualan AYDA adalah bentuk komitmen Bank untuk fokus pada improving asset quality. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas diperlukan sehingga fungsi penjualan dapat lebih fokus untuk melakukan ekspansi bisnis atau good Bank dan fungsi penyelesaian melalui special asset management dapat lebih optimal melakukan collection dan menghindari opsi penyelesaian yang dapat menimbulkan beban bagi Bank. Normalisasi kredit restruktur untuk meningkatkan profitabilitas serta optimalisasi penagihan untuk meningkatkan profitabilitas Bank.
4. *Advance IT and Digital*
   Memperkuat posisi digital di pasar melalui pembenahan dan revamp Wokee. Memfokuskan pada pengembangan digital channel yang ada dan customize aplikasi untuk kebutuhan operasional nasabah antara lain supply chain financing, cash management dan produk dana lainnya.


Arah Strategi 2023
Strategy Direction 2023
Mencapai Kemajuan Bersama Melalui Perubahan Mendasar
Achieving Shared Progress Through Fundamental Change
Agenda Strategi Inti
Agenda Core Strategy
B
Boost Sales Performance
I
Innovation for Turnaround
S
Strengthening The Quality of Assets
A
Advanced IT & Digital
1. Fokus pada bisnis korporasi (BUMN & Indo-Korea) dan meningkatkan bisnis sindikasi club deal
2. Perluasan basis nasabah terbaik di UMKM & Ritel
3. Memperkuat daya saing sales dengan meningkatkan produk
1. Focus on corporate business (SOE & Indo-Korea) and increase club deal syndication business.
2. Expansion of best customer base in MSME & Retail
3. Strengthen sales competitiveness by improving products
1. Menciptakan Budaya berorientasi Kinerja
2. Membangun efisiensi sistem manajemen melalui optimalisasi channel
3. Pembaharuan dari inovasi Manpower serta Struktur Organisasi
4. Mengoptimalkan Efisiensi Biaya
1. Creating a Performance-oriented Culture
2. Building management system efficiency through channel optimization
3. Renewal of Manpower innovation as well as Organizational Structure
4. Optimizing Cost Efficiency improving products
1. Memperkuat strategi perbaikan bad loan dan monitoring secara periodik
2. Menciptakan kedisiplinan dengan memperkuat fungsi Kepatuhan dan Audit
3. Pencegahan transfer bad loan secara menyeluruh melalui preemptive delinquency management
1. Strengthen bad loan recovery strategy and periodic monitoring.
2. Create discipline by strengthening the Compliance and Audit function
3. Thorough prevention of bad loan transfer through preemptive delinquency management improving products
1. Mendorong akselerasi infrastruktur IT (NGBS)
2. Menciptakan digital channel yang independen dan terdefrensiasi
3. Ekosisten Digital dan Platform Bisnis
1. Encourage acceleration of IT infrastructure (NGBS)
2. Create independent and differentiated digital channels
3. Digital Existence and Business Platform

PANGSA PASAR

KB Bank terus berupaya untuk meningkatkan daya saing terhadap peer group dalam menghadapi persaingan di segala aspek terutama dari kompetensi. Perubahan dinamika bisnis bank di Industri Perbankan mempengaruhi peer group KB Bank, maka Bank melakukan evaluasi kembali terhadap peer group berdasarkan ranking perbankan pada aspek; kinerja keuangan (modal inti, Aset, DPK, KYD), persebaran jumlah kantor cabang di setiap provinsi, kesamaan kriteria bisnis bank, dan berdasarkan kedekatan matriks penetrasi pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah Aset yang dimiliki, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, jumlah Kredit Yang Diberikan (KYD), Pendapatan Bersih Bank (Net Income) dan rasio NPL Bank.

Pangsa Pasar KB Bank di Industri Perbankan Indonesia

(dalam triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		2023	2022	2021
Jumlah Aset	Industri Perbankan	11.766	11.113	10.112
	KB Bank	84	90	89
	Pangsa Pasar	0,72%	0,81%	0,88%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	8.458	8.154	7.479
	KB Bank	45	52	56
	Pangsa Pasar	0,53%	0,64%	0,75%
Jumlah Kredit yang Diberikan	Industri Perbankan	7.187	6.498	5.821
	KB Bank	49	51	59
	Pangsa Pasar	0,69%	0,78%	1,01%

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, maka kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Bank disesuaikan dengan kemampuan Bank berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan, serta peraturan mengenai permodalan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Pembagian dividen tersebut tergantung kepada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Pembagian dan Pembayaran Dividen 3 Tahun Terakhir

Uraian	2023	2022	2021
Tahun Buku	2022	2021	2020
Tanggal Pengumuman	-	-	-
Tanggal Pembayaran	-	-	-
Kebijakan Pembagian Dividen (%)	-	-	-
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp)	-	-	-
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar)	-	-	-
Rasio Pembagian Dividen (%)	-	-	-

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2005 seperti yang telah diungkapkan dalam akta No. 26 dari Notaris Lindasari Bachroem, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada direksi dan pekerja pada jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jumlah saham yang diterbitkan pada opsi saham tahap pertama hingga tahap ketiga adalah maksimum 5% (lima persen) dari modal disetor Bank dalam periode 3 (tiga) tahun tanpa memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu). Opsi saham tahap pertama telah diberikan pada saat IPO. Sampai dengan tanggal 6 Juli 2013 (tanggal eksekusi terakhir), terdapat opsi saham yang tidak dieksekusi karena lewat periode pelaksanaannya, karena itu cadangan opsi saham yang telah gugur sebesar Rp8.599 juta telah dibukukan sebagai tambahan modal disetor.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum

JENIS PENAWARAN TERBATAS	TANGGAL EFEKTIF	JUMLAH HASIL PENAWARAN TERBATAS	BIAYA PENAWARAN TERBATAS	HASIL BERSIH	MODAL KERJA KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN BANK	TOTAL	SISA DANA HASIL PENAWARAN TERBATAS
Obligasi Senior Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	31 Agustus 2021	1.000.000	8.584	994.656	994.656	994.656	-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A - B		1.000.000	5.344	991.416	991.416	991.416	-

Pada tanggal 28 Februari 2017, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II tahun 2017 sebesar Rp1.405.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

Pada tanggal 10 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2024.

Pada tanggal 10 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri A sebesar Rp315.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2026.

Pada tanggal 10 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri B sebesar Rp685.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2028.

Bank menerbitkan obligasi senior dan obligasi subordinasi untuk mengembangkan pembiayaan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank. Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian obligasi subordinasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman, dan penerbitan obligasi. Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah melakukan pembayaran bunga obligasi secara tepat waktu.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), obligasi subordinasi di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/PB.31/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan dari Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/TPB1-4 tanggal 14 Maret 2012.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-212/PB.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI

Informasi material mengenai investasi Bank yang jatuh tempo di tahun 2023 dan yang masih beredar setelah 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	
		31-Dec-23	31-Dec-22
Wesel SKBDN	12-Jun-24	Tanpa peringkat	Tanpa peringkat
Obligasi Pemerintah - Dolar Amerika Serikat	15-Jan-24	Tanpa peringkat	Tanpa peringkat
KIK EBA Bahana Bukopin Tahun 2019	04-Sep-26	idAAA	idAAA
IDR-Linked Step-Up Fixed Rate Guaranteed Bond IDMB United Pte Ltd	21-Jun-27	A+	A+
SMMK Pte Ltd	28-Sep-37	A+	-
Sukuk Korporasi	28-Sep-37	AAA(idn)	BBB-
Obligasi Pemerintah - Rupiah	15-Apr-40	Tanpa peringkat	Tanpa peringkat
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	15-Apr-43	idA-	idA-
Obligasi IV Bank Lampung	07-Jul-22	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	11-Jul-22	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B	05-Jun-23	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri A	06-Jun-21	-	-
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance tahap V Tahun 2017 Seri B	22-Mar-20	-	-
Obligasi Berkelanjutan III Bank Tabungan Negara Tahun 2017 Tahap I Seri A	13-Jul-20	-	-
Obligasi Berkelanjutan II Wahana Ottomitra Multiartha Tahap II Tahun 2017 Seri B	22-Aug-20	-	-
Obligasi II Bank Maluku Tahun 2017 Seri B	08-Dec-20	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016	30-Jun-21	-	-
Medium Term Notes IV Clipan Finance tahun 2018	23-Nov-20	-	-
Obligasi MTM Bank Jambi Tahap II Tahun 2017	06-Jun-20	-	-
Obligasi MTN Tahap II Bank Sumitomo Mitsui	14-Jun-20	-	-
Obligasi MTN I Bank Danamon 2019	06-Mar-20	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	3 Jan 2020-14 Ags 2020	-	-
Sukuk Bank Indonesia	09-Jan-20	-	-

Peringkat untuk obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sedangkan peringkat untuk obligasi lain yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat obligasi yang dilaporkan oleh Standard & Poor's.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.
Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Bank dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i); atau
   g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (i) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil managemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

NAMA PIHAK BERTRANSAKSI, SIFAT HUBUNGAN AFILIASI, SIFAT TRANSAKSI, SERTA ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak-pihak berelasi dan sifat hubungannya dengan Bank diuraikan sebagai berikut:

Sifat dari hubungan	Pihak berelasi
Pemegang saham pengendali	KB Kookmin Bank Co., Ltd.
Dikendalikan/di bawah pengaruh signifikan salah satu pemegang saham utama Bank	PT Haka Sarana Investama
	Kopelindo Infrastruktur Indonesia
	PT Bosowa Berlian Motor
	PT Bosowa Amal Taksi
	PT Mallomo
	PT Bosowa Utama
	PT Makassar Capital
	PT Bosowa Tambang Indonesia
	PT KB Finansial Multi Finance
	PT Sunindo KB Finance
	PT Kurnia Oryza Abadi
	PT Dalle Mineral Papua
Dikendalikan oleh keluarga terdekat dari manajemen	
Manajemen kunci yang sama	Dinasti Batubara Indonesia
	PT Gerin Surya Gemilang
Dana pensiun Bank	Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Manajemen dan karyawan kunci	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2023	2022
ASET		
Giro pada Bank lain		
KB Kookmin Bank	6.377	75.647
Kredit yang diberikan dan pembiyaan/piutang Syariah-bruto		
PT KB Finansia Multi Finance	499.791	250.000
PT Haka Sarana Investama	0	121.048
PT Sunindo KB Finance	119.988	120.000
PT Dalle Mineral Papua	0	55.309
Dinasti Batubara Indonesia	0	46.278
PT Bosowa Amal Taksi	0	28.891
PT Bosowa Utama	0	27.519
PT Mallomo	0	27.012
PT Bosowa Berlian Motor	0	26.081
Kopelindo Infrastruktur Indonesia	0	15.934
PT Makassar Capital	0	7.369
PT Kurnia Oryza Abadi	0	4.878
PT Gerin Surya Gemilang	0	3.348
PT Bosowa Tambang Indonesia	0	32
PT Merpati Wahana Taksi	0	0
PT Karya Ratu Mulia	0	0
PT Legalino Lines	0	0
PT Oto Rental Nusantara	0	0
PT Anisbi Nunggal Bhakti	0	0
PT Bantimurung Indah	0	0

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2023	2022
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif	20.867	27.634
Total Aset untuk pihak berelasi	647.023	836.980
Persentase terhadap total aset	0,77%	0,93%
LIABILITAS		
Simpanan dari Bank Lain	7.699.413	10.121.907
Pinjaman yang diterima	6.544.886	6.533.582
Deposito Berjangka	40.311	55.847
Giro	9.094	260.318
Tabungan	18.491	9.870
Surat berharga yang diterbitkan	0	0
Imbalan pascakerja	0	0
Dana Pensiun Bank KB Bukopin	61.700	51.700
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif	0	0
Total Liabilitas untuk pihak berelasi	14.373.895	17.033.224
Persentase terhadap total Liabilitas	20,48%	21,62%
Pendapatan Bunga dan Syariah dari pihak berelasi	22.592	13.157
Persentase terhadap bunga dan Syariah	0,46%	0,32%
Pendapatan operasional lainnya		
Pendapatan dan komisi lainnya dari pihak berelasi	0	255
Persentase terhadap pendapatan operasional lainnya	0,00%	0,05%
Beban bunga dan Syariah dari pihak berelasi	899	7.253
Persentase terhadap beban bunga dan Syariah	0,02%	0,24%
Beban operasional lainnya		
Gaji dan tunjangan karyawan, pengurus dan pejabat eksekutif	67.460	59.227
Persentase terhadap operasional lainnya	2,74%	2,44%

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

KB Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara substansial dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi dan diperlakukan sebagai transaksi yang sesuai dengan standar PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan harga pasar. Untuk transaksi antara Perusahaan dengan BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

PERNYATAAN DIREKSI TERKAIT PRINSIP TRANSAKSI YANG WAJAR (ARMSLENGTH PRINCIPLE)

Direksi berkomitmen memegang prinsip Arm's length principle (ALP) dimana merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. Pada prinsipnya, berdasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut dapat mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV).

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT DALAM MEMENUHI PRINSIP TRANSAKSI YANG WAJAR (ARMSLENGTH PRINCIPLE)

Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit berkomitmen memegang prinsip Arm's length principle (ALP). Mekanisme review Perseroan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pada prinsipnya, berdasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut dapat mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV).

Sepanjang tahun 2023, Bank tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Bank berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga Bank senantiasa memperhatikan setiap adanya perubahan perundang-undangan untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan usaha Bank. Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan. Dengan demikian, Perseroan tidak menyajikan informasi tentang perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya (kualitatif dan/atau kuantitatif).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Perubahan Kebijakan Akuntansi	Penjelasan/Alasan Perubahan	Dampak terhadap Bank
Penerapan standar akuntansi keuangan revisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2023 yang relevan bagi Perusahaan	1. Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material; 2. Amendemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan; 3. Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi 4. Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal; 5. Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"; 6. PSAK 1 (Amendemen): "Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"; 7. PSAK 1 (Amendemen): "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"; 8. PSAK 16 (Amendemen): "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"; 9. PSAK 25 (Amendemen): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi"; 10. PSAK 46 (Amendemen): "Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"; 11. PSAK 73 (Amendemen): "Sewa: terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewabalik"; 12. PSAK 107 (Amendemen): "Akuntansi Ijarah".	tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun sebelumnya

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berikut disajikan proyeksi komitmen dan kontinjensi untuk tahun 2023 – 2025

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos-pos Keuangan Pokok	Realisasi	Proyeksi						
	Sep	Des	Mar	Jun	Sep	Des	Des	Des
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025
Tagihan komitmen								
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	731.385	731.385	740.527	749.670	758.812	767.954	806.352	846.670
Kewajiban komitmen								
Letter of Credit	60.452	60.452	61.208	61.964	62.719	63.475	66.649	69.981
Kelonggaran Tarik pada Debitur	4.369.831	4.369.831	4.424.454	4.479.077	4.533.699	4.588.322	4.817.738	5.058.625
Posisi penjualan spot dan derivative	196.569	196.569	199.026	201.483	203.940	206.397	216.717	227.553
Kewajiban Kontinjensi								
Bank Garansi	1.193.014	1.193.014	1.207.927	1.222.839	1.237.752	1.252.665	1.315.298	1.381.063
Tagihan Kontinjen								
Pendapatan Bunga Tertunggak	3.761.643	3.573.561	3.484.222	3.394.883	3.305.544	3.216.205	2.894.584	2.605.126

Berdasarkan Pihak

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Komitmen		
Tagihan Komitmen		
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	595.903	1.242.120
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	(4.822.935)	(4.215.885)
SKBDN yang masih berjalan	-	(52.283)
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	(88.205)	(11.744)
Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	(971.552)	(818.770)
Jumlah Liabilitas Komitmen	(5.882.692)	(5.098.682)
Jumlah Komitmen - neto	(5.286.789)	(3.856.562)
Kontinjensi		
Tagihan Kontinjensi		

Berdasarkan Pihak

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.038.667	4.066.581
Liabilitas Kontinjensi		
Bank garansi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	(1.337.709)	(3.161.179)
Lainnya	-	-
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	(1.337.709)	(3.161.179)
Jumlah Kontinjensi - neto	**2.700.958**	**905.402**
Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - neto	**(2.585.831)**	**(2.951.160)**

DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 terdapat tagihan dan liabilitas derivatif dengan rincian transaksi sebagai berikut:

Transaksi Derivatif atas Swap Mata Uang Asing

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pihak	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Nilai Kontrak	Nilai wajar	Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif	Nilai Kontrak	Nilai wajar	Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif
Pihak Ketiga								
Transakasi Swap mata uang asing :								
Dolar Amerika Serikat	1.543.614	2.389	3.040	(808)	2.048.630	(3.005)	9.254	(12.259)
Yen Jepang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1.543.614**	**2.389**	**3.040**	**(808)**	**2.048.630**	**(3.005)**	**9.254**	**(12.259)**

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Pengukuran tingkat kesehatan perusahaan yang dilakukan KB Bank berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based bank rating) yang mencakup empat faktor yaitu:

1. Profil Risiko;
2. Good Corporate Governance (GCG);
3. Rentabilitas (Earnings);
4. Permodalan (Capital).

Dari hasil self assessment profil risiko triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk posisi Desember 2023, risiko Bank secara keseluruhan berada pada tingkat risiko PK-2.

INFORMASI
KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, baik pada tahun buku maupun di tahun-tahun mendatang. Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina yang berkelanjutan , KB Bank telah merancang roadmap strategi ke depan secara komprehensif dan mitigasi risiko usaha secara dini dalam rangka menggapai kinerja yang berkelanjutan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen KB Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifkan terhadap kemampuan Bank untukmelanjutkan usahanya.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha meliputi, kinerja Keuangan, likuiditas, solvabilitas, masalah Internal, dan perkara Hukum. Terkait dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Hal tersebut meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek keuangan
   a. Membandingkan saldo-saldo realisasi tahun 2023 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
   b. Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan oleh Manajemen antara saldo-saldo aktual tahun 2023 dengan target anggaran/RKAP tahun 2023 dan saldo-saldo aktual tahun 2022.
2. Perkembangan usaha Perseroan
   a. Membandingkan informasi keuangan tahun 2022 dan 2023 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
   b. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan informasi rasio keuangan tahun 2022 dan 2023.

ASPEK PERPAJAKAN

PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK

Kepatuhan bank dalam pembayaran pajak dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting dalam kontribusinya terhadap negara. Dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan transparansi dalam manajemen, bank dapat memastikan bahwa kontribusinya tidak hanya terbatas pada beberapa produk saja, tetapi terdistribusi secara lebih merata. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan pendapatan berbasis fee yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi bank, sambil membantu mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan demikian, bank tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

PEMBAYARAN PAJAK

Total pembayaran pajak oleh bank untuk periode Januari hingga Desember 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemenuhan Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
PPh Badan	-	-	-	n.a
PPh Perorangan	64.930.679.520	59.431.443.598	5.499.235.922	9,25%
PPN	18.404.235.074	26.495.496.143	(8.091.261.069)	-30,54%
Pajak Lainnya:				
PPh Pasal 23	15.584.706.000	12.322.569.499	3.262.136.501	26,47%
PPh Pasal 26	124.005.791.747	41.862.476.780	82.143.314.967	196,22%
PPh Pasal 4 ayat 2	404.045.662.323	333.126.561.294	70.919.101.029	21,29%
Lainnya (Materai)	1.031.740.000	502.650.000	529.090.000	105,26%
Jumlah Pembayaran Pajak	**628.002.814.664**	**473.741.197.314**	**154.261.617.350**	**32,56%**

Pembayaran pajak ini mencerminkan komitmen bank dalam mematuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan memenuhi tanggung jawab perpajakan ini, bank tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi secara langsung pada pembangunan negara dan perekonomian secara keseluruhan. Dana yang dibayarkan melalui pajak ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 desember 2023, diputuskan untuk mempertahankan bi-rate 6,00%, suku bunga deposit facility 5,25%, dan suku bunga lending facility 6,75%. Mulai 21 desember 2023, BI menggunakan nama bi-rate sebagai suku bunga kebijakan, menggantikan bi 7-day (reverse) repo rate untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Keputusan ini konsisten dengan fokus pro-stability untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth dengan kebijakan longgar untuk mendukung kredit/pembiayaan perbankan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk inklusi ekonomi-keuangan digital, termasuk transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencakup pula langkah sebagai berikut:

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
2. Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);
3. Penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi (Lampiran);
4. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasa n kerja sama antarnegara guna meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD), melalui:
5. Perluasan implementasi QRIS dengan: (a) menetapkan target penggunaan QRIS sebesar 55 juta pengguna di tahun 2024; (b) menetapkan target volume transaksi QRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi pada tahun 2024; dan (c) memperkuat strategi implementasi QRIS Antarnegara untuk percepatan akseptasi transaksi;
6. Penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur Online Payment, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring yang lebih intensif;
7. Perluasan kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS antarnegara dan Local Currency Transactions (LCT), serta fasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

LARANGAN, BATASAN DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menetapkan kebijakan yang jelas terkait dengan batasan dalam melakukan transfer dana, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak memiliki batasan di dalam prosedur operasional terkait transfer dana nasabah baik transfer masuk maupun transfer keluar antar bank dan entitas lain dalam satu kelompok usaha. Jumlah dan nilai transaksi mengacu pada ketentuan regulator mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Perseroan mengacu pada regulasi BMPK terkait dengan transaksi untuk penempatan antar Bank dari KB Bank ke Bank Lain dan Entitas dalam satu kelompok usaha.

KINERJA
ENTITAS ANAK

Dalam struktur bisnisnya, Perseroan memiliki dua Entitas Anak yang kinerjanya terkonsolidasi, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance. Penjelasan mengenai Entitas Anak disajikan pada bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini.

PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH

KINERJA KEUANGAN PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Aset	7.920,5	7.013,2	907,2	12,94%
Liabilitas	7.151,7	6.399,2	752,5	11,76%
Ekuitas	768,8	614,1	154,7	25,20%
Laba bersih	(527,1)	(68,6)	(458,4)	-667,97%

PT KB BUKOPIN FINANCE

KINERJA KEUANGAN PT KB BUKOPIN FINANCE

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Aset	459,7	424,5	35,2	8,29%
Liabilitas	10,3	299,4	(289,1)	-96,57%
Ekuitas	449,4	125,1	324,2	-259,10%
Laba bersih	(18,6)	(2,9)	(15,6)	-531,41%

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

UMUM

No.	Deskripsi	T (31 Desember 2023)	T-1 (30 September 2023)	T-2 (30 Juni 2023)	T-3 (31 Maret 2023)	T-4 (31 Desember 2022)
	Modal yang Tersedia (nilai)			Konsolidasi		
1	Modal Inti Utama (CET1)	9.813.056	11.837.425	13.347.079,66	6.682.166,67	6.750.289,42
2	Modal Inti (*Tier* 1)	9.813.056	11.837.425	13.347.079,66	6.682.166,67	6.750.289,42
3	Total Modal	14.205.129	16.288.190	17.972.921,00	11.370.810,00	11.538.974,75
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	50.831.470	51.915.591	49.137.624,59	52.582.308,08	58.512.127,99
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	19.31%	22.80%	27.16%	12.71%	11.54%
6	Rasio *Tier* 1 (%)	19.31%	22.80%	27.16%	12.71%	11.54%
7	Rasio Total Modal (%)	27.95%	31.37%	36.58%	21.62%	19.72%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	*Capital conservation buffer* (2.5% dari ATMR) (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
12	Komponen CET1 untuk *buffer*	13.31%	16.80%	21.16%	6,71%	5,54%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	81.624.415.98	81.516.022,51	84.926.240,00	86.629.823,34	89.448.195,85
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	12.02%	14.52%	15.72%	7.71%	7.46%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	12.02%	14.52%	15.72%	7.71%	7.46%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset *Securities Financing Transaction* (SFT) secara gross	12.02%	14.52%	15.72%	7.71%	7.46%

No.	Deskripsi	T (31 Desember 2023)	T-1 (30 September 2023)	T-2 (30 Juni 2023)	T-3 (31 Maret 2023)	T-4 (31 Desember 2022)
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*	12.02%	14,52%	15,72%	7,71%	7,46%
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	15.043.596.10	16.692.850,46	19.228.497,64	18.139.233,61	16.796.868,76
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)	12.236.932.29	11.890.658,81	10.468.604,90	11.166.235,08	10.170.023,09
17	LCR (%)	122.94%	140.39%	183.68%	162.45%	165.16%
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	74.367.444.17	71.108.887,52	73.605.396,92	67.581.524,28	68.596.524,90
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	71.426.243.31	69.792.891,75	67.788.655,38	65.996.897,75	65.851.086,97
20	NSFR (%)	104.12%	101.89%	108.58%	102.40%	104.17%
Analisis Kualitatif						
Pada posisi Desember 2023, rasio Bank baik secara konsolidasi maupun individual diantaranya rasio total modal, rasio pengungkit, LCR, dan NSFR sudah memenuhi ketentuan regulator.						

Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan kehati-hatian

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan (dalam jutaan)	Nilai tercatat masing-masing risiko				
		Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
	neraca konsolidasi					
Aset						
Kas	289.184	289.184				
Penempatan pada Bank Indonesia	4.929.237	4.929.237				
Penempatan pada bank lain	752.531	752.531				
Tagihan spot dan derivatif	3.040	-	3.040,00			
Surat berharga yang dimiliki	17.536.249	17.416.636		119.600	13	
Surat berharga yang dijual denga janji dibeli kembali (repo)						
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.572.152	2.572.152				
Tagihan akseptasi	132.577					
Kredit yang diberikan	43.786.828	132.577				
Pembiyaan syariah	5.631.788					

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan (dalam jutaan)	Nilai tercatat masing-masing risiko				
		Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Penyertaan modal	15	15				
Aset keuangan lainnya	739.975	739.975				
Cadangan keugian penuruna nilai aset keuangan -/-		-				
a. Surat berharga yang dimiliki	(109)	-				
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.582.834)	-2.358.581				
c. lainnya	(1.613)	-				
Aset tidak berwujud	635.815	635.815				
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(350.230)	-350.230				
Aset tetap dan inventaris	4.645.635	4.645.635				
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.412.584)	-1.412.584				
Aset non produktif						
a. Properti terbengkalai	22.395					
b. Agunan yang diambil alih	2.503.459	2.503.459				
c. Rekening tunda		-				
d. Aset antar kantor		-				
Aset lainnya	5.473.166	3.064.652				
Total Aset	**84.307.300**	**82.437.108**	**3.040**	**119.600**	**13**	**-**
Kewajiban						
Giro	3.177.648					3.177.648
Tabungan	6.873.184					6.873.184
Deposito	34.738.311					34.738.311
Uang elektronik	-					-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-					-
Liabilitas kepada bank lain	7.886.721					7.886.721
Liabilitas spot dan derivatif / forward	808					808
Liabilitas atas surat berharga yang dijual degan janji dibeli kembali (repo)	219.631					219.631
Liabilitas akseptasi	132.577					132.577
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588					3.397.588
Pinjaman / pembiayaan yang diterima	11.704.492					11.704.492

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan (dalam jutaan)	Nilai tercatat masing-masing risiko				
		Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Setoran jaminan	30.830					30.830
Liabilitas antar kantor	-					-
Liabilitas lainnya	2.035.347					2.035.347
Kepentingan minoritas (minority interest)	(26.146)					(26.146)
Total liabilitas	**70.170.991**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.170.991**
Modal disetor	21.000.000					
a. Modal dasar	(2.000.000)					
b. Modal yang belum disetor -/-	-					
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-					
Tambahan modal disetor	8.225.767					
a. Agio	-					
b. Disagio -/-	-					
c. Modal sumbangan	-					
d. Dana setoran modal	-					
e. Lainnya	-					
Penghasilan komprehensif lain	1.775.069					
a. Keuntungan	-					
b. Kerugian	-					
Cadangan	-					
a. Cadangan umum	-					
b. Cadangan tujuan	-					
Laba/rugi	(8.830.450)					
a. Tahun-tahun lalu	(6.034.077)					
b. Tahun berjalan	-					
c. Dividen yang dibayarkan -/-						
Total Ekuitas	**14.136.309**					

Sumber Perbedaan Utama antara Eksposur sesuai Ketentuan Kehati-Hatian dengan Carrying Values sesuai Standar Akuntansi Keuangan

	Desember 2023				
	a	b	c	d	e
	Total	Item sesuai:			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	84.307.300	82.437.108	119.600	3.040	13
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	70.170.991				
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	14.136.309	82.437.108	119.600	3.040	13
Nilai rekening administratif	6.213.849	6.213.849			
Perbedaan valuasi					
Perbedaan antara netting rules, selain dari yang termasuk pada baris 2.					
Perbedaan provisi					
Perbedaan prudential filters					
....					
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	20.350.158	88.650.957	119.600	3.040	13

Analisis Kualitatif

Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada kerangka risiko kredit yang diperhitungkan hanya CKPN Stage II dan Stage III. Selain itu, dalam hal pos kredit perbedaan disebabkan karena adanya kredit yang diakui sebagai faktor pengurang modal inti yaitu penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada Bank Lain.

Komposisi Permodalan

	Desember 2023		Desember 2022	
Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor				
Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	27.225.767	16,17	15.286.428	16,17
Laba ditahan	(14.864.834)	19,20	(8.830.450)	19,20
Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1.775.376	18	1.609.016	18
Modal yang termasuk *phase out* dari CET1	-		3.000.000	
Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan		21	-	21
CET 1 sebelum *regulatory adjustment*	**14.136.309**		**11.064.994**	
CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)				
Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*				
Goodwill	(189.482)	14	(189.482)	14

Komponen	Desember 2023		Desember 2022	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)
Aset tidak berwujud lainnya (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	(96.103)	14	(12.512)	14
Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*				
Cash-flow hedge reserve				
Shortfall on provisions to expected losses				
Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi				
Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)				
Aset pensiun manfaat pasti				
Investasi pada saham sendiri (jika belum di *net* dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)				
Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain				
Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)				
Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)				
Mortgage servicing rights				
Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, *net* dari kewajiban pajak)				
Jumlah melebihi batasan 15% dari:				
investasi signifikan pada saham biasa *financials*				
mortgage servicing rights				
pajak tangguhan dari perbedaan temporer				
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional				
Selisih PPKA dan CKPN	(254.447)		(1.459.545)	
PPKA non produktif	(1.112.664)		(711.000)	
Aset Pajak Tangguhan	(2.670.542)	17	(1.942.151)	17
Penyertaan	(15)	11	(15)	11
Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi				
Eksposur sekuritisasi				
Lainnya				
Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan *Tier* 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya				
Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1	**(4.323.253)**		**(4.314.705)**	
Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	**9.813.056**		**6.750.289**	
Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen	-		-	
Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)	-		-	
Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-		-	
Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-		-	
Modal yang yang termasuk *phase out* dari AT 1	-		-	

Komponen	Desember 2023		Desember 2022	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)
Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi			-	
Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*			-	
Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment	-		-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)				
Investasi pada instrumen AT 1 sendiri			-	
Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain			-	
Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)			-	
Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan)			-	
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional			-	
Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain			-	
Penyesuaian pada AT 1 akibat *Tier* 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya			-	
Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT 1	-		-	
Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-		-	
Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)	**9.813.056**		**6.750.289**	
Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan				
Instrumen *Tier* 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)				
Modal yang yang termasuk *phase out* dari *Tier 2*	3.848.018		4.234.609	
Instrumen *Tier 2* yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi			-	
Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*			-	
Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	544.055		554.076	
Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	**4.392.073**		**4.788.685**	
Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)				
Investasi pada instrumen *Tier* 2 sendiri	-		-	
Kepemilikan silang pada instrumen *Tier* 2 pada entitas lain	-		-	
Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	-			
Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	-		-	

Komponen	Desember 2023		Desember 2022	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)
Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan)	-		-	
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-		-	
Sinking fund	-		-	
Penempatan dana pada instrumen *Tier* 2 pada Bank lain	-		-	
Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap	-		-	
Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment	**4.392.073**		**4.788.685**	
Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	**14.205.129**		**11.538.974**	
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	**50.831.470**		**59.205.780**	
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)				
Rasio CET 1 (persentase terhadap ATMR)	19,31%		11,40%	
Rasio Modal Inti *Tier* 1 (persentase terhadap ATMR)	19,31%		11,40%	
Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	27,95%		19,49%	
*Buffer (*persentase terhadap ATMR)				
Capital Conservation Buffer			-	
Countercyclical Buffer			-	
higher loss absorbency requirement			-	
Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi Buffer (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi *Buffer*.				
National minima (jika berbeda dari Basel 3)				
Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)				
Rasio terendah *Tier* 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)				
Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)				
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)				
Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain				
Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan				
Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak)				
Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (*net* dari kewajiban pajak)				
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2				
Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*)				
Cap atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan standar				
Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan *cap*)				
Cap atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan IRB				

Komponen	Desember 2023		Desember 2022	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1)
Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)				
Cap pada CET 1 yang temasuk *phase out*				
Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)				
Cap pada AT 1 yang temasuk *phase out*				
Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)				
Cap pada *Tier* 2 yang temasuk *phase out*				
Jumlah yang dikecualikan dari *Tier* 2 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)				

Rekonsiliasi Permodalan

No	Pos-pos	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2022
	ASET				
1	Kas	254.501	289.184	490.328	524.320
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3.394.382	4.929.237	14.589.945	15.585.586
3	Penempatan pada bank lain	367.341	752.531	1.002.409	1.479.645
4	Tagihan spot dan derivatif	3.040	3.040	9.254	9.254
5	Surat berharga yang dimiliki	17.608.966	17.536.249	12.113.487	12.009.954
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.572.152	2.572.152	-	-
8	Tagihan akseptasi	132.577	132.577	17.346	17.346
9	Kredit yang diberikan	44.183.228	43.786.828	45.984.992	46.030.876
10	Pembiayaan syariah 1)	-	5.631.788	-	4.552.558
11	Penyertaan modal	2.206.951	15	926.386	15
12	Aset Keuangan lainnya	715.645	739.975	770.789	797.153
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				
	a. Surat berharga yang dimiliki	(109)	(109)	(76)	(76)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.353.299)	(3.582.834)	(1.419.124)	(1.626.676)
	c. Lainnya	(1.613)	(1.613)	(211)	(211)
14	Aset tidak berwujud	338.304	635.815	187.538	485.049
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(243.063)	(350.230)	(176.339)	(283.055)

No	Pos-pos	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2022
15	Aset tetap dan inventaris	4.322.260	4.646.734	4.360.811	4.686.955
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.300.473)	(1.413.059)	(1.185.651)	(1.290.753)
16	Aset non produktif		-		
	a. Properti terbengkalai	22.395	22.395	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	2.370.014	2.503.459	2.715.389	2.858.081
	c. Rekening tunda	-	-	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-	-	-
17	Aset lainnya	5.249.395	5.473.166	4.316.467	4.159.331
	TOTAL ASET	**78.842.594**	**84.307.300**	**84.703.740**	**89.995.352**
	LIABILITAS DAN EKUITAS				
1	Giro	2.733.688	3.177.648	3.198.511	3.577.927
2	Tabungan	6.395.495	6.873.184	6.484.175	6.955.784
3	Deposito	29.907.451	34.738.311	37.013.364	41.428.659
4	Uang Elektronik	-	-	-	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
6	Liabilitas kepada bank lain	7.761.176	7.886.721	10.374.005	10.381.375
7	Liabilitas spot dan derivatif / forward	808	808	12.259	12.259
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	219.631	-	-
9	Liabilitas akseptasi	132.577	132.577	17.346	17.346
10	Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	3.397.588	3.392.717	3.392.718
11	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	11.654.712	11.704.492	11.132.586	11.200.131
12	Setoran jaminan	15.531	30.830	23.105	40.170
13	Liabilitas antar kantor 2)	-	-	-	-
14	Liabilitas lainnya	2.080.847	2.035.347	1.729.708	1.772.378
15	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-26.146	-	-4.828
	TOTAL LIABILITAS	**64.079.873**	**70.170.991**	**73.377.776**	**78.773.919**
16	Modal disetor				
	a. Modal dasar	21.000.000	21.000.000	13.000.000	13.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2.000.000)	-2.000.000	(6.000.000)	(6.000.000)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	-	-
17	Tambahan modal disetor				
	a. Agio	8.225.767	8.225.767	8.286.428	8.286.428
	b. Disagio -/-	-		-	-
	c. Modal sumbangan	-	-	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-	3.000.000	3.000.000
	e. Lainnya	-	-	-	-
18	Penghasilan komprehensif lain				

No	Pos-pos	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2022
	a. Keuntungan	1.709.915	1.775.069	1.701.716	1.765.455
	b. Kerugian	-	-	-	-
19	Cadangan		-		
	a. Cadangan umum	-	-	-	-
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
20	Laba/rugi		-		
	a.Tahun-tahun lalu	(8.662.180)	-8.830.450	-3.692.200	-3.802.989
	b.Tahun berjalan	(5.510.781)	-6.034.077	(4.969.980)	(5.027.461)
	c. Dividen yang dibayarkan -/-		-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	**14.762.721**	**14.136.309**	**11.325.964**	**11.221.433**
21	Kepentingan Non Pengendali				
	TOTAL EKUITAS	**14.762.721**	**14.136.309**	**11.325.964**	**11.221.433**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**78.842.594**	**84.307.300**	**84.703.740**	**89.995.352**

Fitur Utama Permodalan Bank

		Desember 2023					
No		Saham Biasa	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch	
1	Penerbit	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	
2	Nomor identifikasi	ID1000103609	IDA000078703	IDA0001176A9	IDA0001176B7		
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Inggris	
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)						
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM						
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	setelah masa transisi	CET 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	

	Desember 2022				
	Saham Biasa	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017**	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A**	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B**	**Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch**
	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk
	ID1000103609	IDA000078703	IDA0001176A9	IDA0001176B7	
	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Inggris
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CET 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2

No		Desember 2023					
		Saham Biasa	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch	
6	Apakah instrumen *eligible* untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu	Individu	Individu	Individu	Individu	
7	Jenis Instrumen	Saham biasa	Surat Berharga Subordinasi	Surat Berharga Subordinasi	Surat Berharga Subordinasi	Pinjaman Subordinasi	
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	19.000.000	327.833	231.000	685.000	3.000.000	
9	Nilai par dari instrumen	19.000.000	1.405.000	315.000	685.000	3.000.000	
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Liabilitas	Liabilitas	Liabilitas	Liabilitas	
11	Tanggal penerbitan	10/07/2006	28/02/2017	10/09/2021	10/09/2021	30 Juni 2022	
12	Tidak ada jatuh tempo (*perpetual*) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Dengan Jatuh Tempo	Dengan Jatuh Tempo	Dengan Jatuh Tempo	Dengan Jatuh Tempo	
13	Tanggal jatuh tempo	Tidak Ada Jatuh Tempo	28/02/2024	09/09/2026	09/09/2028	29 Juni 2029	
14	Eksekusi *call option* atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
15	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan call option lainnya (bila ada)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	*Subsequent call option*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Kupon / dividen						
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau *floating*	N/A	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	
18	Tingkat dari *coupon rate* atau index lain yang menjadi acuan	N/A	11% pa	8% pa	8,9% pa	8.52% pa	
19	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	Tidak	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	*Fully discretionary; partial* atau *mandatory*	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	N/A	
21	Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	Non-kumulatif atau kumulatif	Non-Kumulatif	Kumulatif	Kumulatif	Kumulatif		
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Dapat Dikonversi Menjadi Saham Biasa	

	Desember 2022				
	Saham Biasa	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017**	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A**	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B**	**Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch**
	Individu	Individu	Individu	Individu	Individu
	Saham biasa	Surat Berharga Subordinasi	Surat Berharga Subordinasi	Surat Berharga Subordinasi	Pinjaman Subordinasi
	19.000.000	327.833	231.000	685.000	3.000.000
	19.000.000	1.405.000	315.000	685.000	3.000.000
	Ekuitas	Liabilitas	Liabilitas	Liabilitas	Liabilitas
	10/07/2006	28/02/2017	10/09/2021	10/09/2021	30 Juni 2022
	Perpetual	Dengan Jatuh Tempo	Dengan Jatuh Tempo	Dengan Jatuh Tempo	Dengan Jatuh Tempo
	Tidak Ada Jatuh Tempo	28/02/2024	09/09/2026	09/09/2028	29 Juni 2029
	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
	N/A	11% pa	8% pa	8,9% pa	8.52% pa
	Tidak	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Non-Kumulatif	Kumulatif	Kumulatif	Kumulatif	
	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Dapat Dikonversi Menjadi Saham Biasa

		Desember 2023					
No		Saham Biasa	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch	
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya	N/A	N/A	N/A	N/A	Dapat melakukan konversi menjadi saham biasa dalam hal Bank KB Bukopin berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) merujuk kepada Surat Edaran OJK No. 20/ SEOJK.03/2016	
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	N/A	N/A	N/A	(ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian	
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A	N/A	N/A	N/A	Formula Konversi: a. rata-rata harga penutupan di pasar reguler BEI dari saham biasa selama periode dua puluh lima (25) hari perdagangan BEI segera sebelum tanggal dimana permohonan pencatatan Saham Konversi diajukan ke BEI; atau, b. apabila konversi dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai dengan POJK 32/2015, harga pasar yang wajar dari saham biasa yang akan ditentukan oleh suatu penilai pihak ketiga yang terdaftar di OJK yang akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama antara Bukopin & KBHK	
27	Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatory, apabila terjadi trigger event	
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	N/A	N/A	N/A	Dapat Dikonversi Menjadi Saham Biasa	
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A	It Converts into Common Shares	
30	Fitur write-down	N/A	Ya	Ya	Ya	Tidak	

	Desember 2022				
	Saham Biasa	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch
	N/A	N/A	N/A	N/A	Dapat melakukan konversi menjadi saham biasa dalam hal Bank KB Bukopin berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) merujuk kepada Surat Edaran OJK No. 20/ SEOJK.03/2016
	N/A	N/A	N/A	N/A	(ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian
	N/A	N/A	N/A	N/A	Formula Konversi: a. rata-rata harga penutupan di pasar reguler BEI dari saham biasa selama periode dua puluh lima (25) hari perdagangan BEI segera sebelum tanggal dimana permohonan pencatatan Saham Konversi diajukan ke BEI; atau, b. apabila konversi dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai dengan POJK 32/2015, harga pasar yang wajar dari saham biasa yang akan ditentukan oleh suatu penilai pihak ketiga yang terdaftar di OJK yang akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama antara Bukopin & KBHK
	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatory, apabila terjadi trigger event
	N/A	N/A	N/A	N/A	Dapat Dikonversi Menjadi Saham Biasa
	N/A	N/A	N/A	N/A	It Converts into Common Shares
	N/A	Ya	Ya	Ya	Tidak

		Desember 2023					
No		Saham Biasa	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch	
31	Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya	N/A	Obligasi subordinasi dapat di write down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no. 34/ POJK.03/2016	Obligasi subordinasi dapat di write down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no. 34/ POJK.03/2016	Obligasi subordinasi dapat di write down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no. 34/ POJK.03/2016	N/A	
32	Jika terjadi write-down, apakah penuh atau sebagian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
33	Jika terjadi write down; permanen atau temporer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
34	Jika terjadi write down temporer, jelaskan mekanisme write-up	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
34a	Tipe subordinasi	N/A	Junior Bond	Junior Bond	Junior Bond	Pinjaman Subordinasi	
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Pada saat likuidasi, pemegang saham hanya akan mendapatkan pengembalian investasinya apabila Perseroan telah membayarkan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur dan harta Perseroan masih tersisa	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Memiliki peringkat setidaknya pari passu dalam prioritas pembayaran dan dalam semua hal lainnya dengan semua hutang tanpa jaminan dan subordinasi lainnya dari Bank KB Bukopin kecuali yang didahulukan oleh hukum	
36	Apakah terdapat fitur yang non-compliant	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

	Desember 2022				
	Saham Biasa	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017**	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A**	**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B**	**Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch**
	N/A	Obligasi subordinasi dapat di write down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no. 34/ POJK.03/2016	Obligasi subordinasi dapat di write down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no. 34/ POJK.03/2016	Obligasi subordinasi dapat di write down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no. 34/ POJK.03/2016	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	Junior Bond	Junior Bond	Junior Bond	Pinjaman Subordinasi
	Pada saat likuidasi, pemegang saham hanya akan mendapatkan pengembalian investasinya apabila Perseroan telah membayarkan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur dan harta Perseroan masih tersisa	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Memiliki peringkat setidaknya pari passu dalam prioritas pembayaran dan dalam semua hal lainnya dengan semua hutang tanpa jaminan dan subordinasi lainnya dari Bank KB Bukopin kecuali yang didahulukan oleh hukum
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

STRUKTUR PERMODALAN BANK DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PERMODALAN

Kebijakan Permodalan

Implementasi rencana permodalan, yaitu:

1. Menjaga rasio kecukupan modal minimum diatas 16.5%, dan memastikan tingkat permodalan minimal sama dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pengembangan usaha perusahaan serta menjaga komposisi permodalan Tier 1 dan Tier 2 sesuai dengan ketetapan Basel III.
2. Kebijakan pengelolaan modal:
   a. Memanfaatkan modal secara efisien untuk pertumbuhan bisnis, khususnya pembiayaan baru dan investasi masa depan (New Generation Banking System, Pengembangan Outlet, dll)
   b. Pencadangan kerugian kredit untuk upaya penyelesaian kredit bermasalah akan berasal dari perolehan pendapatan dari upaya Turn-around (keuntungan sendiri)
   c. pengelolaan ATMR dan capital charges (pengelolaan faktor pengurang modal melalui retaksasi jaminan) serta penyelesaian kredit bermasalah serta AYDA

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan bagian penting dari aktivitas perbankan dan proses pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tujuan bisnis. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko.

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara aktif dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan Manajemen Risiko KB Bank (“Bank”) berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, yang meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dokumen Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) 9.

Manajemen risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Bank senantiasa memperkuat praktik manajemen risiko untuk mendukung tujuan strategis. Bank bertujuan menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat. Dalam menuju perubahan transformasi dan peningkatan proses manajemen risiko yang lebih baik dan efektif, Bank akan berfokus kepada 4 tahapan inisiatif penyempurnaan manajemen risiko yang meliputi :

1. Penetapan dasar/fondasi;
2. Meningkatkan pemahaman;
3. Eksekusi yang tepat;
4. Pemantauan dan kontrol yang memadai.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Penerapan Manajemen Risiko di KB Bank melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris KB Bank serta Dewan Pengawas Syariah (Bank KB Bukopin Syariah). Menyadari peran strategis ketiganya, KB Bank telah menetapkan pembagian tugas pengawasan pada masing-masing pihak sebagai berikut:

Fungsi Pengawasan Aktif

Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah	Direksi
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi arahan rekomendasi kepada Direksi	Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak Bank KB Bukopin Syariah.	Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Menyetujui kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta melakukan evaluasi secara berkala. 2. Melakukan pemantauan atas risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta eksposur risiko melalui kajian berkala dengan Direksi. 3. Menyetujui aktivitas bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 4. Menyetujui kebijakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang dipersyaratkan oleh ketentuan BI/OJK atau peraturan eksternal lainnya.	1. Bertindak sebagai penasehat dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan manajemen bisnis Syariah (pejabat yang terkait dengan pelaksanaan bisnis Syariah) mengenai hal-hal terkait dengan prinsip Syariah. 2. Berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional untuk mendiskusikan usulan dan rekomendasi Bank atas produk dan perkembangan jasa yang membutuhkan review dan keputusan dari Dewan Syariah Nasional. 3. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 4. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1. Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. 2. Mengkaji ulang secara berkala metodologi penilaian risiko, implementasi sistem informasi manajemen risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan *limit* risiko. 3. Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala terkait perkembangan dan permasalahan risiko yang material. 4. Menyetujui aktivitas bisnis yang membutuhkan persetujuan Direksi. 5. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 6. Memantau kualitas risiko dibandingkan tingkat kewajaran yang berlaku. 7. Memastikan bahwa manajemen menerapkan pendekatan yang hati-hati dalam mengembangkan bisnis mereka. 8. Menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*. 9. Memastikan langkah perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh SKAI. 10. Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi perusahaan. 11. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. 12. Memastikan efektivitas pengelolaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko. 13. Menempatkan pejabat yang kompeten pada unit kerja sesuai sifat, jumlah dan kompleksitasnya. 14. Menyusun dan menempatkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui *limit* kewenangan untuk setiap jenjang jabatan

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

Perumusan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit telah tersedia dan sejalan dengan sasaran, strategi, dan bisnis Bank secara keseluruhan.

Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang telah sejalan dengan Peraturan Regulator perihal penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Kebijakan ini digunakan sebagai dokumen payung dalam pelaksanaan pengelolaan seluruh risiko di Bank dan ditinjau secara periodik. Kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi :

1. Kebijakan Manajemen Risiko Bank lainnya yang mencakup risiko kredit, pasar dan likuiditas, operasional, stratejik, hukum, kepatuhan dan reputasi.
2. Kebijakan Risk Appetite Statement untuk Bankwide dan Risk Taking Unit.
3. Kebijakan dan Pedoman lain terkait penerapan manajemen risiko.

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam hal manajemen data terkait pengelolaan risiko telah ditunjang oleh beberapa aplikasi internal diantaranya : Sistem Informasi Konglomerasi Keuangan (SIKK), Risk Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), Sistem Informasi Keuangan Mikro (SIKM), SME Credit Tools (SCT).

Selain daripada itu, Bank juga menggunakan platform regulator (Antasena, Sipena, Apolo, dan OJK Box) dalam hal pelaporan antara lain Profil Risiko, ATMR, Arus Kas, dan laporan lainnya.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi manajemen risiko terdiri dari beberapa komite risiko, satuan kerja manajemen Risiko di KB Bank dan Perusahaan Anak dan unit kerja terkait lainnya dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

1. Komite Pemantau Risiko
   Komite Pemantau Risiko merupakan komite risiko di level Dewan Komisaris. Peran utamanya adalah memantau, mengevaluasi, mengetahui dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan memberikan pengawasan dalam praktik manajemen risiko, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan meninjau semua kebijakan manajemen risiko dan kebijakan internal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Komite Manajemen Risiko
   Merupakan komite risiko di level Direksi yang memiliki wewenang dan tanggungjawab melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sehubungan dengan penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, serta perubahannya, memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko secara keseluruhan, evaluasi atas permasalahan risiko yang signifikan, pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi risiko kecukupan modal serta profil risiko untuk memastikan bahwa proses-proses, system dan perangkat pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi dan rencana bisnis.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   Divisi Manajemen Risiko merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank yang independen terhadap grup bisnins, grup operasional, dan grup/divisi/departemen pendukung lainnya (risk taking unit) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Pengendalian intern. Divisi ini terdiri dari beberapa departemen yaitu Departemen Enterprise Risk Management, Departemen Operational & IT Risk Management, dan Departemen Manajemen Risiko Kredit.

   Wewenang dan tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain adalah mengembangkan dan meninjau ulang secara berkala strategi dan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan termasuk kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, Memantau pelaksanaan strategi, kerangka dan kebijakan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi dan Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan yang efektif diperlukan pengembangan system manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam Internal System Bank. Hal ini terutama dapat mendukung analisa manajemen risiko yang lebih cepat, akurat dan terpercaya sehingga mendukung arah strategi dan bisnis bank yang lebih prudent.

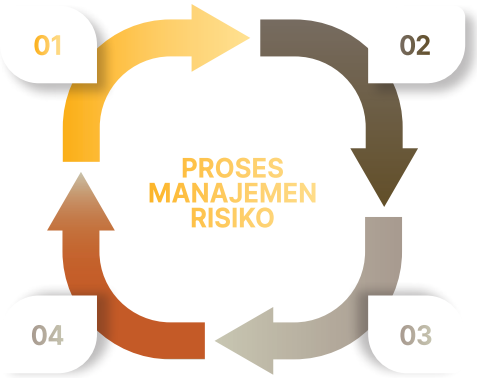
KB Bank secara berkala melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian seluruh risiko yang dihadapi baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Proses ini tercantum dalam kebijakan dan panduan kerja di setiap unit kerja di KB Bank dan Perusahaan Anak. Gambaran proses manajemen risiko sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Proses identifikasi Risiko dapat didasarkan pada pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi. Dalam melaksanakan proses tersebut bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk kegiatan bank.

Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara lindung nilai, mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.



Pengukuran Risiko

Dalam melaksanakan proses pengukuran risiko, bank wajib melakukan paling sedikit evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. Dilakukan juga penyempurnaan sistem pengukuran Risiko, dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.

Pemantauan Risiko

Dalam melaksanakan pemantauan risiko, bak wajib melakukan paling sedikit, evaluasi terhadap eksposur risiko, serta penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.

Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern KB Bank mengacu pada konsep *Three Lines of Defense*. Sebagai bagian dari proses self assessment Profil Risiko Bank, penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko khususnya terkait Sistem Pengendalian Risiko, diantaranya dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan sistem pengendalian intern dan hasil pelaksanaan kaji ulang oleh SKAI dengan bentuk hasil pemeriksaan SKAI terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank dan identifikasi risiko atas hasil pemeriksaan SKAI tersebut serta pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Penentuan Model dan Interaksi Profil Risiko

Sesuai dengan penerapan manajemen risiko, model bisnis Bank ditetapkan sesuai dengan profil risiko Bank yang menggambarkan risiko-risiko yang berkaitan dengan aktivitas bisnis serta fungsional Bank. Risiko yang patut untuk dipertimbangkan diantaranya adalah proyeksi ekonomi, pertumbuhan bisnis, *risk appetite* serta target yang ditetapkan sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Penetapan model bisnis dan interaksi profil risiko tidak lepas dari Visi dan Misi Bank.

Dalam rangka memberikan gambaran risiko yang menyeluruh dan berkesinambungan, bank melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di setiap kegiatan usaha Bank. Bila penerapan manajemen risiko belum efektif, maka bank segera memperbaiki pengendalian yang telah ditentukan agar tujuan dapat tercapai. Untuk menjaga tingkat risiko yang dapat ditoleransi, maka Bank menetapkan dan melakukan kaji ulang atas *risk apetite* yang disesuaikan dengan kemampuan Bank. Bank memiliki dua jenis risk appetite yang akan diambil dalam rangka mencapai sasaran diantaranya adalah *Risk Appetite Group* dan *Risk Appetite Management*. *Risk Appetite Group* mencakup sejumlah metric risiko utama dimana akan membantu untuk menentukan dan mengukur kemungkinan risiko maksimum yang dapat diambil oleh Bank, dimana hal tersebut dipantau oleh komisaris dan dewan direksi. Sedangkan *Risk Appetite Management* adalah risiko yang dapat diambil oleh Bank namun belum tercantum dalam *Risk Appetite Group* dan dipantau hingga tingkat Direksi.

Strategi manajemen Risiko Bank, telah disusun untuk tujuan jangka panjang, guna memastikan Bank dapat mencapai kelangsungan usaha, kecukupan permodalan yang diharapkan, serta diharapkan strategi secara keseluruhan ini dapat mengendalikan risiko yang dihadapi Bank. Strategi manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi, kecukupan sumber daya manusia, infrastruktur, kondisi keuangan, dan lainnya.

Stuktur Tata Kelola Risiko

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pada KB Bank tercermin dalam organisasi manajemen risiko yang sejalan terhadap tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas, serta kemampuan Bank. Pada seluruh unit kerja, struktur organisasinya disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, baik secara umum maupun yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

KB Bank menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif pada seluruh satuan kerja dengan menerapkan pendekatan Tiga Lini Pertahanan sesuai dengan Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk. Perangkat atau unit yang terlibat atas manajemen Risiko Kredit telah disesuaikan dan terbagi atas prinsip Three Lines of Defence. Risk Taking Unit, dalam hal ini bisnis dan supporting, termasuk tim kredit sebagai *1st Line of Defence*, Risk Group dan Kepatuhan sebagai *2nd Line of Defence*, serta Internal Audit sebagai *3rd Line of Defence*, tercermin dalam struktur organisasi dan kewenangan masing-masing fungsi tersebut, dan telah tercantum dalam job description atas setiap fungsi.

Media Komunikasi Manajemen Risiko

Dalam strategi pengembangan kesadaran dan pengetahuan risiko, Perseroan merancang serangkaian inisiatif pembelajaran yang beragam. Ini mencakup program pelatihan untuk menyamakan kompetensi karyawan dalam manajemen risiko, uji pengetahuan melalui kuis berkala, serta dukungan terhadap sertifikasi yang relevan dengan manajemen risiko. Selain itu, untuk menyebarkan informasi umum tentang risiko, materi-materi tersebut didistribusikan melalui saluran

internal Perseroan seperti Bukopin Office Communication. Dengan demikian, Perseroan memastikan bahwa karyawan terus meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko dalam operasi Perseroan.

Sistem Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko di Bank diselaraskan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha yang berlangsung. Keakuratan dalam pengukuran risiko dianggap sangat penting dalam konteks ini. Evaluasi risiko dilakukan secara berkala, mencakup produk, portofolio, dan seluruh aktivitas Bank. Sistem pengukuran risiko berfungsi sebagai pedoman untuk menilai eksposur risiko Bank, menjadi dasar untuk pelaksanaan pengendalian yang efektif. Penyesuaian dalam pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan perubahan yang signifikan dalam kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, dan faktor risiko terkait. Prosedur pengukuran risiko dievaluasi dan diperbaharui secara berkala, minimal sekali dalam setahun, atau sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa asumsi, akurasi, keadilan, dan integritas data terjaga, dan bahwa metode pengukuran risiko yang digunakan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan industri dan regulasi terkini.

Stress Test

Bank melakukan *stress test* secara berkala dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian atau perubahan pada kondisi-kondisi ekonomi di masa depan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis terhadap Bank. Dimana tujuan utama dari *stress test* adalah untuk mengevaluasi kecukupan modal bank untuk menyerap potensial kerugian besar yang dapat timbul dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan menjaga modal pada tingkat yang aman. Secara umum, skenario dalam pelaksanaan *stress test* mempertimbangkan perubahan pada beberapa variabel makroekonomi seperti suku bunga, tingkat inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar, dan lainnya.

Bank melakukan *stress test* untuk risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Stress test risiko kredit bertujuan untuk menilai dampak pada kualitas aset dan kecukupan modal dalam kondisi krisis. Dalam penerapannya, *stress test* kredit disesuaikan dengan perubahan-perubahan penurunan sektor usaha atau ekonomi serta kejadian-kejadian pada risiko kredit.

Stress test risiko likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan Bank untuk bertahan dalam kondisi *stress* dari berbagai tingkatan. Dalam penerapannya, Bank melakukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank, dengan memperhatikan (1) perubahan jenis, skala, dan kompleksitas usaha Bank, (2) perubahan kondisi pasar, dan (3) pengalaman Bank dalam kondisi krisis.

Bank juga melakukan *stress test* untuk risiko pasar guna mengantisipasi situasi yang terburuk pada saat kondisi *stress*. *Stress test* dilakukan dengan menggunakan batasan eksposur maksimal dari nilai tukar atau suku bunga yang berdampak pada eksposur risiko pasar meliputi Posisi Devisa Netto (PDN) dan surat berharga. Tujuan utama dari *stress test* adalah untuk mengevaluasi kapasitas dari modal bank untuk menyerap potensial kerugian besar dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang bank dapat lakukan untuk mengurangi risikonya dan menjaga modalnya.

Proses Pelaporan Informasi Risiko

Proses pelaporan informasi risiko yang disampaikan secara rutin, secara bulanan dalam bentuk *Monthly Risk Management Report* kepada Direksi dan *Monthly Risk Oversight Report* kepada Komisaris yang disusun Divisi Manajemen Risiko. Laporan tersebut mencakup pemantauan atas *risk appetite* secara *bankwide* dan pemantauan atas risiko utama yang dikelola Perseroan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko juga menyampaikan laporan profil risiko yang mencakup seluruh risiko utama yang dikelola Perseroan secara kuartalan. Laporan Profil Risiko disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Pemantau Risiko untuk kemudian dilaporkan kepada regulator. Hasil evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi akan ditindaklanjuti oleh semua unit terkait dan pemenuhan atas rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi akan dipantau secara berkala. Bank memastikan bahwa seluruh laporan yang disampaikan senantiasa menjaga keterbukaan dan komunikasi dengan *stakeholder* utama. Selain itu Bank secara periodik menyampaikan berbagai laporan yang diatur oleh regulator baik melalui portal pelaporan maupun penyampaian langsung ke kantor regional terdekat. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan secara mingguan dalam *Weekly Risk Report* kepada *President Director* untuk memberikan *update* mingguan atas parameter risiko yang dikelola oleh Bank.

Strategi Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko Bank disusun untuk memastikan kelangsungan usaha jangka panjang, mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan, dan mengendalikan serta mengelola risiko Perseroan secara komprehensif. Perumusan strategi ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur, kondisi keuangan Bank, diversifikasi portofolio, dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan strategi bisnis keseluruhan Perseroan, sambil memperhatikan Risk Appetite Perseroan, untuk menjamin stabilitas, keuntungan yang berkelanjutan, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO LEVERAGE

LR1: Ringkasan Perbandingan Accounting Asset vs Leverage Ratio Exposures

(Dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	Individu	Konsolidasi
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	82.251.850	87,593,723
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	(610,919)	(610,919)
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	15,677	15,677
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.	-	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	1,094,580	1.387.875
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(8.835.264)	(6.546.926)
12	Penyesuaian lainnya.	-	-
13	**Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.**	**73.915.924**	**81.624.416**

Analisa Kualitatif

Bank secara individual memiliki total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (sebelum dikurangi CKPN) adalah sebesar Rp. 82,25 Triliun. Setelah ditambah dengan eksposur transaksi derivatif, TRA dan dilakukan penyesuaian penilaian prudensial maka Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara individu (bank only) menjadi sebesar Rp. 73,92 Triliun.
Sedangkan, Bank secara konsolidasi memiliki total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (sebelum dikurangi CKPN) adalah sebesar Rp. 87,38 Triliun. Setelah ditambah dengan eksposur transaksi derivatif, TRA dan dilakukan penyesuaian penilaian prudensial maka Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara konsolidasi menjadi sebesar Rp. 81,62 Triliun.

LR2: Pengungkapan Leverage Ratio

1)Pengungkapan Leverage Ratio – Bank Secara Individu

(dalam juta rupiah)

Item		Periode	
		T (31 Desember 2023)	T-1 (31 September 2023)
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
1	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. *Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	79.065.739	80.905.294
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait *cash variation margin* yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-

1)Pengungkapan Leverage Ratio – Bank Secara Individu

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2023)	T-1 (31 September 2023)
4	(Penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.	(3.409.257)	(3.564.873)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (Tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)	(5.426.007)	(4.423.372)
7	Total eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan) (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)	70.230.475	72.917.048
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai *Replacement Cost* (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat *variation margin* yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.	4.256	3.558
9	Nilai penambahan yang merupakan *Potential Futures Exposures* (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.	14.461	28.190
10	(pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diseleseaikan melalui *central counterparty* (CCP)).	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit.	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan *add-on* untuk transaksi penjualan kredit derivatif).	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12).	18.716	31.747
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai Gross SFT	2.572.152	372.518
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan *Current Exposure* sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)	2.572.152	372.518
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi. *Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	5.662.259	6.298.556
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK)kemudian dikurangi CKPN)	(4.567.679)	(5.077.562)
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku).	-	-
22	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)	1.094.580	1.220.993
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti (Tier 1)	7.847.606	10.952.437
24	Total eksposur (Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22)	73.915.924	74.542.307
Rasio Leverage			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	10.62%	14,69%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	10.62%	14,69%

1)Pengungkapan Leverage Ratio – Bank Secara Individu

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2023)	T-1 (31 September 2023)
26	Nilai Minimum Rasio Leverage	3,00%	3,00%
27	Buffer terhadap nilai Rasio Leverage	0,00	0,00
Pengungkapan Niai Rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	2.572.152	372.518
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	2.572.152	372.518
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	73.915.924	74.542.307
30a	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	73.915.924	74.542.307
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	10.62%	14,69%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	10.62%	14,69%

Analisis Kualitatif

Dengan Total Eksposur Rasio Pengungkit sebesar Rp. 73,92 Triliun dan Total Modal Inti sebesar Rp. 7.85 Triliun. Maka didapatkan Rasio Pengungkit pada Triwulan IV 2023 sebesar 10.62%. Rasio Pengungkit PT. Bank KB Bukopin Tbk. secara individu (bank only) berada di atas nilai minimum Rasio Pengungkit yang ditetapkan Regulator (3%).

2) Pengungkapan Leverage Ratio - Bank Secara Konsolidasi degan Entitas Anak

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2023)	T-1 (31 September 2023)
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
1	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. *Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	84.192.599	86.521.891
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait cash variation margin yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.	(3.590.785)	(3.795.163)

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2023)	T-1 (31 September 2023)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (Tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)	(2.956.142)	(3.208.632)
7	**Total eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan) (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)**	**77.645.672**	**79.518.097**
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai Replacement Cost (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.	4.256	3.558
9	Nilai penambahan yang merupakan Potential Futures Exposures (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.	14.461	28.190
10	(pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diseleseaikan melalui central counterparty (CCP)).	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit.	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan kredit derivatif).	-	-
13	**Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12).**	**18.716**	**31.747**
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai Gross SFT	2.572.152	372.518
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan Current Exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	**Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)**	**2.572.152**	**372.518**
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi. *Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	6.248.849	7.043.890
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK)kemudian dikurangi CKPN)	(4.860.974)	(5.450.229)
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku).	-	-
22	**Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)**	**1.387.875**	**1.593.660**
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti (Tier 1)	9.813.056	11.837.425
24	**Total eksposur (Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22)**	**81.624.416**	**81.516.023**
Rasio Leverage			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	12,02%	14,52%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	12,02%	14,52%
26	Nilai Minimum Rasio Leverage	3,00%	3,00%
27	Buffer terhadap nilai Rasio Leverage	0,00	0,00
Pengungkapan Niai Rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	2.572.152	372.518

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2023)	T-1 (31 September 2023)
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	2.572.152	372.518
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	81.624.416	81.516.023
30a	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	81.624.416	81.516.023
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	12,02%	14,52%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	12,02%	14,52%

Analisis Kualitatif

Dengan Total Eksposur Rasio Pengungkit sebesar Rp. 81,62 Triliun dan Total Modal Inti sebesar Rp. 9,8 Triliun, maka didapatkan Rasio Pengungkit pada Triwulan IV 2023 sebesar 12,02%. Rasio Pengungkit PT. Bank KB Bukopin Tbk. secara konsolidasi berada di atas nilai minimum Rasio Pengungkit yang ditetapkan Regulator (3%).

PENGUNGKAPAN INFORMASI KUALITATIF TERKAIT RISIKO KREDIT SECARA UMUM (CRA)

Berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko (internal), Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, settlement risk dan country risk.

Dalam peningkatan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan Risiko Kredit, Bank telah menetapkan struktur organisasi yang telah menggambarkan secara jelas pemisahan antara fungsi lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua dan lini pertahanan ketiga.

1. Cerminan Model Bisnis Dalam Komponen Profil Risiko Kredit Bank
   Strategi manajemen Risiko Kredit Bank, telah disusun untuk tujuan jangka panjang, guna memastikan Bank dapat mencapai kelangsungan usaha, kecukupan permodalan yang diharapkan, serta diharapkan strategi secara keseluruhan ini dapat mengendalikan risiko yang dihadapi Bank. Strategi manajemen Risiko Kredit disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi, kecukupan sumber daya manusia, infrastruktur, kondisi keuangan, dan lainnya.
   Bank akan melakukan percepatan untuk menyelesaikan sisa non-performing asset secara tepat waktu sehingga struktur permodalan menjadi kuat dan meningkatkan soundness Bank dengan mendorong dan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kapabilitas organisasi dan peningkatan infrastuktur TI Bank. Selain itu, bank akan meningkatkan profitabilitas, meningkatkan portofolio asset, dan struktur permodalan yang kuat sehingga dapat menciptakan siklus yang baik untuk pertumbuhan Bank berkelanjutan. Adapun arah strategi Bank di tahun 2024 adalah:
   a. Capital Structure Advancement. Penguatan struktur permodalan dan memastikan kesesuaian dengan regulasi melalui peningkatan profitabilitas dan inisiatif penghematan factor pengurang modal serta implementasi teknik mitigasi risiko kredit.
   b. Portfolio Improvement. Penyelesaian bad asset, membangun model penjualan yang baru dengan berfokus pada bisnis yang telah dikuasai bank, pembentukan portofolio good asset melalui ekspansi bisnis dan rekomposisi DPK dan peningkatan CASA, memperkuat credit management
   c. Productivity Enhancement. Efisiensi terus dilakukan baik dari sisi menekan biaya overhead, peningkatan infrastruktur dan sistem manajemen bank dan inovasi untuk menciptakan organisasi yang capable.

   Fase transformasi Bank yang diagendakan terus berlanjut mengikuti dinamika perkembangan bisnis yang ada, dimana Bank membagi dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan proyeksi waktu. Fase pertama (2023-2024) yaitu memulihkan fundamental dasar. Fase kedua (2025-2026) Bank akan mempelajari dan meniru market leader serta menanamkan kompetensinya, sehingga dapat membangun competitive level. Pada fase ketiga (2027-dst) Bank diharapkan sudah berada dalam tahap memimpin market melalui inovasi.

PENGUNGKAPAN INFORMASI KUALITATIF TERKAIT RISIKO KREDIT SECARA UMUM (CRA)

2. Kriteria dan Pendekatan untuk Kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan Penetapan Limit Risiko Kredit
Penyusunan strategi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank, dan dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis dan kompleksitas usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Dalam mendukung penerapan manajemen Risiko Kredit, Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, dan Piagam Komite Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit digunakan sebagai payung kebijakan untuk mengelola Risiko Kredit, serta kebijakan Produk Program sebagai standar bagi unit bisnis untuk mengembangkan produk yang dimiliki.

   Penetapan limit Risiko Kredit mencakup limit keseluruhan, serta limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko Kredit. Besaran limit ini telah disesuaikan dengan skala bisnis Bank, dan rencana kedepannya atas target yang ingin dicapai, disesuaikan dengan potensi risiko yang akan dihadapi Bank. Penetapan limit Risiko Kredit dituangkan dalam risk appetite statement yang dilaporkan secara bulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila ada pelampauan limit Risiko Kredit, maka hal ini akan dieskalasi kepada pihak berwenang, dan Bank menetapkan rencana tindak lanjut sebagai bentuk perbaikan. Limit juga dilakukan kaji ulang secara berkala disesuaikan dengan keperluan internal.

3. Struktur dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol
Pengawasan aktif Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (BOC) terkait Risiko Kredit dilakukan melalui masing-masing komite, dan dilakukan secara konsisten. Agenda pembahasan secara umum adalah pembahasan profil risiko kredit secara triwulan, dan pemaparan rasio-rasio kredit secara bulanan, dimana limit yang berlaku telah ditetapkan sebelumnya sesuai ketentual internal yang berlaku. Selain Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Komite Pemantau Risiko (ROC), Bank juga memiliki Komite Kredit yang membahas terkait dengan proses perkreditan Bank, dan dilakukan secara berkala sesuai piagam yang berlaku, maupun tambahan kajian apabila diperlukan sesuai keperluan internal.

   Struktur Organisasi Perusahaan terkini tercantum pada Surat Keputusan No. 0020 Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Tentang Struktur Organisasi Bank KB Bukopin Tbk. Perangkat atau unit yang terlibat atas manajemen Risiko Kredit telah disesuaikan dan terbagi atas prinsip Three Lines of Defence. Risk Taking Unit, dalam hal ini bisnis dan supporting, termasuk tim kredit sebagai 1st Line of Defence, Risk Group dan Kepatuhan sebagai 2nd Line of Defence, serta Internal Audit sebagai 3rd Line of Defence, tercermin dalam struktur organisasi dan kewenangan masing-masing fungsi tersebut, dan telah tercantum dalam job description atas setiap fungsi. Selain itu, Bank sudah memiliki control manajemen risiko dengan menambahkan Risk Management Division Head pada struktur organisasi tersebut. Bank akan selalu melakukan perubahan yang diperlukan terkait dengan kecukupan perangkat organisasi guna mendukung operasionalisasi Bank.

4. Hubungan Fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan, dan Audit Internal
Berdasarkan prinsip Three Lines of Defence, Grup Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk sebagai 2nd Line of Defence yang bertugas untuk melakukan fungsi pemantauan secara independen. Grup Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menyusun dan melakukan kaji ulang secara berkala atas berbagai kebijakan, limit, dan perangkat manajemen risiko. Grup Manajemen Risiko juga berperan dalam melakukan pemantauan dan memberikan arahan kepada Lini Pertahanan/Model Pertama atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Sementara itu, Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan agar segala aktivitas Bank pada seluruh tingkatan organisasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK) maupun otoritas berwenang lainnya.

   Sedangkan untuk Audit Internal termasuk sebagai 3rd Line of Defence yang secara independen bertugas untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh Lini Pertahanan/Model Pertama dan Kedua. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian hasil atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Lini Pertahanan/Model Pertama dan Kedua terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang berlaku.

   Sistem pengendalian intern dilakukan melalui pelaksanaan program kerja rutin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melalui pelaksanaan audit umum sebagai 3rd line of defense. Monitoring terhadap kondisi kredit bank dilakukan oleh Enterprise Risk Management Department dan Credit Risk Management Department sebagai 2nd line of defense, dan bekerjasama dengan Risk Taking Unit di 1st line of defense (segregation of duties). Adapun unit-unit lain juga dapat membantu terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Kredit yang memadai.

5. Informasi Utama Laporan Eksposur Risiko Kredit
Risk Group secara berkala menyampaikan Laporan Risiko kepada Direksi (melalui Komite Manajemen Risiko) dan Komisaris (melalui Komite Pemantau Risiko). Selain itu, perbaikan terkait tata kelola aktivitas perkreditan (end-to-end process) akan selalu dilakukan, diantaranya melalui pemantauan rasio kredit (bankwide), dan lainnya.

1) Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023						
		Nilai Terrcatat Bruto		CKPN (d+e)	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	7.128.114	37.055.114	3.353.299	2.922.839	430.459		40.829.929
2	Surat Berharga	-	17.608.965	109	-	109		17.608.856
3	Transaksi Rekening Administratif	185.107	5.477.152	-	-	-		5.662.259
4	**Total**	**7.313.221**	**60.141.232**	**3.353.408**	**2.922.839**	**430.568**		**64.101.045**

2) Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset - Bank secara Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023						
		Nilai Terrcatat Bruto		CKPN (d+e)	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	7.480.980	42.552.670	3.429.247	3.066.844	524.373		46.604.403
2	Surat Berharga	-	17.946.800	109	-	109		17.946.691
3	Transaksi Rekening Administratif	185.107	6.063.742	-	-	-		6.248.849
4	**Total**	**7.666.087**	**66.563.212**	**3.429.356**	**3.066.844**	**524.482**		**70.799.943**

PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

1) Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo - Bank Individual

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023
		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	7.128.114
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	3.373.765
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	39.788
4	Nilai Hapus Buku	12.559.520
5	Perubahan Lain	-
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan terakhir (1+2-3-4+5)	-2.097.429

2) Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo - Bank secara Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023
		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	7.371.826
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	3.419.205
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	5.455.184
4	Nilai Hapus Buku	13.191.414
5	Perubahan Lain	-
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan terakhir (1+2-3-4+5)	-7.855.568

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

a. Kualitatif

i) Tagihan yang Telah Jatuh Tempo, mengacu pada kategori portofolio tagihan yang telah jatuh tempo sebagaimana Lampiran A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. SEOJK 24/SEOJK.03/2021.

ii) Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai, tagihan yang berada pada stage 2 (aset kurang baik) dan stage 3 (aset tidak baik)

iii) Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap kredit yang diberikan dalam klasifikasi dan pengukuran selain nilai wajar melalui laba rugi. Tujuan dari penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss) sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan mendukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking).

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individu (dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 (Unaudited)				31 Desember 2022 (Audited)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	f	i	j	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.432.697	-	-	16.432.697	22.039.467	-	-	22.039.467
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.996.050	355	-	2.996.405	2.485.425	-	-	2.485.425
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	367.285	53	4	367.342	1.052.409	-	-	1.052.409
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-				-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	1.522.780	2.193	-	1.524.972				-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	50.000	-	-	50.000				-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	3.353.092	532.882	614.502	4.420.018	533.148	195.320	165.355	893.823
9	Kredit Beragun Properti Komersial	9.658.057	596.499	1.170.748	11.099.573	291.641	45.258	146.558	483.456
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	600	-	600				-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	5.265.610	1.199.709	2.723.110	9.188.429	4.689.575	1.498.962	2.555.957	8.744.495
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.968.052	155.655	258.257	2.381.963	3.242.172	404.951	839.092	4.486.215
13	Tagihan kepada Korporasi	12.823.215	318.674	181.581	13.323.469	24.065.103	3.338.312	3.276.523	30.679.938
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.383.798	225.339	306.907	4.757.974	1.241.922	284.376	513.049	2.039.347
15	Aset Lainnya	7.445.189	-	-	7.435.101	8.783.285	-	-	8.783.285
Total		**65.691.479**	**3.031.958**	**5.255.108**	**73.978.544**	**68.424.147**	**5.767.180**	**7.496.533**	**81.687.859**

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara konsolidasi dengan Entitas Anak (dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31Desember2023 (Unaudited)				31Desember2022 (Audited)			
		TagihanBersihBerdasarkanWilayah				TagihanBersihBerdasarkanWilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	f	i	j	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	17.656.442	-	-	17.656.442	23.434.567	-	-	23.434.567
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.996.050	355	217	2.996.622	2.485.621	-	-	2.485.621
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	401.412	57	7	401.476	1.061.278	-	-	1.061.278
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-				-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	1.522.780	2.193	-	1.524.972				-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	50.000	-	-	50.000				-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	3.327.290	601.335	626.448	4.555.073	662.380	195.320	165.355	1.023.055
9	Kredit Beragun Properti Komersial	9.879.549	597.886	1.173.460	11.650.895	653.557	45.258	146.558	845.372
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	600	-	600				-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	5.309.659	1.221.607	2.734.552	9.265.818	4.998.265	1.498.962	2.555.957	9.053.184
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.432.902	278.027	321.641	3.032.569	3.125.324	404.951	839.092	4.369.367
13	Tagihan kepada Korporasi	15.787.726	1.080.900	595.460	17.464.086	27.747.024	3.338.312	3.276.523	34.361.860
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.349.540	252.481	376.532	4.978.553	1.434.189	284.376	513.049	2.231.614
15	Aset Lainnya	7.845.225	13.390	113.215	7.971.830	9.276.032	-	-	9.276.032
Total		**71.558.573**	**4.048.831**	**5.941.531**	**81.548.936**	**74.878.237**	**5.767.180**	**7.496.533**	**88.141.950**

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
31 Desember 2023 (Audited)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	895.422	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	446.566	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	300.000	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	2.193	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	20.000	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	1.110.784	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	40.564	234.392	-	4.674	71.125	0	146.901	-
	-	17.450	20.961	-	-	7.904	1	577.256	-
	-	253.455	1.685.717	-	11	173.455	3	63.596	-
	-	112.205	97.864	-	86	-	1	184.576	-
	-	4.742	2.832	-	-	-	0	-	-
	-	770.133	1.107.412	600	-	55.672	0	1.132.071	-
	-	755.027	2.388.242	-	558	134.183	1	608.378	-
	-	190.326	939.850	-	1.232	246.083	0	501.357	-
	-	413.615	2.670.778	-	36	9.517	0	282.765	-
	0	561.121	31.178	0	0	100	0	2.939	-
	50.000	19.176	28.556	-	-	363.668	1	206.442	-
	-	361.928	804.276	-	111	1.903	0	198.959	-
	-	20.196	176.604	-	-	5.654	0	21.495	-
	-	75.149	38.642	-	241	15.481	0	6.687	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	355	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	1	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	16.432.697	1.334.061	-	367.341	-	411.996	
Total		**16.432.697**	**2.996.405**	**-**	**367.342**	**-**	**1.524.972**	

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
	31 Desember 2022 (Audited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-			
2	Pertambangan dan Penggalian	-	1.167.563	-	-			

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	-	23.797	511.335	-	-	14.986	0	22.657	-
	-	16.308	106.597	-	34	1.960	0	7.162	-
	-	12.850	137.566	-	301	12.365	0	3.392	-
	-	10.110	20.458	-	111	8.650	0	6.334	-
	-	809	583	-	-	-	0	-	-
	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	-	715.106	95.729	-	9.180.807	729.689	0	782.581	-
	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	-	-	-	-	-	524.834	6	-	7.435.101
	50.000	**4.374.066**	**11.099.573**	**600**	**9.188.202**	**2.377.230**	**13**	**4.755.548**	**7.435.101**

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	6.520		224	483.574	704.325	30.411	-
	-	-	-		-	26.603	1.269.920	0	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	
3	Industri pengolahan	-	22.197	-	-			
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-			
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-			
6	Konstruksi	-	-	-	-			
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-			
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-			
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-			
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-			
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	616.000			
12	Real Estat	-	-	-	-			
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-			
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-			
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-			
16	Pendidikan	-	-	-	-			
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-			
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-			
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-			

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	4.875		107	259.512	4.322.438	33.344	-
	-	-	-		-	5.246	596.823	1.081	-
	-	-	-		-	2.272	7.572	-	-
	-	-	119.107		4.354	303.986	3.913.735	67.824	-
	-	-	7.041		4.527	1.009.090	5.725.385	141.631	-
	-	-	-		-	279.743	1.948.353	59.146	-
	-	-	236.617		-	184.106	2.859.659	74.093	-
	-	-	-		-	11.807	183.829	1.583	-
	-	-	-		-	49.865	1.493.151	142.212	-
	-	-	98.430		130	50.279	2.178.526	2.626	-
	-	-	-		130	20.340	242.846	26.089	-
	-	-	209		-	35.933	182.500	1.921	-
	-	-	-		-	-	-	-	-
	-	-	8.392		-	29.713	661.838	3.493	-
	-	-	438		-	36.535	153.191	3.098	-
	-	-	55		230	20.844	145.427	3.991	-
	-	-	-		-	10.336	61.588	1.817	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-			
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-			
22	Rumah Tangga	-	-	-	-			
23	Bukan Lapangan Usaha	22.039.467	1.295.665	-	436.409			
24	Lainnya							
Total		**22.039.467**	**2.485.425**	**-**	**1.052.409**	**-**	**-**	

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
	31 Desember 2023 (Audited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	895.422	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	446.566	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	300.000	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	2.193	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	20.000	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-		-	2.001	-	-	-
	-	-	-		-	-	-	-	-
	893.823	-	1.771		8.677.084	1.089.284	572.209	1.444.548	-
	-	-	-		57.708	575.145	3.456.620	439	8.783.285
	893.823	**-**	**483.456**	**-**	**8.744.495**	**4.486.215**	**30.679.938**	**2.039.347**	**8.783.285**

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	40.564	234.392	-	4.674	74.344	541.543	146.987	-
	-	17.450	20.961	-	-	7.904	651.982	577.618	-
	-	253.455	1.686.185	-	11	203.046	3.202.093	64.636	-
	-	112.205	97.864	-	86	4.332	1.409.177	184.576	-
	-	4.742	2.832	-	-	-	43.096	-	-
	-	776.076	1.181.719	600	-	114.006	251.470	1.157.579	-
	-	769.720	2.424.048	-	558	330.882	1.201.763	638.836	-
	-	190.326	946.215	-	1.232	275.080	763.341	504.087	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	1.110.784	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	355	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	196	-	1	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	21	-	-	-	-	
24	Lainnya	17.656.442	1.334.061	-	401.476	-	411.996	
Total		**17.656.442**	**2.996.622**	**-**	**401.476**	**-**	**1.524.972**	

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	413.615	2.736.113	-	36	109.727	139.482	285.635	-
	-	561.121	31.178	-	-	100	120.802	2.939	-
	50.000	19.176	28.556	-	-	408.332	644.780	207.864	-
	-	362.432	811.691	-	111	33.303	314.805	209.540	-
	-	20.196	176.604	-	-	5.654	7.980	21.495	-
	-	75.149	38.642	-	241	15.481	485.934	6.687	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	24.284	693.689	-	-	78.376	777.312	30.828	-
	-	16.380	285.870	-	34	11.562	423.822	36.345	-
	-	14.114	137.566	-	301	16.743	174.288	3.392	-
	-	10.110	20.458	-	111	8.650	13.848	6.334	-
	-	809	583	-	-	-	49.483	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	818.952	95.729	-	9.242.600	747.629	24.670	816.326	-
	-	8.244	-	-	15.596	842	54.059	473	-
	-	-	-	-	-	524.834	6.081.521	-	7.971.831
	50.000	**4.509.121**	**11.650.895**	**600**	**9.265.591**	**2.970.828**	**17.377.250**	**4.902.177**	**7.971.831**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
	31 Desember 2022 (Audited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-			
2	Pertambangan dan Penggalian	-	1.167.563	-	-			
3	Industri pengolahan	-	22.197	-	-			
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-			
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-			
6	Konstruksi	-	-	-	-			
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-			
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-			
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-			
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-			
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	594.328			
12	Real Estat	-	-	-	-			
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-			
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-			
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-			
16	Pendidikan	-	-	-	-			
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-			
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-			

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		-	6.520		224	487.317	725.175	30.497	-
		-	-		-	27.161	1.369.702	371	-
		-	5.721		107	265.864	4.403.111	34.352	-
		-	-		-	6.470	879.599	1.081	-
		-	-		-	2.272	7.572	-	-
		7.847	190.795		4.354	358.649	4.086.683	77.358	-
		16.882	48.103		4.527	1.165.530	6.566.658	211.309	-
		-	2.313		-	316.819	2.375.884	59.319	-
		-	307.134		-	261.030	2.941.030	79.417	-
		-	-		-	11.807	183.829	1.583	-
		-	25		-	64.232	1.749.578	143.628	-
		504	132.603		130	77.953	2.552.597	15.786	-
		-	-		130	20.340	242.846	26.089	-
		-	209		-	35.933	182.500	1.921	-
		16	-		-	-	-	-	-
		176	125.016		-	41.427	1.193.503	3.670	-
		93	23.090		-	58.661	536.022	56.566	-
		1.340	55		230	23.182	169.156	3.991	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-			
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-			
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-			
22	Rumah Tangga	-	196	-	-			
23	Bukan Lapangan Usaha	23.434.567	1.295.665	-	466.950			
24	Lainnya							
Total		**23.434.567**	**2.485.621**	**-**	**1.061.278**	**-**	**-**	

3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 (Audited)						
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
a	b	c	d	e	f	g	h	
1	Tagihan kepada Pemerintah	6.959.641	1.236.459	2.034.420	6.036.312	165.865	16.432.697	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	210.323	355	1.151.665	1.634.061	-	2.996.405	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	1	-	-	-	367.341	367.342	
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya	1.031.775	491.002	-	2.195	-	1.524.972	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	50.000	-	-	50.000	

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
		-	-		-	10.336	61.588	1.817	-
		-	-		-	9.052	5.209	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		988.666	3.268		8.951.346	547.692	613.776	1.481.954	-14.000
		7.533	519		92.135	577.638	3.515.840	905	9.290.032
	-	1.023.057	845.372	-	9.053.184	4.369.367	34.361.861	2.231.614	9.276.032

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022 (Audited)					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	i	j	k	l	m	n
	12.850.156	1.493.553	243.893	3.708.076	3.743.790	22.039.467
	-	-	1.189.760	1.295.665	-	2.485.425
	-	-	-	-	-	-
	236.675	-	-	50.000	765.734	1.052.409
						-
						-
					-	-

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 (Audited)					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	645.694	691.187	1.496.383	1.586.754	-	4.420.018
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.310.880	1.444.408	1.966.623	4.377.662	-	11.099.573
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	600	-	-	-	-	600
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	94.664	373.268	624.755	8.095.742	-	9.188.429
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.081.042	443.464	248.817	268.112	340.528	2.381.963
13	Tagihan kepada Korporasi	4.857.337	669.673	3.290.327	4.490.271	15.861	13.323.469
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	941.756	768.656	1.007.048	2.040.513	-	4.757.974
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	7.435.101	7.435.101
Total		**19.133.714**	**6.118.473**	**11.870.037**	**28.531.623**	**8.324.697**	**73.978.544**

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 (Audited)					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.244.528	1.236.459	2.034.420	6.036.312	1.104.723	17.656.442
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	210.323	376	1.151.665	1.634.061	196	2.996.622
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	34.135	-	-	-	367.341	401.476
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022 (Audited)					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	20.388	43.904	84.068	745.463	-	893.823
	45.012	80.349	92.079	266.015	-	483.456
						-
	162.627	359.520	660.723	7.561.057	567	8.744.495
	1.518.363	923.754	727.570	894.542	421.985	4.486.215
	6.977.346	4.452.570	7.567.869	11.695.972	-13.819	30.679.938
	134.716	232.915	223.668	1.217.458	230.589	2.039.347
	-	-	-	-	8.783.285	8.783.285
	21.945.284	**7.586.565**	**10.789.630**	**27.434.248**	**13.932.132**	**81.687.859**

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022 (Audited)					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
i	j	k	l	m	n	
	13.163.016	1.493.553	274.214	3.708.076	4.795.709	23.434.567
	-	-	1.189.760	1.295.665	196	2.485.621
	-	-	-	-	-	-
	245.544	-	-	50.000	765.734	1.061.278
						-

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 (Audited)					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.031.775	491.002	-	2.195	-	1.524.972
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	50.000	-	-	50.000
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	645.739	692.047	1.499.188	1.586.754	131.345	4.555.073
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.314.608	1.450.615	1.991.320	4.377.662	516.690	11.650.895
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	600	-	-	-	-	600
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	94.681	374.566	632.113	8.095.742	68.715	9.265.818
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.205.685	614.452	380.625	268.112	555.149	3.024.023
13	Tagihan kepada Korporasi	5.105.517	1.178.221	3.764.467	4.490.271	2.936.391	17.474.866
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	970.215	820.460	1.081.244	2.041.615	65.085	4.978.620
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	7.971.831	7.971.831
Total		**19.857.807**	**6.858.199**	**12.585.040**	**28.532.725**	**13.717.467**	**81.551.238**

4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

1) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

No.	Keterangan	31 Desember 2023 (Unaudited)		
		Wilayah		
		Jawa	Sumatera	Lain-lain
a	b	c	d	e
1	Tagihan	62.469.306	3.275.166	5.591.413
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	8.573.894	412.375	670.399
	a. Belum jatuh tempo	2.261.363	50.415	90.738
	b. Telah jatuh tempo	6.312.530	361.960	579.661
3	CKPN - *Stage* 1	384.774	32.677	55.647
4	CKPN - *Stage* 2	784.033	5.168	7.042
5	CKPN - *Stage* 3	1.741.708	125.237	271.356
6	Tagihan yang dihapus buku			

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022 (Audited)					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
						-
						-
	20.440	46.928	91.117	745.463	119.108	1.023.055
	111.636	106.964	104.787	266.015	255.970	845.372
						-
	162.723	363.425	673.772	7.561.057	292.207	9.053.184
	1.081.307	992.885	784.969	894.542	615.664	4.369.367
	7.469.991	4.637.315	8.048.721	11.695.972	2.509.862	34.361.861
	139.467	263.528	276.829	1.217.458	334.331	2.231.613
	-14.000	-	-	-	9.290.032	9.276.032
	22.380.123	**7.904.596**	**11.444.168**	**27.434.248**	**18.978.813**	**88.141.949**

		31 Desember 2022 (Audited)			
		Wilayah			
	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
	h	i	j	k	n
	71.335.885	68.981.972	5.862.980	7.732.548	82.577.500
	9.656.668	2.694.622	539.463	968.646	4.202.731
	2.402.516	979.484	167.731	254.475	1.401.690
	7.254.152	1.715.138	371.733	714.170	2.801.041
	473.098	385.729	65.629	78.126	529.484
	796.244	61.385	9.769	11.690	82.844
	2.138.301	496.440	86.032	224.325	806.797
	12.523.033				11.399.784

2) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Keterangan	31 Desember 2023 (Unaudited)		
		Wilayah		
		Jawa	Sumatera	Lain-lain
a	b	c	d	e
1	Tagihan	68.345.464	4.307.231	6.253.584
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	8.586.416	443.536	711.242
	a. Belum jatuh tempo	2.633.965	110.173	150.211
	b. Telah jatuh tempo	6.481.087	408.621	655.690
3	CKPN - *Stage* 1	440.700	41.905	317.388
4	CKPN - *Stage* 2	805.880	5.933	8.124
5	CKPN - *Stage* 3	1.822.385	142.407	319.660
6	Tagihan yang dihapus buku			

5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

1) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2023 (Unaudited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	924.532	968	186.681	10.038	29.913	9.953	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.355.983	3.407	3.407	18.980	130	282.307	
3	Industri pengolahan	5.557.796	108.910	108.910	68.876	38.442	70.782	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	1.837.904	-	-	20.781	9.554	8.859	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	50.799	1.828	1.828	617	137	43	
6	Konstruksi	3.633.799	486.028	486.028	25.235	301.130	90.043	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4.929.221	230.421	230.421	49.441	117.602	267.298	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.341.064	20.612	20.612	21.642	23.160	154.331	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.625.104	1.113.269	1.113.269	29.243	180.175	7.016	
10	Informasi dan Komunikasi	718.492	-	-	9.017	-	1.326	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.926.984	30.651	30.651	31.939	3.023	80.453	

(dalam jutaan rupiah)

	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
	h	i	j	k	n
	78.906.278	77.557.925	6.444.015	7.766.936	91.768.876
	9.741.194	3.416.436	688.782	980.275	5.085.493
	2.894.348	1.529.461	250.617	264.985	2.045.062
	7.545.398	1.886.975	438.165	715.290	3.040.430
	799.993	429.880	71.803	82.085	583.768
	819.937	76.961	12.078	16.198	105.237
	2.284.452	651.079	100.770	239.836	991.685
	13.111.741				11.399.784

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
12	Real Estat	1.430.061	4.893	4.893	15.114	11.962	31.188	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	243.984	6.969	6.969	2.601	-	10.318	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	632.048	5.736	5.736	8.087	511	14.857	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	620.510	-	-	7.900	403	5.333	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	150.070	4.609	4.609	1.819	-	13.875	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	229.681	189.380	189.380	439	59.999	774	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	61.393	-	-	685	-	1.636	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.478	878	878	8	86	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	12.569.498	191.479	191.479	107.780	19.747	1.075.953	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	22.329.722	-	-	42.639	239	11.466	
Total		**67.170.123**	**2.400.037**	**2.585.749**	**472.882**	**796.212**	**2.137.811**	**12.523.033**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2022 (Audited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.252.588	16.524	55.166	16.291	917	26.617	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.480.054	71.138	0	30.415	519	15.449	
3	Industri pengolahan	4.662.159	58.445	46.378	60.412	4.473	15.212	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	604.052	8.001	1.500	7.507	483	419	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	9.879	215	-	141	34	-	
6	Konstruksi	4.459.375	290.209	94.951	54.106	23.238	27.130	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	6.986.769	389.125	213.553	87.587	12.400	86.695	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.313.532	67.071	82.355	28.468	2.838	23.452	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.407.269	88.303	120.793	41.531	6.094	46.700	
10	Informasi dan Komunikasi	197.922	950	2.196	2.578	89	614	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.360.786	85.887	184.349	24.295	2.841	56.717	
12	Real Estat	2.337.322	36.329	7.597	29.149	2.360	4.970	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	300.190	12.314	36.200	3.281	673	10.111	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	222.539	13.532	2.665	2.992	1.232	744	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	706.009	14.989	4.835	9.226	1.231	1.342	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	194.668	2.771	4.266	2.710	237	1.168	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	171.510	115	4.950	2.106	3	959	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	75.529	13.397	2.521	690	958	830	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	2.001	-	-	29	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	13.188.477	232.158	1.936.228	124.979	22.190	487.568	
23	Bukan Lapangan Usaha	36.644.872	216	539	993	34	100	
24	**Lainnya**							
Total		**82.577.500**	**1.401.690**	**2.801.041**	**529.484**	**82.844**	**806.797**	**11.399.784**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2023 (Unaudited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.082.237	158.586	186.768	11.562	29.966	9.953	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.456.787	100.653	6.804	19.953	465	285.094	
3	Industri pengolahan	5.988.110	517.090	110.300	72.388	38.892	71.079	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	2.127.060	289.156	-	23.650	9.557	8.859	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	50.799	1.828	1.828	617	137	43	
6	Konstruksi	3.860.327	683.241	514.795	26.902	301.597	93.295	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.941.039	1.125.783	346.886	56.807	120.114	276.630	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.862.916	440.216	40.639	26.218	24.095	168.982	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.873.627	1.357.092	1.117.970	31.679	180.175	7.803	
10	Informasi dan Komunikasi	790.011	71.519	-	9.733	-	1.326	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3.089.305	191.417	32.206	33.190	3.384	80.586	
12	Real Estat	1.594.703	165.316	9.112	16.609	11.971	31.415	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	263.370	20.777	12.546	2.737	-	10.496	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	792.707	161.780	10.350	9.482	661	14.976	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	1.607.499	986.812	177	17.464	519	5.339	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	792.818	611.390	35.182	7.301	792	14.434	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	255.387	190.086	189.380	1.068	59.999	774	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	241.812	178.782	1.639	2.439	26	3.193	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	50.792	50.192	878	502	86	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
22	Rumah Tangga	12.835.876	397.361	251.976	109.560	20.011	1.100.247	
23	Bukan Lapangan Usaha	78.952	78.157	795	329	15	123	
24	Lainnya	22.384.411	3.393	52.199	42.650	239	66.952	
Total		**73.020.545**	**7.780.625**	**2.922.428**	**522.837**	**802.702**	**2.251.600**	**12.523.033**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
	31 Desember 2022 (Audited)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.280.670	19.627	55.253	16.540	963	29.547	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.587.442	77.526	371	31.425	737	20.858	
3	Industri pengolahan	4.760.993	67.237	47.768	61.300	4.582	23.875	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	888.514	8.464	1.500	10.348	483	884	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	9.879	215	-	141	34	-	
6	Konstruksi	4.780.878	326.600	105.703	64.674	23.674	31.340	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	8.172.752	576.066	290.816	97.198	19.310	126.970	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.803.312	153.270	83.248	31.545	4.006	34.162	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.643.199	90.744	127.785	43.779	6.219	48.369	
10	Informasi dan Komunikasi	197.922	950	2.196	3.799	89	635	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.633.167	85.887	185.912	27.009	2.841	56.863	
12	Real Estat	2.787.764	62.431	21.509	31.314	2.360	5.113	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	300.190	12.314	36.200	3.426	774	10.486	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	222.539	13.532	2.665	4.800	1.239	980	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	16	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	1.366.470	22.395	5.012	15.580	1.335	1.342	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	677.371	52.416	58.627	6.804	877	2.062	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	198.921	521	4.950	2.147	3	959	

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
19	Aktivitas Jasa Lainnya	146.004	71.869	2.521	1.243	2.082	54.558	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	14.261	-	-	151	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	17.095.145	289.620	1.936.729	125.549	22.260	487.605	
23	Bukan Lapangan Usaha	37.201.470	113.378	71.664	4.995	11.369	55.077	
24	Lainnya							
Total		**91.768.876**	**2.045.063**	**3.040.430**	**583.768**	**105.237**	**991.685**	**11.399.784**

6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

1) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023 (Unaudited)			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	114.900	227.649	3.565.619	3.908.167
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
Total		**114.900**	**227.649**	**3.565.619**	**3.908.167**

2) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023 (Unaudited)			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	160.522	255.715	3.780.634	4.196.872
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-

Total	160.522	255.715	3.780.634	4.196.872

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET BERMASALAH (CRB-A)

a) Kualitatif

1. Penetapan kualitas aset merujuk pada POJK No/40/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Bank Umum, dimana penetapan kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:
   a. prospek usaha;
   b. kinerja debitur; dan
   c. kemampuan membayar

2. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Restrukturisasi Kredit adalah Upaya perbaikan/ penyelamatan/ penyehatan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dimana, pelaksanaan restrukturisasi ini harus merujuk pada ketentuan regulator maupun internal baik dari pelaksanaan maupun penetapan keringanan.

b) Kuantitatif

1) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

1) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Individu (dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023							
		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	17.608.965	109	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	39.957.427	1.284.122	4.225.802	2.069.177	-	-	-	-
	a. Korporasi	29.453.018	1.154.213	2.452.515	991.130	-	-	-	-
	b. Ritel	10.504.409	129.909	1.773.287	1.078.047	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	762.345	-	76.980	-	-	-	-	-

2) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak (dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023							
		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	17.946.800	109	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	45.040.070	1.359.963	4.992.757	2.230.892	-	-	-	-
	a. Korporasi	33.365.827	1.217.265	2.521.857	1.035.741	-	-	-	-

2) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak (dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023							
		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	b. Ritel	11.674.243	142.698	2.470.900	1.195.151	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	1.348.934	-	76.980	-	-	-	-	-

1) Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non-Performing - Bank secara Individu (dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023									
		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, dan M)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kredit	12.711.073	924.086	2.624.776	1.119.887	8.002.219	108.153	4.578.497	761.203	2.755.133	1.174.618
	a. Korporasi	12.394.310	915.696	1.914.170	799.324	7.822.092	106.414	4.447.027	755.796	2.039.361	852.811
	b. Ritel	316.763	8.390	710.606	320.563	180.127	1.739	131.470	5.407	715.772	321.807
3	Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non-Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak (dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023									
		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, dan M)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	13.993.436	955.670	2.746.754	1.146.875	8.029.207	135.141	4.605.485	788.191	2.782.121	1.201.606
	a. Korporasi	13.408.496	943.641	1.942.816	804.478	7.827.246	111.568	4.452.181	760.950	2.044.515	857.965
	b. Ritel	584.940	12.029	803.939	342.396	201.960	23.572	153.303	27.240	737.605	343.640
3	Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN KUALITATIF TERKAIT TEKNIK MRK (CRC)

Penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sejak awal pemberian kredit dimana masa berlaku penilaian dan/atau retaksasi agunan adalah 18 (delapan belas) bulan jikan dilakukan oleh penilai publik (KJPP), 12 (dua belas) bulan jika dilakukan oleh penilai internal Bank, dan untuk agunan tertentu dilakukan retaksasi setiap 12 (dua belas) bulan, baik yang dilakukan oleh penilai publik (KJPP) atau penilai internal Bank.

1) Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK - Bank Individual

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023				
		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b = c + d	c	d	e
1	Kredit	41.287.834	2.895.395	398.890	2.496.504	
2	Surat Berharga	17.608.965	-	-	-	
3	Total	58.896.799	2.895.395	398.890	2.496.504	
4	Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo (Kualitas 3, 4, 5)	4.219.899	5.903	5.903	-	

2) Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK - Bank Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023				
		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b = c + d	c	d	e
1	Kredit	47.247.769	3.899.938	1.403.434	2.496.504	
2	Surat Berharga	17.946.800	-	-	-	
3	Total	65.194.569	3.899.938	1.403.434	2.496.504	
4	Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo	4.437.195	144.355	75.129	69.226	

PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN PERINGKAT KREDIT EKSTERNAL (CRD)

Saat ini, Bank belum menggunakan peringkat kredit eksternal.

1) Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK - Bank Individual

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.432.697,43	-	13.860.545,09	-	-	0,0%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.975.329,72	210.751,76	2.975.329,72	21.075,18	1.498.202,45	50,0%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,0%
4	Tagihan kepada Bank	367.341,43	6,00	367.341,43	0,60	136.555,48	37,2%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	1.524.972,26	-	1.524.972,26	-	761.829,71	50,0%
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0,0%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korproasi Umum2)	11.795.670,15	1.692.617,65	11.795.670,15	495.992,90	8.463.306,09	68,9%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain3)						0,0%
	Eksposur Pembiayaan Khusus4)	1.031.805,75	59.838,28	1.031.805,75	-	668.553,94	64,8%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	50.000,00	-	50.000,00	-	75.000,00	150,0%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.993.097,25	2.763.099,07	1.993.097,25	388.865,75	1.591.891,40	66,8%
9	Kredit Beragun Properti	15.355.907,79	750.819,50	15.355.907,79	163.683,54	10.989.599,52	70,8%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1.701.539,71	23.449,63	1.701.539,71	5.411,34	566.084,52	33,2%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	2.711.495,45	13.120,11	2.711.495,45	1.571,80	1.195.103,14	44,0%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	2.345.534,09	310.609,72	2.345.534,09	68.257,59	1.632.372,82	67,6%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	8.597.338,54	403.640,03	8.597.338,54	88.442,81	7.596.039,05	87,5%
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	600,00	-	600,00	-	900,00	150,0%
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.733.020,36	185.106,55	4.733.020,36	24.954,00	6.016.881,07	126,5%
12	Aset Lainnya	7.435.101,24	-	7.435.101,24	-	7.886.837,12	106,1%
	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9.188.420,78	20,66	9.188.420,78	8,26	4.594.214,52	50,0%
Total		**63.695.543,38**	**5.662.238,81**	**61.123.391,04**	**1.094.571,95**	**38.089.556,78**	**61,2%**
Total With Kredit Pegawai atau Pensiunan		**72.883.964,17**	**5.662.259,47**	**70.311.811,82**	**1.094.580,22**	**42.683.771,30**	**59,8%**

2) Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK - Bank Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	17.656.442,07	-	13.860.545,09	-	-	0,0%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.975.546,79	210.751,76	2.975.438,25	21.075,18	1.498.212,87	50,0%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,0%
4	Tagihan kepada Bank	401.475.80	6,00	374.168,30	0,60	143.382.35	38.3%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lain1)	1.524.972,26	-	1.524.972,26	-	761.829,71	50,0%
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0,0%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korproasi Umum2)	15.849.451,14	2.071.408,17	15.849.451,14	571.751,00	12.418.994.01	75.6%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lain3)	-	-	-	-	76,9%	0,0%
	Eksposur Pembiayaan Khusus4)	1.031.805,75	59.838,28	1.031.805,75	-	668.553,94	64,8%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	50.000,00	-	50.000,00	-	75.000,00	150,0%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.586.695.05	2.763.617,91	2.438.295,60	389.254,87	2.030.345.28	71.8%
9	Kredit Beragun Properti	57,4%	750.819,50	15.355.907,79	163.683,54	10.989.599,52	70,8%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1.836.594,71	23.449,63	1.747.304,37	5.411,34	611.830,74	34,9%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	2.711.495,45	13.120,11	2.711.495,45	1.571,80	1.195.103,14	44,0%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	2.896.856,09	310.609,72	2.896.856,05	68.257,59	2.183.694,78	73,6%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	8.597.338,54	403.640,03	8.597.338,54	88.442,81	7.596.039,05	87,5%
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	600,00	-	600,00	-	900,00	150,0%
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.879.649.69	185.106,55	4.879.649,69	24.954,00	6.163.510.40	125.7%
12	Aset Lainnya	128,5%	-	7.435.101,24	-	8.391.024,89	112,9%
	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9.265.809,26	20,66	9.227.115,02	8,26	4.632.896,05	50,2%
Total		**70.970.754**	**6.041.548**	**66.373.022**	**1.170.719**	**43.738.421**	**64.8%**
Total With Kredit Pegawai atau Pensiunan		**80.236.563**	**6.041.569**	**75.600.137**	**1.170.727**	**48.371.317**	**63.0%**

PENGUNGKAPAN KUALITATIF TERKAIT TEKNIK MRK (CRC)

Penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sejak awal pemberian kredit dimana masa berlaku penilaian dan/atau retaksasi agunan adalah 18 (delapan belas) bulan jikan dilakukan oleh penilai publik (KJPP), 12 (dua belas) bulan jika dilakukan oleh penilai internal Bank, dan untuk agunan tertentu dilakukan retaksasi setiap 12 (dua belas) bulan, baik yang dilakukan oleh penilai publik (KJPP) atau penilai internal Bank.

1) Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK - Bank Individual

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023				
		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b = c + d	c	d	e
1	Kredit	41.287.834	2.895.395	398.890	2.496.504	
2	Surat Berharga	17.608.965	-	-	-	
3	Total	58.896.799	2.895.395	398.890	2.496.504	
4	Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo (Kualitas 3, 4, 5)	4.219.899	5.903	5.903	-	

2) Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK - Bank Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023				
		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b = c + d	c	d	e
1	Kredit	47.159.060	3.382.804	696.275	2.686.529	
2	Surat Berharga	17.946.800	-	-	-	
3	Total	65.105.860	3.382.804	696.275	2.686.529	
4	Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo	4.399.372	5.903	5.903	-	

1) Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank Individual

Kategori Portofolio	December 31, 2023															
	Net Receivables After Taking into Account the Impact of Credit Risk Mitigation															
	0%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	37,5%	40%	45%	50%	52,5%	60%	65%	67,5%	
Kategori Portofolio	**0%**			**20%**							**50%**					
1 Tagihan kepada Pemerintah	18.308.819			-												
Kategori Portofolio				**20%**							**50%**					
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik				-							2.996.405					
Kategori Portofolio	**0%**			**20%**		**30%**					**50%**					
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-			-		-					-					
Kategori Portofolio				**20%**		**30%**			**40%**		**50%**					
4 Tagihan kepada Bank				169.530		-			-		197.811					
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lain1)				-		619.779			-		411.996					
Kategori Portofolio		**10%**	**15%**	**20%**	**25%**		**35%**				**50%**					
5 Tagihan berupa Covered Bond		-	-	-	-		-				-					
Kategori Portofolio	**0%**			**20%**		**30%**					**50%**			**65%5)**		
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korproasi Umum2)	33.324			120.093		1.569.045					5.322.917					
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lain3)																

December 31, 2023																
Net Receivables After Taking into Account the Impact of Credit Risk Mitigation																
	70%	75%	80%	85%	90%	100%	105%	110%	112,5%	130%	150%	250%	400%	1250%	Others	
						100%					150%				Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
					-					-				-		18.308.819
						100%					150%				Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
						-										2.996.405
						100%					150%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
																-
		75%				100%					150%				Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		1				-										367.342
		493.197				-										1.524.972
						100%									Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
						-										-
		75%	80%	85%		100%				130%	150%				Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		-		-		483.638										7.529.016
																-

	Eksposur Pembiayaan Khusus4)	159.786					307.681											
	Kategori Portofolio																	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya																	
	Kategori Portofolio	**0%**									**45%**							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	75.716									659.590							
	Kategori Portofolio	**0%**			**20%**	**25%**	**30%**	**35%**		**40%**	**45%**	**50%**		**60%**	**65%5)**			
9	Kredit Beragun Properti																	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	4.764			566.848	231.942	430.678			133.312		126.919						
	tanpa pendekatan pembagian kredit5)																	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)																	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)																	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti						1.601.073	185.893			454.344			82.618				
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	244			-		-			-		-		1.636.144				
	tanpa pendekatan pembagian kredit5)																	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)																	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara																	

							26.964				486.301				61.116		1.041.848

						100%						150%	250%	400%5)		Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
						-											-

		75%		85%		100%										Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		1.045.830		600.827		-											2.381.963

	70%	75%		85%	90%	100%	105%	110%			150%					Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
																	-
	212.488	-		-		-											1.706.951
																	-
																	-
																	-
		43.010					346.129										2.713.067
																	-
		101.069		676.335		-											2.413.792
																	-
																	-
																	-

	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	14.471											-				
	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi																
Kategori Portofolio		**0%**										**50%**					
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	6.242										209.972					
Kategori Portofolio		**0%**			**20%**												
12	Aset Lainnya	254.501															
Kategori Portofolio												**50%**					
	Kredit Pegawai atau Pensiunan											9.188.429					

No	Bobot Risiko	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	22.774.498	38.488	25%	9.809
2	40%-70%	25.099.822	3.347.326	16%	526.817
3	75%	1.657.686	205.515	12%	25.422
4	80%	26.928	184	19%	35
5	85%	1.274.314	25.250	11%	2.848
6	90%-100%	9.770.250	1.753.806	28%	493.926
7	105-130%	3.276.535	207.287	11%	22.589
8	150%	4.140.209	84.398	16%	13.134
9	250%	-	-		-
10	400%	-	-		-
11	1250%				

2) Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank Konsolidasi

Kategori Portofolio		**31 Desember 2023**															
Kategori Portofolio		**0%**			**20%**							**50%**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	18.308.819			-												

2) Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank Konsolidasi

Kategori Portofolio	31 Desember 2023																
Kategori Portofolio				**20%**							**50%**						
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik				196							2.996.426						
Kategori Portofolio	**0%**			**20%**		**30%**					**50%**						
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-			-		-											
Kategori Portofolio				**20%**		**30%**					**50%**						
4 Tagihan kepada Bank				198.824		-					197.811						
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lain1)				-		619.779					411.996						
Kategori Portofolio		**10%**	**15%**	**20%**	**25%**		**35%**				**50%**						
5 Tagihan berupa Covered Bond		-	-	-	-		-										
Kategori Portofolio	**0%**			**20%**							**50%**			**65%5)**			
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korproasi Umum2)	131.417			120.093							5.322.917			-			
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lemabaga Jasa Keuangan Lain3)				-							-			-			
Eksposur Pembiayaan Khusus4)				-							-						
Kategori Portofolio																	
7 Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya																	

	31 Desember 2023															
							100%					150%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
							-					-				-	2.996.622
							100%					150%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
							-					-				-	-
		75%				100%					150%					Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		1				-					-					-	396.636
		493.197				-					-					-	1.524.972
						100%										Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
						-											-
		75%	80%	85%		100%				130%	150%					Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		-	-	-		4.456.185				-	-						10.030.612
		-		-		-					-						-
		-				486.301				61.116	-						547.417
						100%					150%	250%	400%5)			Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
						-					-	-	-				-

2) Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank Konsolidasi

Kategori Portofolio		31 Desember 2023															
Kategori Portofolio		0%									45%						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	84.708															
Kategori Portofolio		0%			20%	25%	30%	35%		40%	45%	50%		60%	65%5)		
9	Kredit Beragun Properti	-			-	-	-							-	-		
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	4.817			579.445	354.347	430.678			133.312		126.919			-		
	tanpa pendekatan pembagian kredit5)	-													-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)																
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)	-													-		
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti						1.601.073	185.893			454.344			82.618			
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	244			-		-			-		-		1.636.144	-		
	tanpa pendekatan pembagian kredit5)	-												-			
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)													-			
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)	-			-		-			-		-			-		
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																
	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi																

	31 Desember 2023															
		75%		85%		100%									Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		1.639.457		600.827		-										2.324.993

	70%	75%			90%	100%	105%	110%			150%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-			-	-	-	-			-					-
	212.488	-		-		-					-					1.842.006
	-	-		-		-					-					-
																-
	-	-		-		-					-					-
	-	43.010					346.129				-					2.713.067
		101.069		676.335		-					-					2.413.792
																-
																-
		-		-		-										-
	3.993.696				1.724.619	551.325		2.952.995			-					9.222.635
											600					600

2) Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank Konsolidasi

Kategori Portofolio		31 Desember 2023															
Kategori Portofolio												50%					
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo											209.972					
Kategori Portofolio		0%			20%												
12	Aset Lainnya	289.165			-												
Kategori Portofolio		0%										50%					
	Kredit Pegawai atau Pensiunan	25										9.266.092					

No	Bobot Risiko	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	24.956.940	38.488	25%	9.809
2	40%-70%	25.177.507	3.347.326	16%	526.817
3	75%	2.251.313	205.515	12%	25.422
4	80-85%	26.928	184	19%	35
5	90%-100%	6.373.856	25.250	11%	2.848
6	105-130%	9.770.250	1.753.806	28%	493.926
7	150%	3.276.535	207.287	11%	22.589
8	250%	4.140.209	84.398	16%	13.134
9	400%	-	-		-
10	1250%	-	-		-

PENGUNGKAPAN KUALITATIF MENGENAI COUNTERPARTY CREDIT RISK

Indonesia

Banks harus menyediakan:

- Tujuan manajemen risiko dan kebijakan terkait risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), termasuk:
- Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi yang didefinisikan pada internal capital untuk *counterparty credit exposures* dan untuk eksposur CCP;
- Kebijakan yang berkaitan dengan garansi dan mitigasi risiko dan penilaian terkait *counterparty risk*, termasuk eksposur *towards* CCP;
- Kebijakan terkait eksposur *wrong-way risk*;
- Dampak pada nilai jaminan yang dibutuhkan untuk menyediakan penurunan peringkat kredit.

Baik Transaksi Repo maupun Reverse Repo, KB Bank mengacu kepada Surat Edaran OJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

	31 Desember 2023															
							100%					150%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
							1.980.964					2.740.270					4.931.205
							100%					150%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
							6.164.324					1.412.473					7.865.963
																Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
																	9.266.118

Analisis Tagihan Bersih Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan pendekatan yang digunakan

		a	b	c	d	e	f
No	Indonesia	Replacement Cost (RC)	Potential Future Exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	3.040	10.329		1,4	18.716	3.743
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
6	Total						3.743

Analisis Kualitatif

Sesuai dengan SEOJK Nomor 48/SEOJK.03/2017, Perhitungan ATMR Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan dengan Metode Pendekatan Standar atas Transaksi Derivatif Bank menggunakan metode analisis perhitungan Replacement Cost transaksi derivatif tanpa margin.

EKSPOSUR CCR BERDASARKAN PORTOFOLIO DAN BOBOT RISIKO BERDASARKAN PENDEKATAN STANDAR

Bobot Risiko	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Kategori Portofolio									-
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	2.572.152								2.572.152
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik									-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									-
Tagihan kepada Bank Lain									-
Tagihan kepada perusahaan sekuritas									-

Bobot Risiko	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Korporasi									-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel									-
Aset lainnya									-
Total	2.572.152	-	-	-	-	-	-	-	2.572.152

Analisis Kualitatif

Eksposur Counterparty Credit Risk pada Desember 2023 berasal dari instrumen repo dan reverse repo, tergolong pada kategori portofolio Tagihan pada Pemerintah dengan bobot risiko 0%

	a	b
	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Indonesia		
Nilai Notional		
Single-name credit default swaps		
Index credit default swaps		
Total return swaps		
Credit options		
Derivatif kredit lainnya		
Total Nilai Notional		
Nilai wajar		
Nilai wajar positif (aset)		
Nilai wajar negatif (kewajiban)		

Analisis Kualitatif

Pada posisi Desember 2023, KB Bank tidak memiliki tagihan bersih derivatif kredit (counterparty credit risk).

PENGUNGKAPAN KUALITATIF MENGENAI EKSPOSUR SEKURITISASI

Pengungkapan Kualitatif

A) Bank harus mendeskripsikan tujuan manajemen risiko dan kebijakan untuk aktivitas sekuritisasi dan fitur utama dari aktivitas ini berdasarkan kerangka di bawah ini. Jika bank mempunyai posisi sekuritisasi pada laporan posisi keuangan dan transaksi rekening administratif, bank harus menjelaskan poin-poin dibawah ini dengan aktivitas berbeda pada setiap regulatory books.	
Tujuan bank terkait sekuritisasi dan aktivitas re-sekuritisasi, termasuk aktivitas pemindahan risiko kredit dari eksposur sekuritisasi yang mendasari dari bank kepada entitas lain, tipe risiko yang diasumsikan dan tipe risiko yang dipertahankan.	Sebagai upaya diversifikasi risiko, Perseroan menempatkan sejumlah portofolio dalam bentuk sekuritisasi atau Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA). Perseroan telah melakukan sekuritisasi pertama atas kumpulan tagihan kredit pensiunan yang selanjutnya dialihkan ke Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Bahana Bukopin – Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan yang Dialihkan (KIK EBA BB). Selanjutnya, KIK-EBA BB menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan.

Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book

		a	b	c	e	f	g	j	k
		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor	
No		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	-	-	-	-	-	-	119.600	-	119.600
2	Kredit perumahan									
3	Kartu kredit									
4	Eksposur ritel lainnya							119.600		119.600
5	Re-sekuritisasi									
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-		-	-
7	Kredit korporasi									
8	Kredit komersil									
9	Sewa dan piutang									
10	Non-retail lainnya									
11	Re-sekuritisasi									

Analisis Kualitatif

Pada Desember 2023, seluruh eksposur sekuritisasi Bank hanya terdapat pada Banking Book dimana Bank sebagai investor

Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book

		a	b	c	e	f	g	i	j	k
		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
No	Indonesia	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-		-	-
2	pinjaman perumahan									
3	kartu kredit									
4	eksposur ritel lainnya									
5	re-sekuritisasi									
6	Non-retail(total) – antara lain	-	-	-	-	-	-		-	-
7	kredit korporasi									
8	kredit komersil									
9	sewa dan piutang									
10	non-retail lainnya									
11	re-sekuritisasi									

Analisis Kualitatif

Pada Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Trading Book

Securitization exposure on the banking book when the bank is the originator or sponsor and its capital requirements

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
No		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	
1	Total eksposur	-	-	-	-	-		-	-	-	
2	Sekuritisasi tradisional										
3	Dimana underlying sekuritisasi										
4	ritel										
5	non-ritel										
6	Dimana re-sekuritisasi										
7	Senior										
8	Non-senior										
9	Sekuritisasi sintetis										
10	Dimana underlying sekuritisasi										
11	ritel										
12	non-ritel										
13	Dimana re-sekuritisasi										
14	Senior										
15	Non-senior										

Analisis Kualitatif

Pada Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau sponsor dan persyaratan permodalannnya

Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya - Bank sebagai investor

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
No		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	
1	Total eksposur			-	-	-					
2	Sekuritisasi tradisional										
3	Dimana underlying sekuritisasi										
4	ritel					119.600				119.600	
5	non-ritel										
6	Dimana re-sekuritisasi										
7	Senior										
8	Non-senior										
9	Sekuritisasi sintetis										

	j	k	l	m	o	p	q
	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
		-		-	-	-	-

	j	k	l	m	o	p	q
	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
							-
				59.800			5.980

Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya - Bank sebagai investor

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
No		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	
10	Dimana underlying sekuritisasi										
11	ritel										
12	non-ritel										
13	Dimana re-sekuritisasi										
14	Senior										
15	Non-senior										

Analisis Kualitatif

Pada Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau sponsor dan persyaratan permodalannnya

Analisis Kualitatif

Pada Desember 2023, seluruh eksposur sekuritisasi Bank memiliki bobot 1250% dengan perhitungan ATMR menggunakan metode standar

PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR MENGGUNAKAN METODE STANDAR

No.	Jenis Risiko	Posisi Desember 2023				Posisi Desember 2022			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik								
	b. Risiko Umum	0	1	0	1	12.192	152.395	12.192	152.395
2	Risiko Nilai Tukar	15.772	197.153	15.772	197.153	13.209	165.119	13.209	165.119
3	Risiko Ekuitas*)								
4	Risiko Komoditas*)								
5	Risiko Option								
	Total ATMR Risiko Pasar	15.772	197.154	15.772	197.154	25.401	317.514	25.401	317.514
	CVA		41		41				
	Total ATMR Risiko Pasar + CVA	15.772	197.195	15.772	197.195	25.401	317.514	25.401	317.514

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

	j	k	l	m	o	p	q
	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB SFA	SA/SSFA	1250%

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Analisis Kualitatif

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB, selain mengacu pada pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank menambahkan aspek pengelolaan risiko untuk IRRBB.

Proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan IRRBB melekat pada produk dan aktivitas Bank. Bank memastikan bahwa proses tersebut telah memiliki prosedur dan pemantauan yang memadai. Proses identifikasi IRRBB mencakup identifikasi terhadap sumber IRRBB seperti gap risk, basis risk dan option risk yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank dan nilai ekonomis (economic value) posisi keuangan Bank, serta modal yang tersedia untuk mengantisipasi dampak IRRBB.

Dalam melakukan pengukuran IRRBB, Bank menggunakan 2 (dua) metode yang saling melengkapi, yaitu EVE dan Net Interest Income (NII) yang mencakup skenario shock suku bunga dan skenario stres dengan rentang yang luas dan tepat. Pengukuran berdasarkan perubahan pada EVE adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank. Pengukuran berdasarkan EVE merupakan pengelolaan Risiko suku bunga dalam jangka panjang berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan pengukuran berdasarkan perubahan pada NII adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (earnings) Bank, perubahan suku bunga tersebut dapat terjadi secara bertahap atau dalam satu waktu dengan nominal shock yang besar. Pengukuran berdasarkan NII merupakan pengelolaan risiko suku bunga dengan periode estimasi jangka pendek hingga jangka menengah dengan asumsi bahwa Bank mampu melanjutkan bisnis operasional (perspektif going concern).

Dalam rangka pengendalian risiko IRRBB, Bank melakukan pemantauan terhadap rasio IRRBB (terutama dalam metode EVE) sesuai dengan ketentuan regulator (Batasan penilaian risiko sebagaimana SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018). Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi pencapaian maksimum limit, dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh regulator.

Bank melakukan simulasi shock dalam perhitungan IRRBB. Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario shock suku bunga sebagai berikut:

1. Shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up);
2. Shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down);
3. Shock suku bunga yang melandai (steepener shock) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (short rates down and long rates up);
4. Shock suku bunga yang mendatar (flattener shock) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun (shorf rates up and long rates down);
5. Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat (shorf rates shock up); dan
6. Shock suku bunga jangka pendek yang menurun (short rates shock down).

Simulasi shock dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE adalah berdasarkan 6 (enam) skenario shock tersebut.

Sedangkan untuk simulasi shock dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode NII adalah berdasarkan 2 (dua) skenario shock, yaitu shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) dan shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down).

Bank menggunakan metode internal untuk menghitung rata-rata jatuh tempo NMD dengan mempertimbangkan behaviour dari Non-Maturity Deposits (NMD). Bank menggunakan pendekatan statistik sederhana untuk mengetahui besarnya run of rate, volatility dan sensitivity NMD terhadap perubahan suku bunga.

Analisis Kuantitatif

Bank menggunakan metode internal untuk menghitung rata-rata jatuh tempo NMD dengan mempertimbangkan behaviour dari NMD. Berdasarkan analisis behavioural untuk NMD menggunakan model internal bank, rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) dari NMD adalah maksimum 3 (tiga) tahun, sementara untuk jangka waktu penyesuaian terlama yang diterapkan untuk NMD adalah maksimum 4 (empat) tahun.

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank	: PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)
Posisi Laporan	: Desember 2023
Mata Uang	: Rupiah

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	**Dec-23**	**Jun-23**	**Dec-23**	**Jun-23**
Parallel up	-74.702	-68.054	-250.026	-202.156
Parallel down	-228.660	-255.337	250.026	202.156
Steepener	630.564	669.656		
Flattener	-454.999	-482.180		
Short rate up	-418.214	-435.318		
Short rate down	399.132	421.362		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	454.999	482.180	250.026	202.156
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	7.954.561	12.050.227	3.884.648	4.281.457
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	5,72%	4,00%	6,44%	4,72%

Nama Bank	: PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)
Posisi Laporan	: Desember 2023
Mata Uang	: US Dollar

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	**Dec-23**	**Jun-23**	**Dec-23**	**Jun-23**
Parallel up	27.937	36.441	-146.997	-108.742
Parallel down	-38.370	-47.578	146.997	108.742
Steepener	31.421	16.407		
Flattener	-22.353	-7.616		
Short rate up	-10.615	7.202		
Short rate down	3.086	-14.664		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	38.370	47.578	146.997	108.742
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	7.954.561	12.050.227	205.282	398.668
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	0,48%	0,39%	71.61%	27,28%

Nama Bank	: PT Bank KB Bukopin Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan	: Desember 2023
Mata Uang	: Rupiah

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	**Dec-23**	**Jun-23**	**Dec-23**	**Jun-23**
Parallel up	-71.548	-54.553	-340.212	-302.675
Parallel down	-274.729	-320.248	340.212	302.675
Steepener	729.979	775.160		
Flattener	-524.622	-553.772		
Short rate up	-477.730	-491.496		
Short rate down	450.685	468.029		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	524.622	553.772	340.212	302.675
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	10.035.311	13.347.080	4.473.695	4.911.227
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	5,23%	4,15%	7,60%	6,16%

Nama Bank	: PT Bank KB Bukopin Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan	: Desember 2023
Mata Uang	: US Dollar

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	**Dec-23**	**Jun-23**	**Dec-23**	**Jun-23**
Parallel up	27.937	36.441	-146.997	-108.742
Parallel down	-38.370	-47.578	146.997	108.742
Steepener	31.421	16.407		
Flattener	-22.353	-7.616		
Short rate up	-10.615	7.202		
Short rate down	3.086	-14.664		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	38.370	47.578	146.997	108.742
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	10.035.311	13.347.080	205.282	398.668
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	0,38%	0,36%	71.61%	27,28%

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan IV - 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Triwulan IV - 2023		Posisi Triwulan III - 2023		Posisi Triwulan IV - 2023		Posisi Triwulan III - 2023	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1.	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		63 hari	0	62 hari		63 hari	0	62 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2.	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		13.792.918	0	14.636.862		15.670.386	0	16.692.850
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)									
3.	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	11.369.453	913.730	11.265.299	890.802	13.724.099	1.089.506	13.741.622	1.074.451
	a. Simpanan/ Pendanaan Stabil	4.464.300	223.215	4.714.560	235.728	5.658.073	282.904	5.994.225	299.711
	b. Simpanan/ Pendanaan Kurang Stabil	6.905.153	690.515	6.550.739	655.074	8.066.027	806.603	7.747.398	774.740
4.	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	8.673.055	3.737.795	7.564.630	3.073.084	11.317.050	5.630.440	10.151.006	4.849.435
	a. Simpanan Operasional	5.071.989	1.128.580	4.684.529	938.204	5.611.743	1.208.839	5.283.437	1.045.672
	b. Simpanan non-Operasional dan/ atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	3.601.066	2.609.215	2.880.102	2.134.880	5.705.306	4.421.601	4.867.569	3.803.763
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-	0	-		-	0	-
6.	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	17.136.557	11.146.922	16.794.484	10.999.313	17.163.522	11.173.888	16.867.234	11.072.063
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	2.219.012	2.219.012	2.142.404	2.142.404	2.219.012	2.219.012	2.142.404	2.142.404
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Triwulan IV - 2023		Posisi Triwulan III - 2023		Posisi Triwulan IV - 2023		Posisi Triwulan III - 2023	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	689.278	68.928	790.171	79.017	689.278	68.928	790.171	79.017
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	5.418.333	49.049	5.139.254	55.238	5.418.333	49.049	5.139.254	55.238
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	8.809.933	8.809.933	8.722.654	8.722.654	8.836.899	8.836.899	8.795.404	8.795.404
7.	**TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)**		**15.798.447**		**14.963.200**		**17.893.834**		**16.995.949**
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)									
8.	Pinjaman dengan agunan secured lending	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	4.832.733	3.978.013	5.170.416	4.203.199	4.901.892	4.012.592	5.239.878	4.237.930
10.	Arus kas masuk Lainnya	778.885	778.885	867.361	867.361	778.885	778.885	867.361	867.361
11.	**TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)**	**5.611.618**	**4.756.898**	**6.037.777**	**5.070.560**	**5.681.879**	**4.792.029**	**6.107.239**	**5.105.291**
			TOTAL ADJUSTED VALUE[1]		**TOTAL ADJUSTED VALUE[1]**		**TOTAL ADJUSTED VALUE[1]**		**TOTAL ADJUSTED VALUE[1]**
12.	**TOTAL HQLA**		**13.792.918**		**14.636.862**		**15.670.386**		**16.692.850**
13.	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)**		**11.041.549**		**9.892.640**		**13.101.806**		**11.890.659**
14.	LCR (%)		124,92%		147,96%		119.60%		140,39%

Keterangan: [1] Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Nilai outstanding Posisi Triwulan IV 2023 merupakan rata-rata LCR selama hari kerja bulan Oktober s.d Desember 2023 (63 titik data).

Nilai outstanding Posisi Triwulan III 2023 merupakan rata-rata LCR selama hari kerja bulan Juli s.d September 2023 (62 titik data).

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank: PT Bank KB Bukopin Tbk.

Posisi Laporan: Triwulan IV - 2023

Analisis secara Individu

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank KB Bukopin (Individu) periode Triwulan IV - 2023 menggunakan data rata-rata posisi harian selama bulan Oktober s.d Desember 2023. LCR Bank KB Bukopin secara individu untuk Triwulan IV - 2023 adalah sebesar 124,92%, menurun -23,04% apabila dibandingkan dengan LCR pada Triwulan III - 2023 yang sebesar 147,96%. Rasio tersebut berada diatas ketentuan yang telah di tetapkan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.42/ POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum yaitu sebesar 100%

Komposisi High Quality Liquid Assets (HQLA) yang dimiliki Bank secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2023 didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia (BI) sebesar 23,82% dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia sebesar 74,36%. Dibandingkan dengan Triwulan III - 2023, total HQLA mengalami penurunan sebesar Rp. 843,94 miliar (-5,77%) dari Rp. 14,63 triliun pada Triwulan III - 2023 menjadi Rp. 13,79 triliun pada Triwulan IV - 2023, terutama disebabkan oleh penurunan Penempatan pada Bank Indonesia menurun sebesar Rp. 551,12 miliar (-36,71%) dan penurunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menurun sebesar Rp. 217,46 miliar (-2,08%).

Net Cash Outflow secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2023 sebesar Rp. 11,04 triliun, meningkat sebesar Rp. 1,14 triliun (11,61%) dibandingkan dengan Triwulan III - 2023. Peningkatan Net Cash Outflow terutama disebabkan oleh peningkatan pada Cash Outflow dan penurunan pada Cash Inflow. Cash Outflow meningkat sebesar Rp. 835,25 miliar (5,58%), yang disebabkan oleh peningkatan pada Simpanan Korporasi sebesar Rp. 664,71 miliar (21,63%) (nilai setelah run-off rate), peningkatan pada Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya sebesar Rp. 87,28 miliar (nilai setelah run-off rate) dan peningkatan Arus Kas Keluar lainnya terkait Transaksi Derivatif sebesar Rp. 76,60 miliar (3,58%). Sementara itu Cash Inflow mengalami penurunan sebesar Rp. 313,66 miliar (-6,19%), yang disebabkan oleh menurunnya Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty) dalam bentuk penempatan pada bank lain sebesar Rp. 112,68 miliar (-3,48%) (nilai setelah run-off rate).

Bank secara internal melakukan pemantauan atas rasio konsentrasi pendanaan dan terus melakukan upaya diversifikasi pendanaan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas DPK, terutama untuk meningkatkan pendanaan jangka menengah ke jangka panjang serta dengan mengurangi jenis DPK yang memiliki suku bunga tinggi (seperti misalnya Deposito berjangka dan Tabungan / Giro bersuku bunga premium). Program diversifikasi ini telah dilakukan oleh Bank KB Bukopin sejak tahun lalu serta berkelanjutan di tahun 2023 sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

Dalam mengelola likuiditas, Bank telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas secara berkala, dengan melibatkan unit-unit kerja terkait lainnya, seperti Treasury, Bisnis Korporasi dan Retail-SME. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko likuiditas dalam berbagai kondisi, Bank KB Bukopin juga telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) yang berisi langkah yang harus dilakukan oleh Bank Bukopin dalam mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas serta pemantauan yang dilakukan secara harian.

Secara umum, berdasarkan perhitungan dan komparasi tersebut di atas, risiko likuiditas jangka pendek relatif kecil (rasio LCR cukup jauh berada di atas 100% sesuai ketentuan regulator). Namun demikian kami melihat potensi risiko tetap ada dimana tren pergerakan DPK Bank menjadi komponen penting dalam LCR.

Oleh karena itu, Bank perlu tetap menjaga keseimbangan struktur neraca terutama pada komposisi tenor jangka pendek serta melakukan diversifikasi Dana Pihak Ketiga pada segmentasi bisnis yang memiliki run-off rate yang lebih kecil (untuk meningkatkan LCR melalui penurunan Cash Outflow).

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan IV - 2023

Analisis secara Konsolidasi

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank KB Bukopin (Konsolidasi) periode Triwulan IV - 2023 menggunakan data rata-rata posisi harian selama bulan Oktober s.d Desember 2023. LCR Bank KB Bukopin secara konsolidasi untuk Triwulan IV - 2023 adalah sebesar 119,62%, menurun -20,77% apabila dibandingkan dengan LCR pada Triwulan III - 2023 yang sebesar 140,39%. Rasio tersebut berada diatas ketentuan yang telah di tetapkan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.42/P OJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum yaitu sebesar 100%.

Komposisi High Quality Liquid Assets (HQLA) yang dimiliki Bank secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2023 didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia (BI) sebesar 27,11% dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia sebesar 68,66%. Dibandingkan dengan Triwulan III - 2023, total HQLA mengalami penurunan sebesar Rp. 1,02 triliun (-6,13%) dari Rp. 16,69 triliun pada Triwulan III - 2023 menjadi Rp. 15,67 triliun pada Triwulan IV - 2023, terutama disebabkan oleh penurunan Penempatan Pada Bank Indonesia menurun sebesar Rp. 250,93 miliar (-5,58%) dan penurunan kepemilikan Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menurun sebesar Rp. 469,38 miliar (-4,18%).

Net Cash Outflow secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2023 sebesar Rp. 13,10 triliun, meningkat sebesar Rp. 1,21 triliun (+10,17%) dibandingkan dengan Triwulan III - 2023. Peningkatan Net Cash Outflow terutama disebabkan oleh peningkatan pada Cash Outflow dan penurunan pada Cash Inflow. Cash Outflow meningkat sebesar Rp. 895,55 miliar (5,27%), yang disebabkan oleh peningkatan pada Simpanan Korporasi sebesar Rp. 781,00 miliar (16,11%) (nilai setelah run-off rate), peningkatan pada Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya sebesar Rp. 39,15 miliar (nilai setelah run-off rate) dan Arus Kas Keluar lainnya terkait Transaksi Derivatif sebesar Rp. 76,61 miliar (3,58%). Sementara itu Cash Inflow mengalami penurunan sebesar Rp. 313,81 triliun (-6,15%), yang disebabkan oleh menurunnya Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty) dalam bentuk penempatan pada bank lain sebesar Rp. 112,68 miliar (-3,48%) (nilai setelah run-off rate).

LCR Konsolidasi di dominasi oleh HQLA dan Net Cash Outflow PT Bank KB Bukopin sebagai pemegang saham pengendali. Rata-rata HQLA dan Net cash Outflow Bank KB Bukopin berada pada rentang 80% sampai dengan 90%. Oleh karena itu pergerakan pada komponen LCR Bank KB Bukopin adalah penentu utama dalam kenaikan / penurunan LCR Konsolidasi. Dengan demikian, ke depan sebagaimana yang telah disampaikan dalam analisa LCR Individu, diversifikasi DPK Bank KB Bukopin tetap merupakan rencana tindak yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan LCR ke depan.

- Secara umum, analisa per anak perusahaan, secara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
  Bank KB Bukopin Syariah dari sisi HQLA didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia (Sukuk), sementara itu dari sisi Net Cash Outflow ditentukan lebih banyak oleh Cash Outflow pada komponen Simpanan nasabah UKM dan Korporasi.
- KB Bukopin Finance dari sisi HQLA didominasi oleh Kas dan Setara Kas, sementara itu dari sisi Net Cash Outflow ditentukan lebih banyak oleh Cash Outflow pada komponen Arus kas keluar kontraktual lainnya.

Dalam mengelola likuiditas, Bank telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas secara berkala, dengan melibatkan unit-unit kerja terkait lainnya serta melalui kordinasi dengan anak perusahaan (KB Bukopin Syariah dan KB Bukopin Finance).

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko likuiditas dalam berbagai kondisi, Bank KB Bukopin juga telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) yang berisi langkah yang harus dilakukan oleh Bank Bukopin dalam mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas.

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)

Posisi Laporan : Desember 2023

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Total Nilai Tertimbang				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)									
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	28.783.133	1.404.180	-	3.106.991	31.890.124	28.792.829	1.404.667	-	2.935.982	31.728.811
2	Modal sesuai POJK KPMM	28.783.133	1.404.180	-	3.106.991	31.890.124	28.792.829	1.404.667	-	2.912.892	31.705.721
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	6.249.909	12.185.652	935.261	310.193	18.017.217	7.340.222	12.914.304	1.432.203	300.525	20.073.082
5	Simpanan dan pendanaan stabil	3.115.363	2.258.840	91.465	60.173	5.252.556	3.002.561	1.906.695	180.794	53.122	4.888.669
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	3.134.547	9.926.813	843.797	250.020	12.764.661	4.337.660	11.007.609	1.251.409	247.403	15.184.413
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	2.330.733	14.831.188	203.107	157.131	6.240.387	1.788.962	14.261.581	937.449	61.390	6.499.343
8	Simpanan operasional	1.071.250	382.949	27.227	10.000	750.713	616.378	329.052	75.451	10.000	520.441
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	1.259.483	14.448.239	175.880	147.131	5.489.674	1.172.584	13.932.529	861.998	51.390	5.978.902

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Total Nilai Tertimbang				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)									
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :										
12	NSFR liabilitas derivatif	-									
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	4.431.624	8.787.135	5.647.928	10.041.495	-	3.517.775	9.937.965	6.188.646	11.157.628
14	Total ASF					66.189.223					69.435.775

LAPORAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Nama Bank: PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)

Posisi Laporan: Desember 2023

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					517.979					513.980
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	106.500	-	-	-	53.250	126.926	-	-	-	63.463
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)	249.101	5.052.106	3.873.216	36.469.152	36.230.918	240.415	4.813.324	6.031.570	35.293.279	35.874.282
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	8.499	8.168	9.422	14.356	-	33.517	-	34.114	37.466
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	249.101	348.317	153.490	1.196.305	1.362.663	240.415	358.064	456.762	908.604	1.226.757

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	3.870.120	3.478.733	25.152.365	25.053.936	-	3.071.240	4.326.875	23.366.531	23.551.277
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	528.751	1.033.021	409.864	1.047.298
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	394.010	115.307	2.017.518	1.969.549	-	71.464	51.129	1.225.409	1.102.895
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	118.307	117.518	1.439.362	1.053.497	-	327.909	159.074	2.467.178	1.847.158
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	312.853	-	6.654.181	6.776.917	-	422.379	4.710	6.881.578	7.061.433
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	-	25.565.116	81.015	1.760.106	27.406.237	-	27.799.753	36.236	1.787.500	29.623.489
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)					-					
29	NSFR aset derivatif					-					

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin					-					
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	25.565.116	81.015	1.760.106	27.406.237	-	27.702.886	36.236	1.787.500	29.623.489
32	Rekening Administratif				6.298.556	68.717			5.662.259		60.731
33	**Total RSF**					**64.277.102**					**66.135.945**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%)**					**102,97%**					**104,99%**

Analisis Secara Individu

Net Stable Funding Ratio (NSFR) PT Bank KB Bukopin, Tbk secara Individu per Desember 2023 sebesar 104,99%, meningkat sebesar 2,01% dibandingkan dengan posisi akhir September 2023 dengan nilai NSFR sebesar 102,97%. Pada posisi Desember 2023 NSFR Individu Bank KB Bukopin berada diatas ketentuan regulator (100%) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum.

Total Available Stable Funding (ASF) pada akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 69,43 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 20,07 triliun (28,91%) (nilai tertimbang) serta Modal sebesar Rp. 31,70 triliun (45,66%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir bulan September 2023, total ASF mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,25 triliun (4,90%) yang terutama disebabkan oleh:
- Peningkatan pada Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 2,05 triliun (nilai tertimbang).
- Peningkatan pada Simpanan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp. 258,95 miliar (nilai tertimbang) dan
- Peningkatan pada Ekuitas dan liabilitas lainnya sebesar Rp. 1,12 triliun (nilai tertimbang)

Total Required Stable Funding (RSF) pada akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 66,13 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar Rp. 35,87 triliun (54,24%) (nilai tertimbang) serta Aset lainnya sebesar Rp. 29,62 triliun (44,79%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir bulan September 2023, total RSF mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,83 triliun yang terutama disebabkan oleh:
- Peningkatan pada komponen Aset lainnya sebesar Rp. 2,22 triliun (nilai tertimbang).
- Peningkatan pada komponen Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar Rp. 356,64 miliar (nilai tertimbang).

Pada periode ini Bank tidak memiliki komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependent) dan keterkaitan antar transaksi.

Bank tetap perlu menjaga keseimbangan struktur neraca terutama pada komposisi sumber pendanaan tenor jangka menengah-panjang, serta melakukan diversifikasi Dana Pihak Ketiga pada segmentasi bisnis yang memiliki bobot Faktor ASF lebih besar (untuk meningkatkan NSFR). Sementara itu, dari sisi RSF, pengelolaan kualitas kredit juga diharapkan dapat meningkatkan rasio NSFR melalui peningkatan Kredit Kualitas Lancar.

LAPORAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Konsolidasi)

Posisi Laporan : Desember 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	30.235.928	1.404.180	-	3.201.424	33.437.352	30.309.048	1.404.667	-	3.002.910	33.311.958
2	Modal sesuai POJK KPMM	30.235.928	1.404.180	-	3.201.424	33.437.352	30.309.048	1.404.667	-	3.002.910	33.311.958
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	6.815.756	14.099.753	1.035.726	310.193	20.404.909	7.938.184	14.638.082	1.693.939	300.525	22.473.739
5	Simpanan dan pendanaan stabil	3.433.970	3.159.717	178.401	60.173	6.493.657	3.353.570	2.860.598	386.421	53.122	6.323.681
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	3.381.786	10.940.035	857.325	250.020	13.911.252	4.584.615	11.777.485	1.307.517	247.403	16.150.058
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	2.825.093	18.177.217	389.160	181.273	7.160.429	2.177.046	16.526.446	1.756.629	61.390	7.357.937
8	Simpanan operasional	1.491.438	534.137	205.280	34.142	1.149.570	895.265	473.052	85.451	10.000	736.884
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	1.333.655	17.643.080	183.880	147.131	6.010.859	1.281.781	16.053.394	1.671.178	51.390	6.621.053
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	-	4.732.508	8.816.979	5.697.708	10106197,42	-	4.561.117	9.970.769	6.238.426	11.223.810
12	NSFR liabilitas derivatif				-					-	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	4.732.508	8.816.979	5.697.708	10.106.197	-	4.561.117	9.970.769	6.238.426	11.223.810
14	Total ASF					71.108.888					74.367.444

LAPORAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)

Nama Bank: PT Bank Bukopin Tbk (Konsolidasi)

Posisi Laporan: Desember 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					603.235					530.872
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	138.671	-	-	-	69.335	156.271	-	-	-	78.136
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing)	249.101	5.604.404	4.187.325	41.229.955	40.692.229	240.415	5.155.159	6.542.740	40.000.411	40.287.762
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	8.499	8.168	9.422	14.356	-	33.517	-	51.682	55.034
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	249.101	348.317	153.490	1.196.305	1.362.663	240.415	359.805	457.093	1.019.634	1.338.214

(dalam Jutaan Rupiah)

	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Triwulan III - 2023)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	4.422.034	3.791.421	29.820.293	29.453.977	-	3.312.206	4.779.918	27.781.241	27.650.786
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	627.050	1.086.168	444.818	1.145.741
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	394.010	115.307	2.017.518	1.969.549	-	71.464	51.129	1.225.409	1.102.895
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	118.691	118.939	1.532.236	1.114.768	-	328.738	163.721	2.596.048	1.933.661
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	312.853	-	6.654.181	6.776.917	-	422.379	4.710	6.881.578	7.061.433
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	-	26.140.277	86.782	2.060.872	28.287.931	-	28.369.440	38.397	1.967.832	30.375.669
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)				-	-				-	-
29	NSFR aset derivatif				-	-				-	-
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin				-	-				-	-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	26.140.277	86.782	2.060.872	28.287.931	-	28.369.440	38.397	1.967.832	30.375.669
32	Rekening Administratif				7.727.427	140.161				7.523.720	153.804
33	**Total RSF**					**69.792.892**					**71.426.243**
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					101,89%					104,12%

Analisis Secara Konsolidasi

Net Stable Funding Ratio (NSFR) PT Bank KB Bukopin, Tbk secara Konsolidasi per akhir Desember 2023 sebesar 103,74%, meningkat sebesar 1,86% dibandingkan dengan posisi akhir September 2023 dengan nilai NSFR Konsolidasi sebesar 101,89%. Pada posisi Desember 2023 NSFR Bank secara konsolidasi berada diatas ketentuan regulator (100%) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum.

Total Available Stable Funding (ASF) pada akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 74,50 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Modal sebesar Rp.33,41 triliun (44,85%) (nilai tertimbang) dan Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 22,47 triliun (30,16%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir bulan September 2023, total ASF mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,39 triliun terutama disebabkan oleh :
• Peningkatan pada komponen Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 2,06 triliun (nilai tertimbang);
• Peningkatan pada komponen Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp. 233,88 miliar (nilai tertimbang) dan
• Peningkatan pada komponen Pendanaan yang berasal dari ekuitas dan liabilitas lainnya sebesar Rp. 1,11 triliun (nilai tertimbang).

Total Required Stable Funding (RSF) pada akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 71,81 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar Rp. 40,77 triliun (56,77%) (nilai tertimbang) dan Aset lainnya sebesar Rp. 30,28 triliun (42,17%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir September 2023, total RSF mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,02 triliun terutama disebabkan oleh :
• Peningkatan pada komponen Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar Rp. 78,30 miliar (nilai tertimbang).
• Peningkatan pada komponen Aset lainnya sebesar Rp. 1,99 triliun (nilai tertimbang).

Pada periode ini Bank tidak memiliki komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependent) dan keterkaitan antar transaksi.

Secara konsolidasi, NSFR di dominasi oleh ASF dan RSF PT. Bank KB Bukopin sebagai pemegang saham pengendali. Komposisi rata-rata ASF dan RSF Bank KB Bukopin terhadap figure konsolidasi sebesar lebih dari 80%. Oleh karena itu pergerakan pada komponen NSFR Bank KB Bukopin adalah penentu utama dalam kenaikan / penurunan NSFR Konsolidasi. Dengan demikian, ke depan sebagaimana yang telah disampaikan dalam analisa NSFR Individu, diversifikasi DPK Bank KB Bukopin secara tenor jangka menengah dan secara segmentasi tertentu, merupakan rencana tindak yang direkomendasikan dalam rangka mempertahankan NSFR ke depan. Meskipun demikian, Bank KB Bukopin Syariah sebagai anak perusahaan yang memiliki potensi Dana Pihak Ketiga yang cukup baik, diharapkan dapat mendukung peningkatan NSFR Konsolidasi melalui peningkatan sumber pendanaan stabil yang berbasis Syariah.

ASET TERIKAT (ENCUMBRANCE) KONSOLIDASI

dalam jutaan rupiah

	a	b	c	d
	Aset Terikat (Encumbered)	**aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas**	**Aset tidak terikat (unencumbered)**	**Total**
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan	-	16.415.904	2.012.802	18.428.706

Analisis Kualitatif

Aset terikat (encumbered assets) adalah aset bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres. Encumbered Asset tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Bank tidak memiliki aset terikat pada posisi Triwulan IV - 2023.

Mengacu pada penjelasan atas POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, pasal 9 ayat (3) huruf a, contoh aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah giro wajib minimum sekunder (sekarang Penyangga Likuiditas Makroprudensial). Pada posisi Desember 2023 Bank (Konsolidasi) memiliki Giro Wajib Minimum Primer sebesar Rp 3,20 triliun dan Giro Wajib Sekunder atau Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar Rp 13,21 triliun yang merupakan seluruh surat berharga pemerintah yang dimiliki Bank.

Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi kualifikasi sebagai HQLA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio). Saat ini Bank (konsolidasi) memiliki aset tidak terikat berupa Kas, Penempatan pada Bank Indonesia selain GWM dan Surat Berharga sebesar Rp. 2,01 triliun.

LIQA - Manajemen Risiko Likuiditas

Pengungkapan kualitatif

1 Tata kelola pengelolaan risiko likuiditas, termasuk: toleransi risiko; struktur dan tanggung jawab pengelolaan risiko likuiditas; pelaporan likuiditas internal; dan komunikasi strategi, kebijakan dan praktik risiko likuiditas di seluruh lini bisnis dan dengan dewan direksi.

a. Toleransi Risiko

Perumusan Risk Tolerance dan Risk Apetite Risiko Likuiditas Bank KB Bukopin disesuaikan dengan sasaran strategis dan komplektisitas kegiatan usaha Bank. Penetapan limit Risk Appetite dan Risk Tolerance dilakukan agar Bank dapat mengelola likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Penetapan besaran limit risk appetite dan risk tolerance diajukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko (KMR). Selanjutnya apabila terjadi pelampauan limit, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) akan berkoordinasi dengan Unit Bisnis terkait untuk menyusun action plan.

LIQA - Manajemen Risiko Likuiditas

Pengungkapan kualitatif

b. Struktur dan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko Likuiditas

Bank menetapkan struktur organisasi, kecukupan perangkat dan kelengkapan fungsi/unit terkait dengan penerapan manajemen risiko likuiditas sesuai dengan karakteriktas dan komplektisitas kegiatan usaha Bank. Perangkat atau unit yang terlibat atas manajemen risiko likuiditas baik bisnis dan supporting tergambar dalam struktur organisasi dan kewenangan masing-masing fungsi tersebut telah tercantum dalam job description atas setiap fungsi.
Penanggung jawab dari pengelolaan Risiko Likuiditas adalah Unit Bisnis yang memiliki aktivitas terekspos langsung oleh Risiko Likuiditas. Selanjutnya Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan Risiko Likuiditas secara independen. Dewan Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen Risiko Likuiditas telah sesuai dengan sasaran strategis, karakteristik dan komplektisitas bisnis, serta profil Risiko Likuiditas.

c. Pelaporan Likuiditas Internal dan Komunikasi Strategi

Secara umum, Bank telah menyampaikan dan melaporkan informasi terkait manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas yang terdiri dari: rasio-rasio likuiditas, arus kas dan profil maturitas, stress testing Likuiditas, Profil Risiko Likuiditas, serta informasi lainnya yang terkait dengan posisi Likuiditas Bank dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur Risiko Likuiditas. Seluruh informasi disampaikan ke Unit Bisnis terkait serta Dewan Direksi dan Komisaris melalui kanal sistem informasi internal Bank dan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) secara bulanan. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) selanjutnya akan berkoordinasi secara periodik dengan Unit Bisnis terkait yang mengelola Risiko Likuiditas jika terjadi pelampauan terhadap kebijakan maupun limit untuk Risiko Likuiditas dan menyusun rencana aksi (action plan).

d. Kebijakan dan Praktik Risiko Likuiditas di Seluruh Lini Bisnis dan dengan Dewan Direksi

Kebijakan strategi manajemen risiko likuiditas telah terdapat dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Bank, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar Bank, serta Kebijakan/Pedoman terkait pengelolaan risiko likuiditas pada tingkat risk taking unit. Unit Bisnis yang terekspos oleh Risiko Likuiditas akan menyampaikan informasi mengenai kondisi indikator makroekonomi dan proyeksi bisnis melalui rapat Asset and Liability Committee (ALCO), selanjutnya strategi risiko likuiditas akan ditetapkan melalui mekanisme rapat ALCO dan Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas berupa Keputusan ALCO akan disampaikan kepada Departemen terkait dan Cabang.
Dewan Direksi melakukan pengawasan aktif secara harian dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas telah berjalan sesuai dengan tujuan dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian maupun secara bulanan atas kondisi likuiditas meliputi pemantauan rasio-rasio yang terkait risiko likuiditas melalui laporan yang disampaikan oleh Divisi-divisi terkait, serta mengevaluasi kecukupan informasi yang disajikan untuk penilaian kondisi likuiditas.

2 Strategi pendanaan, termasuk kebijakan sumber diversifikasi dan tenor pendanaan, dan apakah strategi pendanaannya terpusat atau terdesentralisasi.

Secara umum, akses pada sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh Bank antara lain pinjaman antar Bank, Repo surat berharga, FX SWAP, penjualan surat berharga, penjualan Banker's Acceptance dan pinjaman dari pihak lain. Sejak pertengahan Desember 2013 Bank Bukopin menjadi salah satu Bank yang turut serta menandatangani Mini Master Repo Agreement (MRA) akan semakin memperluas alternatif akses pada sumber-sumber pendanaan non DPK untuk memperkuat pengelolaan likuiditas. Selain itu, dengan adanya penandatanganan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia dengan beberapa Bank juga akan semakin memperluas alternatif akses pada sumber-sumber pendanaan non DPK.

3 Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas

Bank melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara memantau limit-limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan dalam kebijakan secara periodik. Apabila limit tersebut mengalami pelampauan, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko berkordinasi akan dengan Unit Bisnis terkait action plan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut sehingga kembali sesuai dengan ketentuan limit. Selain itu Bank melakukan review atau pembaharuan terhadap limit, kebijakan dan prosedur menyesuaikan dengan pembaharuan peraturan regulator atau strategi dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

4 Penjelasan Tentang Bagaimana Stress-test Digunakan

Stress Testing Likuiditas digunakan untuk mengukur ketahanan dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress test secara spesifik (Bank specific scenario) maupun stress pada pasar (general market stress scenario). Telah terdapat Pedoman Pelaksanaan Stress Test Risiko Likuiditas serta arahan dari Direksi atas pelaksanaan Stress Test Likuiditas yang diwujudkan dalam pemberian persetujuan dan tanggapan terhadap Laporan Stress Test Likuiditas.

5 Garis Besar Rencana Pendanaan Mendesak Bank

Dalam rangka pengendalian likuiditas dalam kondisi krisis, Bank memantau secara continue mengenai kondisi likuiditas Bank yang dilakukan oleh Departemen yang membawahi fungsi market & liquidity risk management. Apabila kondisi likuiditas Bank berada dalam kondisi krisis, maka Bank akan mengaktifkan Rencana Pendanaan Darurat. Rencana Pendanaan Darurat berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka mengantisipasi dan menghadapai perubahan kondisi likuiditas sehingga Bank dapat tetap memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waku dan menjaga kelangsungan proses bisnis Bank.

PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Indikator Bisnis (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	1.398.876,13	167.865,14	2.098.314,20	1.358.605,65	203.790,85	2.547.385,60
	Total	**1.398.876,13**	**167.865,14**	**2.098.314,20**	**1.358.605,65**	**203.790,85**	**2.547.385,60**

PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Indikator Bisnis (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	1.562.930,07	187.551,61	2.344.395,10	1.636.291,89	245.443,78	3.068.047,29
	Total	**1.562.930,07**	**187.551,61**	**2.344.395,10**	**1.636.291,89**	**245.443,78**	**3.068.047,29**

RISIKO OPERASIONAL – PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank memiliki organisasi manajemen risiko operasional terdiri dari fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Quality Assurance dan Satuan Kerja Audit Internal yang independen terhadap unit bisnis maupun unit operasional.

Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko yang secara inheren ada pada suatu suatu produk dan/atau layanan serta proses yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi. Bank menggunakan beberapa tools atau perangkat dalam menerapkan manajemen risiko operasional, yaitu:
   a. Risk and Control Self Assessment (RCSA),
      Risk issues and controls yang akan dipergunakan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan pengendalian sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat meminimalisir dampak dari risiko yang melekat pada aktivitas bank. Identifikasi dilakukan dengan cara penilaian mandiri (self-assessment) yang dilakukan oleh risk taking unit (RTU) pada periode yang telah ditetapkan.
   b. Loss Event Database (LED),
      Database insiden risiko operasional yang dicatat secara web based dengan tujuan untuk menginventaris data kerugian / potensi kerugian risiko operasional, kepatuhan, hukum dan lainnya yang dialami Bank. Hasil inputan tersebut akan dijadikan sebagai langkah mitigasi atas pengelolaan risiko dan dilakukan reporting berdasarkan inputan insiden risiko setiap bulannya.
2. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan data hasil identifikasi risiko, antara lain:
   a. Menjalankan implementasi pengelolaan risiko operasional ke seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Cabang termasuk Implementasi Operational Risk Management (ORM) Tools yang meliputi aplikasi Loss Event Database (LED) dan Aplikasi Risk Control Self-Assessment (RCSA).
   b. Penilaian risiko atas rencana produk dan/atau layanan baru dan/atau pengembangan ataupun evaluasi atas produk dan/atau layanan baru yang telah diluncurkan.
   c. Self-Assessment terhadap tingkat kesehatan Bank dengan membuat laporan Profil Risiko Bank.
   d. Melakukan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional.
3. Pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi dan diukur terhadap potensi terjadinya dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau early warning system atau perangkat/pelaporan yang ada. Pemantauan risiko operasional antara lain sebagai berikut:
   a. Fungsi pemantauan beberapa Indicators untuk memastikan kesesuaian dengan Risk Appetite.
   b. Melakukan analisis risiko operasional mengenai: Human Capital, IT Sistem error, Kasus Fraud, Akun Dorman, Operational Loss Data, Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk Bank, Corporate Action, Pengembangan bisnis Bank baru, dan Kejadian external yang mempengaruhi kegiatan operasional Bank.
4. Pengendalian risiko operasional maupun mitigasi risiko berdasarkan aktivitas operasional yang bersifat Low Frequency High Impact, High Frequency Low Impact, dan/atau High Frequency High Impact, akan dilakukan antara lain atas hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Manajemen Risiko terkait rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan.
   b. Pengendalian risiko operasional dengan menerbitkan suatu kajian/opini setelah melakukan review terkait kebijakan, prosedur, perjanjian kerjasama, isu terkait operasional, rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan, dan Teknologi Informasi.
   c. Observasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Quality Assurance.
   d. Memiliki beberapa ketentuan (prosedur) yang berfungsi untuk memitigasi risiko operasional termasuk Business Continuity Management (BCM).

e. Pengendalian risiko operasional termasuk risiko hukum, kepatuhan, stratejik, dan risiko reputasi berdasarkan data profil risiko bank.
f. Kontrol setiap aktivitas operasional dengan melakukan review dan update kebijakan/pedoman manajemen risiko operasional yang meliputi namun tidak terbatas pada risiko hukum, kepatuhan, stratejik, dan risiko reputasi sesuai dengan kebutuhan internal maupun perkembangan eksternal.
g. Membangun Risk Awareness di seluruh lini organisasi termasuk mewujudkan Risk Culture dalam aktivitas bisnis Bank.
h. Pelaksanaan Forum Pengendalian Internal.
i. Menerapkan prinsip three lines of defense, dimana risk taking unit merupakan fungsi first line yang melakukan pengelolaan risiko secara langsung, fungsi second line dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko, sedangkan fungsi third line dilakukan oleh satuan kerja audit internal untuk melakukan assurance atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara menyeluruh yang dilaksanakan pada Perusahaan.

RISIKO HUKUM– PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional Bank termasuk identifikasi kemungkinan adanya risiko hukum yang ditimbulkan oleh rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan, perjanjian Bank dengan debitor/pihak ketiga lainnya, strategi penanganan kasus hukum, dan kegiatan operasional dan bisnis Bank lainnya. Pada organisasi manajemen risiko hukum terdapat fungsi legal yang ada di Kantor Pusat dan Cabang untuk memitigasi potensi atau Risiko Hukum yang melekat pada aktivitas Bank serta melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum Perusahaan dan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan hukum khususnya atas gugatan dan somasi, serta memonitor dan menganalisis perkara yang dihadapi oleh Perusahaan yang sedang dalam proses pengadilan.

Pengukuran dan pemantauan risiko hukum dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan nominal potential loss setiap kasus yang dihadapi Bank, pemantauan biaya penanganan kasus hukum, kerugian yang dihadapi Bank atas sebuah putusan yang Inkracht, monitoring update penanganan kasus hukum, dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko hukum. Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan menerbitkan suatu kajian dan/atau opini setelah melakukan review terkait kebijakan, prosedur, perjanjian kerjasama, isu operasional serta isu hukum yang terjadi karena kegiatan bisnis dan operasional Bank.

RISIKO REPUTASI– PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan yang antara lain disebabkan adanya kejadian yang dapat merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media masa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, serta hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, seperti kelemahan tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Risiko reputasi dikelola melalu mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan serta didukung oleh bagian terkait dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah. Untuk memastikan pengendalian risiko reputasi, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan terhadap penanganan frekuensi dan materialitas berita dan komentar negatif terhadap Bank pada media massa, media sosial dan media online lainnya.
2. Pemantauan terhadap kredibilitas dan kejadian lain yang mempengaruhi reputasi Bank.
3. Pemantauan secara berkala terkait frekuensi dan materialitas penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah.
4. Penggunaan Complaint Tracking System (CTS) untuk mengelola penyelesaian keluhan nasabah
5. Penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan standar waktu penyelesaian keluhan nasabah.
6. Secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam rangka monitoring dan pengendalian risiko reputasi, Bank melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko terkait risiko reputasi meliputi kajian terhadap root cause timbulnya risiko reputasi, evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan/handling keluhan, pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif di media masa.

Evaluasi terhadap penilaian kepuasan nasabah secara bulanan dilakukan oleh departemen yang membidangi Pengembangan Kualitas Nasabah (DPNS) unit Kualitas Layanan dan disampaikan melalui memo internal Bukopin Office Communication (BOC) atau Outlook Email kepada seluruh karyawan Bank. Bank juga mengelola dan pengelolaan Risiko Reputasi seperti pemberitaan negatif terkait perusahaan yang merupakan salah satu peran dari Departemen Pengalaman Nasabah, Departemen Communication Relation, Sekretaris Perusahaan dan Departemen Komunikasi Pemasaran serta Departement terkait.

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perusahaan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja. Perusahaan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada nasabahnya. Kegagalan Perusahaan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi

negatif terhadap Perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perusahaan.

RISIKO STRATEJIK– PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.Pengukuran risiko stratejik dapat menggunakan indikator berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perusahaan, posisi bisnis Perusahaan di industri perbankan, pencapaian rencana bisnis, dan melalui parameter profil risiko stratejik. Pengendalian risiko stratejik diantaranya dilakukan melalui monitoring posisi Bank baik di antara industri perbankan maupun di antara peers group, pemantauan pencapaian realisasi atas Target (rencana bisnis) , dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor penyebab kegagalan serta pelaksanaan monitoring atas perkembangan kondisi makro ekonomi yang kemungkinan dapat berdampak pada bisnis Bank.

Bank merumuskan dan menetapkan target dan strategi bisnis yang akan dicapai di dalam rencana bisnis (business plan) dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan visi dan misi Bank.

Bank mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

Sebagai salah satu upaya pengelolaan risiko srategi, Bank telah menetapkan struktur organisasi yang selaras dengan arah strategi Bank. Bank telah memiliki Divisi Strategi Perusahaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan strategi Perusahaan.

Selain itu, dilakukan juga identifikasi dan analisa risiko secara memadai atas setiap aksi korporasi yang dijalankan (seperti misalnya penjualan asset, penerbitan sub-loan, penyertaan modal kepada perusahaan anak, dan lainnya). Hal ini untuk memastikan dampak risiko yang terjadi akibat aksi korporasi telah diterima dan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite).

RISIKO KEPATUHAN– PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku lainnya. Organisasi manajemen risiko kepatuhan terdiri dari Departemen Kebijakan Kepatuhan & Tata Kelola, Departemen Quality Assurance, dan Departemen Anti Money Laundering. Selain itu dalam rangka memperkuat fungsi kepatuhan telah dibentuk Unit Pengembangan Kepatuhan. Setiap fungsi memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur batasan kewenangan atas aktivitas. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai tercermin dalam kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan didukung dengan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundangundangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kualitas Aset, NPL net, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).
3. Risiko likuiditas terkait dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
4. Risiko operasional terkait pemenuhan ketentuan terkait penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank.

Identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan secara berkala yang antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan melalui perhitungan risiko berdasarkan accounting loss data dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko kepatuhan.
Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan antara lain melakukan:

1. Pengumpulan pos-pos kerugian operasional secara berkala (harian, bulanan, triwulan, dan tahunan);
2. Analisis dan review secara berkala terhadapa faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional dan risiko-risiko lainnya serta kerugian yang dapat ditimbulkan.

Pemantauan dan pengendalian atas eksposur risiko kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja pelaksana lainnya secara berkala dan berkesinambungan dengan parameter-parameter dan limitasi yang telah ditetapkan. Unit kerja yang membidangi manajemen risiko kepatuhan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan secara berkala untuk keperluan pemantauan dan pengendalian eksposur risiko kepatuhan, termasuk identifikasi faktor-faktor penyebabnya untuk disampaikan kepada komite manajemen risiko dan direksi sebagai bahan evaluasi bersama.

Sistem dan prosedur back-up untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko merujuk pada Procedure Disaster Recovery Plan (DRP) terhadap sistem dan prosedur akan dilakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala. Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dengan menggunakan model internal mencakup penggunaan tools, identifikasi secara dini atas perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari risiko kepatuhan, serta laporan yang dihasilkan disampaikan secara berkala kepada Direksi.

Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perusahaan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perusahaan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perusahaan.



5

FUNGSI PENUNJANG BISNIS



TATA KELOLA
SUMBER DAYA MANUSIA

Di tengah tantangan yang semakin dinamis pada industri perbankan, ditambah tuntutan akselerasi digital yang kian mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman, serta dapat dilakukan dari mana saja, menuntut KB Bank untuk senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif dan efektif yang berdampak tidak hanya pada produktifitas pekerja dan profitabilitas, namun juga *sustainability* Bank ke depan. Bagi KB Bank, SDM adalah aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun tingkat kesejahteraan. Manajemen SDM memiliki tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

KB Bank tetap berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan SDM yang kuat dan berkelanjutan serta mengembangkan talenta yang kompeten dan berkualitas tinggi yang mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis. KB Bank terus mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan berkualitas seperti yang diharapkan. Kunci utama dalam menciptakan SDM yang turut meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja Bank adalah proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan talenta serta kompetensi.

Pelaku industri perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki karakteristik khusus, yakni wajib menjaga kepercayaan nasabah yang mana tingkat kepercayaan dan reputasi Bank diukur dari kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini KB Bank menjadikan kepercayaan nasabah sebagai prinsip yang fundamental dan senantiasa mendorong seluruh SDM berkomitmen untuk menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkup Bank, dengan tujuan menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank dalam hal pengelolaan keuangan dan layanan berdasarkan standar perbankan yang berlaku.

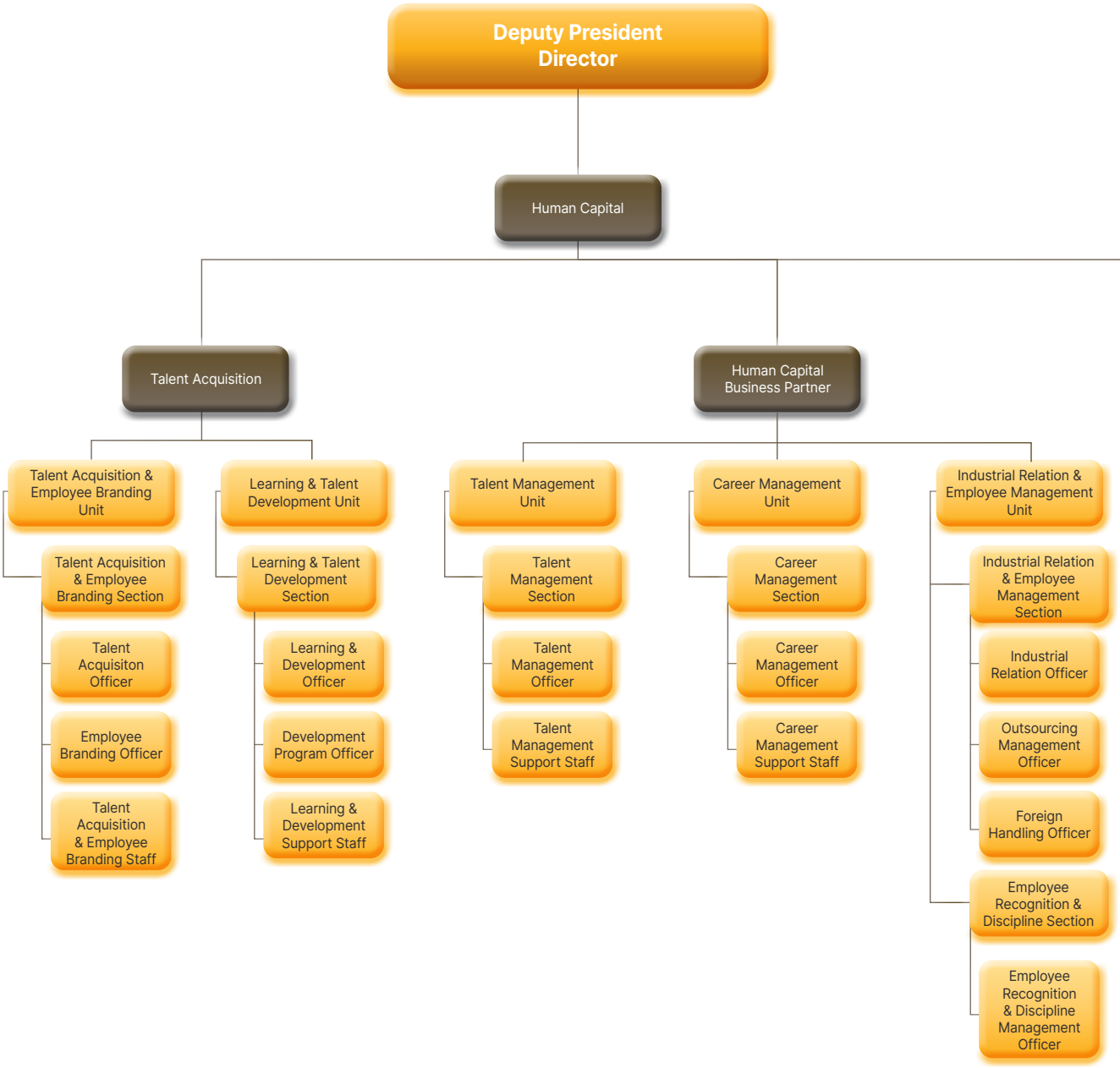
Pada tahun 2023, KB Bank melanjutkan upaya pembentukan SDM yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur melalui 2 (dua) pendekatan, yakni meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal; dan mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

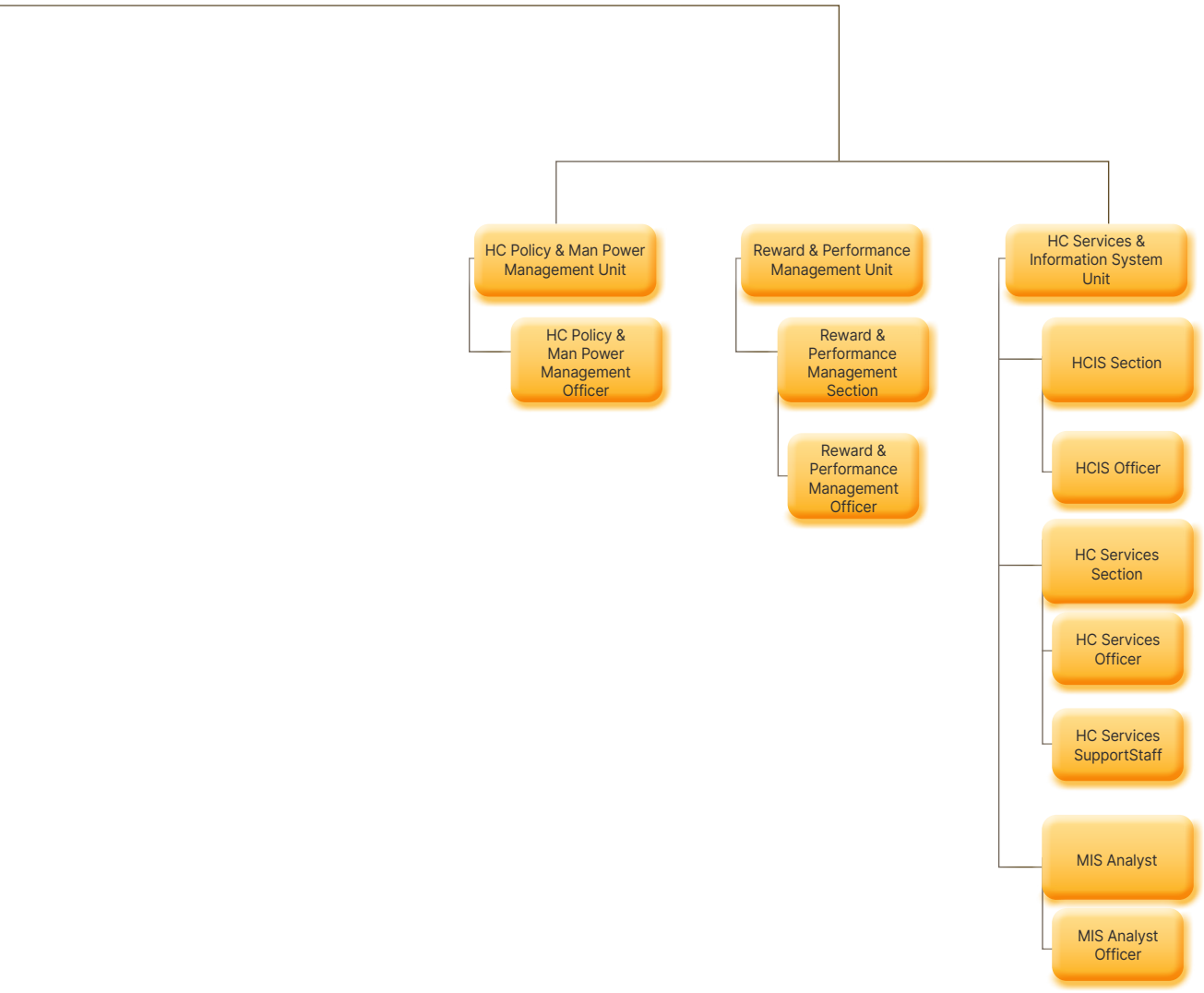



KB Bukopin

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan SDM di Bank disupervisi langsung oleh Wakil Direktur Utama yang membawahi Grup Human Capital. Grup HC dipimpin oleh seorang Division Head. Grup HC terdiri dari Talent Acquistion Department dan HCBP Department sebagaimana bagan sebagai berikut:


Deputy President Director
Human Capital
Talent Acquisition
Human Capital Business Partner
Talent Acquisition & Employee Branding Unit
Learning & Talent Development Unit
Talent Management Unit
Career Management Unit
Industrial Relation & Employee Management Unit
Talent Acquisition & Employee Branding Section
Talent Acquisiton Officer
Employee Branding Officer
Talent Acquisition & Employee Branding Staff
Learning & Talent Development Section
Learning & Development Officer
Development Program Officer
Learning & Development Support Staff
Talent Management Section
Talent Management Officer
Talent Management Support Staff
Career Management Section
Career Management Officer
Career Management Support Staff
Industrial Relation & Employee Management Section
Industrial Relation Officer
Outsourcing Management Officer
Foreign Handling Officer
Employee Recognition & Discipline Section
Employee Recognition & Discipline Management Officer


HC Policy & Man Power Management Unit
HC Policy & Man Power Management Officer
Reward & Performance Management Unit
Reward & Performance Management Section
Reward & Performance Management Officer
HC Services & Information System Unit
HCIS Section
HCIS Officer
HC Services Section
HC Services Officer
HC Services SupportStaff
MIS Analyst
MIS Analyst Officer

Adapun ruang lingkup tugas dari masing-masing Department pengelola SDM Bank, adalah sebagai berikut:

- HC Business Partner Department
  Bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan terkait sumber daya manusia, *talent pool* dan manajemen karir, kompensasi, perselisihan karyawan dan manajemen *outsourcing*. Selain itu menjadi penghubung dengan *Group* lain berkaitan dengan permasalahan mengenai sumber daya manusia dan non-rekrutmen.

- Talent Acquistion Department
  Bertanggung jawab menjadi penghubung antara Human Capital dan *Group* lain sehubungan dalam proses pencarian, perekrutan, dan *onboarding* karyawan baru serta melakukan proses realokasi dan transfer karyawan *eksisting*.

Sementara itu, KB Bank juga memiliki Human Capital Business Partner (HCBP) yang berperan sebagai *strategic business partner* yang menyelaraskan antara tujuan bisnis Bank dengan karyawan dan Manajemen, serta berperan sebagai konsultan bagi Manajemen dalam hal isu-isu terkait SDM untuk mendukung pencapaian sasaran bisnis. HCBP melakukan tugas dan fungsinya di bidang Pengembangan Organisasi, *Talent Management*, *Training* dan *Performance Management*.

Berikut adalah komposisi SDM di Group HC per 31 Desember 2023, sebagaimana terlampir di bawah ini

NO	DEPARTMENT / UNIT	TOTAL KARYAWAN
1	HC DIVISION HEAD	1
2	HC BUSINESS PARTNER DEPARTMENT	29
3	OUTSOURCING HANDLING UNIT	3
4	HC SERVICE UNIT	10
5	HC POLICY & STRATEGY UNIT	3
6	HC LEARNING & TALENT DEVELOPMENT UNIT	6
TOTAL		**52**

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Bank berkomitmen untuk selalu mengembangkan karyawan agar menjadi karyawan yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu selaras dengan dinamika era digital saat ini, Bank senantiasa melakukan transformasi baik dari sisi bisnis maupun pengembangan dan pengelolaan karyawan. Bank akan memastikan efisiensi dan efektivitas dari Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang sejalan dengan strategi bisnis Bank dengan melakukan peningkatan produktivitas dan kompetensi karyawan. Peningkatan produktivitas karyawan dan kompetensi karyawan (*hard competency* maupun *soft competency*) merupakan prioritas utama yang dilakukan Bank dalam mempersiapkan KB Bank *Leader*.

Disamping itu, Bank akan melakukan penyesuaian organisasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan *management* melalui peningkatan produktivitas, optimalisasi *channel* dan optimalisasi *Man Power*. Penyesuaian organisasi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan strategi Bank dalam rangka meningkatkan penajaman segmentasi bisnis, penguatan *span of control*, peningkatan kualitas bisnis proses, penguatan *first line of defense* serta untuk pengembangan bisnis Bank ke depan sejalan dengan visi, misi dan corporate plan Bank.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi *channel* dan optimalisasi *Man Power* untuk meningkatkan produktivitas, Bank akan melakukan kajian terkait dampak atas pengelolaan sumber daya manusia. Kajian tersebut telah memperhatikan adanya optimalisasi *channel* yang akan berdampak terhadap penurunan jumlah tenaga kerja dan *outsourcing* yang diharapkan berdampak terhadap penurunan biaya selaras dengan upaya Bank dalam melakukan *Cost Reduction*.

Dengan adanya penutupan sebagian jaringan kantor, maka Bank akan membentuk tim khusus untuk menangani masa transisi ini sehingga pelayanan terhadap nasabah termasuk *stakeholders* tetap dapat berjalan tanpa adanya kendala yang akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Bank juga telah berkonsultasi kepada lembaga hukum dan berusaha akan melakukan komunikasi sebaik mungkin terhadap karyawan dan media terkait dengan kebijakan yang akan diambil ini, sehingga kebijakan ini telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional, hukum, kepatuhan dan reputasi Bank.

Strategi – strategi yang diterapkan tersebut bertujuan salah satunya adalah untuk memastikan Bank dapat memiliki SDM yang kompeten, produktif dan berintegritas untuk mendukung implementasi RBB 2023-2025, mengingat SDM menjadi salah satu faktor keberhasilan bisnis Bank.

Pengembangan Organisasi

Bank melakukan penyelarasan struktur organisasi yang baru untuk penajaman fungsi dalam upaya mendukung strategi bisnis yaitu peningkatan dana, kredit yang berkualitas dan peningkatan *feebased income*. Dalam penyelarasan tersebut, Bank juga berkomitmen untuk melakukan peninjauan atas produktivitas karyawan Bank. Dengan demikian diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pertumbuhan bisnis yang diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan serta penguatan fungsi pengendalian internal, sehingga bisnis kedepan diharapkan dapat bertumbuh dengan kualitas dan *performance* yang baik.

a. Pengembangan Struktur Organisasi
   Bank mengkaji efektifitas Struktur Organisasi dari waktu ke waktu dengan berdasar pada produktivitas karyawan serta memastikan relevansi dengan strategi bisnis yang berjalan yaitu peningkatan dana, peningkatan kredit yang berkualitas dan peningkatan *feebased income*, kemudian apabila dirasakan perlu Bank akan melakukan penyesuaian Struktur Organisasi yang mendukung strategi bisnis tersebut.

b. Job Role Evaluation
   - Memastikan *Job Role* dari setiap jabatan mendukung dalam pencapaian strategi bisnis.
   - Mengidentifikasi dan melakukan rotasi karyawan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian dari tujuan strategi bisnis bank.

c. Pengembangan Budaya Perusahaan
   - Bank akan melakukan *review* terhadap budaya perusahaan saat ini agar mengarah kepada budaya perusahaan yang mengedepankan kinerja baik secara organisasi maupun individu.
   - Penerapan budaya perusahaan pada lingkungan internal Bank sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan dan integritas karyawan.
   - Pemberian *reward* kepada karyawan dengan kinerja baik sesuai dengan target perusahaan.
   - Peningkatan integritas, penegakan disiplin serta pemberian sanksi yang tegas kepada karyawan yang melakukan per target.

d. Peningkatan Peran dan Fungsi Human Capital Business Partner (HCBP)
   Peningkatan peran dan fungsi HCBP dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan karyawan dan manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja unit kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Fokus utama peran dan fungsi HCBP adalah pengembangan organisasi, manajemen talenta, analisa kebutuhan *training* dan manajemen kinerja. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi dan mengintegrasikan beragam pandangan menjadi poin utama dalam membangun strategi menghadapi tantangan bisnis. Selain itu, peningkatan fungsi dan peran HCBP akan mendorong keberadaan HCBP lebih efektif dalam mendukung pencapaian bisnis.

Kebijakan Kompensasi & Benefit (Compensation & Benefit)

Dalam rangka memenangkan persaingan dalam merebut dan mempertahankan karyawan terbaik serta mendukung tercapainya tujuan Bank, Bank berkomitmen untuk menerapkan sistem kompensasi dan *benefit* yang berperan dalam mendorong peningkatan *Productivity, Performance, Engagement, Compliance* dan *Competitiveness*. Konsep pemberian kompensasi & benefit yang dijalankan oleh Bank dalam rangka dalam pemenuhan tujuan tersebut yaitu 3P (*Pay for Position, Pay for Person & Pay for Performance*).

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Pengembangan sistem informasi SDM (Human Capital Information System yang berbasis *mobile apps* dan terintegrasi dengan seluruh sistem), antara lain:

1. Pengembangan aplikasi *employee self service* berbasis mobile yang mencakup updating data/informasi karyawan, pengajuan cuti, pengajuan lembur, dan sebagainya.
2. Enhancement Human Capital Information System (HCIS) sebagai *core system* dari SDM untuk peningkatan layanan dan informasi SDM antara lain pengelolaan struktur organisasi dan data karyawan, transaksi *benefit* karyawan, perhitungan dan pelaporan pajak dan sebagainya.
3. Pengembangan aplikasi *Learning Management System*, sehingga dapat lebih memastikan agar seluruh karyawan mendapatkan *training* khususnya *training* terkait materi untuk mendukung pekerjaan serta dalam rangka peningkatan kompetensi untuk mendukung karyawan dalam pengembangan karir.

Dengan adanya pengembangan sistem informasi SDM (Human Capital Information System), proses yang masih dilakukan secara manual akan diubah menjadi berbasis sistem sehingga akan menghilangkan proses-proses yang tidak perlu melalui digitalisasi.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2017 POJK tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan Berdasarkan POJK Nomor 37/PJK 03/2017, disebutkan bahwa Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan sebagai berikut atau yang setara:

a. Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Pejabat Eksekutif, yakni pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, dan/atau.
c. Tenaga ahli atau konsultan, yakni perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

Selain ketentuan POJK Nomor 37/POJK.03/2017, dalam penggunaan TKA, Bank juga berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan adanya Tenaga Kerja Asing dari KB Kookmin Bank diharapkan KB Bank dapat melakukan penguatan Sistem Analisa dan *Scoring* Perkreditan dalam penerapan Manajemen Risiko, *Financial Planning and Performance Analysis* dan untuk menangkap peluang dari pelaku bisnis Korea di Indonesia beserta *Supply Chain* nya. Rencana penggunaan tenaga kerja asing ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem analisis kredit untuk mekanisme pemeringkatan kredit yang lebih akurat dan penerapan perbaikan pada sistem evaluasi dan manajemen kredit.
2. Membantu penyelesaian target proyek NGBS (*Next Generation Banking System*).
3. Mengurangi NPL melalui teknik sekuritisasi dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas aset.
4. Meningkatkan kesempatan pendapatan baru seperti digital dan bisnis ke perusahaan Korea dengan memanfaatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja asing dari KB Kookmin.
5. Memberikan kontribusi KB Bank dalam rangka *turn around* dengan mentransfer praktik perbankan yang canggih, memperkenalkan produk baru, dan merampingkan bisnis.
6. Meningkatkan ketrampilan karyawan lokal karena ada transfer Pengetahuan & keterampilan profesional Tenaga Kerja Asing (TKA) seperti CIB (*Corporate Investment Banking*/Korean Link), *Financial Management, Corporate Strategic, Transformation, Corporate Communication, New Business Solution, Treasury, Digital, Special Asset Management* (SAM).
7. Dengan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) maka terdapat ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini maka menambah inovasi pada KB Bank.
8. Mempercepat proses transformasi Bank dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli dari KB Kookmin Korea. Penggunaan Tenaga Kerja dari KB Kookmin yang sudah berpengalaman di bidangnya akan mempercepat pencapaian target.
9. Di setiap *core business area* seperti IT, keuangan, dan strategi, pengetahuan profesional tenaga kerja asing akan ditransfer ke pegawai KB Bank untuk meningkatkan kompetensi kerja mereka.
10. Membuat dan mengembangkan produk dan transaksi *wholesale banking*, sesuai kebutuhan bisnis, baik yang terkait dengan *lending, funding, trade finance*, transaksi perbankan lainnya dan produk kerjasama bisnis (*partnership*), membuat program untuk mendongkrak penjualan, dan *performance management* & MIS. Sebagai *Business driver* untuk perusahaan terkait (*Anchor*).
11. Mendorong tenaga kerja asing untuk belajar bahasa Indonesia dengan mengikuti program belajar bahasa indonesia yang di selanggarakan, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dengan staf Indonesia di KB Bank dan mempelajari Budaya Indonesia.

Penggunaan Tenaga Alih Daya

Tenaga Alih Daya

1. Tenaga alih daya dikelola secara terpusat di Divisi Human Capital.
2. Cabang tidak lagi melakukan pengelolaan tenaga alih daya.
3. Proses atas penambahan, pengurangan, serta penggantian tenaga alih daya harus melalui persetujuan Divisi Human Capital Kantor Pusat yang akan dievaluasi berdasarkan standard produktivitas.
4. Bank akan membuat standarisasi terhadap penggunaan Tenaga Alih Daya yang berdasarkan produktivitas dan menetapkan posisi-posisi yang dapat diisi oleh Tenaga Alih Daya.

Vendor Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya

1. Bank akan melakukan penilaian terhadap vendor Tenaga Alih Daya dan di selaraskan dengan POJK Tenaga Alih Daya yang berlaku.
2. Kerjasama dengan Perusahaan penyedia jasa tenaga alih daya dikelola secara terpusat oleh Divisi Human Capital dan kantor cabang tidak dapat lagi melakukan kerjasama dengan Perusahaan penyedia jasa tenaga alih daya.
3. Besaran *management fee* kerjasama seluruh perusahaan penyedia jasa tenaga alih daya ditetapkan oleh kantor pusat.
4. Pekerjaan yang akan dialihdayakan kepada Perusahaan Alih Daya mengacu kepada bidang pekerjaan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Biaya Alih Daya harus mempertimbangkan dan mengacu pada rencana kerja dan target yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penunjukkan Perusahaan Alih Daya dilaksanakan melalui proses tender/*beauty contest* dimana mekanismenya mengacu kepada ketentuan dan kewenangan yang berlaku di PT Bank KB Bukopin Tbk.

Hubungan Karyawan

Penyusunan program untuk menciptakan suasana kerja yang membantu peningkatan produktivitas karyawan dan meningkatkan *engagement* karyawan sehingga dapat memberikan pengalaman karyawan yang baik. Selain itu Bank telah mensosialisasikan peraturan maupun ketentuan yang terkait dengan kedisiplinan karyawan, pengkinian data karyawan serta kebijakan yang mengatur mengenai kepegawaian lainnya untuk mendapatkan penilaian dari karyawan atas pengelolaan sumber daya manusia.

Kebijakan Retirement dan Kompensasi

Menyediakan program pensiun untuk karyawan yang akan menghadapi masa pensiun nanti untuk menjembatani karyawan untuk terus mengembangkan diri pasca pensiun dan melewati masa-masa transisi dalam menyiapkan mental menjelang pensiun. Secara keseluruhan, di tahun 2023 ini terdapat pengurangan jumlah karyawan tetap dan/atau kontrak. Pengurangan jumlah karyawan tersebut diambil setelah memperhitungkan dampak keberlanjutan Bank kedepannya dimana diperlukan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja dan bagi karyawan yang terdampak atas kebijakan ini akan diberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.

Hubungan Industrial (Industrial Relation)

Pelaksanaan hubungan industrial dibangun atas dasar pemahaman bahwa Bank, karyawan dan Serikat Pekerja merupakan mitra kerja Bank dalam melaksanakan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya menjaga suasana kerja saling menghormati, saling mempercayai, dan tekad untuk saling bekerjasama dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan menjamin kelangsungan usaha Bank dan perbaikan kesejahteraan seluruh karyawan. Bank juga akan melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama untuk menyesuaikan dengan kondisi Bank saat ini.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Kebijakan dan Realisasi Program

Bank memastikan kebutuhan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Desain pelatihan dan pengembangan human capital diselaraskan dengan strategi Bank agar seluruh program/kegiatan dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kinerja Bank.

Aktivitas yang mendukung hal tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

a. Penajaman Program Pendidikan dan Pelatihan
   - Penajaman terhadap konten materi *training* yang sejalan dengan arah kebijakan Strategi Bisnis Bank terutama *Good* Bank.
   - Pelatihan dasar untuk seluruh karyawan juga akan dilengkapi dengan modul APU PPT dan *Anti-Fraud*, yang diberikan kepada seluruh karyawan dari seluruh tingkatan.
   - Sehubungan dengan inisiatif untuk memutasikan *supporting officer* menjadi *business officer*, bank juga mempersiapkan pelatihan untuk karyawan yang meliputi pemahaman produk, meningkatkan kemampuan menjual, kredit dan *funding*.

b. Pengembangan teknik-teknik pelaksanaan Training
   - Pengembangan metode pembelajaran baik secara online melalui *e-learning* atau *platform online meeting* serta *training* secara *offline*.
   - Pengembangan *Trainer*/Fasilitator dari Internal KB Bank.
   - Digitalisasi metode evaluasi kegiatan pendidikan, dan pelatihan dengan mengembangkan *Learning Management System*.

c. Penyusunan Program Pengembangan Talent Dan Successor
   - Identifikasi dan pengembangan kompetensi *successor*.

- Melakukan identifikasi dan pelaksanaan *Management Development Program* (MDP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan cara yang lebih efektif dalam merekrut maupun mengembangkan peserta

Adapun pelaksanaan pelatihan yang bersifat mandatory untuk masing-masing level jabatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan Level	Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta
Seluruh Level	*Training Induction*	Training bagi karyawan baru KB Bank untuk meningkatkan pemahaman dalam hal company profile, kebijakan, produk, dll.	181
Staff	*Basic Financial Analysis*	untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan.	164
Coordinator, Manager, Department Head, Division Head, Direksi, Komisaris	Sertifikasi Manajemen Risiko Level I-V	Pemenuhan kompetensi pejabat Bank di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan regulator.	534
Relationship Banking Officer, Priority Banking Officer	Sertifikasi Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD)	Pemenuhan lisensi karyawan marketing funding untuk menjual produk reksadana.	57
Karyawan fungsi *Treasury*	Sertifikasi *Treasury Level Basic, Advanced, Intermediate*	Pemenuhan kompetensi karyawan treasury di bidang treasury dealer sesuai ketentuan regulator.	3
Karyawan fungsi SDM	*Training* Struktur & Skala Upah	Memberikan bekal kepada peserta agar dapat membuat struktur skala upah yang baik & benar.	16
Karyawan fungsi Operasional	Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR)	Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).	828
Seluruh Karyawan	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	Meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kejahatan pencucian uang serta cara mengantisipasinya.	2192
Seluruh Karyawan	*Anti Fraud*	Meningkatkan kemampuan para karyawan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.	2093
Seluruh Karyawan	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1-5	untuk memberikan penyegaran kepada para karyawan yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko dimana masa berlaku.	311
Karyawan Fungsi Perkreditan	*Training Mortgage*	Mengetahui dan memahami filosofi kredit konsumtif dan KPR (Mortgage).	23
Karyawan Level Managerial	*Leadership Training*	Meningkatkan kompetensi leadership para karyawan di level Manajerial.	61

Biaya Pengembangan Kompetensi

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, bahwa Bank wajib menyediakan dana pendidikan (BPL) sekurang-kurangnya 3,5% dari anggaran pengeluaran SDM tahun berjalan/Biaya Tenaga Kerja (BTK). Bank telah merealisasikan biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023 sebesar Rp9.634.908.175,- yaitu 40,78 % dari *Budget Training* 2023.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam Global Teknologi saat ini telah tercipta beberapa teknologi yang dapat mendukung usaha dibidang perbankan. *Machine Learning, AI, Devops, and RegTech* diperkenalkan dan dapat digunakan dalam *Actual Task Execution*. Disamping itu, tren dalam *Online/Digital Banking* saat ini adalah melakukan *Full Scales Digital Transformation* yang mencakup *channels*, *products, services* dan *customer*. Selain itu, penguatan layanan digital berbasis seluler, persaingan dan perluasan bisnis berbasis open API juga menjadi tren dalam *Online/Digital Banking*.

Dampak Pandemi Covid-19 membuat hampir semua sektor kehidupan melambat, sehingga masyarakat melakukan perubahan dan beradaptasi dengan cepat dan melakukan berbagai kegiatan dengan cara digital, seperti belajar, bekerja, berbelanja dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengguna Internet dan *Smartphone* meningkat serta peningkatan transaksi E-Commerce dan transaksi pembayaran digital juga meningkat cukup signifikan yang terlihat dari peningkatan transaksi *E-Money* yang menunjukkan bahwa transaksi non tunai semakin diminati oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat aturan-aturan dari regulator yang mengatur sistem Tata Kelola Teknologi Informasi yang didalamnya terdapat prosedur, kebijakan dan pengelolaan TI secara keseluruhan dan juga adanya aturan terkait dengan *privacy*.

PROGRAM *ADVANCED* IT & DIGITAL

Untuk mengejar ketertinggalan Bank dan memenangkan persaingan digital banking yang kompetitif, Bank menetapkan strategik agenda "*Advanced* IT & Digital" sebagai bentuk implementasi melalui 2 (dua) agenda yang dijalankan pada tahun 2023 antara lain:

1. Mendorong Akselerasi Infrastruktur IT
   Untuk mempercepat proses bisnis dan memindahkan sistem yang sebelumnya masih konvensional menjadi otomasi proses bisnis dan sentralisasi proses bisnis melalui digitalisasi diperlukan Infrastruktur IT yang kuat. Bank telah merilis proyek IT yaitu "SHINE Project" yang bertujuan untuk mendigitalisasikan semua proses bisnis kedalam satu database dan terhubung ke semua infrastruktur sistem Bank.

2. Menciptakan *Digital Channel* yang Independen dan terdiferensiasi
   Percepatan proses infrastruktur IT melalui SHINE Project dimulai secara bertahap dan salah satu agenda percepatan proses digitalisasi adalah fokus pada pengembangan digital *channel* dan memaksimalkan fitur dengan tujuan sentralisasi layanan agar nasabah dengan mudah mengakses semua layanan perbankan hanya dalam satu *digital channel* Bank.

3. Menciptakan Digital Ecosystem dan Bisnis Platform
   Perkembangan bisnis digital harus diimbangi dengan tersedianya layanan transaksi keuangan yang memberi kemudahan bagi nasabah.

PENGEMBANGAN DIGITAL BANKING SERTA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

Perkembangan *digital Banking* sudah sangat pesat dimana saat ini 78% nasabah sudah menggunakan layanan *digital Banking*. Bank telah memiliki produk digital, namun market share produk tersebut sangat rendah. KB Bank perlu membangun sistem IT yang mumpuni melalui SHINE project untuk "*New Go-To-Market Strategy*" digital Banking, "Operational excellence" dan "*Proactive response to Risk*". Selain itu data di KB Bank tersebar dan tidak tersentralisasi sehingga menimbulkan risiko validitas data. Hal ini Merupakan tantangan bagi organisasi untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan dan kinerja bisnis untuk pengambilan keputusan strategis

Dalam rencana pengembangan aplikasi digital, Bank berupaya untuk selalu memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia yang mana evaluasi pengembangan secara internal juga dilakukan sebagai upaya memitigasi risiko yang mungkin muncul. Pengembangan aplikasi digital yang direncanakan oleh Bank erat kaitannya dengan implementasi transformasi IT melalui SHINE project yang saat ini sedang berjalan sebagai faktor internal, sedangkan pada faktor eksternal Bank sangat mengharapkan dukungan OJK dan BI untuk dapat merealisasikan rencana pengembangan aplikasi digital tersebut.

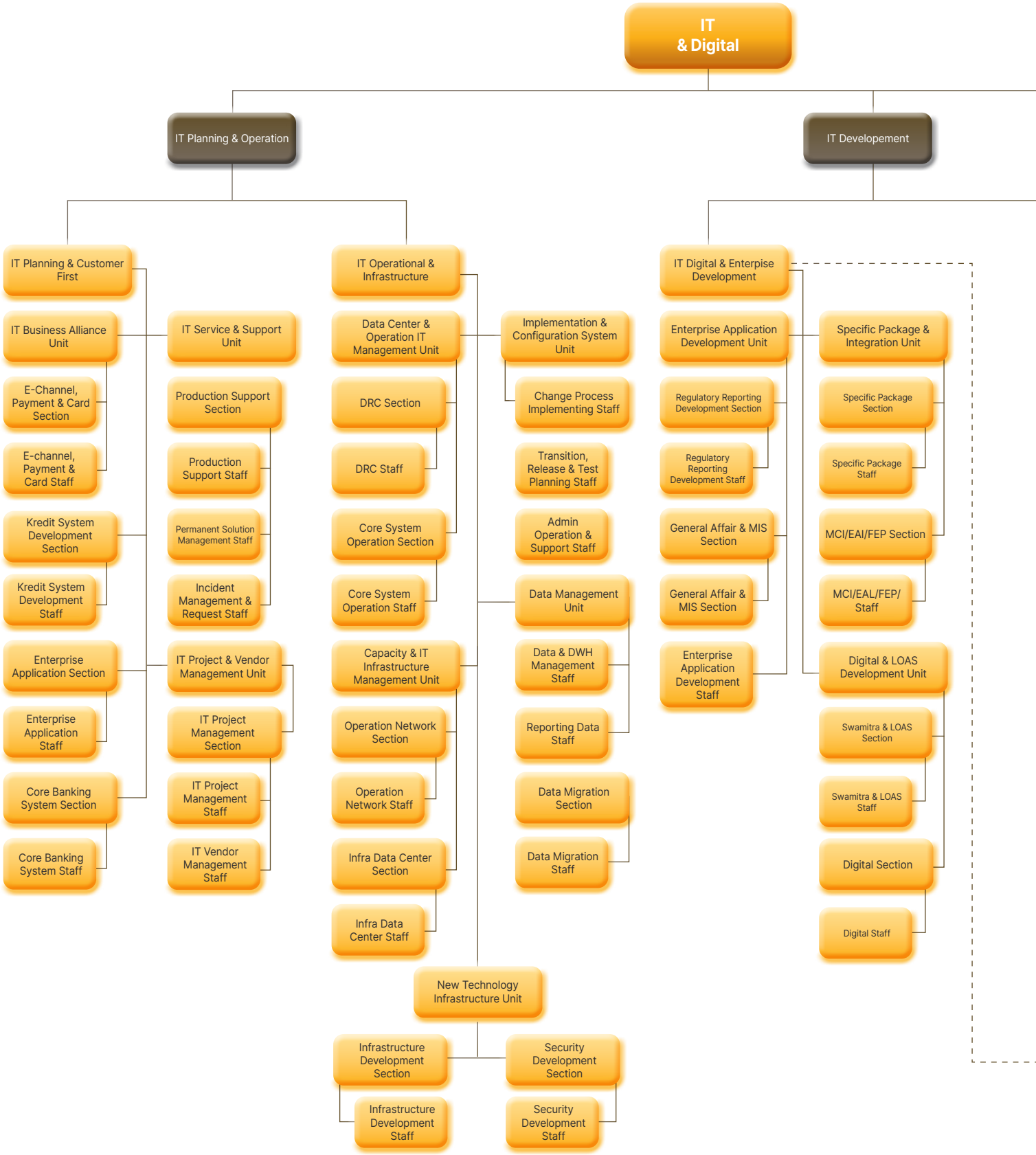
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut dan memenangkan persaingan digital banking yang kompetitif, Bank menetapkan strategic agenda "New Digital & IT Infra" sebagai bentuk implementasi melalui 3 (tiga) agenda yang dijalankan pada tahun 2023 antara lain:

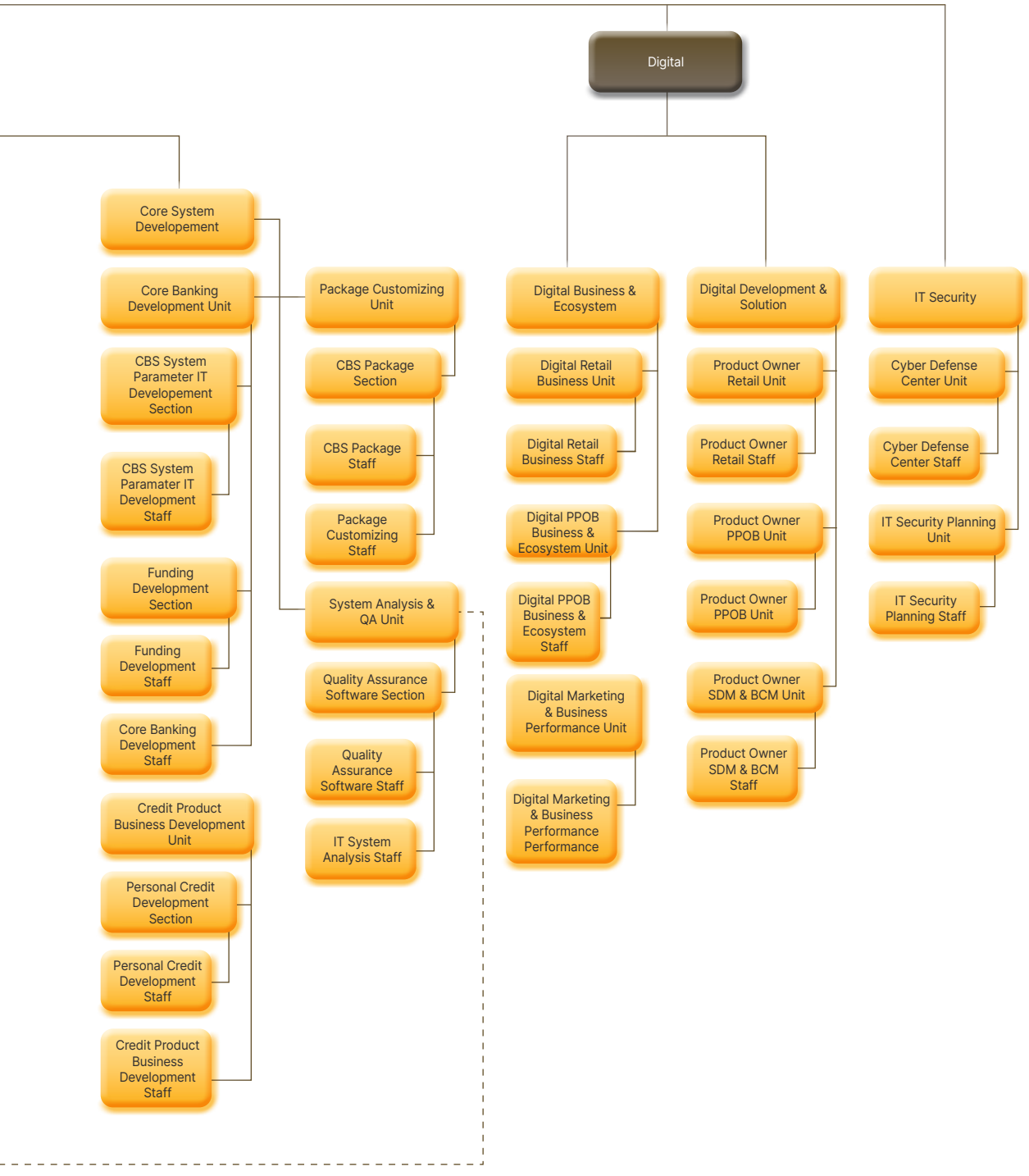
1. Membangun ekosistem digital yang berbeda melalui kemitraan strategis.
2. Memperkuat posisi digital di pasar melalui revitalisasi & *rebranding* Wokee.
3. Fokus pada simplifikasi dan bersiap membangun *digital channel* yang terintegrasi.

STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) dilakukan oleh Grup Teknologi Informasi yang berada di bawah supervisi Direktur Teknologi Informasi dan Digital. Group Teknologi Informasi membawahi 3 (tiga) Divisi yaitu IT Planning & Operation, IT Development, dan Digital

Berikut Struktur Pengelola Teknologi Informasi per 31 Desember berdasarkan SK DIR No.0020 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk




Digital
Core System Developement
Core Banking Development Unit
CBS System Parameter IT Developement Section
CBS System Paramater IT Development Staff
Funding Development Section
Funding Development Staff
Core Banking Development Staff
Credit Product Business Development Unit
Personal Credit Development Section
Personal Credit Development Staff
Credit Product Business Development Staff
Package Customizing Unit
CBS Package Section
CBS Package Staff
Package Customizing Staff
System Analysis & QA Unit
Quality Assurance Software Section
Quality Assurance Software Staff
IT System Analysis Staff
Digital Business & Ecosystem
Digital Retail Business Unit
Digital Retail Business Staff
Digital PPOB Business & Ecosystem Unit
Digital PPOB Business & Ecosystem Staff
Digital Marketing & Business Performance Unit
Digital Marketing & Business Performance Performance
Digital Development & Solution
Product Owner Retail Unit
Product Owner Retail Staff
Product Owner PPOB Unit
Product Owner PPOB Unit
Product Owner SDM & BCM Unit
Product Owner SDM & BCM Staff
IT Security
Cyber Defense Center Unit
Cyber Defense Center Staff
IT Security Planning Unit
IT Security Planning Staff

Melihat kondisi TI KB Bank, saat ini memiliki empat fungsi utama yang dibagi menjadi divisi (*IT Planning & Operation, IT Development, IT Security* dan *Digital*), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Divisi	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
IT Planning & Operation	Bertanggung jawab untuk mengelola pengembangan teknologi informasi Bank termasuk dalam strategi, kebijakan, prosedur, arsitektur, standar kualitas dan membangun infrastruktur IT Bank secara *end-to-end* untuk memastikan keamanan dan kelangsungan bisnis proses Bank.
IT Development	Bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem aplikasi Digital dan *E-channel*. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan *Core Banking System*, sistem Produk Kredit dan aplikasi lainnya (yaitu sistem *Treasury* dan *Trade Finance*), serta pengujian aplikasi termasuk Unit Test, SIT, dan UAT. Memastikan dokumen teknis, sumber aplikasi proses administrasi kode dan dokumentasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan internal yang berlaku.
Digital	Bertanggung jawab sebagai inkubator digital untuk mengembangkan, inovasi digital dan juga memberikan solusi. Melakukan perencanaan pengembangan, alokasi sumber daya, manajemen fitur *platform digital*, dan pengumpulan kebutuhan *user* terkait platform Digital. Membuat Kerjasama transaksi dengan perusahaan/nasabah (B2B/B2C). Menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan strategi untuk meningkatkan *fee-based income* dari penjualan layanan *public, e-channel, digital transaction & service* (tidak termasuk PPOB).

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Undang-undang (UU) yang berlaku, maka Grup Teknologi Informasi (GTI) menyusun rencana strategis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dengan menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap keseluruhan aset dan aktivitas penyelenggaraan teknologi informasi. GTI juga bersiap dalam menyiapkan kapabilitas baru sebagai penyedia layanan TI bagi industri finansial dengan membangun kompetensi dan penyiapan infrastruktur sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu upaya untuk memiliki keunggulan kompetitif Bank, khususnya aspek TI sehingga dapat secara langsung turut serta dalam mengakselerasi pencapaian target kinerja Bank, maka pada tahun 2023-2025, Grup TI akan mengembangkan inisiatif dan solusi inovatif untuk menunjang KB Bank dalam pertumbuhan bisnis. Untuk itu tetap dilakukan penguatan atas fungsi organisasi yang berperan dalam melakukan koordinasi atas seluruh fungsi Teknologi Informasi di KB Bank.

Menjawab Tantangan IT Disruption

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi informasi di Bank menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Bank terus mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk menjawab tantangan dan peluang bisnis yang muncul, sehingga dapat tetap relevan dan adaptif dengan melakukan berbagai pengembangan, diantaranya sebagai berikut:

- Core Banking
  Masalah terkait G/L dan masalah manajemen akun yang terjadi pada sistem lama dengan cepat diselesaikan dengan memperkenalkan *core banking package* yang modern.

- Transportation Layer
  Memodernisasi arsitektur lapisan transportasi yang terfragmentasi saat ini melalui peningkatan *middleware* dan pemfaktoran ulang arsitektur.

- Management Information System (MIS)
  EDW ditingkatkan secara signifikan melalui memperkenalkan fungsi-fungsi baru seperti RDM, CRM, audit, profitabilitas dan KPI dan respons kepatuhan.

- New Loan Origination & Admin
  Dapat berkontribusi pada mitigasi risiko kredit dan peningkatan tingkat pemulihan dengan memekanisasi proses skrining manual, evaluasi dan pasca manajemen.

- Payment Gateway
  Untuk peluncuran produk konvergensi digital yang tepat waktu, pembayaran, persetujuan, respons peraturan, fungsi rekonsiliasi untuk setiap jaringan pembayaran diintegrasikan ke dalam satu system.

- Digital First
  Infrastruktur digital all-in-one digunakan untuk meminimalkan dampak pada sistem lama untuk mewujudkan strategi transformasi digital bank secara lebih aman dan efisien.

- General Affairs
  Mendapatkan visibilitas ke dalam operasi internal melalui komputerisasi proses eksekusi anggaran & pengeluaran, manajemen inventaris akta, dan manajemen aset tetap.

- IT Operation
  Mampu secara signifikan meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan dengan memperkenalkan ITSM modern.

- Banking Terminal
  Mampu memecahkan masalah produktivitas saat ini dengan memperkenalkan sistem terminal terintegrasi dengan UI/UX yang ditingkatkan dan kegunaan yang memiliki fitur single sign on.

- Credit Card
  Mampu menarik nasabah kaya dengan meningkatkan fungsi kartu usang melalui peningkatan lisensi, integrasi dengan core banking baru dan menyediakan layanan kartu kredit digital baru.

- Digital Contact Center
  Dapat mendukung pelanggan dengan cara yang hemat biaya melalui integrasi sistem menggunakan API dengan pusat kontak digital profesional Indonesia di era digital.

- Anti Money Laundering (AML) / Fraud Detection System (FDS)
  Secara signifikan mengurangi risiko penalti dan reputasi besar dengan memperkenalkan sistem *respons* kepatuhan yang gesit dan implementasi sistem pemantauan penipuan.

- Infrastructure Software
  Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan perbankan melalui modernisasi perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur.

- Enterprise Authentication
  Sistem otentikasi baru berdasarkan berbagai biometrik seperti sidik jari, iris mata atau pengenalan wajah disediakan.

Peningkatan Arsitektur Aplikasi

- KBStar
  a. Layanan untuk pelanggan asing yang sudah ada yang ingin membuka akun tambahan.
  b. Integrasi dengan produk *e-wallet* lainnya memudahkan nasabah untuk melihat saldo *e-wallet* dan top up.
  c. Pilihan pembayaran ke *merchant* menggunakan teknologi NFC di hp yang langsung terkoneksi dengan rekening melalui KBstar.
  d. Layanan pembelian produk asuransi oleh nasabah melalui KBstar.
  e. Layanan pembelian produk investasi bagi nasabah melalui KBstar.
  f. Kelola kartu debit dan kredit pelanggan melalui KBstar seperti mengganti pin, memblokir kartu, dan membuka blokir hingga permintaan kartu baru.
  g. Fitur memberikan keuntungan kepada pelanggan dengan konsep *game-like* yang membuat pelanggan tertarik untuk mendapatkan poin atau hadiah dari Kbstar.

- Corporate Internet Banking
  a. Pembukaan deposito berjangka *online* untuk nasabah korporasi
  b. Pengajuan pinjaman untuk nasabah korporasi
  c. Mengelola kartu debit dan kredit nasabah melalui internet banking korporasi seperti pemblokiran kartu dan pembukaan blokir hingga permintaan kartu baru

- New Bukopinet
  a. Fitur pembayaran dan pembelian yang memungkinkan agen dapat melakukan transaksi untuk pelanggan mereka.
  b. Layanan pengiriman uang oleh pelanggan melalui agen ke agen lain sehingga penerima dapat mengambil di agen tujuan.

- Open API implementation
  a. Menyediakan layanan API perbankan yang dapat diakses oleh pihak ketiga.
  b. Meningkatkan peluang kerjasama dengan banyak pihak, seperti fintech, dll.

- Robotic Processing Automation (RPA)
  a. Alat bantu untuk melakukan otomasi terhadap proses-proses sederhana yang sebelumnya dilakukan secara manual.
  b. Teknologi perangkat lunak dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis berulang dan sederhana yang biasanya tindakan tersebut dilakukan oleh manusia.
  c. Kegiatan perumusan dan implementasi *Robotic Processing Automation* (RPA) untuk mendukung operasional banking.

- Project Management Tools
  a. Alat bantu untuk meningkatkan transparansi progress proyek, komunikasi antar project team member dalam melaksanakan Proyek TI dan upaya terhadap mitigasi berbagai risiko proyek dan penanganan isu proyek secara tersentralisasi.
  b. Alat bantu untuk melakukan manajemen sumber daya termasuk di dalamnya simplifikasi proses pelaporan proyek yang terintegrasi dan sentralisasi data proyek yang dapat membantu manajemen dalam mengambil berbagai keputusan strategis yang dibutuhkan.

- Expandable Public Cloud
  a. Memudahkan user/bank untuk menjalankan aplikasi/ program tanpa harus menginstall aplikasi terlebih dahulu sehingga pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses data dan informasi melalui internet.
  b. Kemudahan yang ditawarkan oleh *public cloud* bagi perusahaan tidak perlu menyimpan data pada hardware yang tentunya memiliki kapasitas yang terbatas dan memerlukan biaya tambahan jika sudah penuh.

Peningkatan Arsitektur Keamanan & Cyber Security

- Keamanan Administratif
  a. Organisasi Keamanan yang sistematis dan pendefinisian peran serta distribusi tenaga ahli.
  b. Pelatihan *Security Incident and Response* untuk tenaga ahli secara regular.
  c. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi (IT *Security Awareness*) bagi eksekutif dan karyawan dan melakukan pelatihan regular.
  d. Penerapan/Implementasi pedoman keamanan sistem informasi yang sistematis.

- Keamanan Fisik
  a. Implementasi sistem kontrol media penyimpanan di kantor dan fasilitas pemeliharaan keamanan, serta fasilitas pengarsipan media eksternal penyimpanan.
  b. Pembuatan keamanan dokumen PC untuk mencegah kebocoran rahasia.
  c. Membuat manajemen patch keamanan PC, untuk patch dan pembaruan keamanan terbaru.
  d. Implementasi sistem pemblokiran Software ilegal untuk mengidentifikasi aset perangkat lunak (*Software Maintenance*).

- Keamanan Teknologi
  a. Sistem deteksi untuk memantau aktivitas mencurigakan dalam *traffic* jaringan.
  b. Sistem pemblokiran situs berbahaya untuk memblokir akses ke situs yang mendistribusikan kode dan situs berbahaya yang dapat membocorkan informasi internal
  c. Sistem kontrol akses untuk mengontrol akses jaringan dengan memeriksa *Security Policy* sebelum mengakses jaringan internal.
  d. Menerapkan *web firewall* untuk melindungi aplikasi web.
  e. Sistem DDoS untuk merespons serangan DDoS.
  f. Implementasi *Threat Management System* (TMS) untuk melindungi aset informasi internal dari berbagai *threats*.
  g. *Source Code and Repository Management* yang terintegrasi untuk mengelola change point seperti dokumen, *blueprint*, dan *source code*.
  h. Sistem manajemen otentikasi terintegrasi untuk Single Sign On (SSO).
  i. Sistem deteksi pemalsuan aplikasi *mobile* untuk memblokir perubahan ilegal pada aplikasi *mobile*.
  j. Sistem analisis weblog untuk peningkatan kesalahan sistem dan keamanan.
  k. Log audit terintegrasi untuk merekam jenis akses seperti pengguna dan objek.
  l. Sistem kontrol akses basisdata untuk mengontrol akses basisdata pengguna berdasarkan otoritas.
  m. Sistem enkripsi basisdata untuk melindungi dari intrusi eksternal basis data, kesalahan *authorize* pengguna internal, dan akses berbahaya.

Disaster Recovery

Kebijakan Manajemen Kelangsungan Teknologi Informasi memberikan pedoman umum pelaksanaan IT Service Continuity Management (ITSCM) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan IT Strategic Plan KB Bank. Ruang lingkup kebijakan tersebut yaitu:

1. Kebijakan Umum.
2. Kebijakan Business Impact Analysis.
3. Kebijakan Risk Assessmen.
4. Kebijakan Disaster Recovery.
5. Kebijakan Sarana Disaster Recovery Center .
6. Kebijakan Uji Coba.
7. Kebijakan Pelatihan dan Awareness.
8. Kebijakan Review dan Audit.
9. Kebijakan Penyedia Jasa DRC Pihak Ketiga.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Sejalan dengan meningkatnya peranan teknologi informasi bagi Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal ini membuat Teknologi Informasi tidak hanya berperan sebagai alat pendukung melainkan dapat menjadi elemen utama atau pendorong bagi Bank untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk itu, KB Bank telah menyusun rencana pengembangan Teknologi Informasi yang menyelaraskan dengan rencana bisnis bank dengan mengedepankan inovasi dan digitalisasi. Rencana pengembangan Teknologi Informasi ke depan adalah sebagai berikut:

ROADMAP TI

2024 Penyelesaian SHINE Project	2025 Memperkuat Kemampuan Pengoperasian Sistem Secara Mandiri	2026 Memaksimalkan Pengembangan In-house
• Pengoperasian Sistem Proyek SHINE. • Stabilisasi sistem SHINE. • Meminimalkan pengembangan di luar proyek SHINE, kecuali untuk kebutuhan regulasi, audit, dan pemenuhan kebutuhan strategis.	• Memperkuat kemampuan pengoperasian sistem dengan memprioritaskan pelatihan reguler dan program pendidikan kepada karyawan. • Meningkatkan proses operasi sistem untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja. • Otomatisasi tugas-tugas pengoperasian sistem untuk meningkatkan produktivitas.	• Mempercepat inovasi bisnis dengan kemampuan teknologi kami yang sudah terakumulasi. • Meningkatkan kolaborasi dengan mitra pihak ketiga melalui open system. • Membangun ekosistem untuk memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*.



6

Tata Kelola Perusahaan



Perkembangan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik



PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT Bank KB Bukopin Tbk memprioritaskan pengembangan dan peningkatan budaya perusahaan yang kondusif sebagai upaya untuk memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh lingkungan perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan manajemen tingkat atas, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.

Bagi Bank, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan faktor yang sangat penting dalam memegang kepercayaan pemegang saham dan nasabah, peningkatan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, industri perbankan nasional, dan *stakeholder*. Terutama seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan nasional.

Bank meyakini bahwa kunci utama untuk mempertahankan keberlangsungan pertumbuhan bank tidak hanya pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah, tetapi juga pada penerapan pengelolaan kinerja yang efektif dan menerapkan prinsip dasar GCG, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan prinsip dasar GCG dituangkan dalam nilai-nilai budaya Bank yang disebut ICCAN yaitu *Integrity, Competent, Care, Accountable, Never Give Up* yang menjadi panduan bagi manajemen dan karyawan dalam bekerja dan berperilaku. Budaya perusahaan tersebut diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai dengan norma. Dengan pendekatan tersebut selain tertuang dalam kebijakan dan prosedur juga menjadi suatu disiplin (*soft skills*) yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Bank mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:

1. *Governance Structure*, bertujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
2. *Governance Process* bertujuan agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan *output* yang memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas.

Langkah-langkah ini menggarisbawahi tekad KB Bank untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dan setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip etika, integritas, dan kepatuhan hukum, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan GCG di KB Bank mengacu kepada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator antara lain:

Undang Undang:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan terbatas

Peraturan OJK:
1. POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
5. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
6. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
7. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
8. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan & Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
9. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan & Pedoman Piagam Unit Audit Internal
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
13. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
14. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
15. POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
16. POJK N0. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
17. POJK NO. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan
18. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Surat Edaran OJK:
1. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
2. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
3. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
4. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
5. SEOJK No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
6. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

Lainnya:
1. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pasar Modal dan lainnya
2. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
3. Anggaran Dasar KB Bank

Aktualisasi GCG sebagai budaya dilakukan melalui proses internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Interaksi tersebut membentuk budaya kerja yang positif dan dapat memberikan keunggulan bersaing Bank.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

KB Bank memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan harian. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku serta keterbukaan terhadap perbaikan sesuai dengan praktik terbaik. Tujuannya adalah agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan KB Bank, serta mampu tumbuh secara sehat dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

GCG ditempatkan sebagai fondasi penting dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, dengan memperkuat struktur dan mekanisme GCG serta menerapkan nilai-nilai budaya KB Bank, yaitu ICCAN (*Integrity, Competent, Care, Accountable, Never Give Up)* yang menjadi panduan bagi manajemen dan karyawan dalam bekerja dan berperilaku.

Komitmennya tercermin dalam penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Gratifikasi serta Anti Suap. Dalam Pakta Integritas berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan KB Bank.

Komitmen Dewan Komisaris

Isi pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS

PT. BANK KB BUKOPIN TBK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik Bank KB Bukopin dan memahami kewajiban sebagai Komisaris untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang tertuang di dalamnya, termasuk segala bentuk perubahan yang dibuat oleh Bank KB Bukopin.

Maka saya berjanji dan menyatakan bersedia untuk :

1. Mengawali setiap pekerjaan dengan niat baik dan semata–mata bekerja untuk kepentingan Perusahaan serta tidak merugikan orang lain dan Stakeholders, yang dilandasi keikhlasan dan tulus.
2. Memelihara dan meningkatkan Integritas diri dalam melaksanakan tugas dengan tidak menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab kerja.
3. Mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan internal Perusahaan.
4. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan serta melaporkan/menyampaikan informasi tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Perusahaan.
5. Tidak meminta dan/atau menerima segala bentuk pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung berupa Uang dan/atau Hadiah dan/atau Cinderamata dan/atau Gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Jabatan dan Pekerjaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
6. Menyampaikan informasi kepada *Whistleblowing* yaitu tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
7. Menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Perusahaan, mengganti kerugian yang ditimbulkan atas tindakan *Fraud* yang terjadi, maupun konsekuensi hukum baik dari Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Otoritas lainnya.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan pemahaman tanpa paksaan dari pihak manapun.

(tempat),(tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan,

Nama

(Jabatan)

Komitmen Direksi

Isi pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS

PT. BANK KB BUKOPIN TBK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik Bank KB Bukopin dan memahami kewajiban sebagai Direktur untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang tertuang di dalamnya, termasuk segala bentuk perubahan yang dibuat oleh Bank KB Bukopin.

Maka saya berjanji dan menyatakan bersedia untuk :

1. Mengawali setiap pekerjaan dengan niat baik dan semata–mata bekerja untuk kepentingan Perusahaan serta tidak merugikan orang lain dan *Stakeholders*, yang dilandasi keikhlasan dan tulus.
2. Memelihara dan meningkatkan Integritas diri dalam melaksanakan tugas dengan tidak menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab kerja.
3. Mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik, Budaya Perusahaan, Peraturan Disiplin Karyawan, Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan serta melaporkan/menyampaikan informasi tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Perusahaan.
5. Tidak meminta dan/atau menerima segala bentuk pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung berupa Uang dan/atau Hadiah dan/atau Cinderamata dan/atau Gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Jabatan dan Pekerjaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
6. Menyampaikan informasi kepada *Whistleblowing System* yaitu tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
7. Memahami dan berperan aktif dalam menjalankan Strategi Perusahaan.
8. Menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Perusahaan, mengganti kerugian yang ditimbulkan atas tindakan *Fraud* yang terjadi, maupun konsekuensi hukum baik dari Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Otoritas lainnya.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan pemahaman tanpa paksaan dari pihak manapun.

(tempat),(tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan,

Nama

(Jabatan)

Komitmen Karyawan KB Bank



Isi pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS
PT. BANK KB BUKOPIN TBK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik Bank KB Bukopin dan memahami kewajiban sebagai karyawan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang tertuang di dalamnya, termasuk segala bentuk perubahan yang dibuat oleh Bank KB Bukopin.

Maka saya berjanji dan menyatakan bersedia untuk :

1. Mengawali setiap pekerjaan dengan niat baik dan semata–mata bekerja untuk kepentingan Perusahaan serta tidak merugikan orang lain dan Stakeholders, yang dilandasi keikhlasan dan tulus.
2. Memelihara dan meningkatkan Integritas diri dalam melaksanakan tugas dengan tidak menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab kerja.
3. Mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik, Budaya Perusahaan, Peraturan Disiplin Karyawan, Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan serta melaporkan/menyampaikan informasi tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Perusahaan.
5. Tidak meminta dan/atau menerima segala bentuk pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung berupa Uang dan/atau Hadiah dan/atau Cinderamata dan/atau Gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Jabatan dan Pekerjaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
6. Menyampaikan informasi kepada *Wistleblowing System* yaitu tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
7. Memahami dan berperan aktif dalam menjalankan Strategi Perusahaan.
8. Menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Perusahaan, mengganti kerugian yang ditimbulkan atas tindakan *Fraud* yang terjadi, maupun konsekuensi hukum baik dari Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Otoritas lainnya.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan pemahaman tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., ...2023

Yang membuat pernyataan,

Nama :
NIP :

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *GOVERNANCE OUTCOME*

KB Bank menganggap penting untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memberikan layanan unggul kepada nasabah dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG ini berakar pada perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Bank mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) terbaru, yaitu PUGKI 2021, yang mengembangkan nilai dasar TARIF. KB Bank memastikan implementasi prinsip GCG tersebut dalam semua aspek operasional dan keputusan perusahaan, termasuk budaya perusahaan, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Dengan pendekatan ini, KB Bank bertujuan untuk memperkuat fondasi keberlanjutan bisnis, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, dan mempertahankan reputasi sebagai institusi keuangan yang integritasnya terjaga.

Berikut adalah 4 (empat) pilar governansi korporat yang menjadi pedoman KB Bank dalam pengelolaan Perusahaan:

Perilaku Beretika
Definisi Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. **Penerapan di lingkup Perusahaan** Segenap jajaran di KB Bank , mulai dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan menjunjung tinggi komitmen terhadap Kode Etik. Perwujudan dari komitmen tersebut adalah menjunjung tinggi kepatuhan dan ketaatan pada peraturan , perundang-undangan yang berlaku. Selain itu mengikuti budaya perusahaan yaitu *Integrity, Competent, are, Accountable, Never Give Up* dalam pelaksanaan pekerjaan.
Akuntabilitas
Definisi Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. **Penerapan di lingkup Perusahaan** Segenap jajaran di KB Bank, mulai dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan dalam melaksanakan tugas wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan garis kewenangan yang ditetapkan perseroan, dengan meningkatkan aspek tata kelola melalui partisipasi pemangku kepentingan dengan mencakup semua aspek penting dalam perusahaan.
Transparansi
Definisi Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. **Penerapan di lingkup Perusahaan** Berkomunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan. Serta pelaksanaan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu.
Keberlanjutan
Definisi Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. **Penerapan di lingkup Perusahaan** KB Bank memiliki komitmen yang kuat untuk membangun komunikasi secara jujur dan terbuka dengan pemegang saham dan masyarakat, antara lain dengan menghormati budaya masyarakat, melibatkan diri dalam aktivitas sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama.

Selain menerapkan 4 pilar utama governansi korporat, KB Bank juga mengadopsi 8 prinsip governansi korporat yang komprehensif. Prinsip-prinsip ini mencakup hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga memperhatikan aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan.

Kedelapan prinsip governansi korporat tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok:

1. Fungsi Pengurusan dan Pengawasan Korporasi
   Prinsip-prinsip ini mengatur peran dan tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris. Fokus utamanya adalah pada mekanisme pengambilan keputusan, pemantauan, dan pengawasan atas kegiatan korporasi.

2. Proses dan Keluaran dari Direksi dan Dewan Komisaris
   Kelompok prinsip ini mengatur proses-proses yang digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan serta hasil yang dihasilkan dari proses tersebut. Ini termasuk kriteria evaluasi kinerja, perencanaan strategis, dan pelaporan keuangan yang transparan.
3. Pemilik Sumberdaya
   Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya akan menerima manfaat dari penerapan governansi korporat. Ini melibatkan hak-hak pemegang saham, perlindungan kepentingan pemangku kepentingan, dan alokasi dividen yang adil.

Dengan menerapkan kedelapan prinsip ini, KB Bank bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan korporasi dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kuat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini juga membantu bank dalam membangun kepercayaan dan menjaga reputasi yang baik di mata para pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.

Berikut adalah 8 (delapan) prinsip governansi korporat dan penerapannya di lingkup Perusahaan, sebagaimana terlampir di bawah ini.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi
Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Penjelasan
Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Penjelasan

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.

Penjelasan
Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.

Prinsip 4: Perilaku Etis

Definisi
Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Penjelasan
Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Definisi
Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.

Penjelasan
Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi
Definisi Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. **Penjelasan** Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.
Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham
Definisi Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. **Penjelasan** Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.
Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan
Definisi Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial. **Penjelasan** Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

GOVERNANCE FRAMEWORK

Bank mengimplementasikan 4 pilar governansi korporat tersebut secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:

1. Struktur tata kelola (*governance structure*) *Governance structure* menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite, dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Proses Tata Kelola (*governance process*) *Governance process* mencerminkan efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan, struktur dan infrastruktur tata Kelola Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola (*governance outcome*) *Governance outcome* ditunjukkan dengan kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

GOVERNANCE OUTCOME

Sebagai dampak positif dari manifestasi penerapan dan penegakan tata kelola terhadap penciptaan budaya kerja dan keberlangsungan usaha, Bank senantiasa menjaga kepercayaan dari pemegang saham pengendali dan pihak eksternal. Hal tersebut diwujudkan dengan hasil penerapan *good corporate governance* di KB Bank secara umum adalah Baik sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Di tahun 2023, peringkat GCG KB Bank berdasarkan *self assessment* adalah Peringkat 2 (dua).

STANDAR KUALITAS PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE*

KB Bank mengimplementasikan standar penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengintegrasikan visi dan misi perusahaan yang diwujudkan melalui Nilai-nilai Budaya Perseroan, yang dikenal sebagai ICCAN (*Integrity, Competent, Care, Accountable, & Never Give Up*). ICCAN menjadi panduan bagi seluruh level manajemen dan karyawan dalam menjalankan tugas dan berperilaku.

Penerapan GCG dianggap sebagai proses jangka panjang yang bertujuan untuk menghasilkan nilai berkelanjutan. GCG menjadi budaya yang ditanamkan melalui proses internal yang melibatkan seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.

Standar penerapan GCG mengatur peran Dewan Komisaris

dalam menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan kepengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab menjalankan fungsi kepengurusan secara amanah dan profesional, serta menghindari konflik kepentingan. Seluruh organ GCG bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, sebagai entitas usaha yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diawasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, standar implementasi GCG di KB Bank juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk lebih meningkatkan kualitas penerapan GCG, KB Bank juga melakukan penelaahan dan penyelarasan terhadap praktik-praktik terbaik yang berlaku secara global, antara lain:
1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *Stated Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
2. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia;
3. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision; dan
4. ESG atau *Environment, Social, and Governance*.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berstandar nasional maupun internasional tersebut ke dalam kebijakan internal KB Bank merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh insan KB Bank. Komitmen ini diwujudkan ke dalam visi, misi dan tata nilai Perseroan dan diharapkan menyatu ke dalam perilaku sehari-hari seluruh insan KB Bank.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

KB Bank secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tercermin dari peningkatan *governance outcome* dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tampak dalam kinerja operasional dan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan sebagai hasil dari implementasi GCG.

Untuk menjaga konsistensi ini, Bank melakukan pengukuran kualitas implementasi GCG secara rutin, baik melalui *self-assessment* maupun kerja sama dengan pihak ketiga, guna mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen. Adapun Implementasi *monitoring* pelaksanaan GCG dilakukan dengan:
1. *Monitoring* pelaksanaan rekomendasi SEOJK kepada seluruh unit kerja terkait.
2. Melakukan *reminder* penerapan GCG ke seluruh unit kerja terkait.
3. Meningkatkan sosialisasi dengan *Compliance Awareness* (kesadaran kepatuhan) yang dimaksud adalah kesadaran bahwa adanya peraturan oleh seluruh pihak berikut pemahaman akan peraturan.

SELF ASSESSMENT GCG

Bank menerapkan standar Kualitas Implementasi GCG, antara lain sebagai berikut:
1. Memastikan pelaksanaan prinsip dasar tata Kelola diimplementasikan dengan komprehensif.
2. Melakukan monitoring atas kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaan GCG.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada departemen/unit terkait untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan GCG.
4. Meningkatkan kualitas dan peran organ dalam organisasi GCG untuk menerapkan Budaya pelaksanaan GGC ke seluruh jenjang organisasi.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG dan dengan berlandaskan kepada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.; Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif setiap semester agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang meliputi tindakan korektif (bila diperlukan) dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Berikut adalah hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG di KB

Bank per posisi Desember tahun 2023:

	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	KB Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Dengan demikian, peringkat GCG KB Bank adalah Peringkat 2.
konsolidasi	2	Penerapan *good corporate* governance KB Bank secara konsolidasi adalah Baik, penilaian GCG PT KB Bank Syariah Bukopin dan PT KB Bukopin Finance sebagai Perusahaan Anak belum memiliki dampak atau pengaruh signifikan yang dapat menyebabkan penurunan terhadap penilaian GCG Bank KB Bukopin.

ANALISIS

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola KB Bank dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Anggota Dewan Komisaris seluruhnya telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
2. Anggota Direksi seluruhnya telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
3. Fungsi dan pelaksanaan tugas komite berjalan dengan baik.
4. Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan kepada OJK secara periodik.
6. Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern telah tercantum dalam Laporan Tahunan.
7. Akuntan Publik bekerja secara independen dan obyektif dalam melaksanakan audit.
8. Bank telah menerapkan manajemen risiko melalui struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Berdasarkan analisis profil risiko, risiko yang dihadapi Bank tergolong *low to moderate*.
9. Pada posisi Desember 2023 tidak terjadi pelampauan BMPK.
10. Laporan Tahunan dan Laporan Triwulanan telah disampaikan secara tepat waktu.
11. Penyampaian RBB telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Pada Tahun 2023, berdasarkan temuan dan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, penerapan *good corporate governance* di KB Bank secara umum adalah "BAIK", sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *good corporate governance* secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Dengan demikian, peringkat GCG KB Bank adalah Peringkat 2 (dua).

Rating Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank mencerminkan hasil penilaian kondisi Perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based bank rating*) yang mencakup empat faktor yaitu:
1. Profil Risiko;
2. *Good Corporate Governance*;
3. Rentabilitas;
4. Permodalan.

Laporan profil risiko merupakan salah satu *factor* dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan disusun secara *self assessment* dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based Bank rating*), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dari hasil *self assessment* profil risiko triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk posisi Desember 2023, peringkat risiko komposit Bank secara keseluruhan berada pada tingkat *low to moderate* (P2).

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015, terdapat 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Rekomendasi ini adalah standar yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan praktik Tata Kelola Perusahaan yang efektif dan terintegrasi.

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
I	**Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham**			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	Bank mengatur mekanisme atau prosedur pengumpulan suara pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham sesuai dengan POJK Rapat Umum Pemegang Saham	Terpenuhi
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan, maupun tatap muka dan/ atau melalui *video conference*	Terpenuhi
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Bank telah menyediakan risalah RUPS pada situs *web* di bagian Hubungan Investor	Terpenuhi
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Bank mempunyai sarana komunikasi khusus untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berupa *e-mail* sekretaris perusahaan dan hubungan investor	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau *investor* dalam Situs *Web*	Bank telah menyantumkan *e-mail* sekretaris perusahaan dan hubungan investor pada situs *web* sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan.	Terpenuhi
II	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Perusahaan menentukan jumlah Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan POJK Tata Kelola dan Peraturan lain yang berlaku	Terpenuhi
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Perusahaan menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai POJK Tata Kelola dan Peraturan lain yang berlaku.	Terpenuhi
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Perusahaan menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai POJK Tata Kelola dan Peraturan lain yang berlaku.	Terpenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Sesuai dengan Surat Keputusan No. 005 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2021 bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang telah diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Setiap usulan pengangkatan dan atau pergantian anggota Dewan Komisaris/ Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Bukopin tanggal 10 Februari 2017. Dijelaskan di dalam ketentuan bahwa anggota Komisaris/Direksi tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau sektor keuangan.	Terpenuhi

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Umum. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan sebagaimana pada bagian Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
III	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Seluruh anggota direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan observasi terhadap *curriculum vitae* anggota direksi, terlihat bahwa direksi memiliki integritas dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai direksi bank. Hal tersebut salah satunya terungkap dengan adanya rekam jejak jenjang karier yang jelas di Bank dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan maupun sertifikasi.	Terpenuhi
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Laporan keuangan Perseroan disusun dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di indonesia dan telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan.	Terpenuhi
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan observasi terhadap *curriculum vitae* anggota Direksi, terlihat bahwa direksi memiliki integritas dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi Bank. Hal tersebut salah satunya terungkap dengan adanya rekam jejak jenjang karier yang jelas di Bank dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan maupun sertifikasi.	Terpenuhi
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Merujuk Surat Keputusan No.0404 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 bahwa Direksi wajib melakukan Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) melalui sistem penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	*Self Assessment* atas kinerja direksi telah diungkapkan pada bagian penilaian kinerja direksi Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi diatur dalam Surat Keputusan 0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Bukopin tanggal 10 Februari 2017. (*akan diperbaharui sesuai POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	Terpenuhi

No	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Kebijakan terkait *Insider Trading* diatur dalam Surat Keputusan 0056 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT Bank KB Bukopin, Tbk.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*.	KB Bank telah memiliki kebijakan anti fraud dan kebijakan lainnya terkait dengan anti korupsi diantaranya yaitu Surat Keputusan No.0165 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi tanggal 3 Desember 2021	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan vendor melalui Pedoman Kegiatan Operasi. Pedoman tersebut Surat Edaran No.164/DIR/VI/2020 tentang Pedoman Kegiatan Operasi – Pengadaan Barang dan Jasa.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Perusahaan telah memiliki Pedoman *Whistleblowing* melalui Surat Keputusan Nomor 1291 Tahun 2018.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	Surat Keputusan No.0205 Tahun 2023 tentang Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) tanggal 9 November 2023	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Tidak Ada.	Tidak Terpenuhi
V	Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs *Web* sebagai media keterbukaan informasi.	Perusahaan memiliki akun media sosial yaitu Surat Kabar dan Situs *Web* Bursa Efek Indonesia.	Terpenuhi
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	KB Bank setiap bulan melaporkan kepemilikan saham di atas 5% kepada Otoritas Bursa dan telah diungkapkan pada Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi

STRUKTUR DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*

Struktur Tata Kelola Perusahaan KB Bank mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem kepengurusan mengadopsi sistem dua badan (*two-tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, serta tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama, KB Bank didukung oleh organ pendukung, termasuk Komite di bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perseroan, Audit Internal (SKAI), dan Komite Direksi di bawah Direksi.

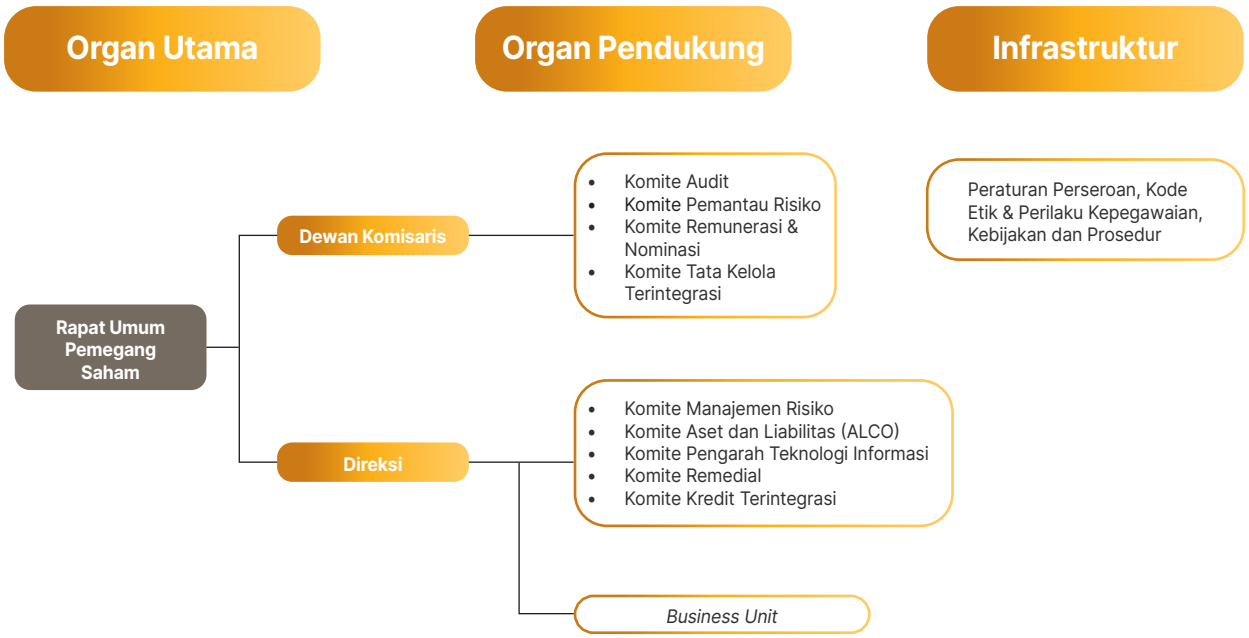
Komite Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi & Nominasi;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di KB Bank, dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Audit Internal (SKAI) dan Komite Direksi, terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO);
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
4. Komite Restrukturisasi Kredit;
5. Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah;
6. Komite Kredit;
7. Komite *Foreign Exchange*;
8. Komite *Support TI*;
9. Komite Pengendalian Internal dan Anti *Fraud*.

STRUKTUR TATA KELOLA KB Bank



Berikut adalah daftar kebijakan dan SOP yang dimiliki oleh KB Bank:

KEBIJAKAN/SOP	KETERANGAN
Pedoman Kode Etik	• Surat Keputusan Direksi No. 0382 Tahun 2020 tentang Kode Etik PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Pemberian Kredit	• Surat Keputusan Direksi No. 0394 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pembatasan Pemberian Kredit PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Komite Pendukung	• Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk • Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Bukopin Tbk • Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Bukopin Tbk • Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Bukopin Tbk
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	• Surat Edaran Direksi No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk
Piagam Audit Intern	• Surat Keputusan Direksi No. 0146 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Manajemen Risiko	• Surat Keputusan Direksi No. 0149 tahun 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Pengelolaan Gratifikasi	• Surat Keputusan No.0165 Tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
Pedoman sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)	• Surat Keputusan No.0205 Tahun 2023 tentang Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS)
Pedoman Lainnya	• Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk • Surat Keputusan Direksi No. 0178 Tahun 2021 tentang Kebijakan Hierarki Ketentuan Internal PT Bank KB Bukopin Tbk

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komitmen KB Bank terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercermin dalam serangkaian kebijakan dan prosedur operasional yang secara konsisten diterapkan dalam seluruh kegiatan sehari-hari. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek dari praktik GCG dipatuhi dengan ketat dan berkelanjutan.

Proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait GCG tidak hanya merupakan suatu kewajiban, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya kerja di KB Bank. Seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah, diarahkan untuk memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Selain diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, kebijakan GCG juga secara berkala di*review* dan dievaluasi untuk memastikan relevansinya dengan kondisi pasar, peraturan perundang-undangan terbaru, serta praktik-praktik terbaik dalam industri perbankan. *Review* ini dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak di KB Bank, sehingga memastikan bahwa kebijakan dan prosedur GCG tetap *up-to-date* dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Selain itu, komitmen terhadap kebijakan GCG tersebut tidak hanya berhenti pada level pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tetapi juga dalam hal komunikasi dan sosialisasi. Kebijakan GCG dikomunikasikan secara luas kepada seluruh elemen organisasi Bank, baik melalui pelatihan, pertemuan, atau media komunikasi internal lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami betapa pentingnya prinsip-prinsip GCG dalam mencapai tujuan-tujuan strategis KB Bank.

Rapat Umum
Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam KB Bank menjabat sebagai forum tertinggi yang dilengkapi dengan hak dan kewenangan khusus, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Fungsi utamanya adalah sebagai medium komunikasi yang efektif antara Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham.

Dalam setiap pelaksanaan RUPS, para pemegang saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas berbagai isu terkait kebijakan, kinerja, dan arah strategis Bank. Hal ini memungkinkan pemegang saham untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang memengaruhi kinerja dan prospek Bank.

Selain sebagai sarana untuk berkomunikasi, RUPS juga menjadi ajang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas manajemen Bank kepada para pemegang saham. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Keseluruhan proses RUPS juga mencerminkan komitmen Bank untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara konsisten, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan berada dalam koridor yang ditetapkan, dan memastikan bahwa kepentingan para pemegang saham dijaga dengan baik.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka;
3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik; dan
4. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pada 31 Desember 2023, komposisi Pemegang Saham KB Bank adalah sebagai berikut:



JENIS RUPS

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS Perseroan:

1. RUPS Tahunan
   RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. RUPS Luar Biasa
   Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

WEWENANG RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. Wewenang RUPS antara lain adalah:

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan.
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik.
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus.
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan.
10. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
12. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
13. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

HAK PEMEGANG SAHAM

Hak pemegang saham sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS;
2. Ikut berpartisipasi dalam mengambil Keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS;
3. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan;
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
4. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan;
5. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sehari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
6. Pertanyaan Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, Pemimpin Rapat akan menjawab atau menanggapinya. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
7. Hak Suara
   a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu hari sebelum tanggal Panggilan atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara;
   b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

KETENTUAN KUORUM

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai maka diadakan panggilan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

KB Bank telah menyampaikan pemberitahuan RUPS kepada OJK, yakni sebagaimana terlampir berikut ini:
1. Surat No. 20870/DIR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Agenda Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan") tanggal 31 Januari 2023.
2. Surat No. 06052/DIR/V/2023 tanggal 8-06-2023 perihal Pemberitahuan Agenda Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan") tanggal 30 Juni 2023.

RUPS TAHUNAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, KB Bank menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2023 dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

Keputusan RUPS Tahunan 2023

Pokok keputusan RUPS Tahunan KB Bank tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan
KB Bank telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS Tahunan kepada OJK pada 15 Mei 2023 sebagaimana dalam surat No.06052/DIR/V/2023	KB Bank telah mengumumkan RUPS Tahunan pada tanggal 24 Mei 2023 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan web penyedia e-RUPS	KB Bank telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Tahunan pada tanggal 8 Juni 2023 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan web penyedia e-RUPS	KB Bank melangsungkan RUPS Tahunan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 bertempat Auditorium Gedung Bank KB Bukopin lantai 3, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah diumumkan pada tanggal 4 Juli 2023 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pengambilan Keputusan

Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	162.558.263.964	100,00000%
Suara tidak setuju	94.900	0,00006%
Suara Abstain	25.300	0,00002%
Suara Setuju	162.558.143.764	99,99992%
Total suara setuju	162.558.169.064	99,99992%

Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No. 00328/2.1051/AU.1/07/1671-2/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja Keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tindak Lanjut/ Realisasi

Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Kedua	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 beserta penetapan honorariumnya.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	162.558.263.964	100,00000%
Suara tidak setuju	20.539.144	0,01264%
Suara Abstain	23.300	0,00001%
Suara Setuju	162.537.701.520	99,98735%
Total suara setuju	162.537.724.820	99,98736%

Keputusan Rapat	1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2023. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 jika diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Tindak Lanjut/ Realisasi	Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	162.558.263.964	100,00000%
Suara tidak setuju	224.766	0,00014%
Suara Abstain	25.300	0,00002%
Suara Setuju	162.558.013.898	99,99984%
Total suara setuju	162.558.039.198	99,99986%

Keputusan Rapat	1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tahun Buku 2023 yaitu tetap sesuai dengan jumlah maksimum nominal paket remunerasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Desember 2020. 2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasi besaran gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Tindak Lanjut/ Realisasi	Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Keempat	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Mengingat Mata Acara Rapat Keempat sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.
Keputusan Rapat	
Tindak Lanjut/ Realisasi	Sudah direalisasikan

RUPS LUAR BIASA

Pada tahun 2023, Bank KB Bukopin menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. serta ketentuan Anggaran Dasar Bank KB Bukopin.

RUPS Luar Biasa 31 Januari 2023

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan
Bank KB Bukopin telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana dalam surat No. 20870/DIR/XII/2022	Bank KB Bukopin telah mengumumkan RUPSLB pada tanggal 23 Desember 2022 di *website* Perseroan, Web Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS	Bank KB Bukopin telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB pada tanggal 9 Januari 2023 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS	Bank KB Bukopin melangsungkan RUPSLB pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 bertempat di Auditorium Gedung Bank KB Bukopin Lantai 3 Jl. MT Haryono Kav 50- 51 Jakarta Selatan	Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 2 Februari 2023 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS

Mata Acara RUPS LB	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara Yang Hadir	47.088.618.716	100,000
Suara Tidak Setuju	60.103.680	0,128
Suara Abstain	1.072.111	
Suara Setuju	47.027.442.925	99,870
Total Suara Setuju	47.028.515.036	99,872

Keputusan Rapat	1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan atas Tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindak pidana. 3. Memberikan apresiasi kepada Saudara Jin Bum Kim atas semua hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perseroan yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. 4. Mengangkat Saudara Jung Ho Han sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025. 5. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama — Jerry Marmen Wakil Komisaris Utama — Nam Hoon Cho Komisaris — Nanang Supriyatno Komisaris Independen — Tippy Joesoef Komisaris Independen — Hae Wang Lee Komisaris Independen — Stephen Liestyo Komisaris Independen — Sukriansyah S. Latief Komisaris Independen — Eugene K. Galbraith Direksi Direktur Utama — Woo Yeul Lee Wakil Direktur Utama — Robby Mondong Direktur — Helmi Fahrudin Direktur — Dodi Widjajanto Direktur — Seng Hyup Shin Direktur — Yohanes Suhardi Direktur — Henry Sawali Direktur — Young Eun Moon**) Direktur — Jung Ho Han**) **) Dengan ketentuan bahwa Saudara Young Eun Moon, dan Saudara Jung Ho Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 6. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan
Tindak Lanjut/ Realisasi	Sdr. Jung Ho Han, Sdr. Wong Eung Moon telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2022, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 25 Mei 2022 dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Maret 2022, 24 Agustus 2022 dan 30 November 2022 dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

RUPS TAHUNAN 2022

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022, bertempat di Auditorium Gedung Bank KB Bukopin Lantai 3, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770.

No	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No. 00298/2.1051/AU.07/1671-1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindak pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Sudah direalisasikan
2.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 beserta penetapan honorariumnya	1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2022. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 jika diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait pembuatan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang diputuskan melalui proses tender sesuai dengan POJK yang berlaku

No	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
3.	Persetujuan penetapan Honorarium, Gaji dan/ atau Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Menyetujui dan menetapkan honorarium, gaji dan/ atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 adalah tetap atau tidak ada penyesuaian.	Sudah direalisasikan
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") Tahun 2021	Mata Acara Rapat ini tidak mengambil keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan dari Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V) Tahun 2021.	Sudah direalisasikan
5.	Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.	1. Menyetujui penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. 2. Memberi Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud adalah (i) menghapus Pasal 3 ayat (2A) Anggaran Dasar Perseroan untuk keseluruhannya dan (ii) penyesuaian Pasal 3 ayat 3, sehingga selengkapnya bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :	Telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Kb Bukopin Tbk No. 29 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, S.H.

No	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
		PASAL 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, b. deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya c. yang dipersamakan dengan itu. d. Memberikan kredit. e. Menerbitkan surat pengakuan hutang. f. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk g. Kepentingan dan atas perintah nasabah: i) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa ii) berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan iii) surat- surat dimaksud. iv) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya v) tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. vi) Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah. vii) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). viii) Obligasi. ix) Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. x) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan xi) PeraturanPerundang-undangan. h. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. i. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada j. Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. m. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. n. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuksurat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. o. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. p. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat. q. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing. r. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.	

No	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
		s. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. t. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku. u. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya. v. Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut : a. Bank Umum Konvensional; b. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional; c. Perantara Moneter Lainnya; d. Perusahaan Pembiayaan Konvensional; e. Pembiayaan Kartu Kredit; f. Perusahaan Modal Ventura Konvensional; g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional; h. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; i. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun; j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional; k. Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek; l. Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka; m. Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik; n. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang Dan Pasar ValutaAsing; o. Kustodian (*Custodian*); p. Wali Amanat (*Trustee*); q. Aktivitas Agen Asuransi. Serta kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.	

No	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
6.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak tanggal 25 Mei 2022 disertai dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. 2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi atas semua hasil kerja yang dicapai, yang besarannya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Perseroan termasuk apabila menurut pertimbangan Dewan Komisaris dapat diberikan apresiasi lainnya, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 3. Mengusulkan untuk mengangkat Sdr. Woo Yeul Lee sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. 4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. 5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** 1. Komisaris Utama : Jerry Marmen*) 2. Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho 3. Komisaris : Nanang Supriyatno 4. Komisaris Independen : Tippy Joesoef 5. Komisaris Independen : Hae Wang Lee 6. Komisaris Independen : Stephen Liestyo 7. Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief, SH. MH.*) 8. Komisaris Independen : Eugene K. Galbraith**) *) Untuk Saudara Jerry Marmen, saudara dan saudara Sukriansyah S. Latief terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan. **) Untuk Saudara Eugene K. Galbraith terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. **Direksi** 1. Direktur Utama : Woo Yeul Lee**) 2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong 3. Direktur : Helmi Fahrudin, SE. 4. Direktur : Dodi Widjajanto 5. Direktur : Seng Hyup Shin 6. Direktur : Yohanes Suhardi 7. Direktur : Iwan Dharmawan*) 8. Direktur : Henry Sawali* 9. Direktur : Jin Bum Kim**) * Untuk Saudara Iwan Dharmawan dan Saudara Henry Sawali terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan. ** Untuk Saudara Woo Yeul Lee dan Saudara Jin Bum Kim terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku	Sdr. Woo Yeul Lee, Sdr. Henry Sawali, Sdr Jin Bum Kim telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and Proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, sementara Sdr. Iwan Dharmawan teleh efektif mengundurkan Diri pada tanggal 24 Agustus 2022

RUPS LUAR BIASA 2022

Pada tahun 2022, KB Bank menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022, 24 Agustus 2022 dan 30 November 2022 dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

No.	Rapat	Keputusan	Realisasi
1.	RUPSLB **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Auditorium Gedung Bank KB Bukopin Lantai 3 Jl. MT Haryono Kav 50- 51 Jakarta Selatan	1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 27 Januari 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. 2. Memberikan apresiasi kepada Saudara Ji Kyu Jang atas semua hasil kerja yang dicapai, yang besarannya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Perseroan termasuk apabila menurut pertimbangan Dewan Komisaris dapat diberikan apresiasi lainnya, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 3. Mengusulkan untuk mengangkat Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. 4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. 5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** 1. Komisaris Utama : Jerry Marmen* 2. Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho** 3. Komisaris : Nanang Supriyatno* 4. Komisaris Independen : Tippy Joesoef 5. Komisaris Independen : Hae Wang Lee** 6. Komisaris Independen : Stephen Liestyo 7. Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief* 8. Komisaris Independen : Eugene K. Galbraith** *) Untuk Saudara Jerry Marmen, Saudara Nanang Supriyatno dan Saudara Sukriansyah S. Latief terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan. **) Untuk Saudara Nam Hoon Cho, Saudara Hae Wang Lee dan Saudara Eugene K. Galbraith terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. **Direksi** 1. Direktur Utama : Chang Su Choi 2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong* 3. Direktur : Helmi Fakhrudin 4. Direktur : Dodi Widjajanto*** 5. Direktur : Seng Hyup Shin 6. Direktur : Yohanes Suhardi 7. Direktur : Iwan Dharmawan* 8. Direktur : Henry Sawali* 9. Direktur : Jin Bum Kim** * Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. ** Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. *** Efektif sebagai Direktur Kepatuhan sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Sdr. Jerry Marmen, Sdr. Nam Hoon Cho, Sdr. Nanang Supriyatno, Sdr. Hae Wang Lee, Sdr. Sukriansyah S. Latief, Sdr. Eugene K. Galbraith, Sdr. Robby Mondong, Sdr. Dodi Widjajanto, Sdr. Henry Sawali, Sdr Jin Bum Kim telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and Proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, sementara Sdr. Iwan Dharmawan telah efektif mengundurkan Diri pada tanggal 24 Agustus 2022

No.	Rapat	Keputusan	Realisasi
2	RUPSLB **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di Auditorium Gedung Bank KB Bukopin Lantai 3 Jl. MT Haryono Kav 50- 51 Jakarta Selatan	1. Mengusulkan untuk mengangkat Saudara Young Eun Moon sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. 2. Pembatalan pengangkatan dan menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 24 Agustus 2022 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Saudara Iwan Dharmawan sebagai Direktur Manajemen Risiko atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. 4. Memberikan apresiasi kepada Saudara Iwan Dharmawan atas semua hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perusahaan yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** 1. Komisaris Utama : Jerry Marmen* 2. Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho 3. Komisaris : Nanang Supriyatno 4. Komisaris Independen : Tippy Joesoef 5. Komisaris Independen : Hae Wang Lee 6. Komisaris Independen : Stephen Liestyo 7. Komisaris Independen : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH.MH 8. Komisaris Independen : Eugene K. Galbraith *) Untuk Saudara Jerry Marmen, terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan. **Direksi** 1. Direktur Utama : Woo Yeul Lee**) 2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong 3. Direktur : Helmi Fahrudin 4. Direktur : Dodi Widjajanto 5. Direktur : Seng Hyup Shin 6. Direktur : Yohanes Suhardi 7. Direktur : Henry Sawali 8. Direktur : Jin Bum Kim**) 9. Direktur : Young Eun Moon**) ** Untuk Saudara Woo Yeul Lee, Saudara Jin Bum Kim, dan Saudara young Eun Moon terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/ POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.	Sdr. Jerry Marmen, Sdr. Woo Yeul Lee, Sdr Jin Bum Kim telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan, sementara Sdr. Young Eun Moon dalam Proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan

No.	Rapat	Keputusan	Realisasi
3	RUPSLB **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 bertempat di Auditorium Gedung Bank KB Bukopin Lantai 3 Jl. MT Haryono Kav 50- 51 Jakarta Selatan	**Mata Acara Rapat Pertama :** 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perorangan tentang Modal, terkait dengan penambahan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp.13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp.21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah). 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. **Mata Acara Rapat Pertama :** 1. Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui PUT VII dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK 14/2019. 2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT VII sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham actual (*finish*) yang telah dikeluarkan beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan melalui PUT VII dengan HMETD, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan hal tersebut, meminta persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.	Telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Kb Bukopin Tbk No. 108 tanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan entitas kunci dalam struktur organisasi Bank, bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan Bank secara keseluruhan sesuai dengan Anggaran Dasar. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa Bank menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki peran penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) di semua tingkat organisasi.

Dewan Komisaris KB Bank berperan penting dalam memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan independen dari Dewan Komisaris, Bank dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Ini tidak hanya membantu Bank dalam mencapai tujuan jangka panjangnya, tetapi juga menjaga integritas serta kredibilitas perusahaan secara keseluruhan.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Pedoman Kerja Dewan Komisaris KB Bank.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM DEWAN KOMISARIS

KB Bank telah menyusun pedoman kerja untuk Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk tanggal 05 Agustus 2019. Tujuan penyusunan Pedoman tata kerja Dewan Komisaris agar segala tindakan dan keputusan yang akan diambil dapat diselaraskan dengan pedoman, anggaran dasar dan aturan yang berlaku.

Pedoman berisikan tentang:

1. Pendahuluan berisikan tentang Landasan Hukum;
2. Struktur Dewan Komisaris;
3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
4. Komisaris Independen;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
6. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab;
7. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi;
8. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
9. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris;
10. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan;
11. Transparansi;
12. Penutup.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Kriteria anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      iii) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
8. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
9. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

KETENTUAN MASA JABATAN

Ketentuan masa jabatan di dalam pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diatur bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS sampai dengan penutupan RUPS tahun kelima setelah tahun pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam suatu keputusan RUPS berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Mengundurkan diri;
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2023, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Jerry Marmen	Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Nanang Supriyatno	Komisaris	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Sukriansyah Latief	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 22 Desember 2020	2020-RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris KB Bank mengungkapkan bahwa tidak satupun anggota yang memiliki saham, baik dalam Perseroan atau bahkan pada bank dan perusahaan lainnya sesuai dengan aturan OJK yang tertera dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar saham)			
		Bank KB Bukopin	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Jerry Marmen	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nanang Supriyatno	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
   a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
   b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
   c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Jerry Marmen	Komisaris Utama	• Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan (TRK) • Asisten Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	Kepala Grup Bisnis Global KB Kookmin Bank
Nanang Supriyatno	Komisaris	Direktur Utama PT Satu Gen Indonesia
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	-
Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen	-
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	• Anggota Direksi Asosiasi Korea Indonesia • Direktur Utama LEENOH Consulting Indonesia
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	• Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan • Komite Audit Independen AIA Financial
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen	Direktur PT Sarana Menara Nusantara

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jerry Marmen	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√		√
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama		√		√	√			√		√		√	√	

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nanang Supriyatno	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Stephen Liestyo	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Hae Wang Lee	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√	√	
Tippy Joesoef	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Tippy Joesoef	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√

TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN

Penjabaran mengenai tugas, hak dan kewajiban Dewan Komisaris telah dicantumkan dalam Pedoman kerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan secara keseluruhan. Dewan Komisaris memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan tujuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa semua keputusan Direksi sesuai dengan nilai-nilai perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab serta kehati-hatian;
2. Memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan;
5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Perseroan umum;
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
7. Melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
9. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
10. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
    a. Komite Audit;
    b. Komite Pemantau Risiko;
    c. Komite Remunerasi dan Nominasi;

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
e. Komite Lainnya jika yang diwajibkan oleh peraturan perundangan Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas), wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

13. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas) menjalankan tugas secara efektif;
14. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
15. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 15 (lima belas) apabila dapat membuktikan:
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
16. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
3. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
4. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
5. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
6. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan tindakan pengurus Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris memastikan fokus yang optimal dalam pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Setiap anggota bertanggung jawab pada area spesifik, memastikan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan efisien, serta menciptakan kejelasan tentang peran masing-masing baik secara kolektif maupun individual.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Jerry Marmen	Komisaris Utama	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nanang Supriyatno	Komisaris	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko
Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen	• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris KB Bank selalu mengedepankan prinsip independensi dan menjunjung tinggi kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Prinsip independensi ini menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertindak secara netral dan objektif, tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal ataupun internal yang dapat mengganggu integritas dan kredibilitas keputusan yang diambil.

Dengan mengutamakan kepentingan Bank, Dewan Komisaris memastikan bahwa semua keputusan yang diambil memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan kesinambungan bisnis KB Bank. Dewan Komisaris berkomitmen untuk bertindak secara adil dan transparan dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan menjaga reputasi yang baik dari Bank.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan strategis Bank, antara lain *Corporate Strategy* dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Periode 2023-2025;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2023, pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) serta Kinerja Keuangan bulanan tahun 2023;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023;
4. Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas kredit, restrukturisasi kredit dan investasi di atas limit tertentu serta pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait, yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris KB Bank tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan nasihat aktif kepada Direksi. Dewan Komisaris memastikan keputusan pengawasan dan penasihatan semakin efektif dengan berinteraksi secara teratur dalam rapat formal dan dialog informal dengan seluruh Direksi atau anggota Direksi tertentu. Dengan pemberian nasihat yang berkesinambungan, Dewan Komisaris membantu Direksi merumuskan strategi bisnis yang efektif, mengidentifikasi risiko, dan menjaga agar operasional Bank sesuai standar.

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris yang diantaranya dapat pula mengundang Direksi (RAKOM);
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (RADIRKOM) sebanyak 10 kali. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada Rapat Komite tersebut dapat pula mengundang Direksi atau anggota Direksi.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, benturan kepentingan dijelaskan sebagai situasi di mana kepentingan individu anggota Dewan Komisaris bisa bertentangan dengan kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ini termasuk meningkatkan laba, nilai perusahaan, mencapai visi, menjalankan misi, dan melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengelolaan benturan kepentingan diatur secara ketat dalam pedoman tersebut. Dewan Komisaris diwajibkan untuk menghindari benturan kepentingan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Pihak lain atau inisiatif pribadi yang dapat dikategorikan sebagai upaya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Pihak lain atau inisiatif pribadi yang dapat berpotensi dikategorikan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pengambilan keputusan di mana secara pribadi atau dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung para anggota Direksi mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks dalam kegiatan perbankan, penting bagi Perseroan untuk memiliki pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dalam manajemen risiko. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level	Masa Berlaku
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 1	4 Tahun
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 2	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset 1 hingga 10 T	4	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan *(Refreshment)* secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KB Bank berkomitmen untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komitmen tersebut tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI KOMISARIS BARU

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Perseroan. Ini termasuk pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta proses bisnis yang dijalankan oleh Direksi. Tujuan akhirnya adalah agar Dewan Komisaris dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Dalam program ini, Dewan Komisaris baru akan diperkenalkan dengan operasional Perseroan, visi, dan strategi yang dipimpin oleh Direksi. Mereka juga akan mempelajari kerangka kerja regulasi, kebijakan internal, dan praktik terbaik yang digunakan oleh Perseroan.

Selain itu, Program Pengenalan bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antara Dewan Komisaris dengan Organ Perseroan lainnya. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang Perseroan, Dewan Komisaris dapat berkontribusi secara efektif dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan, serta menjaga keselarasan antara berbagai organ dalam mencapai tujuan bersama.

Program pengenalan Perseroan meliputi:
1. Pengenalan bisnis dan divisi-divisi yang ada di Perseroan;
2. Pengenalan budaya Perseroan;
3. Perseroan mengikutsertakan dalam program training pada bidang yang sesuai dengan pengawasan yang bersangkutan;
4. Penyampaian dokumen Perseroan, diantaranya; Laporan Tahunan, Rencana Bisnis Bank (RBB).

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris, sehingga KB Bank tidak melaksanakan program pengenalan kepada anggota Dewan Komisaris baru.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Terdapat beberapa jenis prosedur penilaian untuk melihat kinerja Dewan Komisaris, dua di antaranya dijabarkan sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS
Setiap tahun, kinerja Dewan Komisaris dinilai dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penilaian dilakukan berdasarkan tugas kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar, serta amanat Pemegang Saham.

Kriteria evaluasi disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi, baik secara keseluruhan maupun individu, menjadi bagian integral dalam skema kompensasi dan insentif Dewan Komisaris. Evaluasi kinerja individu menjadi pertimbangan penting bagi Pemegang Saham dalam mempertimbangkan pemberhentian atau penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris, baik sebagai kolektif maupun individu, digunakan sebagai alat evaluasi dan peningkatan efektivitas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Dewan Komisaris
Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan *Board Manual* serta target-target kinerja Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:
1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada;
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan;
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu;
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan;
5. Pencapaian realisasi program kerja tahunan;
6. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*
Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Untuk Tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris telah menggunakan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tersebut sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan Metode *Self-Assessment* GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Self Assessment* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola Bank.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG untuk kinerja Dewan Komisaris dimulai dari penilaian sendiri kinerja masing-masing anggota dengan pengisian template lembar kinerja dan hasilnya akan diberikan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan untuk dievaluasi dan dijadikan dasar dalam menentukan pemberhentian dan/atau penunjukan kembali keanggotaan Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan komisaris

Self Assessment GCG yang dilakukan menggunakan kriteria SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi;
2. Evaluasi Kompetensi;
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada);
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris;
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu *Compliance Group* sebagai satuan kerja yang melaksanakan penilaian terhadap faktor pelaksanaan GCG di Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Audit

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan Baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaria antara lain:

1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komite Pemantau Risiko

Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan risiko. Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan Baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan Baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komisaris Independen

Komisaris Independen, sebagai anggota Dewan Komisaris, memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional Perseroan. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan finansial, manajemen, kepemilikan saham, atau keluarga dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, atau dengan Bank itu sendiri yang dapat mengganggu independensinya dalam mengambil keputusan.

Pada tahun 2023, KB Bank memiliki 5 (lima) Komisaris Independen, sesuai dengan ketentuan POJK, yang bertugas untuk mengawasi kegiatan Perseroan dengan independen dan menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Melalui kehadiran Komisaris Independen, KB Bank memperkuat komitmen terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Persyaratan diangkatnya anggota Dewan Komisaris Independen minimal sama dengan persyaratan untuk mengangkat Anggota Dewan Komisaris non Independen ditambah dengan beberapa aturan lain dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana berikut ini:

Kriteria	Komisaris Independen				
	Sukriansyah S. Latief	Hae Wang Lee	Tippy Joesoef	Stephen Liestyo	Eugene K. Galbraith
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Pernyataan independensi dari anggota Dewan Komisaris Independen menyatakan diri tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak Perseroan untuk kemudian disampaikan kepada OJK.

Berikut adalah bukti pernyataan Independensi Dewan Komisaris Independen KB Bank:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : [redacted]

Tempat dan Tanggal Lahir : [redacted]

No. KTP : [redacted]

Alamat : [redacted]

bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa :

1. Saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau Pemegang Saham Pengendali (PSP);
2. Saya tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,

[redacted]

Indra Fabrizalin

[redacted]

Bang Hoap Ghin

Jakarta, [redacted] Desember 2021

[redacted]

Sriwiamyati S. Lukiati

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	Hee Wang Lee
Tempat dan Tanggal Lahir	Korea Selatan, 05 Agustus 1956
No. KTP/ Paspor	M8016643
Alamat	Kebayoran Residence, Unit 1/30, Jl. Buni No.10 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa :

1. Berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
2. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Desember 10 , 2021

[redacted]

Hee Wang Lee

STATEMENT LETTER

I, the undersigned :

Name	Hee Wang Lee
Place and Date of Birth	South Korea, 05th August 1956
Passport Number	M8016643
Address	Kebayoran Residence, Unit 1/30, Jl. Buni No.10 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

acting as a prospective member of Independent Commissioner of PT Bank KB Bukopin Tbk, for and on behalf of itself, stating that:

1. Committed to developing sound bank operations and supporting Financial Services Authority policies;
2. Is an independent party to the owner of the bank or controlling shareholders;
3. Have no financial management, share ownership and / or family relationships with other members of the board of commissioners, members of the board of directors and / or controlling shareholders or relationships with the bank, which may affect my ability to act independently.

Thus, this statement I make consciously and without coercion from any party.

Jakarta, December 10 , 2021

Mengetahui/Knowing,

[redacted]

Hee Wang Lee

[redacted]

[redacted]

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yopy Joesoef

Tempat dan Tanggal Lahir : Purwokerto, 01 Oktober 1964

No. KTP / Paspor : 3674023...

Alamat : River Park Blok GH 8/6, Bintaro Jaya sektor 9, RT/RW ...
Kel/Desa Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren,
Tangerang

bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa :

1. Berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mematuhi Kebijakan CUK.
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi bertalau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
   a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
   b. Pertanggungjawabannya ditolak anggota Direksi tersebut, anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi tersebut anggota Dewan Komisaris tersebut RUPS dan
   c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui

Rivan A. Purwantono

Jakarta, April 2021

Yopy Joesoef

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eugenia Kelih Gofasalih

Tempat dan Tanggal Lahir : New York, 28 Agustus 1952

No. KTP/ Paspor : 3174032808520001 / M7567063

Alamat : Jl. Melur Alam II TE No. 18, RT. 010, RW. 010, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310

bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa :

1. Berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mematuhi Kebijakan CUK.
2. Memenuhi syarat yang independen terhadap pemilik bank atau PSP.
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Desember 21, 2021

Eugenia Kelih Gofasalih

Mengetahui, Komisaris

Helmi Fahrudin

Stanly Hyoso Shin

STATEMENT LETTER

am signed below :

Name : Eugenia Kelih Gofasalih

Place and Date of Birth : New York, 28 Agustus 1952

Passport Number : 3174032808520001 / M7567063

Address : Jl. Melur Alam II TE No. 18, RT. 010, RW. 010, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310

acting as a prospective member of Independent Commissioner of PT Bank KB Bukopin Tbk, for and on behalf of itself, stating that :

1. Committed to developing sound bank operations and supporting Financial Services Authority policies.
2. Is an independent party to the owner of the bank or controlling shareholders.
3. Have no financial, management, share ownership and / or family relationships with other members of the board of commissioners, members of the board of directors and / or controlling shareholders or relationships with the bank, which may affect my ability to act independently.

Thus, this statement I make consciously and without coercion from any party.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	[redacted]
Tempat dan Tanggal Lahir	:	[redacted]
No. KTP	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]

bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. Saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau Pengendali Bank (PSP);
2. Saya tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, pengurus bank dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Mengetahui

Hakim Pahrudin | Hari Wulianto | Stephen Liaputra

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi KB Bank senantiasa mengedepankan transparansi, sikap profesional, kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan, serta berpikir strategis untuk mencapai sasaran bank.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN DIREKSI

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM DIREKSI

Piagam Direksi disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piagam Direksi secara rutin selalu ditinjau, untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi *(Charter)* yang berlaku saat ini berdasarkan Surat Keputusan No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi KB Bank, yang mencakup aspek-aspek mengenai:

1. Pendahuluan;
2. Susunan Direksi;
3. Etika Kerja;
4. Waktu Kerja;
5. Rapat Direksi
6. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan GCG;
7. Cuti/Berhalangan Sementara;
8. Sanksi;
9. Lain-lain;
10. Penutup.

KRITERIA DIREKSI

Kriteria Direksi Perseroan disesuaikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Di samping itu, Perseroan juga menetapkan kriteria tambahan, yaitu:

1. Memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank minimal 5 tahun;
2. Disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN MASA JABATAN

Selain ditentukan dalam RUPS, Pedoman kerja Direksi juga menentukan masa jabatan Direksi yang diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan RUPS sewaktu diangkat, dan apabila ada anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 31 Januari 2023, yang memberhentikan dengan hormat Jim Bum Kim selaku Direktur Bank, dan mengangkat Jung Ho Han sebagai Direktur Bank yang baru. Adapun komposisi dan susunan Direksi yang menjabat per 31 Desember 2023, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	RUPS Tahunan 25 Mei 2022	2022-RUPS Tahun 2025
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2021-RUPS Tahun 2024
Helmi Fahrudin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahun 2025
Dodi Widjajanto	Direktur	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2021-RUPS Tahun 2025
Seng Hyup Shin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahun 2025
Yohanes Suhardi	Direktur	RUPS Luar Biasa 8 Juli 2021	2021-RUPS Tahun 2024
Young Eun Moon	Direktur	RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2022	2022-RUPS Tahun 2025
Henry Sawali	Direktur	RUPS Luar Biasa 8 Desember 2021	2022-RUPS Tahun 2025
Jung Ho Han	Direktur	RUPS Luar Biasa 31 Januari 2023	2023-RUPS Tahun 2026

Pada saat pembuatan Laporan Tahunan ini terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 24 Januari 2024, yang memberhentikan dengan hormat Seng Hyup Shin selaku Direktur Bank, dan mengangkat Jang Hyuk Im sebagai Direktur Bank yang baru. Adapun komposisi dan susunan Direksi yang menjabat per 24 Januari 2024, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	RUPS Tahunan 25 Mei 2022	2022-RUPS Tahun 2025
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2021-RUPS Tahun 2024
Helmi Fahrudin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-RUPS Tahun 2024
Dodi Widjajanto	Direktur	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2020-RUPS Tahun 2024
Jang Hyuk Im*	Direktur	RUPS Luar Biasa 24 Januari 2024	2024-RUPS Tahun 2027
Yohanes Suhardi	Direktur	RUPS Tahunan 17 Juni 2021	2021-RUPS Tahun 2024
Young Eun Moon	Direktur	RUPS Luar Biasa 24 Agustus 2022	2022-RUPS Tahun 2025
Henry Sawali	Direktur	RUPS Luar Biasa 19 November 2021	2022-RUPS Tahun 2025
Jung Ho Han	Direktur	RUPS Luar Biasa 31 Januari 2023	2023-RUPS Tahun 2026

*) Jang Hyuk Im diangkat sebagai Direktur per 24 Januari 2024, menggantikan Seng Hyup Shin yang tidak lagi menjabat per 24 Januari 2024.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan merinci bahwa pengelola atau pengurus lembaga keuangan harus memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan untuk menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian ini meliputi beberapa aspek, yaitu integritas, kelayakan atau reputasi keuangan, dan kompetensi calon pengurus bank. Dalam konteks ini, integritas merujuk pada kejujuran dan kepercayaan, kelayakan atau reputasi keuangan mengacu pada rekam jejak finansial dan profesional, sementara kompetensi mencakup kemampuan teknis dan manajerial yang relevan untuk melakukan tugas dan fungsi yang ditugaskan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa para pengelola atau pengurus lembaga keuangan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dengan efektif dan bertanggung jawab.

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	KEP-4/D.03/2023	5 Januari 2023
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	KEP-65/D.03/2022	28 April 2022
Helmi Fahrudin	Direktur	KEP-35/D.03/2021	22 April 2021
Dodi Widjajanto	Direktur	KEP-120/D.03/2021	19 Agustus 2021
Seng Hyup Shin	Direktur	KEP-78/D.03/2021	20 Agustus 2021
Yohanes Suhardi	Direktur	KEP-26/D.03/2022	9 Maret 2022
Henry Sawali	Direktur	KEP-26/D.03/2022	3 Agustus 2022
Jung Ho Han	Direktur	KEPR-150/D.03/2023	10 Januari 2024
Young Eun Moon	Direktur	KEPR-164/D.03/2023	28 Februari 2024

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Berikut adalah penjabaran kepemilikan saham anggota Direksi KB Bank hingga akhir tahun 2023:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar saham)			
		KB Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	8.500.000 (0,0045240%)	Nihil	Nihil	Nihil
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	1.107.000 (0,0005892%)	Nihil	Nihil	Nihil
Helmi Fahrudin	Direktur	482.951 (0,0002570%)	Nihil	Nihil	Nihil
Dodi Widjajanto	Direktur	1.000.088 (0,0005323%)	Nihil	Nihil	Nihil
Seng Hyup Shin	Direktur	2.300.000 (0,0012241%)	Nihil	Nihil	Nihil
Yohanes Suhardi	Direktur	574.800 (0,0003059%)	Nihil	Nihil	Nihil
Henry Sawali	Direktur	200.000 (0,0001064%)	Nihil	Nihil	Nihil
Jung Ho Han	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Young Eun Moon	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Pedoman dan tata kerja Direksi Perseroan KB Bank melarang anggota Direksi untuk merangkap jabatan sebagai:
1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
2. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Kepala daerah;
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Helmi Fahrudin	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Dodi Widjajanto	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Seng Hyup Shin	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Yohanes Suhardi	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Henry Sawali	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Jung Ho Han	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Young Eun Moon	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Anggaran Dasar menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi jika terdapat hubungan keluarga hingga derajat ketiga antara anggota Direksi atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris. Hubungan keluarga ini mencakup hubungan garis lurus dan garis ke samping, termasuk yang timbul akibat perkawinan.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Woo Yeul Lee	Direktur Utama		X		X		X		X		X		X		X
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama		X		X		X		X		X		X		X
Helmi Fahrudin	Direktur		X		X		X		X		X		X		X
Dodi Widjajanto	Direktur		X		X		X		X		X		X		X
Seng Hyup Shin	Direktur		X		X		X		X		X		X		X
Yohanes Suhardi	Direktur		X		X		X		X		X		X		X
Henry Sawali	Direktur		X		X		X		X		X		X		X
Jung Ho Han	Direktur		X		X		X		X		X		X		X
Young Eun Moon	Direktur		X		X		X		X		X		X		X

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
2. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:
   a. Satuan Kerja Audit Internal;
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
   c. Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Melaksanakan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Proyek bersifat khusus;
   b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
   c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.
10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
11. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
12. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
13. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar, hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan, dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;
2. Direktur Utama atau 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
4. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) kelompok orang dalam bentuk komite untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diatur dalam pedoman tata kerja Direksi. Pedoman ini memberikan arahan spesifik mengenai tanggung jawab masing-masing anggota Direksi berdasarkan keahlian, pengalaman, dan tujuan perusahaan. Adapun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Mengkoordinasi seluruh fungsi dan grup/divisi meliputi Internal Audit, *Anti Fraud*, *Corporate Communication*, dan Sumber Daya Manusia.
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Mengkoordinasi pelaksanaan bisnis ritel grup, usaha kecil menengah dan *wholesale, corporate relation*, hingga menjaga KPI dari kinerja bisnis kantor cabang.
Helmi Fahrudin	Direktur Operasi	1. Perencanaan dan manajemen penjualan segmen ritel. 2. Layanan nasabah Cabang. 3. Fungsi penjualan segmen ritel. 4. Pengembangan produk dan pengelolaan portofolio untuk segmen ritel yang terdiri dari Kredit Pensiunan, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KPM), Kartu Kredit, *Wealth Management,* Produk Dana, dan produk lainnya. 5. Mitra strategis dan strategi penjualan produk ritel. 6. Komunikasi pemasaran. 7. Mengelola retail *credit factory* pada segmen ritel terkait analisa kredit untuk segmen ritel dan operasi terkait proses kesesuaian dokumen kredit, investigasi kredit dan pencairan pada segmen ritel serta pengelolaan pihak ketiga.
Dodi Widjajanto	Direktur Kepatuhan dan Risiko	1. Regulasi dan kebijakan kepatuhan. 2. *Monitoring* tata kelola perusahaan. 3. Single *point of contact* dengan regulator. 4. Pengenalan nasabah. 5. Anti pencucian uang dan *monitoring* transaksi. 6. Fungsi hukum Perusahaan dan litigasi. 7. Pemantauan, analisis, dan penilaian portofolio kredit dan kolektibilitas kredit, memberikan model penilaian/pemeringkatan. 8. Pengendalian risiko kredit. 9. Enterprise *Risk Management.* 10. Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas. 11. Manajemen Risiko Operasional dan lainnya. 12. Manajemen Risiko Teknologi Informasi. 13. *Personal data protection.* 14. *Customer Protection.*
Seng Hyup Shin	Direktur Keuangan	1. *Treasury* dan manajemen likuiditas. 2. Bisnis kustodian dan wali amanat. 3. Strategi dan perencanaan keuangan perusahaan dan anggaran. 4. *Management information system* dan manajemen kinerja. 5. Akuntansi, pajak dan *Internal Control Over Financial Report.* 6. Transaksi keuangan dalam proses pengadaan. 7. Mengelola ALCO. 8. Mengelola KPI pada level *corporate, group* sampai dengan departemen.
Yohanes Suhardi	Direktur SME Bisnis	1. Perencanaan dan manajemen penjualan 2. segmen mikro dan UKM. 3. Fungsi penjualan produk segmen mikro dan UKM. 4. Pengembangan produk segmen mikro dan UKM. 5. Kemitraan segmen mikro dan UKM. 6. Mengelola portofolio dan mendukung penjualan untuk segmen mikro dan UKM. 7. Fungsi bisnis, pengembangan dan dukungan penjualan serta operasional produk *trade finance.* 8. Pengelolaan risiko operasional kredit UKM. 9. Perencanaan dan manajemen penjualan segmen komersial, korporat, dan *Korean Link.* 10. Fungsi penjualan dan kemitraan segmen komersial, korporat dan *Korean Link.* 11. Pengembangan produk dan solusi transaksional pada segmen komersial, korporat dan *Korean Link.* 12. Berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi global, pinjaman perbankan internasional ke perusahaan besar, dan juga layanan pembiayaan dan *cross selling.* 13. Pengembangan solusi bisnis baru dan *supply chain.* 14. Fungsi pengebangan kebijakan dan restrukturisasi proses bisnis terkait perkreditan. 15. Mengelola KPI bisnis segmen komersial, korporat, dan *Korean Link.*
Henry Sawali	Direktur Kredit	1. Analisa kredit untuk *segmen.corporate, commercial* dan Korean Link. 2. Mengelola *Credit Regional Center* untuk segmen UMKM. 3. Mengelola *bad bank,* kredit restruktur untuk segmen MSME, korporat, komersial dan *Korean Link.* 4. Mengelola Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan melakukan *bulk sale.* 5. Mengelola aset dan/atau portofolio Bank yang telah dijual, serta mengelola ABS dan Sukuk. 6. Penagihan kredit segmen ritel. 7. Operasi proses kredit kredit legal, investigasi kredit dan pencairan pada segmen MSME, korporat, komersial dan *Korean Link.* 8. Mengelola seluruh kualitas aset di Bank dan sebagai menara kontrol untuk meningkatkan kualitas aset. 9. Penagihan, penyehatan, dan penyelesaian untuk Swamitra.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Jung Ho Han	Direktur Strategi	1. Perencanaan dan pengelolaan strategi perusahaan. 2. Manajemen anak perusahaan. 3. Mendorong pertumbuhan bisnis melalui Kemitraan strategis. 4. Strategi dan optimalisasi kanal penjualan fisik/*outlet* kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan ATM. 5. Mendorong transformasi dan sebagai *project management office*. 6. Pengadaan dan manajemen aset tetap. 7. Mendorong implementasi dan me*monitoring* strategi efisiensi melalui *cost hunt*. 8. Operasi pada kanal elektronik kartu kredit, sistem pembayaran, dan *treasury*. 9. *Monitoring* dan pengembangan layanan dan operasional untuk peningkatan layanan nasabah. 10. *Business Process Restructuring*. 11. Pengelolaan mitra asuransi.
Young Eun Moon	Direktur IT	1. Pengembangan TI Digital dan pengembangan layanan berbasis TI untuk nasabah. 2. Kebijakan dan strategi Teknologi Informasi (TI). 3. Keandalan dan ketersediaan infrastruktur TI. 4. Pengembangan aplikasi TI. 5. *IT security* untuk ketahanan dan keamanan siber Bank. 6. *New Generation Banking System* (NGBS). 7. Inkubasi dan pengembangan solusi digital. 8. Pengembangan bisnis dan ekosistem digital. 9. Perbaikan pada proses dan peningkatan kompetensi TI dan digital.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS berdasar suara terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan dengan baik. Direksi bertugas mengarahkan kebijakan bisnis operasional dan strategis Bank. Hal ini terlihat melalui kebijakan Bank yang turut mendukung program pemerintah dan arah strategi Bank yang berfokus pada segmen Ritel, adapun kegiatan yang dijalankan Direksi pada tahun 2023 termasuk *Rebranding* merek dan logo baru Bank.

Adapun Surat Keputusan yang diterbitkan Direksi di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No. Surat	Perihal
0005	Kebijakan Remunerasi Tenaga Kerja Asing
0008	Kebijakan BI - *Fast Payment*
0018	Kebijakan Jabatan Non Struktural
0019	Kebijakan *Clean Desk* PT Bank KB Bukopin Tbk
0020	Struktur Organisasi
0021	Kebijakan Mutasi , Promosi & Demosi Karyawan
0025	pedoman Penjualan Kredit Bermasalah Secara Kolektif
0037	Penetapan Batas Kewenangan *Approval Power Matrix* Kartu Kredit & *Merchant* KB Bank Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk
0039	Kebijakan Pelaksanaan *Training* untuk Karyawan
0045	Peraturan Disiplin Karyawan
0048	Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja
0049	Perubahan Susunan Perubahan Pengawas Dapen
0050	*Addendum* I SKEP Direksi No. 0020 Tahun 2023
0052	Kebijakan Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk
0064	Program Kredit Konsumer untuk Karyawan KB Bank
0080	Kebijakan Pelaporan Informasi Kepada Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk
0081	Pencabutan Pedoman *Loss Event Database* PT Bank KB Bukopin Tbk
0085	Kebijakan Perlakukan Khusus Pada Daerah dan Sektor Tertentu yang terkena Dampak Bencana

No. Surat	Perihal
0128	Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk
0129	Penunjukan Departemen atau Unit Penangung Jawab Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di PT Bank KB Bukopin Tbk
0130	*Addendum* II SKEP Direksi No. 0020 tahun 2023 struktur organisasi
0131	Kebijakan Cuti Karyawan
0132	Kebijakan Pemberian Bantuan Pendidikan
0137	Kebijakan *Car Ownership Cash Program*
0152	Kebijakan *Audit Rating* PT Bank KB Bukopin Tbk
0153	Addendum V Atas Kebijakan Perlakuan Khusus untuk Debitur Akibat Dampak COVID-19
0155	Kebijakan Remunerasi Tenaga Kerja Asing
0156	Kebijakan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Program Alih Pengetahuan dan Kunjungan Bisnis
0160	Kebijakan Strategi *Anti Fraud* PT Bank KB Bukopin Tbk
0178	Kewenangan Penganggaran, Investasi, Alokasi Anggaran, Pembayaran dan Penarikan Anggaran
0179	Kebijakan Anggaran
0198	Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat PT Bank KB Bukopin Tbk
0199	Kode Etik Perlindungan Konsumen PT Bank KB Bukopin Tbk
0205	Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS)
0206	Kebijakan Kelembagaan dan Kewenangan Komite Kredit PT. Bank KB Bukopin Tbk
0208	Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal KB Bank
0211	Struktur Organisasi Bank
0212	Kebijakan Keuangan Berkelanjutan
0219	Kebijakan Klasifikasi Jaringan Kantor

PROGRAM PENGEMBANGAN DIREKSI

Bank KB Bukopin senantiasa mendorong aktivitas pengembangan Direksi baik melalui program orientasi yang ditujukan bagi anggota Direksi baru maupun program pelatihan bagi Direksi. Program pengembangan kompetensi Direksi ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan Bank yang efektif.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level	Masa Berlaku
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 1	4 tahun
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 2	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset 1 hingga 10 T	4	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Direksi KB Bank tahun 2023.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Helmi Fahrudin	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Dodi Widjajanto	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Seng Hyup Shin	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Yohanes Suhardi	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Henry Sawali	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Jung Ho Han	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Young Eun Moon	Direktur	5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (BSMR)

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Seluruh anggota Direksi KB Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Komitmen tersebut tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Direksi sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Program Pengenalan kepada Direktur yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Perseroan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya. Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi Program Pengenalan Perusahaan berkaitan dengan:

1. Penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi;
2. Pengenalan dan penjelasan mengenai Budaya Perseroan dan Struktur Organisasi;
3. Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, dan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mengikutsertakan dalam program *training* pada bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Serta hal-hal penting lainnya yang dapat diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya.

Pada tahun 2023, terdapat anggota Direksi baru yang telah mengikuti program orientasi Direksi, yaitu Bapak Jung Ho Han.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Bank, dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri anggota Direksi untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Jika tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Usulan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan apabila anggota Direksi tersebut mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya dan/atau tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
4. Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya;
5. Anggota Direksi yang mengundurkan diri hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawab selama masa jabatannya;
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut;
7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi;
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri;
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Meninggal dunia;
   d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka tanggung jawab Direksi berlaku secara tanggung renteng. Terdapat 2 (dua) macam prosedur penilaian kriteria kinerja Direksi sebagai berikut.

Penilaian Kinerja oleh RUPS
Setiap tahun, Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari akuntabilitas. Evaluasi ini mencakup hasil kinerja keseluruhan Direksi, baik secara kolegial maupun individual. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Evaluasi ini menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi pemegang saham dalam keputusan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi
Setiap tahun, anggota Direksi melakukan *self-assessment* untuk mengevaluasi kinerja Direksi secara kolegial. Hal ini bertujuan untuk mendorong kontribusi positif dari setiap anggota Direksi dalam memperbaiki kinerja secara berkesinambungan. Usulan pencapaian kinerja Direksi disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi atas pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya, kecuali jika ada perbuatan penggelapan, penipuan, atau tindakan pidana lainnya yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
Penilaian kinerja Direksi diukur berdasarkan *key performance indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Direksi, yaitu:

Direktur Utama
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas Aset;
3. Melakukan ekspansi pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Meningkatkan efektivitas produk sesuai dengan kebutuhan *customer*;
5. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan;
6. Meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan;
7. Meningkatkan pengelolaan risiko dan *good corporate governance*;
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan;
9. Meningkatkan dukungan IT dalam pelayanan dan operasi untuk mendukung bisnis.

Wakil Direktur Utama
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas Aset;
3. Melakukan ekspansi pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Meningkatkan efektivitas produk sesuai dengan kebutuhan *customer*;
5. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan;
6. Meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan;
7. Meningkatkan pengelolaan risiko dan *good corporate governance*;
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan.

Direktur Operasi
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas aset;
3. Meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Meningkatkan efektivitas produk sesuai dengan kebutuhan *customer*;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan.

Direktur Kepatuhan dan Risiko
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas *asset*;
3. Meningkatkan implementasi GCG di Perusahaan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan
5. Meningkatkan pengelolaan risiko.

Direktur Keuangan
1. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas aset;
2. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan.

Direktur SME Bisnis
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas aset;
3. Melakukan ekspansi pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Direktur Kredit
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas aset;
3. Menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan.

Direktur Strategi
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan ekspansi pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
3. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Direktur IT
1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas *asset*;
3. Meningkatkan dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan dan operasi untuk mendukung bisnis;

Pihak yang Melakukan *Assessment*
Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan. Proses penilaian ini juga mengikuti amanat yang diberikan oleh Pemegang Saham, yang dapat termanifestasikan dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kinerja Direksi dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Pemegang Saham memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan, termasuk mengevaluasi kinerja Direksi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, proses penilaian kinerja Direksi menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban di tingkat kepemimpinan tertinggi.

Penilaian Kinerja Berdasarkan *Assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi
Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sendiri *(self assessment)* sesuai SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* GCG terkait Kinerja Direksi
Direksi melakukan *self assessment* atas kinerjanya selama satu tahun pada periode Bulan Juni dan Desember, atas pengelolaan Perseroan, pencapaian target, upaya penanggulangan kendala dan manajemen risiko serta penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan. Dewan komisaris akan mengevaluasi melalui rapat dengan Komite Nominasi dan Remunerasi kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance Structure* terdiri dari 16 (enam belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 14 (empat belas) indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 10 (sepuluh) indikator.

Pihak yang Melakukan *Assessment*
Pelaksanaan *assessment* dilaksanakan oleh *Compliance, Policy & Good Corporate Governance Department* sebagai satuan kerja yang melaksanakan penilaian terhadap faktor pelaksanaan GCG di Perseroan.

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas kepengurusannya, Direksi mengakui pentingnya pembentukan komite-komite di bawahnya. Pembentukan komite-komite ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Tujuan utama dari pembentukan komite-komite ini adalah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan.

Komite-komite tersebut dapat mencakup berbagai bidang seperti audit, risiko, remunerasi, nominasi, dan lain sebagainya, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Setiap komite memiliki tanggung jawab khusus sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti mengawasi kebijakan dan praktik operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, atau memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi dan penunjukan anggota Direksi.

Pada tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite yang dibentuk telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kinerja komite-komite dalam mencapai tujuan mereka, serta efektivitas proses kerja dan kontribusinya terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komite-komite ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis yang strategis.

Komite Manajemen Risiko

Pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi dalam konteks operasional perusahaan mendorong pembentukan Komite Manajemen Risiko. Komite ini memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif di seluruh lapisan organisasi. Dengan membentuk Komite Manajemen Risiko, Perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko bisnis dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Direksi menyimpulkan bahwa Komite Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab atas identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, komite ini juga memastikan bahwa strategi dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan baik ke dalam strategi bisnis Perseroan secara keseluruhan.

Dengan demikian, Direksi menyimpulkan bahwa Komite Manajemen Risiko telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik selama tahun 2023, yang memberikan kontribusi positif dalam memastikan pengelolaan risiko bisnis yang efektif dan berkesinambungan.

Komite ALCO

Komite ALCO bertugas mengelola produk aset dan liabilitas dengan mempertimbangkan pertumbuhan, kesinambungan bisnis, dan profitabilitas. Menurut Direksi, rapat dan keputusan ALCO pada tahun 2023 efektif. Ini mencerminkan pemantauan yang cermat terhadap portofolio keuangan serta kemampuan dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah. Keputusan-keputusan yang diambil oleh ALCO memiliki dampak strategis yang signifikan bagi bank, termasuk dalam hal manajemen risiko dan pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, ALCO berperan penting dalam mengambil keputusan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas bisnis Bank.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan entitas tertinggi dalam pengelolaan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta memberikan bantuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Tugasnya mencakup meninjau dan mengevaluasi kebutuhan teknologi informasi perusahaan, memberikan saran strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kebijakan IT yang berlaku.

Menurut Direksi, pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi selama tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Komite ini telah berhasil mendukung implementasi teknologi informasi di Perseroan dengan baik. Hal ini mencerminkan komitmen Komite dalam memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi perusahaan berjalan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan demikian, peran serta Komite Pengarah Teknologi Informasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa teknologi informasi menjadi salah satu pendorong utama dalam pencapaian tujuan bisnis Perseroan.

Komite Restrukturisasi Kredit

Komite Restrukturisasi Kredit adalah entitas yang memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam merekomendasikan dan/atau memutuskan restrukturisasi kredit. Kewenangan ini mencakup restrukturisasi kredit kualitas 1 dan 2 untuk debitur dalam kategori pemantauan (*watch list*), serta restrukturisasi atau penyehatan kredit kualitas 3, 4, dan 5 pasca restrukturisasi.

Komite ini memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan terkait restrukturisasi kredit, yang merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah kredit yang muncul. Proses restrukturisasi kredit memerlukan analisis yang cermat terhadap kondisi keuangan debitur dan risiko yang terkait, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa Komite Restrukturisasi Kredit telah menjalankan tugasnya dengan baik. Komite ini berhasil merekomendasikan dan/atau memutuskan restrukturisasi kredit secara efektif sesuai dengan kewenangannya. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komite Restrukturisasi Kredit memiliki dampak yang signifikan terhadap mitigasi risiko kredit perusahaan dan memastikan kelangsungan bisnis yang stabil. Dengan demikian, peran serta Komite Restrukturisasi Kredit menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memastikan pengelolaan kredit yang sehat.

Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah

Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merekomendasikan dan/atau memutuskan penyelesaian kredit yang mengalami masalah. Wewenang ini mencakup penyelesaian kredit bermasalah kualitas 3, 4, dan 5, termasuk pengambilalihan agunan (AYDA), penghapusan buku, dan penghapusan tagihan kredit.

Komite ini memainkan peran penting dalam mengevaluasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kredit yang timbul. Proses pengambilan keputusan Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah memerlukan analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan debitur, nilai agunan, serta risiko yang terkait.

Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa seluruh anggota Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Penilaian ini didasarkan pada kontribusi masing-masing Komite terhadap bank, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi. Evaluasi ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah memiliki dampak yang positif dalam mengatasi masalah kredit serta menjaga kesehatan keuangan bank. Dengan demikian, peran serta Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah menjadi kunci dalam memastikan penanganan yang efektif terhadap portofolio kredit yang bermasalah.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menekankan pentingnya keberagaman dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman ini mencakup karakteristik yang diinginkan dari segi struktur organisasi dan individu. Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Hal ini akan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi yang sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan terbuka dengan efektif.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Jerry Marmen	Komisaris Utama	Laki-laki	58	Doctor of Philosophy at the Australian National University	• Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (Bidang Ekonomi/Economic Affairs) • Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi TataKelola, Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance): LSP TRK/LSP GRC • Komisioner Pengawas Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) • Komite Kebijakan Risiko/Komite Pemantau Risiko PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) • Strategic Advisor & Senior Partner, Korn Ferry (Hay Group) Indonesia • Strategic Advisor and Senior Partner at PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan • Chairman of Indonesian Association for Competency Development in Financial Service Industry (Perkumpulan Pengembangan Kompetensi Industri Jasa Keuangan) • Secretary General IPA-GRC (Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa • Komisaris PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) • Vice Rector Perbanas School of Economics (PERBANAS Institute)	*GRC Specialist for Banking & Financial Institutions*
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	Laki-laki	55	Bachelor of Economics at Sungkyunkwa University	• Global Business Group – Head of Global Business Group KB Kookmin Bank (2021-sekarang) • Global Strategy Department - Chief Global Strategy Officer KB Financial Group (2018-2020) • Global Business Department - Managing Director KB Securities (2016-2018) • Management Support Dept. - Managing Director KB Investment & Securities (2015-2016) • Global Sales Department - Managing Director Daewoo Securities (2013-2015)	*Securities and Capital Investment*
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	Laki-laki	59	S2 International Marketing, IPMI International Business School	• Presiden Komisaris, PT Sol Mitra Fintec (2016-2021) • Presiden Komisaris, PT Prismalink International (2014-2021) • Komisaris Independen PT. KiosOn Komersial Indonesia, Februari (2018 - 2019) • Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), (2010 - 2015) • Direktur Konsumer Banking, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009-2013) • Komisaris BCA Finance (2000-2009)	Keuangan
Nanang Supriyatno	Komisaris	Laki-laki	54	Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada	• Direktur Utama PT Satu Gen Indonesia (2020-Sekarang) • Direktur Corporate Internal Audit Bosowa Group (2017-2022) • Direktur Utama PT Bosowa Beton Indonesia (2015-2018) • Direktur Risk Management PT Semen Bosowa Maros (2015-2017) • Vice President - Special Asset Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2013) • Credit Examiner/Auditor PT Bank Dagang Negara (Persero) (1995-1999)	Keuangan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen	Laki-laki	54	Doctor of Law, Universitas Hasanudin	• Special Staff of Vice President Vice President's Palace (2019-sekarang) • Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2022) • Komisaris PT Media Fajar Holding Company (2015-2022) • Pengajar di Fajar Educational Foundation of Ujung Pandang (1998-sekarang) • Komisaris PT Pelindo IV Makassar (2021) • Komisaris Utama PT. Petrokimia Kayaku (2021) • Komisaris PT Pupuk Indonesia Holding Company (2015-2020) • Staf Khusus Kementerian Pertanian (2014-2019) • Direktur PT Media Fajar Holding Company (2014-2015) • Extraordinary Lecturer of Hasanuddin University (2011-2014) • Direktur Produksi dan SDM, Harian Fajar (2009-2013)	Hukum
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	Laki-laki	55	Magister di bidang Hukum dari Yonsei University	• Member of Board of Directors Korean Association of Indonesia (2020-sekarang) • President Director LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang) • Foreign Lawyer MR & Partners Law Firm at Jakarta (2015-2019) • Lawyer at APEX LLC Head of Jakarta Apex Office (2011-2014) • Lawyer at Law Firm C&K, LEX, APEX (2006-2011)	Hukum
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	Laki-laki	59	Sarjana di bidang Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB)	• Member of the Audit Board, Otoritas Jasa Keuangan (2023-sekarang) • Independent Audit Committee, American International Assurance (AIA) Financial (2019-2021) • Chief GRC, Fazz Financial Group (2019-2021) • Executive Director – Country Risk Management Head, UOB Indonesia (2013-2016) • SVP Global Consumer Group, Citibank NA (2013) • SVP Risk Management, Bank Danamon (2011-2012) • Head of Country Operational Risk Management, Basel 2 and Enterprise Risk Management – Maybank (2005-2011) • Head of Compliance for Consumer & Commercial Banking, ABN AMRO Bank (1999-2005) • Credit Operations Manager, Standard Chartered Bank (1991-1999)	*Risk Management*
Eugene K. Galbraith	Komisaris Independen	Laki-laki	71	Phd Anthropology Economics dari Jhon Hopskins University	• Direksi PT Sarana Menara Nusantara (2020-sekarang) • Senior Advisor Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapore (2019-2021) • Senior Advisor, McKinsey and Company (2019-2021) • Deputy President Director Bank Central Asia [IDX: BBCA] (2011-2019) • President Commissioner Bank Central Asia [IDX: BBCA] (2002-2011) • Deputy President Commissioner Bank OCBC NISP (1998-2006)	Keuangan

Keberagaman komposisi Direksi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Laki-laki	59	• Master of International Economics dari Korea University tahun 1990 • Sarjana di bidang Agricultural Economics dari Korea University pada tahun 1988	• Senior Executive Vice President & Chief Strategy Officer KB Financial Group (2022) • Senior Executive Vice President & Chief Human Resource Officer KB Financial Group (2021) • Senior Executive Vice President & Chief Information Technology Officer KB Financial Group (2020)	Keuangan
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Laki-laki	55	• MBA Degree in Marketing, Woodbury University Burbank CA USA (1993) • Degree in Finance and Banking, National University San Diego CA USA (1992)	• SEVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (2019 – 2021) • EVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015 – 2019) • SVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (2013 – 2015)	Keuangan
Henry Sawali	Direktur	Laki-laki	54	• Masters Degree in Business Administration, National University of San Diego USA (1992) • Bachelor Degree in Finance, California State University – Fresno (1986)	• Head of Commercial and MSME Banking Credit PT Bank CIMB Niaga Tbk (2017-2022) • Senior Manager – SCO for Indonesia PT Bank ANZ Indonesia (2016-2017) • Senior Vice President – Head of Corporate Credit Risk, PT Bank OCBC NISP Tbk (2010-2016)	Keuangan
Helmi Fahrudin	Direktur	Laki-laki	48	• Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia, (2003) • Diploma (D-3) di bidang Ekonomi Akuntansi, STIE Yogyakarta, (1997)	• Kepala SKAI (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020) • Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk, (2018-2019) • Anggota Dewan Pengawas, Dana Pensiun Bank Bukopin (2016-2020)	Keuangan
Dodi Widjajanto	Direktur	Laki-laki	57	• Magister Manajemen di bidang Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, (2002) • Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, (1990)	• Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung (2020) • Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang (2018-2020) • General Manager Kantor Cabang Hong Kong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Hong Kong (2016-2018)	Keuangan
Seng Hyup Shin	Direktur	Laki-laki	53	• Bachelor of Administration di bidang Administration, KyungPook Nastional University (1995) • Master of Administration di bidang Administration, KyungPook National University (1997)	• General Manager, KB Financial Group (2018- 2020) • Senior Deputy General Manager, KB Financial Group (2017) • Team Manager, KB Financial Group (2014-2016)	Keuangan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Yohanes Suhardi	Direktur	Laki-laki	58	• Sarjana Ekonomi, Manajemen, Universitas Tarumanegara (1998) • MBA Degree in Finance Oklahoma University, USA, (1990)	• Komisaris, PT Sahabat Financial Keluarga (2014-2021) • EVP National Head SME Banking, PT Bank Permata Tbk (2013-2021) • SVP National Head SME Credit, PT Bank Permata Tbk (2007-2013)	Keuangan
Jung Ho Han	Direktur	Laki-laki	58	• Bachelor in Public Administration, Yonsei University (1992) • Master of Public Administration Yonsei University, Korea (1993)	• CISO/Managing Director (Information Security Division) KB Kookmin Bank (2020) • General Manager (Future IT Implementation Department KB Kookmin Bank (2019) • General Manager (Digital Strategy Department KB Kookmin Bank (2018-2019)	Manajemen
Young Eun Moon	Direktur	Laki-laki	57	• Bachelor in Public Administration, Yonsei University (1992) • Master of Public Administration Yonsei University, Korea (1993)	• CISO/Managing Director (Information Security Division) KB Kookmin Bank (2020) • General Manager (Future IT Implementation Department KB Kookmin Bank (2019) • General Manager (Digital Strategy Department KB Kookmin Bank (2018-2019)	IT & Digital

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Selain itu, keputusan mengenai remunerasi juga dibahas dan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya.

Pengkajian terhadap sistem remunerasi dan kesejahteraan pekerja dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengkajian tersebut antara lain adalah:

1. Kinerja Keuangan Bank;
2. Kompetensi dan kinerja pekerja;
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar.

KB Bank menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil, dan seimbang bagi semua pekerja. Bank ini memastikan bahwa tidak ada pekerja yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, KB Bank secara berkala melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan remunerasi agar selaras dengan perkembangan industri dan strategi bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem remunerasi tetap relevan dan mematuhi ketentuan perbankan yang berlaku.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris akan ditetapkan di dalam RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham melakukan pembahasan pada RUPS;
2. RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian dan evaluasi untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris;
4. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kemudian diusulkan melalui surat kepada Pemegang Saham Pengendali;
6. Surat Penetapan oleh Pemegang Saham Pengendali kepada Dewan Komisaris;
7. Surat Dewan Komisaris kepada Direksi tentang Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha dari KB Bank dalam industri perbankan;
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja KB Bank;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1	Honorarium	Sesuai dengan ketentuan Skala Honorarium Dewan Komisaris setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dana atau ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2	Tunjangan Tunjangan Rumah & Utilities Tunjangan Kendaraan Tunjangan Hari Raya Tunjangan Kesehatan Tunjangan Kaca Mata Bantuan Pendidikan	Diberikan sesuai ketentuan internal sebagai berikut: • Bagi Dewan Komisaris merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/016-DKOM/XI/2021 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium dan *Benefit* lainnya bagi Dewan Komisaris. • Bagi Direksi merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2023 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium, Remunerasi Variabel dan *Benefit* lainnya bagi Direksi.
3	Fasilitas Fasilitas Pulsa Fasilitas Telepon Genggam Uang Saku Perjalanan Dinas Asuransi Jiwa Asuransi Purna Jabatan Bantuan Hukum	Diberikan sesuai ketentuan internal sebagai berikut: • Bagi Dewan Komisaris merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2021 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium dan *Benefit* lainnya bagi Dewan Komisaris. • Bagi Direksi merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2023 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium, Remunerasi Variabel dan *Benefit* lainnya bagi Direksi.
4	Tantiem/Bonus/Insentif	Sesuai dengan Keputusan RUPS.
5	Apresiasi Selesai Masa Kerja	Diberikan sesuai ketentuan internal sebagai berikut: • Bagi Dewan Komisaris merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2021 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium dan *Benefit* lainnya bagi Dewan Komisaris. • Bagi Direksi merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2023 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium, Remunerasi Variabel dan *Benefit* lainnya bagi Direksi.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Nominal (dalam Rp)
Honorarium	7	8,775,590,256
Tunjangan		
Tunjangan Rumah & Utilities	7	1,755,118,056
Tunjangan Kendaraan	7	1,316,338,524
Tunjangan Hari Raya	7	996,798,207
Tunjangan Kesehatan	7	256,154,332
Tunjangan Kaca Mata	3	15,000,000
Bantuan Pendidikan	7	731,299,188
Fasilitas		
Fasilitas Pulsa	7	114,531,648
Fasilitas Telepon Genggam	4	48,000,000
Uang Saku Perjalanan Dinas	5	7,200,000
Asuransi Jiwa	0	0
Asuransi Purna Jabatan	0	0
Bantuan Hukum	0	0
Tantiem/Bonus/Insentif	0	0
Apresiasi Selesai Masa Kerja	0	0

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Total Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	7
Di atas Rp1 Miliar-Rp2 Miliar	0
Di atas Rp500 juta-Rp1 Miliar	0
Rp500 juta ke bawah	0

OPSI SAHAM BAGI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2005, pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan yang memenuhi persyaratan. Namun demikian, pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki program opsi saham.

REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan yang berlaku, Perseroan akan memperhatikan target pencapaian *profit*, kemampuan menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha yang dilakukan sesuai hasil analisis dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi kemudian mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diusulkan pada RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. *Key Performance Indicator* (KPI) atau hasil penilaian kinerja dan prestasi Dewan Komisaris;
2. Kinerja dan kemampuan keuangan Perseroan;
3. Perkembangan bisnis Bank;
4. Hasil perbandingan remunerasi industri Perbankan;
5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 memberikan pedoman bagi pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum. Pengungkapan komponen remunerasi ini merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan.

Komponen remunerasi untuk Dewan Komisaris dapat terdiri dari berbagai elemen, termasuk gaji pokok, insentif, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Jumlah nominal atau besaran komponen remunerasi ini biasanya disesuaikan dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris, serta kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Detail komponen remunerasi tersebut biasanya diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan remunerasi di perusahaan, serta untuk memastikan bahwa proses pemberian remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.

Jumlah nominal/komponen remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Nominal (dalam Rp)
Honorarium	7	19,652,500,000
Tunjangan		
Tunjangan Utilities	7	3,930,500,000
Tunjangan Hari Raya	7	1,999,800,000
Tunjangan Kesehatan	6	1,163,278,480
Tunjangan Kaca Mata	2	11,545,000
Bantuan Pendidikan	7	1,666,500,000
Tunjangan Cuti	7	1,666,500,000
Tunjangan Pendapatan Hari Tua	0	0
Tunjangan Jaminan Asuransi Jiwa	0	0
Fasilitas		
Fasilitas Pulsa	6	4.000.000
Fasilitas Telepon Genggam	1	12,000,000
Fasilitas *Housing Loan*	0	0
Fasilitas *Car Loan*	3	1,568,952,420
Fasilitas Perjalanan Dinas	6	336,033,900
Fasilitas Kendaraan	9	0
Fasilitas *Membership*	7	602,681,653
Asuransi Purna Jabatan	0	0
Tantiem/Bonus/Insentif	6	6,838,074,094
Apresiasi Selesai Masa Jabatan	0	0
Jumlah		

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Total Remunerasi	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	7
Di atas Rp1 Miliar-Rp2 Miliar	0
Di atas Rp500 juta-Rp1 Miliar	0
Rp500 juta ke bawah	0

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	2023	2022
Gaji karyawan tertinggi dan terendah	68:1	38:1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,69:1	1,34:1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,39:1	1,39:1
Gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,46:1	1,16:1

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Karyawan

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Karyawan			
	2023		2022	
	Orang	Rp (juta)	Orang	Rp (juta)
Jumlah	2.340	11,680,412,056	2.278	13.831.543.914

TOTAL KOMPENSASI YANG DIBERIKAN UNTUK KARYAWAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL YANG DIBAYARKAN

Jumlah nominal Kompensasi yang dibayarkan	2023	2022
Rp Miliar	22,62	258,18
Jumlah Orang	490	1.687

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan, yang Kembali ditegaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris maupun Direksi.

Rapat Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. 015 Tahun 2019, mengatur ketentuan rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Direksi;
3. Selain hal tersebut Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala wajib mengadakan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris dengan mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat;
6. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir;
7. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
8. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
9. Risalah rapat Dewan Komisaris dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau Sekretaris Perusahaan.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris KB Bank melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, Rata-Rata kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sebesar 86% (delapan puluh enam) dengan rincian agenda rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	13 Januari 2023	Persetujuan Kebijakan Alih Daya.	10 Peserta
2	27 Januari 2023	• Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan IV Tahun 2022; • Pembahasan Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) Semester II Tahun 2022.	35 Peserta
3	14 Februari 2023	• Pembahasan Pembagian Tugas & Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Penyampaian Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan.	16 Peserta
4	9 Maret 2023	• Persetujuan Dewan Komisaris Penarikan Sebagian Agunan Kredit Pihak Terkait (PT. Bosowa Utama & PT Bosowa Amal Taksi); • Pembahasan dan persetujuan perubahan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris.	19 Peserta
5	15 Maret 2023	Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank.	23 Peserta
6	3 April 2023	Persetujuan Usulan Harga Saham PUT VII.	17 Peserta
7	28 April 2023	Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan I tahun 2023.	28 Peserta
8	12 Mei 2023	• Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum; • Pembahasan *Pricing Rate Business* KB Bank.	16 Peserta
9	5 Juni 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas pembelian obligasi PT KB Finansia Multi Finance.	14 Peserta
10	23 Juni 2023	Persetujuan Penunjukkan Pimpinan RUPST 2023.	17 Peserta
11	27 Juni 2023	• Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Periode 2023-2025; • Persetujuan Penambahan Modal KB Bukopin Syariah - Penempatan Dana Setoran Modal dan Laporan Penambahan Modal KB Bukopin Finance - Penempatan Dana Escrow Tahap Kedua.	23 Peserta
12	5 Juli 2023	Pembahasan Laporan Perkembangan Proyek NGBS (*Next Generation Banking System*).	23 Peserta
13	21 Juli 2023	Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan II tahun 2023.	26 Peserta
14	26 Juli 2023	Pembahasan RBBR Semester I Tahun 2023.	23 Peserta
15	29 September 2023	• Pembahasan Realisasi Konversi Penyertaan Modal ke KB Bukopin Finance dan Perkembangan Kinerja Perusahaan Anak; • Persetujuan Penambahan Modal PT Bank KB Bukopin Syariah; • Pembahasan Perlindungan Konsumen dan Layanan Pengaduan Nasabah KB Bank.	40 Peserta
16	19 Oktober 2023	• Pembahasan Progress Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Komitmen Hasil Temuan OJK 2023; • Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan III Tahun 2023.	40 Peserta
17	6 November 2023	Laporan dan Pembahasan Rencana *Rebranding* KB Bank.	18 Peserta
18	17 November 2023	Pembahasan Perubahan *Role and Responsibility* Direksi terkait Perpindahan Fungsi Divisi Human Capital dibawah Direktur Utama.	15 Peserta
19	27 November 2023	RBB 2024-2026 *Approval.*	17 Peserta
20	4 Desember 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Surat OJK No. SR-111/ PB.31/2023 dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Berdasarkan POJK 17 Tahun 2023.	15 Peserta
21	13 Desember 2023	• *Highlights* OJK Pada Pertemuan Audiens; • Perencanaan Audit 2024; • Persetujuan Kebijakan APU, PPT dan CPF Sesuai Peraturan Baru POJK No. 08 Tahun 2023.	18 Peserta
22	29 Desember 2023	• Persetujuan atas Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait Kandidat Direktur Keuangan; • Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan *Rules & Responsibility* Direksi; • Persetujuan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.	11 Peserta

RAPAT GABUNGAN

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris KB Bank melaksanakan rapat dengan mengundang Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun agenda rapat adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	27 Januari 2023	Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan IV Tahun 2022 Pembahasan Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) Semester II Tahun 2022.	35 Peserta
2	15 Maret 2023	Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank.	23 Peserta
3	3 April 2023	Persetujuan Usulan Harga Saham PUT VII.	17 Peserta
4	28 April 2023	Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan I tahun 2023.	28 Peserta
5	23 Juni 2023	Persetujuan Penunjukkan Pimpinan RUPST 2023.	17 Peserta
6	21 Juli 2023	Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan II tahun 2023	26 Peserta
7	26 Juli 2023	Pembahasan RBBR Semester I Tahun 2023.	23 Peserta
8	25 September 2023	• Pembahasan Realisasi Konversi Penyertaan Modal ke KB Bukopin Finance dan Perkembangan Kinerja Perusahaan Anak; • Persetujuan Penambahan Modal PT Bank KB Bukopin Syariah; • Pembahasan Perlindungan Konsumen dan Layanan Pengaduan Nasabah KB Bank.	40 Peserta
9	19 Oktober 2023	• Pembahasan Progress Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Komitmen Hasil Temuan OJK 2023; • Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan III Tahun 2023.	40 Peserta
10	27 November 2023	RBB 2024-2026 *Approval*.	17 Peserta

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Rapat Dewan Komisaris selama 2023 dilaksanakan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Sedangkan, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama 2023 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun frekuensi Kehadiran Rapat Dewan dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Jerry Marmen	22	22	100%	10	10	100%
2	Nam Hoon Cho	22	10	45.45%	10	5	50%
3	Nanang Supriyatno	22	20	90.91%	10	9	90%
4	Stephen Liestyo	22	21	95.45%	10	10	100%
5	Sukriansyah S. Latief	22	22	100%	10	10	100%
6	Hae Wang Lee	22	20	90.91%	10	10	100%
7	Tippy Joesoef	22	19	86.36%	10	8	80%
8	Eugene K. Galbraith	22	17	77.27%	10	8	80 %

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dipimpin oleh Direktur Utama;
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar;

5. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi;
6. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris;
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan di dalam risalah rapat beserta alasannya.

RAPAT INTERNAL DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, Direksi KB Bank melaksanakan rapat Direksi sebanyak 65 kali. Adapun Agenda rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Jumlah Peserta
1	9 Januari 2023	1. Persetujuan Tanggapan Manajemen atas Manajemen Letter Crowe; 2. Laporan Pinjaman PT. Air Bersih Jakarta (Salim Group).	35
2	10 Januari 2023	Laporan Efisiensi Biaya	14
3	25 Januari 2023	1. Permohonan Persetujuan Tingkat Kesehatan Bank Semester 2 2022; 2. Laporan Kinerja Keuangan Desember 2022.	58
4	27 Januari 2023	Permohonan Persetujuan Pimpinan Rapat RUPSLB 31 Januari 2023.	24
5	30 Januari 2023	1. Permohonan Persetujuan Laporan ICAAP Semester II Tahun 2022; 2. Laporan Pelaksanaan *Wholesale Credit Rating;* 3. Laporan Bulanan Audit Progres; 4. Laporan Kinerja Kredit *Wholesale*.	26
6	7 Februari 2023	1. Laporan Bulanan *Marketing Budget* Desember 2022; 2. Permohonan Persetujuan Struktur Organisasi; 3. Persetujuan Budaya Kedisiplinan Karyawan; 4. Persiapan *Prudential Meeting* OJK & Rasio LAR.	34
7	8 Februari 2023	Persiapan *Prudential Meeting* OJK.	26
8	16 Februari 2023	1. Permohonan Persetujuan Pembelian Kendaraan & Kerja Sama Transportasi *Daring*; 2. Laporan Strategi *Cross-selling & Update* Bisnis; 3. Laporan Perbaikan CASA; 4. Laporan *Update* Kepatuhan.	41
9	20 Februari 2023	1. Laporan Progres Audit; 2. Laporan Kinerja Keuangan Januari 2023.	57
10	27 Februari 2023	1. Permohonan Persetujuan Design Kewenangan Limit Kredit Baru pada periode Transisi untuk SME & *Wholesale;* 2. Permohonan Persetujuan Background & Rekomendasi Pinjaman Koperasi Sekunder Jasa Bukopin Seluruh Indonesia; 3. Laporan Pemetaan AYDA berdasarkan Umur.	32
11	28 Februari 2023	1. Laporan Progres : PUT VII; 2. Permohonan Persetujuan *Design* Kewenangan Limit Kredit Baru pada periode; Transisi untuk SME & *Wholesale*.	24
12	14 Maret 2023	1. Laporan Kolaborasi PT Bank KB Bukopin Tbk & PT. PLN; 2. *Update* Kredit Pensiun; 3. Bulk Auction Plan untuk Meningkatkan Kualitas Aset; 4. *Approval Pan Pacific*.	41
13	15 Maret 2023	Revisi Rencana Bisnis Bank.	25
14	16 Maret 2023	Laporan Perkembangan *General Audit* atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 oleh KAP Crowe.	43
15	28 Maret 2023	1. Laporan Presentasi Produk SME & Penyaluran KUR PT KB Bukopin Tbk tahun 2023; 2. Laporan Progres Audit; 3. Persetujuan *Background* & Rekomendasi Pinjaman Koperasi Sekunder Jasa Bukopin Seluruh Indonesia.	39
16	29 Maret 2023	1. Persetujuan Usulan Harga Saham PUT VII; 2. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2023.	39
17	03 April 2023	1. Persetujuan Usulan Harga Saham LPO VII; 2. Persetujuan ABS Tahap 2; 3. Persetujuan Pedoman Penyelesaian Kredit; 4. Persetujuan Pembayaran THR Taspen & Asabri; 5. Persetujuan Kebijakan Peran & Tanggung Jawab; 6. Laporan Progres BI *Fast;* 7. Laporan manajemen DPD & *Watchlist Monitoring*.	56

No.	Tanggal	Agenda	Jumlah Peserta
18	10 April 2023	1. Persetujuan Pencabutan Laporan Kepolisian PT. Tunas Muda Jaya (Lunas); 2. Persetujuan Implementasi AGMS tahun buku 2022.	23
19	12 April 2023	Laporan Respon Manajemen atas *Management Letter* KAP Crowe.	34
20	13 April 2023	Persiapan OJK *Meeting* Realisasi *Action Plan* Perbaikan Kinerja Bank.	11
21	17 April 2023	1. Persetujuan KPI Semester 2 2022; 2. *Approval of* KKBS.	17
22	27 April 2023	Laporan Kinerja Keuangan Maret 2023.	39
23	4 Mei 2023	Dampak Berakhirnya Relaksasi COVID-19 Terhadap Rasio NPL & CKPN Posisi April 2023.	11
24	10 Mei 2023	1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023; 2. Persetujuan Informasi Kebijakan Pelaporan kepada Direksi.	22
25	15 Mei 2023	Laporan Kinerja Keuangan April 2023.	49
26	22 Mei 2023	Isu Rekonsiliasi antara G/L dan *Ledger*.	44
27	29 Mei 2023	Persetujuan dan Laporan KKBS.	18
28	5 Juni 2023	1. Persetujuan dan Laporan Pengembalian Dana Tunggakan KLBI; 2. Laporan Strategi *Winback* PLN: *Host to Host* ATM & PPOB.	31
29	12 Juni 2023	Persetujuan dan Laporan Pengembalian Dana Tunggakan KLBI Part II.	19
30	15 Juni 2023	Persiapan Penutupan Cabang.	11
31	16 Juni 2023	Isu Rekonsiliasi GL.	44
32	19 Juni 2023	1. *Update* Rekonsiliasi GL; 2. Laporan Kinerja Keuangan Mei 2023; 3. Informasi Program KLBI KUT 1998-1999; 4. Persetujuan Kebijakan dan *Scorecard* KPI 2023.	52
33	23 Juni 2023	Persetujuan Pimpinan Rapat AGMS 2023 dan Laporan AGMS 2023.	26
34	23 Juni 2023	1. Persetujuan Revisi Bisnis Bank; 2. Persetujuan Penambahan Modal PT Bank KB Syariah - Penempatan Dana Setoran Modal; 3. Laporan Penambahan Modal PT Bank KB Bukopin Finance - Penempatan Dana Escrow Tahap Kedua.	23
35	3 Juli 2023	Laporan Progres Audit.	14
36	10 Juli 2023	Laporan Progres Audit (Lanjutan).	11
37	17 Juli 2023	Laporan Kinerja Keuangan Juni 2023.	34
38	24 Juli 2023	1. Permohonan Persetujuan Tingkat Kesehatan Bank; 2. Persetujuan Penjualan Aset Boedel Pailit Via Kurator PT Kagum Yakin Abadi (Hotel Gino Feruci Braga Bandung).	22
39	27 Juli 2023	Perubahan Struktur Organisasi.	14
40	31 Juli 2023	1. Persetujuan Laporan ICAAP Semester 1 2023; 2. Perubahan Struktur Organisasi; 3. Laporan Pemanfaatan TKA (Hal yang boleh dilakukan dan Tidak sebelum mendapatkan FnP).	22
41	7 Agustus 2023	1. Laporan dan Persetujuan KKBS; 2. Laporan Progres TFT Rekonsiliasi G/L and Ledger.	37
42	14 Agustus 2023	1. Laporan Kinerja Keuangan Juli 2023; 2. Laporan dan Persetujuan Hasil Tax Audit *Financial Year* 2018; 3. Laporan Informasi Penting Kepada Direksi (Kasus Gugatan PT. TGA & PT. BSG). Agenda Lain-lain.	41
43	21 Agustus 2023	1. Laporan Progres Audit; 2. Update terkait DPD dan Proyeksi Agustus 2023.	21
44	28 Agustus 2023	1. Laporan *Update Website;* 2. Credit *culture value up' course results report;* 3. Laporan Persiapan RBB 2024; 4. Laporan Tindak Lanjut Temuan SKAI oleh Direksi.	41
45	5 September 2023	1. Persetujuan Perpanjangan Shine External PMO; 2. Persetujuan *Budget Marcom* & Insentif.	28
46	11 September 2023	1. Persetujuan dan Laporan konversi modal PT Bank KB Bukopin Finance; 2. Persetujuan *Launching* KB Star dan Rencana Pemasaran; 3. Laporan Temuan OJK & Komitmen Direksi serta *Update* Kepatuhan September 2023. 4. Laporan Departemen AML Semester II 2023.	58

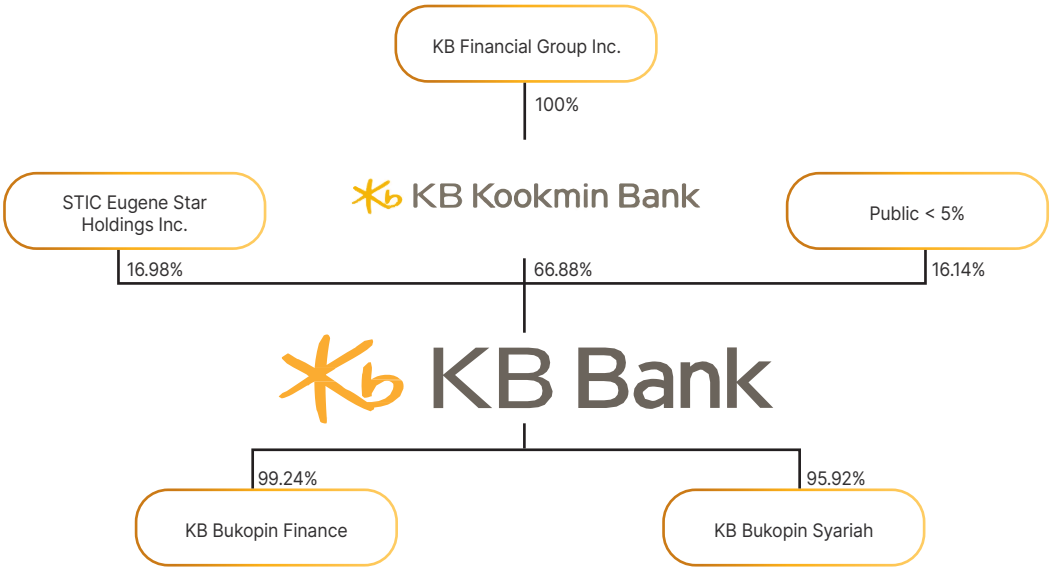
No.	Tanggal	Agenda	Jumlah Peserta
47	18 September 2023	1. Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2023; 2. Laporan Progres Rekonsiliasi TFT vs Buku Besar; 3. Laporan Pendapatan Akrual Bunga Ganda.	52
48	21 September 2023	Persetujuan Injeksi Modal untuk PT Bank KB Bukopin Syariah.	13
49	2 Oktober 2023	1. Laporan Progres Audit; 2. Persetujuan Kampanye Penagihan Kredit Macet.	24
50	9 Oktober 2023	1. Laporan Pembaruan Metamorfosis Perubahan Mendalam; 2. Laporan Penilaian Program Perjalanan Bisnis SME Total Marketing.	40
51	16 Oktober 2023	1. Laporan Kinerja Keuangan September 2023; 2. Persetujuan Hasil KPI Semester I tahun 2023; 3. Persetujuan Cessie PT. Mandiri Madura Barat; 4. Laporan Kepatuhan *Update*: Tindak Lanjut Temuan OJK dan Rekomendasi.	54
52	23 Oktober 2023	1. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi; 2. Laporan Perkembangan Penyelesaian *Open Items;* 3. Laporan Pemantauan Batas RWA; 4. Laporan Perkembangan Audit.	35
53	30 Oktober 2023	1. Persetujuan dan Laporan Bulanan *Marketing Budget* 2023; 2. Laporan Proses Perekrutan dan Manajemen *Outsourcing*.	48
54	06 November 2023	1. Laporan Analisis Progres PPOP Cabang Surabaya; 2. Laporan *Rebranding* Baru.	47
55	13 November 2023	1. Kinerja Keuangan Oktober 2023; 2. Perubahan Kewenangan & Pelaksanaan Komite Kredit; 3. Rencana SME Total *Marketing*.	69
56	17 November 2023	Persetujuan RBB 2024 - 2026.	34
57	20 November 2023	1. Laporan Verifikasi Dokumen Pinjaman Persetujuan *Rebranding: Brand Name* & Logo; 2. Persetujuan Perbedaan Pelaporan Eksternal Segment Kartu Kredit Hapus Buku (WO); 3. Laporan Audit *Progress* November 2023.	57
58	21 November 2023	Laporan *Progress* Audit November 2023.	9
59	23 November 2023	1. Persetujuan *Update* Rencana Pemasaran KB STAR M10; 2. *Deep Change* Bisnis KPR.	28
60	27 November 2023	1. Persetujuan Implementasi Perlindungan Data Pribadi (PDP); 2. Persetujuan RBB 2024 - 2026; 3. Persetujuan Flexy Pay.	56
61	04 Desember 2023	1. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi; 2. Persetujuan Perkembangan Penyelesaian *Open Items;* 3. Persetujuan Pusat Kontak Digital; 4. Persetujuan *Revamping* Manajemen *Outsourcing;* 5. Laporan *Paywatch*.	55
62	11 Desember 2023	1. Persetujuan Implementasi Pajak Natura; 2. Laporan Bulanan *Marketing Budget* Oktober 2023; 3. Laporan *Update* Fuel Card 3.0 Cabang Batam; 4. Laporan Pemeriksaan Khusus Kredit Pensiun.	51
63	14 Desember 2023	Laporan kinerja keuangan November 2023.	43
64	18 Desember 2023	1. Persetujuan Perpanjangan *Bad Loan Collection Campaign;* 2. Persetujuan Perubahan Kebijakan Hapus Tagih PT Bank KB Bukopin Tbk; 3. Persetujuan Indikator Kinerja Utama; 4. Persetujuan Materi *Public Expose* 2023.	58
65	21 Desember 2023	*Approval and Progress Update* SHINE.	37

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2023

No	Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1	Woo Yeul Lee	65	62	95.3
2	Robby Mondong	65	61	93.8
3	Dodi Widjajanto	65	59	90.7
4	Seng Hyup Shin**)	65	63	96.9
5	Yohanes Suhardi	65	63	96.9
6	Helmi Fahrudin	65	58	89
7.	Jung Ho Han*)	60	50	83.3
8.	Henry Sawali	65	60	92.3
9.	Young Eun Moon*)	65	58	89

*) Saudara Jung Ho Han, Young Eun Moon terhitung Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
**) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Seng Hyup Shin pada tanggal 8 Desember 2023.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



Pemegang saham utama dan pengendali KB Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd., perusahaan perbankan asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group, salah satu grup keuangan terbesar di Korea Selatan. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. Saham KB Financial Group tercatat di Korea Exchange (KRX) sejak 10 Oktober 2008 dan di New York Stock Exchange (NYSE) sejak 29 September 2008. Total aset KB Financial Group per 31 Desember 2019 mencapai KRW789,6 triliun (atau sekitar Rp9.326 triliun). Perusahaan itu telah mengembangkan sayapnya ke pasar global dengan jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, Kookmin melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia.

Sekretaris
Dewan Komisaris

Dewan Komisaris KB Bank memiliki Sekretaris Dewan Komisaris (Sekdekom) yang merupakan pejabat karir internal Perseroan. Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi Bank berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah melaksanakan fungsi kesekretariatan bagi Dewan Komisaris, dengan langsung bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Untuk mendukung kelancaran administrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, KB Bank membentuk Unit Kesekretariatan Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Unit ini bertugas menyelenggarakan kegiatan administratif yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris, memastikan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berjalan dengan efisien.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Sekretaris Dewan Komisaris PT. Bank Bukopin Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018 Tahun 2019, tanggal 04 September 2019, secara umum sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan;
2. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, dan pihak terkait lainnya berikut risalah rapatnya;
4. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;
7. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan Pihak Lain;
8. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

YOCKY EKO WICAKSONO **Sekretaris Dewan Komisaris**	**Usia**	:	40 Tahun
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Domisili	:	Jakarta
	Riwayat Pendidikan	:	Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya Malang
	Riwayat Pekerjaan	:	• Manager Regulasi dan Kebijakan PT Bank KB Bukopin Tbk • Staf Senior Hukum Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk
	Jabatan Lainnya	:	-
	Sertifikasi	:	• Manajemen Risiko Level 3 (BSMR) • Manajemen Risiko Level 2 (BSMR) • Manajemen Risiko Level 1 (LSPP) • General Banking Level 1 (LSPP) • Kepatuhan Perbankan Level Officer • Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI)
	Dasar Hukum Pengangkatan		• SKEP /0118-DIR/VIII/2023

PELATIHAN DAN/ATAU *WORKSHOP* SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Kick Off Shine Project	22 – 23 Februari 2023, Jakarta	DXC
Workshop Annual Report	3 April 2023, Jakarta	Inmark
English Course	13 September - 30 November 2023, Jakarta	Golden English Course
Training Ngbs-Be Budget Trf & App	25 Oktober 2023	Internal House (Diklat)
Workshop Board of Commissioner	08 November 2023	Internal House (Diklat)

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya guna mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun agenda rapat Dewan Komisaris dan mengkoordinasikan kepada semua pihak yang terkait guna memastikan efektivitas dan kelancaran pelaksanaannya, termasuk membuat dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Menyiapkan draft surat Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi ataupun saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris, hasil penelaahan komite-komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, tanggapan atas surat internal ataupun eksternal yang diterima Dewan Komisaris, dan sumber data/ informasi lainnya yang bersifat strategis sebagai masukan/ saran Dewan Komisaris kepada Direksi Perseroan;
3. Menginformasikan perkembangan regulasi terbaru yang relevan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk usulan/masukan dalam pembuatan, pembaharuan/ penyesuaian terhadap Surat Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kepada pihak- pihak terkait dalam pembuatan draft Surat Keputusan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris;
5. Menjalankan tugas sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak/unit terkait lainnya dalam Perseroan;
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris terkait hal-hal yang berkaitan dengan operasional Perseroan guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris;
7. Mengkoordinir dan mensupervisi unit kesekretariatan guna mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris, yaitu diantaranya terkait pengelolaan, penyimpanan, dan administrasi berkas-berkas Dewan Komisaris serta tugas dan kegiatan kesekretariatan lainnya yang diminta oleh Dewan Komisaris.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris KB Bank dibantu oleh Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, yang terdiri dari:

1. Komite Audit;
2. Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Komite Pemantau Risiko;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Semua komite di tingkat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di tingkat Dewan Komisaris KB Bank mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan best practices yang ditinjau ulang secara berkala.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan meningkatkan peran aktif untuk memastikan adanya tindak perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

Terbentuknya Komite Audit dilandasi oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Ketentuan Bursa Efek Jakarta Nomor-Kep-305/BEJ/07 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
2. Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;
6. POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan;
7. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
8. SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
9. POJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003 tahun 2019 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank KB Bukopin Tbk.

Piagam Komite Audit Bank KB Bank memuat aturan yang berkaitan dengan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, pelaporan dan rapat-rapat Komite Audit. Hal-hal tersebut diuraikan secara lebih rinci dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Komite Audit PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:
   a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang dari pihak independen dari luar Perseroan, dimana 1 (satu) orang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi minimal 5 (lima) tahun dan 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun;
   b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota;
   c. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan menjadi Ketua Komite lain paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
   d. Salah seorang anggota Komite Audit ditunjuk sebagai Sekretaris Komite;
   e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
   f. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas dimuat dalam laman (*website*) bursa dan laman Perseroan.

KETENTUAN MASA JABATAN

Merujuk kepada Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan mengenai masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) Periode berikutnya.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Susunan dan jumlah keanggotaan Komite Audit yang telah disahkan dalam Surat Keputusan SK No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bukopin	Keahlian	Periode
Stephen Liestyo	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2022-2023
Tippy Joesoef	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG, Manajemen Risiko dan Audit Keuangan	2023-2024
Eugene K. Galbraith	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2022-2023
Dewi Anggesty Sah Bandar	Anggota	Pihak Mandiri	Perbankan dan Audit Keuangan	2022-2025
Jacobus Sindu Adisuwono	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Audit Keuangan	2022-2025

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil Stephen Liestyo, Tippy Joesoef dan Eugene K. Galbraith dapat dilihat pada bagian Profile Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil anggota yang merupakan pihak mandiri dan pihak independen adalah sebagai berikut

Dewi Anggesty Sah Bandar
Anggota Komite Audit (Pihak Mandiri)

Usia	58 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bekasi
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (Ir) Ekonomi Pertanian (Agribisnis), Institut Pertanian Bogor (1988) • Master Management (MM) in Finance, Universitas Gadja Mada (1993)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Manajemen Kualitas Biz Retail Banking - BTPN (2012-2017); • Komisaris Independen PT DMS Modal Ventura (2019-sekarang); • Mitra Senior PT INOFIN Consulting (2018-sekarang).
Jabatan Lainnya	• Komisaris Independen PT DMS Modal Ventura (2019-sekarang) • Senior Partner PT INOFIN Consulting (2018- sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023
Kualifikasi	Perbankan dan Audit Keuangan

Jacobus Sindu Adisuwono **Anggota Komite Audit (Pihak Independen)**	**Usia**	61 Tahun
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Domisili	Jakarta
	Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan
	Riwayat Pekerjaan	• Sekretaris Jenderal Ikatan Auditor Intern Bank sebagai asosiasi profesi (2011-2014) • Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (2014-2017); • Anggota Dewan Pengawas - Ikatan Auditor Intern Bank (2017-2020); • Ketua Komite Audit The Institute of Internal Auditors Indonesia (2018-saat ini).
	Jabatan Lainnya	• Komisaris PT Asuransi Umum BCA (Agustus 2021-sekarang) • Anggota Komite Audit PT Bank BCA Syariah (2017-sekarang)
	Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023
	Kualifikasi	Akuntansi dan Audit Keuangan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Stephen Liestyo, Nanang Supriyatno, Eugene K. Galbraith, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini. Sementara kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Dewi Anggesty Sah Bandar, dan Jacobus Sindu Adisuwono dapat di lihat pada profil kedua anggota Komite Audit tersebut.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE AUDIT

Pendidikan dan/atau pelatihan Komite Audit dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan Komite Audit di dalam buku Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, atau kepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham. Komite Audit juga tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota komite lainnya. Independensi ini diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 untuk memastikan bahwa anggota Komite Audit dapat memberikan pendapatnya secara bebas tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal dalam menjalankan tugasnya.

Aspek Independensi	Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa audit;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
10. Menilai kecukupan pengendalian intern;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit senantiasa memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. Selain itu, Komite Audit juga mendukung tugas Dewan Komisaris dengan memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa audit.

RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dihadiri oleh seluruh anggota komite. Tata cara rapat telah diatur dalam Pedoman Kerja Komite Audit. Rapat diadakan minimal sekali sebulan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara terbanyak. Setiap keputusan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh semua anggota Komite Audit, kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit KB Bank telah menyelenggarakan rapat sebagaimana berikut (komposisi Komite Audit sesuai SK No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023) :

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
6 Januari 2023	• Pembahasan Hasil *Monitoring* Pengikatan Jaminan Kredit da/ atau Pengikatan Agunan di Notaris • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai dengan bulan Desember 2022	√	√	√	√	√
27 Januari 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut dari *Management Letter* KAP Crowe untuk Laporan Keuangan KB Bank Tahun Buku 2021 dan tahun-tahun sebelumnya • Pembahasan Hasil Pemeriksaan *Quality Assurance* cabang seluruh Indonesia (Selindo) Periode Januari - Desember 2022. • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampaik dengan Triwulan IV Tahun 2022	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
24 Februari 2023	• Pembahasan Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV, 2022; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan Bulan Januari 2023.	√	√	√	√	√
17 Maret 2023	Materi disampaikan oleh Departemen Manajemen, Topik Pembahasan Progress Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Konsolidasian oleh Crowe.	√	√	√	√	√
31 Maret 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit 14 Februari 2023 sampai dengan maret.	√	√	√	√	√
13 April 2023	Pembahasan Respon Manajemen atas *Management Letter*.	√	√	√	√	√
28 April 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Internal Audit Sampai Triwulan 1 Tahun 2023.	√	√	√	√	√
26 Mei 2023	• Pembahasan Laporan Hasil Tender KAP Tahun Buku 2023; • Pembahasan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan OJK sampai dengan Triwulan I Tahun 2023; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan 19 Mei 2023.	√	√	√	√	√
6 Juli 2023	• Pembahasan *Reliability & Reliance IT Security* terhadap *Cyber Crime* Pembahasan Realisasi ; • Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan 12 Juni 2023.	√	√	√	√	√
28 Juli 2023	• Pembahasan Monitoring dan Progress Tindak Lanjut Hasil Temuan OJK; • Tindak Lanjut Dari Rekomendasi Komite Audit mengenai Penyebab dan *Action Plan* Temuan *Back Up* CCTV di Cabang; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai Triwulan II, 2023.	√	√	√	√	√
1 September 2023	• *Monitoring* & *Progress* Tindak Lanjut Penyelesaian Komitmen Hasil Temuan OJK per jabatan pada tanggal 31 Agustus 2023; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai Agustus 2023.	√	√	√	√	√
29 September 2023	• Pembahasan Laporan Rekonsiliasi GL; • Pembahasan Laporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Semester 1 Tahun 2023; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai September 2023; • *Update Progress* Temuan *Overdue Procurement*.	√	√	√	√	√
27 Oktober 2023	• Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Internal dan SOP Berdasarkan Hasil Observasi QA dan Evaluasi Temuan Berulang di Unit Kerja Kantor Pusat & Cabang; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Triwulan III Tahun 2023.	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
24 November 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan 10 November 2023.	√	√	√	√	√
14 Desember 2023	• Pembahasan terkait Perkembangan Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Cabang yang Belum Memenuhi Standar Operasional Bank; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai dengan 04 Desember 2023.	√	√	√	√	√

X= Absen/V = Hadir

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Bank KB Bukopin juga telah mengikuti Rapat yang diselenggarakan oleh unit kerja lain untuk membahas materi yang terkait dengan penugasan kepada Komite Audit. Adapun rapat tersebut adalah sebagaimana berikut (komposisi Komite Audit sesuai SK No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023) :

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
6 Januari 2023	• Pembahasan Hasil *Monitoring* Pengikatan Jaminan Kredit da/ atau Pengikatan Agunan di Notaris; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai dengan bulan Desember 2022.	√	√	√	√	√
27 Januari 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut dari Management Letter KAP Crowe untuk Laporan Keuangan Bank KB Bukopin Tahun Buku 2021 dan tahun-tahun sebelumnya; • Pembahasan Hasil Pemeriksaan *Quality Assurance* cabang seluruh Indonesia (Selindo) Periode Januari - Desember 2022; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampaik dengan Triwulan IV Tahun 2022.	√	√	√	√	√
24 Februari 2023	• Pembahasan Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV, 2022; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan Bulan Januari 2023.	√	√	√	√	√
17 Maret 2023	• Materi disampaikan oleh Departemen Manajemen, Topik Pembahasan Progress Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Konsolidasian oleh Crowe.	√	√	√	√	√
31 Maret 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit 14 Februari 2023 sampai dengan maret.	√	√	√	√	√
13 April 2023	Pembahasan Respon Manajemen atas *Management Letter*.	√	√	√	√	√
28 April 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Internal Audit Sampai Triwulan 1 Tahun 2023.	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
26 Mei 2023	• Pembahasan Laporan Hasil Tender KAP Tahun Buku 2023; • Pembahasan *Progress* Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan OJK sampai dengan Triwulan I Tahun 2023; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan 19 Mei 2023.	√	√	√	√	√
06 Juli 2023	• Pembahasan *Reliability & Reliance IT Security* terhadap *Cyber Crime* Pembahasan Realisasi; • Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan 12 Juni 2023.	√	√	√	√	√
28 Juli 2023	• Pembahasan *Monitoring* dan *Progress* Tindak Lanjut Hasil Temuan OJK; • Tindak Lanjut dari Rekomendasi Komite Audit mengenai Penyebab dan *Action Plan* Temuan *Back Up* CCTV di Cabang; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai Triwulan II, 2023.	√	√	√	√	√
01 September 2023	• *Monitoring* & *Progress* Tindak Lanjut Penyelesaian Komitmen Hasil Temuan OJK per jabatan pada tanggal 31 Agustus 2023; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai Agustus 2023.	√	√	√	√	√
29 September 2023	• Pembahasan Laporan Rekonsiliasi GL; • Pembahasan Laporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Semester 1 Tahun 2023; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai September 2023; • *Update Progress* Temuan *Overdue Procurement*.	√	√	√	√	√
27 Oktober 2023	• Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Internal dan SOP Berdasarkan Hasil Observasi QA dan Evaluasi Temuan Berulang di Unit Kerja Kantor Pusat & Cabang; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Triwulan III Tahun 2023.	√	√	√	√	√
24 November 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan 10 November 2023.	√	√	√	√	√
14 Desember 2023	• Pembahasan terkait Perkembangan Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Cabang yang Belum Memenuhi Standar Operasional Bank; • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan 04 Desember 2023.	√	√	√	√	√
Jumlah	**Jumlah Rapat**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
	Jumlah Kehadiran	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
	Tingkat Kehadiran	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit telah dilaksanakan sesuai Program Kerja yang telah disetujui Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Piagam Komite Audit serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

REALISASI KEGIATAN KOMITE AUDIT

Sesuai Program Kerja Komite Audit Tahun 2023, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan meliputi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk;
2. Melakukan penelaahan atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang disampaikan secara triwulanan oleh Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan dan secara semesteran kepada OJK yang memuat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan perkembangan tindak lanjut hasil Audit SKAI selama tahun 2022 serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja SKAI secara berkala melalui rapat bersama SKAI;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui rapat-rapat dengan Divisi Kepatuhan.

KEBIJAKAN DAN BESARAN REMUNERASI BAGI KOMITE AUDIT NON KOMISARIS

No	Uraian	Catatan
1	Gaji/Honorarium	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
2	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali Upah
3	Bantuan Pendidikan	1 (satu) kali gaji pokok/honorarium pokok
4	Tunjangan Utilities	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
5	Fasilitas Perjalanan Dinas	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
6	Tunjangan Kesehatan	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
7	Bonus/Tantiem	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018 dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kemampuan Perusahaan

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Kewajiban bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi didasari beberapa peraturan antara lain:
1. PBI No. 8 April PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Serta kebijakan lain yang telah dimiliki oleh Perusahaan terkait akan Komite Remunerasi dan Nominasi:
1. Surat Keputusan No. 0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola *Perusahaan (Good Corporate Governance)* KB Bank;
2. Surat Keputusan No. 1805 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Bukopin Tbk;
3. Keputusan No. 001 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Bukopin Tbk.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi KB Bank telah dibekali dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2019. Pedoman tersebut mengatur beragam aspek, termasuk tugas, kewenangan, struktur, kode etik, jadwal kerja, rapat, pelaporan, serta remunerasi dan fasilitas kerja.

Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam pedoman tersebut, sebagai upaya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dijunjung tinggi oleh KB Bank. Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja yang jelas, diharapkan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menjalankan perannya secara profesional dan transparan, serta memberikan kontribusi yang positif bagi kesuksesan perusahaan.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dijelaskan persyaratan sebagai anggota Komite yaitu:
1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perseroan;
2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perseroan;
4. Memiliki keahlian di bidang Perbankan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya serta memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.

Selain itu kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menurut pedoman kerja sebagai berikut:
1. Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang Komisaris;
   c. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau satu orang perwakilan pegawai.
2. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen;
4. Ketua dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain;
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
6. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
7. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional perseroan;
8. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai harus memiliki pengetahuan mengenal sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi *(succession plan)* perseroan.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan di dalam SK pengangkatan, sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 4 juga telah dijelaskan bahwa masa jabatan anggota komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Susunan dan jumlah keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per Januari 2023, yang telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 0042 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bukopin	Keahlian	Periode
Hae Wang Lee	Ketua	Komisaris Independen	Hukum	2021-2024
Jerry Marmen	Anggota	Komisaris Utama	Manajemen Risiko, dan GCG	2021-2024
Nam Hoon Cho	Anggota	Wakil Komisaris Utama	Perbankan, dan Manajemen	2021-2023
Tippy Joesoef	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG, Manajemen Risiko dan Audit Keuangan	2021-2024
Nanang Supriyatno	Anggota	Komisaris	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2021-2024
Sukriansyah S. Latief	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen, dan GCG	2021-2023
Gamaridha Akhirul AR	Anggota	Alt. Divisi Sumber Daya Manusia	Perbankan, Manajemen	2022-2025

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Profil Hae Wang Lee, Jerry Marmen, Nam Hoon Cho, Tippy Joesoef, Nanang Supriyatno, dan Sukriansyah S. Latief dapat dilihat pada bagian Profile Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil Gamaridha Akhirul AR adalah sebagai berikut.

Gamaridha Akhirul AR
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Usia	43 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bandung
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen (S2) Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Riwayat Pekerjaan	• Konsultan Senior HR pada SEVERAL COMPANY • General Manager HR pada PT SHINHAN BANK INDONESIA • Kepala Departemen Remunerasi pada BANK WOORI SAUDARA • Accounting Officer di BANK BTPN • Equipment Control Data pada PT. ZHONGHAI INDO SHIPPING
Jabatan Lainnya	HC Strategy, Policy, Development & Service Department Head perseroan
Dasar Hukum Pengangkatan	SK No. 0088 tanggal 15 Juli 2022
Kualifikasi	Perbankan dan Manajemen

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pendidikan dan/atau pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Bab Profile di dalam buku Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Terkait dengan Fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, serta pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Kebijakan Remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara berkala (tahunan) terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur Remunerasi;
   b. Kebijakan Remunerasi; dan
   c. Besaran Remunerasi.
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terkait Dengan Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang ada dibawah koordinasi Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

1. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Unit-unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Menjalankan tugas dengan cermat dan baik;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Menyusun laporan kegiatan selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite di bawah Dewan Komisaris;

7. Terkait dengan Remunerasi yang bersifat tetap, Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun Kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Terkait Remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan poin 7, kebijakan yang disusun juga harus mendorong dilakukannya *prudent taking risk*.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan dihadiri oleh ketua dan mayoritas dari jumlah anggota. Keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah untuk disimpan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi KB Bank telah menyelenggarakan rapat sebagaimana berikut (komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK No. 0042 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
03/01/2023	• Wawancara Kandidat CSO • Pembahasan Hasil Interview • Pembahasan Usulan Kebijakan Remunerasi Tenaga Kerja Asing	√	√	√	√	√	√	√
02/02/2023	Pembahasan Proposal Remunerasi Direksi Korea	√	√	√	√	√	√	√
16/03/2023	Pembahasan Hasil KPI Manajemen Tahun 2022	√	√	√	√	√	√	√
13/04/2023	Penetapan Remunerasi yang Bersifat Variabel Direksi Berdasarkan Hasil Kinerja Tahun 2022	√	√	√	√	√	√	√
16/08/2023	• Wawancara Kandidat KTKT Non Komisaris (Sdr. Dinan S & Sdr. Siswahyudi) • Pembahasan Hasil Interview	√	√	√	√	√	√	√
21/09/2023	Pembahasan Perubahan Kebijakan Remunerasi Tenaga Kerja Asing	√	√	√	√	√	√	√
06/10/2023	• Pembahasan Pelaporan Hasil KPI BOD Semester 1 2023 (PIC: *Finance Group*) • Pembahasan *update* skala gaji pegawai (PIC: Divisi HC)	√	√	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
27/12/2023	Wawancara dan Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi atas Calon Direktur Keuangan KB Bank	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah	**Jumlah Rapat**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
	Tingkat Kehadiran	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
	Rata-Rata Kehadiran	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

X = Absen/V = Hadir

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi KB Bank telah menyelenggarakan rapat sebagaimana berikut (komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK No. 0042 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023):

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
03 /01/2023	• Wawancara Kandidat CSO • Pembahasan Hasil *Interview* • Pembahasan Usulan Kebijakan Remunerasi Tenaga Kerja Asing	√	√	√	√	√	√	√
02/02/2023	Pembahasan Proposal Remunerasi Direksi Korea	√	√	√	√	√	√	√
16/03/2023	Pembahasan Hasil KPI Manajemen Tahun 2022	√	√	√	√	√	√	√
13/04/2023	Penetapan Remunerasi yang Bersifat Variabel Direksi Berdasarkan Hasil Kinerja Tahun 2022	√	√	√	√	√	√	√
16/08/2023	• Wawancara Kandidat KTKT Non Komisaris (Sdr. Dinan S & Sdr. Siswahyudi) • Pembahasan Hasil *Interview*	√	√	√	√	√	√	√
21/09/2023	Pembahasan Perubahan Kebijakan Remunerasi Tenaga Kerja Asing	√	√	√	√	√	√	√
06/10/2023	• Pembahasan Pelaporan Hasil KPI BOD Semester 1 2023 (PIC: *Finance Group*) • Pembahasan *update* skala gaji pegawai (PIC: Divisi HC)	√	√	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
27/12/2023	Wawancara dan Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi atas Calon Direktur Keuangan Bank KB Bukopin	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah	Jumlah Rapat	8	8	8	8	8	8	8
	Tingkat Kehadiran	8	8	8	8	8	8	8
	Rata-Rata Kehadiran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pada tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dengan memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Rekomendasi ini didasarkan pada kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Komite sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Proses ini melibatkan penyusunan kebijakan, analisis data bakal calon, dan identifikasi calon yang memenuhi syarat.

Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023. Sistem remunerasi tersebut mencakup penggajian, tunjangan, tantiem, dan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa remunerasi yang diberikan sesuai dengan kontribusi dan kinerja para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta mendukung pencapaian tujuan bank secara efektif.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas proses manajemen risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada Bank. Hingga saat ini Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

DASAR HUKUM

Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

KB Bank telah menerapkan program pengembangan karyawan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Program ini menyasar para pegawai potensial yang termasuk dalam Talent Pool, memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau aktivitas terkait manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan, serta program sejenis lainnya.

Dengan adanya program ini, Bank memiliki cadangan internal yang dapat dipertimbangkan sebagai calon anggota Direksi jika dibutuhkan, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses nominasi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan Bank, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kandidat internal, Bank juga dapat mempertimbangkan kandidat eksternal yang memenuhi syarat, seperti yang diperoleh melalui referensi dari Pemegang Saham atau Pengurus Bank, atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2019 tentang Pedoman Nominasi, sehingga memungkinkan Bank untuk memiliki beragam opsi dalam memilih calon anggota Direksi yang terbaik.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Bank memiliki Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini.

Pembaharuan/penyempurnaan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko KB Bank terakhir dilakukan tahun 2019 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 28 Maret 2019.

Dalam Pedoman diatur mengenai:

1. Tugas dan Tanggung jawab;
2. Wewenang;
3. Struktur Keanggotaan;
4. Struktur Keanggotaan;
5. Waktu Kerja;
6. Rapat;
7. Pelaporan;
8. Rangkap Jabatan ketua Komite;
9. Remunerasi dan Fasilitas Kerja;
10. Penilaian Kinerja.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus dari pihak independen dengan tujuan agar dapat bersifat obyektif dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Pedoman Komite Pemantau Risiko juga menyebutkan mengenai kode etik keanggotaan antara lain:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Bersikap professional, jujur, dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Bersikap professional, jujur, dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
4. Menjunjung tinggi dan menjaga citra (visi dan misi perseroan), kehormatan dan martabat perseroan serta kehormatan dan martabat diri pribadi;
5. Bersikap *prudent* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
6. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;

7. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi;
8. Menjaga dan menyimpan kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Susunan dan jumlah keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023, yang telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 0041 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bukopin	Keahlian	Periode
Tippy Joesoef	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, GCG, Manajemen Risiko dan Audit Keuangan	2022-2024
Jerry Marmen	Anggota	Komisaris Utama	Manajemen Risiko dan GCG	2022-2023
Nanang Supriyatno	Anggota	Komisaris	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2023-2024
Stephen Liestyo	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2022-2023
Togar Natigor Siregar	Anggota	Pihak Mandiri	Akuntansi dan Manajemen Risiko	2022-2025
Rahardja Alimhamzah	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, GCG, dan Manajemen Risiko	2022-2025

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil Tippy Joesoef, Jerry Marmen, Nanang Supriyatno, dan Stephen Liestyo, dapat dilihat pada bagian Profile Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini. Sementara profil Togar Natigor Siregar dan Rahardja Alimhamzah adalah sebagai berikut.

Togar Natigor Siregar
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (1988) • S2 Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2008)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Departemen Administrasi Hukum Kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bank Exim Indonesia (2020-Present) • Kepala Unit Pengendalian Kredit, PT.Bank DBS Indonesia (4 Juni 2010 – 31 Agustus 2019) • Kepala Unit Pengendalian Risiko Bank Barclays Indonesia (16 Juli 2009-31 Mei 2010) • Kepala Divisi Administrasi & Pengendalian Kredit Bank Internasional Indonesia (BII) (29 Okt 2007-15 Juli 2009) • Kepala Risiko & Kredit Kontrol - Bank Standard Chartered (Des 2005 – 23 Okt 2007) • Manajer Senior Manajemen Risiko & Kepatuhan - Bank Standard Chartered (Maret 2002 – Nov 2005)
Jabatan Lainnya	• Kepala Administrasi Hukum Kredit Lembaga Pembiayaan • Ekspor Indonesia (LPEI) Bank Exim Indonesia. (2020-Present)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0003 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022
Kualifikasi	Akuntansi dan Manajemen Risiko

Rahardja Alimhamzah **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	**Usia**	57 Tahun
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Domisili	Jakarta
	Riwayat Pendidikan	• S1 Teknik Mesin & Industri di University of New South Wales, Sydney-Australia (1986-1989) • S2 Magister Manajemen Keuangan & Akuntansi di Universitas Indonesia (1992-1994)
	Riwayat Pekerjaan	• Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Manajemen Risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2021-Present) • Penasihat Teknis PT ABI Komoditi Berjangka (2020-Present); • Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sompo Insurance Indonesia (2020-Present). • Komisaris Utama PT CIMB Niaga Sekuritas (Maret 2018 - Agustus 2020) • Direktur Bisnis Non-Ritel PT Bank Cimb Niaga (Maret 2016 – April 2020) • Direktur corporate Banking PT Bank DBS Indonesia (Mei 2014- Agustus 2014) • Direktur corporate Banking PT Bank DBS Indonesia (April 2009- April 2014) • Direktur corporate Banking PT Bank Rabobank International (April 2003 -April 2009)
	Jabatan Lainnya	• Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Manajemen Risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2021-Present); • Penasihat Teknis PT ABI Komoditi Berjangka (2020-Present); • Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sompo Insurance Indonesia (2020-Present).
	Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0003 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022
	Kualifikasi	Perbankan, GCG, dan Manajemen Risiko

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pendidikan dan/atau pelatihan Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab Profile di dalam buku Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap Direksi dalam mengelola perseroan. Mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Tugas utama komite ini adalah memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau masalah yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga bertugas untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari Dewan Komisaris, terutama terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh perseroan. Dengan demikian, Komite Pemantau Risiko berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen risiko di perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mengidentifikasi serta menangani risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja dan kelangsungan bisnis perseroan secara efektif.

Selain Tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Pemantau Risiko wajib:

1. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
4. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bersama dengan Dewan Komisaris;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan Dewan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi atas Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola;
7. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara Periodik;
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk:

1. Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk:
   a. Pihak Perseroan (termasuk pekerja Perseroan);
   b. Pihak berkepentingan lainnya.
2. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Penyelenggaraan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun sesuai dengan peraturan di dalam Pedoman Komite Pemantau Risiko Bank Bukopin tahun 2019. Rincian rapat Komite pemantau Risiko pada tahun 2023 (komposisi Komite Pemantau Risiko sesuai SK No. 0041 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
06 /01/2023	• *Update Matriks* Perkembangan *Human Capital* dan *Performance Assessment* • *Update* Perkembangan Pengkinian Data Nasabah dan KYC (*Know Your Customer*) • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan November Tahun 2022. • Pembahasan Perkembangan Kebijakan dan kesiapan BCM (*Business Continuity Management*), BCP (*Business Continuity Plan*) dan DRP (*Disaster Recovery Planning*)	√	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
27/01/2023	Pembahasan Penilaian Profil Risiko PT. Bank KB Bukopin Tbk Triwulan IV Tahun 2022.	√	√	√	√	√	√
24/02/2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Januari 2023; • Pembahasan Quarterly Stress Test.	√	√	√	√	√	√
06/04/2023	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Februari 2023	√	√	√	√	√	√
28/04/2023	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Triwulan I 2023	√	√	√	√	√	√
26/05/2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko April 2023 • Pembahasan *Bottom-up Stress Test: Market, Solvency & Sensitivity* • Pembahasan *Stress Test* Covid-19 Q1 2023	√	√	√	√	√	√
06/07/23	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Mei 2023	√	√	√	√	√	√
28/07/23	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Q2-2023	√	√	√	√	√	√
01-Sep-23	• Pembahasan *Stress Test Kredit*, Pasar dan Likuiditas; • Pembahasan *New Market* RWA Basel III; • Pembahasan Laporan Bulanan Risiko Juli 2023.	√	√	√	√	√	√
29-Sep-23	• Pembahasan *progress Follow Up Findings* OJK; • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Agustus 2023.	√	√	√	√	√	√
27-Oct-23	• Pembahasan *progress Follow Up Findings* OJK; • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Triwulan III tahun 2023.	√	√	√	√	√	√
24-Nov-23	• Pembahasan *progress Follow Up Findings* OJK; • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Oktober 2023.	√	√	√	√	√	√
Jumlah	**Jumlah Rapat**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
	Tingkat Kehadiran	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
	Rata-Rata Kehadiran	**100%.**	**100%.**	**100%.**	**100%.**	**100%.**	**100%.**

x = tidak hadir / √ = hadir

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki peran sentral dalam membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Perseroan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur dan metodologi pengelolaan risiko telah mencukupi, sehingga aktivitas Perseroan tetap terkendali dan berada dalam batas risiko yang dapat diterima.

Dalam menjalankan fungsi ini, Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko Perseroan. Komite Pemantau Risiko memastikan bahwa metode yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memonitor risiko-risiko yang dihadapi Perseroan telah sesuai dengan praktik terbaik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, Komite juga berperan dalam mengawasi implementasi dan efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko yang telah diambil oleh Direksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengelola risiko, sehingga risiko-risiko yang dihadapi dapat dikelola secara efektif dan tetap berada dalam batas risiko yang dapat diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, peran Komite Pemantau Risiko menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan operasional Perseroan dalam menghadapi tantangan risiko yang kompleks dan beragam.

Untuk maksud tersebut di atas, selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan untuk melaksanakan Program Kerja Tahun 2023, antara lain:
1. Pemantauan Risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas berbagai laporan risiko dari Divisi Manajemen Risiko yang dilakukan secara Bulanan;
2. Rapat Pemantauan Laporan Profil Risiko yang diterima dari Divisi Manajemen Risiko dilakukan secara Triwulanan;
3. Mengikuti kegiatan Seminar/Workshop ataupun Training/Pendidikan Pelatihan yang diselenggarakan untuk masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko.

Kebijakan dan Besaran Remunerasi Bagi Komite Pemantau Risiko

No	Uraian	Catatan
1	Gaji/Honorarium	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
2	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali Upah
3	Bantuan Pendidikan	1 (satu) kali gaji pokok/honorarium pokok
4	Tunjangan Utilities	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
5	Fasilitas Perjalanan Dinas	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
6	Tunjangan Kesehatan	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
7	Bonus/Tantiem	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018 dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kemampuan Perusahaan

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan dibentuk dengan tujuan utama untuk mendukung Dewan Komisaris dalam mengevaluasi implementasi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan. Salah satu fokus utamanya adalah menilai kecukupan pengendalian internal serta pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi di seluruh lapisan perusahaan.

Komite ini bertugas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Perseroan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa proses pengendalian internal telah dijalankan dengan efektif. Selain itu, Komite ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi kepatuhan diintegrasikan secara efisien dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Dengan pendekatan ini, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan berperan penting dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan standar yang berlaku, serta memastikan bahwa sistem pengendalian internal beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Ini membantu meminimalkan risiko-risiko terkait kepatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi perusahaan secara keseluruhan.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk No. SKEP/016-KOM/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penyempurnaan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan telah mengadopsi Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun secara khusus untuk Konglomerasi Keuangan, sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014. Pedoman ini mengatur langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh komite dalam menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi.

Dokumen ini merinci tugas, tanggung jawab, serta kewenangan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan, serta menetapkan kerangka kerja untuk evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan konglomerasi keuangan. Pedoman ini juga memuat prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi.

Selain itu, Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini juga membahas tentang tata cara pelaporan, pembahasan, serta tindak lanjut terhadap temuan atau rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi Tata Kelola Terintegrasi. Dengan demikian, dokumentasi ini menjadi panduan yang penting bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite;
2. Masa Jabatan Komite;
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite;
4. Rapat Komite;
5. Pelaporan;
6. *Self Assessment*.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE

Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi juga menyebutkan mengenai persyaratan keanggotaan antara lain:

1. Komite paling sedikit terdiri dari:
   a. Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama;
   b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
   c. Pihak Independen dari Anggota Komite Entitas Utama dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite Entitas Utama.
3. Penetapan Anggota Komite dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan diatur dalam surat keputusan tersendiri yang dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik dan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidangnya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Entitas dan dapat dipilih kembali.

STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN

Susunan dan jumlah keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan per 31 Desember 2023, yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. No. 0043 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di KB Bank	Keahlian
Sukriansyah S. Latief	Ketua	Komisaris Independen	Manajemen
Eugene K. Galbraith	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan
Hae Wang Lee	Anggota	Komisaris Independen	Hukum

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Sukriansyah S. Latief	Eugene K. Galbraith	Hae Wang Lee
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√

PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Profil Sukriansyah S. Latief, Tippy Joesoef, Eugene K. Galbraith, dan Hae Wang Lee, dapat dilihat pada bagian Profile Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;

3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja yang relevan pada Entitas Utama atau pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Rincian penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan pada tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Direksi Sukriansyah S. Latief, Tippy Joesoef, Eugene K. Galbraith, dan Hae Wang Lee adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		Sukriansyah S. Latief	Eugene K. Galbraith	Hae Wang Lee
22 September 2023	1. Pembahasan Implementasi GRC dan Laporan Financial Group Triwulan III 2023 2. Pembahasan Isu Strategis Financial Group PT Bank KB Bukopin Tbk, Tahun 2024.	√	√	√

X = Absen/V = Hadir

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, KONGLOMERASI KEUANGAN

Dengan jumlah anggota yang telah sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan serta bertindak secara independen, dalam tahun 2023 Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan melakukan penilaian atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan memastikan kecukupan pengendalian intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Melakukan koordinasi dengan organ Konglomerasi Keuangan yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Hasil Penilaian Kinerja Komite di Tingkat Dewan Komisaris Tahun 2023

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan.

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik yang terlihat dari:

1. Tercapainya seluruh Rencana/Program Kerja Komite-komite yang ditetapkan pada awal tahun 2023;
2. Pelaksanaan Rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite.

Pelaksanaan program dan rencana kerja komite-komite dilakukan melalui rapat-rapat yang melibatkan Direktorat terkait serta evaluasi mendalam di luar rapat, yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit memberikan pendapat profesional terhadap laporan dan informasi keuangan, menelaah ketaatan terhadap peraturan, serta mengevaluasi kinerja auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab atas kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai peraturan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko memonitor proses perbaikan Perseroan terkait manajemen risiko, sementara Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris secara berkala mengevaluasi kinerja komite-komite ini. Pada tahun 2023, tiap komite terlihat telah menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan frekuensi rapat, kehadiran, dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Komite di Bawah Direksi

KB Bank memiliki 6 (enam) Komite dibawah Direksi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Kredit;
3. *Assets And Liabilities Committee* (ALCO);
4. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi;
5. Komite Restrukturisasi Kredit.
6. Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko di PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko dengan melibatkan evaluasi, persetujuan, penilaian, dan memberikan rekomendasi terkait risiko Kredit, Operasional, Pasar, Likuiditas, Kepatuhan, Stratejik, Hukum, dan Reputasi. Tugas komite ini meliputi pemantauan dan penyesuaian kebijakan serta praktik manajemen risiko, sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Komite ini memiliki peran penting dalam memastikan bank dapat mengelola risiko secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

PEDOMAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko Perseroan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0156 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko. Selain itu, pembentukan Komite Manajemen Risiko berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
2. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. POJK No. No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk;
6. Surat Keputusan No. 0110 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk;
7. Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko di PT Bank KB Bukopin Tbk terdiri dari anggota tetap dan undangan, yang meliputi *Division Head, Department Head, Regional Head*, dan/atau pihak lain yang relevan dengan topik rapat. Rapat komite dapat diselenggarakan dengan kehadiran Ketua Komite atau Pengganti Ketua, dan minimal 51% anggota tetap untuk mencapai kuorum. Pertemuan bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui platform daring. Hal ini menjamin keberlangsungan komunikasi yang efektif serta pengambilan keputusan yang tepat terkait manajemen risiko bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Susunan Komite Manajemen Risiko

Ketua (merangkap anggota)	Presiden Direktur
Pengganti Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Enterprise Risk Management Department Head
Anggota Tetap	Direksi
Undangan	Division Head, Department Head, Regional Head dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko diantaranya, sebagai berikut:

1. Merekomendasikan dan/atau menyetujui penyusunan kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, penentuan limit beserta penetapan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pembahasan ata laporan profil risiko Bank secara berkala sebelum laporan profil risiko disampaikan ke Regulator.
5. Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bankwide*.
6. Melakukan pembahasan terkait *risk appetite*, serta memantau dan mengelola risiko Bank agar berada dalam batasan risiko yang telah ditentukan.

7. Melakukan kajian terhadap *Stress Test* termasuk diantaranya skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana kontinjensi apabila diperlukan.
8. Memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, dan persetujuan eksposur kepada pihak terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
9. Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
10. Pengkajian berbagai risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi (namun tidak terbatas pada):
    a. Risiko Kredit,
    b. Risiko Pasar dan Likuiditas;
    c. Risiko Operasional termasuk *Fraud*;
    d. Risiko Reputasi;
    e. Risiko Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi;
    f. Risiko Hukum dan Litigasi;
    g. Risiko Kepatuhan;
    h. Risiko Stratejik;
    i. Isu risiko signifikan lainnya (diluar yang telah disebutkan di atas) secara berkala.
11. Pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal dengan menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
12. Memantau dan mengevaluasi kinerja Divisi Manajemen RIsiko.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat minimal 4 kali setahun, membahas laporan profil risiko dan isu-isu terkait manajemen risiko seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Keputusan Komite dapat diambil jika hadir Ketua atau Pengganti Ketua dan minimal 51% dari total anggota tetap, baik dalam rapat langsung maupun daring. Hal ini memastikan konsistensi evaluasi risiko serta pengambilan keputusan yang akurat.

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	21 Februari 2023	• RWA Basel III Implementation (sebagai informasi) • Stress Test Q4 – 2022 (Credit, Market & Liquidity) (sebagai informasi) • Peers Comparison Q3-2022 (sebagai informasi) • Operational & IT Risk Update (sebagai informasi)
2	05 April 2023	• Risk Profile Guideline Annual Report (sebagai informasi) • Risk Monthly Report as of February 2023 (sebagai informasi) • Operational & IT Risk Update (sebagai informasi)
3	30 Mei 2023	• Kebijakan Bencana (sebagai persetujuan) • BUST: Solvency, Sensitivity & Liquidity (sebagai persetujuan) • Risk Monthly Report as of April 2023 (sebagai informasi)
4	24 Juli 2023	• Laporan Profil Risiko Triwulan II 2023 (sebagai persetujuan)
5	21 Agustus 2023	• Matter Arising from Previous RMC (sebagai informasi) • Piagam KPR (sebagai persetujuan) • Stress Test Kredit, Pasar, Likuiditas (sebagai persetujuan) • ATMR Pasar Baru: Basel III (sebagai informasi) • Laporan Bulanan Risiko posisi Juli 2023 (sebagai informasi)
6	22 September 2023	• Matter Arising from Previous RMC (sebagai informasi) • Kebijakan Produk Program (sebagai persetujuan) • Pemantauan Rencana Tindak Stress (sebagai informasi) • Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi) • Laporan Bulanan Risiko posisi Agustus 2023 (sebagai informasi)
7	18 Oktober 2023	• Matter Arising from Previous RMC (sebagai informasi) • Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023 (sebagai informasi) • Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi) • Pemantauan Rencana Tindak Stress (sebagai informasi)
8	22 November 2023	• Matter Arising from Previous RMC (sebagai informasi) • Stress Test Kredit, Pasar, Likuiditas (sebagai persetujuan) • Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi)
9	20 Desember 2023	• Matter Arising from Previous RMC (sebagai informasi) • Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi) • Laporan Bulanan Risiko posisi November 2023 (sebagai informasi)

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan presensi kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Nama Direktur/peserta/jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran
Lee Woo Yeoul/President Director	9	9
Robby Mondong/Deputy President Director	9	7
Seng Hyup Shin/Finance Director	9	6
Yohanes Suhardi/Wholesale & SME Banking Director	9	7
Dodi Widjajanto/Compliance & Risk Director	9	8
Helmi Fahrudin/Retail & Operations Director	9	7
Henry Sawali/Credit Group Director	9	8
Jung Ho Han/ Strategic Director	2	2

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko Oleh Direksi

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa kinerja Komite Manajemen Risiko sudah baik dan telah membuktikan bahwa terus menerus melakukan perbaikan baik dari sisi kualitas materi yang disampaikan dan tindak lanjut concern anggota Komite Manajemen Risiko.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit adalah suatu Komite yang mempunyai tugas mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan dan persyaratan Kredit atas permohonan Kredit yang diajukan oleh (calon) Debitur kepada Unit Bisnis (Divisi Bisnis dan Cabang) yang berada dibawah Direktorat Ritel, Direktorat Komersial dan Direktorat Keuangan dan Perencanaan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Kelembagaan Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit secara kelembagaan/Forum/kelompok/Komite Kredit berdasarkan tingkatan limit kewenangan yang ditentukan dan diatur oleh Direksi untuk Segmen Kredit SME (UKM), Wholesale (Komersial) baik untuk Komite Kredit secara rapat/meeting/tatap muka maupun secara circulate.

Kewenangan individual limit/Job limit kewenangan memutus Kredit diberlakukan untuk jenis Kredit Ritel, Produk Kredit yang bersifat massal (*mass product*), Kredit tertentu yang bersifat khusus, serta pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian atau penagihan Kredit bermasalah yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah:

1. Memutus pemberian Kredit (baru, tambahan, penurunan, perubahan syarat dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur Kredit dalam kategori Non-Restruktur, Struktur Kredit termasuk namun tidak terbatas pada limit Kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis Kredit, sifat Kredit, jangka waktu Kredit, porsi pembiayaan, syarat Kredit/*covenant*, dan agunan.
2. Memutus tindakan yang diambil Bank dalam rangka Perbaikan, Penyehatan, dan penyelesaian Kredit baik itu Perbaikan, Penyehatan dan Penyelesaian Kredit yang masih dalam pengelolaan Bisnis Unit maupun Perbaikan, Penyehatan atau penyelesaian Kredit yang dikelola oleh Bisnis Unit atau *Special Asset Management* (SAM).
3. Dalam mengambil keputusan terhadap kelayakan Kredit harus didasari oleh prinsip:
   a. Integritas & Kejujuran
   b. Professionalisme
   c. Kompetensi
   d. Independensi
   e. Obyektifitas
   f. Asas kehati-hatian Bank (prudential Banking)
   g. Ketentuan Persyaratan Kredit yang sehat dan ketentuan operasional Bank.
4. Tanggung jawab Lembaga Komite Kredit paling sedikit meliputi:
   a. Melaksanakan tugas terutama dalam proses pemberian persetujuan Kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
   b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit untuk memberikan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
   c. Memastikan bahwa setiap Kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat;
   d. Anggota Komite Kredit bertanggung jawab atas kualitas kelayakan Kredit pada saat permohonan Kredit tersebut diputuskan.
   e. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Kredit telah mengevaluasi, mempertimbangkan dan memutuskan kelayakan permohonan Kredit serta persyaratan Kredit yang diajukan pada saat Komite Kredit atas Proposal Kredit atau permohonan Kredit atau Aplikasi permohonan Kredit baru, tambahan dan atau perpanjangan antara lain seperti (penetapan, pengaturan, perubahan, penghapusan, pembebasan):

1. Plafon Kredit, termasuk untuk penambahan atau pengurangan/penurunan plafon Kredit atau pelunasan dipercepat.
2. *Interest During Construction* (IDC)/sejenisnya.
3. *Grace period* Kredit.
4. Penggunaan Kredit.
5. Suku bunga Kredit.
6. Jenis fasilitas Kredit.
7. Jangka waktu Kredit, termasuk perpanjangan, penambahan atau pengurangan jangka waktu
8. Jaminan atau agunan, termasuk penggantian atau menarik sebagian agunan.
9. Provisi
10. Biaya Administrasi.
11. Pengikatan Kredit dan Pengikatan Jaminan atau Agunan.
12. Denda Keterlambatan
13. Denda Pembatalan
14. Pencairan Kredit
15. Pembayaran Kewajiban
16. Persyaratan Kredit lainnya
17. Tata cara pengikatan Perjanjian Kredit & Agunan Kredit.

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Komite *Assets* dan *Liabilities Management* (ALCO) dibentuk oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE/197/DIR/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Kebijakan Assets and Liabilities Management Committee. ALCO bertanggung jawab dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilities, dengan mempertimbangkan pertumbuhan, kesinambungan bisnis, dan profitabilitas. Keputusan ALCO hanya dapat diubah melalui rapat ALCO. Komite ini dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan pasar uang, tingkat bunga, nilai tukar, dan sektor perbankan, khususnya terkait penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada aset produktif.

Struktur Keanggotaan

Composition of ALCO Committee

Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur yang membidangi keuangan
Sekretaris	Unit kerja yang membidangi fungsi perencanaan keuangan
Anggota	• Direktur yang membidangi fungsi bisnis yaitu Konsumer,UMKM dan Komersial dan Wakil Presiden Direktur • Direktur yang membidangi fungsi resiko • Direktur membidangi fungsi kredit

Tugas Dan Tanggung Jawab

Assets and Liabilities Committee (ALCO) berwenang dan bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pengendalian risiko atas posisi risiko likuiditas dan risiko pasar, serta menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) perseroan yang diantaranya meliputi manajemen liabilitas, manajemen likuiditas, manajemen aset likuid, manajemen kredit yang diberikan (KYD), manajemen pos *administrative*, dan strategi lindung nilai;
2. Melakukan kaji ulang terhadap deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank;
3. Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penetapan harga (*pricing*) atas aset dan liabilitas maupun *fee based income* serta memastikan kebijakan harga tersebut dapat mendukung strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA) dan pengelolaan likuiditas Bank;
4. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan kondisi terkini serta perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
5. Melakukan evaluasi atas rencana pendanaan darurat;
6. Meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan kepada unit kerja terkait agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan serta keputusan ALCO yang telah diambil.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite ALCO telah menjalankan tugasnya dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait

1. *Pricing* produk baru dan lama agar sejalan dengan tujuan strategis dan bisnis Bank melalui kuorum persyaratan.
2. Kerangka kerja *Fund Transfer Pricing* (FTP) sesuai dan berfungsi sebagai penjembatan antara lini bisnis dalam merancang dan mengimplementasi FTP, serta mengedepankan konsistensi dalam kinerja Bank.
3. Melakukan penyesuaian atas ketersediaan dana jangka panjang dari pasar modal atas kebutuhan Bank.
4. Kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman dan rekening antar kantor berdasarkan pertumbuhan *asset* dan liabilitas, tren suku bunga dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing.

KOMITE PENGARAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite tertinggi dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Keanggotaan Komite Pengarah TI ditunjuk dan diangkat oleh Direksi. Struktur organisasi Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut.

1. Ketua Komite Pengarah TI adalah Direktur yang membawahi Teknologi informasi.
2. Anggota Komite Pengarah TI:
   a. Direktur yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko
   b. Pejabat tertinggi dibawah Direktur yang membawahi

Teknologi informasi setingkat Kepala Divisi.
c. Pejabat tertinggi di bawah Direktur yang membawahi Layanan selaku pengguna utama TI setingkat Kepala Divisi.
d. Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan yang bertugas sebagai penyelaras strategi dan inisiatif Korporat dengan strategi dan inisiatif TI.
e. Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi yang bertugas melakukan evaluasi anggaran Bank, khususnya atas investasi atau biaya operasional TI.
f. Departemen terkait lainnya dapat menjadi peserta dalam Komite Pengarah TI dengan mempertimbangkan kelayakannya seperti keterkaitan dengan materi pembahasan, sebagai narasumber dan sebagainya.
g. Kepala Departemen yang membawahi Strategis dan Perencanaan TI yang bertugas melakukan evaluasi pengelolaan proyek TI dan Sekretaris Komite Pengarah TI.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:
   a. Rencana strategis TI *(IT Strategic Plan)* yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan bisnis Perseroan (*Business Plan*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan rekomendasi dimaksud adalah sebagai berikut:
      i) Rencana pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Roadmap* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam *mencapai future state;*
      ii) Sumber daya yang dibutuhkan;
      iii) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
   b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI;
   c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI dan *corporate plan* yang berlaku;
   d. Komite pengarah juga dapat menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan);
   e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan;
   f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan;
   g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keuangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
2. Melaksanakan *Management Review* (Tinjauan Manajemen) terhadap penyelenggaraan sistem manajemen layanan minimal satu tahun sekali pada setiap bulan Maret serta terhadap hal-hal lain yang bersifat strategis, kritikal, dan mendesak terkait kegiatan penyelenggaraan dan infrastruktur TI yang tidak dapat diselesaikan melalui Komite *Support TI.*
3. Komite Pengarah TI dapat memerintahkan Komite Support TI untuk melakukan rapat komite apabila terdapat hal-hal teknis yang harus segera diselesaikan dan/atau menjadi bahan masukan bagi Komite Pengarah TI dalam membuat rekomendasi kepada Direksi.

Pelaksanaan Tugas Pada Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menjalankan tugasnya dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dukungan TI di Perseroan, di antaranya

1. Project Relokasi dan Peremajaan DC *Server Development* dilaksanakan dengan pengadaan VM *Server Development* baru dan ditempatkan di DC Sentul.
2. *Project Dedicated Line DR, DRC & Branches* harus mempertimbangkan jumlah cabang saat pembelian line pada tahap negosiasi sebelum proses finalisasi.
3. Pembelian *Crystal* Report langsung oleh PT Bank KB Bukopin Tbk kepada SAP *Crystal* Report dan dilakukan *amendment* kontrak dengan DXC dengan menghapus *scope* pembelian *Crystal Report*.
4. Untuk *risk* dan *issue* pada *project* SHINE bisa disampaikan langsung kepada Direktur terkait oleh ITPMO, Bisnis PMO dan External PMO.
5. Pembaruan sistem Kartu Kredit dengan anggaran senilai Rp 21 Miliar dan vendor pelaksananya adalah Silverlake.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Komite Restrukturisasi Kredit (*Credit Restructuring Committee*) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merekomendasikan serta memutus restrukturisasi kredit sesuai dengan kategori dan tingkat risiko kreditnya. Komite ini berfokus pada restrukturisasi kredit kualitas 1 dan 2 untuk debitur dalam pemantauan (*watch list*), serta restrukturisasi atau penyehatan kredit kualitas 3, 4, dan 5 setelah proses restrukturisasi. Melalui proses evaluasi yang cermat, Komite ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik guna memitigasi risiko kredit dan memaksimalkan pemulihan aset. Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi kredit dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit

Kelembagaan Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit secara kelembagaan/Forum/kelompok/Komite Kredit berdasarkan tingkatan limit kewenangan yang ditentukan dan diatur oleh Direksi untuk Segmen Kredit SME (UKM), *Wholesale* (Komersial) baik untuk Komite Kredit secara rapat/*meeting*/ tatap muka maupun secara *circulate*.

Kewenangan individual limit/Job limit kewenangan memutus Kredit diberlakukan untuk jenis Kredit Ritel, Produk Kredit yang bersifat masal (*mass product*), Kredit tertentu yang bersifat khusus, serta pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian atau penagihan Kredit bermasalah yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan Komite Kredit.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Restrukturisasi Kredit

Komite Restrukturisasi Kredit berwenang dan bertanggung jawab untuk merekomendasikan dan/atau memutus Restruktur Kredit sesuai kewenangannya dalam hal:

1. Restrukturisasi Kredit kualitas 1 (satu) dan 2 (dua) untuk debitur kategori watch list.
2. Restrukturisasi/penyehatan Kredit kualitas 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) serta kualitas 1 (satu) dan 2 (dua) pasca Restrukturisasi yang masih dikelola Unit Bisnis.
3. Restrukturisasi/penyehatan Kredit kualitas 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) serta kualitas 1 (satu) dan 2 (dua) pasca Restrukturisasi yang dikelola Special Asset Management.
4. Lembaga Komite Restrukturisasi Kredit harus Memahami aspek legal/hukum, aspek bisnis/usaha, aspek keuangan dan aspek kewajaran dari Kredit yang dikomitekan.
5. Untuk pelaksanaan Komite Restrukturisasi Kredit berlaku untuk portofolio Debitur yang masih dikelola oleh Unit Bisnis.
6. Untuk pelaksanaan Komite Restrukturisasi Kredit (*Special Asset Management*) berlaku untuk portofolio Debitur yang dikelola oleh *Special Asset Management* (SAM).

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Restrukturisasi kredit telah mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan plafon Kredit Restruktur, termasuk untuk penambahan atau pengurangan/penurunan plafon atau pelunasan dipercepat;
2. Penundaan pembayaran kewajiban pokok dan/atau bunga atau sejenisnya;
3. Pemberian grace period;
4. Perubahan Penggunaan Kredit yang direstrukturisasi;
5. Perubahan Suku bunga yang direstrukturisasi;
6. Perubahan Jenis fasilitas Kredit ;
7. Perubahan Jangka waktu Kredit, termasuk perpanjangan, penambahan atau pengurangan jangka waktu dalam rangka penyelamatan;
8. Perubahan Jaminan atau agunan, termasuk penggantian atau menarik sebagian agunan;
9. Pembebanan atau pembebasan biaya Provisi;
10. Pembebasan biaya Biaya Administrasi;
11. Pengikatan Kredit dan Jaminan atau Agunan;
12. Pembebasan Denda Keterlambatan;
13. Pencairan Kredit;
14. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan Debitur (khusus bagi komite Restruktur dengan SAM);
15. Penetapan Kredit yang direstrukturisasi menjadi non-restruktur;
16. Penetapan persyaratan Restrukturisasi Kredit lainnya.

KOMITE PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Adalah Lembaga komite yang berfungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian Kredit bermasalah dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan penyelesaian Kredit bermasalah yang diajukan atas portofolio yang dikelola oleh SAM atau portofolio yang dikelola oleh fungsi SAM Retail

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kelembagaan Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit secara kelembagaan/Forum/kelompok/Komite Kredit berdasarkan tingkatan limit kewenangan yang ditentukan dan diatur oleh Direksi untuk Segmen Kredit SME (UKM), Wholesale (Komersial) baik untuk Komite Kredit secara rapat/*meeting*/ tatap muka maupun secara circulate.

Kewenangan individual limit/Job limit kewenangan memutus Kredit diberlakukan untuk jenis Kredit Ritel, Produk Kredit yang bersifat masal (*mass product*), Kredit tertentu yang bersifat khusus, serta pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kelembagaan Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit secara kelembagaan/Forum/kelompok/Komite Kredit berdasarkan tingkatan limit kewenangan yang ditentukan dan diatur oleh Direksi untuk Segmen Kredit SME (UKM), *Wholesale* (Komersial) baik untuk Komite Kredit secara rapat/*meeting*/ tatap muka maupun secara *circulate*.

Kewenangan individual limit/Job limit kewenangan memutus Kredit diberlakukan untuk jenis Kredit Ritel, Produk Kredit yang bersifat massal (*mass product*), Kredit tertentu yang bersifat khusus, serta pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah

Secara umum, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah adalah:

1. Penyelesaian atas Portofolio Kredit yang termasuk kepada kategori kredit bermasalah sesuai ketentuan eksternal dan internal Bank yang berlaku, termasuk memutus Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
2. Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit.
3. Memahami aspek legal/hukum, aspek bisnis/usaha, aspek keuangan dan aspek kewajaran dari Kredit yang dikomitekan.
4. Untuk Pelaksanaan Komite Penyelesaian Kredit berlaku untuk portofolio Debitur yang masih dikelola oleh Unit Bisnis.
5. Untuk Pelaksanaan Komite Penyelesaian Kredit (SAM) berlaku untuk portofolio Debitur yang dikelola oleh *Special Asset management* (SAM).

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah telah mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan eksekusi atau likuidasi agunan Kredit;
2. Penetapan agunan Kredit menjadi AYDA;
3. Persetujuan penebusan/penjualan agunan;
4. Pemutusan Subrogasi Kredit bermasalah;
5. Penetapan cessie;
6. Penyelesaian Kredit melalui jalur hukum;
7. Persetujuan penggunaan jasa pihak ketiga;
8. Hapus Buku Kredit bermasalah;
9. Hapus Tagih Kredit bermasalah;
10. Keputusan lainnya terkait penyelesaian Kredit bermasalah.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan sosok kunci dalam struktur KB Bank sebagai Perusahaan Terbuka. Peran tersebut meliputi menjembatani komunikasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi pasar modal. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertemuan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, serta memfasilitasi dialog yang efektif antara Pemangku Kepentingan dan KB Bank. Selain itu, Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik Perseroan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan No. I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PROFIL PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Slamet Haryanto Pradhana*	**Usia**	38 Tahun
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Domisili	Jakarta
	Riwayat Pendidikan	Sarjana Pendidikan Ekonomi & Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Negeri Malang (2008)
	Riwayat Pekerjaan	• QA & IT Audit Department Head (Kepala Departemen Kualitas Audit & IT Audit) • Secretariat & Protocol Manager (Manajer Kesekretariatan dan Protokoler) Sekretaris Perusahaan.
	Jabatan Lainnya	-
	Dasar Hukum Pengangkatan	SKEP/0026-DIR/II/2022 tanggal 14 Februari 2022

*) Menjabat sejak 27 Februari 2023 – 6 April 2023

Yocky Eko Wicaksono	**Usia**	40 Tahun
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Domisili	Jakarta
	Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
	Riwayat Pekerjaan	• Sekretaris Dewan Komisaris • Regulasi Manajer dan Kebijakan PT Bank KB Bukopin Tbk • Staf Senior Hukum Perusahaan dan Kebijakan PT Bank KB Bukopin Tbk
	Jabatan Lainnya	-
	Dasar Hukum Pengangkatan	SKEP /0118-DIR/VIII/2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

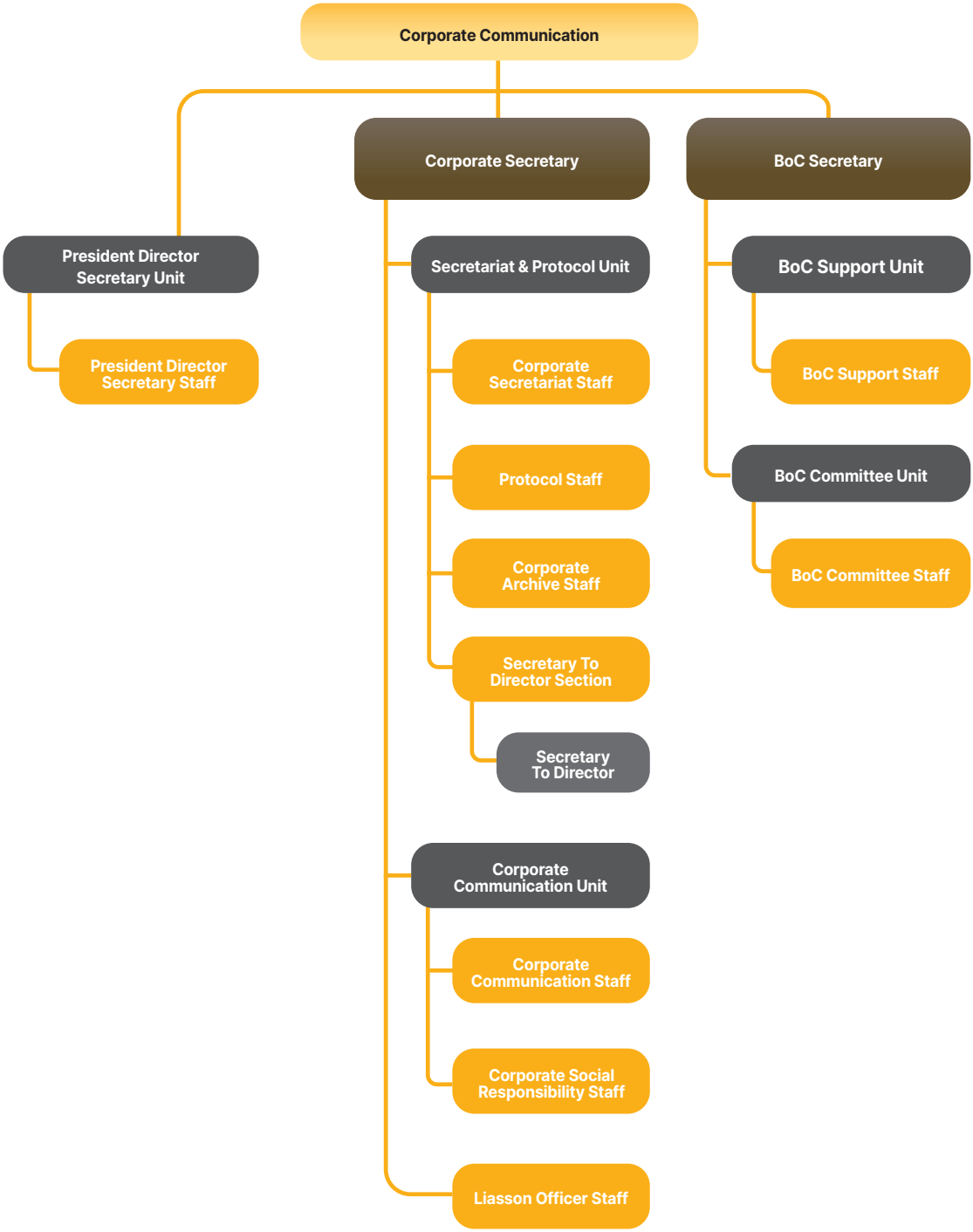
Sekretaris Perusahaan memiliki tugas yang luas dan penting dalam menjaga citra KB Bank. Ini termasuk membangun citra perusahaan melalui fungsi hubungan masyarakat, investor, dan kesekretariatan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan semua hasil rapat didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada pihak terkait. Sekretaris Perusahaan juga memastikan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu tentang kinerja perusahaan. Selain itu, dia menjadi penghubung antara perusahaan dan otoritas pasar modal, pemegang saham, investor, dan media. Informasi mengenai kinerja perusahaan disampaikan melalui berbagai media, seperti RUPS, laporan keuangan, siaran pers, pertemuan dengan analis, dan melalui situs web Perusahaan, yaitu www.kbbukopin.co.id

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku. Dengan tugas dan tanggung jawab yang bersifat strategis tersebut Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/.04/2014 melaksanakan tugas paling kurang:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN



PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah melakukan tugas, antara lain:
1. Menyelenggarakan Rapat Direksi, Komisaris, dan Rapat Gabung antara Direksi dan Komisaris;
2. Melakukan Penyusunan Notulensi dari setiap Rapat;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa;
4. Mengelola keterbukaan informasi kepada publik dan regulator;
5. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pemangku kepentingan;
6. Melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan image Perseroan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan Sekretaris Perusahaan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal. Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop*/Seminar antara lain:

NAMA TRAINING	TANGGAL	PENYELENGGARA	
E Learning Anti Fraud Th 2023	23-Oct-23	Internal House (Diklat)	Jakarta
E Learning APU PPT Tahun 2023	23-Oct-23	Internal House (Diklat)	Jakarta
E Learning Induction (APU PPT & Anti Fraud)	22-Dec-23	Internal House (Diklat)	Jakarta
E Learning Induction, Anti Fraud Dan APU PPT	16-Jan-23	Learning Management System (BPRIDE)	Jakarta
Kick Off Shine Project	22-Feb-23	DXC	Jakarta
Pemenang Kuis Kahoot Kick Off Shine	22-Feb-23	DXC	Jakarta
Refreshment Smr Level 1-5	04-Sep-23	BSMR	Jakarta
Refreshment SMR Tahun 2023	21-Feb-23	BSMR	Jakarta
Training Budget Expense Pic Allocation	26-Oct-23	Internal House (Diklat)	Jakarta
Training Icofr	21-Nov-23	PWC, Deloite &Kookmin	Jakarta
Training Ngbs-Be Budget Trf & App Batch 2 (25okt)	25-Oct-23	Internal House (Diklat)	Jakarta
Webinar Fkdkp	10-Oct-23	FKDKP	Jakarta
Workshop Annual Report (Corsec)	03-Apr-23	Inmark	Jakarta
Workshop Board Of Commissioner	08-Nov-23	Internal House (Diklat)	Jakarta

KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2023

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat sepanjang tahun 2023, melalui media massa, situs web BEI dan situs *web* KB Bank dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI dan OJK sebagai berikut:

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan
Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank	OJK	Tahunan
Laporan Tahunan (*Annual Report*) Anak Perusahaan Bank	OJK	Tahunan
Laporan penyelenggaraan RUPS Tahunan	OJK & BEI	Tahunan
Laporan manajemen dan hasil pengawasan dewan komisaris	BI	Tahunan

LAPORAN INSIDENTIL

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
10 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Pengangakatan Efektif Sebagai Direktur UTama PT Bank KB Bukopin Tbk (Woo Yeul Lee)
05 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III KB Bank Tahap I Tahun 2021 per 31 DERsember 2022

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
19 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2022 oleh Bank kustodian KB Bank
20 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Laporan Kondisi Terkini Penyelenggraan Teknologi Informasi Tahun 2022
26 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan KCP Gadog Cianjur Cipanas
26 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan KCP Pemantang Siantar Medan
26 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan KCP Jombang, Tulung Agung Jawa Timur
26 January 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan KCP IKIP/UNJ Jakarta Timur
06 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Rencana Bank untuk Tidak Beroperasi pada Hari Kerja di Kantor Cabang Sidoarjo, Jawa Timur
07 February 2023	Bank Indonesia	Laporan Insidental
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP RSPAD, KCP Grand Cakung, KCP Kelapa Gading II, KCP Pulo Gadung Trade Center, KCP Roxy Mas, KCP Pasar Minggu, KCP Kebayoran Lama, KCP Mampang, KFO Pasar Minggu
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Ajibarang
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Fakultas Tehnik UI dan KCP Billy Moon
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Dalyeng Kolot dan KCP Situraja
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Mikro Gedung Halang dan KCP PMI
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Cilimus
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Peterongan Plasa, KCP Univ Kristen Satya Wacana (UKSW), KFO Petorangan
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Magetan
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Blimbing, KCP Sawojajar dan KCP Singosari
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Lumajang
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Kayu Agung dan KCP Lahat
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Kotabumi
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Penuin
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Muara Bungo
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Juanda, KCP Mempawah, KCP Singkawang, KCP Sungai Raya Dalam
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Karang Jati
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Kandangan
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP AW Syahrani
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Salodong
15 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	informasi rencana penutupan kantor KCP Amurang
20 February 2023	Bank Indonesia	Laporan insidental
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Harapan Indah, KCP Jababeka, KCP Ruko Menteng Cikarang, KCP Unisma, KCP Citra Grand Cibubur
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Pandeglang
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Tangerang City, KCP Meruya, KCP Muara Karang, KCP Bakrie Tower, KCP Tanjung Priok, KCP Kemang, KCP Bendungan Hilir
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Cikampek
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Pekalongan
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Banjarnegara
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Salatiga, KCP Sultan Agung, & KCP Majapahit
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Grha Kepri
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Univ Bung Hatta
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP UNILA
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Gresik , KCP Perak Barat 7 KCP Mulyosari

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Mojokerto
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Kuta & KCP Kreneng
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Mamuju
27 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu KCP Banjar Baru
28 February 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepengurusan Perusahaan Anak PT Bank KB Bukopin Tbk
01 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Tanggapan atas surat OJK Nomor S-162/PB.31/2022
02 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk
07 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Tindak Lanjut atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal Semester I Tahun 2022 KB BankBukopin
08 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Risalah Rapat
09 March 2023	Bank Indonesia	Pelaporan rencana penerbitan kartu kredit mastercard rebranding KB Bank
09 March 2023	Bank Indonesia	Pelaporan rencana penerbitan kartu debit mastercard *rebranding* KB Bank
09 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan dan/atau tambahan Informasi atas pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan Modal dengan memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT) VII PT Bank KB Bukopin Tbk
10 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris KB Kookmin Bank Co.Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank KB BUkopin Tbk
06 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Pelaporan perubahan daftar pegawai pelaksanaan dan/atau pejabat SLIK
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_KPO
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_KPO
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_KPO
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_ Kudus Semarang
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Solo
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Bandung
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Pemrov Kepulauan Riau
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Batam
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Surabaya
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Samarinda
24 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP)_Pare-pare
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Cilegon
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Purwokerto
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Cirebon
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Magelang
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Sukabumi
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Tasikmalaya
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Tegal
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Madiun
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Probolinggo
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Banyuwangi
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Sidoarjo
27 March 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang di Dalam Negeri_Parepare
06 April 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan Anggota Komite Audit PT Bank KB Bukopin Tbk
10 April 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII PT Bank KB Bukopin Tbk
11 April 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Pemberitahuan Pengunduran diri dan Penunjukan Alternate Sekretaris Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk
12 April 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Mamuju
13 April 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Banjar Baru

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
28 April 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan dan/ tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu VII PT Bank KB Bukopin Tbk
02 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII PT Bank KB Bukopin Tbk
04 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII PT Bank KB Bukopin Tbk
05 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Tanggapan dan Tindaklanjut atas surat otoritas jasa keuangan nomor SR-3/ PM.223/2023
12 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu ("KCP") - KCP Kampus STTNAS
15 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Solo
15 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Bintaro
15 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Klaten
15 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Barru
15 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Batam Center
15 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Pembatalan Penutupan KCP Abda
26 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - Seng Hyup Shin
29 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - Yohanes Suhardi
29 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - Robby Mondong
29 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk- Seng Hyup Shin
29 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - Dodi Widjajanto
29 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - Helmi Fahrudin
29 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - Woo Yeul Lee
05 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk- STIC Eugene Star Holding Inc
05 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk-WYL-Tambahan PUT VII
05 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk- Mr.Shin-Tambahan PUT VII
05 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk - KB FG 67,57%
14 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi rencana pemindahan Alamat KCP Ciranjang Cianjur
13 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Perubahan Komposisi Saham Bank yang Tercatat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian
26 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Kepengurusan Perusahaan Anak PT Bank KB Bukopin Tbk
04 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk KBBS
04 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk Bufin
05 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu ("KCP") dan Kantor Fungsional Operasional ("KFO")
11 July 2023	Bank Indonesia	Laporan Insidental
11 July 2023	Bank Indonesia	Laporan Insidental
21 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Penutupan Kantor Lain selain Kantor Pusat APERD
21 July 2023	Bank Indonesia	Pelaporan Rencana Penambahan Fitur Nirsentuh (Contactles) Pada Kartu Kredit dan Mesin EDC KB Bank
24 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Informasi Penghentian PUB Pbligasi 2021 PT Bank KB Bukopin Tbk

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
05 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Rencana Bank untuk Tidak Beroperasi pada Hari Kerja di Kantor Cabang Medan
08 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP)
14 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Informasi Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang ("KC") Balikpapan
15 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Kegiatan Penyertaan Modal Ke PT KB Bukopin FInance (KBBF)
28 August 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2023
23 June 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Material PT Bank KB Bukopin Tbk
04 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk
04 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Transaksi Afiliasi PT. Bank KB Bukopin Tbk
10 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
24 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Informasi Penghentian PUB Obligasi 2021 PT Bank KB Bukopin Tbk
25 July 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Penghentian PUB Obligasi 2021 PT Bank KB Bukopin Tbk
14 August 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
31 August 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
08 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
13 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
20 September 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
03 October 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk
10 October 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk
11 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direktur Perseroan
11 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
11 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Atas Pengunduran Diri Direktur Perseroan
18 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
18 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
29 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Pengunduran Diri Wakil Komisaris Utama Perseroan
29 December 2023	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Atas Pengunduran Diri Wakil Komisaris Utama

Satuan Kerja
Audit Intern

Audit internal di KB Bank adalah kegiatan yang independen dan objektif, bertujuan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi operasional bank. Sebagai bagian dari lini pertahanan ketiga, audit internal harus memastikan bahwa kontrol internal di setiap tahapan pertahanan semakin kuat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk itu, Satuan Kerja Audit Internal KB Bank terus berinovasi dalam penggunaan metodologi dan alat audit, agar pelaksanaan audit menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan melalui pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank. Dengan demikian, audit internal menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku.

PIAGAM AUDIT INTERN

Piagam Audit Internal merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melakukan fungsi audit intern, inisiasi komunikasi dengan auditee pada perusahaan, pemeriksaan aktivitas perusahaan, pemeriksaan aktivitas perusahaan dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik core perusahaan termasuk sistem manajemen informasi dan pelaporan.

Piagam Audit Intern telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0146 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

ROBY ENDRAMA PURBA
Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Usia	43 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan	S1 Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya
Riwayat Pekerjaan	• Head of Internal Audit PT AXA Mandiri Financial Service (2019-2022) • Head of Internal Audit IPC Investment Company (2018-2019) • Head Office Audit Group Head PT CIMB Niaga Tbk (2016-2018)
Jabatan Lainnya	-
Dasar Hukum Pengangkatan	SKEP/0015-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.03/2019, POJK No. 56/POJK.04/2015, dan Internal Audit Charter PT Bank KB Bukopin Tbk, Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit. Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern dapat dilakukan oleh Direktur Utama setelah persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan auditor atau tidak menjalankan tugas dengan baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam Struktur Pengendalian Intern perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan melakukan penilaian independen terhadap manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. SKAI melakukan analisis dan penelitian dalam berbagai bidang seperti keuangan, akuntansi, dan operasional melalui pemeriksaan on-site dan pemantauan off-site. SKAI memberikan saran perbaikan dan informasi objektif kepada manajemen. Tanggung jawab SKAI juga termasuk memastikan bahwa fungsi audit intern berada sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.

KEWENANGAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan terkait pengawasan dengan auditor ekstern;
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
6. Mengusulkan perubahan Piagam Audit Internal sesuai perkembangan lingkungan yang terkait dengan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Mengalokasikan sumber daya auditor intern;
8. Mengusulkan mutasi, mengikuti pendidikan & pelatihan dan program sertifikasi profesi bagi auditor intern;
9. Menggunakan tenaga ahli/spesialis dari luar Perseroan jika diperlukan.

RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

Ruang lingkup pekerjaan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas Perusahaan mengenai :

1. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola secara kesinambungan.
2. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan, sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kualitas kinerja organisasi.

Kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Perusahaan secara keseluruhan termasuk Perusahaan Anak, Kantor Cabang dan kegiatan Perusahaan yang diserahkan kepada pihak ekstern.

SISTEM INFORMASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN

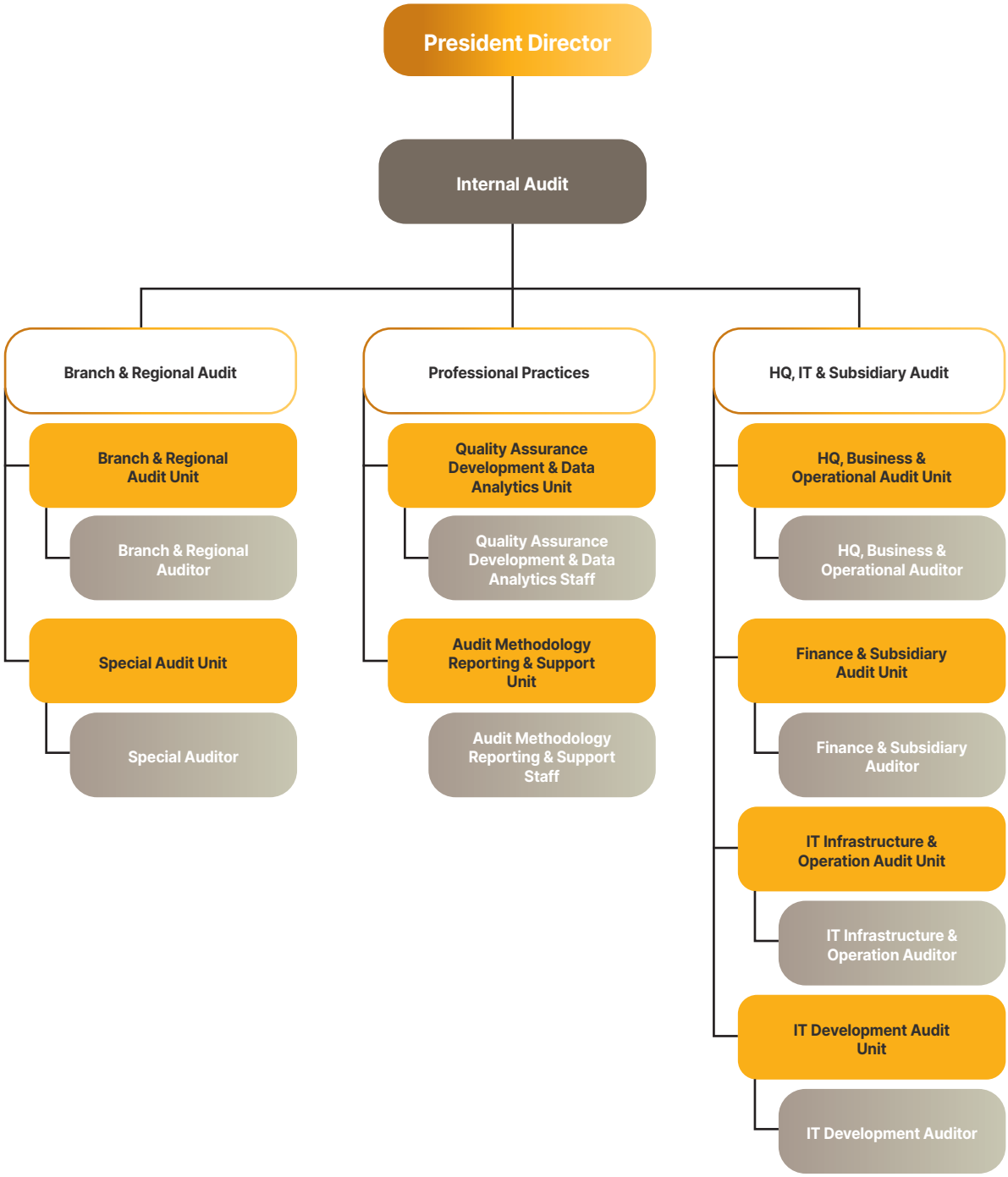
Dalam mendukung aktivitas audit, SKAI telah memiliki Sistem Aplikasi untuk mempermudah melakukan audit dan melaksanakan fungsi pengawasan internal berdasarkan Rencana Audit Tahun 2023 serta memudahkan supervisi dalam melakukan monitor aktivitas audit yang dilakukan oleh aparat internal audit.

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL DAN JUMLAH PEGAWAI

Satuan Kerja Audit Intern dalam Perusahaan terbagi atas 2 (dua) Departemen, yaitu:

1. *Branch & Regional Audit*
   a. *Branch & Regional Audit Unit*;
   b. *Branch & Regional Auditor*;
   c. *Special Audit Unit*;
   d. *Special Auditor*.
2. *Professional Practices*
   a. *Quality Assurance, Development & Data Analytics Unit;*
   b. *Quality Assurance, Development & Data Analytics Staff;*
   c. *Audit Methodology, Reporting & Support Unit;*
   d. *Audit Methodology, Reporting & Support Staff*
3. *HQ, IT & Subsidiary Audit*
   a. *HQ Business & Operational Audit Unit;*
   b. *HQ Business & Operational Auditor;*
   c. *Finance & Subsidiary Audit Unit;*
   d. *Finance & Subsidiary Auditor;*
   e. *IT Infrastructure & Operation Audit Unit;*
   f. *IT Infrastructure & Operation Auditor ;*
   g. *IT Development Audit Unit*
   h. *IT Development Auditor.*

Masing-masing Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang berkedudukan di Kantor Pusat dengan jumlah staf sesuai dengan kebutuhan.


President Director
Internal Audit
Branch & Regional Audit
Branch & Regional Audit Unit
Branch & Regional Auditor
Special Audit Unit
Special Auditor
Professional Practices
Quality Assurance Development & Data Analytics Unit
Quality Assurance Development & Data Analytics Staff
Audit Methodology Reporting & Support Unit
Audit Methodology Reporting & Support Staff
HQ, IT & Subsidiary Audit
HQ, Business & Operational Audit Unit
HQ, Business & Operational Auditor
Finance & Subsidiary Audit Unit
Finance & Subsidiary Auditor
IT Infrastructure & Operation Audit Unit
IT Infrastructure & Operation Auditor
IT Development Audit Unit
IT Development Auditor

KEDUDUKAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang berada pada layer ketiga dalam *three Line of Defense* yang memiliki fungsi membantu Manajemen dalam mencapai tujuan Perseroan melalui penilaian yang independen atas pengendalian internal, penilaian risiko dan tata kelola perusahaan.

KOMPOSISI PERSONEL SKAI

Satuan Kerja Audit Internal didukung oleh 38 karyawan, dengan perincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah personel
Kepala SKAI	1
Kepala Departemen	3
Manajer	12
Auditor	17
QA & *Audit Plan*	4
Sekretaris Kepala SKAI	1
Jumlah	**38**

SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI AUDIT INTERN

	Sertifikasi	Jumlah Orang
Nasional	**Sertifikasi Internal Audit**	
	Qualified Internal Auditor Lanjut 1	-
	Qualified Internal Auditor Lanjut 2	2
	Qualified Internal Auditor Lanjut *Managerial*	4
	Certified Banking Internal Audit	11
	Certified Banking Internal Audit Level Supervisor	5
	Manajemen Risiko	
	Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 1	14
	Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 2	11
	Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 3	4
	Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 4	1
	Sertifikasi Audit Forensik	
	Certified Forensic Auditor (CFrA)	3

KODE ETIK *AUDITOR*

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, SKAI juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum dalam *Internal Audit Charter*. Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.

1. Independen
   Auditor intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.
2. Integritas
   Auditor Intern harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
3. Objektivitas
   Auditor Intern bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau aktivitas yang diperiksa.
4. Kerahasiaan
   Auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
5. Kompetensi
   Auditor intern menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit intern.
6. Profesionalisme
   Profesionalisme menjadi acuan dalam aktivitas audit, untuk itu auditor intern memiliki integritas, sikap mental yang independen, dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDIT INTERN

Kegiatan bisnis Perusahaan yang semakin berkembang, menuntut pengembangan kompetensi bagi personel SKAI untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan audit. Atas hal tersebut SKAI Perseroan berupaya memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personel Internal Audit melalui penyusunan program peningkatan kompetensi. Program peningkatan kompetensi tersebut diimplementasikan melalui kegiatan *training, workshop*, serta sertifikasi profesi baik skala nasional maupun internasional.

No	Nama Training	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Workshop Bisnis Operation & Sinergi Reg IV	9-Jan-2023	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
2	E-Learning Induction, Anti Fraud dan APU PPT	Jan, Oct, Dec 2023	Learning Management System (BPRIDE)	Jakarta
3	Remedial E-Learning Induction Batch I	1-8 Feb 2023	Learning Management System (BPRIDE)	Jakarta
4	Fraud Auditing Training I	7–10 Feb 2023	LPFA	Jakarta
5	Refreshment SMR Tahun 2023	Feb, Sep 2023	MAISA Edukasi (BSMR)	Jakarta
6	Kick Off Shine Project	22-Feb-2023	Internal House (Diklat & IT)-(DXC)	Head Office (Jakarta)
7	Workshop SKAI	Mar, Nov 2023	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
8	Workshop Swamitra	5-Apr-23	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
9	Fraud Auditing Training II	11-14 Apr 2023	LPFA	Jakarta
10	Workshop BRD NGBS	13-14 Apr 2023	Internal House (Diklat)	Jakarta
11	Sharing Session SKAI	May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct 2023	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
12	Training Induction Batch II Th 2023	8-May-23	Internal House (Diklat)	Jakarta
13	Risk Based Internal Audit	16-17 May 2023	Ruang Seminar	Jakarta
14	Training Root Cause Analyst	22-23 May 2023	IIA Indonesia	Jakarta
15	Workshop Collective Labour	5-Jun-23	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
16	Sharing Session Compliance & Risk Group	15-Jun-23	Internal House (Diklat)	Ground FL KPO (Jakarta)
17	Training Quality Assurance For Internal Audit	26-27 Jun 2023	YPIA	Hotel Amaris Pancoran (Jakarta)
18	National Conference IAIB 23	12–13 Jul 2023	IAIB	Tangerang - Banten
19	Training Financial Reporting (ICOFR)	8-Aug-23	Internal House (Diklat) - Deloitee	Learning Center (Jakarta)
20	Training Excel Basic	Aug, Dec 2023	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
21	Training Excel Intermediate	Aug, Dec 2023	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
22	Training Excel Advance	Aug, Sep, Dec 2023	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
23	Training Induction Batch 3 (Induction,APU PPT & Anti Fraud)	28 Aug – 3 Sep 2023	Internal House (Diklat)	Jakarta
24	Training Analisa Lapkeu Konsolidasi Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank	12-13 Oct 23	Info Bank	Hotel Ashley Wahid Hasyin (Jakarta)
25	Training NGBS-BE Budget Trf & App Batch 2 (24okt)	24-Oct-23	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
26	Training NGBS-BE Budget Trf & App Batch 1 (25okt)	25-Oct-23	Internal House (Diklat)	Learning Center (Jakarta)
27	Training NGBS	11-15 Sep 2023	Internal House (Diklat & IT)-(DXC)	Head Office (Jakarta)
28	Pelatihan Audit Forensik	20-21 Sep 2023	LPFA	Jakarta
29	APU PPT PPSPM Pojk 8-2023 (Offline)	2-Nov-23	IAIB Indonesia	Hotel JS Luwansa (Jakarta)
30	Pelatihan Certified Information System Auditor	6-10 Nov 2023	Andalan	Jakarta
31	Training Data Analitik Auditor Internal	29-30 Nov 23	YPIA	Jakarta
32	Seminar Nasional Internal Audit 2023	6-7 Dec 2023	YPIA	Bali
33	Workshop Credit Investigation	7-8 Dec 2023	Internal House (Diklat)	Jakarta
34	Sertifikasi Audit Forensik	11-13 Dec 2023	LPFA	Jakarta

PELAKSANAAN TUGAS DAN HASIL TEMUAN AUDIT TAHUN 2023

Metode Audit

SKAI melaksanakan fungsi pengawasan internal berdasarkan Rencana Audit Tahun 2023 yang telah disusun dengan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) dengan fokus proses bisnis dan risiko inheren dan dalam pelaksanaan auditnya diarahkan pada area-area yang memiliki risiko tinggi yang dapat menghambat tercapainya target bisnis atau kegiatan operasional.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2023

Uraian Pelaksanaan audit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Audit Umum	Audit Plan s.d Des 2023	Realisasi s.d Des 2023	% Realisasi s.d Des 2023
1	Audit Umum Kantor Pusat	7	12	171%
2	Audit Umum Cabang	23	26	113%
3	Audit Umum IT	4	5	125%
4	Audit Tematik	6	6	100%
5	Audit Perusahaan Anak	2	2	100%
6	Audit Khusus	-	11	-
Jumlah		**42**	**62**	**148%**

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

KB Bank telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Audit Intern selama tahun 2023 dengan tingkat persentase *follow up* sebesar 91%.

EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Telah dilakukan evaluasi dan *review* oleh Kantor Akuntan Parker Russell Internasional yang telah teregister sebagai Akuntan Publik. Berdasarkan hasil *review* terhadap SKAI periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023 yang tujuannya untuk memastikan dan meyakini kepatuhan kegiatan audit internal SKAI terhadap Ketentuan POJK No. 1/POJK.03/2019, International Professional Practices Framework (IPPF) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

Dari hasil penilaian terhadap kesesuaian dengan standar POJK, IPPF dan SPFAIB tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern PT Bank KB Bukopin Tbk dari 15 (lima belas) sub area yang dikaji ulang, 11 (sebelas) diantaranya disimpulkan *Generally Conform* (GC), 3 (tiga) diantaranya disimpulkan *Partially Conform* (PC), dan 1 (satu) disimpulkan *Not Applicable* (N/A) karena *sub area* tersebut tidak diterapkan.

Akuntan Publik

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2023 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk.

Pada tahun 2023 KB Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan OJK yaitu Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Global) untuk memeriksa buku-buku Perseroan tahun buku 2023.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017.

NAMA DAN TAHUN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SERTA AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik (Partner Penanggung Jawab)	Periode	Fee (Rp)	Opini	Izin KAP
2023	Mirawati Sensi Idris	Denny Susanto	1 Tahun	2.430.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No.327/ KM.1/2023
2022	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Denny Susanto	1 Tahun	1.700.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/ KM.1/2015
2021	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Denny Susanto	1 Tahun	1.600.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/ KM.1/2015
2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Mulyadi	1 Tahun	1.600.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/ KM.1/2015
			30 September 2020 (*Limited Review*)	1.100.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/ KM.1/2015
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan	Dedy Sukrisnadi	1 Tahun	2.950.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 477/ KM.1/2015

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Global) selain jasa audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Selama periode pemeriksaan, Bank menerapkan komunikasi terbuka dengan memberikan informasi dan data pemeriksaan secara lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Kerjasama yang erat dilakukan untuk membahas kebijakan akuntansi terbaru dan perkembangan kebijakan perpajakan sehingga Laporan Keuangan Bank dapat disajikan secara wajar dan akurat. Dengan demikian, kerangka kerja yang efektif terbentuk antara Bank dan auditor eksternal untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemeriksaan.

Hal ini sejalan dengan Piagam Komite Audit, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, yang antara lain menyebutkan:

1. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal (Satuan Kerja Audit Internal), auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan lembaga pengawas Bank (BI, OJK atau Lembaga Otoritas Lainnya) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan tersebut.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan elemen vital dalam strategi perusahaan untuk menghindari dampak risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Fungsi manajemen risiko ini memiliki peran yang strategis dalam menjalankan kegiatan bisnis secara proaktif dan mengantisipasi potensi risiko di masa depan, sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, baik di tingkat domestik maupun global, perseroan membutuhkan sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang terintegrasi dan efektif.

Dalam upaya untuk mengelola risiko dengan baik, perseroan memitigasi potensi risiko dari setiap aspek bisnisnya. Hal ini mencakup langkah-langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mungkin timbul. Untuk mendukung proses ini, perseroan terus mengembangkan teknologi dan sistem informasi manajemen yang dapat mengelola berbagai jenis risiko dengan lebih efektif, serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penerapan manajemen risiko.

Melalui penerapan manajemen risiko yang konsisten, perseroan memastikan bahwa setiap proses bisnis dan operasionalnya dilakukan dengan standar risiko yang telah ditetapkan, sehingga memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan berpedoman pada peraturan eksternal, diantaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.

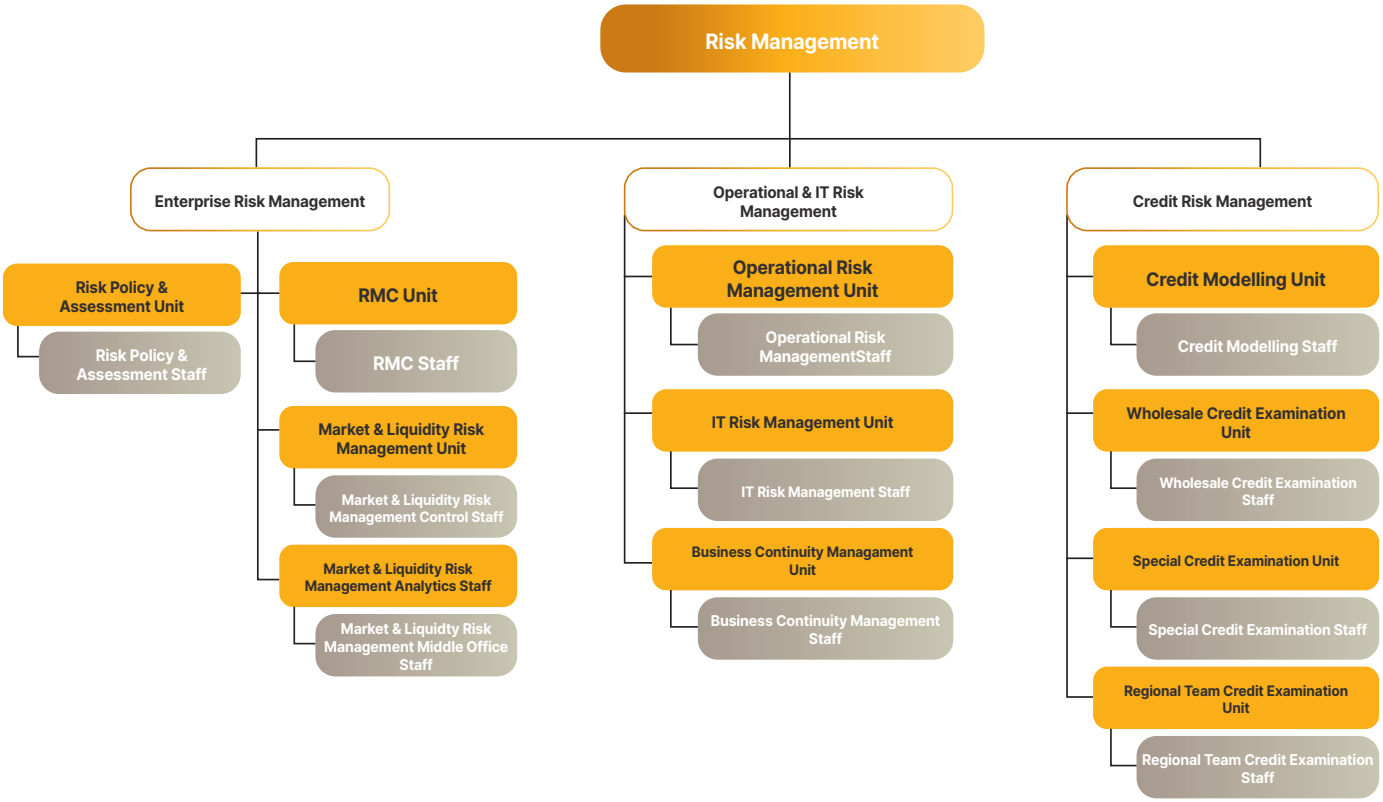
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko yang ada di setiap kegiatan bisnis, Perseroan mengacu pada:

1. Kebijakan Manajemen Risiko KB Bank merupakan aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis KB Bank. (Surat Keputusan No. 0149 Tahun 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Bank KB Bukopin).
2. Kebijakan maupun pedoman internal yang berkaitan dengan manajemen risiko diantaranya:
   a. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank KB Bukopin;
   b. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Bank KB Bukopin;
   c. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional Bank KB Bukopin;
   d. Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan Bank KB Bukopin;
   e. Pedoman Manajemen Risiko Hukum Bank KB Bukopin;
   f. Pedoman Manajemen Risiko Reputasi Bank KB Bukopin;
   g. Pedoman Manajemen Risiko Strategik Bank KB Bukopin;
   h. Pedoman Pelaksanaan Stress Test Risiko Kredit;
   i. Pedoman Pelaksanaan Stress Test Risiko Pasar;
   j. Pedoman Pelaksanaan Stress Test Risiko Likuiditas;
   k. Pedoman Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*);
   l. Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio);*
   m. Kebijakan Risk Appetite Bank KB Bukopin;
   n. Mekanisme Pengukuran Risiko Atas Penyelenggaran Produk Bank;
   o. Kebijakan Produk Program Bank KB Bukopin;
   p. Piagam Komite Manajemen Risiko Bank KB Bukopin;
   q. Kebijakan Pengelolaan Permodalan Bank KB Bukopin;

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi dan fungsi Manajemen Risiko KB Bank disusun sebagai berikut:


Risk Management
Enterprise Risk Management
Risk Policy & Assessment Unit
Risk Policy & Assessment Staff
RMC Unit
RMC Staff
Market & Liquidity Risk Management Unit
Market & Liquidity Risk Management Control Staff
Market & Liquidity Risk Management Analytics Staff
Market & Liquidty Risk Management Middle Office Staff
Operational & IT Risk Management
Operational Risk Management Unit
Operational Risk ManagementStaff
IT Risk Management Unit
IT Risk Management Staff
Business Continuity Managament Unit
Business Continuity Management Staff
Credit Risk Management
Credit Modelling Unit
Credit Modelling Staff
Wholesale Credit Examination Unit
Wholesale Credit Examination Staff
Special Credit Examination Unit
Special Credit Examination Staff
Regional Team Credit Examination Unit
Regional Team Credit Examination Staff

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Perseroan telah merancang sebuah struktur organisasi yang terperinci, yang mencakup tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap bagian. Struktur ini diadaptasi sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.

Perseroan mengakui pentingnya manajemen risiko di setiap level dan unit kerja. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun struktur organisasi yang inklusif, yang meliputi berbagai entitas seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Risk Taking Unit, dan Satuan Kerja Audit Internal.

Dalam struktur organisasi Bank, terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang bertindak secara independen terhadap grup bisnis, operasional, serta divisi atau departemen pendukung lainnya (Risk Taking Unit). Satuan kerja ini berperan penting dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis.

Selain itu, terdapat pula satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengendalian internal, yaitu Satuan Kerja Audit Internal. Mereka memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa standar dan prosedur pengendalian internal diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi, serta melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas sistem pengendalian tersebut.

Dengan adanya struktur organisasi yang kokoh dan terintegrasi, Perseroan dapat lebih efektif dalam mengelola risiko yang muncul dari berbagai aspek kegiatan bisnisnya, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Divisi Manajemen Risiko merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam Perseroan yang dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang melapor kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Divisi Manajemen Risiko terdiri dari beberapa Departemen/Unit sebagai berikut:

1. *Enterprise Risk Management Department*
   a. *Market & Liquidity Risk Management Unit*
   b. *Risk Policy & Assessment Unit*
   c. *RMC Unit*
2. *Operational & IT Risk Management Department*
   a. *Operational Risk Management Unit*
   b. *IT Risk Management Unit*
   c. *Business Continuity Management Unit*
3. *Credit Risk Management Department*
   a. *Credit Modelling Unit*
   b. *Wholesale Credit Examination Unit*
   c. *Special Credit Examination Unit*
   d. *Regional Team Credit Examination Unit*

Tugas utama Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan dan menguji pengukuran dan pelaporan risiko yang dilaporkan oleh para pemilik risiko tersebut. Penetapan kebijakan penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Adapun wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Mengembangkan dan meninjau ulang secara berkala strategi dan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan termasuk kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko;
2. Memantau pelaksanaan strategi, kerangka dan kebijakan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi;
3. Merekomendasikan *limit* portofolio dan memastikan kepatuhannya terhadap *limit* tersebut;
4. Memantau eksposur risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko;
5. Melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak perubahan kondisi makro yang signifikan terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
6. Mengkaji risiko atas usulan produk bank;
7. Evaluasi terhadap akurasi internal model dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko;
8. Memberikan rekomendasi kepada grup bisnis, grup operasional dan grup/divisi/departemen pendukung lainnya (*Risk Taking Unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Satuan Kerja Manajemen Risiko selama 2023, sebagai berikut:

No	Nama Training	Periode	Penyelenggara	Tempat
1.	Training Excel	2023	Departemen Finance	Menara Sentraya KB Bank
2.	Training Manajemen Risiko Kredit	6-7 Desember 2023	LPPI	LPPI Jakarta Selatan
3.	ATMR Risiko Pasar	November 2023	Risiko Manajemen Gagasan	Mercure Hotel Jakarta
4.	Induction Training	Desember 2023	Bank KB Bukopin	E-Learning
5.	Training Procurement	Januari 2023	Lembaga Media Indonesia	Menara Sentraya Bank KB Bukopin
6.	Training End User untuk Budget Expense	Oktober 2023	Finance Departemen	Menara Sentraya Bank KB Bukopin
7.	Training Anti Pencucian Uang PPT dan Anti Fraud	23 Oktober – 03 November 2023	Bank KB Bukopin	E-Learning
8.	Training Refreshment SMR Level 1-5	4-6 September 2023	BSMR	E-Learning
9.	Training Finasta Proyek Shine W6	20-24 Maret 2023	DXC	Lantai 3 Kantor Pusat Bank KB Bukopin
10.	Training Leadership for Managerial	11-12 Desember 2023	Bank KB Bukopin	Menara Sentraya Bank KB Bukopin

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sertifikasi Manajemen Risiko

Level Sertifikasi	Jabatan	Jumlah Pegawai
3	Departemen Head DERM	1
4	Departemen Head DRTI	1
3	Departemen Head DMRK	1
2	Manager DERM	3
3	Manager DRTI	2
2	Manager DRTI	1
2	Manager DMRK	3
2	Staff DERM	2
1	Staff DRTI	1
1	Staff DMRK	13

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko dilaksanakan secara terintegrasi melalui 4 pilar yaitu:

PILAR I PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penerapan manajemen risiko Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif, Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami risiko, mengembangkan budaya risiko dan memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Tugas Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
2. Melakukan Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan perseroan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
4. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bersama Dewan Komisaris;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan bersama dengan Dewan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi atas Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola;
7. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kerja Pemantau Risiko secara *periodic*;
8. Melakukan tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu seuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulen. Adapun rapat Komite Pemantau Risiko dengan pembahasan Laporan Profil Risiko telah dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali sepanjang tahun 2023. Selain pembahasan Profil Risiko, dilakukan juga pembahasan isu-isu terkait aktivitas penerapan manajemen Risiko termasuk menyetujui kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas manajemen Risiko. Berikut adalah rapat Komite Pemantau Risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda
1	06 Januari 2023	• *Update Matriks* Perkembangan *Human Capital & Performance Assessment* • *Update* Perkembangan Pengkinian Data Nasabah dan KYC (*Know Your Customer*) • Pembahasan Laporan *Risk Profile* Bulan Desember Tahun 2022 • Pembahasan Perkembangan Kebijakan dan Kesiapan BCM (*Business Continuity Management*), BCP (*Business Continuity Plan*), DRP (*Disaster Recovery Planning*)
2	27 Januari 2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Triwulan IV Tahun 2022. • Lain-lain
3	24 Februari 2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Januari 2023 • Pembahasan *Quarterly Stress Test*
4	28 April 2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Triwulan I 2023
5	26 Mei 2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko April 2023 • Pembahasan *Bottom-up Stress Test Market, Solvency & Sensitivity* • Pembahasan *Stress Test* Covid-19 Q1 2023
6	06 Juli 2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Mei 2023
7	14 Juli 2023	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Q2-2023. • Lain-lain
8	23 Agustus 2023	• Pembahasan *Stress Test* Kredit, Pasar dan Likuiditas. • Pembahasan *New Market* RWA *Basel* III • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Bulan Juli 2023
9	20 September 2023	• Pembahasan *progress Follow-Up* temuan OJK. • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Agustus 2023
10	27 Oktober 2023	• Pembahasan *progress Follow Up Findings* OJK • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Q3-2023.
11	24 November 2023	• Pembahasan *progress Follow Up Findings* OJK • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk Bulan Oktober 2023

Untuk memastikan implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif, Perseroan mengandalkan pada Tata Kelola Risiko yang telah ditetapkan. Tata Kelola Risiko ini berfungsi sebagai landasan yang jelas untuk mengatur peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, serta hubungan antara berbagai fungsi pengelolaan Risiko di seluruh perusahaan.

Dalam Tata Kelola Risiko, setiap fungsi memiliki peran yang terdefinisi dengan baik dalam pengelolaan Risiko. Hal ini termasuk identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian Risiko di berbagai level dan unit kerja. Selain itu, Tata Kelola Risiko juga menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mengelola Risiko dengan efektif.

Keterkaitan antar fungsi pengelolaan Risiko juga diatur dengan cermat dalam Tata Kelola Risiko. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait dengan Risiko dipertimbangkan secara holistik, dengan memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh perusahaan. Selain itu, kebijakan yang diperlukan untuk mengelola Risiko secara efektif juga ditetapkan dan diimplementasikan sesuai dengan Tata Kelola Risiko yang telah ditetapkan.

PENGAWASAN DIREKSI

Pelaksanaan fungsi pengawasan Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radir) dan Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), sebagai berikut:

1. 21 Februari 2023 dengan agenda:
   a. RWA Basel III Implementation (sebagai informasi)
   b. Stress Test Q4-2022 (*Credit, Market & Liquidity*) (sebagai informasi)
   c. Peers Comparison Q3-2022 (sebagai informasi)
   d. *Operational & IT Risk Update* (sebagai informasi)
2. 05 April 2023 dengan agenda:
   a. *Risk Profile Guideline Annual Report* (sebagai informasi)
   b. *Risk Monthly Report as February* 2023 (sebagai informasi)
   c. *Operational & IT Risk Update* (sebagai informasi)
3. 30 Mei 2023 dengan agenda:
   a. Kebijakan Bencana (sebagai persetujuan)
   b. BUST: *Solvency, Sensitivity & Liquidity* (sebagai persetujuan)
   c. *Risk Monthly Report as of* April 2023 (sebagai informasi)
4. 24 Juli 2023 dengan agenda:
   a. Laporan Profil Risiko Triwulan II 2023 (sebagai persetujuan)
5. 21 Agustus 2023 dengan agenda:
   a. *Matters Arising from Previous* RMC (sebagai informasi)
   b. Piagam KMR (sebagai persetujuan)
   c. *Stress Test* Kredit, Pasar, Likuiditas (sebagai persetujuan)
   d. ATMR Pasar Baru; Basel III (sebagai informasi)
   e. Laporan Bulanan Risiko posisi Juli 2023 (sebagai informasi)
6. 22 September 2023 dengan agenda:
   a. *Matters Arising from Previous RMC* (sebagai informasi)
   b. Kebijakan Produk Program (sebagai persetujuan)
   c. Pemantauan Rencana Tindak *Stress* (sebagai informasi)
   d. Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi)
   e. Laporan Bulanan Risiko posisi Agustus 2023 (sebagai informasi)
7. 18 Oktober 2023 dengan agenda:
   a. Matters Arising From Previous RMC (sebagai informasi)
   b. Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023 (sebagai informasi)
   c. Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi)
   d. Pemantauan Rencana Tindak Stress Test (sebagai informasi)
8. 22 November 2023 dengan agenda:
   a. *Matters Arising from Previous* RMC (sebagai informasi)
   b. Stress Test Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas (sebagai persetujuan)
   c. Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi)
9. 20 Desember 2023 dengan agenda:
   a. Matters Arising from Previous RMC (sebagai informasi)
   b. Manajemen Penguatan NSFR (sebagai informasi)
   c. Laporan Bulanan Risiko posisi November 2023 (sebagai informasi)

PILAR II KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT

PILAR II Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit telah tersedia dan sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank, dan dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis dan kompleksitas usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang tidak bertentang dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Kebijakan Manajemen Risiko KB Bank.

1. Strategi Manajemen Risiko Bank
   Strategi manajemen risiko Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi, disusun untuk tujuan jangka panjang guna memastikan kelangsungan usaha, mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan serta secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Bank.

   Strategi manajemen risiko Bank disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi, kecukupan sumber daya manusia & infrastruktur, kondisi keuangan Bank, diversifikasi portofolio Bank, serta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Bank melakukan kaji ulang strategi manajemen risiko secara berkala.

2. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
   Kebijakan Manajemen Risiko Bank dibentuk untuk memastikan bahwa Bank memelihara eksposur risiko yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan eksternal, hukum, regulasi dan ketentuan lainnya yang terkait, serta dikelola oleh pejabat yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan keahlian di dalam manajemen risiko, sejalan dengan tingkat kompleksitas bisnis.

   Kebijakan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dibuat dengan mengacu pada dokumen Kebijakan Manajemen Risiko Bank, peraturan OJK dan ketentuan lainnya. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengkoordinasikannya secara terpusat. Sedangkan Prosedur dan pedoman manajemen risiko harus dibuat oleh unit kerja di Bank dan disusun sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Bank, prinsip kehati-hatian dan peraturan terkait yang berlaku.

3. Penetapan Limit Risiko

a. Risk Appetite Statement
   Bank memiliki limit yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis dalam bentuk Risk Appetite Statement dan telah mendapat persetujuan sampai dengan Dewan Komisaris.
b. Limit
   Penetapan limit risiko mencakup antara lain:
   i) Limit secara keseluruhan;
   ii) Limit per jenis risiko; dan
   iii) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

4. Pelaksanaan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
   Kesadaran risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit risiko harus merupakan cara pikir dari semua semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko.

PILAR III KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses tersebut harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai eksposur risiko bank, kinerja aktivitas fungsional dan kondisi keuangan.

1. Identifikasi Risiko
   Langkah-langkah dalam identifikasi risiko meliputi:
   a. Memahami bisnis dan melakukan analisa berbagai risiko yang melekat.
   b. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang potensial pada produk dan aktivitas Bank secara berkala.
   c. Mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari kerugian.
   d. Memastikan ketersediaan metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko.

2. Pengukuran Risiko
   Risiko harus dapat diukur sehingga dapat ditentukan kecukupan pencadangan dan kemampuan modal untuk menyerap risiko yang diakibatkannya. Langkah-langkah penting untuk membentuk suatu proses pengukuran risiko adalah:
   a. Menempatkan pejabat yang ahli dan berpengalaman dalam menentukan bagaimana risiko diukur.
   b. Membuat metodologi atau model yang tepat untuk masing-masing jenis risiko tersebut. Metodologi atau model harus didokumentasikan.
   c. Memiliki aplikasi pengukuran risiko yang memadai dan juga mengetahui keterbatasan teknologi tersebut.
   d. Menguji hasil actual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan untuk memvalidasi metodologi atau model tersebut.
   e. Melakukan kaji ulang secara berkala mengenai kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
   f. Melakukan penyempurnaan terhadap metodologi pengukuran apabila terdapat perubahan secara signifikan atas factor - faktor material yang mempengaruhi risiko.
   g. Melakukan Stress Testing secara berkala, yaitu suatu proses estimasi potensi kerugian ekonomis pada kondisi pasar yang tidak normal, yang memungkinkan Bank untuk menilai dampak terhadap pendapatan dan modal Bank.
   h. Melakukan *Backtesting* secara berkala untuk menguji model internal Bank.
   i. Memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank.

3. Pemantauan Risiko
   Dalam memantau risiko, setiap unit kerja di Bank harus melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
   a. Memiliki suatu prosedur yang jelas untuk memantau eksposur risiko, toleransi risiko, limit, hasil Stress Testing dan konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
   b. Memiliki sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi perubahan profil risiko atau pelampauan limit sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk meminimalkan potensi kerugian.
   c. Melaporkan hasil pemantauan termasuk tinjauan atas portfolio kepada manajemen Bank secara berkala dalam rangka mitigasi risiko.
   d. Menyempurnakan proses pelaporan jika terdapat perubahan yang material atas kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank.
   e. Memiliki sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Sistem back-up dan prosedur dikaji secara berkala.

4. Pengendalian Risiko
   Dalam mengendalikan risiko, setiap unit kerja di Bank harus melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
   a. Memiliki proses pengendalian untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
   b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan harus disesuaikan dengan eksposur risiko, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.
   c. Memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
   d. Memastikan bahwa semua produk baru dan/atau pengembangan hanya akan pasarkan setelah melalui tinjauan yang memadai atas semua bagian risiko serta terdokumentasikan dalam Produk program dan hanya jika persetujuan regulator telah didapat (khusus produk yang dipersyaratkan mendapat persetujuan dari regulator).
   e. Memiliki sistem back-up dan prosedur untuk menangani dan memantau risiko jika terjadi kegagalan sistem.
   f. *Assets and Liabilities Management* (ALMA) diterapkan Bank dalam mengendalikan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
   g. Pengendalian risiko lainnya dapat dilakukan melalui

mekanisme rapat dewan direksi melalui Komite Manajemen Risiko (KMR), ataupun melalui rapat pembahasan lainnya.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Bank secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan eksposur risiko, baik secara agregat/komposit maupun eksposur risiko berdasarkan jenis risiko yang melekat pada kegiatan bisnis dan operasional Bank. Sistem ini harus didokumentasikan dan dikaji secara berkala.

PILAR IV SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan pengendalian intern dalam pengelolaan risiko mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko.
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang- undangan.
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Pilar 2 Basel II

Sebagai bagian implementasi Pilar 2 Basel II, KB Bank telah melakukan proses penilaian kecukupan modal secara internal *(Internal Capital Adequacy Assessment Process*/ICAAP) yang disampaikan setiap semester, yaitu berupa Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko. Selain itu Bank KB Bukopin telah melakukan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko *(Risk-based Bank Rating/* RBBR*)* dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko *(Risk Profile)*, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas *(Earnings)* dan Permodalan *(Capital)* untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Dalam implementasi Pilar 2 *Basel* II, adanya kesesuaian pengukuran yang dilakukan oleh Bank (dengan kerangka *Internal Capital Adequacy Assessment Process*/ICAAP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (dengan kerangka *Supervisory Review and Evaluation Process*/SREP) menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan *gap* penilaian dan semakin meningkatkan proses manajemen risiko.

Bank KB Bukopin senantiasa melakukan penyempurnaan antara lain melalui *review* atas penetapan kategorisasi peringkat dalam setiap penilaian parameter/indikator dari setiap jenis risiko, memastikan sumber data yang digunakan untuk setiap penilaian parameter/ indikator dari setiap jenis risiko dan *review* tingkat signifikansi dari suatu kejadian maupun hasil temuan/pemeriksaan dan pengaruhnya terhadap Peringkat Profil Risiko secara keseluruhan. Secara umum tingkat KPMM Bank KB Bukopin selalu dikelola secara hati-hati untuk dapat memitigasi tingkat risiko yang dihadapi dalam segala kondisi, melalui penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai perkembangan bisnis dan kompleksitas usaha serta memastikan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank KB Bukopin yang memadai dalam rangka mendukung kesinambungan usaha, pengembangan bisnis dan pertumbuhan tingkat keuntungan.

Pilar 3 Basel II

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/ POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/ POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, terdapat beberapa konten laporan khususnya yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain yaitu pengungkapan setiap jenis risiko, potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank, praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, dan pengungkapan laporan rasio kecukupan likuiditas. Secara umum Bank KB Bukopin telah mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan Bank KB Bukopin dan publikasi pada situs web Bank KB Bukopin. Bank akan terus meningkatkan pengembangan database, sistem informasi dan manajemen risiko sehingga dapat menghasilkan meningkatkan pengungkapan dan sesuai dengan pilar 3 *Basel* II.

Basel III-Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio

Sehubungan dengan penerapan *Basel* III, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Perseroan telah melakukan *review* terhadap Pedoman Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE/004/ DIR/I/2019 tentang Pedoman Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* tanggal 14 Januari 2019 dan Pedoman Perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE/241/DIR/ XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio)* tanggal 21 Desember 2018.

Adapun Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap,

di mana tahapan bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 adalah 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2016; 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2017; 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; dan 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018.

KB Bank telah menyampaikan laporan LCR (individual dan konsolidasi) secara bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan LCR triwulanan (individual dan konsolidasi) pada situs *web* KB Bank. Selain itu KB Bank telah melakukan pengelolaan dan pemantauan tingkat aset likuid dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara harian dengan memperhatikan limit sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko likuiditas.

Hal yang menjadi perhatian dalam penerapan pengukuran sesuai kerangka *Basel* III tersebut, antara lain terkait kesiapan sistem informasi dan ketersediaan *database*, *review* berkala atas kebijakan dan prosedur di Bank dalam pelaksanaan pengukuran dan monitoring rasio likuiditas berdasarkan kerangka *Basel* III.

Sesuai dengan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*), terhitung mulai bulan Januari 2018 KB Bank telah melakukan pemantauan terhadap pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih.

Implementasi kerangka NSFR ini tidak terlepas dari kerangka LCR dan bersifat saling melengkapi sebagai alat untuk mengukur risiko likuiditas Bank, di mana pemenuhan standar LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek dari profil risiko likuiditas KB Bank dengan memastikan bahwa KB Bank memiliki *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk bertahan selama periode *scenario stress* yang signifikan dalam 30 hari ke depan, sedangkan pemenuhan standar NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank mendanai aktivitasnya dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko tekanan pada pendanaan di masa depan.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan implementasi Basel III khususnya aspek *common equity tier I, conservation buffer, countercyclical buffer dan leverage ratio*, Bank KB Bukopin menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan permodalan untuk mendukung pencapaian rencana bisnis.

Basel III – Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Bank KB Bukopin dalam pengelolaan risiko pasar, khususnya risiko suku bunga, yaitu risiko yang bersumber dari pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *banking book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang *(Interest Rate Risk in The Banking Book/IRRBB*), Bank KB Bukopin saat ini telah melakukan perhitungan dan penerapan IRRBB, yang dilaporkan secara triwulanan kepada OJK.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Perseroan wajib menyusun Laporan Profil Risiko, sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dan POJK No. 38/POJK.03/2017, baik secara individual maupun secara konsolidasi. Laporan ini disusun secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dengan perbandingan komparatif terhadap triwulan sebelumnya.

Laporan Profil Risiko harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan untuk laporan secara individu, dan akhir bulan setelah bulan laporan untuk laporan secara konsolidasi. Isi laporan yang disampaikan kepada OJK harus sejalan dengan substansi Laporan Profil Risiko yang diberikan kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Self assessment Profil Risiko Triwulan IV 2023 disusun berdasarkan data Desember 2023 *(unaudited)*. Secara keseluruhan peringkat tingkat risiko inheren Risiko Bank KB Bukopin adalah Peringkat Peringkat 2 (*Low to Moderate*), dengan perincian peringkat risiko yaitu seluruh risiko komposit ada pada Peringkat 2 (*Low to Moderate*).

Sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain *(counterparty)* dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit yang dikelola Bank KB Bukopin tidak hanya terkait pada penyaluran kredit tetapi juga eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi. Bank KB Bukopin memiliki pedoman perkreditan yang mengatur kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit kepada segmen SME, Wholesale dan Retail, serta kebijakan dan prosedur dalam rangka penempatan antar bank maupun kegiatan *trade finance*. Pedoman perkreditan tersebut dikaji dan disempurnakan secara berkala, baik atas kebijakan umum maupun pedoman tiap bisnis, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan eksternal lainnya serta kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit.

Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas harus diproses melalui Komite Kredit (atau komite sejenis). Komposisi dan jumlah anggota komite dapat berbeda sesuai dengan jumlah dan jenis fasilitas yang diajukan. Untuk eksposur risiko kredit dengan nilai yang dirasa signifikan bagi Bank, dilakukan melalui proses Komite Kredit berjenjang mengacu pada kewenangan limitasi risiko kredit yang dimiliki anggota Komite Kredit. Untuk meningkatkan kualitas keputusan kredit dimaksud maka pengajuan proposal kredit dilakukan oleh

Credit Underwriting yang bersifat independen terpisah dari struktur organisasi bisnis, dan diajukan setelah proses analisa kelayakan debitur.

Sistem pengelolaan risiko kredit juga telah diimplementasikan pada berbagai aspek pengelolaan risiko kredit. Sistem tersebut antara lain SME *Credit Tools* dan *Wholesale Credit Tools* untuk segmen SME dan segmen *Wholesale* dan model *scoring* risiko kredit untuk kredit retail. KB Bank secara berkelanjutan melakukan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model tersebut.

KB Bank secara berkelanjutan mengelola risiko kreditnya melalui penetapan dan evaluasi proses dan kebijakan kredit, pengaturan dan evaluasi limit, yang didukung dengan mekanisme pelaporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Bank juga terus melakukan penyempurnaan terkait kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi Basel, utamanya dalam penerapan *Standardized Approach* Risiko Kredit.

Hal lain yang menjadi kunci penting dalam pengelolaan risiko kredit adalah faktor sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi terhadap pengelolaan risiko kredit menjadi perhatian utama dengan memberikan training baik kepada para *Account Officer* sebagai *risk owner* maupun staf yang berkaitan dengan fungsi analis risiko kredit.

Untuk meningkatkan kehandalan proses manajemen risiko kredit, KB Bank senantiasa melakukan kajian terhadap desain dan infrastruktur dalam proses kredit dengan terus meningkatkan penerapan aspek independensi atas keputusan kredit *(four eyes principle)* dan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)*. KB Bank melakukan *back testing* secara berkala untuk keperluan validasi, penyempurnaan maupun pengembangan terhadap model pengukuran risiko kredit. Adapun model pengukuran risiko kredit meliputi model pengukuran segmen SME, *Wholesale* dan Retail. KB Bank juga melakukan kajian dalam rangka memastikan implementasi *Risk Appetite dan Risk Tolerance* untuk masing-masing bisnis.

Selanjutnya, KB Bank melakukan *stress test* dengan menggunakan pendekatan *macro-related* (atau disebut *macro bottom up stress testing*) yang memperhatikan faktor risiko eksternal seperti perkembangan kondisi makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas nasabah, termasuk dengan menerapkan skenario terburuk *(worst case scenario/Beyond Severe Scenario)*. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kecukupan modal Bank KB Bukopin apabila kualitas kredit mengalami pemburukan.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Variabel risiko pasar yang dikelola Bank secara individual dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.

Pengendalian risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga Bank pada *trading book* antara lain dilakukan melalui analisis risiko dan limit untuk aktivitas trading yang meliputi transaksi *Money Market*, *Foreign Exchange* dan *Fixed Income Securities* (surat berharga). Selain itu, dilakukan proses *mark to market* secara harian, dan *monitoring Posisi Devisa Neto* (PDN) atas posisi tersebut.

Dengan mempertimbangkan komposisi portofolio KB Bank, pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* menjadi fokus perhatian KB Bank karena posisi banking book yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan posisi *trading book*. Hal ini dilakukan antara lain dengan memperhatikan posisi gap aset dan kewajiban Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan kecenderungan pergerakan Suku Bunga Kebijakan Moneter *(Policy Rate)* Bank Indonesia berupa BI 7-*day* (*Reverse*) Repo Rate serta suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas KB Bank. Pengukuran risiko pada *banking book* dilakukan dengan menggunakan *Interest Rate Risk* Model dengan metodologi *repricing profile gap* dan menggunakan skenario pergerakan tingkat bunga hingga level tertentu sehingga dapat diketahui *potential loss* yang dapat berdampak pada profitabilitas dan permodalan Bank KB Bukopin. Penilaian risiko nilai tukar mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan PDN dan volatilitas mata uang asing yang dikelola KB Bank, dengan pengendalian risiko dilakukan melalui monitoring mutasi transaksi valuta asing di seluruh kantor cabang dan unit bisnis. *Monitoring* dan evaluasi atas limit-limit yang terkait dengan risiko pasar dilakukan secara berkala dengan disesuaikan kepada kondisi internal Bank KB Bukopin, ketentuan Bank Indonesia maupun OJK.

Dalam melakukan pengukuran risiko dengan memperhatikan berbagai faktor risiko, KB Bank melakukan *stress test* dengan beberapa skenario, diantaranya skenario terburuk *(worst case scenario/Beyond Severe Scenario)*. Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank KB Bukopin dalam menghadapi berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Pelaksanaan *stress test* tersebut dilakukan dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Pasar.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank KB Bukopin. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan pengelolaan risiko likuiditas, KB Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan evaluasi risiko likuiditas secara harian antara lain melalui pengumpulan data yang terkait dengan pengendalian risiko likuiditas antara lain meliputi pemenuhan Giro Wajib Minimum, posisi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), posisi alat likuid,

liquidity coverage ratio (LCR), dan *net stable funding ratio* (NSFR) serta penyampaian laporan rutin yang mencakup posisi risiko likuiditas KB Bank.

Untuk memastikan kemampuan KB Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah/*counterparty*, KB Bank menerapkan pengelolaan likuiditas melalui alokasi penempatan pada Cadangan Primer *(Primary Reserve)* dan aset likuid berdasarkan kriteria dan limit tertentu. Bank telah memiliki Kebijakan Rencana Pendanaan Darurat *(Contingency Funding Plan),* yang berisi langkah yang harus dilakukan oleh KB Bank dalam mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas harian sehingga KB Bank dapat tetap memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu dan menjaga kelangsungan proses bisnis KB Bank. *Review* terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko likuiditas dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan KB Bank, ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan eksternal lainnya.

Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Assets and Liabilities Management Committee* (ALCO).

Dalam melakukan pengukuran risiko, KB Bank telah melakukan *stress test* yang bersifat historis *(historical scenario)* maupun hipotetis *(hypothetical scenario)* dengan menerapkan skenario terburuk *(worst case scenario/Beyond Severe Scenario)*. Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan KB Bank dalam memenuhi kewajiban dalam segala kondisi krisis, serta mitigasi yang harus dilakukan terkait dengan kondisi tersebut. Sebagai satu dasar asumsi yang digunakan dalam *stress test* terkait dengan proyeksi dana keluar dari penarikan dana pihak ketiga (DPK) oleh nasabah, KB Bank melakukan pemantauan pergerakan DPK secara harian, mingguan maupun bulanan untuk mengetahui tingkat pengendapan dana pihak ketiga. Pelaksanaan *stress test* tersebut dilakukan dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas. Selain itu untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank KB Bukopin dalam memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis, KB Bank juga melakukan pemantauan tingkat akses pasar secara harian antara lain melalui pemantauan pinjaman antar Bank, SWAP forex, penjualan surat berharga, Repo surat berharga dan pemanfaatan pinjaman dari pihak lain.

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bagi Bank Umum di mana kewajiban pemenuhan LCR bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dilakukan secara bertahap sejak 30 Juni 2016, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, KB Bank telah menyampaikan laporan LCR (individual dan konsolidasi) secara bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan LCR triwulanan (individual dan konsolidasi) pada situs web Bank KB Bukopin. Posisi rasio LCR KB Bank Triwulan IV 2023 secara individual adalah sebesar 129,92% sedangkan secara konsolidasi adalah sebesar 119,62%.

Sesuai dengan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio)*, Pada saat ini KB Bank telah melakukan pemantauan terhadap pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih. Rasio NSFR hingga akhir Triwulan IV 2023 secara individual adalah sebesar 104,39% sedangkan secara konsolidasi adalah sebesar 103,74%. Rasio tersebut berada diatas batas minimal yang harus dijaga yaitu sebesar 100%.

Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional yang melekat di seluruh aktivitas Perseroan bertujuan untuk meminimalisasi adanya kerugian bagi Perseroan dengan lebih difokuskan pada aspek sumber daya manusia dan internal proses, namun demikian pengelolaan risiko operasional tetap memperhatikan aspek sistem/teknologi informasi dan kejadian eksternal yang berpengaruh terhadap operasional Perseroan.

Kepedulian setiap individu pada seluruh fungsi atas tanggung jawab risiko yang melekat pada masing-masing fungsi, secara terus menerus dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka pemahaman yang baik terhadap pengelolaan risiko.

Pengendalian risiko dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dengan adanya kebijakan dan pedoman atau prosedur untuk setiap aktivitas pada masing-masing fungsi yang secara menyeluruh dipastikan ketersediaannya dengan disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perseroan.

Proses manajemen risiko tercermin dari berbagai aktivitas diantaranya:

1. Identifikasi risiko operasional melalui analisa data/informasi dari berbagai sumber antara lain:
   a. Hasil analisa risiko pada setiap bisnis proses yang memiliki potensi risiko;
   b. Analisa data dengan mengidentifikasi kemungkinan dan dampak risiko operasional setiap aktivitas operasional melalui hasil pengukuran risiko secara mandiri *(risk control self-assessment)*;
   c. Analisa dengan mengidentifikasi risiko berdasarkan data kejadian kerugian *(Loss Event Database)*;
   d. Analisa dari kekurangan maupun pelampauan *threshold* risiko berdasarkan *Risk Appetite Statement (RAS)* yang telah ditetapkan;
   e. Analisa penyebab risiko mengacu pada hasil temuan atau hasil observasi (data/kejadian lampau) berdasarkan frekuensi dan dampak yang terjadi;
   f. Melakukan *mapping risk issue* pada beberapa aktivitas/ fungsi tertentu dengan dilengkapi rancangan mitigasi risiko;
   g. Secara aktif dan fokus pada setiap kegiatan operasional dengan mengumpulkan *risk issue* yang ada.
2. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan data hasil identifikasi risiko berupa:
   a. *Top High Risk Issue* berdasarkan hasil pengukuran risiko secara mandiri;
   b. *Top High Risk Issue* berdasarkan temuan audit;

c. Kejadian kerugian yang memiliki dampak tinggi;
d. Pelampauan *threshold* beberapa parameter yang dimonitor secara rutin;
e. Profil risiko berdasarkan *self assessment* dan dampak terhadap tingkat kesehatan.

3. Pemantauan risiko operasional fokus pada produk, teknologi informasi dan aktivitas antara lain:
   a. *Risk Register Information Technology*;
   b. *Risk Register e-channel*;
   c. *Risk Register* seluruh unit kerja;
   d. *Product Complexity*;
   e. Melakukan kajian terhadap data kerugian atau kejadian yang berdampak risiko lainnya bagi perseroan.
4. Pengendalian risiko yang dilaksanakan antara lain:
   a. Peningkatan fungsi pengendalian pada setiap fungsi melalui penerapan kontrol secara berjenjang dan penerapan SLA;
   b. Peningkatan fungsi pengendalian dengan melakukan observasi terhadap kualitas kepatuhan dan kedisiplinan terhadap prosedur pada setiap aktivitas;
   c. Peningkatan kontrol dan *monitoring* terkait produk dan aktivitas baru;
   d. Pengendalian risiko operasional dengan menerbitkan suatu kajian/opini setelah melakukan *review* terkait kebijakan, prosedur, aktivitas baru, perjanjian kerjasama, produk, dan Teknologi Informasi;
   e. Monitor dan pengendalian risiko operasional antara lain melalui forum diskusi dan forum *meeting* yang disampaikan dalam bentuk laporan, hasil analisa dan memorandum kepada fungsi/unit kerja;
   f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk paham dan dapat mengelola risiko sesuai fungsi masing-masing secara terus menerus;
   g. Pengelolaan risiko dengan penerapan *Business Contingency Plan* dalam menghadapi kejadian eksternal (bencana);
   h. Pelaksanaan monitoring secara berkala atas keamanan sistem teknologi informasi yang dipergunakan oleh Perseroan, termasuk dalam setiap kegiatan pengujian DRC.

Dalam pengeleloaan risiko secara terus menerus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepedulian risiko antara lain:
1. Penerapan *Control Self Assessment* untuk mengukur risiko operasional setiap fungsi;
2. Peningkatan *risk awareness* kepada seluruh lapisan organisasi perusahaan.

Risk Management Tools:

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional, Perseroan mengaplikasikan antara lain:
1. Modul *Risk Control Self Assessment* (RCSA) manajemen risiko operasional berbasis web yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko pada setiap unit kerja;
2. Modul *Loss Event Data* berbasis web yang digunakan untuk analisis historical loss data di mana hasilnya diarahkan untuk memberikan informasi risiko-risiko yang harus diantisipasi di masa yang akan datang atau tidak berulang;
3. *Key Risk Indicator* (KRI) yang yang terdiri dari monitoring terhadap, yang hasilnya akan digunakan sebagai indikator *early warning system* atas kemungkinan terjadinya suatu kejadian risiko.

Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum Perseroan adalah dalam rangka pengamanan Perseroan dari risiko akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat merugikan Perseroan. Dalam pengelolaan risiko hukum, Perseroan membentuk Departemen Hukum Perusahaan dengan fokus kepada penyelesaian tuntutan hukum, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Selain itu Departemen tersebut bertanggung jawab untuk memastikan penguatan posisi Perseroan dalam seluruh perikatan yang dilakukan dan bertindak sebagai *Corporate Legal & Litigation* dalam setiap aktivitas. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko hukum secara aktif Departemen Hukum Perusahaan melaksanakan pembahasan risiko atau potensi risiko hukum dan pengelolaannya, antara lain melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian ataupun diskusi dalam Forum Pengendalian lainnya. Peningkatan kepedulian risiko hukum dan penyelesaian masalah hukum menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi Pengelolaan risiko reputasi disebabkan adanya persepsi negatif terhadap Perseroan, secara konsisten dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian atas adanya indikasi ataupun pengaduan yang disampaikan kepada Perseroan. Perseroan melakukan analisis atas setiap pengaduan nasabah ataupun persepsi negatif yang disampaikan melalui media untuk memastikan penyebab serta penyelesaiannya. Perseroan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko reputasi, terutama terkait dengan pengaduan nasabah yang dapat disampaikan melalui unit *customer care*.

Pengelolaan risiko reputasi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui *media online* serta media lainnya selalu ditingkatkan dan dilakukan mitigasi dengan melakukan Analisis penyebab kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya persepsi negatif, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah dan lainnya. Selain itu, Perseroan telah menetapkan limit risiko untuk penanganan pengaduan Nasabah dalam rangka pengukuran, monitoring, dan pengendalian risiko reputasi.

Pengendalian risiko reputasi dilaksanakan dengan rangkaian

kegiatan antara lain:
1. Secara rutin melakukan *monitoring* terhadap penanganan dan penyelesaian setiap pengaduan yang disampaikan kepada Perseroan;
2. Menggunakan aplikasi yang dapat memonitor proses penyelesaian pengaduan nasabah yang dilengkapi dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati oleh seluruh unit terkait, yaitu aplikasi *Complaint Tracking System*;
3. Meningkatkan pemahaman seluruh staf terhadap risiko reputasi yang dapat terjadi di setiap aktivitas layanan nasabah;
4. Meningkatkan pemahaman seluruh staf terkait risiko reputasi Perseroan yang melekat dalam setiap tindakan dan perilaku selama berada dan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing.

Risiko Strategik

Pengelolaan risiko Strategik dilaksanakan melalui *monitoring* dan Analisis serta evaluasi atas pencapaian target dan sasaran Perseroan secara detail dan rutin. Pembahasan terkait pencapaian target perusahaan dikoordinasikan langsung dari Kantor Pusat melalui pejabat yang bertanggung jawab di setiap *regional*, untuk selanjutnya diteruskan sampai level cabang dan setiap individu.

Monitoring atas risiko strategi Pengelolaan dengan melakukan pengukuran terhadap posisi Perseroan baik diantara industri perbankan maupun di antara *peers group*, yang ditindaklanjuti dengan langkah langkah mitigasi atas penyebab baik secara internal Perseroan maupun perkembangan kondisi makro ekonomi yang kemungkinan dapat berdampak pada bisnis Perseroan.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan terkait risiko yang melekat pada Perseroan dalam hal peraturan perundang-undangan, ketentuan internal dan ketentuan lain yang berlaku. Peningkatan kepatuhan seluruh unit dan fungsi terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator selalu dimonitor dan dikendalikan oleh unit yang khusus me-*monitor* dan sekaligus mengkoordinir pengendalian risiko kepatuhan.

Perseroan senantiasa melakukan update terhadap peraturan ataupun ketentuan baru dari regulator ataupun instansi terkait dengan segera menyelaraskan pelaksanaannya dalam aktivitas setiap unit atau fungsi. Pengukuran risiko kepatuhan adalah mengacu pada hasil identifikasi terhadap kejadian pengalaman yang diakibatkan ketidakpatuhan dengan menghitung besarnya risiko kerugian menggunakan *accounting loss data*.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian profil risiko secara individual maupun secara konsolidasi ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian Risiko Inheren dan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, yang meliputi:
1. Tata Kelola Risiko;
2. Kerangka Manajemen Risiko;
3. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.

Dari hasil *self assessment* yang dilakukan Perseroan atas Profil Risiko secara individual maupun secara konsolidasi yang disampaikan kepada OJK pada posisi Desember 2023, predikat risiko Perseroan secara keseluruhan berada pada tingkat risiko komposit Peringkat 2 (P2). Secara keseluruhan terlihat bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian dan tingkat risiko inheren yang dihadapi Perseroan tergolong sedang dan masih dapat di-*cover* oleh permodalan Perseroan. Demikian juga dilihat dari sisi kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan memadai dibanding potensi kejadian risiko yang mungkin timbul.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Perseroan terus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, pelaksanaan Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi berikut dengan pelaksanaan komite pendukungnya.

INISIATIF STRATEGI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Peningkatan penerapan manajemen risiko oleh Perseroan dilakukan pada seluruh aspek kegiatan usaha Perseroan untuk memastikan terkelolanya tingkat risiko sesuai dengan strategi dan sasaran bisnis Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2023. Dalam rangka mendukung Rencana Bisnis Bank tahun 2023, maka beberapa strategi manajemen risiko yang akan dilaksanakan sejalan dengan upaya pencapaian target-target anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:
1. Penguatan kecukupan kerangka manajemen risiko.
2. Memperkuat implementasi manajemen risiko.
3. Meningkatkan kesadaran risiko.
4. Mendorong budaya risiko sejalan dengan upaya pencapaian strategi bisnis Bank tahun 2024-2026.

TINJAUAN ATAS

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko. Dalam mendukung rangka implementasi rencana strategis Perseroan, di antaranya adalah:

1. Melakukan *adendum* kebijakan risk appetite untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis Bank terkini.
2. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko.
3. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko pasar dan likuiditas.
4. Melakukan *review* kebijakan pengelolaan permodalan.
5. Melakukan *review* piagam komite manajemen risiko.

PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

KB Bank sudah mengevaluasi atas kecukupan sistem manajemen risiko pada tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Direksi melakukan evaluasi terhadap kecukupan manajemen risiko melalui peninjauan secara rutin terhadap kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang sedang berlaku, kecukupan sistem manajemen risiko, laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko KB Bank.
2. Komite Pemantau Risiko Bersama Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang sudah dilakukan oleh direksi.

Sistem Pengendalian Internal

KB Bank menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan elemen vital dalam pengelolaan bank, menjadi landasan utama bagi operasional yang sehat dan terkendali. Dalam konteks ini, Sistem Pengendalian Intern tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan kinerja bank, tetapi juga untuk meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern KB Bank didasarkan pada kerangka kerja COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - Internal Control Integrated Framework. Kerangka kerja ini memberikan pedoman yang komprehensif dalam menyusun sistem pengendalian intern yang mencakup aspek operasional dan keuangan, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan mengacu pada kerangka kerja COSO, KB Bank memastikan bahwa pengendalian internalnya mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk mengelola risiko secara efektif, mengoptimalkan kinerja operasional, dan mematuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku.

TUJUAN PENGENDALIAN

1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan (Tujuan Kepatuhan);
2. Dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha KB Bukopin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bukopin;
3. Tersedianya Informasi Keuangan dan Manajemen yang Lengkap, Akurat, Tepat Guna, dan Tepat Waktu atau Tujuan Informasi (Tujuan Informasi);
4. Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Efektivitas dan Efisiensi dalam Kegiatan Usaha KB Bank (Tujuan Operasional);
6. Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi KB Bank dari Risiko kerugian;
7. Meningkatkan Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada Organisasi KB Bukopin Secara Menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko);
8. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bukopin secara berkesinambungan.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional KB Bukopin. Unsur-unsur lingkungan pengendalian Bukopin meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen KB Bank;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia KB Bank;
5. Atensi dan arahan manajemen KB Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko; dan
6. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi operasional KB Bukopin dan penerapan Manajemen Risiko.

PENILAIAN PENGENDALIAN

Penilaian Risiko di Bank KB Bukopin merupakan proses yang melibatkan Direksi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi, dengan tujuan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Bank ini secara berkelanjutan melakukan identifikasi dan evaluasi risiko-risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain Direksi, penilaian risiko juga melibatkan auditor internal untuk memastikan cakupan audit yang dilakukan mencakup aspek-aspek risiko secara menyeluruh. Proses penilaian risiko ini melibatkan identifikasi jenis risiko, penetapan batasan risiko, dan penerapan teknik pengendalian risiko yang sesuai. Metodologi penilaian risiko menjadi acuan dalam pembuatan profil risiko yang didokumentasikan secara berkala, memastikan data yang relevan dan mutakhir tersedia untuk pengambilan keputusan yang tepat.

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian di Bank KB Bukopin melibatkan seluruh pegawai, termasuk Direksi, untuk memastikan efektivitas dalam mengendalikan risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian yang terencana dan diterapkan dengan baik akan memberikan keyakinan kepada pejabat dan pegawai bahwa arahan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif.

Pengendalian ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada seluruh staf Bank bahwa instruksi dan keputusan dari pucuk pimpinan telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengendalian diterapkan di semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi KB Bank, memastikan bahwa setiap bagian dari Bank terlibat dalam upaya pengendalian risiko secara menyeluruh, yang paling sedikit meliputi:

1. Kaji Ulang Manajemen *(Top Level Reviews);*
2. Kaji Ulang Kinerja Operasional *(Functional Review);*
3. Pengendalian Sistem Informasi;
4. Pengendalian Aset Fisik;
5. Dokumentasi.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan Manajemen Risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Informasi meliputi:

1. Informasi internal dan eksternal yang cukup dan menyeluruh yang diperlukan rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Informasi dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional KB Bank;
3. Sistem yang digunakan baik sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (*auditor intern*), dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai;
4. Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit.

AKTIVITAS PEMONITORAN

Pemantauan dilakukan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern melalui *three lines of defenses* Pemantauan terhadap Risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI.

Penyampaian penilaian audit intern oleh Satuan Kerja Audit Intern disampaikan langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Terhadap kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*), SKAI, maupun pihak lainnya, akan segera dilaporkan kepada pejabat dan/atau Direksi yang berwenang untuk menjadi perhatian dan dilakukan tindakan perbaikan. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KESESUAIAN DENGAN *COSO-INTERNAL CONTROL FRAMEWORK*

Perseroan telah memiliki standar acuan kerja yang berlaku bagi seluruh divisi dan fungsi yang ada di Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam aktivitas operasional harian. Sistem pengendalian internal Bank yang berjalan saat ini telah sesuai dengan COSO *Framework*, pengendalian internal melibatkan seluruh pihak dalam Perseroan dimulai dari karyawan, pejabat sampai pada Direksi dan Dewan Komisaris.

Tujuan pengendalian internal yang akan dicapai Perseroan sesuai dengan COSO *Framework* meliputi tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, tujuan pelaporan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang andal, tepat waktu dan transparan sebagaimana ditetapkan oleh regulator serta tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Ketiga tujuan tersebut dicapai melalui 5 (lima) komponen pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yang merupakan seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi;
2. Penilaian Risiko yaitu suatu proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasikan dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan;
3. Aktivitas Pengendalian yang dilakukan pada semua tingkatan entitas yang mencakup penetapan;
4. Kebijakan, ketentuan, prosedur serta kepatuhan dalam implementasi dalam seluruh kegiatan operasional;
5. Informasi dan Komunikasi yaitu suatu mekanisme komunikasi yang melibatkan semua pihak yang dilakukan secara kontinu dalam berbagi informasi yang relevan dan berkualitas baik yang bersumber dari internal maupun eksternal untuk mendukung pengendalian internal;
6. Pemantauan, merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memberikan keyakinan atas kecukupan pengendalian internal.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi sistem pengendalian internal di KB Bank dilakukan oleh fungsi pengendalian di lapis kedua dan ketiga, meliputi Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi Quality Assurance, dan Satuan Kerja Audit Internal. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan tingkat efektivitas sistem pengendalian internal Bank.

Selama tahun 2023, KB Bank telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini termasuk pengkinian kebijakan, prosedur, dan sistem sebagai bagian dari upaya untuk meminimalisir risiko dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal oleh Satuan Kerja Audit Internal menjadi bahan telaah bagi Dewan Komisaris, khususnya melalui peran Komite Audit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal KB Bank dinilai memadai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan komitmen Bank untuk menjaga tingkat keamanan dan efisiensi dalam operasionalnya.

Fungsi Kepatuhan

KEDUDUKAN FUNGSI KEPATUHAN DALAM ORGANISASI

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan KB Bank mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi ini bertujuan untuk mengelola langkah-langkah preventif guna memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Fungsi Kepatuhan meliputi memastikan bahwa KB Bank mematuhi komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya. Hal ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank terhadap aturan dan regulasi yang ditetapkan.

Selain itu, Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab untuk menyediakan bimbingan dan nasihat kepada seluruh unit bisnis dan fungsi operasional Bank terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Bank beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator dan untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan di mata publik dan regulator.

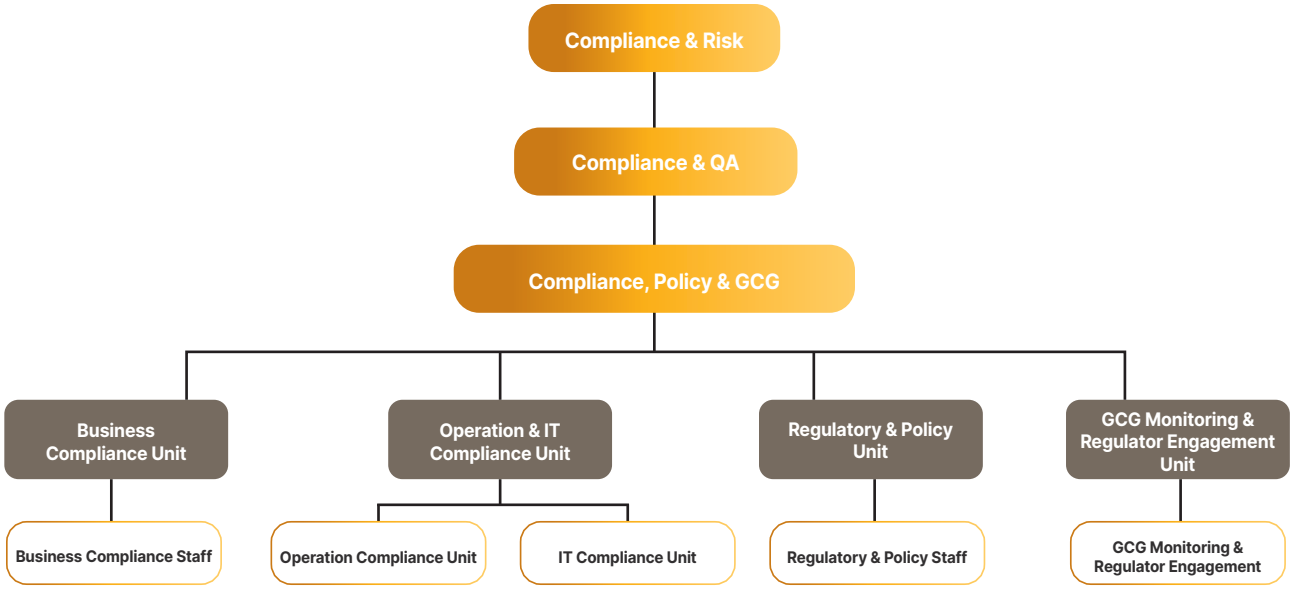
PEDOMAN OPERASIONAL KEPATUHAN

Berdasarkan ketentuan Internal KB Bank, telah diatur beberapa pedoman operasional sebagai dasar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan diantaranya:

1. Surat Edaran No. SE/095/DIR/V/2022 Tentang Pedoman Pemenuhan Permintaan Data dan Informasi dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan PT Bank Kb Bukopin Tbk.
2. Surat Keputusan Direksi No. 0118 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank KB Bukopin Tbk;
3. Surat Edaran No. SE/281/DIR/XI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Dalam Memastikan Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pihak Regulator dan/atau Pihak Otoritas Yang Berwenang;
4. Surat Edaran Direksi No. SE/155/DIR/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Satuan Kerja Kepatuhan dalam Perkreditan.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT Bank KB Bukopin Tbk;
6. Surat Edaran Direksi No. SE/054/DIR/V/2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan Bank KB Bukopin;
7. Surat Edaran Direksi No. SE/009/DIR/IV/2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam *Compliance Checklist*;

STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan selaku Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di KB Bank. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Departemen.



DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Bapak Dodi Widjajanto selaku Direktur Kepatuhan Profil ringkas dapat dilihat pada bagian Profil Direksi. Pengangkatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan telah melalui proses *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan Regulator.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, mengacu kepada Kebijakan Kepatuhan KB Bank dan dilaporkan kepada Regulator, dan dilakukan oleh Direktur Utama atas rekomendasi Direksi untuk kemudian bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

KIMIN Compliance , Policy & GCG Department Head	**Usia**	53 Tahun
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Domisili	Jakarta Selatan
	Riwayat Pendidikan	S1 Ekonomi dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang
	Riwayat Pekerjaan	• Koordinator Operasi KC Semarang (Agustus 2010-Juli 2013) • Koordinator Pelayanan KC Magelang (Agustus 2013-Januari 2014) • Manager Pelayanan & Operasi KC Magelang (Januari 2014-November 2014) • Manager Pelayanan & Operasi KC Sidoarjo (November 2014-Desember 2016) • Manager Pelayanan & Operasi KC Yogyakarta (Januari 2017-Desember 2017) • Manager Pelayanan & Operasi KC Makassar (Januari 2018-Februari 2019) • Kepala Departemen Kepatuhan, Kebijakan & Tata Kelola Kantor Pusat (Februari 2019-sekarang)
	Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan No. SKEP/0161-DIR/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
	Sertifikasi	• BSMR Level IV • Sertifikasi Kepatuhan Level II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KESATUAN KERJA KEPATUHAN

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Training	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	E LEARNING INDUCTION, ANTI FRAUD DAN APU PPT	16 Jan 2023	BPRIDE	JAKARTA
2	REMEDIAL E LEARNING INDUCTION BATCH I	1 Feb 2023	BPRIDE	JAKARTA
3	SEMINAR PUBLIK HUKUM ONLINE	27 Feb 2023	JUSTIKA SIAR	JAKARTA
4	TRAINING INDUCTION BATCH II TH 2023	8 May 2023	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
5	WEBINAR PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU	17 May 2023	FKDKP	JAKARTA

No	Nama Training	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
6	SHARING SESSION COMPLIANCE & RISK GROUP	15 Jun 2023	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
7	SOSIALISASI COACHING CLINIC BANK INDONESIA	23 Jun 2023	BANK INDONESIA	JAKARTA
8	TRAINING APU PPT(ONLINE)CAB.SOLO	30 Aug 2023	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
9	TRAINING INDUCTION BATCH 3(INDUCTION,APU PPT & ANTI FRAUD)	28 Aug 2023	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
10	WEBINAR FKDKP	28 Aug 2023	FKDKP	JAKARTA
11	WEBINAR FKDKP (IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN)	20 Sep 2023	FKDKP	JAKARTA
12	WEBINAR FKDKP	10 Oct 2023	FKDKP	JAKARTA
13	WORKSHOP UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	12 Oct 2023	PT.XYNEXIS INTERNATIONAL	JAKARTA
14	TRAINING APU PPT CABANG MEDAN	20 Oct 2023	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
15	E LEARNING APU PPT TAHUN 2023	23 Oct 2023	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
16	APU PPT PPSPM POJK 8-2023(OFFLINE)	2 Nov 2023	IAIB INDONESIA	JAKARTA
17	APU PPT PPSPM POJK 8-2023(ONLINE)	2 Nov 2023	IAIB INDONESIA	JAKARTA
18	CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL	14 Nov 2023	LSP MKS	JAKARTA
19	WORKSHOP PERSONAL DATA PROTECTION LAW IMPLEMENTATION	13 Nov 2023	IGNITE	JAKARTA

PRINSIP KEPATUHAN

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Meningkatkan dan mewujudkan suatu Budaya Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan KB Bank terus melanjutkan program *compliance awareness* (kesadaran kepatuhan) untuk seluruh pihak dan unit di Bank. Sebagaimana Program-program *Compliance Awareness* yang telah berjalan pada tahun sebelumnya meliputi :

1. Menjalankan Program-program Sosialisasi dan Edukasi, diantaranya :
   a. Program Sosialisasi *Compliance Campaign*.
   b. Melakukan Sosialisasi atas Regulasi yang dikeluarkan oleh Regulator dan Ketentuan Internal kepada Direksi, seluruh Cabang/Divisi dan Unit-unit terkait baik dalam rapat secara langsung maupun melalui media Bukopin *Office Communication* (BOC).
   c. Mengikuti *Training* Kerjasama dengan *Human Capital*.
2. Menyediakan dan Mengembangkan Infrastruktur serta Layanan Kepatuhan, yaitu dengan:
   a. Mengelola *website* Satuan Kerja Kepatuhan yaitu http://igrc (IGRC: *Integrated Governance Risk Compliance*).
   b. Memperbarui tampilan IGRC yang rencananya selesai pada Semester I 2024
   c. Secara berkelanjutan mengevaluasi dan memastikan ketersediaan ketentuan internal Bank dan eksternal (UU, PBI dan SEBI, POJK dan SEOJK dan ketentuan regulator lainnya) dengan melakukan updating dan pengkinian ketentuan baik ketentuan internal maupun eksternal kedalam *website* IGRC.
3. Melakukan Fungsi Konsultatif, hal tersebut diwujudkan dengan Pembuatan *Compliance Call Center & Email* Kepatuhan. Selain itu konsultasi juga dapat dilakukan dalam Forum diskusi tanya-jawab. Membuat kuesioner untuk disebarkan kepada departemen terkait sebagai bahan untuk membahas permasalahan terkini.
4. Meningkatkan Kompetensi Anggota Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yaitu dengan:
   a. Mengikuti Training, Seminar ataupun *Workshop* terkait dengan Pelaksanaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
   b. Mengikuti Sertifikasi Kepatuhan dan manajemen Risiko.
   c. *Sharing Knowledge* antar unit dalam Departemen Kepatuhan.
5. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten diantaranya dengan melakukan:
   a. Menyusun pelaporan dalam rangka membantu memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan
   b. Menyampaikan memo atas kesiapan dokumen permohonan persetujuan ke OJK (*Compliance Checklist*) terkait dengan *Fit and Proper* Direksi dan Dewan Komisaris.
   c. Menyampaikan memo atas kesiapan dokumen permohonan persetujuan ke OJK (*Compliance Checklist*) terkait dengan Produk Aktivitas Baru.
   d. Menyampaikan *reminder* atas kewajiban pelaporan, *review* kebijakan, serta melakukan kajian dan

pengendalian atas pemenuhan KJPP, Laporan Audited, dan pengendalian perbedaan kualitas kredit sebagai bentuk pengelolaan risiko kepatuhan.

e. Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
f. Pengelolaan kebijakan internal dalam Portal IGRC dengan penyeragaman seluruh kebijakan yang berlaku menggunakan dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa inggris).
g. Menyampaikan reminder atas kewajiban pelaporan, pelaksanaan penerbitan produk, kegiatan usaha bank, operasional bank, *review* kebijakan dan peringatan denda.

6. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan melakukan pemberian opini, penyusunan kajian, melakukan *review*, melaksanakan meeting, menyusun laporan, dan melakukan *reminder*.

Dalam rangka implementasi budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan selama 2023 Satuan Kerja Kepatuhan telah diwujudkan dengan:

NO	Output	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Total
1	Opini	37	45	40	25	28	15	190
2	Kajian	1		1	2			4
3	*Review*	2		2		2		6
4	FGD & *Meeting*	7	4	4	6	1	5	27
5	Laporan	2	1			2	1	6
6	*Reminder*	46	22	40	2	26	33	169

No	Output	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Opini	41	41	37	49	26	49	243
2	Kajian			2	3			5
3	*Review*	2	2	4	4	1		13
4	FGD & *Meeting*			1			1	2
5	Laporan	1			4	2		7
6	*Reminder*	23	24	24	21	20	18	130

Pada tahun 2023 Bank telah memiliki kebijakan-kebijakan yang terkait dengan prinsip-prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi, antara lain:

1. Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank KB Bukopin Tbk.
2. Kebijakan APU PPT PPPSPM
3. Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Bank Kustodian.
4. Kebijakan Pedoman Penggunaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rekanan Untuk Penilaian Agunan Kredit.
5. Kebijakan Pedoman Seleksi Penerimaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rekanan Untuk Penilaian Agunan Kredit.
6. Kebijakan Pembentukan Corporate Contract Committee Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Kebijakan *Sanction Screening*.

Adapun total persentase pemenuhan komitmen atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk posisi pemeriksaan Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :

1. Pemeriksaan OJK Kantor Pusat Posisi 31 Mei 2021 sebesar 100 % dari 168 Komitmen
2. Pemeriksaan OJK KC Yogyakarta Posisi 31 Mei 2021 sebesar 100 % dari 26 Komitmen
3. Pemeriksaan OJK KC Batam Posisi 31 Mei 2021 sebesar 100 % dari 61 Komitmen
4. Pemeriksaan OJK KC Mataram Posisi 31 Mei 2021 sebesar 100% dari 49 Komitmen
5. Pemeriksaan OJK Kantor Pusat Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100 % dari 149 Komitmen
6. Pemeriksaan OJK KC Denpasar Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100 % dari 26 Komitmen
7. Pemeriksaan OJK KC Manado Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100 % dari 50 Komitmen
8. Pemeriksaan OJK KCBanjarmasin Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100% dari 65 Komitmen
9. Pemeriksaan OJK KC Medan Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100 % dari 24 Komitmen
10. Pemeriksaan OJK KC Bogor Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100 % dari 38 Komitmen
11. Pemeriksaan OJK KC Semarang Posisi 31 Januari 2022 sebesar 100 % dari 35 Komitmen
12. Pemeriksaan OJK Kantor Pusat Posisi 31 Januari 2023 sebesar 100 % dari 266 Komitmen
13. Pemeriksaan OJK KC Bandung Posisi 31 Januari 2023 sebesar 100 % dari 36 Komitmen
14. Pemeriksaan OJK KC Solo Posisi 31 Januari 2023 sebesar 100 % dari 31 Komitmen
15. Pemeriksaan BI Lingkup Bisnis & Ops Posisi 31 Juli 2021 sebesar 100 % dari 10 Komitmen
16. Pemeriksaan BI Lingkup IT Posisi 31 Juli 2021 sebesar 100 % dari 29 Komitmen

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, Dan PPPSPM)

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di KB Bank didasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK No. 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang hal tersebut dalam sektor jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan.

KB Bank telah memiliki Departemen *Anti Money Laundering* (AML) di kantor pusat dan Unit Kerja Khusus (UKK) di setiap cabang dan/atau unit kerja terkait. Departemen AML bertanggung jawab atas penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh entitas KB Bank.

Departemen AML memiliki fungsi analisis dan pelaporan yang bertugas untuk mengawasi transaksi dan aktivitas keuangan Bank guna mendeteksi potensi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. UKK di cabang-cabang dan/atau unit kerja terkait bertindak sebagai mata rantai pertama dalam proses ini, dengan melaporkan temuan dan aktivitas mencurigakan kepada Departemen AML di Kantor Pusat untuk dilakukan analisa lebih lanjut.

Pada tahun 2023, KB Bank telah melakukan *self assessment* terhadap paparan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara *Bank Wide* dengan penilaian risiko akhir adalah *Medium*, hasil tersebut mempertimbangkan dari paparan risiko terhadap nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) dengan juga mempertimbangkan perhitungan dari *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA). KB Bank sebagai Bank Umum juga berperan sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal karena dalam prakteknya KB Bank juga menjalankan fungsi kustodian, oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan kajian dan penilaian tersendiri terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal pada Bank Kustodian. Bank KB Bukopin sebagai Bank Kustodian juga telah melakukan *self assessment* terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan melakukan metode pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada bank umum secara *Bank Wide* dengan penilaian risiko akhir adalah *Low*.

KB Bank telah berupaya melakukan kontrol dalam memaksimalkan program APU, PPT, dan PPPSPM dan berkomitmen penuh dengan menetapkan beberapa target peningkatan kualitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Namun demikian, KB Bank melihat masih rentannya Bank digunakan dalam praktek-praktek pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal karena seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan dunia usaha sehingga modus baru pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal akan terus berkembang. Oleh karena itu KB Bank terus melakukan peningkatan dalam memitigasi potensi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, salah satunya dengan melakukan peningkatan penggunaan teknologi informasi/pengembangan sistem *monitoring* transaksi, *sanction screening* serta perbaikan kebijakan-kebijakan internal agar efektif selaras dengan perkembangan regulasi.

Pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di KB Bank dilakukan oleh Departemen AML dimana berfungsi untuk melakukan aktivitas dan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban regulasi tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dengan aktivitas sebagai berikut :

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Melakukan review atas kebijakan tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM yang disesuaikan dengan ketentuan regulator terkini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
3. Melakukan *review* secara berkala terhadap pedoman yang terkait dengan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kebijakan dan prosedur.
4. Melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM Bank yang mengacu pada hasil penilaian risiko secara nasional (*National Risk Assessment*/NRA) dan sektoral (*Sectoral Risk Assessment*/SRA) terkini yang menilai berdasarkan 4 (empat) faktor, berupa Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.
5. Mengelompokkan nasabah berdasarkan profil risiko melalui pendekatan *Risk Based Approach* (RBA).

6. Melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko terkait produk, layanan, dan aktivitas baru untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
7. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan transaksi nasabah secara berkesinambungan serta sebagai *counterparty* Pihak Penyidik dan Regulator dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
8. Meningkatkan kualitas dan *monitoring* terhadap kewajiban pelaporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan.
9. Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi (*screening*) terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), *The Office of Foreign Assets Control* (OFAC) *List*, *United Nations* (UN) *List*, dan *European Union* (EU) *List*, dan lain sebagainya pada saat pembukaan rekening dan dilakukan secara berkala.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan rencana dan pemantauan realisasi terhadap target.
11. Mengembangkan AML Transaksi *Monitoring* Sistem untuk mempertajam analisa, pemantauan dan memenuhi kebutuhan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan terkini terkait APU, PPT, dan PPPSPM.
12. Peningkatan pemahaman (*awareness*) APU, PPT, dan PPPSPM untuk karyawan/ti pada seluruh cabang/*area* melalui kegiatan sosialisasi kepada karyawan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai program APU, PPT, dan PPPSPM serta mengimplementasi di unit kerjanya.

Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perdata Bank KB Bukopin Sampai Dengan Desember 2023

No	Keterangan	Data Umum	Perkara Debitur PKPU/Pailit
1	Perkara Hukum yang telah Selesai sampai dengan Desember 2023	53	12
2	Dalam Proses Penyelesaian	54	57
	2a. Perkara yang masih proses di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)	31	-
	2b. Perkara yang masih proses di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)	9	-
	2c. Perkara yang masih proses di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)	11	-
	2d. Perkara yang masih proses di Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)	3	-
	2e. Arbitrase	Nihil	Nihil
Jumlah		**161**	**69**

Permasalahan Hukum Pidana Bank KB Bukopin Sampai Dengan Desember 2023

No	Keterangan	Dalam Proses	Selesai
1	PELAPOR	11	0
2	TERLAPOR	12	5
3	SAKSI	39	1
Jumlah		**62**	**6**

Perkara Penting

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Berikut adalah perkara penting (Perkara gugatan perdata) di tahun 2023 yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak secara material terhadap Bank:

1. **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Waryono Karno**

   PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ("PT Kembang 88") adalah Ex-Debitur KB Bank Kantor Pusat dengan jaminan kredit berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Selanjutnya pada tahun 2015, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT Kibiland Agung Kencana dengan KB Bank, Roland Yahya selaku komisaris PT Kibiland Agung Kencana dan sekaligus anak dari Direktur Utama PT Kembang 88 pada saat itu (Chandra Yahya), telah menyerahkan kepada KB Bank Asset berupa Tanah seluas 88.298 M2 yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 29 November 2013 yang ditandatanganinya dengan Waryono Karno (Penggugat), sebagai penyelesaian kredit PT Kembang 88. Adapun nilai asset tanah yang telah diserahkan oleh Roland Yahya kepada KB Bank tersebut adalah sebesar nilai total kewajiban pokok milik PT Kembang 88 yang tertunggak, yaitu sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah).

   Selanjutnya Waryono Karno mengajukan laporan pidana terhadap Roland Yahya atas penipuan yang dilakukan Roland Yahya untuk mendapatkan asset tanah tersebut. Berdasarkan putusan pidana menyebutkan Roland Yahya terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap transaksi jual beli asset tanah tersebut dan dijatuhi hukuman penjara. Selanjutnya, Waryono Karno mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Roland Yahya, serta menarik KB Bank selaku Tergugat IX dalam Perkara No. 727/Pdt.G/2021/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.

   Adapun Gugatan Waryono Karno tersebut pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim untuk menetapkan Waryono Karno sebagai pemilik yang sah atas Asset Tanah dimaksud berdasarkan 136 Akta Jual Beli, menuntut pembatalan atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat antara Waryono Karno dengan Roland Yahya serta menuntut pula pembatalan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat antara Roland Yahya dengan KB Bank. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memenangkan Waryono Karno sebagai Penggugat, dimana Waryono Karno ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas Asset Tanah dimaksud dan menghukum KB Bank untuk menyerahkan 136 Asli AJB kepada Waryono Karno. Apabila KB Bank tidak dapat menyerahkan, maka Camat Serpong selaku PPAT diminta untuk menerbitkan Kembali Salinan AJB dimaksud.

   Dalam hal Waryono Karno gagal untuk memperoleh seluruh 136 Asli AJB, baik dari KB Bank maupun Salinan penerbitan ulang atas AJB dari Camat Serpong selaku PPAT, maka KB Bank Bersama dengan para Tergugat lainnya, dihukum untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp 397.329.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

   Atas Putusan Tingkat Pertama, KB Bank telah mengajukan upaya hukum Banding, yang mana atas banding yang diajukan, pada tanggal 15 September 2022, Pengadilan Tinggi Banten telah menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding yang intinya kembali memenangkan Waryono Karno dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Atas Putusan Tingkat Banding, pada tanggal 9 November 2022, KB Bank telah mengajukan Upaya hukum kasasi yang mana atas permohonan kasasi, pada tanggal 4 Oktober 2023, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Tingkat Kasasi yang intinya menguatkan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko yang besar bagi KB Bank sebagai akibat dari isi Putusan terutama adanya potensi hukuman pembayaran dalam jumlah cukup besar yang dikenakan kepada KB Bank secara tanggung renteng bersama para Tergugat lainnya, KB Bank telah berupaya keras untuk memperoleh asli 136 AJB yang dihukum untuk dikembalikan kepada Penggugat/Waryono Karno, dimana Upaya tersebut telah membuahkan hasil bahwa Sebagian besar asli AJB dimaksud telah berhasil ditemukan guna meminimalisir potensi kerugian KB Bank akibat hukuman pembayaran sebagaimana isi putusan.

2. **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PATIBRATA**

   Tahun 1986, PT Patibrata ("Debitur") mendapat fasilitas kredit untuk membiayai proyek Duta Plaza dan Villa Hadis Permai dengan total plafond Rp9.300.000.000,- (per 29 Desember 1990). Tanggal 23 Maret 1991 Debitur memperoleh tambahan fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,-.

   Jaminan kredit Debitur, diantaranya adalah 55 unit kios yang berada di Gedung Duta Niaga Nusamakmur, yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada KB Bank berdasarkan Akta No. 158 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Zamri, SH., Notaris di Padang Kredit Debitur macet, sehingga antara Bank dengan PT Patibrata telah membuat Akta-akta: (1) Akta Perjanjian Penyerahan Hak No. 30 tanggal 6 Juli 1994; (2) Akta Kesepakatan No.

80 tanggal 28 September 1998 dan (3) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 74 tanggal 23 Maret 1995, dimana berdasarkan AKta-akta tersebut, Bank telah menyewakan unit-unit kios jaminan kredit Duta Plaza kepada PT Matahari Putra Prima («PT Matahari») dimana hasil sewa tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran kewajiban kredit PT Patibrata dan sebagiannya diserahkan kepada PT Patibrata;

Sebelum masa kontrak sewa dengan PT Matahari berakhir, terjadi gempa di Padang th 2009 yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung Duta Plaza, dimana kerusakan gedung semakin diperparah dikarenakan adanya pembongkaran Salvage Claim yang ditunjuk oleh Pihak Asuransi, PT Patibrata mengajukan gugatan, diantaranya untuk menuntut klaim asuransi dan kekurangan bayar dari Bank kepada PT Patibrata.

Pada tanggal 12 Februari 2024, PT Patibrata telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap KB Bank dan PT Matahari melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang intinya mempermasalahakan:

a. Pembayaran retribusi yang dibebankan oleh KB Bank kepada PT Patibrata;
b. KB Bank tidak menarik uang sewa unit-unit tertentu kepada PT Matahari;
c. Klaim Asuransi yang telah diterima oleh PT Matahari yang diklaim sebagai haknya PT Patibrata;

Sebagai informasi, sebelumnya PT. Patibrata pernah 2 kali mengajukan gugatan kepada BANK namun gugatannya diputus PN tidak dapat diterima. Saat ini, gugatan dimaksud masih dalam tahap awal proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Koperasi Pedagang Pasar Citeureup**
Adanya permasalahan terkait tindakan pendebetan pada 19 Juni 1989 senilai Rp357.579.666 yang dilakukan oleh KB Bank (dahulu Bank Bukopin selanjutnya disebut» Bank»)) dari rekening
Koppas Citeureup ke rekening RKS (selaku Kontraktor), di mana tindakan pendebetan dimaksud baru dipermasalahkan setelah 13 tahun kemudian yaitu pada tahun 2003, di mana Koppas Citeureup mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Bank dan para pihak lainnya.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bank menang dimana Bank tidak dihukum untuk membayar, namun pada tingkat Kasasi dimana putusan Kasasi membatalkan putusan sebelumnya dan akhirnya menghukum RKS dan KB Bank untuk secara tanggung renteng: (i) mengembalikan dana Koppas Citeureup sebesar Rp357.579.666; dan (il) untuk membayar ganti rugi Rp 146.313.298,94/ bulan sejak September 2003 sampai para Tergugat melunasi kewajibannya (Bank kalah). Bahwa selanjutnya Bank mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke I namun upaya hukum dimaksud ditolak.

Selanjutnya Bank berbalik diajukan Gugatan Kepada Koppas Citeureup, RKS dan BS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingKat banding di Pengadilan Tinggi, Bank menang yang pada intinya dinyatakan bahwa tindakan pendebetan yang dilakukan Bank 1989 adalah berdasar hukum. Atas putusan tingkat Banding ini, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum (kasasi). Dasar putusan yang memenangkan Bank dijadikan sebagai dasar bagi Bank untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke II namun sayangnya PK ke II yang diajukan KB Bank diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga ditolak. (Bank Kalah). Selanjutnya Koppas Citeureup mengajukan permohonan eksekusi untuk pelaksanaan putusan, sehingga potensi resiko yang dihadapi oleh Bank sampai Desember 2022 terhitung sekitar Rp41.000.000.000,-.

Karena masih beranggapan pendebetan yang dilakukan Bank adalah sah dan berdasar dnan diduga kuat adanya itikad buruk dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan sanggahan terhadap tindakan pendebetan yang baru diajukan 14 tahun kemudian, maka pada tanggal 30 Juni 2022, Bank Kembali mengajukan Gugatan baru dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada Koppas Citeureup dengan RKS.

Bahwa pada 08 Agustus 2023, telah dijatuhkan Putusan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana KB Bank menang), dengan amar putusan pada intinya : (i) Menyatakan bahwa Transaksi Debet Kredit dilakukan oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku: (ii) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp 165.270.772.342,88 (seratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Atas Putusan Tingkat Pertama, Koppas Citeureup mengajukan Upaya hukum banding. Atas Upaya hukum Banding, pada tanggal 11 Januari 2024 telah dijatuhkan putusan Banding, dengan amar putusan pada intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding (KB Bank menang).

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024, Koppas Citeureup mengajukan permohonan kasasi namun saat ini masih menunggu Memori Kasasi dari Koppas Citeureup. Bank akan melakukan penanganan terbaik atas perkara ini pada Tingkat Kasasi untuk mempertahankan isi Putusan sebelumnya demi mempertahankan hak-hak dan kepentingan KB Bank.

4. **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Nur Kencana Lestari Inti**
Pada tanggal 21 Februari 2023 Direktur Utama PT.Nur Kencana Lestari Inti ("Debitur") mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor 191/Pdt.G/2023/PN.Jkt Selatan

("Gugatan Perdata") terhadap:PT Bank KB Bukopin Tbk ("KB Bukopin") selaku Tergugat I;PT Tunas Muda Jaya ("TMJ") selaku Turut Tergugat I; Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surabaya selaku Turut Tergugat II; Notaris Otty Chandra ("Notaris") selaku Turut Tergugat III. TMJ adalah ex Debitor KB Bank yang kemudian pada tanggal 4 November 2019 dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan No. 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Surabaya.

Kredit TMJ di KB Bank dilunasi dari penerimaan dari KPKNL Surabaya atas hasil lelang saham milik PT Anugerah Berkah Bersatu dan PT Inter Sarana Raya yang ada di TMJ, masing-masing sebanyak 2.950.200 lembar saham (total 99 % saham di TMJ) yang dibeli oleh NKLI melalui lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 1636/45/2019 tertanggal 28 November 2019 ("Risalah Lelang 28 November 2019") dimana untuk pembelian saham dimaksud, NKLI mendapatkan kredit dari KB Bank senilai Rp638.385.375.500,- (enam ratus tiga puluh delapan Miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dengan jaminan berupa:

a. Tagihan atas penjualan batubara sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh Miliar Rupiah) berdasarkan Kontrak Jual Beli Batubara antara PT. NKLI dengan PT. Belayan Internasional Coal.
b. Tagihan atas penjualan batubara sebesar Rp192.000.000.000,- (seratus sembilan puluh puluh dua Miliar Rupiah) berdasarkan Kontrak Jual Beli Batubara antara PT. NKLI dengan PT. Kasih Industri Indonesia.
c. Cadangan Batubara PT. Tunas Muda Jaya.
d. SHM No.01660 an. Virgitha Wulandari (dalam proses balik nama ke a/n Abdul Hamid Ali) yang berlokasi di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
e. Saham PT. Anugerah Berkah Bersatu dan PT. Inter Sarana Raya di PT. Tunas Muda Jaya sebesar 99% yang dibeli oleh NKLI dimaksud.

Tanggal 21 Februari 2023 NKLI mengajukan Gugatan terhadap KB Bank melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar antara lain:

a. NKLI menggugat karena sebagai Pembeli yang Sah atas 5.900.400 lembar saham milik NKLI (dengan Harga Rp638.385.375.500,-) namun akhirnya tidak dapat melakukan Perubahan Susunan Kepengurusan pada TMJ dikarenakan ada pihak yang berkeberatan dari PT ADITYA CIPTA KONTRAKTOR selaku pemegang Hak Going Concern berdasarkan Penetapan No. 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby tanggal 19 Desember 2019
b. KB Bank beritikad buruk karena tidak menginformasikan adanya Putusan PAILIT terhadap TMJ pada tanggal 4 November 2019 terkait Perkara PKPU No. 39/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dan adanya Penetapan Going Concern yang haknya dipegang PT ADITYA CIPTA KONTRAKTOR

Saat ini gugatan dimaksud masih dalam proses pemeriksaan di Tingkat Pertama di PN Jakarta Selatan. KB Bank akan melakukan Upaya penanganan terbaik atas perkara ini demi mempertahankan hak dan kepentingan bank.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Selama tahun 2023 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi Entitas Anak Perseroan

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BANK YANG SEDANG MENJABAT

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang sedang menjabat tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2023 tidak terdapat sanksi administratif yang material yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank yang diberikan oleh regulator.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

KB Bank secara konsisten berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GCG dalam setiap aspek operasionalnya. Salah satu implementasi nilai-nilai tersebut adalah melalui keterbukaan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Bank mengakui pentingnya pengelolaan dan keterbukaan informasi tentang perusahaan untuk membangun citra yang positif di mata publik, khususnya para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam upaya memastikan keterbukaan informasi yang optimal, KB Bank secara rutin menyediakan informasi aktual dan bermanfaat kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai saluran komunikasi. Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers, media cetak, media sosial, dan media elektronik. Bank senantiasa memperhatikan ketentuan terkait kerahasiaan data perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang disampaikan tetap relevan dan tepat sasaran. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki berbagai sarana yang dapat diakses di antaranya:

1. Situs web: https://www.kbbukopin.co.id;
2. *Call Center*: 14005; +6221 798 8266, 798 9837
3. *Customer Care*: customercare@kbbukopin.co.id;
4. Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Bank melalui email: investor.relations@bukopin.co.id.

SIARAN PERS

Sepanjang tahun 2023, KB Bank telah menerbitkan siaran pers sebagai berikut:

Januari-April 2023:

1. G-Pro Program January 2022
2. EMGS March 23rd2022 : CSO Resignation
3. Financial Report Q4 2021 April 1st, 2022 : Loss IDR 2,3 T
4. Financial Report Q1 2022 April 28th, 2022 : Loss IDR 1,3 T
5. Lawsuit Case at Kupang Branch 12 May 2022
6. AGMS May 25th, 2022 : CEO Resignation
7. Demonstration Issue at Surabaya Branch, June 13th, 2022
8. Financial Report Q2 2022 July 29th, 2022 : Loss IDR 3,3 T
9. EGMS August 24th, 2022 : CRO Resignation
10. EGMS November 30th, 2022
11. Financial Report Q3 2022 December 30th, 2022 : Loss IDR 2,6 T
12. 76 Branch Closure Start on May 23rd, 2022 until December 20th, 2022

Mei – Desember 2023

1. Financial report Q1 2023 – 30 Juli 2023
2. KB Bukopin›s MoU with Indika Energi Company for the development of Electric Vehicles (EV) – 11 Mei 2023
3. KB Bukopin received the highest national rating from Fitch Ratings (18 Mei 2023)
4. KB Bukopin strategies to keep customer transactions safe from cyber attacks (24 Mei 2023)
5. Directors of Bank KB Bukopin cohesively buy BBKP shares (29 Mei 2023)
6. The KB Bukopin loan remains positive amid slowing banking growth (2 November 2023)
7. KB Bukopin again gets the highest rating from Indonesian banking (idAAA) from Pefindo after the rights issue (16 Juni 2023)
8. Free! KB Bukopin customers can make transactions at ATMs anytime and anywhere (29 September 2023)
9. Holding AGMS Bank KB Bukopin shows performance growth throughout 2022 (30 Juni 2023)
10. SME loans increased. Bank KB Bukopin is optimistic about reaching the target of 30% (28 Juli 2023)
11. KB Bukopin Partnering with Paywatch will launch Upfront Salary Service for Employee in Indonesia – 17 Mei 2023
12. Further Strengthening Investment in Indonesia, KB Kookmin Bank Maintains Ownership as Controlling Shareholder in KB Bukopin Bank (BBKP) Through Right Issue – 2 Juli 2023

BULETIN DIGITAL

Perubahan strategis dalam era digitalisasi telah mempengaruhi bagaimana KB Bank melakukan komunikasi internal. Pada tahun 2023, Bank KB Bukopin mengalihkan media komunikasi internal dari format Majalah bulanan menjadi platform digital yang terintegrasi, yang dikenal sebagai Bukopin Office Communication (BOC).

Melalui BOC, karyawan KB Bank dapat mengakses informasi terkini, berita terbaru, serta berbagai materi lainnya yang relevan dengan perusahaan dan industri. Platform digital ini menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah bagi karyawan untuk terhubung dengan informasi terbaru mengenai kegiatan perusahaan, inisiatif, perkembangan, serta kesempatan dan acara internal.

Selain itu, BOC memungkinkan adanya interaksi dan keterlibatan yang lebih aktif dari karyawan, dengan fitur komentar dan umpan balik yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan, serta berbagi pengalaman dan ide.

MEDIA ELEKTRONIK

Dengan mengacu kepada aturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau Perusahaan publik, Situs Web Perseroan menyediakan informasi penting seperti Informasi mengenai Pemegang Saham, Informasi mengenai RUPS, struktur grup Perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan 5 tahun terakhir, profil Dewan Komisaris dan Direksi serta Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal.

Situs resmi Perseroan www.kbbukopin.co.id dapat diakses selama 24 jam sehari dan informasi yang disajikan senantiasa diperbaharui secara periodik agar masyarakat dan para pemangku kepentingan selalu mendapatkan berita terkini dari Bank KB Bukopin. Situs lainnya yang dapat digunakan dalam pencarian informasi mengenai KB Bank adalah Situs OJK dan Pasar Modal (www.ojk.go.id dan www.idx.co.id).

MEDIA SOSIAL

Kemutlakan perkembangan teknologi informasi saat ini membuat Perusahaan harus menyelaraskan kinerja operasional agar tidak tertinggal, media sosial menjadi sarana yang paling banyak dan mudah untuk diakses masyarakat dari seluruh lapisan, Bank KB Bukopin menyediakan informasi juga pada sejumlah aplikasi teknologi yaitu:

Facebook	@KB Bank
Twitter	@kbbank_id
Instagram	@kbbukopin
YouTube	KB Bank

MEDIA CETAK

Meskipun media elektronik saat ini sudah menjadi kemudahan dalam mencari informasi media cetak tetap dijadikan salah satu sarana penyampaian informasi Bank KB Bukopin, selain menjadi aturan regulator juga memberikan informasi kepada masyarakat di pelosok yang belum dapat memanfaatkan media elektronik. Beberapa informasi dan pengumuman Bank KB Bukopin disampaikan melalui harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Kontan dan beberapa brosur mengenai produk dan layanan Bank KB Bukopin juga dalam media cetak berupa brosur ataupun *leaflet*.

Nasabah juga dapat memperoleh informasi yang lebih rinci dengan menghubungi *contact center* KB Bank dengan No. akses 14005 selama 24 jam setiap hari atau menghubungi Kantor-kantor Cabang terdekat. Kemudahan akses informasi juga diberikan kepada investor dan calon investor, yaitu dengan menghubungi Investor *Relations* Perseroan melalui e-mail investor.relations@bukopin.co.id.

Kode Etik

Kode Etik Perseroan bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan cerminan dari nilai-nilai yang mendasari budaya dan prinsip-prinsip utama Perseroan. Sebagai bagian integral dari berbagai kebijakan dan peraturan internal, Kode Etik menjadi pedoman yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan sehari-hari bagi semua individu yang terlibat dalam operasional Perseroan.

Tidak hanya menjadi panduan untuk tindakan, Kode Etik Perseroan juga menciptakan kerangka kerja yang memberikan arahan dalam menjalankan tugas dan interaksi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan prinsip-prinsip etika yang tinggi. Dengan demikian, Kode Etik menjadi landasan bagi budaya kerja yang positif, di mana setiap individu di Perseroan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi, tanpa memandang jabatan atau posisi dalam organisasi.

Komitmen terhadap Kode Etik Perseroan dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran, dari Dewan Komisaris hingga karyawan di tingkat operasional. Hal ini menegaskan bahwa integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip yang ditekankan dalam setiap aspek kegiatan bisnis dan operasional Perseroan.

PEDOMAN KODE ETIK

Pedoman Kode Etik disusun untuk dijadikan pedoman penerapan bagi seluruh Jajaran Perusahaan, baik Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan yang bersifat mengikat tanpa memandang fungsi, pangkat atau posisi jabatan. Pedoman ini senantiasa dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan.

Pedoman Perilaku (Kode Etik) KB Bank, terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu:

Bagian I	Kepatuhan
Bagian II	Melindungi Aset Perseroan
Bagian III	Konflik Kepentingan
Bagian IV	Pemimpin sebagai Panutan
Bagian V	Hubungan dengan Nasabah, Rekanan dan Pesaing
Bagian VI	Hubungan dengan Perusahaan dan Sesama Karyawan
Bagian VII	Hubungan dengan Pemegang Saham dan Masyarakat

POKOK/INTI KODE ETIK KB BANK

Pokok-pokok isi kode etik Bank adalah:

1. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Menghindari persaingan yang tidak sehat;
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok;
5. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan;
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Perseroan;
7. Memperhitungkan dampak kerugian dari setiap kebijakan yang ditetapkan Perusahaan terhadap situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
8. Tidak menerima hadiah atau imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan tugas dan wewenang yang diemban;
9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi dan citra Perseroan;
10. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan;
11. Tidak memiliki kredit macet.

PENGUNGKAPAN KEPATUHAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite, Pekerja tetap dan pekerja kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Bank yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh segenap Insan KB Bank pada surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik Insan KB Bank sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan Kode Etik KB Bank.

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Untuk menyebarluaskan Kode Etik yang dimiliki KB Bank ini, Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa sosialisasi penyebaran Kode Etik kepada seluruh karyawan Perusahaan telah dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Situs *web* Perseroan;
2. Memorandum Internal;
3. Media Internal;
4. Meminta Pimpinan unit untuk selalu mengingatkan personilnya agar berkegiatan dengan mengindahkan kode etik.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Penerapan Kode Etik dalam seluruh lapisan Perusahaan menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kesadaran akan pentingnya Kode Etik tidak hanya terletak pada pemahaman kolektif, tetapi juga pada tanggung jawab pribadi setiap karyawan dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang tercantum dalam Kode Etik.

Keberhasilan penerapan Kode Etik tidak hanya menjadi tanggung jawab tim manajemen, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh jajaran Perseroan, dari tingkat personal hingga tingkat unit kerja. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Kode Etik, setiap insan KB Bank diharapkan mampu menjadikan prinsip-prinsip etika sebagai panduan dalam setiap kegiatan operasional, sehingga secara keseluruhan Perseroan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk tanggung jawab individu adalah dalam hal pelaporan pelanggaran Kode Etik. Perseroan menekankan pentingnya keterbukaan dan kewajiban untuk melaporkan setiap tindakan yang diduga melanggar Kode Etik, baik yang dilakukan oleh rekan kerja maupun oleh pegawai lain. Dengan memberikan dukungan dan perlindungan terhadap pelapor, Perseroan menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu untuk memberikan laporan terkait penyimpangan yang mereka ketahui.Pentingnya penerapan Kode Etik juga tercermin dalam konsistensi dan ketegasan Perseroan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.

JUMLAH PELANGGARAN PADA TAHUN 2023

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan dikategorikan sebagai pelanggaran yang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan sebagai tindakan korektif yang dilakukan oleh Perusahaan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan jenis pelanggaran serta sanksi yang diberikan Perusahaan:

Jenis Surat Sanksi	Jumlah Sanksi
Surat Peringatan 1 (SP 1)	12
Surat Peringatan 2 (SP 2)	26
Surat Peringatan 3 (SP 3)	29
Surat Teguran	10
Total	**77**

Kebijakan Anti Korupsi Dan Sosialisasinya

Tindakan korupsi merugikan negara dan swasta dengan melambatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Suap dan korupsi umumnya timbul dari kelemahan integritas individu. Bank KB Bukopin berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara jujur, beretika, dan bebas dari praktik suap dan korupsi. Ini penting untuk membangun kepercayaan dari semua pihak terlibat dalam kegiatan KB Bank.

Bank KB Bukopin menyadari pentingnya pengendalian terhadap suap dan korupsi. Oleh karena itu, Perseroan merumuskan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi sesuai dengan Surat Keputusan No. 0165 Tahun 2021. Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh karyawan Bank KB Bukopin untuk menghindari dan melawan segala bentuk praktik suap dan korupsi. Dengan langkah ini, Bank KB Bukopin memperkuat komitmennya terhadap integritas dan transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Untuk kebijakan tersebut telah dilakukan sosialisasi melalui media internal seperti Bukopin *Office Communication* (BOC) dan *email postmaster*.

Pengendalian Gratifikasi

Bank KB Bukopin menegaskan komitmennya terhadap prinsip Zero Tolerance terhadap segala bentuk praktik suap, korupsi, dan gratifikasi. Sejalan dengan itu, Bank berupaya bertindak secara professional, adil, dan berintegritas dalam setiap aspek kegiatan dan hubungan usahanya. Kesadaran akan pentingnya pengendalian terkait gratifikasi mendorong Bank untuk merumuskan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi sesuai dengan Surat Keputusan No. 0165 Tahun 2021.

Kebijakan ini tidak hanya disusun, tetapi juga disosialisasikan secara luas melalui berbagai media komunikasi internal Bank. Selain itu, pelatihan rutin diadakan untuk memastikan pemahaman dan kesadaran setiap karyawan terhadap pentingnya mematuhi kebijakan tersebut. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan kepercayaan pada Bank KB Bukopin serta memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menaati standar tinggi dalam praktik bisnisnya.

Dalam hal gratifikasi dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Seluruh Karyawan KB Bank wajib untuk menolak gratifikasi tersebut. KB Bank melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi, dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, kode etik dan Pedoman Disiplin Karyawan.

Untuk mendukung Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi sesuai dengan Surat Keputusan No. 0165 Tahun 2021, KB Bank telah memiliki kebijakan anti fraud dan kebijakan lainnya terkait dengan pengendalian gratifikasi, diantaranya yaitu Surat Keputusan No. 0382 Tahun 2020 Terkait Kode Etik PT Bank KB Bukopin Tbk.; Surat Keputusan No.0205 Tahun 2023 tentang Kebijakan *Whistleblowing* (WBS) tanggal 9 November 2023 dan Surat Keputusan No.0160 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud PT Bank KB Bukopin Tbk. Tanggal 29 September 2023.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan Perusahaan

Bank KB Bukopin telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs *web* Bank sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web OJK dan Bank;
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Bank;
3. Laporan Tahunan KB Bank yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank;
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs *web* Bank;
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan, termasuk jaringan kantor, dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs *web* Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank;
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs *web* Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen;
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Dan Obligasi Bank KB Bukopin

Selama tahun 2023, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Kebijakan internal KB Bank dengan tegas melarang keterlibatan Bank, termasuk para karyawannya, dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dan profesionalisme Bank serta para karyawannya, sehingga Bank dapat tetap fokus pada kegiatan bisnisnya tanpa adanya pengaruh politik yang dapat memengaruhi kinerja dan integritasnya.

Di sisi lain, KB Bank meyakini bahwa kegiatan sosial memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara luas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Bank aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan kegiatan sosial ini diatur dan dilaporkan secara terperinci dalam bagian khusus yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

KEBIJAKAN

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Bank mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 8/13/ PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7 Maret PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK). Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan tata cara proses persetujuan dan pelaksanaannya diatur pada Surat Edaran Direksi No. SE/023/DIR/VI/2014 tentang Addendum 1 Kebijakan dan Prosedur BMPK.

Sepanjang tahun 2023, penyediaan dan kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar (*large exposure*), dapat disampaikan sebagai berikut:

Provision of Fund for Related Party	2023 (Rp billion)	2022 (Rp billion)	*Nature of Relationship*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah-bruto	626	760	Dikendalikan/di bawah pengaruh signifikan salah satu Pemegang Saham Utama
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif	21	28	Manajemen dan Karyawan kunci
Lainnya	0	50	Dikendalikan/di bawah pengaruh signifikan salah satu Pemegang Saham Utama, dan/ atau Manajemen dan Karyawan kunci

Perlindungan Nasabah, *Anti Fraud* dan *Whistleblowing System*

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NASABAH

KB Bank meningkatkan layanan kepada nasabah dengan menerapkan kebijakan penanganan pengaduan nasabah yang terintegrasi, *online*, dan handal. Setiap pengaduan diselesaikan dengan cepat untuk melindungi hak-hak nasabah. Jika penyelesaian tidak tercapai, nasabah dapat memilih penyelesaian di luar pengadilan melalui LAPSPI, sesuai regulasi OJK No. 1/POJK.07/2014.

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

KB Bank menerapkan kebijakan keterbukaan informasi yang jujur dan transparan untuk melindungi hak-hak kreditur. Setiap kreditur diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dengan keterbukaan informasi, kreditur dan mitra usaha berhak mendapatkan informasi yang relevan sesuai kebutuhan mereka. Hak-hak kreditur diatur dalam perjanjian yang disepakati, dan Bank wajib memenuhi kewajibannya tepat waktu, serta berupaya mencegah keterlambatan atau kelalaian yang dapat merugikan kedua belah pihak.

KEBIJAKAN *CONFLICT MANAGEMENT* (TERMASUK *INSIDER TRADING*)

KB Bukopin belum memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Namun dalam mempersiapkan dokumen publikasi selama ini, informasi telah dilokalisir dengan ketat di Departemen-departemen terkait.

PENERAPAN STRATEGI *ANTI FRAUD*

KB Bank menerapkan Kebijakan Strategi *Anti Fraud* sebagai komitmen dalam mengendalikan *fraud* melalui sistem pengendalian yang efektif dan berkesinambungan. Strategi ini memerlukan alokasi sumber daya yang memadai untuk implementasi yang efektif. Tujuan utamanya adalah mencegah risiko penyimpangan, terutama risiko fraud yang dapat merugikan nasabah dan Bank, serta meningkatkan efektivitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kebijakan tersebut bertujuan tidak hanya untuk pencegahan, tetapi juga pendeteksian, investigasi, dan perbaikan sistem sebagai bagian integral dalam pengendalian fraud. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan No. 0160 Tahun 2023. Harapannya, penerapan Kebijakan Strategi Anti Fraud akan meningkatkan pengendalian internal Bank, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja bisnis dan operasional KB Bank serta memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

PENCEGAHAN

Pilar Pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

Anti *fraud Awareness*

Anti fraud Awareness adalah upaya KB Bank untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi dan berbagi pihak yang berhubungan dengan melalui seluruh fungsi pengendalian internal yang terkait secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepedulian dan budaya anti *Fraud* dengan berbagai cara, yaitu:

1. Penyusunan dan Sosialisasi *Anti Fraud Statement*
   Salah satu upaya edukasi KB Bank yang ditujukan kepada seluruh karyawan untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti *Fraud* dan agar dapat meningkatkan kewaspadaan maupun meningkatkan kesadaran atas potensi risiko *Fraud* pada setiap aktivitas kegiatan Bank serta kebijakan dan komitmen KB Bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud* (*zero tolerance*).
2. *Program Employee Awareness;*
   Program ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan publikasi/kampanye pencegahan Fraud secara internal yang berkelanjutan melalui media yang ada di Bank, misalnya:
   a. Menjalankan aktivitas pelatihan, baik secara *offline* (tatap muka), *online* maupun melalui *E-Learning* terkait materi Anti *Fraud Awareness* yang diselenggarakan bekerjasama dengan *Human Capital* dan /atau dengan unit kerja terkait.
   b. Pengenalan budaya perusahaan dan kode etik melalui *E-Learning* Induction.
   c. Kampanye Anti *Fraud Awareness* melalui media komunikasi perusahaan (*e-mail*, poster, brosur atau media elektronik) yang berisikan pesan tentang anti *Fraud*.
   d. Publikasi atas kejadian *Fraud* beserta sanksi yang diberikan kepada pelaku *Fraud*.
3. *Customer Awareness.*
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah, deposan, serta vendor dan *stakeholder* lainnya, terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud* serta untuk mendukung upaya Bank dalam rangka menegakkan budaya anti *Fraud*. Program ini diselenggarakan dalam bentuk pembuatan dan penyebarluasan poster/ brosur anti *Fraud*, penjelasan tertulis, media elektronik, dan penggunaan sarana lainnya.

Komitmen Pencegahan *Fraud*

1. Setiap karyawan, Direksi, Komisaris, dan anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris wajib memahami dan mematuhi Kode Etik dan Budaya Perusahaan serta semua peraturan yang relevan dengan pekerjaan yang bersangkutan.
2. Setiap karyawan wajib memahami dan mematuhi Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
3. Setiap karyawan, Direksi, Komisaris, dan anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan pedoman kerja yang sudah ditentukan.
4. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif berdasarkan moralitas, integritas, dan loyalitas terhadap perusahaan.
5. Menyediakan sarana/media untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pencegahan *Fraud*.
6. Membangun komunikasi aktif antara manajemen dan fungsi audit internal, kepatuhan, manajemen risiko, serta pengendalian internal terkait dalam upaya pencegahan *Fraud*.

Kegiatan Pengendalian

Mekanisme pengendalian *fraud* diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bukopin yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kaji Ulang Direksi dan Dewan Komisaris;
   Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala mengkaji ulang realisasi rencana kerja dan anggaran guna mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian laporan keuangan, dan lain-lain.
2. Kaji Ulang Operasional;
   a. Kaji ulang dilaksanakan oleh fungsi audit internal secara berkala.
   b. Mekanisme kaji ulang operasional diatur dalam pedoman tersendiri.
3. Pengendalian Sistem Informasi;
   a. Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
   b. Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan KB Bank dalam mengolah transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya *audit trail* sehingga proses audit dapat berjalan dengan efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
4. Pengendalian Aset (Fisik);
   a. Pengendalian aset dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengaman fisik terhadap asset KB Bank.
   b. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva KB Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.
5. Dokumentasi.
   a. Seluruh ketentuan, kebijakan dan prosedur didokumentasikan secara memadai.
   b. Dokumen dikaji ulang dan diperbaharui secara berkala guna menggambarkan kegiatan Operasional KB Bank secara aktual dan diinformasikan kepada Karyawan, Direksi, dan Komisaris serta anggota komite yang dibentuk Dewan Komisaris.

Pemisahan Fungsi untuk Menghindari Benturan Kepentingan

Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) bertujuan agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh Langkah kegiatan Operasional.

Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Langkah-langkah pemisahan fungsi antara lain:

1. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu yang harus dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dan atau pemisahan fungsi pengadministrasian dan penyimpanan barang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan/kekayaan atau penyalahgunaan aset KB Bank.
2. Pemisahan fungsi tidak terbatas pada kegiatan *front office* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
   a. Persetujuan atas pembelian dan atau penjualan suatu barang atau jasa.
   b. Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
   c. Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
   d. Transaksi dalam pembukuan Bank.
   e. Pemberian informasi kepada nasabah Bank.
   f. Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
   g. Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan.
   h. Independensi Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal KB Bank.

Ketentuan mengenai rotasi, mutasi, dan cuti diterapkan dalam rangka sistem pengendalian internal termasuk di dalamnya untuk mencegah dan mendeteksi *Fraud*. Untuk ketentuan mengenai mutase, rotasi dan cuti diatur dalam ketentuan tersendiri

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

1. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*.
2. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi mengelompokkan, menganalisa, mengklasifikasi mencatat/membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
3. Sistem Informasi Bank menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Hal-hal ini yang menjadi perhatian dalam menerapkan pengendalian *Fraud* terkait penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi:
   a. Ketersediaan pencatatan yang akurat dan terkini dari setiap transaksi dan kekayaan KB Bank.
   b. Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit (*audit trail*).
   c. Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general control*) maupun pengendalian terhadap aplikasi *software* dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
   d. Relevansi akurasi, ketepatan waktu, ketersediaan akses bagi pihak yang berkepentingan serta konsistensi format penyajian.
   e. Prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
5. Ketersediaan saluran komunikasi yang efektif antara supervisi dengan *subordinate* begitu pula sebaliknya, maupun lintas satuan kerja bertujuan agar seluruh pejabat/karyawan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pencegahan *Fraud*.

Know Your Employee (KYE)

1. Seluruh elemen organisasi KB Bank menerapkan prinsip "*Know Your Employee*", yaitu setiap supervisi harus mengenali secara utuh setiap bawahannya.
2. *Recruitment* karyawan dilakukan dengan sistem dan prosedur *recruitment* yang efektif (*pre recruitment screening*), yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai secara lengkap dan akurat.
3. Melakukan kontrol pasca *recruitment* termasuk sistem rotasi, mutasi, cuti wajib, promosi dengan mempertimbangkan rekam jejak karyawan.
4. Metode *pre employment screening* disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas kegiatan usaha KB Bank dengan menggunakan sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki keahlian khusus.
5. Supervisi wajib mengenali karyawannya antara lain karakter, integritas, relasi, perilaku, gaya hidup, permasalahan yang sedang dihadapi dan penempatan pada posisi yang sesuai dengan keinginan serta kemampuan.
6. Supervisi secara berkala melakukan *coaching* dan konseling terhadap *subordinate*nya dengan tujuan untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif serta motivasi kerja yang tinggi.
7. Dokumentasi dan pengkinian data karyawan, termasuk membuat database yang berisi negative list karyawan terkait kasus *Fraud*.
8. Ketentuan dan mekanisme *Know Your Employee* diatur dalam ketentuan tersendiri.

Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan KB Bank dengan cara Sebagai berikut:

1. Identifikasi kerawanan melalui kajian Risiko Operasional dan *Fraud* meliputi proses identifikasi, analisis dan menilai potensi risiko pada setiap aktivitas/produk Bank serta memberikan rekomendasi cara mitigasinya.
2. Identifikasi dilakukan melalui kajian terhadap dokumen Produk program dan layanan atau media formal lainnya yang setingkat. Dalam hal informasi yang belum mencukupi untuk memberikan kajian, maka Departemen Anti Fraud & Investigasi Khusus dapat meminta dokumen pendukung lainnya atau penjelasan melalui diskusi/rapat.

Ketentuan tentang Identifikasi Kerawanan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Deteksi

Pilar Deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank yang meliputi:

1. *Whistleblowing System* (WBS)
   a. Sebagai sarana bagi seluruh *stakeholders* untuk melaporkan tindakan pelanggaran kode etik, pedoman disiplin karyawan, dan benturan kepentingan yang dilakukan baik oleh pegawai maupun Direksi KB Bank.
   b. Saluran *Whistleblowing System* (WBS) terdiri dari; Email, Whatsapp, SMS, Surat, Tatap Muka & E-Form Website.
   c. Bank memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
   d. Kebijakan dan mekanisme pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. *Surprise Audit*
   a. *Surprise audit* merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara mendadak pada unit bisnis tertentu yang berisiko tinggi atau rawan terjadinya *Fraud*.
   b. *Surprise audit* dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
3. *Surveillance System*
   a. *Surveillance System* bertujuan memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*.
   b. Pelaksanaan *Surveillance System* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank KB tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
   c. Dilakukan dalam situasi dan kondisi dimana tujuan pengujian dan pemeriksaan hanya dapat dicapai jika pemeriksa/penguji mengetahui secara langsung/mendapatkan gambaran/informasi yang sebenarnya dan apa adanya mengenai subjek dan/atau objek audit.
   d. Adapun 3 (tiga) komponen/piranti utama pengujian dalam kegiatan *Surveillance System* adalah:
      i) Sistem Pengendalian Internal;
      ii) Manajemen Risiko;
      iii) Kepatuhan.
4. *Fraud Detection System*
   Sistem yang digunakan oleh Bank untuk memonitor transaksi, Akun, dan Jaringan yang terdapat di sitem pembayaran Bank. Monitoring dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi suatu anomali transaksi, *channel* yang dimonitor adalah Sebagai berikut:
   a. *E-Channel*,
   b. Kartu Kredit,
   c. Kartu Debit.

INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI

Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* yang mencakup:

Investigasi

Pelaksanaan investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan jumlah kerugian, tempat kejadian, pelaku, modus, serta penyebab terjadinya *fraud* dalam rangka Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Pelaporan Hasil Investigasi

Hasil investigasi akan dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, *Anti Fraud & Special Investigation Department*, Komisaris Utama, Ketua Komite Audit dan Direktur Terkait.

Pelaporan Ke Pihak Otoritas

1. Laporan Terhadap Perubahan Strategi Anti Fraud
2. Dalam hal terdapat perubahan terhadap strategi anti *Fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank wajib menyampaikan perubahan strategi anti *Fraud* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
3. Bank melaporkan penerapan Strategi Anti *Fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Bank menyampaikan Laporan *Fraud* yang berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud* yang diputuskan dalam Komite Disiplin Karyawan.
5. Adapun yang dimaksud dengan Fraud yang berdampak signifikan adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki dampak kerugian aktual ≥ Rp. 1 miliar.
   b. Menjadi perhatian publik dalam media massa dengan skala nasional.
   c. Terdapat ≥ 5 (lima) kejadian serupa dengan total ≥ Rp. 1 miliar.
6. Pelaporan Hasil investigasi akan dilaporkan kepada President Director dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, Direktur terkait, dan SKAI dan/atau Departemen *Anti Fraud* & Investigasi Khusus.

Sanksi

KB Bank memiliki kebijakan pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan *Fraud* yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan.

Keputusan pemberian sanksi terhadap pelaku *Fraud* akan diputuskan melalui Komite Disiplin Karyawan. Ketentuan terkait pemberian sanksi secara rinci diatur dalam ketentuan Peraturan Disiplin Karyawan.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut memuat Langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, yang mencakup:

Pemantauan

Pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadia-kejadian *fraud* dilakukan oleh Departemen *Anti Fraud* & Investigasi Khusus atas hasil rekomendasi penilaian/pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

Evaluasi

KB Bank memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) guna mendukung pelaksanaan evaluasi yang mencakup data dan informasi mengenai jenis fraud, tanggal terjadinya fraud, unit kerja terjadinya *fraud*, pihak yang terlibat, jabatan, kerugian dalam rupiah, tindakan KB Bank, kelemahan/penyebab terjadinya *fraud*, tindak lanjut/perbaikan, dan kronologis kejadian *fraud*.

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern.

Adapun evaluasi juga dilakukan terhadap aktivitas pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, evaluasi atas ketiga pilar tersebut dilakukan melalui *fraud overview* setiap 6 bulan sekali untuk menilai efektifitas pelaksanaannya. Hasil dari *fraud overview* akan disampaikan kepada President Director untuk perbaikan pelaksanaan strategi anti Fraud.

Tindak Lanjut

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern sehingga dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa maka KB Bank memiliki mekanisme tidak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud*.

PELANGGARAN (*FRAUD*) INTERNAL

Data Pelanggaran Internal Fraud Melebihi Rp100 Juta

Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional perseroan yang berdampak terhadap timbulnya kerugian secara finansial maupun yang tidak menimbulkan kerugian finansial secara langsung, tercermin dalam tabel berikut:

Internal Fraud dalam Periode 1	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Jumlah Fraud	0	0	9	8	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	8	8	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	0	0	1	0	0	0

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dalam menghadapi kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, KB Bank mengakui pentingnya optimalisasi peran serta dari pengurus dan karyawan dalam mengungkapkan pelanggaran. Sebagai bagian dari strategi Anti Fraud dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), KB Bank mengembangkan *Whistleblowing System* (WBS) untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan.

WBS memungkinkan pelaporan pelanggaran melalui media yang independen dan rahasia, dengan jaminan perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower*). Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) disusun untuk mengatur sistem pengelolaan pelaporan pelanggaran, berlaku bagi seluruh karyawan, Direksi, Komisaris, dan anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Implementasi WBS memperkuat komitmen KB Bank dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Kebijakan mengenai WBS diatur dalam Surat Keputusan No. 0205 Tahun 2023 tentang Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS).

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Mekanisme

1. Mekanisme penyampaian pengaduan oleh Pelapor dapat melalui media WBS. Pengaduan yang dilaporkan oleh Pelapor harus dapat dipertanggungjawabkan, harus didasari dengan asas itikad, bukan untuk kepentingan pribadi atau balas dendam dan bukan merupakan fitnah.
2. *Anti Fraud & Special Investigation Department* menerima laporan pengaduan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Komisaris serta anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
3. Proses pelaporan pengaduan *Whistleblowing System* KB Bank dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
   a. Apabila laporan pengaduan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh seluruh karyawan *Level Staff* s.d Division Head atau jabatan lainnya dibawah Direksi), Direksi, Dewan Komisaris, dan Anggota Komite maka laporan pengaduan akan disampaikan kepada President Director;
   b. Apabila laporan pengaduan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh President Director, maka laporan pengaduan akan disampaikan kepada Komisaris Utama;
4. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka pelapor dapat melaporkan indikasi kecurangan/*fraud* melalui saluran penyingkapan/pengaduan yang telah tersedia dalam waktu 2×24 jam sejak diketahuinya indikasi kecurangan/*fraud*.
5. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor yang sekurang-kurangnya memuat informasi antara lain:
   a. Nama pelapor atau informasi anonim;
   b. Nomor telepon dan alamat *email* yang dapat dihubungi.
6. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur 4W1H antara lain:
   a. *What*: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui;
   b. *Where*: Di mana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan;
   c. *When*: Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan;
   d. *Who*: Siapa saja yang telibat dalam perbuatan pelanggaran hukum tersebut;
   e. *How*: Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan.
7. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
   a. *Fraud*,
   b. Pelanggaran selain *fraud*,
   c. Usulan perbaikan,
   d. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,
   e. Keluhan nasabah,
   f. Hal-hal lain diluar yang telah disebutkan di atas yang dapat disamakan dengan itu.
8. *Anti Fraud* & Special Investigation Department sebagai pengelola WBS secara periodik atau minimal 6 bulan sekali membuat laporan kepada President Director atas tindak lanjut pelaksanaan WBS, antara lain meliputi:
   a. Jumlah pengaduan;
   b. Kategori pengaduan;
   c. Saluran yang digunakan oleh pelapor;
   d. Penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti.
9. Komisaris dan Board of Directors memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh laporan WBS yang masuk

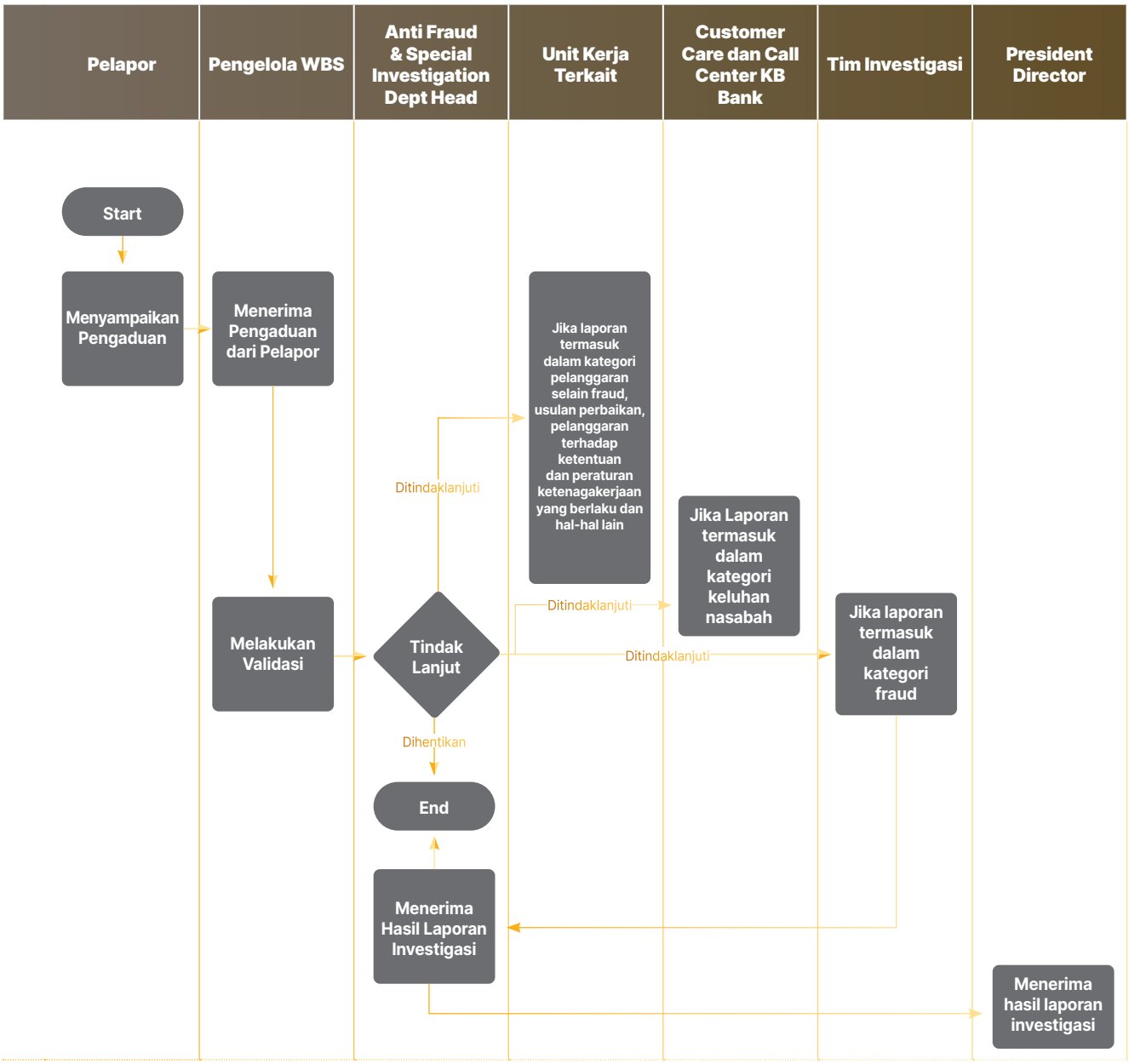
Penanganan Pengaduan

1. Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada KB Bank melalui sarana/media sebagai berikut:

Email	pedulibukopin@kbbank.co.id
Tatap muka	Menyampaikan pengaduan kepada Anti Fraud & Special Investigation Department
Aplikasi Whatsapp	08119714005
SMS	08119714005
Surat	Ditujukan kepada Anti Fraud & Special Investigation, Gedung KB Bank Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
E-Form Website	http://bit.ly/PortalWBSKBBank

2. Pengelola WBS menerima pengaduan, mencatat, dan mendokumentasikan seluruh informasi tersebut. Adapun dokumen yang harus di buat adalah sebagai berikut:
   a. Berita acara pengaduan *Whistleblowing System* (WBS);
   b. Catatan/rekap pengaduan yang masuk sesuai kategori lingkup pengaduan.
3. Pengelola WBS segera melaporkan pengaduan kepada *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* dan diikuti dengan analisa terhadap pengaduan berdasarkan bukti dan dokumen pendukung serta memberikan rekomendasi apakah pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak.
4. Pengaduan yang masuk melalui media WBS wajib disampaikan kepada *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* dan diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan (investigasi)/diteruskan kepada unit kerja terkait atau tidak dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
5. *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* memutuskan untuk memproses laporan pengaduan berdasarkan pertimbangan melalui informasi yang masuk melalui media WBS. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:
   a. Dihentikan, karena informasi dan dokumen pendukung yang tidak lengkap;
   b. Ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* dengan menginformasikan kepada:
      i) Unit Kerja Terkait (Jika laporan WBS termasuk dalam kategori pelanggaran selain *fraud*, usulan perbaikan, pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dan hal-hal lain diluar yang telah disebutkan di atas yang dapat disamakan dengan itu).
      ii) Pengaduan yang masuk terkait informasi serta keluhan nasabah atas layanan produk dan jasa (termasuk jaringan kantor dan ATM) diarahkan untuk menyampaikan pengaduan kepada *Email Customer Care* dan *Call Center* KB Bank.
      iii) Tim Investigasi untuk melakukan investigasi (Jika laporan WBS termasuk dalam kategori *fraud*).
6. Hasil investigasi dituangkan dalam bentuk laporan investigasi dan disampaikan kepada President Director dan ditembuskan kepada Direktur Terkait dan Dewan Komisaris.
7. Hasil pemeriksaan dan seluruh dokumen WBS didokumentasikan oleh *Anti Fraud & Special Investigation Department* dan dikategorikan sebagai dokumen rahasia.
8. Pengelolaan sarana/media WBS menerapkan prinsip *dual control* dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Anti *Fraud & Special Investigation Department Head*.
9. Pemeliharaan Dokumen
   a. *Anti Fraud* & Special Investigation Department bertindak sebagai pemelihara dokumen dan bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen sesuai dengan Kebijakan/ Prosedur terkait arsip.
   b. Kaji ulang atas Kebijakan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank.

BAGAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN



Perlindungan Bagi Pelapor

1. KB Bank akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan kepada pihak manapun serta laporan yang disampaikan bukan berupa fitnah.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud diatas meliputi segala perlindungan hukum, fisik dan kejiwaan apabila pelapor mengalami ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan manapun.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi tim investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan.

Jenis Laporan yang Dapat Dilaporkan

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti melalui WBS meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Perbuatan *Fraud*
   Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/ atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Segala bentuk pelanggaran selain *fraud* dengan contoh tindakan antara lain:
   a. Membuka rahasia Bank untuk kepentingan pribadi,
   b. Pelecehan seksual dan perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank,
   c. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang,

d. Benturan kepentingan,
e. Norma dan Etika (*Code of Conduct*),
f. Pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku,
g. Tindakan melanggar hukum pidana maupun perdata ataupun peraturan perundang - undangan lainnya,
h. Tindakan membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan bank, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah.

3. Usulan Perbaikan
   Memberikan usulan kepada Bank atas celah yang terdapat pada prosedur, usulan atas perbaikan sistem ataupun usulan lainnya.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
5. Keluhan Nasabah
   Keluhan nasabah atas layanan produk, jasa (termasuk jaringan kantor dan ATM) ataupun keluhan lainnya.
6. Hal-hal lain diluar yang telah disebutkan di atas yang dapat disamakan dengan itu.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Anti Fraud & Special Investigation Department dan setiap Unit Kerja Terkait senantiasa melakukan sosialisasi tentang Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System* dalam setiap kesempatan sesuai dengan kapasitasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Anti Fraud & Special Investigation Department secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan KB Bank. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi kejahatan finansial. Tindakan ini tercermin dari upaya Anti Fraud & Special Investigation Department dalam menyelenggarakan program sosialisasi kepada karyawan, dengan menyampaikan informasi tentang berbagai aktivitas *fraud*. Anti Fraud & Special Investigation Department juga memanfaatkan media internal seperti Bukopin *Office Communication* (BOC) dan email postmaster untuk menyebarkan edukasi tentang aktivitas *fraud*. Melalui pendekatan ini, KB Bank berupaya untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengidentifikasi dan mencegah potensi *fraud* dalam lingkungan kerja.

Jumlah Pengaduan

Pelaksanaan kebijakan *Whistleblower* sebagai salah satu cara pengungkapan/penyingkapan kecurangan yang terjadi. Sepanjang tahun 2023, terdapat 18 (delapan belas) informasi yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*, dengan rincian dalam tabel berikut:

	Email	Fax	SMS	WhatsApp	Kotak Surat	Lainnya (Telepon/ Informasi Lain)
Jumlah WBS yang masuk sepanjang Tahun 2023	6	-	-	12	-	-

Adapun proses tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Laporan Internal WBS	2023
Total Laporan	18
Telah Diselesaikan	15
Terbukti	2
Tidak Terbukti	0
Bersifat Informasi/Keluhan	13
Data Tidak Lengkap dan Pelapor tidak Memberikan Informasi/Data Tambahan yang Diminta	0
Dalam Proses Penyelesaian	3

Transparansi Praktik

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di KB Bank terus ditingkatkan setiap tahun dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan. Perusahaan menyadari bahwa praktik-praktik yang tidak baik dalam tata kelola perusahaan dapat mengganggu sistem GCG yang telah dibangun. Oleh karena itu, KB Bank tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan kebijakan terkait GCG.

Beberapa prinsip GCG yang ditekankan oleh KB Bank antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. KB Bank menegaskan komitmennya untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Hal ini tercermin dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Laporan atas Kegiatan Perusahaan yang Mencemari Lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5	Kasus Terkait Buruh dan Karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital	Nihil

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Seluruh manajemen dan karyawan KB Bank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Manajemen dan karyawan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil serta berkesinambungan guna mencapai tujuan usaha KB Bank.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* KB Bank Tahun 2023

HASIL PENILAIAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian Penerapan Tata Kelola KB Bank Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Penerapan Tata Kelola KB Bank Tahun 2023 berada pada **Peringkat 2 (dua)** dengan kategori **"BAIK"**.

Mengacu hasil analisa terhadap 3 (tiga) Aspek *Self Assessment* Tata Kelola KB Bank Tahun 2023, maka dalam laporan ini disampaikan kekuatan dan kelemahan dari masing aspek *Self Assessment* Tata Kelola KB Bank serta rencana tindak lanjut penerapan Tata Kelola, sebagai berikut:

Kekuatan Penerapan Tata Kelola

1. **Governance Structure**
   a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha serta memperhatikan latar belakang pengalaman, pendidikan serta pelatihan untuk memenuhi persyaratan, integritas, kompetensi, independensi dan reputasi keuangan yang memadai untuk mendukung kinerja Bank.
   b. Bank telah mengupayakan percepatan pengajuan *Fit & Proper test* ke OJK, sehingga sampai dengan posisi Desember 2023.
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper* test, dan
   d. Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper test*.
   e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pemenuhan prinsip-prinsip GCG telah memadai. Hal ini tercermin dari kelengkapan struktur berupa perangkat Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Quality Assurance,* dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Masing-masing satuan kerja tersebut memiliki komposisi, kompetensi, dan kriteria yang memadai sehingga mampu bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   f. Memiliki komite–komite untuk mendukung kinerja Direksi, yaitu antara lain: Komite Manajemen Risiko, Komite Support Manajemen Risiko, Komite *Asset dan Liabilities*, Komite Kredit, Komite Remedial, Komite Pengarah TI, Komite Support TI, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Pengendalian Internal dan Anti Fraud, Komite Disiplin Karyawan (KDK), Komite Human Capital dan Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
   g. Memiliki komite-komite yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.Terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan Komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Bank serta pelaksanaan tugas komite dilengkapi dengan kebijakan dan pedoman tata tertib kerja (*charter*).
   h. Peningkatan pemahaman terhadap regulasi melalui *E Learning Human Capital Morning Quiz* yang diikuti oleh seluruh karyawan secara berkala dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
   i. Direksi dan Dewan Komisaris telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar dengan cukup baik. Penyampaian Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan realisasi pencapaian terhadap Rencana Strategis Bank dan melaporkannya kepada OJK.
   j. Bank memiliki sistem informasi penunjang aktivitas bisnis dan kegiatan operasional serta untuk mendukung proses pelaksanaan pengendalian internal. Bank berkomitmen untuk selalu melakukan pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan tantangan bisnis. Sistem informasi yang sudah berjalan antara lain adalah Sistem *E-Flow*, Sistem Informasi Keuangan Mikro (SIKM), *BukiSys* (AS400), *Risk Control Self Assessment* (RCSA), go-AML, *Silverlake*, *SME Credit Tools* (SCT), dan *Loan Origination System* (LOS), *Sanction Screening*, *Anti Money Laundering (AML) Monitoring System,* dan *Enysis*.
   k. Mengembangkan dan memperkuat struktur organisasi untuk memitigasi risiko reputasi dan pengelolaan media *handling* dengan dibentuknya Departemen Hubungan Perusahaan. Selain itu juga dibentuk unit untuk melaksanakan dan memantau ketentuan terkait perlindungan konsumen yaitu unit kerja perlindungan Konsumen di bawah Divisi Compliance & Quality Assurance.
   l. Telah dilakukan Inisiatif pengkinian kebijakan atas kebijakan-kebijakan yang ada, saat ini Bank dalam tahap mapping seluruh kebijakan, identifikasi pemilik kebijakan, pemisahan kebijakan yang masih berlaku dan tidak berlaku dan pada akhir semester II tahun 2023 pada tahap monitoring pengkinian dari masing-masing *policy owner*.

m. Selama semester II tahun 2023 telah dilakukan pengkinian dan pembuat kebijakan baru sebanyak 51 (lima puluh Satu) Kebijakan dan untuk peningkatan tata kelola pengambilan keputusan kredit telah dibuat beberapa kebijakan antara lain:
   i) Surat Edaran No. SE/068/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Penyaluran Kredit Lingkungan Hidup dan Sosial PT Bank KB Bukopin Tbk.
   ii) MEMO No. 080/MEMO-DIDB/VIII/2023 tentang Pedoman Special Pricing untuk Kredit SME
   iii) Surat Edaran No. SE/067/DRS/VII/2023 tentang Program Produk Perkreditan Konsumer Khusus Mortgage
   iv) Surat Edaran No. SE/077/DIR/VIII/2023 tentang Pedoman Proses Persetujuan Kredit Wholesale dan SME
   v) Surat Keputusan No. 0153 Tahun 2023 tentang Addendum V Atas Kebijakan Perlakuan Khusus Untuk Debitur akibat Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
   vi) Surat Edaran No. SE/085/DRS/IX/2023 tentang Produk Program KPR Ekspress Take Over Dan Top Up Dari Take Over (Perpanjangan)
   vii) Surat Keputusan No. 0206 Tahun 2023 tentang Kebijakan Kelembagaan dan Kewenangan Komite Kredit PT Bank KB Bukopin Tbk
   viii) MEMO No. 120/Memo-DIDB/XI/2023 Pedoman Special Pricing untuk Kredit SME.
   ix) Surat Keputusan No.0153 tahun 2023 Adendum V atas Kebijakan Perlakuan Khusus untuk Debitur Akibat Dampak Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).

n. Mengembangkan *Group* Teknologi Informasi yang dibagi menjadi empat fungsi utama yaitu Divisi IT Planning & Operation, IT Development, IT Security dan Digital. Sebagai salah satu upaya untuk memiliki keunggulan kompetitif khususnya aspek TI sehingga dapat secara langsung turut serta dalam mengakselerasi pencapaian target kinerja Bank, dan fungsi ciber security yang independent terhadap IT Plan dan IT Operasional.

o. Tajuk Strategis agenda Bank di tahun 2023 adalah "BISA" yang memiliki makna Bank ingin mencapai kemajuan bersama melalui perubahan mendasar dengan fokus 4 pilar utama yaitu *Boost Sales Performance, Innovation for Turnaround, Strengthening the Quality of Assets, Advanced IT & Digital*. Dengan empat hal tersebut, bisnis Bank dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus pada *Good Bank* yang didukung oleh perbaikan IT infrastruktur dan *digital innovation*

2. Governance Process

a. Direksi melaksanakan proses tata kelola sesuai dengan prinsip GCG dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya, yaitu diantaranya:
   i) Menerapkan prinsip GCG berupa *Transparancy, Accountability*, *Responsibility, Independency* dan *Fairness*.
   ii) Mengambil keputusan yang bersifat strategis berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.
   iii) Menyelenggarakan beberapa rapat baik bersama-sama dengan Dewan Komisaris, Komite – Komite di bawah Direksi, maupun dengan unit kerja terkait untuk membahas isu – isu strategis dan mencari solusi langkah perbaikan.
   iv) Telah menyusun action plan Bank yang diminta oleh OJK dan telah dibuat laporan atas realisasi action plan ke OJK.
   v) Menyusun Laporan Realisasi Bisnis Bank Triwulan secara komprehensif dan disampaikan tepat waktu.
   vi) Melakukan penjualan *Bad Asset* dan NPL melalui beberapa skema dengan terlebih dahulu dilakukan kajian hukum, baik dari internal Bank maupun eksternal untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul kemudian hari.
   vii) Melakukan serangkaian *stress test* sebagai langkah antisipatif Bank terhadap kondisi kedepan antara lain: akan berakhirnya restrukturisasi Covid dan dampaknya terhadap rasio- rasio likuiditas dan permodalan Bank, kenaikan GWM dan simulasi penarikan DPK, melakukan perhitungan NSFR maupun LCR secara berkala.
   viii) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan SKAI, Audit Eksternal, dan pengawasan otoritas yang berwenang, termasuk dengan menyusun *action plan* untuk pencegahan dan penyelesaian permasalahan *non compliance event*.
   ix) Mendukung penguatan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan budaya kepatuhan yang lebih baik, dengan mengesahkan beberapa kebijakan antara lain:
      - Kebijakan *Clean Desk*.
      - Tata Tertib Pemakaian Busana dan Penampilan Kerja.
      - Kebijakan Peraturan Disiplin Karyawan (PDK)
      - Kebijakan Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
      - Kebijakan Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi.
      - Kode Etik PT Bank KB Bukopin Tbk
      - Kebijakan Komite Pengendalian Internal.
      - Kebijakan No 001 Tahun 2023 Kebijakan Tentang Hierarki & Tata Kelola Ketentuan Internal PT Bank KB Bukopin Tbk
      - Pedoman No 002 Tahun 2023 Pedoman tentang Mekanisme Internalisasi Peraturan Eksternal Bank
   x) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya berdasarkan rekomendasi dari Regulator dan arahan/ nasehat Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank melakukan penguatan dalam fungsi kepatuhan dengan melakukan berbagai upaya untuk penurunan denda regulator dan pemenuhan komitmen ke regulator, yaitu; melalui kunjungan ke cabang baik oleh Direksi maupun oleh Compliance & QA Division, melakukan *focus group discussion* oleh Departemen Kepatuhan, Departemen Quality Assurance, dan SKAI, serta melakukan monitoring pemenuhan komitmen, monitoring laporan dan denda oleh Departemen Kepatuhan.
c. Bank melakukan koordinasi dengan Bank KB Bukopin Syariah maupun KB Bukopin Finance dalam rangka penguatan tata kelola dengan anak perusahaan untuk memastikan tingkat kepatuhan kepada ketentuan dan tindak lanjut temuan audit dipantau dengan baik pada anak perusahaan.
d. Melakukan penyesuaian ATMR kredit sesuai dengan SEOJK no 24/SEOJK.03/2021 dan ATMR operasional sesuai dengan SEOJK no 6/SEOJK.03/2020.
e. Melakukan pelaksanaan aktivitas *credit examination* baik secara regular di beberapa cabang maupun atas *special credit examination*.
f. Dewan Komisaris telah melaksanakan proses pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu diantara nya:
   i) Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja keuangan secara berkala.
   ii) Melakukan pembahasan kebijakan strategis Bank.
   iii) Memastikan tindak lanjut atas temuan SKAI, tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan audit eksternal, hasil pengawasan otoritas yang berwenang dan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen Direksi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
g. Seluruh Komite yang menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertindak secara independen, yaitu dengan:
   i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan analisa yang memadai.
   ii) Koordinasi antara Komite dibawah Dewan Komisaris dengan SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan baik, hal ini tercermin dengan adanya pembahasan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi hasil temuan SKAI, penerapan Manajemen Risiko dan *monitoring* pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen atas hasil pemeriksaan OJK dan Bank Indonesia.
   iii) Telah berjalan ketegasan sanksi atas pelanggaran untuk menciptakan Budaya kepatuhan

3. Governance Outcome

a. Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah melaksanakan tugasnya dan mengadakan Rapat baik secara tersendiri maupun gabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengadministrasikan setiap dokumen notulen Rapat tersebut.
b. Bank melaporkan Laporan Hasil Penggunaan Dana periode Juni dan Desember atas aksi penambahan modal melalui Right Issue pada 31 Mei 2023.
c. Sampai dengan Desember 2023, Bank telah merealisasikan penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas VII sebesar Rp7.360.398.493.456 dengan rincian sebagai berikut:
   i) tambahan investasi kepada KB Bukopin Finance Rp. 592.000.000.000;
   ii) tambahan investasi kepada KB Bukopin Syariah Rp. 680.000.000.000;
   iii) ekspansi kredit baru berkualitas baik fase I Rp. 538.983.645.870;
   iv) ekspansi kredit baru berkualitas baik fase II Rp. 5.549.414.847.586;
   v) biaya penawaran umum Rp. 60.661.014.127.
d. Berdasarkan data DPD posisi akhir Desember 2023, Debitur yang memiliki *Day Past Due* lebih dari 1 hari untuk debitur *Wholesale* tidak ada, sedangkan untuk debitur SME yang *droping* tahun 2021 sebesar 1.89%, tahun 2022 sebesar 5.42% dan tahun 2023 sebesar 1.02%.
e. Rasio fundamental keuangan bank masih terjaga dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f. Bank mendapatkan peringkat idAAA dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat kredit, Pefindo. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank memiliki kehandalan dari sisi kekuatan finansial, stabilitas, dan berbagai keunggulan lainnya.
g. Bank mendapatkan peringkat Rating AAA(idn) dari Fitch Rating.
h. Persiapan bank untuk menjadi "*Next Level Banking*" salah satunya dengan SHINE *Project* telah menyelesaikan beberapa aktivitas sebagai berikut:
   i) Implementasi Dedicated Line di DC, DRC, dan 176 cabang Indonesia
   ii) Implementasi SDWAN di seluruh 176 cabang Indonesia
   iii) Implementasi sistem budget/expense
   iv) Implementasi KBStar M10
   v) Pengembangan Silverlake untuk kartu kredit
   vi) Telah melaksanakan perizinan PAB Aplikasi KBStar
i. Bank telah berhasil meluncurkan KB Star pada tanggal 22 September yang merupakan Platform Digital Banking, untuk mendukung *cardless withdrawal, branchless banking, One Stop Service* dan layanan digital lainnya, meningkatkan value proposition dan peluang baru bagi Bank terhadap perubahan pola transaksi nasabah yang sudah mengarah ke digital.
j. Bank mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dari Business News Indonesia, yaitu:
   i) The Best GRC For IT/Digital Transformation 2023 Category - Banking Industries
   ii) The Best CEO For GRC Excellence 2023
   iii) The Best GRC For Corporate Governance & compliance 2023
k. Bank mendapatkan penghargaan dari Indonesian Institute for Corporate Directorship yaitu, Top 50 *Mid Capitalization* (*Mid Cap*) *Public Listed Company*.
l. Bank mendapat penghargaan dari Indonesia Top Banking CEO Award 2023 yaitu TOP 10 Banking CEO 2023
m. Bank mendapat penghargaan dari infobank yaitu *Top* 100 CEO 2023

n. Bank secara berkelanjutan terus membangun *compliance culture*, *risk culture* melalui penguatan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, Fungsi Audit Internal dan *Quality Assurance* pada semua tingkatan organisasi termasuk pemenuhan dan tindak lanjut temuan pemeriksa intern maupun ekstern serta otoritas pengawas lainnya.
o. Bank telah melaksanakan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku serta menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, dan jelas baik melalui situs *website* KB Bank dan/atau media cetak.
p. Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Anti Fraud telah melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan yang dilaksanakan secara independen dan berkesinambungan sesuai dengan rencana kerja audit tahunan/*risk based audit* dan rencana strategi *Anti Fraud* yang ditetapkan.
q. Audit Eksternal telah bertindak objektif dalam melakukan audit sehingga hasil audit yang disampaikan kepada Manajemen telah menggambarkan permasalahan KB Bank yang akan ditindaklanjuti oleh Manajemen KB Bank. Penyampaian hasil audit eksternal tersebut disampaikan secara tepat waktu kepada OJK.
r. Melakukan perbaikan bisnis proses yang berkelanjutan yaitu salah satunya dengan mengatur proses persetujuan kredit melalui keputusan Komite. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi yang terlibat pada aktivitas perkreditan Bank dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan fraud yang dilakukan oleh Karyawan.
s. Bank menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan komitmen sampai dengan posisi 31 Desember 2023, dengan pencapaian berdasarkan hasil *assessment* Bank sebagai berikut:
    i) Pemeriksaan oleh OJK Tahun 2023 di Kantor Pusat dengan komitmen yang harus ditindaklanjuti sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 266 komitmen dan telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan pencapaian tindak lanjut posisi akhir Desember 2023 sebesar 100%.
    ii) Pemeriksaan oleh Bank Indonesia Tahun 2021 dengan Ruang Lingkup Teknologi yang harus ditindaklanjuti sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 29 komitmen dan telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan pencapaian tindak lanjut posisi akhir Desember 2023 sebesar 100%.
t. Atas pemenuhan tindak lanjut yang telah disampaikan oleh Bank kepada OJK, selanjutnya OJK melakukan evaluasi dan dari hasil evaluasi OJK terdapat tambahan dokumen atas 57 komitmen yang masih harus ditindaklanjuti dan Bank telah menindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut :
    i) Sebanyak 42 komitmen ditindaklanjuti pada bulan Desember 2023 dan telah dipenuhi 100%; dan
    ii) Sebanyak 12 komitmen ditindaklanjuti pada bulan Januari 2024 dan sebanyak 3 komitmen ditindaklanjuti pada bulan Maret 2024.
u. Bank memenuhi permintaan data dari OJK dalam rangka pengawasan yang dilakukan secara harian.
v. Bank telah melakukan realisasi penyertaan permodalan kepada anak Perusahaan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII.
w. Bank melakukan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan konsumen serta melaporkan secara berkala mengenai pengaduan konsumen kepada OJK.

Kelemahan Penerapan Tata Kelola

1. Governance Structure

Masih diperlukan revamping dan penyempurnaan beberapa kebijakan terutama dalam pengelolaan risiko kredit antara lain Kebijakan Restruktur Covid, Kebijakan penanganan Kredit bermasalah, Kebijakan Hapus Buku dan AYDA, kebijakan Devisa Hasil Ekspor, Kebijakan pada aktivitas Sumber Daya Manusia antara lain, kebijakan TKA, Kebijakan Kode Etik Bank.

Identifikasi permasalahan/*Root cause* adalah:
a. Kebijakan terkait pengelolaan risiko kredit masih terdapat beberapa yang belum ada petunjuk pelaksanaanya.
b. Belum optimalnya pengelolaan SDM terutama terkait Tenaga Kerja Asing, serta atas kebijakan Kode Etik Bank masih memerlukan pengkinian

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perbaikan Bank telah melakukan:
a. *Revamp* dan adendum Kebijakan terkait pengelolaan risiko kredit, serta penegasan berupa pembuatan petunjuk teknis terkait pengelolaan risiko kredit.
b. *Revamp* atas Kode Etik Bank dan telah disosialisasikan kepada seluruh Organisasi Bank.

2. Governance Process

a. Perlu ditingkatkan pemenuhan komitmen Bank kepada Regulator antara lain ketepatan dan kecepatan yang memerlukan Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Masih terdapat temuan berulang dalam aktivitas operasional maupun proses bisnis dari pemeriksaan OJK, SKAI dan hasil observasi QA.
c. Masih terdapat kesalahan/dilakukannya koreksi dalam pengisian laporan kepada OJK antara lain pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan APOLO. Serta keterlambatan dalam merespon secara cepat surat mengenai *action plan* dari OJK.
d. Diperlukan peningkatan pengelolaan open item, *proofsheet* dan pos-pos pada rupa-rupa aktiva

Identifikasi permasalahan/*Root cause* adalah:
a. Pedoman sebagai petunjuk teknis untuk pemenuhan permintaan data dan informasi dari regulator perlu disempurnakan agar memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.
b. Diperlukan penguatan fungsi supervisi pada seluruh aktivitas operasional Bank.
c. Terdapat *human error*, proses *manual*, dan peningkatan supervisi.
d. Kurangnya monitoring secara ketat oleh RTU dan/atau supervisi atas akun-akun tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perbaikan Bank telah melakukan:
a. Pedoman pemenuhan permintaan data dan informasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan telah dibuat dan disosialisasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dapat dipahami. Telah adanya komitmen Direksi melalui BOD *meeting* untuk memenuhi seluruh komitmen Bank kepada Regulator.
b. Adanya sosialisasi atas temuan-temuan dari Regulator, SKAI dan QA untuk menjadi *lesson learned*.
c. Telah dimasukkan *request changes* untuk beberapa pelaporan dalam pengembangan SHINE *project*.
d. Telah dilakukan *action plan* untuk melakukan *mapping* dan penyelesaian (Departemen *Finance* dan Manajemen Aset)

3. Governance Outcome
a. Terdapat beberapa target strategis Bank yang masih belum tercapai, antara lain:
   i) Peningkatan Aset
   ii) Peningkatan *Good Bank*
   iii) Penurunan *Bad Bank*
   iv) Laba rugi
b. Masih terdapat denda-denda sebagai akibat kurang tepat dan akuratnya atas pelaporan kepada regulator.
c. Masih terdapat temuan *fraud* berdasarkan hasil audit internal atas kejadian yang dilakukan dimasa lampau.

Identifikasi permasalahannya/*Root Cause* adalah:
a. Perlu evaluasi pelaksanaan dan perbaikan serta penyempurnaan strategi dan proses bisnis untuk menjamin kinerja Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
b. Perlu peningkatan dalam kualitas manajemen informasi dan sistem Bank serta *monitoring* oleh supervisi.
c. Masih diperlukan peningkatan/awareness kepatuhan Bank di seluruh jajaran organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perbaikan Bank akan melakukan:
a. Pembuatan Rencana Bisnis Bank baru tahun 2024 yang dikirim ke OJK, dan adanya *action plan* yang baik atas penyelesaian *Bad* Bank ke OJK.
b. Memastikan data dan pelaporan pada pengembangan SHINE terorganisir dengan sesuai target, *monitoring* dan melakukan *reminder* oleh Departemen Kepatuhan ke masing-masing RTU untuk pemenuhan komitmen.
c. Menetapkan strategi untuk peningkatan program budaya perusahaan berbasis risiko dan kepatuhan untuk mendorong peningkatan kinerja, serta penegasan sanksi kepada pelaku *fraud*.


KB Bank



7

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

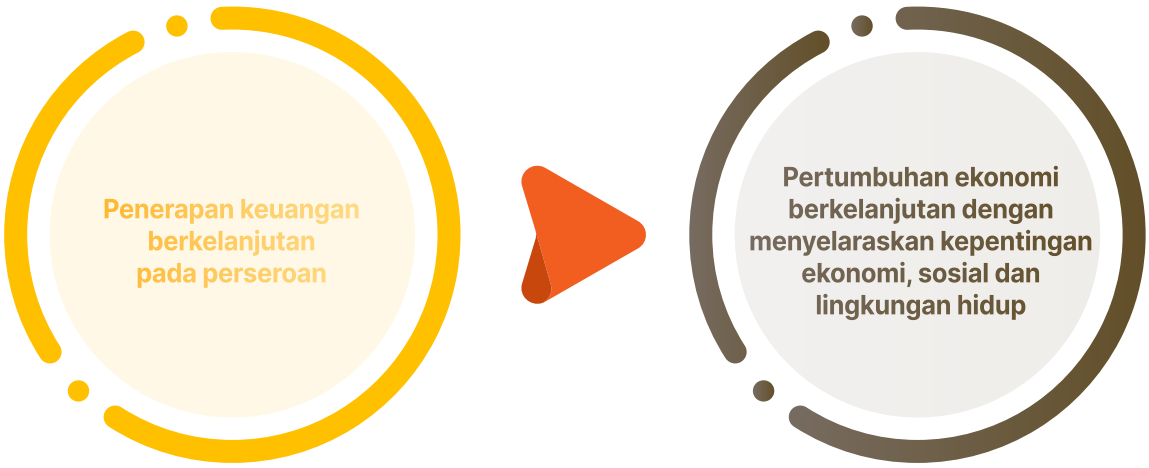
Bank KB Bukopin berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diimplementasikan dengan pendekatan terukur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Komitmen ini sepenuhnya sejalan dengan misi perusahaan, terutama dalam memberikan manfaat optimal bagi pemegang saham, karyawan, masyarakat global, dan keselarasan dengan prinsip kepedulian terhadap lingkungan. Bank KB Bukopin juga pendukung terwujudnya resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa pada 21 Oktober 2015 lalu telah menerbitkan resolusi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

Komitmen dan aktivitas TJSL Bank pada intinya merujuk pada aspek-aspek *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Responsibility*. Kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan-peraturan terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi indikator dalam mengukur kinerja Program TJSL Bank. Adapun Pelaksanaan program TJSL Bank KB Bukopin juga merupakan bentuk dukungan Bank terhadap, antara lain:

1. Pemerintah Indonesia yang telah menandatangani Paris *Agreement*, yakni perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja;
2. Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), adaptasi dan keuangan. Melalui Paris *Agreement*, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pengurangan laku perubahan iklim dan mencegah pemanasan global. Implementasi ini harus dilakukan bersama-sama di seluruh dunia dengan memastikan pelaksanaan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca (GRK) dan memberikan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK terkait literasi dan edukasi serta inklusi keuangan bagi masyarakat;
4. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 November 2016;
5. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Komitmen untuk menjalankan kegiatan TJSL yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

Bank KB Bukopin menyadari bahwa Bank memiliki kewajiban moral untuk memberikan manfaat, termasuk memperbesar akses bagi masyarakat guna mencapai kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, Bank KB Bukopin berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program TJSL untuk terus menjalankan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan manfaat yang dapat diberikan.

Bank KB Bukopin telah merumuskan *Sustainability Banking Principles* yaitu seluruh prinsip pengelolaan aktivitas Perseroan dalam aspek-aspek: *customer*, *business strategy*, *banking operations*, *risk management*, *human capital*, dan *community development*.


Penerapan keuangan berkelanjutan pada perseroan
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

LANDASAN DASAR PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Secara umum, pelaksanaan program TJSL Bank KB Bukopin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

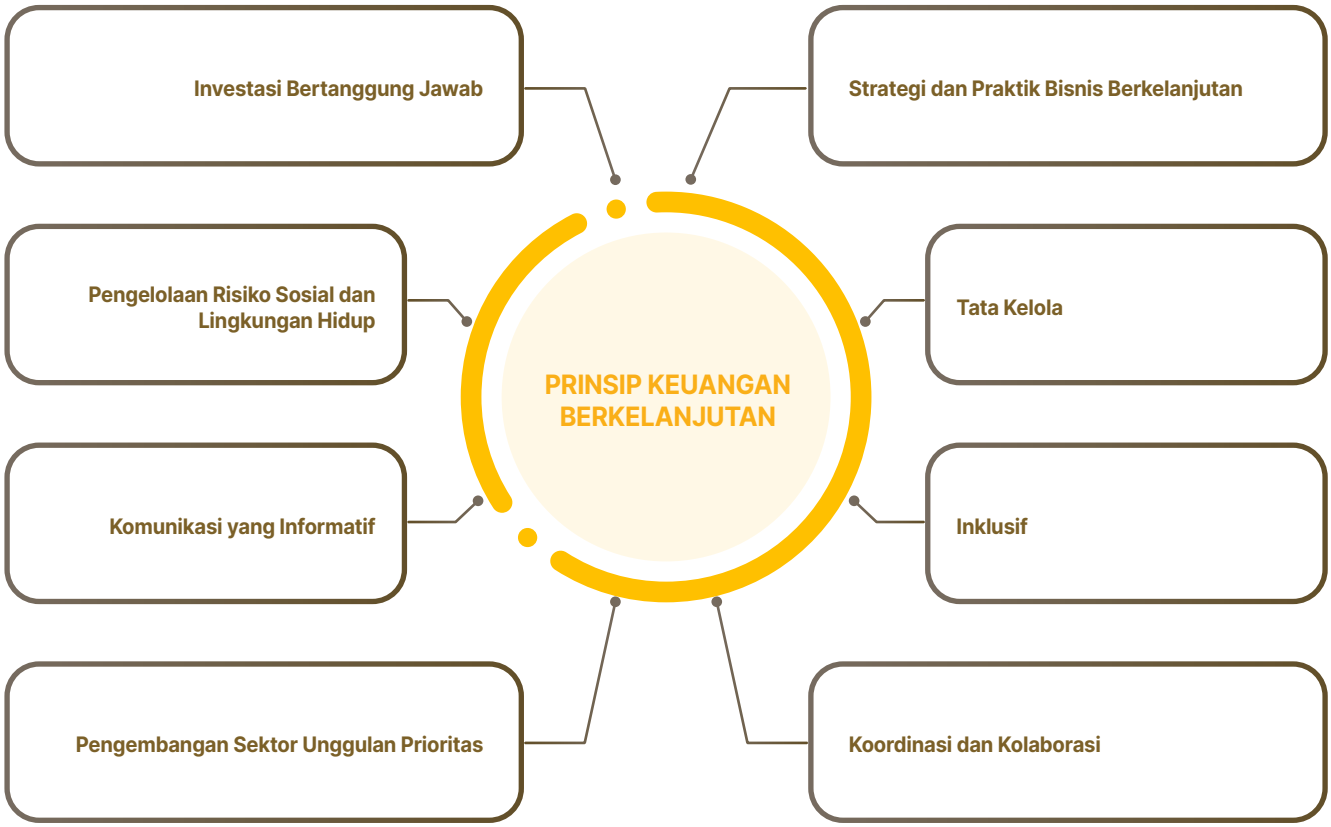
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 ayat 3;
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

LINGKUP PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan kegiatan TJSL dikoordinasikan oleh Unit Kerja Komunikasi. Penanggung jawab pengelolaan program TJSL di Bank KB Bukopin berada pada Departemen Sekretaris Perusahaan di bawah supervisi dari Direktur Utama. Pada implementasinya kegiatan TJSL seringkali dilakukan melalui kerja sama dengan departemen lain, kantor cabang, KB Kookmin Bank, KB Financial Group, Perusahaan Anak, Baitul Maal KB Bukopin, KB Bukopin Club, Yayasan Kesejahteraan Karyawan KB Bukopin, Koperasi Karyawan Bukopin, Dewan Kemakmuran Masjid, ataupun institusi lainnya.

STRATEGI KEUANGAN BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM TJSL BANK

Bank KB Bukopin telah memiliki *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I dalam rangka mendukung program TJSL Bank, dan telah menghasilkan beberapa inisiatif yang menjadi fondasi bagi perubahan pola pikir pelaku usaha. Pertama, berdasarkan *guideline* OJK telah memperkenalkan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang menjadi acuan lembaga jasa keuangan dalam implementasi Rencana Keuangan Berkelanjutan, sebagai berikut:



Berdasarkan *guideline* tersebut, Bank telah menetapkan 4 pilar utama dalam Rencana Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan, yaitu:

1. KB Bukopin Untuk Negeri bertujuan untuk mendukung penyaluran kredit program pemerintah, inklusi keuangan, dan peningkatan kualitas SDM anak–anak Indonesia.
2. KB Bukopin Care bertujuan untuk meningkatkan kepedulian insan Bank KB Bukopin terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam setiap langkah kegiatan bisnis dan operasional Bank.
3. KB Bukopin Dari Kita Untuk Kita bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM internal Bank KB Bukopin yang berkualitas dan berdaya saing.
4. KB Bukopin Satu bertujuan untuk meningkatkan penyesuaian organisasi dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan terkait sosial dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan berikutnya, Bank tetap berpegang pada pilar utama tersebut dengan melakukan penyesuaian inisiatif pendukung. Sesuai dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) diharapkan dapat menjadi landasan bagi Sektor Jasa Keuangan dan rujukan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembiayaan inovatif. Berdasarkan *Sustainable Finance Roadmap Phase* II (2021 - 2025), berikut adalah Prioritas Pengembangan *Roadmap* Tahap II:

1. Pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia 16 (enam belas) klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
2. Implementasi aspek LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) ke dalam manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan *key performance indicators* serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
3. Pengembangan program riil dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau sehingga meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan. Pelaksanaan program riil dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini sejalan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pemerintah serta menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan hijau.
4. Inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan dalam rangka mempercepat industri keuangan bertransisi ke arah berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan skema inovatif pembiayaan/pendanaan proyek berkelanjutan. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam skema inovatif meliputi keterbukaan informasi, inklusivitas, dukungan ahli, bertujuan jangka panjang, dan kredibel.
5. Kampanye nasional keuangan berkelanjutan yang bertujuan

membangun pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan strategi komunikasi serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU TERPENGARUH SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS BANK

Identifikasi terhadap pemangku kepentingan menjadi bagian yang penting dalam perumusan strategi pelaksanaan program TJSL. Dengan pemetaan pemangku kepentingan beserta dampak dan pengaruhnya, Perseroan dapat menyusun program TJSL yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Bank KB Bukopin melakukan identifikasi pemangku kepentingan dengan merujuk pada *Stakeholder Engagement Standard* versi tahun 2015, yang membagi ke dalam 6 (enam) atribut sebagai berikut:

1. *Dependency*/Ketergantungan
   Jika Perseroan memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.
2. *Responsibility*/Tanggung jawab
   Jika Perseroan memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi.
3. *Tension*/Perhatian
   Jika seseorang atau sebuah organisasi membutuhkan perhatian Perseroan terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu.
4. *Influence*/Pengaruh
   Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Perseroan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.
5. *Diverse Perspective*/Keberagaman
   Pandangan Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.
6. *Proximity*/Kedekatan.
   Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan Perseroan.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Bank KB Bukopin mendapatkan sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki dampak secara langsung atau pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis Bank KB Bukopin, memiliki andil yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan operasional Bank KB Bukopin, antara lain:

1. Nasabah;
2. Pemegang Saham;
3. Pemerintah dan Otoritas Keuangan;
4. Pegawai;
5. Serikat Pekerja;
6. Mitra Kerja/Pemasok;
7. Organisasi Bisnis;
8. Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat;
9. Media.

ISU DAN RISIKO SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN BANK

Selain melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak dan berdampak terhadap aktivitas Bank, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Bank KB Bukopin juga melakukan pemetaan terkait isu dan risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan penting yang terkait dampak dari kegiatan Bank KB Bukopin. Isu dan risiko penting tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menentukan prioritas dan menetapkan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen.

Isu dan risiko ekonomi, sosial dan lingkungan penting terkait dampak kegiatan Bank KB Bukopin adalah sebagai berikut:

Isu	Dampak
Isu Ekonomi	
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan	Berdampak signifikan pada pemegang saham.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	Berdampak bagi pemegang saham, nasabah, pemerintah dan otoritas keuangan, organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan, mitra kerja, masyarakat dan media.
Isu Sosial	
Kepegawaian	Berdampak signifikan pada pemerintah (regulator), serikat pekerja dan karyawan.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Berdampak signifikan pada karyawan.
Pelatihan dan Pendidikan	Berdampak signifikan pada karyawan.
Masyarakat Lokal	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan.
Isu Lingkungan	
Energi	Berdampak pada keberlanjutan lingkungan.
Air	Berdampak pada keberlanjutan lingkungan.

ANGGARAN DAN PROGRAM UNGGULAN TJSL 2023

Pada tahun 2023, Bank menganggarkan dana sebesar Rp900.000.000 untuk menjalankan kegiatan TJSL dengan 4 (empat) bidang TJSL yang terdiri dari pendidikan, lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Untuk pengembangan kompetensi SDM, Bank menganggarkan dana sebesar 5% dari Biaya Ketenagakerjaan (BTK) yang dikeluarkan oleh Bank.

No	Ruang Lingkup	Nominal
1.	Pendidikan	Rp62.000.000
2.	Sosial kemasyarakatan	Rp223.587.450
3.	Keagamaan	Rp472.000.000
Total		**Rp757.587.450**

Sejalan dengan visi keberlanjutan pemerintah, kegiatan TJSL Bank KB Bukopin tahun 2023 difokuskan untuk mendukung implementasi visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan kondisi internal Bank KB Bukopin. Adapun beberapa program unggulan kegiatan TJSL di 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan TJSL/CSR	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan	Capaian
1 .	Penyaluran Dukungan Kegiatan Ramadan (Buka Bersama) melalui masjid Ar Ridho & masjid Al Ikhlas.	TPB No. 2 – Tanpa Kelaparan.	Alokasi Dana Rp147.000.000. Periode pelaksanaan: Bulan 24 Maret - 18 April 2023.	Penyaluran Takjil & Makan malam bagi warga dan pengendara yang melintasi area masjid Ar Ridho & Al Ikhlas.
2	Penyaluran Hewan Qurban kepada warga yang berhak menerima di sekitar Cikoko, Tebet, S. Parman dan proposal yang diajukan.	TPB No. 2 – Tanpa Kelaparan.	Alokasi Dana Rp275.000.000. Periode pelaksanaan: 29 Juni 2023.	Jumlah hewan qurban yang disalurkan 10 ekor sapi.
3	Dukungan Kegiatan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Beat The Quest.	TPB No. 4 – Pendidikan yang Berkualitas.	Alokasi Dana Rp12.000.000. Periode Pelaksanaan: 11 November 2023.	Telah dilaksanakan serangkaian Acara kompetisi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing serta mengasah softskill mahasiswa khususnya dibidang Seni & Budaya.
4	Dukungan Kegiatan Konferensi Internasional MUI.	TPB No. 16 – Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.	Alokasi Dana Rp50.000.000. Periode Pelaksanaan: 21 sd 23 Mei 2023.	Tujuan Konferensi Internasional: menyampaikan pesan perdamaian beserta solusinya kepada masyarakat yang berbeda etnis, budaya dan agama serta membentuk kesiapan masyarakat dan antisipasinya terhadap perubahan tata budaya dunia terutama teknologi, industri dan ekonomi.

PERNYATAAN TERKAIT KEGIATAN TJSL DIUNGKAPKAN PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN

Informasi mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KB Bukopin di tahun 2023, secara komprehensif telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Bank Tahun Buku 2023 yang disajikan secara terpisah. Namun, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini sebagaimana arahan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021. Adapun isi Laporan Keberlanjutan KB Bukopin Tahun Buku 2023, mencakup poin-poin sebagaimana arahan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, yakni sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup);
3. Profil Singkat Perusahaan;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata Kelola Keberlanjutan;
6. Kinerja Keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup);
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
8. Lembar Umpan Balik (feedback) untuk Pembaca; dan
9. Tanggapan Perusahaan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

Program TJSL Bank senantiasa diselaraskan dengan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam RAKB yang dilaksanakan

secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain diharapkan dapat meningkatkan *corporate image*, program TJSL Bank juga ditujukan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.





8

Laporan Keuangan


KBstar
Tarik tunai tanpa kartu lebih mudah dan ekonomis di Indomaret
Rp.5000
Rp.3500*
per Transaksi
Indomaret
Tarik Tunai di indomaret
Susun Planning liburan kamu dengan Planning Account KBstar
KURS
SBDK
Panasonic

PT Bank KB Bukopin Tbk
Dan Entitas Anak/*And Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2023/*For the Year*
Ended December 31, 2023

PT BANK KB BUKOPIN TBK DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/ *The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2023 and 2022*	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/ ***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*** *- For the Years Ended December 31, 2023 and 2022*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/*Consolidated Statements of Financial Position*	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*……..	3-4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Changes in Equity*……	5-6
Laporan Arus Kas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Cash Flows*……	7-9
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/*Notes to Consolidated Financial Statements*……...	10-227
Informasi Tambahan/*Additional Information*……	228-237
	Lampiran/ *Attachment*
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk/*Statements of Financial Position of Parent Entity*……	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk/ *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity*……..	2
Laporan Perubahaan Ekuitas Entitas Induk/*Statements of Changes in Equity of Parent Entity*….	3
Laporan Arus Kas Entitas Induk/ *Statements of Cash Flows of Parent Entity*……..	4
Pengungkapan Lainnya/*Other Disclosures*……..	5

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Branch Business License No. 327/KM.1/2023

Branch Office:
EightyEight@Kasablanka Office, 20th Floor Unit A
Jl. Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA

T +62-21-2283 6086
F +62-21-2283 6096

MOORE

Laporan Auditor Independen

No. 00388/3.0478/AU.1/07/1671-3/1/V/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank KB Bukopin Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya terlampir ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprohonsif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00388/3.0478/AU.1/07/1671-3/1/V/2024

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank KB Bukopin Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk Kredit yang Diberikan

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 2 dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mengklasifikasikan kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan menjadi 3 tahap/*stage* sesuai dengan peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awalnya. Salah satu input yang relevan dalam penentuan stage adalah kualitas kredit yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang penilaian kualitas aset.

Untuk kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai *Stage* 1, *Stage* 2 dan *Stage* 3 yang tidak dianggap signifikan secara individual, manajemen menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") menggunakan pendekatan kolektif dengan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), *Exposure at Default* ("EAD"), dan tingkat diskonto setelah memperhitungkan informasi perkiraan masa depan, termasuk faktor makroekonomi.

Untuk kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai Stage 3 yang dianggap signifikan secara individual, manajemen menghitung KKE dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan.

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 9 dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mengakui cadangan kerugian penurunan nilai menggunakan metode KKE untuk Kredit yang Diberikan sebesar Rp3.582.834 juta pada tanggal 31 Desember 2023.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit is outlined as follows:

Assessment of the Allowances for Impairment Losses for Loans

As discussed in Note 2 to the consolidated financial statements, the Group classified the loans measured at amortised cost into 3 stages in accordance with its significant increase in credit risk since their initial recognition. One of the relevant inputs for determining the stages is the credit rating which is defined by considering qualitative and quantitative factors based on Financial Services Authority ("FSA") regulation on determining asset quality.

For loans measured at amortised cost and classified as Stage 1, Stage 2 and Stage 3 which are not considered individually significant, management calculates Expected Credit Loss ("ECL") using collective approach with the risk parameter modelling that incorporates a number of key parameters, including the Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), Exposure at Default ("EAD"), and discount rate after taking into consideration forward-looking information, including macroeconomic factors.

For loans measured at amortised cost and classified as Stage 3 which are considered individually significant, management assesses ECL by estimating the expected future cash flow from the loans.

As discussed in Note 9 to the consolidated financial statements, the Group recognized an allowance for impairment losses using ECL impairment model for loans amounting to Rp3,582,834 million as at December 31, 2023.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan dianggap penting karena memerlukan penerapan pertimbangan kritikal manajemen dan penggunaan estimasi subjektif dalam menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Pertimbangan dan estimasi ini diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian.

Untuk merespon hal audit utama ini, kami melakukan prosedur-prosedur berikut:

- Kami menguji desain dan efektivitas pengoperasian pengendalian utama di seluruh proses siklus pinjaman, dibantu oleh spesialis teknologi informasi kami, dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, validasi model penyisihan kerugian penurunan nilai, input, dasar dan asumsi yang digunakan oleh Grup dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.
- Kami menilai estimasi arus kas masa depan pada sampel pinjaman yang dinilai secara individual dengan membandingkan asumsi yang dibuat dengan informasi yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal dan menilai keandalan informasi yang digunakan dalam estimasi, berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang disiapkan oleh penilai independen.
- Kami melibatkan profesional di bidang risiko kredit dan teknologi informasi dengan keterampilan khusus, pengetahuan industri, dan pengalaman relevan yang membantu dalam mengevaluasi metodologi dan penilaian utama yang digunakan dalam menentukan parameter PD dan LGD, mengevaluasi bagaimana faktor-faktor forward-looking digabungkan dalam model ECL kolektif dan menghitung ulang penilaian penurunan nilai secara kolektif berdasarkan sampel.
- Kami melakukan prosedur loan review, berdasarkan sampel minimal 70% dari total pinjaman dan menyertakan setidaknya 25 debitur terbesar dalam portofolio, untuk mengevaluasi apakah kualitas kredit telah dinilai dengan baik oleh Grup.

Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan Level 2

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 2 dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian dimana nilai diperoleh dari harga yang dapat diobservasi (atau input untuk model penilaian) selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam level 1. Oleh karena itu, penilaian atas instrumen keuangan level 2 memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi. Nilai wajar atas instrumen keuangan ini diukur dengan model penilaian yang dikembangkan secara internal.

The allowance for impairment losses for loans is considered to be a matter of significance as it requires the application of critical management judgment and use of subjective estimates in determining how much allowance for impairment loss is required to be recognized in the consolidated financial statements. These judgments and estimates are disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

To address this key audit matter, we performed the following procedures:

- We tested the design and operating effectiveness of key controls across the loan cycle processes, as assisted by our information technology specialist, and assessed the impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, inputs, basis and assumptions used by the Group in calculating the allowance for impairment losses.
- We assessed the estimates of future cash flows on a sample of individually assessed loans by comparing assumptions made with information obtained from internal and external sources and assessing the reliability of information used in the estimates, based on available market information or valuation prepared by independent valuer.
- We involved credit risk and information technology professionals with specialized skills, industry knowledge and relevant experience who assisted in evaluating the methodology and key judgments used in determining the PD and LGD parameters, evaluating how forward-looking factors was incorporated in the collective ECL model and recalculating the collective impairment assessment on a sample basis.
- We performed loan review procedures, on a sample basis of minimum 70% of the total loans and include at least the top 25 of the biggest debtors in the portfolio, to evaluate whether the credit rating has been properly assessed by the Group.

Measurement of Level 2 Financial Instruments

As discussed in Note 2 to the consolidated financial statements, the Group classifies financial instrument measured at fair value using valuation techniques where values are derived from observable prices (or inputs to valuation models) other than quoted prices included within Level 1. The valuation of the Level 2 financial instruments therefore requires a higher degree of judgment. The fair value of this financial instrument is measured by the internally developed valuation models.

Untuk mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut, Grup menggunakan model arus kas yang didiskontokan. Model ini menggunakan berbagai masukan dan asumsi, bergantung pada sifat instrumen keuangan.

In order to measure the fair value of these financial instruments, the Group uses discounted cash flow model. This model use various inputs and assumptions, depending on the nature of the financial instrument.

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 46 dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian, nilai wajar instrumen tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.322.917 juta.

As discussed in Note 46 to the consolidated financial statements, the fair value of such instrument as at December 31, 2023 was Rp5,322,917 million.

Penilaian wajar instrumen keuangan Grup dianggap sebagai hal audit utama karena penggunaan masukan dari sumber eksternal dalam menghitung nilai pasar dari instrumen keuangan tersebut.

The fair valuation of financial instruments of the Group is considered a key audit matter due to the use of inputs from external sources in computing the market values of these financial instruments.

Untuk merespon hal audit utama ini, kami melakukan prosedur-prosedur berikut:

To address this key audit matter, we performed the following procedures:

- Kami menguji desain dan efektivitas pengoperasian pengendalian utama di seluruh proses penilaian instrumen keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar.
- Kami mengevaluasi apakah harga nilai wajar sudah sesuai dengan menilai teknik penilaian dan masukan signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan dalam penilaian instrumen.
- Kami mereviu formula yang digunakan dalam penilaian nilai wajar.

- We tested the design and operating effectiveness of key controls across the valuation process of the Group's financial instruments measured at fair value.
- We evaluated whether the fair value prices were appropriate by assessing the valuation technique and significant unobservable inputs used on the valuation of the instrument.
- We reviewed the formula used in the fair value valuation.

Informasi Lain

Other Information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi diatas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no reallstic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menemukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS

00388

Denny Susanto
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1671/
Public Accountant Registration No. AP. 1671

20 Mei 2024/*May 20, 2024*

KB Bank
PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
P. (+62)21 7988266, 7989837 F. (+62)21 7980625, 7980244
www.kbbank.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT BANK KB BUKOPIN TBK DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama	:	Woo Yeul Lee
	Alamat Kantor	:	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan – 12770
	Alamat domisili	:	Hotel Fairmont Jakarta Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
	Nomor telepon	:	021 – 7989837
	Jabatan	:	Direktur Utama
2	Nama	:	Han Jung Ho
	Alamat Kantor	:	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan – 12770
	Alamat domisili	:	Pakubuwono Springs Unit 56 Cherywood, Jl Teuku Nyak Arief No 9 RT 6 RW 2 Grogol Jakarta Selatan
	Nomor telepon	:	021 – 7988266
	Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AS AT DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE TWELVE MONTHS PERIOD THEN ENDED PT BANK KB BUKOPIN TBK AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1	*Name*	:	*Woo Yeul Lee*
	Office Address	:	*Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan – 12770*
	Domicile Address	:	*Hotel Fairmont Jakarta Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat*
	Phone Number	:	*021 – 7989837*
	Title	:	*President Director*
2	*Name*	:	*Han Jung Ho*
	Office Address	:	*Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan – 12770*
	Domicile Address	:	*Pakubuwono Springs Unit 56 Cherywood, Jl Teuku Nyak Arief No 9 RT 6 RW 2 Grogol Jakarta Selatan*
	Phone Number	:	*021 – 7988266*
	Title	:	*Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries internal control systems.*

This statement has been made truthfully

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 20 Mei 2024/*May 20, 2024*



Woo Yeul Lee
Direktur Utama/
President Director

Han Jung Ho
Direktur /
Director

PT BANK KB BUKOPIN TBK
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements
Of Financial Position
As at December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
ASET				**ASSETS**
Kas	289.184	3,46,51	524.320	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	4,46,51	4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain		5,46,38		Current accounts with other banks
Pihak berelasi	6.377		75.647	Related party
Pihak ketiga	336.504		668.412	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)		(89)	Less: Allowance for impairment losses
Giro pada bank lain - neto	342.581		743.970	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		6,46,51		Placements with Bank Indonesia and other banks
Pihak ketiga	2.133.567		12.180.830	Third parties
Surat-surat berharga:		7,46,51		Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930		3.362.099	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.067.387		588.835	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.145.932		8.059.020	Measured at amortized cost
	17.536.249		12.009.954	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(109)		(76)	Less: Allowance for impairment losses
Surat-surat berharga - neto	17.536.140		12.009.878	Marketable securities - net
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	2.572.152	8,46,51	-	Marketable securities purchased with agreements to resell - net
Tagihan derivatif	3.040	11,46,51	9.254	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		9,40,46,51		Loans and sharia financing/receivables
Pihak berelasi	640.646	38	761.333	Related parties
Pihak ketiga	48.777.970		49.822.101	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582.834)		(1.626.676)	Less: Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	45.835.782		48.956.758	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	132.577	10,40,46	17.346	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.613)		(211)	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan akseptasi - neto	130.964		17.135	Acceptance receivables - net
Penyertaan saham	15	12,46	15	Investments in shares
Aset tetap dan aset hak guna	4.646.734	13	4.686.955	Fixed assets and right of use assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.413.059)		(1.290.753)	Less: Accumulated depreciation
Aset tetap dan aset hak guna- neto	3.233.675		3.396.202	Fixed assets and right of use assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	2.670.543	21c	1.942.151	Deferred tax assets - net
Aset takberwujud	635.815	14	485.049	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(350.230)		(283.055)	Less: Accumulated amortization and impairment losses
Aset tak berwujud - neto	285.585		201.994	Intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	6.068.453	15,46,51	5.872.414	Other assets - net
TOTAL ASET	**84.307.300**		**89.995.352**	**TOTAL ASSETS**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segera	431.402	16,46,51	388.522	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah		17,18,19,46,51		Deposits from customers
Giro		17		Demand deposits
Pihak berelasi	9.094	38	260.318	Related parties
Pihak ketiga	3.168.554		3.317.609	Third parties
Tabungan		18		Saving deposits
Pihak berelasi	18.491	38	9.870	Related parties
Pihak ketiga	6.854.693		6.945.914	Third parties
Deposito berjangka		19		Time deposits
Pihak berelasi	40.311	38	55.847	Related parties
Pihak ketiga	34.698.000		41.372.812	Third parties
Simpanan dari bank lain		20		Deposits from other banks
Pihak berelasi	7.699.413	38	10.121.907	Related parties
Pihak ketiga	187.308		259.468	Third parties
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	219.631	22,46	-	Marketable securities sold with agreements to repurchase - net
Liabilitas derivatif	808	11,51	12.259	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	132.577	10,46	17.346	Acceptance payables
Pinjaman yang diterima		23,46		Borrowings
Pihak berelasi	6.544.886	38	6.533.582	Related parties
Pihak ketiga	5.159.606		4.666.549	Third parties
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	24,38,46	3.392.718	Marketable securities issued
Utang pajak	64.635	21a	56.496	Tax payables
Liabilitas lain-lain	1.570.140	26,51	1.367.530	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**70.197.137**		**78.778.747**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				**EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY**
Modal saham				Share capital
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)				Common A shares - Rp10,000 (full amount) par value
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				Common B shares - Rp100 (full amount) par value
Modal dasar				Authorized capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 207.866.202.200				Common B shares - 207,866,202,200 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 187.866.201.892 saham per 31 Desember 2023 dan 67.866.202.200 saham per 31 Desember 2022	19.000.000	27a	7.000.000	Common B shares - 187,866,201,892 shares as of December 31, 2023 and 67,866,202,200 shares as of December 31,2022
Tambahan modal disetor	8.225.767	27b	8.286.428	Additional paid-in capital
Uang muka setoran modal	-	27a	3.000.000	Advance for future shares subscription
Surplus revaluasi aset	1.603.893	13	1.605.649	Asset revaluation surplus
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	7.563		2.625	Unrealized gain on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax
Akumulasi defisit	(14.700.914)		(8.673.269)	Accumulated deficit
	14.136.309		11.221.433	
Kepentingan non-pengendali	(26.146)	28	(4.828)	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	**14.110.163**		**11.216.605**	**TOTAL EQUITY**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**84.307.300**		**89.995.352**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income
For the Year Ended December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				**INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS**
Pendapatan bunga dan syariah		29		Interest and sharia income
Pendapatan bunga	4.374.694		3.721.413	Interest income
Pendapatan syariah	486.942		407.257	Sharia income
Total pendapatan bunga dan syariah	4.861.636		4.128.670	Total interest and sharia income
Beban bunga dan syariah		30		Interest expense and sharia charges
Beban bunga	(3.746.710)		(2.828.375)	Interest expense
Beban syariah	(306.044)		(250.792)	Sharia charges
Total beban bunga dan syariah	(4.052.754)		(3.079.167)	Total interest expense and sharia charges
Pendapatan bunga dan syariah - neto	808.882		1.049.503	Interest and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Provisi dan komisi lainnya	333.732	31	323.340	Other fees and commissions
Keuntungan (kerugian) atas penjualan surat-surat berharga - neto	(8.899)		13.082	Gain (loss) on sale of marketable securities - net
Keuntungan selisih kurs - neto	29.265		31.815	Gain on foreign exchange - net
Lain-lain	102.429		131.272	Others
Total pendapatan operasional lainnya	456.527		499.509	Total other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.537.792)	32	(3.948.482)	Provision of allowance for impairment losses on financial assets - net
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5.235		(1.919)	Gain (loss) from foreign exchange transactions - net
Penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	1.999	25	(2.272)	Provision for commitments and contingencies - net
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(269.055)		(81.325)	Provision for allowance for impairment losses on non-financial assets - net
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155.384		(147.542)	Gain (loss) from changes in fair value of financial assets
Beban operasional lainnya:				Other operating expenses:
Umum dan administrasi	(1.371.594)	33	(1.571.018)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(809.976)	34	(734.432)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan pemerintah	(98.812)	30	(118.790)	Premium on government guarantee program
Total beban operasional lainnya	(2.280.382)		(2.424.240)	Total other operating expenses
RUGI OPERASIONAL	**(6.659.202)**		**(5.056.768)**	**LOSS FROM OPERATIONS**
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	**(128.185)**	**35**	**(88.888)**	**NON-OPERATING EXPENSE - NET**
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(6.787.387)**		**(5.145.656)**	**LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				**INCOME TAX BENEFIT**
Tangguhan	731.684	21b	113.152	Deferred
Manfaat pajak penghasilan - neto	731.684		113.152	Income tax benefit - net
RUGI TAHUN BERJALAN	**(6.055.703)**		**(5.032.504)**	**LOSS FOR THE YEAR**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				**OTHER COMPREHENSIVE INCOME:**
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali keuntungan atas program imbalan pasti	8.640	37	25.736	Remeasurement of gain on defined benefit plans
Perubahan surplus revaluasi aset	(1.756)	13	77.837	Revaluation surplus
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.900)	21c	(5.663)	Income tax related to item that will not be reclassified to profit or loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.330		(70.134)	Changes in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.392)	21c	15.429	Income tax related to item that will be reclassified to profit or loss
Penghasilan komprehensif lain - neto	9.922		43.205	Other comprehensive income - net
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(6.045.781)		(4.989.299)	Total comprehensive loss for the year
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(6.034.077)		(5.027.460)	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	(21.626)	28	(5.044)	Non-controlling interest
	(6.055.703)		(5.032.504)	
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(6.024.463)		(4.984.356)	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	(21.318)		(4.943)	Non-controlling interest
	(6.045.781)		(4.989.299)	
RUGI PER SAHAM				**LOSS PER SHARE**
Dasar/dilusian (nilai penuh)	(61)	48	(74)	Basic/diluted (full amount)

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains on Fair Value through Other Comprehensive Income of Marketable Securities Net - of Deferred Tax*	Akumulasi Rugi/ *Accumulated Deficit*	Total	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2022		**7.000.000**	**8.286.428**	**-**	**1.527.812**	**57.330**	**(3.665.882)**	**13.205.688**	**216**	**13.205.904**	**Balance as of January 1, 2022**
Uang muka setoran modal	27a	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	Advance for future shares subscription
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	(54.705)	-	(54.705)	-	(54.705)	Unrealized losses on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax
Surplus revaluasi aset tetap	13	-	-	-	77.837	-	-	77.837	-	77.837	Surplus of fixed asset revaluation
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	-	20.073	20.073	(101)	19.972	Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(5.027.460)	(5.027.460)	(4.943)	(5.032.403)	Loss for the year
Saldo per 31 Desember 2022		**7.000.000**	**8.286.428**	**3.000.000**	**1.605.649**	**2.625**	**(8.673.269)**	**11.221.433**	**(4.828)**	**11.216.605**	**Balance as of December 31, 2022**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains on Fair Value through Other Comprehensive Income of Marketable Securities Net - of Deferred Tax*	Akumulasi Rugi/ *Accumulated Deficit*	Total	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2023		**7.000.000**	**8.286.428**	**3.000.000**	**1.605.649**	**2.625**	**(8.673.269)**	**11.221.433**	**(4.828)**	**11.216.605**	**Balance as of January 1, 2023**
Realisasi uang muka setoran modal	27	3.000.000	-	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	Realization of advance for future shares
Penerimaan dana PUT VII	27	9.000.000	(60.661)	-	-	-	-	8.939.339	-	8.939.339	Receipt of LPO VII funds
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	4.938	-	4.938	-	4.938	Unrealized income on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax
Penghentian revaluasi aset tetap	13	-	-	-	(1.756)	-	-	(1.756)	-	(1.756)	Derecognation of fixed asset revaluation
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	-	6.432	6.432	308	6.740	Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(6.034.077)	(6.034.077)	(21.626)	(6.055.703)	Loss for the year
Saldo per 31 Desember 2023		**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.603.893**	**7.563**	**(14.700.914)**	**14.136.309**	**(26.146)**	**14.110.163**	**Balance as of December 31, 2023**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan bunga	4.445.205		3.611.905	Receipts from interest
Penerimaan pendapatan syariah	486.942		407.257	Receipts from sharia income
Pembayaran bunga	(4.109.898)		(2.790.920)	Payment of interest
Pembayaran beban syariah	(306.044)		(250.792)	Payments of sharia charges
Pendapatan operasional lainnya	351.755		269.558	Other operating income
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	177.584	9p	84.769	Recoveries from written-off loans
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(937.763)		(988.084)	Payments of salaries and employee benefits
Beban operasional lainnya	(1.237.851)		(1.843.715)	Other operating expense
Beban non operasional	(123.249)		(90.542)	Non - operating expenses
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(1.253.319)		(1.590.564)	Cash payments before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan	(17.000)		(30.000)	Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of more than 3 months from acquisition date
Surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.929.462		3.747.558	Marketable securities - at fair value through profit or loss
Surat-surat berharga - diukur pada biaya perolehan diamortisasi	495.880		724.074	Marketable securities - amortized cost
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(3.134.725)		925.552	Loans and sharia financing/receivables
Tagihan akseptasi	113.829		11.783	Acceptances receivable
Aset lain-lain	(492.929)		(1.027.266)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	42.880		99.231	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah:				Deposits from customers:
Giro	(400.279)		263.175	Current accounts
Tabungan	(82.600)		(1.841.133)	Savings deposits
Deposito berjangka	(6.690.348)		(2.282.447)	Time deposits
Simpanan dari bank lain	(2.494.654)		729.306	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	115.231		11.928	Acceptances payable
Utang pajak	8.139		14.332	Tax payables
Liabilitas lain-lain	694.625		(14.757)	Other liabilities
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(10.165.808)		(259.228)	Net cash used in operating activities

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	260.000		1.099.665	Receipts from sale of marketable securities - fair value through other comprehensive income
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo	11.725.517		4.106.018	Receipts from matured marketable securities
Pembelian surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(20.804.241)		(12.205.046)	Purchase of marketable securities - fair value through other comprehensive income and and amortized cost
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo	57.780.679		33.774.734	Receipts from matured marketable securities purchased with agreements to resell
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(60.352.831)		(33.525.187)	Payments of marketable securities purchased with agreements to resell
Pembelian aset tetap	(60.766)	13	(57.220)	Purchase of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	7.200	13	32.581	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian piranti lunak	(150.766)	14	(8.825)	Purchase of software
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(11.595.208)		(6.783.280)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.127.534		10.806.560	Receipts from marketable securities sold with agreements to repurchase
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang jatuh tempo	(8.907.903)		(13.183.397)	Payments of matured marketable securities sold with agreements to repurchase
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	1.246.416		8.887.273	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	(742.055)		(113.383)	Payment of borrowings
Penerimaan uang muka setoran modal	-	27	3.000.000	Advance received for future shares subscription
Penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas VII	8.939.339	27	-	Receipt from Limited Public Offering VII
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	9.663.331		9.397.053	Net cash provided by financing activities

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(12.097.685)**		**2.354.545**	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	492.085		(422.197)	Effects of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**17.559.551**		**15.627.203**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**5.953.951**		**17.559.551**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR**
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	289.184		524.320	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619		4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	342.581		743.970	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2.116.567		12.150.830	Placement with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date
Total	**5.953.951**		**17.559.551**	**Total**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Menurut Anggaran Dasar, usaha Bank mencakup segala kegiatan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Dalam perkembangannya, Bank telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa Bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Dalam Rapat Khusus Anggota Bank, yang dinyatakan dengan akta notaris No. 4 tanggal 2 Desember 1992 dari Notaris Muhani Salim, S.H., para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Bank dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum Bank dinyatakan dengan akta notaris No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta notaris No. 118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama.

Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3633 tambahan No. 64 tanggal 10 Agustus 1993. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993. Bank memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

1. General

a. Establishment of the Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk (the "Bank") was established in the Republic of Indonesia on July 10, 1970 as Bank Umum Koperasi Indonesia (abbreviated to Bukopin) based on Decision Letter No. 13/Dirjen/Kop/70 of the Directorate General for Cooperatives and was registered in the General List of the Directorate General for Cooperatives No. 8251 on the same date. The Bank started its commercial operations as a cooperative Bank in Indonesia on March 16, 1971 upon the approval of the Ministry of Finance in its Decision Letter No. Kep-078/DDK/II/3/1971 dated March 16, 1971.

According to its Articles of Association, the Bank's scope of activities includes all commercial Banking activities as defined in the Banking Law, with the main objective of providing services to cooperatives in Indonesia in accordance with the Law on Cooperatives. During its growth, the Bank merged with certain cooperative Banks. The change in the name from Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) to Bank Bukopin was approved during the Cooperative Members' Meeting of Bank Umum Koperasi Indonesia as stated in letter No. 03/RA/XII/89 dated January 2, 1990.

During the Special Meeting of the Members of Bank, the minutes of which were covered by notarial deed No. 4 dated December 2, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., the cooperative members agreed to change the Bank's legal entity from a cooperative to a limited liability company. The Bank's deed of establishment and the amendment relating to the change in legal entity were covered by notarial deed No. 126 dated February 25, 1993 of Notary Muhani Salim, S.H., and notarial deed No. 118 dated May 28, 1993 of the same notary, respectively.

These changes were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 dated June 29, 1993 and were published in Supplement No. 64 of State Gazette No. 3633 dated August 10, 1993. The changes were also approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. S-1382/MK.17/1993 dated August 28, 1993. The Bank started commercial operations as a limited liability company on July 1, 1993.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Berdasarkan anggaran dasar PT Bank KB Bukopin Tbk, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 9 Juni 2023 No. 33 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2023 No. AHU-0107791.AH.01.11. Tahun 2023 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor PT Bank KB Bukopin Tbk, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 9 Juni 2023 No. 33, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 12 Juni 2023 No. AHU-AH.01.03-0075748 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran DasarPT Bank KB Bukopin Tbk.

Entitas induk sekaligus pemegang saham pengendali Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah KB Kookmin Bank Co., Ltd.

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki kantor pusat operasi, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional dan ATM sebagai berikut:

	2023	2022	
Kantor pusat operasi	1	1	Operations headquarter
Kantor cabang	29	41	Branches
Kantor cabang pembantu	143	231	Sub-branches
Kantor fungsional	1	3	Functional offices
ATM	11	359	ATM

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah karyawan Bank, termasuk karyawan tidak tetap, masing-masing adalah sebesar 2.618 dan 3.373 (tidak diaudit).

b. Susunan Pengurus Bank

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank (continued)

Based on the articles of association of PT Bank KB Bukopin Tbk, Deed of Statement of Meeting Resolution dated on June 9, 2023 No. 33 as received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 12, 2023 No. AHU-0107791.AH.01.11. Year 2023 concerning Amendment to Increase the Issued/Paid-up Capital of PT Bank KB Bukopin Tbk, Deed of Meeting Resolution dated June 9, 2023 No. 33, as received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 12, 2023 No. AHU-AH.01.03-0075748 Subject: Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association PT Bank KB Bukopin Tbk.

The parent entity as well as controlling shareholders of the Bank as at December 31, 2023 and 2022 is KB Kookmin Bank Co., Ltd.

The Bank's head office is located at Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

As at December 31, 2023 and 2022, the Bank has operations headquarter, branches, sub-branches, functional offices and ATMs as follow:

As at December 31, 2023 and 2022, the Bank has total employees, including non-permanent, of 2,618 and 3,373, respectively (unaudited).

b. Composition of the Bank's Management

Key management personnel consists of the Board of Commissioners, Directors, and key executives who have direct responsibility to the Directors.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2023, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Dewan Komisaris:		**Board of Commissioners:**
Komisaris Utama	Jerry Marmen	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Nam Hoon Cho ***)	Deputy President Commissioner
Komisaris	Nanang Supriyatno	Commissioner
Komisaris Independen	Tippy Joesoef	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hae Wang Lee	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Stephen Liestyo	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Sukriansyah S. Latief	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Eugene Keith Galbraith	Independent Commissioner
Direksi:		**Directors:**
Direktur Utama	Woo Yeul Lee	President Director
Wakil Direktur Utama	Robby Mondong	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan dan Risiko	Dodi Widjajanto	Compliance and Risk Director
Direktur Bisnis Retail & Service	Helmi Fahrudin	Retail Business & Services Director
Direktur Keuangan	Seng Hyup Shin **)	Finance Director
Direktur Bisnis UKM & Wholesale	Yohanes Suhardi	SME & Wholesale Business Director
Direktur Kredit	Henry Sawali	Credit Director
Direktur Teknologi Informasi & Digital	Young Eun Moon *)	Information Technology & Digital Director
Direktur Strategi	Jung Ho Han *)	Strategic Director

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Perseroan menerima surat pengunduran diri pada tanggal 8 Desember 2023.

***) Perseroan menerima surat pengunduran diri pada tanggal 29 Desember 2023.

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/ POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

**) The company received a letter of resignation on December 8, 2023.

***) The company received a letter of resignation on December 29, 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Januari 2023 yang dituangkan dalam akta notaris No. 77 tanggal 31 Januari 2023.

Pada tanggal 24 Januari 2024 Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hasil keputusannya adalah mengangkat Bapak Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Perseroan, Bapak Jang Hyuk Im sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan akta Notaris No. 57 tanggal 24 Januari 2024 dan sesuai dengan SKEP Dewan Komisaris No. SKEP/001 Tahun 2024 tentang Pembagian dalam Struktur Organinasi serta pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk Bapak Jang Hyuk Im ditetapkan sebagai Direktur Keuangan, sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sejak tanggal 24 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2023 is based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 31, 2023 stated in notarial deed No. 77 dated January 31, 2023.

On January 24, 2024 the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders and the result of the decision was to appoint Mr. Seng Hyup Shin as a Deputy President Commissioner of the Company and Mr. Jang Hyuk Im as a Director of the Company in accordance with Notary deed No. 57 dated January 24, 2024 and in accordance with SKEP of the Board of Commissioners No. SKEP/001 of 2024 concerning Division in the Organizational Structure and distribution of duties and authorities for the members of the Directors of PT Bank KB Bukopin Tbk. Mr. Jang Hyuk Im was appointed as Director of Finance, so that the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank as at January 24, 2024 are as follows:

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

	24 Januari/ *January 24, 2024*	
Dewan Komisaris:		**Board of Commissioners:**
Komisaris Utama	Jerry Marmen	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Seng Hyup Shin *)	Deputy President Commissioner
Komisaris	Nanang Supriyatno	Commissioner
Komisaris Independen	Tippy Joesoef	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hae Wang Lee	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Stephen Liestyo	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Sukriansyah S. Latief	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Eugene Keith Galbraith	Independent Commissioner
Direksi:		**Directors:**
Direktur Utama	Woo Yeul Lee	President Director
Wakil Direktur Utama	Robby Mondong	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan dan Risiko	Dodi Widjajanto	Compliance and Risk Director
Direktur Bisnis Retail & Service	Helmi Fahrudin	Retail Business & Services Director
Direktur Keuangan	Jang Hyuk Im *)	Finance Director
Direktur Bisnis UKM & Wholesale	Yohanes Suhardi	SME & Wholesale Business Director
Direktur Kredit	Henry Sawali	Credit Director
Direktur Teknologi Informasi & Digital	Young Eun Moon *)	Information Technology & Digital Director
Direktur Strategi	Jung Ho Han	Strategic Director

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/ POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Dewan Komisaris:		**Board of Commissioners:**
Komisaris Utama	Jerry Marmen	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Nam Hoon Cho	Deputy President Commissioner
Komisaris	Nanang Supriyatno	Commissioner
Komisaris Independen	Tippy Joesoef	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hae Wang Lee	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Stephen Liestyo	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Sukriansyah S. Latief	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Eugene Keith Galbraith	Independent Commissioner
Direksi:		**Directors:**
Direktur Utama	Woo Yeul Lee *)	President Director
Wakil Direktur Utama	Robby Mondong	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Dodi Widjajanto	Compliance and Risk Management Director
Direktur Operasi	Helmi Fahrudin	Operation Director
Direktur Keuangan	Seng Hyup Shin	Finance Director
Direktur Strategi	Jin Bum Kim **)	Strategic Director
Direktur Bisnis UKM	Yohanes Suhardi	Business & SME Director
Direktur Kredit	Henry Sawali	Credit Director
Direktur Teknologi Informasi	Young Eun Moon *)	Information Technology Director

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Perseroan menerima surat pengunduran diri pada tanggal 14 Desember 2022.

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/ POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

**) The company received a letter of resignation on December 14, 2022.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2022 yang dituangkan dalam akta notaris No. 37 tanggal 24 Agustus 2022.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Ketua	Stephen Liestyo	Stephen Liestyo	Chairman
Anggota	Tippy Joesoef *)	Nanang Supriyatno	Member
Anggota	Eugene Keith Galbraith	Eugene Keith Galbraith	Member
Anggota	Dewi Anggesty Sah Bandar	Dewi Anggesty Sah Bandar	Member
Anggota	Jacobus Sindu Adisuwono	Jacobus Sindu Adisuwono	Member

Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Ketua	Tippy Joesoef	Tippy Joesoef	Chairman
Anggota	Jerry Marmen *)	Jerry Marmen	Member
Anggota	Stephen Liestyo	Nam Hoon Cho	Member
Anggota	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Member
Anggota	Togar Natigor Siregar	Togar Natigor Siregar	Member
Anggota	Rahardja Alim Hamzah	Rahardja Alimhamzah	Member

Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2022 is based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 24, 2022 stated in notarial deed No. 37 dated August 24, 2022.

The composition of the Bank's Audit Committee as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.

The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee as at December 31, 2023 and 2022, are as follows:

Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/ POJK.03/ 2017, and/or other applicable laws and regulations.

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

The composition of the Bank's Remuneration and Nomination Committee as at December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023* dan/*and* 2022	
Ketua	Hae Wang Lee	Chairman
Anggota	Jerry Marmen	Member
Anggota	Nam Hoon Cho	Member
Anggota	Nanang Supriyatno	Member
Anggota	Tippy Joesoef	Member
Anggota	Sukriansyah S Latief	Member
Anggota	Gamaridha Akhirul AR	Member

Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku.

Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK. 03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.

Susunan Komite Tata Kelola dan Terintegrasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Integrated governance committee as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	**31 Desember/ *December 31, 2022***	
Ketua	Sukriansyah S. Latief *)	Sukriansyah S. Latief *)	Chairman
Anggota	Eugene Keith Galbraith	Tippy Joesoef	Member
Anggota	Hae Wang Lee	Eugene Keith Galbraith	Member
Anggota	Dinan Sufendi Rae	Hae Wang Lee	Member

Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0118-DIR/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Yocky Eko Wicaksono.

Based on the Company's Directors Decision Letter No. SKEP/0118-DIR/VIII/2023 dated August 8, 2023, the Corporate Secretary of the Bank as at December 31, 2023 is Yocky Eko Wicaksono.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0026-DIR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Slamet Haryanto Pradhana.

Based on the Company's Directors Decision Letter No. SKEP/0026-DIR/II/2022 dated February 11, 2022, the Corporate Secretary of the Bank as at December 31, 2023 is Slamet Haryanto Pradhana.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SKEP/0015-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Kepala SKAI) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Roby Endrama Purba.

c. Entitas anak

Entitas anak yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

Based on the Company's Directors Decision Letter No.SKEP/0015-DIR/II/2022 dated February 2, 2022, the Internal Audit Task Force Head (Chief of IATF) as at December 31, 2023 and 2022 is Roby Endrama Purba.

c. Subsidiaries

The subsidiaries included in the consolidated financial statements for years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Kegiatan Usaha/ *Business Activity*	Tahun Beroperasi Komersial/ *Year of Commercial Operation*	Domisili/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Jumlah Aset/ *Total Assets*	
				31 Des./ Dec. 31, 2023	*31 Des./ Dec. 31, 2022*	*31 Des./ Dec. 31, 2023*	*31 Des/ Dec 31, 2022*
PT KB Bukopin Finance	Pembiayaan/ *Financing*	1983	Jakarta	99,24%	97,03%	459.661	424.491
PT Bank KB Bukopin Syariah	Perbankan/ *Banking*	1990	Jakarta	95,92%	92,78%	7.920.474	7.013.225

PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

PT KB Bukopin Finance ("KBBF") didirikan pada tanggal 11 Maret 1983 berdasarkan akta notaris No. 5 dari Notaris Tan A Sioe, S.H., dan bergerak dalam bidang *leasing* (perusahaan pembiayaan). Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Linsia, S.H., M.Kn., No. 1092 tanggal 25 Oktober 2023, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance ("KBBF") yang dituangkan ke dalam Akta No. 06 tanggal 28 Juni 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0041490.AH.01.02.TAHUN 2021.

PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

PT KB Bukopin Finance ("KBBF") was established on March 11, 1983 by notarial deed No. 5 of Notary Tan A Sioe, S.H., and is engaged in leasing activities. The Company's Articles of Association have been amended several times, the last of which was made by Notarial Deed No. 1092 of Linsia, S.H., M.Kn., dated October 25, 2023, in connection with increase in the Company's issued and paid-up capital.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) agreed to change the name of the Company from PT Bukopin Finance to PT KB Bukopin Finance ("KBBF") which was stated in the Deed No. 06 dated June 28, 2021 and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the decision of the Minister Of Law And Human Rights number AHU-0041490.AH.01.02.TAHUN 2021.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Berdasarkan akta No. 1092 tanggal 25 Oktober 2023 dari Notaris Linsia, S.H., M.Kn., Perusahaan menambah setoran modal pada KBBF sebesar 118.580 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp592.900.000.000 sehingga meningkatkan persentase kepemilihan perusahaan pada KBBF dari 97,03% menjadi 99,24%.

PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")

PT Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 berdasarkan akta notaris No. 102 dari Notaris Dr. Widjojo Wilami, S.H., yang bergerak dalam bidang perbankan. Berdasarkan akta notaris No. 28 dari Notaris Adrian Djunaini, S.H., tanggal 31 Maret 2008, BPI telah berubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin ("BSB"). Status BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan Bank Indonesia (BI) No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari BSB menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS") yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Berdasarkan akta nomor 04 tanggal 16 Oktober 2023 dari Notaris Hasnah, S.H., Modal Dasar yang dimiliki KBBS saat ini adalah Rp3.000.000.000.000 yang terbagi atas 56.690.737.000 saham dan terdiri dari saham Seri A, Seri B, dan Seri C. Terdapat penambahan kepemilikan Perusahaan pada Seri C Sebesar 13.600.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp638.000.000.000. Hal ini memengaruhi persentase kepemilikan Perusahaan pada KBBS dari 92,78% menjadi 95,92%.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Based on deed No. 1092 dated October 25, 2023 from Notary Linsia S.H., M.Kn., the Company increased its capital deposit in KBBF by 118,580 shares with a total nominal value of Rp592,900,000,000 thus increasing the Company's ownership percentage in KBBF from 97.03% to 99.24%.

PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")

PT Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") was established on July 29, 1990 by notarial deed No. 102 of Notary Dr. Widjojo Wilami, S.H., and is engaged in Banking activities. Based on notarial deed No. 28 of Notary Adrian Djunaini, S.H., dated March 31, 2008, BPI has changed its name to PT Bank Syariah Bukopin ("BSB"). The status of BSB changed from Conventional Bank to Sharia Bank as stated in Bank Indonesia (BI) decision letter No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 dated October 27, 2008.

On the June 30, 2021 Extraordinary General Meeting Shareholders (EGMS) agreed to change the company name from BSB into PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS") which set forth into the Deed No. 02 dated July 6, 2021 and has been approved for keeping the use of Bank License under new name from Authority Financial Services based on SR-27/PB.101/2021 dated August 12, 2021 and KEP-53/PB.1/2021 dated August 10, 2021.

Based on deed number 04 dated October 16, 2023 from Notary Hasnah, S.H., the current authorized capital of KBBS is Rp3,000,000,000,000 divided into 56,690,737,000 shares and consists of Series A, Series B, and Series C shares. There is an increase in the Company's ownership in Series C of 13,600,000,000 shares with a total nominal value of Rp638,000,000,000. This affected the Company's ownership percentage in KBBS from 92.78% to 95.92%.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank

Penawaran umum obligasi

Pada tanggal 21 April 2015, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. 05630/DIR/IV/2015 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap pertama Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2015 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp400.000.

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022.

Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-26/D.04/2015 tanggal 23 Juni 2015 dilaksanakan pada 24 - 25 Juni 2015. Dana Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada 30 Juni 2015 yang diperoleh dari Penawaran Umum Juni 2015.

Pada 11 Januari 2017, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 00455/DIR/I/2017 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap kedua Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.405.000.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares

Public offering of bonds

On April 21, 2015, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche I Year 2015 (Shelf Public Offering) through letter No. 05630/DIR/IV/2015 to Financial Services Authority ("OJK") in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin amounting to Rp2,000,000, whereby at first tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche I Year 2015 (Subordinated Bonds) amounted to Rp400,000.

The Subordinated Bonds issued were scriptless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 12.00% per annum and will be paid quarterly and mature on June 30, 2022.

The Bank received the effective statement from OJK to conduct Shelf Public Offering through its letter No. S-26/D.04/2015 dated June 23, 2015. The Shelf Public Offering was held on June 24 - 25, 2015. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on June 30, 2015 from Public Offering in June 2015.

On January 11, 2017, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017 (Shelf Public Offering) through letter No. 00455/DIR/I/2017 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin amounting to Rp2,000,000, whereby at second tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017 (Subordinated Bonds) amounted to Rp1,405,000.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2024. Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-161/PB.313/2016 tanggal 23 Desember 2016. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan pada tanggal 20 - 23 Februari 2017. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada tanggal 28 Februari 2017.

Pada 10 September 2021, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 08550/DIR/V/2021 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin dengan jumlah sebesar Rp1.000.000, dimana pada tahap pertama Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.

Pada 10 September 2021, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 seri A dan seri B (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 08550/DIR/V/2017 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin dengan jumlah masing-masing sebesar Rp315.000 dan Rp685.000, dimana pada tahap ketiga Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 seri A (Obligasi Subordinasi No. ISIN IDA0001176A9) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 seri B (Obligasi Subordinasi No. ISIN IDA0001176B7) dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp315.000 dan Rp685.000.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of bonds (continued)

The Subordinated Bonds issued were scriptless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 11.00% per annum and will be paid quarterly and mature on February 28, 2024. The Bank received the effective statement from OJK to conduct Shelf Public Offering through its letter No. S-161/PB.313/2016 dated December 23, 2016. The Shelf Public Offering was held on February 20 - 23, 2017. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on February 28, 2017.

On September 10, 2021, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 (Shelf Public Offering) through letter No. 08550/DIR/V/2021 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank KB Bukopin amounting to Rp1,000,000, whereby at second tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 (Subordinated Bonds) amounted to Rp1,000,000.

On September 10, 2021, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 serie A and serie B (Shelf Public Offering) through letter No. 08550/ DIR/V/2017 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin amounting to Rp315,000 and Rp685,000 respectively, whereby at third tranche the Bank issued and offered the Shelf- registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 serie A (Subordinated Bonds ISIN No. IDA0001176A9) and Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 series B (Subordinated Bonds ISIN No. IDA0001176B7) amounted to Rp315,000 and Rp685,000, respectively.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham

Pada bulan Juni 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga jual Rp350 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat, melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran Umum Saham Perdana saham Seri B kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui suratnya No. S-825/BL/2006 tanggal 30 Juni 2006.

Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006 dan pada saat yang bersamaan sebanyak 99% saham Bank juga dicatatkan. Seluruh saham kelas A sebesar 0,31% dan saham kelas B sebesar 0,69% yang dimiliki oleh Kopelindo dan Kopkapindo masing-masing secara proporsional tidak dicatatkan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 7548/DIR/X/2009 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham (Catatan 27b). Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 286.050.768 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp415 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui suratnya No. S-10319/BL/2009 tanggal 26 November 2009.

Pada tanggal 26 November 2009, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 4 - 10 Desember 2009. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I adalah sebesar Rp118.711 (untuk 286.050.768 saham biasa kelas B), dimana sebesar Rp62.955 (untuk 151.699.698 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp55.756

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares

In June 2006, the Bank undertook an Initial Public Offering of Shares of 843,765,500 Series B shares with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp350 (full amount) per share to the public, through the capital market in Indonesia, in accordance with the prevailing capital market law. The Bank received the effectivity statement from the BAPEPAM-LK through its letter No. S-825/BL/2006 dated June 30, 2006 for the sale of Series B shares to the public.

The initial Public Offering (IPO) shares were onotially traded on the Indonesia Stock Exchange on July 10, 2006 and at the same time, 99% of the Bank's shares were listed. All Series A shares amounting to 0.31% and Series B shares amounting to 0.69% which were owned by Kopelindo and Kopkapindo proportionally, were not listed to comply with the government regulation.

On October 26, 2009, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering I through letter No. 7548/DIR/X/2009 to BAPEPAM-LK, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders (Note 27b). Total shares offered were 286,050,768 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp415 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from BAPEPAM-LK to conduct Limited Public Offering I through its letter No. S-10319/BL/2009 dated November 26, 2009.

On November 26, 2009, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering I with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering I was held on December 4 - 10, 2009. The total proceeds from Limited Public Offering I amounting to Rp118,711 (for 286,050,768 common B shares), of which Rp62,955 (for 151,699,698 common B shares) was raised from the public and Rp55,756 (for 134,351,070 common B shares) was raised from Koperasi Pegawai

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

(untuk 134.351.070 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog yang bertindak sebagai pembeli siaga (*standby buyer*) dengan proporsi masing-masing sebesar 89,83% dan 10,17%.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini telah diterima oleh Bank pada bulan Desember 2009.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 11754/DIR/XII/2010 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham (Catatan 27b).

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 2.051.366.765 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp520 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II melalui suratnya No. S-771/BL/2011 tanggal 26 Januari 2011. Pada tanggal 26 Januari 2011, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas II dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Februari 2011. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas II adalah sebesar Rp929.739 (untuk 1.787.960.495 saham biasa kelas B), dimana sebesar Rp921.098 (untuk 1.771.342.921 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp8.641 (untuk 16.617.574 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Karyawan Bank KB Bukopin Jakarta (KKBJ) dan Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II ini telah diterima oleh Bank pada bulan Februari 2011.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) and Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog, who acted as the standby buyers with proportional share of 89.83% and 10.17%, respectively.

The proceeds from the Limited Public Offering I were received by the Bank in December 2009.

On December 20, 2010, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering II through letter No. 11754/ DIR/XII/2010 to BAPEPAM-LK, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders (Note 27b).

Total shares offered were 2,051,366,765 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp520 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from BAPEPAM-LK to conduct Limited Public Offering II through its letter No. S-771/BL/2011 dated January 26, 2011. On January 26, 2011, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering II with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering II was held on February 10 - 17, 2011. The total proceeds from Limited Public Offering II amounted to Rp929,739 (for 1,787,960,495 common B shares), of which Rp921,098 (for 1,771,342,921 common B shares) was raised from the public and Rp8,641 (for 16,617,574 common B shares) was raised from Koperasi Karyawan Bank KB Bukopin Jakarta (KKBJ) and Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). The proceeds from the Limited Public Offering II were received by the Bank in February 2011.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 13308/DIR/X/2013 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham.

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.659.505.614 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp660 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III melalui surat No. S-424/D.04/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pada 11-13 Desember 2013, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 - 7 Januari 2014. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III sebesar Rp730.126 (untuk 1.106.252.141 saham biasa kelas B), dari nilai tersebut sebesar Rp9.291 (untuk 14.076.556 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat, sebesar Rp343.410 (untuk 520.319.150 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan sebesar Rp377.425 (untuk 571.856.435 saham biasa kelas B) dari PT Bosowa Corporindo. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas III ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp587.490 dan hingga tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp730.126.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On October 28, 2013, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering III through letter No. 13308/DIR/X/2013 to The Financial Services Authority, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders.

Total shares offered were 2,659,505,614 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp660 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from the Financial Services Authority to conduct Limited Public Offering III through its letter No. S-424/D.04/2013 dated December 12, 2013. On December 11 - 13, 2013, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering III with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering III was held on December 30, 2013 - January 7, 2014. The total proceeds from Limited Public Offering III amounted to Rp730,126 (for 1,106,252,141 common B shares), of which Rp9,291 (for 14,076,556 common B shares) was raised from the public, Rp343,410 (for 520,319,150 common B shares) was raised from Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) and Rp377,425 (for 571,856,435 common B shares) was raised from PT Bosowa Corporindo. The proceeds from the Limited Public Offering III received by the Bank until December 31, 2013 amounted to Rp587,490 and until January 9, 2014 amounted to Rp730,126.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 22 Mei 2018, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV melalui surat No.S-92/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018. Pada tanggal 2 Juli 2018, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 10400/SKPR/X/2018 dalam rangka Penyampaian penerbitan Saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham.

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp570 (nilai penuh) per saham.

Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 - 25 Juli 2018. Hingga tanggal 27 Juli 2018, Bank telah menerima dana dari PUT IV sebesar Rp1.462.214 yaitu dari Kookmin Bank sebesar Rp1.460.910 dan dari Publik sebesar Rp1.304. Berdasarkan surat dari PT Datindo Entrycom mengenai komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juli 2018, dana dari Kookmin Bank telah dicatatkan sebagai peningkatan modal disetor sebesar 2.565.288.316 saham biasa kelas B.

Pada tanggal 29 Juni 2020 Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui aplikasi Sprint OJK. PUT V akan menerbitkan 4.660.763.499 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan nilai penawaran Rp180 (nilai penuh) per saham.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On May 22, 2018, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering IV with pre-emptive rights. The Bank received the effectivity statement from the Financial Services Authority to conduct Limited Public Offering IV through its letter No. S-92/D.04/2018 dated June 29, 2018. On July 2, 2018, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering IV through letter No. 10400/SKPR/X/2018 to The Financial Services Authority, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders.

Total shares offered were 2,725,986,130 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp570 (full amount) per share.

The Limited Public Offering (LPO) IV was held on July 13, 2018 to July 25, 2018. Until July 27, 2018, the Bank has received proceed from LPO IV amounting to Rp1,462,214, consist of Kookmin Bank amounting to Rp1,460,910 and from Public of Rp1,304. Based on letter from PT Datindo Entrycom regarding the composition of shareholders as of July 30, 2018, the proceed from Kookmin Bank has been registered as increase in paid-up capital amounting to 2,565,288,316 common B shares.

On June 29, 2020 Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering (LPO) V to The Financial Services Authority (FSA) through Sprint OJK. LPO V will issue 4,660,763,499 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp180 (full amount) per share.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 2 September 2020 Bank telah melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan menerbitkan saham baru sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham yang diambil bagian oleh KB Kookmin Bank Co., Ltd.

Pada tanggal 8 November 2021 Bank telah mendapatkan Pernyataan Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PUT VI sendiri telah menerbitkan 35.214.288.984 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 9 Juni 2023 Bank telah mendapatkan Pernyataan Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PUT VI sendiri telah menerbitkan 119.999.999.692 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

Tindakan Bank yang memengaruhi modal ditempatkan dan disetor penuh dalam saham biasa kelas B sejak Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On September 2, 2020, the Bank held Pre-emptive Rights (PMTHMETD) and issued 16,360,578,947 new shares (sixteen billion three hundred sixty million five hundred seventy eight thousand nine hundred and forty seven) class B shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share subscribed by KB Kookmin Bank Co., Ltd.

On November 8, 2021, the Bank has obtained an Effective Statement related to the Limited Public Offering (PUT) VI from the Financial Services Authority (OJK). PUT VI itself has issued 35,214,288,984 new class B ordinary shares ("New Shares") with a nominal value of Rp100 (full amount) per share.

On June 9, 2023, the Bank has obtained an Effective Statement related to the Limited Public Offering (PUT) VI from the Financial Services Authority (OJK). PUT VI itself has issued 119,999,999,692 new class B ordinary shares ("New Shares") with a nominal value of Rp100 (full amount) per share.

The Bank's action which affects issued and fully paid capital in common B shares from Initial Public Offering of shares up to December 31, 2023 are as follows:

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares*
31 Desember 2005/ *December 31, 2005*	Total saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana/ *Total shares before Initial Public Offering*	4.760.000.050
30 Juni 2006/ *June 30, 2006*	Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham/ *Initial Public Offering of shares of 843,765,500 shares*	5.603.765.550
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2007/*30 trading days starting July 10, 2007*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 47.864.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 47,864,000 shares*	5.651.629.550

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares*
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2007/*30 trading days starting November 1, 2007*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 39.370.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 39,370,500 shares*	5.691.000.050
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2008/ *30 trading days starting July 10, 2008*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 740.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 740,500 shares*	5.691.740.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2008/30 trading days *starting November 1, 2008*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 780.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 780,500 shares*	5.692.521.050
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2009/ *30 trading days starting July 10, 2009*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 7.156.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 7,156,500 shares*	5.699.677.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2009/30 trading days *starting November 1, 2009*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 1.092.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 1,092,000 shares*	5.700.769.550
26 November 2009/ *November 26, 2009*	Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 286.050.768 lembar saham/ *Limited Public Offering I with the Issuance of Pre-emptive Rights of 286,050,768 shares*	5.986.820.318
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2010/ *30 trading days starting July 10, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 129.687.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 129,687,500 shares*	6.116.507.818
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2010/*30 trading days starting November 1, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 16.254.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 16,254,500 shares*	6.132.762.318
26 Januari 2011/ *January 26, 2011*	Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.787.960.495 lembar saham/ *Limited Public Offering II with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,787,960,495 shares*	7.920.722.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2011/ *30 trading days starting July 10, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 12.705.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 12,705,000 shares*	7.933.427.813
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2011/*30 trading days starting November 1, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 269.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 269,000 shares*	7.933.696.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2012/ *30 trading days starting July 10, 2012*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 14.346.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 14,346,000 shares*	7.948.042.813

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares*
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2012/*30 trading days starting November 1, 2012*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 680.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 680,500 shares*	7.948.723.313
30 hari bursa sejak tanggal 2 Januari 2013/*30 trading days starting January 2, 2013*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 352.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 352,500 shares*	7.949.075.813
30 hari bursa sejak tanggal 25 Mei 2013/ *30 trading days starting May 25, 2013*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 9.954.500 embar saham/ *Exercise of management stock option program of 9,954,500 shares*	7.959.030.313
7 Januari 2014/ January 7, 2014	Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah1.106.252.141 lembar saham/ *Limited Public Offering III with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,106,252,141 shares*	9.065.282.454
27 Juli 2018/ *July 27, 2018*	Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 2.565.288.316 lembar saham/ *Limited Public Offering IV with the Issuance of Pre-emptive Rights of 2,565,288,316 shares*	11.630.570.770
29 Juni 2020/ *June 29, 2020*	Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 4.660.763.499 lembar saham/ *Limited Public Offering V with the Issuance of Pre-emptive Rights of 4,660,763,499 shares*	16.291.334.269
2 September 2020/ *September 2, 2020*	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sejumlah 16.360.578.974 lembar saham/ *Non Pre-Preemptive Private Placement with the Issuances of 16,360,578,974 shares*	32.651.913.243
2 Desember 2021/ *December 2, 2021*	Penawaran Umum Terbatas VI dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 35.214.288.984 lembar saham/ *Limited Public Offering VI with the Issuance of Pre-emptive Rights of 35,214,288,984 shares*	67.866.202.200
9 Juni 2023/ *June 9, 2023*	Penawaran Umum Terbatas VII dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 119.999.999.692 lembar saham/ *Limited Public Offering VI with the Issuance of Pre-emptive Rights of 119,999,999,692 shares*	187.866.201.892

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas anak ("Grup") adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

2. Material Accounting Policy Information

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Bank and it's subsidiaries (the "Group") are set out below:

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Kovensional (BPAK), Panduan Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan Syariah disajikan sesuai dengan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", ISAK 102 (Amendemen 2013) tentang "Akuntansi Murabahah", ISAK 103 tentang "Akuntansi Salam", ISAK 104 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Istishna", ISAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", ISAK 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", ISAK 107 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", ISAK 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI") yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dengan Bank Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, The Banking Accounting Handbook for Conventional Commercial Banks (BPAK) and the Islamic Banking Accounting Guide (PAPSI). and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements".

The subsidiary's financial statements which operates under Sharia banking have been presented in accordance with Implementation of Financial Accounting Standards ("IFAS") 101 (Revised 2016) regarding "Sharia Financial Statements Presentation", IFAS 102 (Amendment 2013) regarding "Murabahah Accounting", IFAS 103 regarding "Salam Accounting", IFAS 104 (Amendment 2016) regarding "Istishna Accounting", IFAS 105 regarding "Mudharabah Accounting", IFAS 106 regarding "Musyarakah Accounting", IFAS 107 (Amendment 2016) regarding "Ijarah Accounting", IFAS 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", and Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines ("PAPSI") as issued under the cooperation between Indonesian Institute of Accountants and Bank Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for certain accounts which are valued on other measurement basis as described in the accounting policies for such accounts. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method which presents receipts and payments of cash and cash equivalents which are classified into operating, investing, and financing activities.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang memengaruhi:
- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Perhitungan cadangan kerugian

Saat mengukur Cadangan Kerugian Ekspektasian (ECL), Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:
- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements;
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The most significant uses of the judgment and estimates in determining the amounts recognized in the consolidated financial statements are as follows:

Calculation of loss allowance

When measuring Expected Credit Losses (ECL), the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit increase.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' ("SPPI") dan uji model bisnis (lihat bagian aset keuangan pada Catatan 2d). Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2d atas laporan keuangan konsolidasian.

Nilai wajar atas instrumen keuangan (Catatan 46)

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Business model assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model test (please see financial assets sections of Note 2d). The Group determines the business model at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgement reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Group monitors financial assets measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by considering the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group accounting policies as disclosed in Note 2d to the consolidated financial statements.

Fair value of financial instruments (Note 46)

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Grup mereviu kredit yang diberikan dan piutang yang signifikan secara individual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat pada laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi neto agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang cadangan penurunan nilai tersebut.

Grup mereviu efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individual pada kredit yang diberikan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics, but the individually impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and forecast on future economic condition. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.

The Group review their individually significant loans and receivables at each consolidated statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the profit or loss. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Group make judgments about the debtor's financial situation and the net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment losses.

The Group review their debt securities classified as measured at fair value through profit or loss, measured at fair value through other comprehensive income, and measured at amortised costs investments at each consolidated statement of financial position date to assess whether they are impaired. This requires similar judgment as applied to the individual assessment of loans.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (Catatan 13, 14, dan 15)

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu mana yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Aset pajak tangguhan (Catatan 21.d)

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Liabilitas kesejahteraan karyawan (Catatan 37)

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset, tingkat kenaikan penghasilan, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain.

Penyusutan aset tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap Grup antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri perbankan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2p dan 13.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Impairment of non-financial assets (Notes 13, 14, and 15)

The Group evaluate impairment of non-financial assets if there is event or change in circumstance that may indicate that the carrying amount of the non-financial assets may not be recovered.

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Unit ("CGU") exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Deferred tax assets (Note 21.d)

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits, together with future tax planning strategy.

Liability for employee service entitlements (Note 37)

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on plan assets, salary increase rate, mortality rate, resignation rate, and others.

Depreciation of fixed assets

Management properly estimates the useful lives of the Group's fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the banking industries. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2p and 13.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Revaluasi atas tanah (Catatan 13)

Grup menggunakan penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah. Tanah dinilai dengan mengacu kepada bukti berdasarkan pasar, menggunakan harga yang sebanding setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

Estimasi masa sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank dan laporan keuangan entitas anak.

Pengendalian diperoleh ketika Bank terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaan yang dimiliki.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha entitas yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian atas entitas tersebut berakhir.

Dalam mencatat akuisisi entitas anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Biaya transaksi, selain biaya yang berhubungan dengan penerbitan instrumen utang atau ekuitas yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan kombinasi bisnis, dibebankan pada saat terjadinya. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset neto entitas anak dicatat sebagai goodwill (Catatan 2q.i untuk kebijakan akuntansi atas goodwill).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Revaluation of land (Note 13)

The Group use an independent appraiser to assess the fair value of the lands. Lands are valued by referencing to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific markets factors such as the location and condition of the land.

Estimation of lease term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise atermination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Bank and financial statements of its subsidiaries.

Control is achieved when the Bank is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Where an entity either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of that entity are included into theconsolidated financial statements only from the date that the control commenced or up to the date that control ceased.

The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiary. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets given up, shares issued or liabilities assumed at the date of acquisition. Transaction cost, excluding debt or equity instrument issuance cost which is borne by the Bank in relation with business combination, is charged to expense when incurred. The excess of the cost of acquisition over the fair value of the net assets of the subsidiary acquired is recorded as goodwill (Note 2q.i for the accounting policy on goodwill).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antar entitas dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali. Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal-tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan pada bagian ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

All significant intercompany balances and transactions, including unrealized gain/loss, are eliminated to reflect the financial position and results of operations of the Group as one business entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniformed accounting policy for transactions and events in similar circumstances. The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the subsidiaries, unless otherwise stated.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interest. Total comprehensive income is attributable to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

c. Foreign currency translations

i. Presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Group.

ii. Transactions and balances

Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah using the spot rate at those transaction dates. At the reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated using the reporting (closing) rate determined by Bank Indonesia based on the Reuters spot rate at 16.00 Western Indonesia Time ("WIB") prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Selisih penjabaran mata uang asing atas efek utang dan aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran jumlah dalam mata uang asing ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022	
Poundsterling Inggris	19.626	17.022	Great Britain Poundsterling
Euro Eropa	17.038	14.972	European Euro
Dolar Amerika Serikat	15.397	15.228	United States Dollar
Dolar Singapura	11.676	10.644	Singapore Dollar
Dolar Australia	10.521	9.901	Australian Dollar
China Yuan	2.170	2.146	Chinese Yuan
Dolar Hong Kong	1.970	1.940	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	109	106	Japanese Yen
Won Korea Selatan	12	11	South Korean Won

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan derivatif, surat-surat berharga dengan janji dijual kembali, tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan saham, bunga yang masih akan diterima, dan aset lain-lain (setoran jaminan).

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, bunga yang masih harus dibayar, dan liabilitas lain-lain.

(i) Klasifikasi

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL);
- Diukur pada biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Foreign currency translations (continued)

Translation differences on debt marketable securities and other monetary financial assets measured at fair value are included in foreign exchange gains and losses.

Below are the major exchange rates used for translation of foreign currency amounts into Rupiah as at December 31, 2023 and December 31, 2022:

d. Financial assets and liabilities

The Group's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, derivative receivables, marketable securities purchased with agreement to resell, marketable securities receivables purchased with agreement to re-sell, bills and other receivables, loans and sharia receivables financing, acceptances receivable, investments in shares, interest receivables, and other assets (guarantee deposit).

The Group's financial liabilities consist of liabilities immediately payable, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payable, marketable securities sold under agreement to repurchase, acceptances payable, marketable securities issued, borrowings, interest payable, and other liabilities.

(i) Classification

Financial assets are classified into the following categories on initial recognition:

- Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);
- Amortized cost; and
- Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan hanya dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika instrumen dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual ("hold to collect"), dan dimana arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- *Fitur leverage*; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas.

Aset dapat dijual dari *portofolio hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Financial assets can only be held at amortized cost if the instruments are held in order to collect the contractual cash flows ("hold to collect"), and where those contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI). Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features; and
- Prepayment and extension terms.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset ("*hold to collect and sell*") dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVTOCI, dengan laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut diberhentikan.

Seluruh aset keuangan lainnya akan dipersyaratkan diklasifikasikan sebagai FVTPL. Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi accounting mismatch.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(ii) Pengukuran awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial asset debt instruments where the business model objectives are achieved by collecting the contractual cash flows and by selling the assets ("hold to collect and sell") and that have SPPI cash flows are held at FVTOCI, with unrealized gains or losses deferred in other comprehensive income until the asset is derecognized.

All other financial assets will mandatorily be held at FVTPL. Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces an accounting mismatch.

Management determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that the companies commit to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets and liabilities not measured at fair value through profit and loss plus directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengukuran awal (lanjutan)

jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

a. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
   - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.

(iii) Subsequent measurement

a. Fair value through other comprehensive income financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.
b. Financial assets and other financial liabilities which are measured at amortised cost, are measured at amortised cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
   - The contractual rights to receive cashflows from the financial assets have expired; or

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan
- antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau
- (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (pass-through arrangement), dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and
- either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or
- (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi konsolidasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

a. Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurun nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

a. For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized directly in the statement of comprehensive income (as part of equity) until the financial assets are derecognized or impaired, except for the gain or loss resulting from the change in exchange rates for debt instruments.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive income are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassifications of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gain or losses are removed from equity and are adjusted againts the fair value.

Reclassifications of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group have a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legal enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cummulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Metode dan asumsi signifikan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut: (i) jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut, atau (ii) jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Grup menentukan nilai wajar dengan menggunakan model penilaian

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Amortized cost measurement (continued)

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell an asset or paid to transfer a liability takes place either:

- in the principal market for the assets and liabilities; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

(ix) Fair value measurement

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when determining the price of the asset and liability assuming that market participants act in their own economic best interest.

The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are classified within fair value hierarchy, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1: quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 for the asset and liability, which is directly or indirectly observable.
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

The methods and significant assumptions used to determine the fair value of financial instruments are as follows: (i) where available, the Group measures the fair value of financial instruments using quoted prices in an active market for that instrument, or (ii) if the market is for a financial instrument is inactive, the Group determines fair value using valuation model that most appropriately reflects the nature,

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar

yang paling tepat mencerminkan sifat, karakteristik dan risiko dari masing-masing instrumen keuangan. Selain itu, ketika menggunakan harga kuotasian yang diperoleh dari pihak ketiga, Grup memverifikasi apakah harga tersebut valid dengan menggunakan metode yang tepat, seperti konfirmasi teknik penilaian dan input yang digunakan dan membandingkannya dengan nilai wajar instrumen keuangan serupa.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

(x) Investasi pada sukuk

Grup menerapkan PSAK 110 (Revisi 2020) "Akuntansi Sukuk". PSAK 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk Ijarah dan sukuk mudharabah.

Pengakuan dan Pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Grup. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- Biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement

characteristics and risks of each financial instrument. In addition, when using quoted prices obtained from third parties, the Group verifies whether the prices are valid using appropriate methods, such as confirming the valuation techniques and inputs used and comparing them with the fair value of similar financial instruments.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, Group determine whether transfers have occured between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

(x) Investment in sukuk

The Group has applied SFAS 110 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk". SFAS 110 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk Ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and Measurement

Before the initial recognition, the Group determine the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Groups' investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

- Acquisition cost

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortised cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the term of the sukuk instrument.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Investasi pada sukuk (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hierarki sebagai berikut:

i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i).

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Grup mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Grup mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Investment in sukuk (continued)

- Fair value through profit or loss

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which does not include transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

- Fair value through other comprehensive income

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which includes transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the term of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

i. quoted price (excluding any adjustment) in active market, or
ii. other input other than quoted price included in (i).

For investment in sukuk classified as at acquistion cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Group measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Group recognize the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Investasi pada sukuk (lanjutan)

Reklasifikasi

Grup tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Grup. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (ujrah) dari sukuk Ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Grup menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

e. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Investment in sukuk (continued)

Reclassification

The Group cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Group. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk mudharabah or benefit cash flow (ujrah) from sukuk Ijarah. After initial recognition, if the actual differs from the investment purpose initially set by the Group, then the Group reconsider the consequences of the revised investment purpose.

e. Cash and cash equivalents

For consolidated statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, and placements with Bank Indonesia and other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted for use.

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other Banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

h. Surat-surat berharga

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), wesel ekspor, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan efek utang lainnya.

Surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai kategorinya, yaitu nilai wajar melalui laba rugi, pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga diukur pada nilai perolehan dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

   Aset dapat dijual dari portofolio diukur pada nilai perolehan ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

2. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

   Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat-surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

h. Marketable securities

Marketable securities consist of Bank Indonesia Certificates (SBI), export bills, government bonds, corporate bonds, and other debt marketable securities.

Sharia marketable securities are classified as measured at amortised cost.

Marketable securities are initially measured at fair value. Subsequently, marketable securities are accounted for depending on their classification as fair value through profit or loss, measured at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

Measurement of securities is stated based on the classification of the securities as follows:

1. Marketable securities measured at amortised cost are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

   Assets may be sold out of amortized cost portfolios when there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

2. Marketable securities which are classified under fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on securities are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

   Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities is sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

h. Surat-surat berharga (lanjutan)

3. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

   Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat-surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diakui sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dengan harga jual diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan jangka waktu surat berharga dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Surat berharga yang dibeli tidak dibukukan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena kepemilikan surat berharga tetap berada pada pihak penjual. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diakui sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi. Beban bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli kembali yang disepakati dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga dijual hingga dibeli kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Surat berharga yang dijual tetap dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi kepemilikan surat berharga tetap berada pada pihak Bank sebagai penjual. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

h. Marketable securities (continued)

3. Fair value through profit or loss marketable securities are carried at fair value.

   Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from marketable securities is recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

i. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase

Securities purchased under agreements to resell (reverse repo) are recognized as a repo receivable in the amount of the resale price of the related securities, less unamortized interest. The difference between purchase price and the selling price is treated as unamortized interest and is recognized as interest income in accordance with the period since the securities are purchased until they are resold by using effective interest rate (EIR) method. The securities received are not recorded as assets on the consolidated statements of financial position because the ownership of the securities remains with the seller. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

Marketables securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities sold under repurchase (repo) agreements are recognized at the agreed repurchase price less unamortized interest. The unamortized interest represents the difference between the selling price and the agreed repurchase price and is recognized as interest expense during the period from the sale of securities to the date of repurchase by using Effective Interest Rate (EIR) method. The securities sold are recorded as assets on the consolidated statements of financial position because in substance the ownership of the securities remains with the Bank as the seller. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

j. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) diakui sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui pada laba rugi. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Grup.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama, dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

i. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase (continued)

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

j. Derivative instruments

Derivative financial instruments (including foreign currency transactions for funding and trading) are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair value. Fair value is determined based on quoted prices, pricing models or quoted prices of other instruments with similar characteristics. Derivatives are recorded as assets when the fair value is positive and liabilities when the fair value is negative.

Gain or loss as a result of fair value changes on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year's profit or loss.

k. Loans

Loans are measured at amortised cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

Loans are classified as amortized costs. Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Group.

Syndicated, joint financing, and channeling loans are stated at the loan principal amount based on the risk participation by the Bank.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

k. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit

Setelah syarat dan ketentuan kredit direnegosiasi, penurunan nilai diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang dihitung sebelum persyaratan dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dianggap "*past due*". Manajemen akan melakukan penelaahan ulang atas kredit yang direnegosiasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi dan pembayaran di masa datang akan terjadi. Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk kredit tersebut, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas kredit.

Kerugian dari restrukturisasi kredit dengan cara konversi sebagian kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi beban untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Kredit yang dihapusbuku

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

l. Pembiayaan/Piutang syariah

Termasuk dalam pembiayaan/piutang syariah adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang syariah.

Entitas anak Bank menerapkan ISAK 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", ISAK 102 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", ISAK 103 tentang "Akuntansi Salam", ISAK 104 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi Istishna", ISAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", ISAK 106 tentang "Akuntansi

2. Material Accounting Policy Information (continued)

k. Loans (continued)

Loan restructuring

After the terms of loans have been renegotiated, any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered "past due". Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, following the impairment assessment of loans.

Loss on loan restructuring which involves a conversion of loans into equity or other financial instruments in partial satisfaction of loans, is recognized only if the fair value of the equity or financial instruments received, reduced by estimated expenses to sell the equity or other financial instruments, is less than the carrying value of the loan.

Written-off loans

Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the Group's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries are credited to the allowance for impairment losses in the consolidated statement of financial position.

l. Sharia financing/Receivables

Sharia financing/receivables include mudharabah financing, musyarakah financing, and sharia receivables.

The Bank's subsidiary implements IFAS 101 (Revised 2016) regarding "Sharia Financial Statements Presentation", IFAS 102 (Amendment 2016) regarding "Murabahah Accounting", IFAS 103 regarding "Salam Accounting", IFAS 104 (Amendment 2016) regarding "Istishna Accounting", IFAS 105 regarding "Mudharabah Accounting", IFAS 106

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

I. Pembiayaan/Piutang syariah (lanjutan)

Musyarakah", ISAK 107 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", ISAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Standar Akuntansi Keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk topik tersebut.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara entitas anak Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut dilakukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad murabahah, istishna, qardh, dan ijarah.

Piutang murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dan entitas anak Bank. Entitas anak Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang murabahah dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

I. Sharia financing/Receivables (continued)

regarding "Musyarakah Accounting", IFAS 107 (Amendment 2016) regarding "Ijarah Accounting", IFAS 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) and other statement of Financial Accounting Standards established by the Indonesia Institute of Accountants relating to recognition, measurement, presentation, and disclosure for those topics.

Mudharabah financing represents joint financing between the Bank's subsidiary as a fund owner and customer as a business executor. Revenue sharing on the project or business is conducted in accordance with the agreed nisbah (pre-determined ratio). Mudharabah financing are stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Musyarakah financing is an agreement between the investors (musyarakah partners) to have a joint venture in a partnership with profit or loss sharing based on an agreement or proportionate capital contribution. Musyarakah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Sharia receivables resulted from transactions based on murabahah, istishna, qardh, and ijarah.

Murabahah receivables represent sale and purchase agreements between the borrowers and the Bank's subsidiary. The borrowers' investments are funded by the Bank's subsidiary valued at the main price increased with profit agreed by both parties. The financing facilities are repaid in installments over a certain period of time. Murabahah receivables are stated at their outstanding balance, net of deferred margin and allowance for losses.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

l. Pembiayaan/Piutang syariah (lanjutan)

Istishna merupakan akad penjualan antara nasabah dan produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, nasabah menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Entitas anak Bank membiayai nasabah untuk membeli barang dari produsen (penjual). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Piutang istishna disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi cadangan kerugian.

Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan entitas anak Bank, dengan ketentuan wajib untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman qardh yang dilunasi, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Pembiayaan Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Pembiayaan Ijarah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan

Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Piutang pembiayaan konsumen entitas anak merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

l. Sharia financing/Receivables (continued)

Istishna is a sales transaction between the customer and producer who acts as seller. Based on the contract, the customer orders the manufacturer to make or to supply goods ordered to the specifications required by the customer and to sell to the customer at an agreed price. The Bank's subsidiary finances the customer to buy from the producer (seller). The payment method may be in advance, installment or deferred until a certain period. Istishna receivables are presented based on the outstanding billing less allowance for losses.

Qardh is a fund supply or receivables which can be equalized based on the approval or agreement between the customer and the Bank's subsidiary, with the requirement for repayment after a certain period. Qardh is recognized at the amount of funds granted when incurred. The excess of qardh settlement is recognized as income when incurred. Qardh is stated at its outstanding balance net of allowance for losses.

Ijarah financing is an agreement between the lessor and lessee to receive income on leased item. Ijarah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables

Consumer Financing Receivables

Consumer financing receivables are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. Allowance for impairment loss is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

The subsidiary's consumer financing receivables are presented net of unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Piutang Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dicatat sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan beban-beban yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan tagihan pembiayaan konsumen ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laba rugi tahun berjalan.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Piutang Sewa Pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables (continued)

Consumer Financing Receivables (continued)

Unearned consumer financing income is the excess of the aggregate installment payments to be received from the consumer over the principal amount financed. The unearned consumer financing income is recognized as income over the term of the respective agreement using effective interest rate method.

The net difference between the administration income earned from the consumer at the first time the consumer financing agreement is signed and the initial incremental costs directly related to consumer financing facility is deferred and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as part of interest income in the current year's profit or loss.

Termination before consumer financing period end is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is recognized in the current year's profit or loss.

Leases Financing Receivables

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases are classified as finance leases if the leases transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Piutang Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Entitas anak mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto. Entitas anak bertindak sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o). Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan atas kerugian ekspektasian sepanjang umur aset (the lifetime expected credit loss), kecuali tidak terdapat kenaikan yang signifikan dalam risiko kredit sejak awal, di mana dalam hal ini, cadangan adalah berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan.

Kerugian yang diharapkan sepanjang umur aset dan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan dihitung baik secara individual maupun kolektif, tergantung kepada sifat portofolio instrumen keuangan yang mendasarinya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables (continued)

Leases Financing Receivables (continued)

The subsidiary recognizes assets held under a financing lease in its statement of financial position and presented them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Payment of the lease receivable is treated as repayment of principal and financing lease income. The recognition of financing lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the subsidiary's net investment in the financing lease. The subsidiary acts as a lessor in finance leases.

n. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o). Acceptances payable are measured at amortised cost using effective interest rate method.

o. Impairment of financial and non-financial assets

Impairment of Financial Assets

The Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired at each consolidated statement of financial position date.

The expected credit loss allowance is based on the credit losses expected to arise over the life of the asset (the lifetime expected credit loss), unless there has been no significant increase in credit risk since origination, in which case, the allowance is based on the 12 months expected credit loss.

Both the lifetime expected credit loss and 12 months expected credit loss are calculated on either an individual basis or a collective basis, depending on the nature of the underlying portfolio of financial instruments.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tiga skenario yang tertimbang menurut kemungkinan terjadinya untuk mengukur kekurangan kas yang diharapkan, didiskontokan pada suatu estimasi terhadap suku bunga efektif. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang harus dibayar kepada suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas dari entitas bersangkutan yang diharapkan untuk diperoleh.

Grup telah menyusun suatu kebijakan untuk melakukan suatu penilaian, pada akhir setiap periode pelaporan, mengenai apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan, Dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur manfaat instrumen keuangan.

Grup menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The Group calculates expected credit loss based on three probability-weighted scenarios to measure the expected cash shortfalls, discounted at an approximation to the effective interest rate. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive.

The Group has established a policy to perform an assessment, at the end of each reporting period, of whether a financial instruments credit risk has increased significantly since initial recognition, by considering the change in the risk of default occurring over the remaining life of the financial instrument.

The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

Measurement of expected credit losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk).

Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Restructured financial assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:
- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.

- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit- impaired (worsening).

Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;
- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (lanjutan)

- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (Purchased or originated credit- impaired financial assets - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada cadangan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian cadangan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Cadangan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, cadangan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, cadangan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian cadangan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Credit-impaired financial assets (continued)

- It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization;
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties; or
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

Purchased or originated credit- impaired financial assets - POCI

Financial assets are catergorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the consolidated statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of allowance for expected credit losses in statements of financial position

Allowance for expected credit losses is presented in the consolidated statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortised cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/POJK.03/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Untuk aset keuangan entitas anak berdasarkan prinsip perbankan Syariah, entitas anak Bank menerapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

For the financial assets of subsidiary under Sharia Banking principles, the Bank's subsidiary applies Financial Services Authority regulation ("POJK") No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Assessment of Sharia Bank and Sharia Business Unit" effective starting January 1, 2015.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Berdasarkan peraturan tersebut, entitas anak Bank wajib membentuk cadangan kerugian sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Khusus untuk piutang murabahah yang merupakan pembiayaan, entitas anak Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai dan mengakui kerugian penurunan nilai sesuai dengan ISAK 102 (Revisi 2013) yang mengacu pada PSAK 55 (Revisi 2014), sedangkan cadangan kerugian aset produktif lainnya dibentuk sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase minimum cadangan kerugian/ *Minimum percentage of allowance for losses*	Classification
Lancar	1%	Current
Dalam perhatian khusus	5%	Special mention
Kurang lancar	15%	Sub-standard
Diragukan	50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Cadangan khusus dibentuk atas aset produktif yang di klasifikasikan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dihitung atas nilai aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Grup, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets (continued)

Based on the regulation, the Bank's subsidiary is required to provide an allowance for losses based on prevailing financial accounting standards. Specifically for murabahah receivables that represents financing, the Bank's subsidiary evaluates whether there is objective evidence of impairment and recognizes the impairment losess based on IFAS 102 (Revised 2013) which referring to SFAS 55 (Revised 2014), while the allowance for losses for other earning assets is provided as follows:

Specific allowance for earning assets on earning assets classified as special mention, sub-standard, doubtful, and loss, is calculated based on principal of the earning assets after deducting the value of collateral.

Impairment of Non-financial assets

The carrying amounts of the Group's non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount will be estimated.

The recoverable amount of an asset or Cash Generating Unit (CGU) is greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi tahun berjalan. Penyisihan penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan UPK akan dialokasikan pertama kali untuk mengurangi nilai tercatat dari goodwill yang dialokasikan ke UPK dan kemudian mengurangi nilai tercatat dari aset lainnya di dalam unit tersebut (kelompok unit) secara pro rata.

Penyisihan penurunan nilai sehubungan dengan goodwill tidak dapat dijurnal balik. Sehubungan dengan aset lainnya, penyisihan penurunan nilai yang diakui pada tahun sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Grup menerapkan Peraturan OJK No. 40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah. Untuk aset tetap selain tanah menggunakan model biaya. Sebelum 1 Maret 2016, tanah disajikan sebesar biaya perolehan.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets (continued)

An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss. Impairment losses in respect of CGUs are allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU and then to reduce the carrying amount of the other assets in the units (group of units) on a pro rate basis.

An impairment losses in respect of goodwill can not be reversed. In respect of other assets, impairment losses recognized in prior period are assessed at each reporting date for any indications that the losses has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been change in the estimates used to determine the recoverable amount.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Group implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities

The Group applies revaluation model as accounting policy for land. For fixed assets other than land, cost model is applied. Prior to March 1, 2016, land is stated at cost.

Lands are stated at fair value. Valuation of lands is performed by external independent valuers with certain qualification. Valuation is performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" dan disajikan sebagai "penghasilan komprehensif lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus revaluasi aset", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus revaluasi aset" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Grup melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi dan pajak. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan surplus revaluasi aset di ekuitas.

Aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*) selama estimasi manfaat aset tersebut sebagai berikut:

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revaluated asset does not change significantly, it is necessary to revaluate at a minimum of every 3 years.

Increase in the carrying amount arising from revaluation of land is recorded in "Asset revaluation surplus" and presented as "other comprehensive income". Decrease in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset has "Asset revaluation surplus", loss from revaluation of asset is charged to "Asset revaluation surplus" balance and the remaining balance is charged to current year's expenses.

The Group conduct revaluation for accounting and tax purposes. The related tax paid is recognized in other comprehensive income and asset revaluation surplus in equity.

Fixed assets, except land which is not depreciated, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is computed using the straight line method over the expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	Buildings
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	Furniture, fixtures, and office equipment
Kendaraan bermotor	4 - 8	Motor vehicles
Prasarana bangunan	sesuai masa sewa mana yang lebih rendah dibandingkan umur ekonomis/ *based on the lease period whichever is shorter of economic life*	Leasehold improvement

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Biaya-biaya sehubungan dengan pengurusan perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Aset dalam konstruksi merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah terjadi.

Estimasi masa manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup melakukan penelaahan pada akhir tahun untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset. Grup menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aset yang dimiliki apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai rugi penurunan nilai dalam laba rugi tahun berjalan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Significant renewals and betterments are capitalized when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing assets will flow to the Group. When assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciations are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The expenses incurred in relation with the extension of land right are deferred and amortized over the term of the land rights.

Assets under construction represents assets in progress of construction and not yet ready for use, and intended to be used in business activity. The assets are recorded based on the incurred cost.

Estimated useful lives, depreciation method, and residual value are reviewed at end of each reporting period and adjusted prospectively, if appropriate.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

The Group conduct a review at the end of the year to determine whether there are indications of asset impairment. The Group calculate the estimated recoverable amount of all their assets and determines if there is a decrease in the value of the assets and recognize an impairment loss on such assets to the current year's profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Grup mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written-down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of the contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognized the right use assets and lease liabilities for:

- leases with a term of less or equal to 12 months and there is no purchase option;
- leases of low value assets.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to operate the assets and
- The Group has designed the assets in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The Group recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. Meanwhile, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received.

Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Group and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Group exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not dependt on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

q. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari goodwill dan piranti lunak.

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use asset are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS 48 “Asset Impairment”.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the lessee’s incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and reduce the lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS 73 will be treated the same as operating leases in SFAS 30. The Group will recognize these lease payments on a straight line basis during the lease period on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

q. Intangible assets

Intangible assets consist of goodwill and softwares.

Intangible assets are recognized if, and only if when its cost of the asset can be measured reliably and it is probable that expected future benefits that are attributable to such assets will flow to the Group.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

q. Aset takberwujud (lanjutan)

i. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian Bank atas nilai wajar aset neto entitas anak pada tanggal akuisisi. Kerugian yang menjadi bagian dari kepentingan non-pengendali pada suatu entitas anak yang melebihi bagiannya dalam modal disetor pada tanggal akuisisi, diperhitungkan sebagai bagian dari goodwill.

Goodwill diukur sebesar nilai tercatat dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai seperti diungkapkan pada Catatan 2o.

ii. Piranti Lunak

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa datang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan saat terjadinya.

Piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

q. Intangible assets (continued)

i. Goodwill

Goodwill represents the difference between the acquisition cost of an investment and the Bank's share of the fair value of the net assets of the subsidiary as of the date of acquisition. The losses applicable to the non-controlling interest in a subsidiary that exceed its interests in the equity of the subsidiary at the acquisition date, is calculated as part of goodwill.

Goodwill is measured at carrying value less accumulated impairment losses as disclosed in Note 2o.

ii. Softwares

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as inccured.

Software is amortized using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 4 (four) years. Amortization is recognized from the date when the asset is available for use.

An intangible asset shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset.

The gain or loss shall be recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

r. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya dibayar dimuka, bunga masih akan diterima, agunan yang diambil alih, dan lain-lain.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan atau nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih. Nilai realisasi neto adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatat agunan yang diambil alih dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Grup yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

t. Simpanan nasabah

Giro, tabungan, dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

r. Other assets

Other assets consist of advance payments, prepaid expenses, interests receivable, foreclosed assets, and others.

Foreclosed assets are stated at net realizable value or at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated costs of liquidating the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed assets is charged to the allowance for impairment losses.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from the sale of such properties is recorded as gain or loss at the time of sale.

Expenses for maintaining foreclosed assets are charged in the profit or loss as incurred.

The carrying amount of the foreclosed assets is written-down to recognize a permanent decline in value of the foreclosed assets. Any such write-down is charged to the current year's profit or loss.

s. Liabilities immediately payable

Liabilities immediately payable represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Liabilities immediately payable are measured at their amortized cost using effective interest rate method.

t. Deposits from customers

Demand deposits, savings deposits, and time deposits are classified as liabilities measured at amortised cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from customers and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

u. Simpanan syariah

Simpanan syariah terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA), tabungan dan deposito berjangka mudharabah.

Giro wadiah merupakan titipan dana pihak ketiga yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan entitas anak Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di entitas anak Bank.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan entitas anak Bank. Tabungan wadiah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di entitas anak Bank.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan entitas anak Bank. Deposito berjangka mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal.

Tabungan mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan entitas anak Bank. Deposito berjangka mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal.

v. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk tabungan, giro, interbank call money yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak lebih dari 90 hari, dan deposito berjangka.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

u. Sharia deposits

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits, wadiah savings deposits, Certificate of Inter Bank Mudharabah Investment (SIMA), mudharabah savings and time deposits.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which earn bonus based on the subsidiary of the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts due to the depositors in Bank's subsidiary.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the subsidiary of the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the investment amounts due to the depositors in Bank's subsidiary.

The Interbank Mudharabah Investment Certificate (IMA certificate) is defined as a certificate issued by a sharia bank or Sharia Business Unit which is used as a means of short-term investment in PUAS with a mudharabah contract.

Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing in return for utilization of funds in accordance with pre-determined and pre-approved revenue sharing (nisbah).

Mudharabah time deposits represent deposits from third parties which can be withdrawn only at specified dates based on the agreement between the depositors and the Bank's subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amounts.

Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing in return for utilization of funds in accordance with pre-determined and pre-approved revenue sharing (nisbah).

Mudharabah time deposits represent deposits from third parties which can be withdrawn only at specified dates based on the agreement between the depositors and the Bank's subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amounts.

v. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of saving deposits, demand deposits, interbank call money with original maturities of 90 days or less, and time deposits.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

v. Simpanan dari bank lain (lanjutan)

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan investasi tidak terikat yang terdiri dari deposito berjangka mudharabah.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, bank lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

x. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal surat berharga yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

v. Deposits from other banks (continued)

Deposits from other banks are classified as liabilities measured at amortised cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently are measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other Banks and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Deposits from other banks include Sharia deposits in the form of wadiah demand deposits, mudharabah savings deposits, and unrestricted investments which consist of mudharabah time deposits.

w. Borrowings

Borrowings are funds received from the Government of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia, other banks, or other parties with payment obligation based on borrowing agreements.

Borrowings are classified as liabilities measured at amortised cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Marketable securities issued

Marketable securities issued are classified as liabilities measured at amortised cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of securities issued and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga

Untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan instrumen keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

   Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

   Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

   Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense

For all financial instruments measured at amortised cost, interest bearing financial assets classified as fair value through other comprehensive income, and financial instruments designated at fair value through profit or loss, interest income or expense is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective interest rate.

Interest income and expenses presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income include:

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest method.

   The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

   In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

   For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

a. Interest income and expense on fair value through other comprehensive income assets and financial assets and liabilities measured at amortised cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

Once a financial asset or a group of similar financial assets' value has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognized as the unimpaired portion of the impaired financial assets using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impaired loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Grup merevisi estimasinya untuk pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahannya dicatat pada laba rugi. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada periode berikutnya Grup meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian pada suku bunga efektif sejak tanggal perubahan estimasi.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan margin dan bagi hasil serta beban hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer dari Entitas Anak Syariah.

Pendapatan Entitas Anak Syariah terdiri dari pendapatan margin murabahah, bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pendapatan dari murabahah diakui dengan menggunakan metode akrual.

Pendapatan dari transaksi pembiayaan atas dasar bagi hasil diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Pendapatan Ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

Loans with principal and interest payment that have been past due for 90 days or more, or where reasonable doubts regarding the timely collection exist, are generally classified as impaired loans.

Expenses are recognized when incurred.

The carrying amount of the financial asset or financial liability is adjusted if the Group revise their estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original effective interest rate and the change in carrying amount is recorded in the profit or loss. However, for a reclassified financial asset for which the Group subsequently increase their estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the effective interest rate from the date of the change in estimate.

Income and interest expense include margin and profit sharing revenue and expenses for the rights of any third party for the temporary syirkah fund of Sharia Subsidiary.

Revenues of Sharia Subsidiary consist of murabahah margin, profit sharing mudharabah and musyarakah financing.

Revenue from murabahah is recognized using the accrual method.

Revenue incurred from of financing transactions for profit and loss sharing are recognized when received in cash installments.

Ijarah income is recognized proportionately over the contract period.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Beban Unit Usaha Syariah merupakan beban bagi hasil dan bonus giro dan tabungan wadiah, yang diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

z. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan pinjaman yang diterima atau jangka waktu perkreditan dan pinjaman yang diterima, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

aa. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini diakui sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh dari atau dibayar kepada otoritas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode liabilitas, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian antara aset dan liabilitas menurut pajak dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansif diberlakukan pada tahun dimana aset tersebut direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

Sharia Business Unit expenses represent a profit or loss sharing expense and current accounts and wadiah saving account, which are recognized when the obligation occurred in accordance with the pre-agreed ratio.

z. Fees and commission income and expense

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortized during the life of financial assets or liabilities.

Commissions and fees not related to lending and borrowing activities or loan and borrowing periods, or those that are not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

aa. Taxation

Current income tax assets and liabilities are provided at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority which are computed using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred income tax is calculated using the liability method, on all temporary differences at the consolidated statement of financial position date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted to the year when the asset is realized or the liability is settled.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

aa. Perpajakan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal goodwill; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, sepanjang besar kemungkinan terdapat laba kena pajak pada masa datang yang dapat dimanfaatkan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Aset dan liabilitas pajak kini dapat saling hapus apabila memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan atau banding diterima.

Taksiran pajak penghasilan Grup dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

aa. Taxation (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. the initial recognition of goodwill; or
b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is nor a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities and where there is an intention to settle those balances on a net basis.

Current tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts, and intends either to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment is received or, if objected or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

The income tax of the Group is computed for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal entities are not offset in the consolidated financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ab. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Rugi per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi surat berharga berpotensi saham yang sifatnya dilutif.

ac. Imbalan kerja

Kewajiban Pensiun

Grup mempunyai program pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"). Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB atau PP adalah program iuran pasti.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah iuran pensiun yang akan dibayarkan, yang pemberiannya biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban program iuran pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode projected unit credit.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ab. Earnings (loss) per share

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing income (loss) for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted loss per share is computed by dividing earnings (loss) for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

ac. Employee benefits

Pension Obligations

The Group have pension schemes in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation ("CR"). Since the Job Creation Law or Labour Law or the CLA or the CR sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or the CLA or the CR represent defined contribution plans.

A defined contribution plan is a pension plan that defines an amount of pension contribution to be paid, usually as a function of one or more factors such as years of service or compensation.

The liability recognized in the consolidated statements of financial position in respect of defined contribution plans is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior period. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method.

Termination costs and curtailment gain or loss are recognized in the period when Bank is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban Pensiun (lanjutan)

Sejak tahun 2008, Bank juga memberikan penghargaan masa dinas untuk karyawan yang telah menyelesaikan masa kerja selama 10 tahun atau lebih. Untuk manfaat tersebut, PSAK 24 (Revisi 2013) mengharuskan perlakuan akuntansi yang hampir sama dengan akuntansi untuk program manfaat pasti (sebagaimana disajikan pada paragraf sebelum ini), kecuali bahwa semua keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul harus diakui sekaligus laba rugi tahun berjalan.

Sejak tahun 2014, Bank memberikan imbalan masa persiapan pensiun yaitu imbalan kepada karyawan sebelum usia pensiun dimana karyawan dibebaskan dari tugas-tugas rutin dan tidak perlu masuk kerja, tetapi tetap memperoleh fasilitas kepegawaian tertentu dan sejak tahun 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Estimasi kewajiban untuk imbalan ini dihitung dengan menggunakan perlakuan akuntansi yang sama dengan perhitungan untuk program pensiun imbalan pasti.

ad. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen Grup yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok konvensional, pembiayaan, dan syariah.

Segmen geografis adalah komponen Grup yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Grup melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Jawa selain Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ac. Employee benefits (continued)

Pension Obligations (continued)

Starting 2008, the Bank provided long service awards for employees whose work periods reach 10 years or above. For such benefits, SFAS 24 (Revised 2013) requires an accounting treatment similar to that for defined benefit plans (as described in the previous paragraph), except that the actuarial gains and losses should all be recognized immediately in the current year's profit or loss.

Starting 2014, the Bank provides benefit of pension preparation period, i.e. benefit for employees before retirement age whereby the employee is freed from routine tasks and is not required to present at work, but still receives certain employment facilities and starting 2013, the Bank provides pension health insurance for employees and their spouses during 2 years after the employees' pension date. Estimated liability for these benefits is calculated using same accounting treatment with the calculation for defined benefit pension plan.

ad. Operating segment

An operating segment is a Group's component that involves in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. The operating segment has been determined to be conventional, multi-finance, and sharia.

A geographical segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments. The Group reports geographical segment information based on Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Java excluding Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, and others.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ae. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

i) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

ii) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i);
   g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ae. Transactions and balances with related parties

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

i) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control of the reporting entity;
   b) Has control or joint control of the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

ii) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to others);
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c) Both entities are joint ventures of the same third party;
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in i);
   g) A person identified in i) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ae. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

af. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ag. Beban emisi saham

Beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor.

ah. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2023

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yaitu:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amendemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ae. Transactions and balances with related parties (continued)

h) Entities, or members of the group to which the entity is part of the group, providing services to the entity's key management personnel or to the parent's entity of the reporting entity.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with non-related parties.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

af. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

ag. Shares issuance cost

Costs related to the public offering (including limited public offering with pre-emptive rights) are deducted from the proceeds and presented as a deduction to additional paid-in capital.

ah. Changes in accounting policies and disclosures in 2023

The following are revision, amendments and adjustments to Financial Accounting Standard (FAS) that are effective for the financial year that starting or after January 1, 2023, are as follows:

- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies
- Amendment to SFAS No. 16, Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- Amendment to SFAS No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Erros: Definition of Accounting Estimates

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ah. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2023 (lanjutan)

- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Bank telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan, dengan demikian, mengubah kebijakan akuntansi mengenai atribusi imbalan kerja pada periode jasa. Penerapan ini tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode keuangan sebelumnya. Dengan demikian, dampak dari perubahan tersebut dicatat oleh Bank dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ah. Changes in accounting policies and disclosures in 2023 (continued)

- Amendment to SFAS No. 46, Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to SFAS No. 107, "Ijarah Accounting"

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

The Bank has implemented the said explanatory material and accordingly, changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service. The implementation has no material impact on the amounts reported for the previous financial periods. Therefore, the impact of the changes is recorded entirely in the consolidated financial statements for the current year.

3. Kas

Kas terdiri dari :

3. Cash

Cash consists of the following :

	2023	2022	
Rupiah	276.340	513.588	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	8.627	7.337	United States Dollar
Euro Eropa	1.901	1.734	European Euro
Dolar Singapura	540	1.263	Singapore Dollar
Dolar Australia	201	228	Australian Dollar
Lain-lain	1.575	170	Others
	12.844	10.732	
Total	**289.184**	**524.320**	**Total**

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.154 dan Rp73.152.

Kas dalam mata uang asing lain-lain terdiri dari Yen Jepang, Poundsterling Inggris, Dolar Hong Kong, Yuan Cina dan Won Korea Selatan.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp7,154 and Rp73,152 as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

Cash in other foreign currencies is denominated in Japanese Yen, Great Britain Poundsterling, Hong Kong Dollar, Chinese Yuan, and South Korean Won.

4. Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia terdiri dari:

	2023	2022	
Rupiah	3.089.179	3.931.990	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	116.440	208.441	United States Dollar
Total	**3.205.619**	**4.140.431**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp540.926 dan Rp396.641.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Bank dipersyaratkan untuk memiliki GWM dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Bank Umum Konvensional			Conventional Banking
Rupiah			Rupiah
Giro Wajib Minimum Harian	7,05%	8,53%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro Wajib Minimum Rata-Rata	7,37%	8,53%	Average Minimum Statutory Reserves
Mata Uang Asing			Foreign currency
Giro Wajib Minimum Harian	4,02%	4,02%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro Wajib Minimum Rata-rata	4,02%	4,02%	Average Minimum Statutory Reserves
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	35,08%	13,87%	Macroprudential Liquidity Reserve
Bank Umum Syariah			Sharia Commercial Banking
Giro Wajib Minimum Harian	0%	0%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro Wajib Minimum Rata-rata	8,21%	8,05%	Average Minimum Statutory Reserves

Pada 31 Desember 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditetapkan sebesar 9%. GWM rata-rata Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 7,37%. Bank memperoleh insentif rata-rata GWM dari Bank Indonesia sebesar 1,70% periode 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

4. Current Accounts With Bank Indonesia

Current Accounts with Bank Indonesia consists of the following:

As at December 31, 2023 and 2022, current accounts with Bank Indonesia include amounts under sharia banking principles amounting to each Rp540,926 and Rp396,641, respectively.

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia Minimum Statutory Reserve requirement.

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves in Rupiah and in foreign currency.

As at December 31, 2023 and 2022, the Minimum Statutory Reserves ratios of Bank are as follows:

As at December 31, 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) complies Board of Governors Member Regulation No. 12 of 2023 dated 1 October 2023 concerning the Second Amendment to the Regulation on Members of the Board of Governors No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 which was set at 9%. The Bank's average Minimum Statutory Reserves on December 31, 2023 was 7.37%. The Bank obtains an average GWM incentive from Bank Indonesia of 1.70% for the period December 1, 2023 to February 29, 2024.

4. Giro Pada Bank Indonesia (lanjutan)

Pada 31 Desember 2022, GWM Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditetapkan sebesar 9%. GWM rata-rata Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 8,53%. Bank memperoleh insentif rata-rata GWM dari Bank Indonesia sebesar 0.5% periode 1 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2022.

Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:

	2023	2022	
Bank Umum Konvensional			Conventional Banking
Rupiah:			Rupiah:
Giro wajib minimum secara harian	0,00%	0,00%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro wajib minimum secara rata-rata	9,00%	9,00%	Average Minimum Statutory Reserves
Valuta Asing:			Foreign currency:
Giro wajib minimum secara harian	2,00%	2,00%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro wajib minimum secara rata-rata	2,00%	2,00%	Average Minimum Statutory Reserves
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	5,00%	6,00%	Macroprudential Liquidity Reserve
Bank Umum Syariah			Sharia Commercial Banking
Rupiah:			Rupiah:
Giro wajib minimum	7,50%	7,50%	Daily Minimum Statutory Reserves
Valuta Asing:			Foreign currency:
Giro wajib minimum		-	Daily Minimum Statutory Reserves

PADG No. 21/22/PADG/2019 telah diamendemen dengan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No.21/22/PADG/2019 tentang Rasio RIM dan PLM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan amendemen tersebut terdapat penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan rasio GWM RIM.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Berdasarkan PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Parameter Disinsentif Bawah dari batas bawah Target RIM sebesar 84% dan Parameter Disinsentif Atas dari batas atas Target RIM sebesar 94% dalam pemenuhan Giro RIM adalah sebesar 0 (nol).

4. Current Accounts With Bank Indonesia (continued)

As at December 31, 2022, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) complies with Board of Governors Member Regulations (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 which was set at 9%. The Bank's average Minimum Statutory Reserves on December 31, 2023 was 8.53%. The Bank obtains an average GWM incentive from Bank Indonesia of 0.5% for the period December 1, 2022 to February 28, 2022.

Fulfillment of the above ratios is determined as follows:

PADG No. 21/22/PADG/2019 is amended with PADG No. 23/7/PADG/2021 on April 26, 2021 concerning The Third Amendment of PADG No. 21/22/PADG/2019 concerning RIM and PLM Ratio for Commercial Conventional Banks, Sharia Banks, and Business Units Sharia. Based on the amendments, there are adjusments to the Lower Disincentive Parameters and the Upper Disincentive Parameters used in the fulfillment of GWM RIM ratio.

Macroprudential Liquidity Reserve (PLM) is the minimum liquidity reserves that should be maintained by the Bank, in form of of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate of Bank Indonesia Deposit (SDBI), Treasury Bills (SBN), which is determined by Bank Indonesia percentage of Third Party Funds (DPK). Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) is the minimum statutory reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Account with Bank Indonesia at a certain percentage of third party fund calculated based on the difference between the Bank's RIM and the targeted RIM. Based on PADG No. 24/14/PADG/ 2022 dated October 31, 2022, the Lower Disincentive Parameter of the lower limit of RIM targeted is 84% and the Upper Disincentive Parameter of the upper limit of RIM targeted is 94% in the fulfillment of RIM Current Account, which is 0 (zero).

4. Giro Pada Bank Indonesia (lanjutan)

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

a. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, dan
b. Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank.
terhadap:
c. DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank; dan
d. Surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, persentase GWM untuk Bank Umum Syariah dalam Rupiah masing-masing sebesar 8,21% dan 8,05%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi ketentuan BI mengenai GWM.

4. Current Accounts With Bank Indonesia (continued)

RIM is the ratio of the results of the comparison between:

a. Loans to third parties in Rupiah and foreign currencies, and
b. Corporate securities in Rupiah and foreign currencies owned by the Bank that meet certain requirement.
to:
c. The Bank's TPF in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits/deposits in Rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds; and
d. Marketable securities in Rupiah and foreign currencies that meet certain requirements, issued by the Bank for funding sources.

As at December 31, 2023 and 2022, Minimum Statutory Reserves percentage for Sharia Commercial Banking in Rupiah currency are 8.21% and 8.05%, respectively.

As at December 31, 2023 and 2022, the Group has complied with BI regulation on the Minimum Statutory Reserves.

5. Giro Pada Bank Lain

a. Berdasarkan mata uang

	2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	4.166	75.238	United States Dollar
Won Korea Selatan	2.211	409	South Korean Won
	6.377	75.647	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	102.466	88.199	Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	149.065	486.680	United States Dollar
Dolar Singapura	44.801	55.969	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	9.774	2.788	Hong Kong Dollar
Euro Eropa	8.193	2.141	European Euro
Dolar Australia	7.689	2.790	Australian Dollar
Pound Sterling Inggris	7.018	13.100	Great Britain Poundsterling
Yuan Cina	5.694	6.495	Chinese Yuan
Yen Jepang	1.804	10.250	Japanese Yen
	336.504	668.412	
Total	342.881	744.059	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(89)	Allowance for impairment losses
Neto	**342.581**	**743.970**	**Net**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo giro pada bank lain termasuk saldo yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp164 dan Rp163.697.

5. Current Accounts With Other Banks

a. By currency

As at December 31, 2023 and 2022, current accounts with other banks include amounts under sharia banking principles amounting to Rp164 and Rp163,697, respectively.

5. Giro Pada Bank Lain (lanjutan) / 5. Current Accounts With Other Banks (continued)

a. Berdasarkan mata uang (lanjutan) / a. By currency (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijaminkan.

As at December 31, 2023 and 2022, there is no current account with other banks pledged as collateral.

b. Berdasarkan bank / b. By banks

	2023	2022	
Pihak berelasi			Related party
Mata uang asing :			Foreign currency :
KB Kookmin Bank Co., Ltd	6.377	75.647	KB Kookmin Bank Co., Ltd
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk	81.106	66.746	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	9.548	9.548	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.431	7.297	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	2.374	2.395	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.292	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	452	648	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BCA Syariah	113	164	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54	60	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3	226	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	2	103	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank MNC Internasional Tbk	2	125	PT Bank MNC International Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	827	PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat
Lain-lain	89	60	Others
Sub-total	102.466	88.199	Sub-total
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Standard Chartered Bank, New York	57.956	254.391	Standard Chartered Bank, New York
Citibank N.A., New York	44.988	97.900	Citibank N.A., New York
United Overseas Bank Ltd, Singapura	37.159	24.260	United Overseas Bank Ltd, Singapore
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.894	29.636	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	12.437	67.000	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank, Hong Kong	9.774	2.788	Standard Chartered Bank, Hong Kong
Habib American Bank, New York	9.212	6.575	Habib American Bank, New York
Societe Generale, Perancis	8.193	2.141	Societe Generale, France
Australia and New Zealand Banking Group Limited	7.689	2.790	Australia and New Zealand Banking Group Limited
Standard Chartered Bank, Singapura	7.642	31.709	Standard Chartered Bank, Singapore
Standard Chartered Bank, London	7.018	13.100	Standard Chartered Bank, London
PT Bank ICBC Indonesia	5.694	6.495	PT Bank ICBC Indonesia
Citibank N.A., Jakarta	3.578	31.178	Citibank N.A., Jakarta
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	1.804	10.250	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo
Sub-total	234.038	580.213	Sub-total
Total	**342.881**	**744.059**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(89)	Allowance for impairment losses
Neto	**342.581**	**743.970**	**Net**

5. Giro Pada Bank Lain (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua giro pada Bank lain diklasifikasikan lancar.

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2023	2022	
Rupiah:			Rupiah:
Saldo awal	89	370	Beginning balance
Penyisihan (pembalikan cadangan) kerugian penurunan nilai	211	(281)	Provision (reversal of allowance) for impairment losses
Saldo akhir	**300**	**89**	**Ending balance**

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

d. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Dolar Australia, Euro Eropa, Dolar Singapura, Yuan Cina, Dolar Hong Kong, Won Korea Selatan dan Poundsterling Inggris. Tingkat suku bunga rata-rata setahun untuk giro pada bank lain dalam Rupiah dan mata uang asing lainnya adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Rupiah	0,81%	0,83%	Rupiah
Mata uang asing	0,00%	0,17%	Foreign currencies

5. Current Accounts With Other Banks (continued)

c. By collectability

All current accounts with other banks are classified as current as at December 31, 2023 and 2022.

d. Movements in allowance for impairment losses

Allowance for impairment losses is calculated using collective assessment.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

d. Average annual interest rates

Current accounts with other banks in Rupiah, Unites States Dollar, Japanese Yen, Australian Dollar, European Euro, Singapore Dollar, Chinese Yuan, Hong Kong Dollar, South Korean Won and Great Britain Poundsterling currencies. The average interest rates per annum for current accounts with other banks in Rupiah and other foreign currencies are as follows:

6. Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan bank

	2023	2022	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia, setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan	1.384.883	8.456.195	Placements with Bank Indonesia, net of unearned interest
Interbank call money			**Interbank call money**
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	50.000	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	30.000	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
	-	80.000	

6. Placements With Bank Indonesia And Other Banks

a. By type, currency, and banks

6. Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain (lanjutan)

6. Placements With Bank Indonesia And Other Banks (continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan bank (lanjutan)

a. By type, currency, and banks (continued)

	2023	2022	
Deposito Berjangka			**Time deposits**
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	41.000	-	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Nagari	40.000	50.000	PT Bank Nagari
PT Bank Sahabat Sampoerna	38.000	30.000	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Sulawesi Tenggara	37.000	-	PT Bank Sulawesi Tenggara
PT BPD Sumatera Utara	34.000	30.000	PT BPD Sumatera Utara
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	34.000	-	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT BPD Sulawesi Utara	34.000	-	PT BPD Sulawesi Utara
PT BPD Sulawesi Tengah	33.000	-	PT BPD Sulawesi Tengah
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	30.000	20.000	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Riau Kepri Syariah (d/h PT BPD Riau Kepri)	16.000	10.000	PT BPD Riau Kepri Syariah (formerly PT BPD Riau Kepri)
PT Bank DKI	10.000	-	PT Bank DKI
PT Bank Victoria Syariah Tbk	10.000	-	PT Bank Victoria Syariah Tbk
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	7.000	50.000	PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk	7.000	-	PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk
PT Bank Woori Bersaudara 1960 Tbk	7.000	-	PT Bank Woori Bersaudara 1960 Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	7.000	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan	7.000	-	PT BPD Sulawesi Selatan
PT Bank Mega Tbk	6.000	30.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.000	10.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT BPD Bengkulu	3.000	50.000	PT BPD Bengkulu
PT BPD Kalimantan Barat	3.000	-	PT BPD Kalimantan Barat
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1.000	-	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	950	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	50.000	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk		50.000	PT Bank Mayapada International Tbk
PT BPD Lampung	-	40.000	PT BPD Lampung
PT Bank Victoria International Tbk	-	30.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank IBK IndonesiaTbk	-	30.000	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Taspen Agroniaga Tbk	-	10.000	PT Bank Mandiri Taspen Agroniaga Tbk
	409.950	500.000	
Total	**1.794.833**	**9.036.195**	**Total**
Dolar Amerika Serikat:			United States Dollar:
Penempatan pada Bank Indonesia	338.734	2.988.960	Placements with Bank Indonesia
Interbank call money			**Interbank call money**
PT Bank IBK Indonesia Tbk	-	155.675	PT Bank IBK Indonesia Tbk
	338.734	3.144.635	
Total	**2.133.567**	**12.180.830**	**Total**

6. Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang berdasarkan prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp985.000 dan Rp599.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijaminkan.

6. Placements With Bank Indonesia And Other Banks (continued)

a. By type, currency, and banks (continued)

As at December 31, 2023 and 2022, there are placement with Bank Indonesia and other Banks under sharia banking principles amounting to Rp985,000 and Rp599,000, respectively.

As at December 31, 2023 and 2022, there is no placement with Bank Indonesia and other banks pledged as collateral.

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / b. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah:			**Rupiah:**
≤ 1 bulan	1.733.833	9.006.195	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	44.000	-	> 1 - 3 months
> 3 bulan - 1 Tahun	17.000	30.000	> 3 - 6 months
	1.794.833	9.036.195	
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
≤ 1 bulan	338.734	3.144.635	≤ 1 month
	338.734	3.144.635	
Total	**2.133.567**	**12.180.830**	**Total**

c. Berdasarkan kolektibilitas / c. By collectibility

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan lancar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

As at December 31, 2023 and 2022, all placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current.

Management believes that there is no impaired placements with Bank Indonesia and other banks, therefore no allowance for impairment losses were provided as at December 31, 2023 and 2022.

d. Tingkat bunga rata-rata per tahun / d. Average annual interest rates

	2023	2022	
Rupiah:			**Rupiah:**
Penempatan pada Bank Indonesia	5,06%	3,13%	Placement with Bank Indonesia
Interbank call money	4,38%	2,60%	Interbank call money
Deposito berjangka	3,84%	4,29%	Time deposits
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Penempatan pada Bank Indonesia	4,17%	0,68%	Placement with Bank Indonesia
Interbank call money	1,19%	2,00%	Interbank call money

7. Surat-Surat Berharga / 7. Marketable Securities

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang / a. By purpose, type, and currency

	2023	2022	
Rupiah			**Rupiah**
Nilai wajar melalui laba rugi			**Fair value through profit or loss**
Obligasi pemerintah	13	555.013	Government bonds
Premi yang belum diamortisasi	1	7.403	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	(1)	(6.549)	Unrealized loss
	13	555.867	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			**Amortized cost**
Obligasi pemerintah	4.796.017	2.664.750	Government bonds
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	83.438	(1.028)	Unamortized premium (discount)
	4.879.455	2.663.722	
Obligasi korporasi	224.600	119.600	Corporate bonds
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	1.994.135	2.123.159	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	40.605	(1.085)	Unamortized premium (discount)
	2.034.740	2.122.074	
Wesel SKBDN	12.756	15.000	Domestic Letter of Credit (SKBDN)
Diskonto yang belum diamortisasi	(467)	-	Unamortized discount
	12.289	15.000	
Sukuk Korporasi	2.432.000	2.432.000	Corporate Sukuk
Diskonto yang belum diamortisasi	(1.097.939)	(1.177.789)	Unamortized discount
	1.334.061	1.254.211	
	8.485.145	6.174.607	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			**Fair value through other comprehensive income**
Obligasi pemerintah	2.656.870	486.354	Government Bonds
Premi yang belum diamortisasi	16.198	754	Unamortized premium
Keuntungan yang belum direalisasi	10.373	1.266	Unrealized gain
	2.683.441	488.374	
Obligasi Korporasi	-	10.000	Corporate bonds
Premi yang belum diamortisasi	-	37	Unamortized premium
Keuntungan yang belum direalisasi	-	88	Unrealized gain
	-	10.125	
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	390.000	90.000	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds
Diskonto yang belum diamortisasi	(4.855)	(1.677)	Unamortized discount
Keuntungan yang belum direalisasi	(1.199)	2.013	Unrealized gain
	383.946	90.336	
	3.067.387	588.835	
Sub-total	**11.552.545**	**7.319.309**	**Sub-total**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

a. By purpose, type, and currency (continued)

	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
Nilai wajar melalui laba rugi			**Fair value through profit or loss**
Obligasi pemerintah	-	160.221	Government bonds
Premi yang belum diamortisasi	-	2.667	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	-	(2.708)	Unrealized loss
	-	160.180	
Obligasi korporasi	5.250.377	2.802.150	Corporate bonds
Premi yang belum diamortisasi	-	-	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	72.540	(156.098)	Unrealized loss
	5.322.917	2.646.052	
Subtotal	**5.322.917**	**2.806.232**	**Subtotal**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			**Amortized cost**
Obligasi pemerintah	657.452	1.858.946	Government bonds
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	532	19.192	Unamortized premium (discount)
	657.984	1.878.138	
Wesel SKBDN	-	996	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(33)	Unamortized discount
	-	963	
	657.984	1.879.101	
Subtotal	**5.980.901**	**4.685.333**	**Subtotal**
Yuan China			**China Yuan**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			**Amortized cost**
Wesel SKBDN	2.876	5.451	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Diskonto yang belum diamortisasi	(73)	(139)	Unamortized discount
Subtotal	**2.803**	**5.312**	**Subtotal**
Total	**17.536.249**	**12.009.954**	**Total**
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(109)	(76)	Less: allowance for impairment losses
Neto	**17.536.140**	**12.009.878**	**Net**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang

7. Marketable Securities (continued)

b. By purpose, issuer, and currency

	2023	2022	
Rupiah			**Rupiah**
Nilai wajar melalui laba rugi			**Fair value through profit or loss**
Negara Republik Indonesia	13	555.013	Republic of Indonesia Government
Premi yang belum diamortisasi	1	7.403	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	(1)	(6.549)	Unrealized loss
	13	555.867	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			**Amortized cost**
Negara Republik Indonesia	6.790.152	4.787.909	Republic of Indonesia Government
Diskonto yang belum diamortisasi	124.043	(2.113)	Unamortized discount
	6.914.195	4.785.796	
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2.432.000	2.432.000	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT KB Finansia Multifinance	105.000	-	PT KB Finansia Multifinance
PT KIK EBA Bahana	119.600	-	PT KIK EBA Bahana
PT Lekang Jaya Konstruksi	6.484	-	PT Lekang Jaya Konstruksi
PT Inka Multi Solusi	3.539	-	PT Inka Multi Solusi
PT Rizki Asa Buana	2.733	-	PT Rizki Asa Buana
PT Bahana TCW Investment Management	-	119.600	PT Bahana TCW Investment Management
PT Topsco Steel Utama	-	15.000	PT Topsco Steel Utama
	2.669.356	2.566.600	
Diskonto yang belum diamortisasi	(1.098.406)	(1.177.789)	Unamortized discount
	1.570.950	1.388.811	
	8.485.145	6.174.607	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			**Fair value through other comprehensive income**
Negara Republik Indonesia	3.046.870	576.354	Republic of Indonesia Government
Diskonto yang belum diamortisasi	11.343	(923)	Unamortized discount
Keuntungan yang belum direalisasi	9.174	3.279	Unrealized gain
	3.067.387	578.710	
PT Bank Victoria International Tbk	-	10.000	PT Bank Victoria International Tbk
Premi yang belum diamortisasi	-	37	Unamortized premium
Keuntungan yang belum direalisasi	-	88	Unrealized gain
	-	10.125	
	3.067.387	588.835	
Sub-total	**11.552.545**	**7.319.309**	**Sub-total**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

b. By purpose, issuer, and currency (continued)

	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
Nilai wajar melalui laba rugi			**Fair value through profit or loss**
Negara Republik Indonesia	-	160.221	Republic of Indonesia Government
Premi yang belum diamortisasi	-	2.667	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	-	(2.708)	Unrealized loss
	-	160.180	
IDMB United Pte., Ltd	2.771.460	2.802.150	IDMB United Pte., Ltd
Premi yang belum diamortisasi	-	-	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	(81.595)	(156.098)	Unrealized loss
	2.689.865	2.646.052	
SMMK Pte Ltd	2.478.917	-	SMMK Pte Ltd
Premi yang belum diamortisasi	-	-	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	154.135	-	Unrealized loss
	2.633.052	-	
	5.322.917	2.806.232	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			**Amortized cost**
Negara Republik Indonesia	657.452	1.858.946	Republic of Indonesia Government
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	532	19.192	Unamortized premium (discount)
	657.984	1.878.138	
PT Anugrah Putra Fajar	-	996	PT Anugrah Putra Fajar
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(33)	Unamortized discount
	-	963	
	657.984	1.879.101	
Total	**5.980.901**	**4.685.333**	**Total**
Yuan China			**China Yuan**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			**Amortized cost**
PT Anugrah Putra Fajar	2.876	5.451	PT Anugrah Putra Fajar
Diskonto yang belum diamortisasi	(73)	(139)	Unamortized discount
	2.803	5.312	
Total	**17.536.249**	**12.009.954**	**Total**
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(109)	(76)	Less: allowance for impairment losses
Neto	**17.536.140**	**12.009.878**	**Net**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

c. Berdasarkan tujuan, peringkat, dan mata uang

7. Marketable Securities (continued)

c. By purpose, rating, and currency

	Lembaga pemeringkat/ *Rating company*	2023	2022	
Peringkat				**Rating**
Rupiah				**Rupiah**
Nilai wajar melalui laba rugi				**Fair value through profit or loss**
Tanpa peringkat *)		13	555.867	Not rated *)
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				**Amortized Cost**
idAAA	Pefindo	119.600	119.600	idAAA
idAA	Pefindo	1.334.061	-	idAA
BBB-	Pefindo		1.254.211	BBB-
AAA -	Moodys	105.000	-	AAA
Tanpa peringkat *)		6.926.484	4.800.796	Not rated *)
		8.485.145	6.174.607	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				**Fair value through other comprehensive income**
idA-	Pefindo	-	10.125	idA-
Tanpa peringkat *)		3.067.387	578.710	Not rated *)
		3.067.387	588.835	
Total		**11.552.545**	**7.319.309**	**Total**
Dolar Amerika Serikat				**United States Dollar**
Nilai wajar melalui laba rugi				**Fair value through profit or loss**
A+	Standard & Poor's	5.322.917	2.646.052	A+
Tanpa peringkat *)		-	160.180	Not rated *)
		5.322.917	2.806.232	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				**Fair value through other comprehensive income**
Tanpa peringkat *)		-	-	Not rated *)
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				**Amortized Cost**
Tanpa peringkat *)		657.984	1.879.101	Not rated *)
Total		**5.980.901**	**4.685.333**	**Total**
Yuan China				**China Yuan**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				**Amortized Cost**
Tanpa peringkat *)		2.803	5.312	Not rated *)
Total		**17.536.249**	**12.009.954**	**Total**
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(109)	(76)	Less :allowance for impairment losses
Neto		**17.536.140**	**12.009.878**	**Net**

*) Terdiri dari Wesel SKBDN, Obligasi Pemerintah, Obligasi Ritel Indonesia, Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia, Surat Utang Negara, dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

*) Consists of Domestic Letter of Credit (SKBDN), Government Bonds, Indonesia Retail Bond, Indonesia Sukuk Ijarah Bonds, State Promissory Notes, and Bank Indonesia Certificates of Deposits.

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan) / 7. Marketable Securities (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / d. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah			**Rupiah**
≤ 1 bulan	3.430	327.860	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	333.363	-	> 1 - 3 months
> 3 bulan - 1 tahun	352.428	641.180	> 3 months - 1 year
> 1 - 5 tahun	3.399.602	1.196.209	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun	4.685.286	2.579.050	> 5 - 10 years
> 10 tahun	2.778.436	2.575.010	> 10 years
Subtotal	11.552.545	7.319.309	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
≤ 1 bulan	657.983	425.584	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	-	439.115	> 1 - 3 months
> 3 bulan - 1 tahun	-	559.318	> 3 months - 1 year
> 1 - 5 tahun	2.689.864	3.261.316	> 1 - 5 years
> 5 - 10 tahun	2.633.054	-	> 5 - 10 years
Sub-total	5.980.901	4.685.333	Sub-total
Yuan China			**Chinese Yuan**
≤ 1 bulan	-	324	≤ 1 month
> 1 - 3 bulan	1.277	1.937	> 1 - 3 months
> 3 bulan - 1 tahun	1.526	3.051	> 3 months - 1 year
Subtotal	2.803	5.312	Subtotal
Total	**17.536.249**	**12.009.954**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(109)	(76)	Allowance for impairment losses
Neto	**17.536.140**	**12.009.878**	**Net**

e. Berdasarkan golongan penerbit / e. By classification of issuers

	2023	2022	
Pemerintah dan Bank Indonesia:			Government and Bank Indonesia:
Obligasi Pemerintah	8.220.893	5.746.281	Government Bonds
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	2.418.686	2.212.410	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds
Sub-total	10.639.579	7.958.691	Sub-total
IDMB United Pte., Ltd	2.689.865	2.646.052	IDMB United Pte., Ltd
SMMK Pte., Ltd	2.633.052	-	SMMK Pte., Ltd
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.334.062	1.254.211	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Bahana TCW Investment Management	119.600	119.600	PT Bahana TCW Investment Management
PT KB Finansia Multifinance	105.000	-	PT KB Finansia Multifinance
PT Lekang Jaya Konstruksi	6.188	-	PT Lekang Jaya Konstruksi
PT Inka Multi Solusi	3.430	-	PT Inka Multi Solusi
PT Anugrah Putra Fajar	2.803	6.275	PT Anugrah Putra Fajar
PT Rizki Asa Buana	2.670	-	PT Rizki Asa Buana
PT Topsco Steel Utama	-	15.000	PT Topsco Steel Utama
PT Bank Victoria International Tbk	-	10.125	PT Bank Victoria International Tbk
Sub-total	6.896.670	4.051.263	Sub-total
Total	**17.536.249**	**12.009.954**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(109)	(76)	Allowance for impairment losses
Neto	**17.536.140**	**12.009.878**	**Net**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

f. Berdasarkan tanggal jatuh tempo dan peringkat

7. Marketable Securities (continued)

f. By maturity date and rating

	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	2023	2022	
Wesel SKBDN	12 Juni2024/ June 12, 2024	Tanpa peringkat/ Not rated	Tanpa peringkat/ Not rated	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Obligasi Pemerintah - Dolar Amerika Serikat	15 Januari 2024/ January 15, 2024	Tanpa peringkat/ Not rated	Tanpa peringkat/ Not rated	Government Bonds - United States Dollar
KIK EBA Bahana Bukopin Tahun 2019	4 September 2026/ September 4, 2026	idAAA	idAAA	KIK EBA Bahana Bukopin Year 2019
IDR-Linked Step-Up Fixed Rate Guaranteed Bond IDMB United Pte Ltd	21 Juni 2027/ June 21, 2027	A+	A+	IDR-Linked Step-Up Fixed Guaranteed Bond IDMB United Pte Ltd
SMMK Pte Ltd	28 September 2037/ September 28, 2037	A+	-	SMMK Pte Ltd
Obligasi Korporasi	28 September 2037/ September 28, 2037	AAA(idn)	BBB-	Corporate Bonds
Obligasi Pemerintah - Rupiah	15 April 2040/ April 15, 2040	Tanpa peringkat/ Not rated	Tanpa peringkat/ Not rated	Government Bonds - Rupiah
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	15 April 2043/ April 15, 2043	idA-	idA-	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds

Peringkat untuk obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sedangkan peringkat untuk obligasi lain yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat obligasi yang dilaporkan oleh Standard & Poor's.

The ratings of the bonds which are registered in the Indonesia Stock Exchange are determined by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), meanwhile the ratings of the bonds which are not registered in the Indonesia Stock Exchange are determined by Standard & Poor's.

g. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua surat berharga yang dimiliki oleh Bank diklasifikasikan lancar.

g. By collectibility

As at December 31, 2023 and 2022, all marketable securities held by the Bank are classified as current.

h. Tingkat bunga rata-rata per tahun

h. Average annual interest rates

	2023	2022	
Rupiah			**Rupiah**
Obligasi korporasi	7,30%	10,30%	Corporate bonds
Wesel SKBDN	9,17%	-	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Obligasi pemerintah	10,07%	7,65%	Goverment bonds
Obligasi ritel indonesia - tingkat bunga tetap	4,90%	5,65%	Indonesia retail bond - fixed rate
Sukuk korporasi	0,75%	0,75%	Corporate sukuk

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan) / 7. Marketable Securities (continued)

h. Tingkat bunga rata-rata per tahun (lanjutan) / h. Average annual interest rates (continued)

2023	2022	
Dolar Amerika Serikat		**United States Dollar**
Obligasi Pemerintah - tingkat bunga tetap	5,88%	4,08% Indonesia retail bonds - fixed rate
Obligasi korporasi	2,00%	2,00% Corporate bonds
Wesel SKBDN	-	7,48% Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Yuan China		**Chinese Yuan**
Wesel SKBDN	6,41%	6,04% Domestic Letters of Credit (SKBDN)

i. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai / i. Movements in allowance for impairment losses

2023	2022	
Saldo awal	76	125 Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	33	(49) Provision (reversal) during the year
Saldo akhir	**109**	**76 Ending balance**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

As at December 31, 2023 and 2022, Management believes that the allowance for impairment losses on is adequate.

j. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan surat-surat berharga / j. Other significant information regarding marketable securities

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank menjaminkan sebagian surat berharga berupa obligasi pemerintah dengan nilai tercatat Rp219.745 dan nihil untuk transaksi surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.

As at December 31, 2023 and 2022, the Bank has pledged part of marketable securities in form of government bonds with carrying amount of Rp219,745 and nil, respectively, for marketable securities sold with agreement to repurchase transactions.

k. Perubahan efek-efek berdasarkan klasifikasinya / k. Changes in Marketables securities based on classification

	31 Desember/*December 31, 2023*			
	Nilai Tercatat Bruto/*Gross Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/*Net Carrying Amount***	
Nilai wajar melalui penghasilan laba rugi				Fair value through other profit and loss
Saldo awal tahun	3.362.099	-	3.362.099	Beginning balance of the year
Aset keuangan yang baru dibeli	2.478.917	-	2.478.917	New financial assets puchased
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(745.911)	-	(745.911)	Maturities or disposal
Kerugian dari perubahan nilai wajar	237.895	-	237.895	Loss on changes in fair value
Lainnya	(10.070)	-	(10.070)	Others
Saldo, akhir tahun	**5.322.930**	**-**	**5.322.930**	**Balance, end of year**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

k. Perubahan efek-efek berdasarkan klasifikasinya (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

k. Changes in Marketables securities based on classification (continued)

	31 Desember/*December 31, 2023*			
	Nilai Tercatat Bruto/*Gross Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/*Net Carrying Amount***	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Fair value through other comprehensive income
Saldo awal tahun	588.835	-	588.835	Beginning balance of the year
Aset keuangan yang baru dibeli	2.671.395	-	2.671.395	New financial assets purchased
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(210.877)	-	(210.877)	Maturities or disposal
Kerugian dari perubahan nilai wajar	5.807	-	5.807	Loss on changes in fair value
Lainnya	12.227	-	12.227	Others
Saldo, akhir tahun	**3.067.387**	**-**	**3.067.387**	**Balance, end of year**

	31 Desember/*December 31, 2023*			
	Nilai Tercatat Bruto/*Gross Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/*Net Carrying Amount***	
Biaya perolehan diamortisasi				Amortized cost
Saldo. awal tahun	8.059.020	(76)	8.058.944	Beginning balance of the year
Aset keuangan yang baru dibeli	3.083.060	(33)	3.083.060	New financial assets purchased
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(2.183.126)	-	(2.183.126)	Maturities or disposal
Lainnya	186.978	-	186.945	Others
Saldo, akhir tahun	**9.145.932**	**(109)**	**9.145.823**	**Balance, end of year**

8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

8. Marketable Securities Purchased with Agreement to Resell

As at December 31, 2022, there is no marketable securities purchased with agreements to resell.

Marketable securities purchased with agreements to resell as at December 31, 2023 are as follow:

	2023						
	Jangka Waktu/*Period*	**Tanggal Dimulai/*Start Date***	**Tanggal Jatuh Tempo/*Due Date***	**Suku Bunga/*Interest Rate***	**Harga Beli Kembali/*Repurchase Price***	**Bunga Belum Diamortisasi/*Unamortized Interest***	**Nilai Neto/*Net Value***
Pihak ketiga/*Third party*							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds							
Seri/*Series* VR0034	7 hari/ *7 days*	27 Des. 2023/ *Dec. 27, 2023*	3 Jan. 2024/ *Jan. 3, 2024*	6,00%%	95.875	(48)	95.827
Seri/*Series* VR0054	7 hari/ *7 days*	Des 28, 2023/ *28 Des. 2023/*	4 Jan. 2024/ *Jan. 4, 2024*	6,00%	287.356	(191)	287.165
Seri/*Series* VR0054	7 hari/ *7 days*	28 Des 2023/ *Des 28, 2023/*	4 Jan. 2024/ *Jan. 4, 2024*	6,00%	143.678	(96)	143.582

8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (lanjutan)

8. Marketable Securities Purchased with Agreement to Resell (continued)

	2023						
	Jangka Waktu/ *Period*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Due Date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	Harga Beli Kembali/ *Repurchase Price*	Bunga Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest*	Nilai Neto/ *Net Value*
Seri/*Series* VR0034	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023// *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan 5, 2024*	6,00%	383.685	(319)	383.366
Seri/*Series* VR0034	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023// *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan 5, 2024*	6,00%	671.448	(559)	670.889
Seri/*Series* VR0062	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023// *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan 5, 2024*	6,00%	665.046	(554)	664.492
Seri/*Series* VR0042	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023// *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan 5, 2024*	6,00%	142.915	(119)	142.796
Seri/*Series* VR0034	92 hari/ *92 days*	15 Nov. 2023/// *Nov. 15, 2023*	15 Feb. 2024// *Feb. 15, 2024*	6,55%	48.806	(402)	48.404
Seri/*Series* VR0065	273 hari/ *273 days*	Jun. 16, 2023/ *16 Jun, 2023/*	15 Mar. 2024// *Mar. 15, 2024*	6,40%	24.221	(308)	23.913
Seri/*Series* VR0065	273 hari/ *273 days*	Jun. 16, 2023/ *16 Jun, 2023/*	15 Mar. 2024// *Mar. 15, 2024*	6,41%	24.223	(308)	23.915
Seri/*Series* VR 0045	273 hari/ *273 days*	23 Jun. 2023// *Jun. 23, 2023*	22 Mar 2024/ *Mar. 22, 2024*	6,41%	49.270	(686)	48.584
Seri/*Series* VR 0037	364 hari/ *364 days*	16 Jun 2023/ *Jun. 16, 2023*	14 Juni. 2024/ *June 14, 2024*	6,41%	19.820	(551)	19.269
Seri/*Series* VR 0043	364 hari/ 364 *days*	23 Jun. 2023// *Jun. 23, 2023*	21 Jun 2024/ *Jun. 21, 2024*	6,41%	20.545	(595)	19.950
Total					**2.576.888**	**(4.736)**	**2.572.152**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

9. Loans and Sharia Financing/Receivables

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas

a. By currency, type, and collectability

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Modal kerja	12.700.942	2.778.896	86.298	27.551	1.385.015	16.978.702	Working capital
Investasi	12.421.537	955.853	45.904	15.666	1.036.580	14.475.540	Investment
Konsumsi	10.407.855	444.975	76.048	117.965	1.699.974	12.746.817	Consumer
Program Pemerintah	98.757	1.035	-	1.306	4.044	105.142	Government program
Sindikasi	3.544	122	-	221	39	3.926	Syndicated
Direksi dan karyawan	76.516	-	-	-	2.152	78.668	Directors and employees
Total Rupiah	35.709.151	4.180.881	208.250	162.709	4.127.804	44.388.795	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(591.000)	(752.511)	(44.807)	(56.860)	(2.069.484)	(3.514.662)	Allowance for impairment losses
Neto	35.118.151	3.428.370	163.443	105.849	2.058.320	40.874.133	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Modal kerja	3.355.300	-	-	-	13.821	3.369.121	Working capital
Investasi	1.658.515	-	-	-	-	1.658.515	Investment
Konsumsi	2.185	-	-	-	-	2.185	Consumer
Total mata uang asing	5.016.000	-	-	-	13.821	5.029.821	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.311)	-	-	-	(3.861)	(68.172)	Allowance for impairment losses
Neto	4.951.689	-	-	-	9.960	4.961.649	Net
Total	**40.069.840**	**3.428.370**	**163.443**	**105.849**	**2.068.280**	**45.835.782**	**Total**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas (lanjutan)

a. By currency, type, and collectability (continued)

	2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Modal kerja	17.577.102	537.385	221.593	116.896	398.519	18.851.495	Working capital
Konsumsi	11.421.325	475.524	61.644	117.794	1.901.237	13.977.524	Consumer
Investasi	12.967.929	282.237	132.377	137.770	266.396	13.786.709	Investment
Program Pemerintah	60.032	1.085	272	41	11.193	72.623	Government program
Sindikasi	539.090	-	-	-		539.090	Syndicated
Direksi dan karyawan	76.210	-	-	-	-	76.210	Directors and employees
Total Rupiah	42.641.688	1.296.231	415.886	372.501	2.577.345	47.303.651	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(520.251)	(93.532)	(60.615)	(113.253)	(787.416)	(1.575.067)	Allowance for impairment losses
Neto	42.121.437	1.202.699	355.271	259.248	1.789.929	45.728.584	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Modal kerja	1.573.816	-	-	-	33.384	1.607.200	Working capital
Sindikasi	1.193.746	-	-	-	-	1.193.746	Syndicated
Investasi	476.531	-	-	-	-	476.531	Investment
Konsumsi	2.306	-	-	-	-	2.306	Consumer
Total mata uang asing	3.246.399	-	-	-	33.384	3.279.783	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(42.284)	-	-	-	(9.325)	(51.609)	Allowance for impairment losses
Neto	3.204.115	-	-	-	24.059	3.228.174	Net
Total	**45.325.552**	**1.202.699**	**355.271**	**259.248**	**1.813.988**	**48.956.758**	**Total**

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Jasa	5.453.262	246.206	42.569	29.155	289.934	6.061.126	Business service
Perdagangan	5.042.811	587.683	16.035	3.947	679.208	6.329.684	Trading
Manufaktur	3.366.414	90.299	41	265	72.422	3.529.441	Manufacturing
Transportasi	2.283.449	41.061	2.392	761	305.646	2.633.309	Transportation
Konstruksi	2.020.662	1.517.331	10.750	4.282	188.947	3.741.972	Construction
Tenaga listrik	632.494	-	-	-	14.037	646.531	Power supply
Pertanian	589.456	149.512	20.922	-	3.586	763.476	Agriculture
Pertambangan	525.750	-	-	2.158	856.035	1.383.943	Mining
Lain-lain	15.794.853	1.548.789	115.541	122.141	1.717.989	19.299.313	Others
Total Rupiah	35.709.151	4.180.881	208.250	162.709	4.127.804	44.388.795	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(591.000)	(752.511)	(44.807)	(56.860)	(2.069.484)	(3.514.662)	Allowance for impairment losses
Neto	35.118.151	3.428.370	163.443	105.849	2.058.320	40.874.133	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Manufaktur	1.929.078	-	-	-	-	1.929.078	Manufacturing
Tenaga listrik	1.196.702					1.196.702	Power supply
Pertambangan	971.791	-	-	-	-	971.791	Mining
Jasa	691.970	-	-	-	13.821	705.791	Business service
Perdagangan	140.370	-	-	-	-	140.370	Trading
Transportasi	-	-	-	-	-	-	Transportation
Pertanian	76.966	-	-	-	-	76.966	Agriculture
Konstruksi	6.937	-	-	-	-	6.937	Contructions
Lain-lain	2.186					2.186	Others
Total mata uang asing	5.016.000	-	-	-	13.821	5.029.821	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.311)	-	-	-	(3.861)	(68.172)	Allowance for impairment losses
Neto	4.951.689	-	-	-	9.960	4.961.649	Net
Total	**40.069.840**	**3.428.370**	**163.443**	**105.849**	**2.068.280**	**45.835.782**	**Total**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

a. By economic sector (continued)

	2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Jasa	8.860.548	117.414	13.651	141.655	201.316	9.334.584	Business service
Perdagangan	6.494.235	211.563	214.697	47.819	186.674	7.154.988	Trading
Konstruksi	6.675.508	301.864	14.898	37.854	60.548	7.090.672	Construction
Manufaktur	3.618.959	36.689	594	20.425	26.749	3.703.416	Manufacturing
Transportasi	2.131.639	84.795	2.626	3.120	217.745	2.439.925	Transportation
Pertanian	1.211.319	10.525	59	1.761	53.433	1.277.097	Agriculture
Pertambangan	1.127.077	1.200	55.309	-	371	1.183.957	Mining
Tenaga listrik	736.312	3.984	1.500	-	-	741.796	Power supply
Lain-lain	11.786.091	528.197	112.552	119.867	1.830.509	14.377.216	Others
Total Rupiah	42.641.688	1.296.231	415.886	327.501	2.577.345	47.303.651	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(520.251)	(93.532)	(60.615)	(113.253)	(787.416)	(1.575.067)	Allowance for impairment losses
Neto	42.121.437	1.202.699	355.271	259.248	1.789.929	45.728.584	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Pertambangan	1.381.317	-	-	-	-	1.381.317	Mining
Manufaktur	1.036.436	-	-	-	-	1.036.436	Manufacturing
Perdagangan	446.841	-	-	-	-	446.841	Trading
Transportasi	224.728	-	-	-	-	224.728	Transportation
Tenaga listrik	145.637	-	-	-	-	145.637	Power supply
Jasa	2.117	-	-	-	33.384	35.501	Business service
Konstruksi	7.019	-	-	-	-	7.019	Contruction
Lain-lain	2.304	-	-	-	-	2.304	Others
Total mata uang asing	3.246.399	-	-	-	33.384	3.279.783	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(42.284)	-	-	-	(9.325)	(51.609)	Allowance for impairment losses
Neto	3.204.115	-	-	-	24.059	3.228.174	Net
Total	**45.325.552**	**1.202.699**	**355.271**	**259.248**	**1.813.988**	**48.956.758**	**Total**

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By maturity

	2023	2022	
Rupiah:			Rupiah:
≤ 1 tahun	4.063.560	4.943.737	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	4.312.807	2.930.923	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	7.058.334	6.590.406	> 2 - 5 years
> 5 tahun	28.954.094	32.838.585	> 5 years
	44.388.795	47.303.651	
Mata uang asing:			Foreign currencies:
≤ 1 tahun	515.517	1.089.734	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	1.346.108	355.272	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	852.041	275.123	> 2 - 5 years
> 5 tahun	2.316.155	1.559.654	> 5 years
	5.029.821	3.279.783	
Total	49.418.616	50.583.434	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582.834)	(1.626.676)	Allowance for impairment losses
Neto	**45.835.782**	**48.956.758**	**Net**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan) / 9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / d. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah:			Rupiah:
≤ 1 tahun	11.540.191	5.238.806	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	2.720.879	5.259.702	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	10.476.093	10.899.436	> 2 - 5 years
> 5 tahun	19.651.632	25.905.707	> 5 years
	44.388.795	47.303.651	
Mata uang asing:			Foreign currencies:
≤ 1 tahun	2.017.857	428.364	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	170.491	1.027.607	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	1.798.169	431.345	> 2 - 5 years
> 5 tahun	1.043.304	1.392.467	> 5 years
	5.029.821	3.279.783	
Total	49.418.616	50.583.434	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582.834)	(1.626.676)	Allowance for impairment losses
Neto	**45.835.782**	**48.956.758**	**Net**

e. Berdasarkan mata uang / e. By currency

	2023	2022	
Rupiah	44.388.795	47.303.651	Rupiah
Mata uang asing :			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	5.027.636	3.277.656	United States Dollar
Euro Eropa	2.185	2.127	Euro European
	5.029.821	3.279.783	
Total	**49.418.616**	**50.583.434**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582.834)	(1.626.676)	Allowance for impairment losses
Neto	**45.835.782**	**48.956.758**	**Net**

f. Berdasarkan stage / f. By stages

	2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal tahun	45.503.113	1.634.341	3.445.980	50.583.434	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Stage 2)	(3.141.506)	3.174.585	(33.079)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(5.193.908)	(334.956)	5.528.864	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	467.486	(413.498)	(53.988)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	6.951.508	(73.413)	-	6.878.095	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(3.621.400)	(46.060)	(4.375.453)	(8.042.913)	Written-off
Saldo akhir tahun	**40.965.293**	**3.940.999**	**4.512.324**	**49.418.616**	**Balance end of year**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

f. Berdasarkan stage (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

f. By stages (continued)

	2022				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	44.465.086	4.342.810	9.704.192	58.512.088	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Stage 2)	(5.439)	96.610	(91.171)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	8.979	(26.389)	17.410	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	(1.451.632)	(815.211)	2.266.843	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	2.486.119	(1.963.479)	(3.001.824)	(2.479.184)	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	-	-	(5.449.470)	(5.449.470)	Written-off
Saldo akhir tahun	**45.503.113**	**1.634.341**	**3.445.980**	**50.583.434**	**Balance end of year**

g. Kredit konsumsi

Kredit konsumsi terdiri dari:

g. Consumer loans

The consumer loans consists of:

	2023	**2022**	
Kredit personal	10.154.077	9.509.200	Personal loans
Kredit pemilikan rumah	1.362.701	1.851.156	Housing loans
Kartu kredit	456.910	531.801	Credit card
Kredit kendaraan bermotor	402.945	89.871	Motor vehicle loans
Kredit konsumsi lainnya	372.369	1.997.802	Other consumer loans
Total	**12.749.002**	**13.979.830**	**Total**

h. Kredit yang bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2023, rasio kredit bermasalah - kotor dan neto konsolidasian berdasarkan peraturan Bank Indonesia masing-masing adalah 9,13% dan 4,73% (31 Desember 2022: 6,72% dan 4,80%).

Rincian kredit yang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

h. Non-performing loans

As at December 31, 2023, the ratios of consolidated non-performing loans - gross and net based on Bank Indonesia regulation are 9.13% and 4.73%, respectively (December 31, 2022 : 6.72% and 4.80%).

As at December 31, 2023 and 2022 the details of non-performing loans by economic sector are as follows:

	2023	**2022**	
Pertambangan	858.193	55.680	Mining
Perdagangan	699.190	449.190	Trading
Jasa	375.478	390.006	Business service
Transportasi	308.798	223.491	Transportation
Konstruksi	203.979	113.300	Construction
Manufaktur	72.727	47.768	Manufacturing
Pertanian	24.508	55.253	Agriculture
Tenaga listrik	14.037	1.500	Power supply
Lain-lain	1.955.675	2.062.928	Others
Total	4.512.585	3.399.116	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.175.011)	(970.609)	Allowance for impairment losses
Neto	**2.337.574**	**2.428.507**	**Net**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

i. Pembiayaan Syariah

Rincian pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022	
Piutang Murabahah	3.496.817	724.021	Murabahah receivables
Pembiayaan Musyarakah	1.637.181	4.146.158	Musyarakah financing
Piutang Ijarah	280.049	53.536	Piutang Ijarah
Pembiayaan Mudharabah	207.785	243.729	Mudharabah financing
Piutang Istishna	6.902	582	Piutang Istishna
Piutang Qardh	3.054	119	Qardh receivables
Total	**5.631.788**	**5.168.145**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.804)	(115.245)	Allowance for impairment losses
Neto	**5.539.984**	**5.052.900**	**Net**

j. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 22% sampai dengan 70% pada tanggal 31 Desember 2023 dari total kredit sindikasi. Risiko atas kredit sindikasi ditanggung secara proporsional oleh bank-bank peserta.

k. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Rupiah	10,75%	13,59%	Rupiah
Mata uang asing	6,96%	1,96%	Foreign currencies

l. Kredit kepada pihak berelasi

	2023	2022	
Modal kerja	619.779	370.000	Working capital
Investasi	-	363.699	Investments
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	20.867	27.634	Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers
Total (Catatan 38)	**640.646**	**761.333**	**Total (Note 38)**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.934)	(16.165)	Allowance for impairment losses
Neto	**632.712**	**745.168**	**Net**

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

i. Sharia financing

As at December 31, 2023 and 2022, the details of sharia financing/receivables are as follows:

j. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans and sharia financing/receivables provided to customers under syndication agreements with other banks. The Bank's shares as a member in syndicated loans were 22% to 70% as at December 31, 2023 of the total syndicated loans. Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating banks.

k. Average annual interest rates

The average interest rates per annum on loans are as follows:

l. Loans to related parties

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

m. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah adalah sebagai berikut:

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

m. Movements in allowance for impairment losses

The movements in allowance for impairment losses of loans and Sharia financing/receivables are as follows:

	2023				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	535.853	104.609	986.214	1.626.676	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Stage 2)	(188.371)	190.045	(1.674)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(1.206.777)	(143.842)	1.350.619	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	15.831	(4.476)	(11.355)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	3.968.635	386.059	4.226.660	8.581.354	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(2.213.865)	(35.878)	(4.375.453)	(6.625.196)	Written-off
Saldo akhir tahun	**911.306**	**496.517**	**2.175.011**	**3.582.834**	**Ending balance of the year**

	2022				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	420.937	230.889	4.009.988	4.661.814	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (Stage 2)	55.631	3.226	(58.857)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	256.143	74.418	(330.561)	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	87.203	(138.546)	51.343	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(284.061)	(65.378)	2.763.771	2.414.332	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	-	-	(5.449.470)	(5.449.470)	Written-off
Saldo akhir tahun	**535.853**	**104.609**	**986.214**	**1.626.676**	**Ending balance of the year**

*) Lain-lain termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) Others includes foreign exchange translation.

Di dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai termasuk cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah masing-masing sebesar Rp91.804 dan Rp115.245 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses for sharia financing/receivables amounted to Rp91,804 and Rp115,245 as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

m. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Total kredit yang diberikan dan total cadangan kerugian penurunan nilai yang evaluasi penurunan nilainya dilakukan secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

m. Movements in allowance for impairment losses (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

The total loans and allowance for impairment losses which impairment evaluation is individually and collectively assessed as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023		2022		
	Individual/ *Individual*	**Kolektif/ *Collective***	**Individual/ *Individual***	**Kolektif/ *Collective***	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	1.826.782	47.591.834	504.296	50.079.138	Loans and sharia financing/receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(760.232)	(2.822.602)	(161.554)	(1.465.122)	Allowance for impairment loss
Neto	**1.066.550**	**44.769.232**	**342.742**	**48.614.016**	**Net**

n. Kredit yang direstrukturisasi

Kredit yang telah direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp20.544.831 dan Rp22.032.583. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara perpanjangan masa pelunasan kredit dan perubahan persentase tingkat bunga. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp2.141.045 dan Rp580.509 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Rincian kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

n. Restructured loans

Restructured loans amounted to Rp20,544,831 and Rp22,032,583 as at December 31, 2023 and 2022, respectively. The terms of restructuring consist of extension of payment maturity dates and modification of interest rate. The allowance for impairment losses for restructured loans amounted to Rp2,141,045 and Rp580,509 as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

Detail of restructured loans as at December 31, 2023 and December 31, 2021 are as follow:

	2023	**2022**	
Lancar	16.105.203	20.268.552	Current
Dalam perhatian khusus	2.835.015	758.710	Special mention
Kurang lancar	86.234	335.532	Substandard
Diragukan	33.388	174.298	Doubtful
Macet	1.484.991	495.491	Loss
Total	**20.544.831**	**22.032.583**	**Total**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

o. Piutang pembiayaan entitas anak

Piutang pembiayaan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Piutang pembiayaan - bruto	272.218	280.098	Financing receivables - gross
Dikurangi:			Less:
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(54.424)	(82.272)	Unearned financing receivables
Total	217.794	197.826	**Total**
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(75.940)	(140.225)	Allowance for impairment losses
Total	**141.854**	**57.601**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2021, piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp197.826 dan Rp450.163, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 23).

Tingkat suku bunga per tahun:

	2023	2022	
Produk			Products
Mobil	6,25% - 39,21%	6,25% - 39,21%	Automobiles
Motor	15,5%	15,5%	Motorcycles

p. Kredit yang dihapus buku

Ikhtisar mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo awal	11.363.340	5.998.639	Beginning balance
Penghapusbukuan	4.228.668	5.449.470	Write-off
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(177.584)	(84.769)	Recoveries from written-off loans
Saldo akhir	**15.414.424**	**11.363.340**	**Ending balance**

q. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas kumpulan tagihan kredit pensiunan (”Kumpulan Tagihan”) yang dimilikinya dengan menunjuk PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manager Investasi. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Kontrak Investasi

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

o. The subsidiary’s financing receivables

The subsidiary’s financing receivables balance is as follows:

As at December 31, 2023 and 2022, the financing receivables balances pledged as collateral for borrowings amounted to Rp197,826 and Rp450,163, respectively (Note 23).

Annual interest rate:

p. Written-off loans

A summary of written-off loans is as follows:

q. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK EBA)

The Bank conducted the first securitization on its pension loans (“pool of receivables”), by appointing PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities of

9. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

q. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) (lanjutan)

Kolektif Efek Beragun Aset Bahana Bukopin - Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan yang Dialihkan (KIK-EBA BB) yang tertuang dalam Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 29 Agustus 2019. KIK-EBA BB dibentuk berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Mei 2019 dan diamandemen dengan aktaNo. 80 tanggal 29 Agustus 2019. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi dengan nilai pokok sebesar-besarnya Rp1.001.000 yang terdiri dari 16.783 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal cut-off final (29 Agustus 2019). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12% s.d 23,13% dengan jangka waktu 7 tahun.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

Selanjutnya, KIK-EBA BB menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam tiga kelas yaitu:

(i) EBA Kelas A1 senilai Rp1 (nominal penuh) yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 91,1% dari nilai pokok EBA Kelas A1 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 4 September 2022. EBA Kelas A1 mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA (triple A; Stable Outlook). Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-EBA BB telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-1026/PM.21/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

9. Loans And Sharia Financing/Receivables (continued)

q. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK EBA) (continued)

Bahana Bukopin - Pool of Transferred Pension loans (KIK-EBA-BB) based on sale-purchase deed dated August 29, 2019. KIK-EBA BB was established based on Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager and PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 33 dated May 22, 2019, and amended by deed No. 80 dated August 29, 2019. Nominal par value of sold and transferred receivables which represents selected receivables with maximum nominal value amounting to Rp1,001,000 consists of 16,783 debtors, was sold and transferred at their nominal value at final cut-off date (August 29, 2019). The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 12% up to 23.13% with maturity of 7 years.

Subsequent to the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Further, KIK-EBA BB issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in three types or classes as follows:

(i) Class A1 ABS amounting to Rp1 (full amount) which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 91.1% of the nominal value of class A1 ABS with interest at the annual fixed rate of 9.25% per annum and due on September 4, 2022. The Class A1 ABS was rated idAAA (triple A; Stable Outlook) by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The Registration Statement Letter from KIK-EBA-BB received effective statement based on Letter No. S-1026/PM.21/2019 dated Agustus 28, 2019 of the Chairman of BAPEPAM-LK;

9. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

q. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) (lanjutan)

(ii) EBA Kelas A2 senilai Rp1 (nominal penuh) yang ditawarkan dengan nilai 91,1% dari nilai pokok EBA Kelas A2. EBA Kelas A2 tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa pemegang EBA kelas A2 mempunyai hak untuk dibayar terlebih dahulu dari Pemegang EBA Kelas B.

(iii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp119.600 memiliki jangka waktu 7 tahun dan mewakili sebesar-besarnya 9,2% dari aset keuangan KIK-EBA BB. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang diukur pada biaya perolehan pada neraca Bank (Catatan 7).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp1.300.000 dari neraca Bank (penghentian pengakuan).

Berdasarkan perjanjian penyedia jasa tanggal 29 Agustus 2019, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa penagihan dalam transaksi sekuritisasi Kumpulan piutang diatas. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa pengumpul antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-EBA BB dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-EBA BB yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

9. Loans And Sharia Financing/Receivables (continued)

q. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK EBA) (continued)

(ii) Class A2 ABS amounting to Rp1 (full amount) which are offered at 91.1% of the nominal value of class A2 ABS. Class A2 ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the holder of Class A2 ABS has the first priority to be paid than the holder of Class B ABS.

(iii) Class B ABS with nominal value of Rp119,600 with due date of 7 years and represent maximum 9.2% of financial asset of KIK-EBA BB. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities. On December 31, 2019, Bank recorded Class B ABS as measured at amortised cost securities on the Bank's balance sheets (Note 7).

A true sale opinion was obtained on the sale of the pool of receivables from independent parties which consists of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has excluded the pool of receivables amounting to Rp1,300,000 from its balance sheets (derecognition).

Based on the Service Provider Agreement dated August 29, 2019, the Bank also acts as a collecting service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a collective service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-EBA BB and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-EBA BB, which represents the ABS holders.

9. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

r. Kredit yang dibeli dari BPI (sekarang PT Bank KB Bukopin Syariah)

Bank telah melakukan perjanjian pembelian atas sejumlah portofolio kredit dari BPI. Portofolio kredit tersebut dijamin dengan giro dari BPI.

Pembelian portofolio kredit ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap I sebesar Rp78.688 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2005, tahap II sebesar Rp132.012 dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2005, dan tahap III sebesar Rp93.432 dilakukan pada tanggal 31 Juli 2007.

Perjanjian ini telah sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 8 tertanggal 9 Agustus 2005, No. 18 tertanggal 12 Agustus 2005, dan No. 55 tertanggal 31 Juli 2007 dari Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H.

Seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 1c, sejak tanggal 31 Maret 2008, laporan keuangan BPI telah dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan konsolidasian Bank sehubungan dengan akuisisi 2.000.000.000 lembar saham seri C senilai Rp100.000. Pada saat laporan keuangan dikonsolidasi, agunan tunai dari BPI dieliminasi, dan Bank membentuk 100% cadangan kerugian berdasarkan saldo tersebut. Cadangan kerugian yang dibentuk tersebut diperhitungkan sebagai penyesuaian nilai wajar atas kredit yang diberikan dan menjadi bagian dari *goodwill* yang diakui pada saat akuisisi.

s. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah

i. Pada tanggal 15 Desember 2009, Bank melakukan perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi dengan PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) dimana Bank akan menyediakan dana investasi sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Beberapa ketentuan terkait perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
- Nisbah bagi hasil adalah sebesar 70% untuk Bank dan 30% untuk KBBS dan dapat direview setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Pembayaran nisbah bagi hasil berasal dari pendapatan operasional KBBS;
- Pembayaran pokok Investasi Mudharabah Subordinasi selambat-lambatnya dilaksanakan pada saat jatuh tempo.

9. Loans And Sharia Financing/Receivables (continued)

r. Loans purchased from BPI (currently PT Bank KB Bukopin Syariah)

The Bank entered into assets sale agreements on loan portfolio with BPI. These loans are secured with BPI's current accounts.

The loan purchase was conducted in several tranches. Tranche I amounting to Rp78,688 was performed on August 9, 2005, tranche II amounting to Rp132,012 was performed on August 12, 2005, and tranche III amounting to Rp93,432 was performed on July 31, 2007.

These agreements were notarized in the Asset Sale Agreement No. 8 dated August 9, 2005, No. 18 dated August 12, 2005, and No. 55 dated July 31, 2007 of Notary Tetty Herawati Soebroto, S.H.

As described in Note 1c, since March 31, 2008, BPI's financial statements have been consolidated to the Bank's consolidated financial statements in relation with the acquisition of 2,000,000,000 series C shares with a total of Rp100,000. When the financial statements are consolidated, cash collateral from BPI is eliminated, and the Bank provided 100% allowance for losses based on the outstanding balance. The allowance for losses is considered as adjustment on fair value of the loans and became part of the recognized goodwill during the acquisition.

s. Other significant information relating to loans and Sharia financing/receivables

i. On December 15, 2009, the Bank entered into an agreement of Subordinated Mudharabah Investment financing with PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) whereby the Bank will provide investment fund of Rp100,000 for 72 (seventy two) months period.

Some relevant provisions of the agreement are as follows:
- Revenue sharing (nisbah) is 70% for the Bank and 30% for KBBS and can be reviewed every six-month;
- Payment of revenue sharing (nisbah) comes from KBBS's operating income;
- Principal amount of Subordinated Mudharabah Investment will be paid at maturity date, at the latest.

9. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

s. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah (lanjutan)

Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi antara Bank dengan KBBS telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat No. 11/1594/DPbS tanggal 24 November 2009.

Pada tanggal 28 Desember 2009, KBBS telah melakukan pencairan pertama sebesar Rp50.000 berdasarkan perjanjian tersebut. Pada tahun 2016 pinjaman ini telah diperpanjang.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 seluruh portofolio kredit ini dieliminasi untuk laporan keuangan konsolidasian .

ii Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank. Jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan giro, tabungan, dan deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.982.893 dan Rp1.766.227.

iii. Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit rekening koran, cerukan, dan kredit reguler.

iv. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, kartu kredit, dan kredit perorangan termasuk kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

v. Kredit program Pemerintah terdiri dari kredit usaha rakyat, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit program kepada sektor koperasi, dan kredit pemilikan rumah.

vi. Pinjaman karyawan Bank terdiri dari kredit yang dibebani bunga khusus dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan suku bunga pasar dibebankan dan dicatat sebagai beban tenaga kerja.

9. Loans And Sharia Financing/Receivables (continued)

s. Other significant information relating to loans and Sharia financing/receivables (continued)

The Subordinated Mudharabah Investment agreement between the Bank and KBBS has been approved by Bank Indonesia with letter No. 11/1594/DPbS dated November 24, 2009.

On December 28, 2009, KBBS has performed the first withdrawal amounting to Rp50,000 based on the agreement. On 2016, this facility has been extended.

As at December 31, 2023 and 2022, the loan portfolio is eliminated for the consolidated financial statements.

ii. Certain loans are secured by registered mortgages, powers of attorney to sell, or by other guarantees acceptable to the Bank. The loans secured by demand deposits, savings deposits, and time deposits as at December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp2,982,893 and Rp1,766,227, respectively.

iii. Working capital loans consist of demand loans, overdraft, and regular loan facilities.

iv. Consumer loans consist of housing loan, car loan, credit card receivables, and personal loans including loans secured by cash collateral.

v. Government program loans consist of farming loans, investment loans, working capital loans, cooperative loans, and housing loans.

vi. Loans to the Bank's employees consist of loans granted with special interest rates and with terms between 1 (one) to 15 (fifteen) years, and are collected through monthly salary deductions. The difference between the employee loan's interest rates and market interest rate is expensed and recorded as personnel expenses.

10. Tagihan Dan Liabilitas Akseptasi / 10. Acceptances Receivable And Payable

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / a. By counterparties and currency

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	21.404	-	Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	102.298	7.134	United States Dollar
Yuan Cina	8.875	10.212	Chinese Yuan
Total	132.577	17.346	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.613)	(211)	Allowance for impairment losses
Neto	**130.964**	**17.135**	**Net**

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / b. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah:			Rupiah:
< 1 bulan	9.076	-	< 1 month
> 1 - 3 bulan	11.700	-	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	628	-	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	-	-	> 6 -12 months
Total	21.404	-	Total
Mata uang asing:			Foreign currencies:
< 1 bulan	20.572	3.833	< 1 month
> 1 - 3 bulan	59.300	10.453	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	31.301	3.060	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	-	-	> 6 - 12 months
Total	111.173	17.346	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.613)	(211)	Allowance for impairment losses
Neto	**130.964**	**17.135**	**Net**

Jumlah saldo liabilitas akseptasi adalah sama seperti yang tercatat dalam saldo akun tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Acceptances payable represent the same amount as acceptances receivable as at December 31, 2023 and 2022.

c. Berdasarkan kolektibilitas / c. By collectability

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua Tagihan Dan Liabilitas Akseptasi diklasifikasikan lancar.

All Acceptances Receivable And Payable are classified as current as at December 31, 2023 and 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

As at December 31, 2023 and 2022, management stated that the allowance for impairment losses is adequate.

11. Tagihan Dan Liabilitas Derivatif

Rincian transaksi derivatif atas swap mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

11. Derivative Receivable And Payable

Details of foreign currency swaps as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023				
	Nilai kontrak/ *Contract amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable*	Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable*	
Pihak ketiga					**Third parties**
Transaksi swap mata uang asing :					Foreign currency swap transaction :
Dolar Amerika Serikat:					**United States Dollar:**
PT Bank Permata Tbk	477.321	1.569	1.869	(300)	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	461.932	15	304	(289)	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	184.768	184	207	(23)	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	153.995	1	115	(114)	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	92.384	75	-	(75)	PT Bank Sinarmas Tbk
The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd	76.987	89	89	-	The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd
PT Bank Victoria International Tbk	46.192	417	417	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	30.795	21	21	-	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	15.397	18	18	-	PT Bank ANZ Indonesia
Bank BNP Paribas	3.843	-	-	(7)	Bank BNP Paribas
Total		**2.389**	**3.040**	**(808)**	**Total**

	2022				
	Nilai kontrak/ *Contract amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable*	Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable*	
Pihak ketiga					**Third parties**
Transaksi swap mata uang asing :					Foreign currency swap transaction :
Dolar Amerika Serikat:					**United States Dollar:**
PT Bank Central Asia Tbk	778.381	(8.719)	-	(8.719)	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	738.376	4.958	6.698	(1.740)	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Mega Tbk	155.694	(776)	-	(776)	PT Bank Mega Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	141.478	1.015	1.370	(355)	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Permata Tbk	93.986	348	580	(232)	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	47.282	579	579	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	31.135	(255)	-	(255)	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	31.135	(155)	-	(155)	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	15.595	27	27	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.568	(27)	-	(27)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total		**(3.005)**	**9.254**	**(12.259)**	**Total**

Kontrak-kontrak untuk posisi 31 Desember 2023 dan 2022 jatuh tempo masing-masing pada tanggal 2 Januari – 2 Februari 2024 dan 3 Januari – 12 Januari 2023.

These contracts as at December 31, 2023 and 2022 are due on January 2 – February 2, 2024 and January 3 – January 12, 2023, respectively.

12. Penyertaan Saham / 12. Investments in Shares

Rincian penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Investments in shares as at December 31, 2023 and 2022 consist of the following:

Nama perusahaan/*Name of company*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Simpanan keanggotaan/*Membership deposits:*				
PT Aplikanusa Lintasarta	Jasa Komunikasi/ *Communication Services*	0%	15	15
Total				**15**

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan manajemen Bank, penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan lancar.

Based on management's evaluation and review, investments in shares as at December 31, 2023 and 2022 are classified as current.

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna / 13. Fixed Assets and Right of Use Assets

2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluations*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan							**Cost**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Tanah	2.433.852	8.175	36.783	-	-	2.405.244	Land
Bangunan	1.089.319	5.561	6.224	-	-	1.088.656	Building
Perabotan dan peralatan kantor	722.539	14.084	4.761	-	-	731.862	Furniture, fixture and office equipment
Prasarana bangunan	73.775	351	-	-	-	74.126	Leasehold improvements
Aset dalam konstruksi	41.222	5.846	-	-	-	47.068	Asset under construction
Kendaraan bermotor	26.820	26.749	3.149	-	-	50.420	Motor vehicles
Total	4.387.527	60.766	50.917	-	-	4.397.376	Total
Aset hak guna sewa	299.428	10.136	60.206	-	-	249.358	Right of use of assets
Total	4.686.955	70.902	111.123	-	-	4.646.734	Total
Akumulasi penyusutan							**Accumulated depreciations**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Perabotan dan peralatan kantor	591.381	52.927	4.128	-	-	640.180	Furniture, fixture and office equipment
Bangunan	498.670	56.633	6.224	-	-	549.079	Building
Prasarana bangunan	51.880	8.655	-	-	-	60.535	Leasehold improvements
Kendaraan bermotor	21.866	5.299	3.514	-	-	23.651	Motor vehicles
Total	1.163.797	123.514	13.866	-	-	1.273.445	Total
Aset hak guna sewa	126.956	69.901	57.243	-	-	139.614	Right of use of assets
Total	1.290.753	193.415	71.109	-	-	1.413.059	Total
Nilai buku neto	**3.396.202**					**3.233.675**	**Net book value**

2022

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluations*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan							**Cost**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Tanah	2.377.779	12.826	34.590	-	77.837	2.433.852	Land
Bangunan	1.082.112	10.868	3.661	-	-	1.089.319	Building
Perabotan dan peralatan kantor	705.334	22.677	6.748	1.276	-	722.539	Furniture, fixture and office equipment
Prasarana bangunan	68.100	4.970	140	845		73.775	Leasehold improvements
Aset dalam konstruksi	43.428	4.485	4.570	(2.121)	-	41.222	Asset under construction
Kendaraan bermotor	28.969	1.394	3.543	-	-	26.820	Motor vehicles
Total	4.305.722	57.220	53.252	-	77.837	4.387.527	Total
Aset hak guna sewa	503.054	81.730	285.356	-	-	299.428	Right of use of assets
Total	4.808.776	138.950	338.608	-	77.837	4.686.955	Total

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

	2022						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluations*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Akumulasi penyusutan							**Accumulated depreciations**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Bangunan	447.570	66.234	15.134	-	-	498.670	Building
Perabotan dan peralatan kantor	538.059	57.637	4.315	-	-	591.381	Furniture, fixture and office equipment
Prasarana bangunan	40.865	11.027	12	-	-	51.880	Leasehold improvements
Kendaraan bermotor	21.340	3.390	2.864	-	-	21.866	Motor vehicles
Total	1.047.834	138.288	22.325	-	-	1.163.797	Total
Aset hak guna sewa	263.612	103.975	240.631	-	-	126.956	Right of use of assets
Total	1.311.446	242.263	262.956	-	-	1.290.753	Total
Nilai buku neto	**3.497.330**					**3.396.202**	**Net book value**

Keuntungan (kerugian) bersih dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Net gain (loss) on sale of fixed assets is as follows:

	2023	2022	
Hasil penjualan	7.200	32.581	Proceeds from sale
Nilai buku	(12.900)	(30.927)	Net book value
Keuntungan (kerugian) bersih dari penjualan aset tetap (Catatan 35)	**(5.700)**	**1.654**	**Net gain (loss) on sale of fixed asset (Note 35)**

Rincian aset dalam konstruksi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Detail of assets under construction as of December 31, 2023 and 2022 are as follow:

	2023			
	Jumlah/ *Total*	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Estimasi Penyelesaian/ *Estimated Completion*	
Tanah dan bangunan	47.065	25% - 90%	2024 - 2025	Land and buildings

	2022			
	Jumlah/ *Total*	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Estimasi Penyelesaian/ *Estimated Completion*	
Tanah dan bangunan	41.222	25% - 90%	2023 - 2024	Land and buildings

Pada tanggal 1 Maret 2016, Grup mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengakuan awal untuk tanah dari model biaya ke model revaluasi. Pada tahun 2022, Bank melakukan kembali revaluasi atas aset tanahnya.

On March 1, 2016, the Group change their accounting policy related to subsequent measurement of land from the cost model to the revaluation model. In 2022, the Bank performed revaluation for its land of asset.

Nilai wajar dari tanah yang dimiliki Bank pada 31 Desember 2022 dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Febriman, Siregar & Rekan penilai properti independen dengan tanggal penilaian 29 Juli 2022.

The fair values of land owned by the Bank as at December 31, 2022 are determined by Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Febriman, Siregar & Rekan, an independent property appraiser, with appraisal date of July 29, 2022.

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia dan telah sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal untuk tujuan pelaporan keuangan. Nilai wajar tanah adalah berdasarkan pendekatan data pasar dengan membandingkan harga-harga aset yang serupa yang dapat diobservasi.

Harga pasar yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut-atribut utama, seperti: ukuran tanah, lokasi dan biaya penggantian. Pengukuran nilai wajar juga mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset yang dinilai. Nilai wajar dari tanah diklasifikasikan sebagai tingkat 2 berdasarkan hierarki nilai wajar.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai revaluasi tanah pada tanggal revaluasi:

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

Valuation is performed based on Indonesian Valuation Standards and in accordance with POJK No. 28/POJK.04/2021 regarding Valuation and Presentation of Property Appraisal Report in Capital Market for the purposes of financial reporting. The fair value of land is based on market data approach by comparing observable market prices of similar assets.

Market prices in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as: land size, location, and replacement costs. The fair value measurements also consider highest and best use of the asset being valued. The fair value of lands is classified as level 2 based on hierarchy of fair value.

The following table presents the information on the revaluation of the land on the date of revaluation:

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Nilai buku bersih sebelum revaluasi/ *Net book value before revaluation*	**Nilai wajar pada tanggal revaluasi/ *Fair value on the date of revaluation***	**Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus***	
Tanah	2.220.971	2.298.808	77.837	Land

Pada tahun 2023 terdapat tanah yang di reklasifikasi menjadi aset terbengkalai dengan nilai perolehan ssebesar Rp22.395 dan nilai revaluasi yang dihapuskan sebesar Rp1.756. Mutasi surplus revaluasi telah tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian. Saldo surplus revaluasi per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.605.649 dengan penurunan surplus selama 2023 sebesar Rp1.756 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.603.893.

Mutasi surplus revaluasi telah tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian. Saldo surplus revaluasi per 1 Januari 2022 sebesar Rp1.527.812 dengan penambahan surplus selama 2022 sebesar Rp77.837 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.605.649.

Cadangan revaluasi tidak boleh didistribusikan kepada pemegang saham Bank.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan beberapa perusahaan asuransi diantaranya adalah PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Tania, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi

On 2023, there was land reclassified as abandoned assets with an acquisition value of Rp22,395 and eliminated revaluation amounting to Rp1,756. Movements in the revaluation surplus have been reflected in the Consolidated Statement of Changes in Equity. The revaluation surplus balance as at January 1, 2023 was Rp1,605,649 with the addition of a surplus for 2023 amounting to Rp1.756 therefore the balance as at December 31, 2023 was Rp1,603,893.

Movements in the revaluation surplus have been reflected in the Consolidated Statement of Changes in Equity. The revaluation surplus balance as at January 1, 2022 was Rp1,527,812 with the addition of a surplus for 2022 amounting to Rp77,837 therefore the balance as at December 31, 2022 was Rp1,605,649.

The revaluation reserves are not available for distribution to the Bank's shareholders.

Fixed assets, except land, are insured against losses by fire and other risks under blanket policies with several insurance companies including PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Tania, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Central Asia, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT KB Insurance yang merupakan pihak ketiga dari Bank. Nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.978.770 dan Rp2.514.644. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Aset tetap telah terdepresiasi penuh namun masih digunakan oleh Grup sebesar Rp574.439 dan Rp2.220.971 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, antara lain berupa bangunan, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Grup.

Aset hak guna per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

and PT KB Insurance which are third parties of the Bank. The total insurance coverage as at December 31, 2023 and 2022 are amounted to Rp2,978,770 and Rp2,514,644, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from such risks.

The Fixed Assets that have been fully depreciated but still in use by the Group amounting to Rp574,439 and Rp2,220,971 as at December 31, 2023 and 2022, respectively, included among others, building, office equipment and motor vehicles.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of fixed assets of the Group.

Right of use of assets as at December 31, 2023 and 2022 are follows:

2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan						**Cost**
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	222.500	5.874	36.335	-	192.039	Building
Kendaraan	44.023	1.105	3.517	-	41.611	Vehicle
Perlengkapan kantor	13.163	-	541	-	12.622	Office equipment
ATM	10.304	42	10.346	-	-	ATM
Rumah	9.438	3.115	9.467	-	3.086	House
Total	299.428	10.136	60.206	-	249.358	Total
Akumulasi penyusutan						**Accumulated depreciation**
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	82.320	46.342	33.372	-	95.290	Building
Kendaraan	25.107	9.777	3.517	-	31.367	Vehicle
Perlengkapan kantor	7.994	4.037	541	-	11.490	Office equipment
Rumah	6.522	4.412	9.467	-	1.467	House
ATM	5.013	5.333	10.346	-	-	ATM
Total	126.956	69.901	57.243	-	139.614	Total
Nilai buku neto	**172.472**				**109.744**	**Net book value**

2022

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan						**Cost**
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	306.245	45.404	129.149	-	222.500	Building
Kendaraan	59.936	563	16.476	-	44.023	Vehicle
Perlengkapan kantor	13.637	-	474	-	13.163	Office equipment
ATM	99.562	32.286	121.544	-	10.304	ATM
Rumah	23.674	3.477	17.713	-	9.438	House
Total	503.054	81.730	285.356	-	299.428	Total
Akumulasi penyusutan						**Accumulated depreciation**
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	156.367	54.640	128.687	-	82.320	Building
Kendaraan	30.381	11.420	16.694	-	25.107	Vehicle
Perlengkapan kantor	4.321	4.147	474	-	7.994	Office equipment
Rumah	16.365	7.796	17.639	-	6.522	House
ATM	56.178	25.972	77.137	-	5.013	ATM
Total	263.612	103.975	240.631	-	126.956	Total
Nilai buku neto	**239.442**				**172.472**	**Net book value**

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Bank menyewa beberapa aset termasuk rumah dinas, gedung kantor, ruang ATM, kendaraan dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

Bank had rent a number of assets which include official houses, offices, ATM space, vehicle and others. The average of lease term is 5 (five) years.

14. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari piranti lunak dan goodwill.

	2023	2022	
Piranti lunak	340.104	189.338	Software
Goodwill	295.711	295.711	Goodwill
Sub-total	635.815	485.049	Sub-total
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(350.230)	(283.055)	Accumulated amortization and impairment losses
Neto	**285.585**	**201.994**	**Net**

14. Intangible Assets

Intangible assets consist of computer softwares and goodwill.

a. Piranti lunak

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	189.338	150.766	-	340.104	Cost
Akumulasi amortisasi (Catatan 33)	(176.826)	(67.175)	-	(244.001)	Accumulated amortization (Note 33)
Nilai buku neto	**12.512**			**96.103**	**Net book value**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	189.233	8.825	8.720	189.338	Cost
Akumulasi amortisasi (Catatan 33)	(176.519)	(6.412)	6.105	(176.826)	Accumulated amortization (Note 33)
Nilai buku neto	**12.714**			**12.512**	**Net book value**

a. Softwares

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	189.338	150.766	-	340.104	Cost
Akumulasi amortisasi (Catatan 33)	(176.826)	(67.175)	-	(244.001)	Accumulated amortization (Note 33)
Nilai buku neto	**12.512**			**96.103**	**Net book value**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	189.233	8.825	8.720	189.338	Cost
Akumulasi amortisasi (Catatan 33)	(176.519)	(6.412)	6.105	(176.826)	Accumulated amortization (Note 33)
Nilai buku neto	**12.714**			**12.512**	**Net book value**

b. Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak (Catatan 1c). Perubahan atas saldo goodwill pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

b. Goodwill

Goodwill arose from the acquisition of subsidiaries (Note 1c). Movements in goodwill balance as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	295.711	-	-	295.711	Cost
Akumulasi amortisasi *)	(39.748)	-	-	(39.748)	Accumulated amortization *)
Akumulasi penurunan nilai	(66.481)	-	-	(66.481)	Accumulated impairment
Nilai buku neto	**189.482**			**189.482**	**Net book value**

14. Aset Takberwujud (lanjutan) / 14. Intangible Assets (continued)

b. Goodwill (lanjutan) / b. Goodwill (continued)

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan	295.711	-	-	295.711	Cost
Akumulasi amortisasi *)	(39.748)	-	-	(39.748)	Accumulated amortization *)
Akumulasi penurunan nilai	(66.481)	-	-	(66.481)	Accumulated impairment
Nilai buku neto	**189.482**			**189.482**	**Net book value**

*) Akumulasi amortisasi sampai dengan 1 Januari 2011

*) Accumulated amortization until January 1, 2011

Penurunan nilai sebesar Rp66.481 telah diakui karena jumlah tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan atas KBBS telah dihitung berdasarkan nilai pakai *(value in use)* yang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan berdasarkan anggaran keuangan yang disetujui oleh manajemen untuk periode 5 (lima) tahun.

Impairment losses amounting to Rp66,481 has been recognized as the carrying amount exceeds its recoverable amount. Recoverable amount of KBBS has been calculated based on value in use that is determined by discounting the future cash flows resulting from financial budget approved by management covering a 5 (five) year period.

Bank telah melakukan uji penurunan nilai atas goodwill yang terbentuk dari akuisisi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) dengan asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The Bank has performed impairment testing on goodwill resulting from acquisition of PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) with the following key assumptions used by the Bank:

2023	2022	
6,88%	10,88%	Discount rate
4,5%	3%	Projected growth rate
5,17%	-3,69%	Gross Domestic Product
2,28%	1,87%	Inflation rate
1,60%	5,90%	Terminal value growth

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there is no impairment on intangible assets as of December 31, 2023 and 2022.

15. Aset Lain-lain / 15. Other Assets

2023	2022	
Rupiah:		**Rupiah:**
2.503.459	2.858.081	Foreclosed assets - net
772.143	88.722	Advance payments
504.548	311.314	Prepaid Expenses
260.162	256.590	Accrued interest
141.159	344.498	Trade financing
98.972	100.295	Guarantee deposit
66.328	81.329	Receivables relating to credit card and ATM transactions - net
33.267	148.346	Softwares in development
12.640	7.638	Accrued revenue
1.655.983	1.645.729	Others - net
6.048.661	5.842.542	Sub-total

15. Aset Lain-lain (lanjutan) / 15. Other Assets (continued)

	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Bunga masih akan diterima	19.687	28.930	Accrued interest
Biaya dibayar di muka	106	942	Prepaid expenses
Sub-total	19.793	29.872	Sub-total
Total	**6.068.454**	**5.872.414**	**Total**

Pembiayaan transaksi perdagangan terdiri dari tagihan perdagangan UPAS, tagihan *flexy* gas, *flexy bill* dan *flexy health*, serta tagihan *invoice financing*. Dengan fasilitas ini debitur dapat memperoleh pembiayaan jangka pendek dari Grup dengan menjaminkan tagihan pelanggan kepada Bank, dan debitur dapat memilih untuk melunasi pinjaman tersebut sendiri atau Grup yang akan menagih kepada pelanggan. Fasilitas pembiayaan ini mulai dilaksanakan Grup pada tahun 2019.

Trade financing consists of trade UPAS, flexy gas, flexy bill, flexy health, and trade invoice financing. With these facilities, debtors can receive short term financing from the Group by using its invoices to customer as collateral to Bank, and debtors have the options to repay the financing by themselves or the Group can collect the amount required from the customers. The Group has only started these financing facilities in 2019.

Biaya dibayar di muka sebagian besar terdiri atas biaya-biaya sewa gedung, rumah, kendaraan, peralatan kantor, dan asuransi.

Prepaid expenses consist mainly of prepaid building rent, housing rent, car rent, office equipment rent, and insurance.

Agunan yang diambil alih merupakan agunan yang diambil alih oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian kredit yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Foreclosed assets consist of collaterals which were acquired by the Group in the settlement of loans in form of lands, buildings, vehicles, and others.

Nilai wajar agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp2.503.459 dan Rp2.858.081 per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Fair value of foreclosed assets amounting to Rp2,503,459 and Rp2,858,081 as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, agunan yang diambil alih berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2023 and 2022, foreclosed assets based on collectability are as follow:

	2023	2022	
Lancar	2.156	68.235	Current
Kurang lancar	910.081	1.995.308	Substandard
Diragukan	1.317.548	753.237	Doubtful
Macet	505.343	75.459	Loss
Saldo akhir tahun	2.735.128	2.892.239	Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai	(231.669)	(34.158)	Allowance for impaiment losses
Neto	**2.503.459**	**2.858.081**	**Net**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat agunan yang diambil alih merupakan nilai neto yang dapat direalisasi.

Management believes that the carrying value of foreclosed assets represents their net realizable values.

Perubahan cadangan kerugian untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for losses on foreclosed assets were as follows:

15. Aset Lain-lain (lanjutan) / 15. Other Assets (continued)

	2023	2022	
Saldo awal	34.158	24.367	Begining balance
Beban selama tahun berjalan	197.511	9.791	Provision during the year
Saldo akhir	**231.669**	**34.158**	**Ending balance**

Uang muka terdiri dari uang muka yang dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan cabang-cabang baru, relokasi cabang, renovasi gedung kantor, dan uang muka biaya lain-lain.

Advance payments consist of payments which relate to the opening of new branch offices, branch relocation, office building renovation, and other advance payments.

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan dari pihak ketiga atas pembayaran listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain melalui Grup.

Accrued revenue represents fees from third parties for electricity, water, telephone, tax, and other payments made through the Group.

Setoran jaminan terdiri dari setoran yang diberikan Grup kepada pihak ketiga sebagai jaminan atas pemakaian jasa atau perizinan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Guarantee deposits consist of Group's payment to third parties as collateral on services or license that is delivered by third parties.

16. Liabilitas Segera / 16. Liabilities Immediately Payable

	2023	2022	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			**Rupiah:**
Titipan pembayaran dari nasabah	193.272	220.517	Payments from customers
Kiriman uang yang belum direalisasi	58.017	36.667	Unsettled money transfer
Titipan pajak sebagai bank persepsi	40.116	42.423	Tax collection received as collecting bank
Deposit pembukaan rekening	3	12	Deposit for opening accounts
Lain-lain	136.965	61.862	Others
Sub-total	428.373	361.481	Sub-total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kiriman uang yang belum direalisasi	2.542	26.878	Unsettled money transfer
Lain-lain	487	163	Others
Sub-total	3.029	27.041	Sub-total
Total	**431.402**	**388.522**	**Total**

Titipan pembayaran dari nasabah terdiri dari pembayaran kepada beberapa rekanan payment point.

Payments from customers consist of payments to several payment points partners.

Lain-lain terdiri dari deposito berjangka yang telah jatuh tempo, setoran jaminan jatuh tempo dan lain-lain.

Others consist of matured time deposits, matured guarantee deposits and others.

17. Giro

a. Berdasarkan pihak

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah	3.080	259.920	Rupiah
Mata uang asing	6.014	398	Foreign currencies
Sub-total	9.094	260.318	Sub-total
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	2.723.031	2.920.568	Rupiah
Mata uang asing	445.523	397.041	Foreign currencies
Sub-total	3.168.554	3.317.609	Sub-total
Total	**3.177.648**	**3.577.927**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp459.743 dan Rp647.138.

Giro yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp753.970 dan Rp3.799.183.

Giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp58.280 dan Rp86.236.

b. Berdasarkan mata uang

	2023	2022	
Rupiah	2.726.111	3.180.488	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	417.845	357.951	United States Dollar
Yen Jepang	32.241	35.127	Japanese Yen
Dolar Singapura	722	3.491	Singapore Dollar
Dolar Australia	432	439	Australian Dollar
Euro Eropa	262	383	European Euro
Poundsterling Inggris	35	48	Great Britain Poundsterling
	451.537	397.439	
Total	**3.177.648**	**3.577.927**	**Total**

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Giro dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Dolar Australia, Euro Eropa, Dolar Singapura dan Poundsterling Inggris.

17. Demand Deposits

a. By counterparties

As at December 31, 2023 and 2022 demand deposits under sharia banking principles amounted to Rp459,743 and Rp647,138, respectively.

Demand deposits amounting to Rp753,970 and Rp3,799,183 are pledged as collateral or blocked by the Bank as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

Demand deposits under sharia banking principles amounting to Rp58,280 and Rp86,236 that are pledged as collateral for sharia financing/receivables granted to debtors as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

b. By currency

c. Average annual interest rates

Demand deposits in foreign currencies consist of United States Dollar, Japanese Yen, Australian Dollar, European Euro, Singapore Dollar and Great Britain Poundsterling.

17. Giro (lanjutan) / 17. Demand Deposits (continued)

d. Tingkat bunga rata-rata per tahun (lanjutan) / d. Average annual interest rates (continued)

Suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk Giro adalah sebagai berikut:

The weighted average of interest rate per annum for Demand deposits are as follows:

	2023	2022	
	%	%	
Rupiah	0,12	0,13	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Singapura	0,85	0,17	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	0,25	0,25	Great Britain Poundsterling
Dolar Amerika Serikat	0,10	0,11	United States Dollar
Euro Eropa	0,09	0,01	European Euro
Dolar Australia	0,03	0,20	Australian Dollar
Yen Jepang	0,03	0,16	Japanese Yen

18. Tabungan / 18. Savings Deposits

a. Berdasarkan pihak / a. By counterparties

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah:			**Rupiah:**
SiAga	18.130	9.546	SiAga
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
SiAga	361	324	SiAga
	18.491	9.870	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			**Rupiah:**
SiAga	6.012.162	5.609.135	SiAga
Wadiah	249.284	280.039	Wadiah
Mudharabah	228.658	191.752	Mudharabah
Kerjasama	206.692	270.524	Kerjasama
Sikosi	-	243.125	Sikosi
Lain-lain	104.545	236.594	Others
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
SiAga	53.352	114.745	SiAga
	6.854.693	6.945.914	
Total	**6.873.184**	**6.955.784**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp477.942 dan Rp471.791.

As at December 31, 2023 and 2022, savings deposits under sharia banking principles amounting to Rp477,942 and Rp471,791, respectively.

Adapun pos tabungan lain-lain terdiri atas produk Tabungan Simple, Tabungan Wokee, Tabungan Haji dan Tabunganku.

Savings-Others consist of some products such as Tabungan Simple, Tabungan Wokee, Tabungan Haji and Tabunganku.

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.119.864 dan Rp2.407.214.

Savings deposits amounting to Rp2,119,864 and Rp2,407,214 are pledged as collateral or blocked by the Bank as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

18. Tabungan (lanjutan)

a. Berdasarkan pihak

Tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.305 dan Rp4.585.

18. Savings Deposits (continued)

a. By counterparties

Savings deposits under sharia banking principles amounting to Rp17,305 and Rp4,585 are pledged as collateral to sharia financing/receivables granted to debtors as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

b. Berdasarkan mata uang / b. By currency

	2023	2022	
Rupiah	6.819.471	6.840.715	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	51.876	112.659	United States Dollar
Euro Eropa	1.087	1.083	European Euro
Dolar Australia	319	335	Australian Dollar
Yen Jepang	214	300	Japanese Yen
Dolar Singapura	210	684	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	7	8	Great Britain Poundsterling
Sub-total	53.713	115.069	Sub-total
Total	**6.873.184**	**6.955.784**	**Total**

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun / c. Average annual interest rates

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Poundsterling Inggris, Euro Eropa, Dolar Singapura dan Yen Jepang.

Saving deposits in foreign currencies consist of United States Dollar, Australian Dollar, Great Britain Poundsterling, European Euro, Singapore Dollar and Japanese Yen.

Suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk tabungan adalah sebagai berikut:

The weighted average of interest rate per annum for saving deposits are as follows:

	2023	2022	
	%	%	
Rupiah	0,16	0,21	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Singapura	1,00	0,88	Singapore Dollar
Dolar Australia	0,26	1,00	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	0,25	0,25	Great Britain Poundsterling
Euro Eropa	0,08	0,07	European Euro
Dolar Amerika Serikat	0,06	0,10	United States Dollar
Yen Jepang	0,01	0,01	Japanese Yen

19. Deposito Berjangka

a. Berdasarkan pihak

19. Time Deposits

a. By counterparties

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah	38.129	55.086	Rupiah
Mata uang asing	2.182	761	Foreign currencies
	40.311	55.847	

19. Deposito Berjangka (lanjutan) / 19. Time Deposits (continued)

a. Berdasarkan pihak (lanjutan) / a. By counterparties (continued)

	2023	2022	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	31.206.482	38.216.295	Rupiah
Mata uang asing	3.491.518	3.156.517	Foreign currencies
	34.698.000	41.372.812	
Total	**34.738.311**	**41.428.659**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp5.068.360 dan Rp4.470.295.

As at December 31, 2023 and 2022 time deposits under sharia banking principles amounted to Rp5,068,360 and Rp4,470,295, respectively.

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.035.272 dan Rp869.451.

Time deposits amounting to Rp1,035,272 and Rp869,451 are pledged as collateral or blocked by the Bank as at December 31, 2023 and 2022, respectively.

Deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp125.717 dan Rp420.559.

Time deposits under sharia banking principles amounting to Rp125,717 and Rp420,559 are pledged as collateral to sharia financing/ receivables granted to debtors as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

b. Berdasarkan mata uang / b. By currency

	2023	2022	
Rupiah	31.244.611	38.271.381	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	3.489.847	3.150.417	United States Dollar
Euro Eropa	2.376	2.312	European Euro
Dolar Australia	842	3.674	Australian Dollar
Dolar Singapura	635	826	Singapore Dollar
Yen Jepang	-	49	Japanese Yen
Sub-total	3.493.700	3.157.278	Sub-total
Total	**34.738.311**	**41.428.659**	**Total**

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun berdasarkan periode penempatan / c. Average annual interest rate by contract period

	Tingkat bunga rata-rata per tahun (%)/ *Average interest rates per annum (%)*		Nilai nominal/*Nominal value*		
	2023	2022			
	%	%	2023	2022	
Rupiah:					**Rupiah:**
1 bulan	3,34	3,10	8.641.175	12.160.413	1 month
3 bulan	3,76	3,28	8.964.456	9.021.219	3 months
6 bulan	3,97	3,62	7.750.899	6.733.785	6 months
12 bulan	4,00	3,82	5.888.081	10.355.964	12 months
			31.244.611	38.271.381	

19. Deposito Berjangka (lanjutan) / 19. Time Deposits (continued)

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun berdasarkan periode penempatan (lanjutan) / c. Average annual interest rate by contract period (continued)

	Tingkat bunga rata-rata per tahun (%)/ *Average interest rates per annum (%)*		Nilai nominal/*Nominal value*		
	2023	2022	2023	2022	
	%	%			
Mata uang asing:					**Foreign currencies:**
1 bulan	0,02	0,02	990.041	2.546.026	1 month
3 bulan	0,03	0,02	1.592.250	33.365	3 months
6 bulan	0,04	0,02	120.453	21.997	6 months
12 bulan	0,05	0,03	790.956	555.890	12 months
			3.493.700	3.157.278	
Total			**34.738.311**	**41.428.659**	**Total**

d. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo / d. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah:			**Rupiah:**
Sampai dengan 1 bulan	12.969.924	16.143.833	Up to 1 month
> 1 - 3 bulan	9.384.799	9.305.142	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	6.829.733	5.914.806	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	2.060.155	6.907.600	> 6 - 12 months
	31.244.611	38.271.381	
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Sampai dengan 1 bulan	1.022.486	2.622.924	Up to 1 month
> 1 - 3 bulan	1.653.199	32.590	> 1 - 3 months
> 3 - 6 bulan	157.656	16.880	> 3 - 6 months
> 6 - 12 bulan	660.359	484.884	> 6 - 12 months
	3.493.700	3.157.278	
Total	**34.738.311**	**41.428.659**	**Total**

20. Simpanan Dari Bank Lain / 20. Deposits From Other Banks

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / a. By currency and type

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah:			**Rupiah:**
Giro	913	3.032	Demand deposits
Dolar Amerika Serikat:			United States Dollar:
Interbank call money	7.698.500	10.118.875	Interbank call money
Sub-total	7.699.413	10.121.907	Sub-total
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			**Rupiah:**
Interbank call money	130.000	-	Interbank call money
Tabungan	22.060	89.109	Savings deposits
Deposito berjangka	21.200	150.115	Time deposits
Giro	14.048	20.244	Demand deposits
Sub-total	187.308	259.468	Sub-total
Total	**7.886.721**	**10.381.375**	**Total**

20. Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat simpanan dari bank lain yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp180.553 dan Rp64.651.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari Bank lain yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank.

20. Deposits From Other Banks (continued)

a. By currency and type (continued)

As at December 31, 2023 and 2022, deposits from other banks under sharia banking principles amounted to Rp180,553 and Rp64,651, respectively.

As at December 31, 2023 and 2022, there were no deposits from other Banks pledged as collateral or blocked by the Bank.

b. Tingkat bunga rata-rata per tahun / b. Average annual interest rates

	2023	2022	
	%	%	
Rupiah:			**Rupiah:**
Deposito berjangka	3,55	3,54	Time deposits
Tabungan	1,19	1,27	Savings deposits
Giro	0,80	0,68	Demand deposits
Interbank call money	0,48	3,62	Interbank call money
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Interbank call money	5,36	2,02	Interbank call money
Deposito berjangka	0,00	0,42	Time deposits
Giro	000	0,00	Demand deposits

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo / c. Based on their remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah:			**Rupiah:**
Sampai dengan 1 bulan	179.221	172.298	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	8.000	71.701	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 12 bulan	1.000	18.501	> 3 months - 12 months
	188.221	262.500	
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Sampai dengan 1 bulan	4.465.130	10.118.875	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	3.233.370	-	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 12 bulan	-	-	> 3 months - 12 months
	7.698.500	10.118.875	
Total	**7.886.721**	**10.381.375**	**Total**

21. Pajak Penghasilan / 21. Income Tax

a. Utang pajak / a. Taxes payable

	2023	2022	
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 23 dan 4(2)	38.148	37.168	Articles 23 and 4(2)
Pasal 26	12.786	9.595	Article 26
Pasal 21	7.670	5.211	Article 21
Pajak pertambahan nilai	6.006	4.456	Value added tax
Lain-lain	25	66	Other
Total	**64.635**	**56.496**	**Total**

21. Pajak Penghasilan (lanjutan) / 21. Income Tax (continued)

b. Beban pajak penghasilan / b. Income tax expense

	2023	2022	
Manfaat pajak tangguhan - Bank	702.789	94.711	Deferred tax benefit - Bank
Manfaat pajak tangguhan - entitas anak	28.895	18.441	Deferred tax benefit - subsidiaries
Total manfaat pajak tangguhan	731.684	113.152	Total deferred tax benefit
Total Manfaat Pajak Tahun Berjalan	**731.684**	**113.152**	**Total Current Year Tax Benefit**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan menggunakan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the loss before income tax multiplied by the enacted tax rate is as follows:

	2023	2022	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(6.787.387)	(5.145.656)	Loss before income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Bagian laba bersih entitas anak	573.818	80.965	Net income of subsidiaries
Rugi sebelum pajak penghasilan - Bank	(6.213.569)	(5.064.691)	Loss before income tax - Bank
Manfaat pajak sesuai tarif pajak yang berlaku	1.366.985	1.114.232	Tax benefit based on applicable tax rate
Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan	(11.976)	(22.745)	Non-deductible expenses
Pendapatan dari investasi reksadana yang tidak dikenakan pajak	567	1.700	Income from mutual fund investment exempted from tax
Penyesuaian atas manfaat pajak tangguhan	(652.787)	(998.476)	Adjustment in deferred tax benefit
Penyesuaian tarif pajak penghasilan badan	-	-	Adjustment in corporate income tax rate
	702.789	94.711	
Manfaat pajak entitas anak Tangguhan	28.895	18.441	Tax benefits of subsidiaries Deferred
	28.895	18.441	
Manfaat pajak penghasilan - neto	**731.684**	**113.152**	**Income tax benefit - net**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before income tax expense, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

21. Income Tax (continued)

b. Income tax expense (continued)

The reconciliation between loss before income tax expense, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

2023	2022	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(6.787.387)	(5.145.656)	Loss before income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Bagian laba bersih entitas anak	573.818	80.965	Net income of subsidiaries
Rugi sebelum pajak penghasilan - Bank	(6.213.569)	(5.064.691)	Loss before income tax - Bank
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Representasi	3.707	5.037	Representations
Sumbangan dan hadiah	3.500	6.494	Donations and gifts
Aktivitas karyawan	250	1.341	Employee activities
Reksadana yang tidak dikenakan pajak	(2.576)	(7.729)	Investment exempted from tax
Lain-lain	46.978	90.513	Others
Total perbedaan tetap	51.859	95.656	Total permanent differences
Perbedaan waktu:			Timing differences:
Cadangan kerugian (pembalikan cadangan):			Provision (reversal of allowance) for impairment losses on:
Kredit yang diberikan dan piutang	2.528.696	(2.201.316)	Loans and receivables
Penyusutan aset tetap	11.221	(6.868)	Depreciation of fixed assets
Beban untuk kesejahteraan karyawan	(15.103)	(229.059)	Employee service entitlements expense
Cadangan bonus	19.326	(2.265)	Bonus allowance
Cadangan kerugian penurunan nilai asset yang diambil alih	204.873	-	Allowance for impairment losses - foreclosed Asset
Cadangan kerugian penurunan nilai flexy pay	51.597	-	Allowance for impairment losses of flexy pay
Lain-lain	(23.771)	(24.211)	Others
Total perbedaan waktu	2.776.839	(2.463.719)	Total timing differences
Rugi fiskal	(3.384.871)	(7.432.754)	Fiscal loss

Kompensasi rugi fiskal yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

The fiscal loss compensation that may potentially be utilized to reduce taxable income in the future is as follows:

Kompensasi rugi fiskal			**Fiscal loss compensation carry forward**
2021	-	1.806.355	2021
2022	6.429.474	7.432.754	2022
2023	3.384.871	-	2023
Total	**9.814.345**	**9.239.109**	**Total**

Rugi fiskal Bank hasil rekonsiliasi di atas akan menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan untuk pelaporan SPT tahun buku 2023.

Fiscal loss of the Bank resulting from the reconciliation above will became the basis for filing the Corporate Annual Tax Returns for fiscal years 2023.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rugi fiskal Bank hasil rekonsiliasi di atas telah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan untuk pelaporan SPT tahun buku 2022.

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan perpajakan adalah sebagai berikut:

21. Income Tax (continued)

b. Income tax expense (continued)

Fiscal loss of the Bank resulting from the reconciliation agreed with filing the Corporate Annual Tax Returns for fiscal years 2022.

c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects of significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes are as follows:

	Saldo Awal 1 Januari/ *Beginning Balance January 1, 2023*	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credit to Profit or Loss*	Dikreditkan *ke Ekuitas/ Credited to Equity*	Saldo Akhir 31 Desember/ *Ending Balance December 31, 2023*	
Aset pajak tangguhan					**Deferred tax assets**
Liabilitas imbalan kerja	46.805	(24.254)	(1.415)	21.136	Post-employee benefit liability
Cadangan kerugian kartu kredit	5.791	(1.042)	-	4.749	Allowance for credit card
Penyusutan aset tetap	17.535	(11.266)	-	6.269	Depreciation of fixed assets
Rugi fiskal	2.032.604	126.550	-	2.159.154	Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai aset yang diambil alih	-	45.072	-	45.072	Allowance for impairment losses of foreclosed aset
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(214.915)	556.313	-	341.398	Allowance for impairment losses on loans financial assets and sharia financing/receivable
Lain-lain	5.428	15.475	-	20.903	Others
Aset pajak tangguhan	1.893.248	706.848	(1.415)	2.598.681	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan					**Deferred tax liabilities**
Amortisasi goodwill	(33.673)	(4.059)	-	(37.732)	Goodwill amortization
Kentungan dari perubahan nilai atas instrumen pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(741)	-	(1.392)	(2.133)	Unrealized on changes in fair value of debt instrument through comprehensive income
Liabilitas pajak Tangguhan	(34.414)	(4.059)	(1.392)	(39.865)	Deferred tax liabilities
Aset pajak tangguhan - Bank - neto	**1.858.834**	**702.789**	**(2.807)**	**2.558.816**	**Deferred Tax assets - Bank - net**
Aset pajak tangguhan - entitas anak - neto	**83.317**	**28.895**	**(485)**	**111.727**	**Deferred tax assets - ubsidiaries - net**
Total	**1.942.151**	**731.684**	**(3.292)**	**2.670.543**	**Total**

	Saldo Awal 1 Januari/ *Beginning Balance January 1, 2022*	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credit to Profit or Loss*	Dikreditkan *ke Ekuitas/ Credited to Equity*	Saldo Akhir 31 Desember/ *Ending Balance December 31, 2022*	
Aset pajak tangguhan					**Deferred tax assets**
Liabilitas imbalan kerja	102.425	(50.393)	(5.227)	46.805	Post-employee benefit liability
Cadangan kerugian kartu kredit	6.845	(1.054)		5.791	Allowance for credit card
Penyusutan aset tetap	19.046	(1.511)		17.535	Depreciation of fixed assets
Rugi fiskal	1.395.876	636.728		2.032.604	Fiscal loss
Lain-lain	6.136	(708)		5.428	Others
Aset pajak tangguhan	**1.530.328**	**583.062**	**(5.227)**	**2.108.163**	**Deferred tax assets**

21. Pajak Penghasilan (lanjutan) / 21. Income Tax (continued)

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan) / c. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

	Saldo Awal 1 Januari/ *Beginning Balance January 1, 2022*	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credit to Profit or Loss*	Dikreditkan *ke Ekuitas/ Credited to Equity*	Saldo Akhir 31 Desember/ *Ending Balance December 31, 2022*	
Liabilitas pajak tangguhan					**Deferred tax liabilities**
Amortisasi goodwill	(29.612)	(4.061)		(33.673)	Goodwill amortization
Kentungan dari perubahan nilai atas instrumen pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(16.170)		15.429	(741)	Unrealized on changes in fair value of debt instrument through comprehensive income
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	269.375	(484.290)		(214.915)	Allowance for impairment losses on loans financial assets and sharia financing/receivable
Liabilitas pajak Tangguhan	**223.593**	**(488.351)**	**15.429**	**(249.329)**	**Deferred tax liabilities**
Aset pajak tangguhan - Bank - neto	1.753.921	94.711	10.202	1.858.834	Deferred Tax assets - Bank - net
Aset pajak tangguhan - entitas anak - neto	65.311	18.441	(436)	83.317	Deferred tax assets - subsidiaries -net
Total	**1.819.232**	**113.152**	**9.766**	**1.942.151**	**Total**

d. Administrasi / d. Administrative

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan tambahan pengurangan tarif pajak sebesar 3% bagi wajib pajak dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The Regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate of 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/2020 di Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Wajib Pajak dalam negeri:

In Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1/2020 in Article 5 paragraph 2 mentions that domestic tax payers:

i. Berbentuk perseroan terbuka;
ii. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen);
iii. Memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

i. In the form of a public company;
ii. With the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent);
iii. Fulfilling certain requirements, can get a tariff of 3% (three percent) lower than the rate as referred to in paragraph (1) letter a and letter b.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

d. Administrasi (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang telah dilaporkan Nomor: DE/I/24-0221 tanggal 4 Januari 2024 dan DE/I/23-0330 tanggal 4 Januari 2023 dari PT Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 and 31 Desember 2022, Bank tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak karenanya Bank menggunakan tarif pajak 22% dalam perhitungan PPh Badan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Pemeriksaan pajak

2003, 2004, dan 2006

Pada bulan September 2008, berdasarkan pemeriksaan Tahun Pajak 2003, 2004 dan 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN atas penjualan AYDA dan transaksi murabahah, total senilai Rp74.700.

Atas SKPKB tersebut, pada bulan Desember 2008, Bank mengajukan keberatan karena menurut Bank, baik transaksi penjualan AYDA maupun murabahah bukanlah merupakan objek PPN. Transaksi murabahah bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan transaksi pembiayaan dengan akad jual beli. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan murabahah adalah jasa keuangan di bidang pembiayaan. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jasa keuangan bidang pembiayaan masuk dalam kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Pada tanggal 19 Oktober 2009, DJP menolak keberatan Bank.

21. Income Tax (continued)

d. Administrative (continued)

Based on the Monthly Report on Share Ownership of Issuers or Public Companies and Recapitulation which has been reported Number: DE/I/24-0221 dated January 4, 2024 and DE/I/23-0330 dated January 4, 2023 from PT Datindo Entrycom for the Bank's share ownership for the period ending December 31, 2023 and December 31, 2022, the Bank does not meet the criteria for obtaining a reduced tax rate, therefore the Bank uses a tax rate of 22% in calculating Corporate Income Tax.

In accordance with the taxation laws in Indonesia, the Bank calculates and submits income tax returns based on self-assessment. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under the prevailing regulations.

e. Tax assessments

2003, 2004, and 2006

In September 2008, based on Tax Audit for years 2003, 2004 and 2006, Tax Office (KPP) issued Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) for VAT on foreclosed assets and VAT on murabahah amounted to Rp74,700.

For that SKPKB, in December 2008, the Bank proposed an objection, because according to the Bank, both foreclosed assets and murabahah transactions were not subject to VAT. Murabahah transactions are not buying and selling transactions, but financing transactions under sale and purchase contracts. As stipulated in Law No. 7 of 1992 concerning Banking which has been amended by Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, murabahah financing is financial services in the area of financing. In accordance with Law No. 8 of 1983 which was amended by Law No. 18 of 2000 concerning VAT on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, financial services in the financing sector included in the service category that is not subject to VAT. On October 19, 2009, the DGT rejected the Bank's objection.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2003, 2004, dan 2006 (lanjutan)

Atas penolakan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, baik terhadap pengenaan PPN atas penjualan AYDA maupun transaksi murabahah. Pada bulan Juni 2011, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding yang diajukan Bank.

Sebagai syarat pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat 4, Bank telah melakukan cicilan pembayaran SKPKB kepada Kantor Pajak, yaitu sejumlah 50% dari nilai sengketa atau sebesar Rp32.700. Pengeluaran ini dicatat dalam aset lain-lain (uang muka). Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Bank, atas sengketa PPN penjualan AYDA, Bank telah melakukan penyesuaian uang muka sebesar Rp2.191. Dengan demikian, pembayaran SKPKB PPN yang saat ini masih dicatat di aset lain-lain (uang muka) adalah atas transaksi murabahah, yaitu sebesar Rp30.509.

Selama proses sengketa pajak berlangsung (2009-2010), Pemerintah mengeluarkan undang-undang/peraturan terkait pengenaan PPN atas transaksi murabahah. Pada tanggal 15 Oktober 2009, Pemerintah menerbitkan UU No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. UU tersebut menegaskan bahwa terhitung sejak 1 April 2010, jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak dikenai PPN.

Pada tanggal 25 Mei 2010, Pemerintah menerbitkan UU No. 2 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010, yang menyatakan bahwa PPN murabahah Bank syariah (termasuk Bank KB Bukopin), ditanggung oleh Pemerintah, dengan pagu anggaran untuk Bank KB Bukopin sebesar Rp76.414.

Menindaklanjuti UU tersebut, pada tanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan No. 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010 yang menyatakan bahwa:

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2003, 2004, and 2006 (continued)

For this refusal, on December 30, 2009, the Bank filed an appeal to the Tax Court, both for the imposition of VAT on the sale of the foreclosed assets and murabahah transactions. In June 2011, the Tax Court rejected the appeal submitted by the Bank.

As a precondition for filing an appeal as stipulated in Law No. 14 of 2002 concerning Tax Court Article 36 paragraph 4, the Bank has made installments of SKPKB payments to the Tax Office, which is a total of 50% of the value of the dispute or amounting to Rp32,700. This expenditure is recorded in other assets (down payment). Based on the decision of the Tax Court which rejected the Bank's appeal, over the dispute over the sale of the foreclosed assets, the Bank made an advance adjustment of Rp2,191. Thus, the payment of VAT SKPKB currently recorded in other assets (down payment) is for murabahah transactions, which is amounted to Rp30,509.

During the tax dispute process (2009-2010), the Government issued a law/regulation related to the imposition of VAT on murabahah transactions. On October 15, 2009, the Government issued Law No. 42 of 2009 concerning the Third Amendment to Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Goods and Services Tax and Sales Tax on Luxury Goods. The law stipulates that starting April 1, 2010, financing services based on sharia principles are not subject to VAT.

On May 25, 2010, the Government issued Law No. 2 of 2010 concerning Amendments to Law Number 47 of 2009 concerning the State Budget (APBN) Budget Year 2010, which states that Murabahah VAT of sharia banks (including Bank KB Bukopin), is borne by the Government, with a budget plafond for Bank KB Bukopin of Rp76,414.

Following up on the Act, on December 28, 2010, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued regulation No. 251/PMK.011/2010 concerning Value Added Tax borne by the Government for the Fiscal Year 2010 of Murabahah Transactions Sharia Banking stating that:

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2003, 2004, dan 2006 (lanjutan)

1) Atas transaksi murabahah perbankan syariah yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2010, dikenai PPN.
2) PPN terutang yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, ditanggung Pemerintah.
3) PPN ditanggung pemerintah tersebut, diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp328.000 sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2010 (termasuk untuk Bank KB Bukopin Rp76.414).
4) Wajib pajak bank syariah yang telah membayar Surat Ketetapan Pajak atas transaksi murabahah, dapat diberikan pengembalian pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2010 dan PMK No. 251/PMK.011/2010 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2017, Bank mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Pada tanggal 7 April 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak permohonan Bank. Sehubungan dengan penolakan tersebut, Bank mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 13 Februari 2018, Bank telah menerima keputusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Bank. Atas keputusan tersebut, pada tanggal 30 April 2018, Bank telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 8 November 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan untuk peninjauan kembali sengketa PPN murabahah tahun 2003 dan menolak permohonan Bank.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan peninjauan kembali sengketa PPN murabahah tahun 2004 dan 2006, dan menolak permohonan Bank.

Pada tahun 2022, Bank memutuskan untuk menghentikan upaya hukum penyelesaian sengketa pajak ini dan menerima hasil keputusan Mahkamah Agung.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2003, 2004, and 2006 (continued)

1) Those sharia banking murabahah transactions conducted before April 1, 2010, are subject to VAT.
2) The VAT payable issued by the Tax Assessment Letter is borne by the Government.
3) The VAT borne by the Government therein, is given a budget ceiling of Rp328,000 as stipulated in Law No. 2 of 2010 (including for Bank KB Bukopin Rp76,414).
4) Sharia bank taxpayers who have paid Tax Assessment Letters for murabahah transactions, can be given a tax refund in accordance with applicable tax provisions.

Based on Law No. 2 of 2010 and PMK No. 251/PMK.011/2010, on March 22, 2017, the Bank submitted an application for the return of excess tax payments that should not be payable under Article 17 paragraph (2) of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation as amended several times, the latest by Law No. 16 of 2009. On April 7, 2017, the Directorate General of Taxation (DGT) rejected the Bank's request. In connection with the refusal, the Bank filed a claim to the Tax Court.

On February 13, 2018, the Bank has accepted the decision of the Tax Court to reject the Bank's claim. For the decision, on April 30, 2018, the Bank has submitted a request for a judicial review to the Supreme Court.

On November 8, 2018, the Supreme Court issued the decision for judicial review of the VAT murabahah year 2003 and rejected the Bank's request.

On December 10, 2018, the Supreme Court issued the decision for judicial review of the VAT murabahah year 2004 and 2006, and rejected the Bank's request.

In 2022, the Bank decided to dismiss the legal attempts on this tax dispute and accept the results of the Supreme Court's decision.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2013

Pada tanggal 27 Agustus 2018, Bank telah menerima beberapa SKP nihil, SKPKB, dan STP atas pemeriksaan PPN tahun pajak 2013. Total nilai SKPKB dan STP adalah Rp3.638 dan seluruhnya telah dibayar pada tahun 2018. Dari total SKPKB dan STP senilai Rp3.638 tersebut, jumlah yang disetujui dan tidak diajukan keberatan adalah sebesar Rp1.568. Atas SKPKB yang tidak disetujui dan diajukan keberatan sebesar Rp2.069 pada tanggal 21 November 2018, Bank telah mengajukan keberatan. Pada tanggal 23 September 2019, Bank telah menerima putusan keberatan, dengan hasil Pengadilan Pajak menolak permohonan keberatan Bank.

Atas penolakan tersebut, pada tanggal 13 Desember 2019, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan disebabkan kondisi Covid 19 yang menjadi wabah pandemik di 2020 menyebabkan persidangannya sering tertunda sehingga melewati masa 1 tahun.

Pada tanggal 11 April 2022 Bank menerima putusan Banding. Majelis Hakim mengabulkan seluruh banding yang diajukan Bank terkait PPN AYDA sebesar Rp2.069. Tetapi pihak Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Atas sengketa pajak ini, Bank telah membentuk cadangan sebesar 100%.

Pada tanggal 21 Desember 2023 Bank menerima putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim menolak seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali DJP, sehingga sengketa tersebut dimenangkan oleh Bank. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, belum ada upaya hukum lanjutan dari DJP.

2016

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Bank dan Pemeriksa melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir dan Risalah Pembahasan.

Bank telah menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan seluruh jenis pajak (PPh Badan, PPh dan PPN) untuk tahun pajak 2016.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2013

On August 27, 2018, the Bank has received Notices of nil Tax Assessment, SKPKB and STP for VAT assessment fiscal year 2013. The total amount of SKPKB and STP is Rp3,638 which has been fully paid. From the total amount of Rp3,638, the amount being approved and didn't request the objection is Rp1,568. For the rest amount of SKPKB amounting to Rp2,069, which is disapproved, the Bank filed the objection on November 21, 2018. On September 23, 2019, the Bank had received the objection decision, with the result of the Tax Court rejected the Bank's objection request.

As the action to this rejection, on December 13, 2019, the Bank submitted an appeal to the Tax Court and due to the condition of Covid 19 which became a pandemic in 2020, the trial was often delayed so that it passed a period of 1 year.

On April 11, 2022 the Bank received the decision on Appeal. The Panel of Judges granted all appeals submitted by the Bank regarding VAT for AYDA in the amount of Rp2,069. However, the Directorate General of Taxes submitted a request for review to the Supreme Court.

As result of this tax dispute, the Bank has provided a reserve of 100%.

On December 21, 2023 the Bank received the decision of the Supreme Court. The Panel of Judges completely rejected the DGT's request for reconsideration, so that the dispute was won by the Bank. As of the date the consolidated financial statements were published, There has been no further legal action from the DJP.

2016

On August 30, 2019, the Bank and the Tax Auditor conducted a final discussion of the audit results which was followed by signing Official Report of Investigation, Summary of the Final Discussion result and Minutes of Discussion.

The Bank received SKP and STP of tax audit results in all aspects (Corporate Income Tax, Witholding Tax and VAT) for fiscal year 2016.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2016 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dari total permohonan restitusi PPh badan yang diajukan Bank sebesar Rp159.087, Kantor Pajak menyetujui sebagian besarnya, yaitu Rp143.281. Bank telah menerima restitusi pajak tersebut pada tanggal 4 Februari 2020 sebesar Rp119.749, sedangkan sisanya sebesar Rp23.532 dikompensasikan dengan berbagai utang pajak dan STP untuk tahun pajak 2014-2018.

Total nilai SKPKB dan STP yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk PPh dan PPN adalah sebesar Rp26.306.

Sedangkan, SKPKB yang tidak disetujui oleh Bank adalah senilai Rp15.250 terdiri dari SKPKB PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN. Seluruh SKPKB yang tidak disetujui tersebut telah dilunasi oleh Bank pada tanggal 8 Oktober 2019. Atas SKPKB yang tidak disetujui tersebut, Bank telah mengajukan Keberatan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan nilai sengketa sebesar Rp8.079.

Pada tanggal 12 Agustus 2020, Bank telah menerima putusan keberatan, dengan hasil menolak permohonan keberatan.

Atas penolakan tersebut, pada tanggal 14 Desember 2020, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 12 April 2022, bank mendapatkan hasil putusan Banding, dengan hasil menolak permohonan keberatan.

Tanggal 17 Juni 2022 Bank mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali bank, dimana hasilnya dikeluarkan secara parsial yaitu: tanggal 28 Februari 2023 untuk sengketa masa pajak maret 2016, tanggal 18 April 2023 untuk sengketa masa pajak Februari, April 2016, tanggal 31 Mei 2023 untuk sengketa masa pajak Mei, Juli, September 2016, tanggal 22 Juni 2023 untuk sengketa masa pajak Januari, November 2016, tanggal 18 Juli 2023 untuk sengketa masa pajak Juni 2016.

Bank telah membebankan seluruh sengketa pajak dan dicatat sebagai bagian dari “Beban operasional lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2016 (continued)

Based on the tax audit result, from total of corporate income tax refund requested by the Bank amounting to Rp159,087, Tax Office only approved Rp143,281. The Bank has received the tax refund on February 4, 2020 amounting to Rp119,749, while the remaining amount of Rp23,532 was compensated with various taxes payable and STP for fiscal year of 2014-2018.

Total amount of SKPKB and STP that were released by the tax office for withholding tax and VAT amounted to Rp26,306.

Whereas, SKPKB not agreed by the Bank amounting to Rp15,250 consists of SKPKB Article 23, Article 26, and VAT. All disagreed SKPKB have been paid by the Bank on October 8, 2019. For the not agreed SKPKB, the Bank has filled an Objection on December 6, 2019 for the amount of Rp8,079.

On August 12, 2020, the Bank has received the decision on its appeal denying its request.

As the result of this rejection, on December 14, 2020, the Bank submitted an appeal to the Tax Court.

On April 12, 2022, the Bank has received the appeal decision, with the result of rejecting the appeal request.

On June 17, 2020 the Bank submitted a judicial review to the Supreme Court. The Supreme Court rejected the application for Bank Reconsideration, where the results were issued in partial as follows: February 28, 2023 for March 2016 tax period disputes, April 18, 2023 for February tax period disputes, April 2016, May 31, 2023 for May, July, September 2016 tax period disputes, June 22, 2023 for January tax period disputes, November 2016, July 18 2023 for the June 2016 tax period dispute.

The bank has charged the entire tax dispute and recorded as part of the "Other operating expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2016 (lanjutan)

Pada tahun 2023, Bank memutuskan untuk menghentikan upaya hukum penyelesaian sengketa pajak ini dan menerima hasil keputusan Mahkamah Agung.

2017

Total nilai SKPKB dan STP untuk tahun pajak 2017 yang diterbitkan oleh DJP untuk PPh dan PPN adalah sebesar Rp18.065. Seluruh SKPKB dan STP tersebut telah dilunasi oleh Bank. SKPKB yang tidak disetujui dan diajukan Keberatan oleh Bank adalah senilai Rp3.688, terdiri dari SKPKB PPN. Pembayaran atas SKPKB yang diajukan keberatan dicatat sebagai Uang Muka.

Bank telah membebankan seluruh sengketa pajak dan dicatat sebagai bagian dari “Beban operasional lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Mei 2022 Bank memutuskan untuk menghentikan proses banding.

2018

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Bank menerima SKP dan STP untuk PPh dan PPN dengan total sebesar Rp40.296. Seluruh SKP dan STP tersebut telah dilunasi oleh Bank melalui kompensasi yang diterima Bank atas hasil banding PPN tahun pajak 2019 sebesar Rp32.296. Atas kekurangan pembayaran SKP PPN yang tidak disetujui sebesar Rp8.000, telah dibayarkan dan diajukan keberatan oleh Bank pada tanggal 27 Oktober 2023.

Pada tanggal 27 Oktober 2023 Bank mengajukan keberatan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, proses keberatan masih berlangsung.

2019

Bank telah menerima SKP dan STP untuk PPh dan PPN atas untuk tahun pajak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp75.270. Bank tidak menyetujui dan sedang mengajukan keberatan SKPKB atas PPN sebesar Rp45.558. Seluruh SKPKB dan STP, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui telah dilunasi oleh Bank. Pada tanggal 30 Juni 2022, permohonan Keberatan PPN tersebut ditolak.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2016 (continued)

In 2023, the Bank decided to dismiss the legal attempts on this tax dispute and accept the results of the Supreme Court's decision.

2017

Total amount of SKPKB and STP for fiscal year released by the the DGT for Withholding Tax and VAT amounted to Rp18,065. All of the SKPKB and STP already fully paid by the Bank. The amount of disapproved SKPKB are being submitted by the Bank for objection amounted to Rp3,688, consists of VAT SKPKB. Payments for it, was recorded as Advances.

The bank has charged the entire tax dispute and recorded as part of the "Other operating expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

On May 31, 2022 the Bank decided to stop the appeal process.

2018

On August 24, 2023, the Bank received SKP and STP for Income Tax and VAT totaling Rp40,296. The Bank settled all SKP and STP through compensation received by the Bank from the tax appeal results of PPN for year 2019 amounting to Rp32,296. The underpayment of the PPN’s SKP amounting to Rp8,000 has been paid and objected to by the Bank on October 27, 2023.

On October 27 2023 the Bank submitted an objection. As of the date the consolidated financial statements were published, the objection process was still ongoing.

2019

The Bank received the SKP and STP for Income Tax and VAT for the 2019 fiscal year with a total of Rp75,270. The Bank did not approve and submitted an objection to the SKPKB on VAT amounting to Rp45,558. All SKPKB and STP, both approved and disapproved, have been paid by the Bank. Payments for it were recorded as Advanced. On June 30, 2022, the Bank’s VAT objection application is rejected.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2019 (lanjutan)

Pada tanggal 26 Agustus 2022, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 8 Agustus 2023, permohonan banding tersebut dikabulkan sebesar Rp45.818 yang dikompensasikan ke SKP dan STP untuk PPh dan PPN hasil pemeriksaan tahun pajak 2018 termasuk penalti sebesar Rp32.299 dan jumlah yang diterima Bank sebesar Rp13.519.

Pada tanggal 9 November 2023, DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, proses Peninjauan Kembali masih berlangsung.

2020

Pada tanggal 22 April 2022, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh sebesar Rp15.160, SKPKB PPh dan PPN total sebesar Rp26.593 dan STP PPN sebesar Rp1.558.

Bank menerima pengembalian pajak sebesar Rp15.159 dikompensasikan untuk SKPKB dan STP sebesar Rp13.453, sehingga pengembalian pajak yang diterima bank sebesar Rp1.706.

Atas SKPKB PPN AYDA Bank mengajukan keberatan sebesar Rp18.042, tanggal 21 Juni 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022 permohonan Keberatan PPN Bank ditolak. Pada tanggal 06 April 2023, bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 17 Oktober 2023, permohonan Banding Bank dikabulkan majelis hakim, pada tanggal 23, 24, 27 November 2023 Bank telah menerima pengembalian PPN AYDA sebesar Rp16.712 dan tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp1.328 dan dikompensasikan atas utang Pajak Cabang sebesar Rp1,4.

Pada tanggal 23 Januari 2023, DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, proses Peninjauan Kembali masih berlangsung.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2019 (continued)

On August 26, 2022, the Bank filed an appeal to the Tax Court. On August 8, 2023, the appeal was granted in the amount of Rp45,818, which was compensated to the SKP and STP for Income Tax and VAT resulting from examination for the fiscal year 2018 including penalties amounting to Rp32,299, and the amount received by the Bank was Rp13,519.

On November 9, 2023, DJP submitted a judicial review to the Supreme Court. As of the date the consolidated financial statements are published, the Judicial Review process is still ongoing.

2020

On April 22, 2022, the Bank received Directorate General of Taxes issued an Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) PPh amounting to Rp15,160, SKPKB PPH and VAT totaling Rp26,593 and STP VAT amounting to Rp1,558.

The Bank received a tax refund amounting to Rp15,159, which was deducted for SKPKB and STP amounted to Rp13,453, so that the tax refund received by the bank amounted to Rp1,706.

On the SKPKB VAT AYDA Bank submitted to tax objection amounted to Rp18,042, dated June 21, 2022. On December 30, 2022, the Bank VAT Objection application is rejected. On April 06, 2023 the bank submit it to appeal.

On October 17, 2023, the Bank's appeal request was granted by the panel of judges, on November 23, 24, 27, 2023 the Bank received a refund of AYDA VAT amounting to Rp16,712 and on March 1 2024 amounting to Rp1,328 and compensation for the Branch Tax debt amounting to Rp1.4.

On January 23 2023, the DJP submitted a judicial review to the Supreme Court. As of the date the consolidated financial statements are published, the Judicial Review process is still ongoing.

22. Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

22. Marketable Securities Sold With Agreements To Repurchase

Marketable securities sold with agreements to repurchase as at December 31, 2023 are as follow:

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Jangka waktu/ *Period*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Tanggal jatuh tempo/ *Due date*	Suku bunga/ *Interest rate*	Harga beli kembali/ *Repurchase price*	Bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai neto/ Net *Value*
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series* SUKBI280224091	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,25%	103.680	(126)	103.554
-Seri/*Series* SUKBI150224092	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,25%	52.475	(64)	52.411
-Seri/*Series* SUKBI030524182	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,25%	63.743	(77)	63.666
Total					**219.898**	**(267)**	**219.631**

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.

As at December 31, 2022, there is no marketable securities sold with agreements to repurchase.

23. Pinjaman yang Diterima

23. Borrowings

	2023	2022	
Pihak berelasi			**Related parties**
Rupiah:			**Rupiah:**
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Singapura	3.544.886	3.533.582	KB Kookmin Bank Co., Ltd, Singapore
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Hong Kong	3.000.000	3.000.000	KB Kookmin Bank Co., Ltd, Hong Kong
Sub-total	6.544.886	6.533.582	Sub-total
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			**Rupiah:**
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000	2.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
International Finance Corporation	885.301	882.005	International Finance Corporation
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	720.000	1.000.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	228.301	426.600	PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	49.780	49.780	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	18.681	24.301	Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan
BPJS Ketenagakerjaan	6.538	7.720	BPJS Ketenagakerjaan
PT Bank Shinhan Indonesia	-	200.000	PT Bank Shinhan Indonesia
Lain-lain	-	17.765	Others
	3.908.601	4.608.171	
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.231.760	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Agence Francaise De Developpement	19.245	58.378	Agence Francaise De Developpement
	1.251.005	58.378	
Sub-total	5.159.606	4.666.549	Sub-total
Total	**11.704.492**	**11.200.131**	**Total**

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Akun ini merupakan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI). Dana atas fasilitas ini diterima oleh Bank dari Pemerintah melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku koordinator Bank yang digunakan untuk

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

This account represents investment funds account (Rekening Dana Investasi or RDI). This fund facility was received by the Bank from the Government through PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as the coordinator bank

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (lanjutan)

pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPR-RS). Penyaluran pembiayaan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terbagi menjadi 3 tahun anggaran, 1999, 2000 dan 2001.

i. Berdasarkan perjanjian tahun anggaran 1999/2000, No. 07/PKS/DIR/2000 tanggal 08 Februari 2000, maksimum jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp16.960.481.512.
ii. Berdasarkan perjanjian tahun anggaran 2000, No. 21/PKS/DIR/2001 tanggal 22 Februari 2001 maksimum jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp20.703.980.143.
iii. Berdasarkan perjanjian tahun anggaran 2001, No. 51/PKS/DIR/2001 tanggal 02 November 2001 maksimum jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp19.575.642.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp49.780 dan belum ada pembayaran kembali sejak tahun 2004.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan akta No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 29 Agustus 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

Berdasarkan akta No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 27 September 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,5% per tahun.

Bank memberikan jaminan berupa fidusia aset atas keuangan KPR, yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing prinsipal dan bunga kepada SMF adalah sebesar Rp198.299 dan Rp25.858, dan nihil dan Rp36.611.

23. Borrowings (continued)

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (continued)

was used to finance Very Simple Housing Loans (KPR-RSS) and Simple Housing Loan (KPR-RS). Fund disbursements provided by PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk are divided into 3 fiscal years, 1999, 2000 and 2001.

i. Based on agreement for Fiscal Year 1999/2000, No. 07/PKS/DIR/2000 dated February 08, 2000, the maximum amount of fund borrowing amounted to Rp16,960,481,512.
ii. Based on agreement for fiscal year 2000, No. 21/PKS/DIR/2001 dated February 22, 2001, the maximum amount of fund borrowing amounted to Rp20,703,980,143.
iii. Based on agreement for fiscal year 2001 No. 51 PKS/DIR/2001 dated November 02, 2001, the maximum amount of fund borrowing amounted to Rp19,575,642,000.

As at December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this borrowing amounted to Rp49,780, respectively, whereas no payments have been made since 2004.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Based on deed No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 dated August 29, 2019, the Bank received additional borrowing facility of refinancing Housing Loan Facilities with a loan term until up to August 29, 2024 and bears an interest rate of 8.6% per annum.

Based on deed No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019 dated September 27, 2019, the Bank received additional borrowing facility of refinancing Housing Loan Facilities with a loan term until September 27, 2024 and bears an interest rate of 8.5% per annum.

The Bank provides collateral in form of fiduciary of Housing Loan Facilities, that is bills/receivables that will exist at this time and/or will be available later obtained from the issuance of the Housing Loan Facilities, including the collateral rights attached to them.

During the period of the credit agreement, there is no requirement or prohibitions that should be fulfilled by the Bank in relation to the loan agreement received from PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

For the years ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the principal and interest to SMF amounted to Rp198,299 and Rp25,858, and nil and Rp36,611, respectively.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

c. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan akta No. 106/SK.9/ HK.02.04/ 12/2012 dan PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, fasilitas pinjaman yang diberikan dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Bank yang sasarannya untuk menurunkan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028.

Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0,5% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 20 tahun sejak tanggal pencairan.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUP3).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing prinsipal dan bunga kepada BLUP3 adalah sebesar Rp5.620 dan Rp120, dan Rp6.734 dan Rp153.

d. BPJS Ketenagakerjaan

Bank memperoleh fasilitas pinjaman terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan perjanjian No. PER/47/ 022011 dan PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 tanggal 16 Februari 2011. Fasilitas pinjaman ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek (Persero)) terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta Jamsostek melalui Bank yang digunakan untuk membantu pembelian rumah dengan dukungan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan-Kerja Sama Bank (PUMP-KB).

Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028 dengan tingkat bunga 2% per tahun. Pembayaran pokok dilakukan setiap bulan selama 10 tahun sejak tanggal pencairan.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

23. Borrowings (continued)

c. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Based on deed No. 106/SK.9/HK.02.04/12/2012 and PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 dated December 26, 2012, this borrowing facility is intended to re-lend and distribute Housing Financing Liquidity Facility for the Bank whose target is to reduce housing loan interest rate for low income and lower middle income community. Term of the facility is until December 31, 2028.

The interest rate of the borrowing is 0.5% per annum. Installment shall be made every month in 20 years after drawdown date.

During the period of the credit agreement, there is no requirement or prohibitions that should be fulfilled by the Bank in relation to the loan agreement received from Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUP3).

For the years ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the principal and interest to BLUP3 amounted to Rp5,620 and Rp120, and Rp6,734 and Rp153, respectively.

d. BPJS Ketenagakerjaan

The Bank received borrowing facility in relation with Housing Loan Facilities based on deed No. PER/47/022011 and PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 dated February 16, 2011. The borrowing facility obtained from BPJS Ketenagakerjaan (formerly PT Jamsostek (Persero)) in relation with Housing Loan Facilities for Jamsostek members through the Bank to assist them in purchasing houses with support from Housing Advance Loan-Cooperation with (PUMP-KB) Bank facility.

Fund distribution will be done in phases based on loan granting needs. The term of this facility is up to December 31, 2028 with interest rate of 2% per annum. The principal shall be made every month in 10 years after drawdown date.

During the period of the credit agreement, there is no requirement or prohibitions that should be fulfilled by the Bank in relation to the loan agreement received from BPJS Ketenagakerjaan.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

d. BPJS Ketenagakerjaan (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing prinsipal dan bunga kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp1.182 dan Rp154, dan Rp1.198 dan Rp180.

e. Agence Francaise de Developpement

Fasilitas pinjaman yang diberikan ini adalah dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dengan fokus utama pada proyek-proyek tenaga air, proyek energi panas bumi dan proyek biomasa, berdasarkan perjanjian NºCID 1036 OI E pada tanggal 11 Februari 2014. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 11 Februari 2024 dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 4,78% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2015. Sedangkan, pembayaran prinsipal dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2018.

Selama periode perjanjian kredit, Bank tanpa pemberitahuan tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Agence Francaise de Developpement (AFD) harus mematuhi hal-hal sebagai berikut:

i. Usaha keuangan (KPMM di atas 12%, rasio penurunan nilai pinjaman provisi bersih terhadap total portofolio pinjaman di bawah 5%);
ii. Menginformasikan laporan keuangan (diaudit), menginformasikan laporan peringkat kredit, laporan surat opini yang dikirim oleh Auditor dan laporan audit internal; dan
iii. Menginformasikan informasi lain mengenai Bank yang mungkin diminta oleh AFD secara wajar.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing prinsipal dan bunga kepada AFD adalah sebesar USD2.500.000 (angka penuh) (Rp39.133) dan USD151.699 (angka penuh) (Rp1.557), dan USD2.500.000 (angka penuh) (Rp38.069) dan USD272.858 (angka penuh) (Rp4.155).

Pada tanggal 21 November 2023 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AFD sehubungan dengan perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

23. Borrowings (continued)

d. BPJS Ketenagakerjaan (continued)

For the years ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the principal and interest to BPJS Ketenagakerjaan amounted to Rp1,182 and Rp154, and Rp1.198 dan Rp180, respectively.

***e.* Agence Francaise de Developpement**

This borrowing facility is intended to re-lent and distributed fund to finance renewable energy projects, with a specific focus on hydropower projects, geothermal energy projects and biomass projects, based on agreement NºCID 1036 OI E dated February 11, 2014. This facility has a maximum period until February 11, 2024 with interest rate at 4.78% per annum. Interest payment is made every 6 (six) months starting from February 11, 2015. Meanwhile, principal made every 6 (six) months starting from August 11, 2018.

During the period of the Loan, the Bank without written and/or unwritten notice to Agence Fraincaise de Developpement (AFD) have to comply the following activities:

i. Financial undertakings (CAR above 12%, a ratio of impaired loans of net provisions to total loan portfolio below 5%);
ii. Inform financial statement (audited), inform credit rating report, opinion letter report sent by the Auditors and internal audit report; and
iii. Inform any other informations concerning the Bank that AFD may reasonably request.

For the years ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the principal and interest to AFD were USD2,500,000 (full amount) (Rp39,133) and USD151,699 (full amount) (Rp1,557), and USD2,500,000 (full amount) (Rp38,069) and USD272,858 (Full amount) (Rp4,155), respectively.

On November 21, 2023, the Bank has submitted a written notification to AFD regarding the amendment to increase the issued/paid-up capital.

Management belives that all compliance requirements have been met as of the date of the consolidated statement of financial position.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

f. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 9 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 01 oleh Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Bank telah memeroleh fasilitas kredit berupa fasilitas Term Loan Revolving (TLR-1) sebesar Rp1.000.000, dengan suku bunga sebesar 4,95% dan berlaku hingga 9 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Bank. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 12 Agustus 2022, berdasarkan Akta No. 08, Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit oleh Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Bank memeroleh fasilitas kredit tambahan yaitu fasilitas Term Loan Revolving 2 (TLR-2) sebesar Rp1.000.000, dengan suku bunga sebesar JIBOR + Marjin 0,85% dan berlaku hingga 12 Agustus 2023. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 8 Desember 2022, perjanjian kredit tersebut kemudian diubah berdasarkan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit TLR-1 berlaku hingga 9 Desember 2023;
- mengubah suku bunga menjadi suku bunga JIBOR + marjin 0,75% per tahun untuk TLR-1 dari jumlah fasilitas yang belum dibayar kembali; dan
- mengubah pembayaran bunga TLR-1 menjadi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 7 Agustus 2023, perjanjian kredit tersebut diubah berdasarkan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- memperpanjang jangka waktu fasilitas TLR-2 berlaku hingga 12 Agustus 2025; dan
- mengubah suku bunga TLR-2, menjadi suku bunga JIBOR + marjin 0,85% per tahun dengan jangka waktu pembayaran kembali sampai dengan 12 bulan dan JIBOR + marjin 0,95% per tahun dengan jangka waktu pembayaran kembali lebih dari 12 bulan.

Pada tanggal 4 Desember 2023, perjanjian kredit tersebut diubah kembali berdasarkan Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit TLR-1 berlaku hingga 9 Desember 2025.

23. Borrowings (continued)

f. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

On December 9, 2021, based on Notarial Deed No. 01 by Notary Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., the Bank has obtained a credit facility in the form of a Term Loan Revolving (TLR-1) facility amounting to Rp1,000,000, with an interest rate of 4.95% and is valid until December 9, 2022. This facility is used to finance the Bank's working capital. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every month.

On August 12, 2022, based on Notarial Deed No. 08, First Amendment to the Credit Agreement by Notary Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., the Bank obtained an additional credit facility, namely the Term Loan Revolving 2 (TLR-2) facility amounting to Rp1,000,000, with an interest rate of JIBOR + Margin 0.85% and is valid until August 12, 2023. The principal will be paid at maturity while the interest payments will be paid every 3 (three) months.

On December 8, 2022, the credit agreement was then amended based on the Second Amendment to the Credit Agreement as follows:

- extending the term of the TLR-1 credit facility valid until December 9, 2023;
- change the interest rate to JIBOR interest rate + 0.75% margin per year for TLR-1 of the outstanding facility amount; and
- change the TLR-1 interest payment to be paid every 3 (three) months.

On August 7, 2023, the credit agreement was amended based on the Third Amendment to the Credit Agreement as follows:

- extending the validity period of the TLR-2 facility until August 12, 2025; and
- change the TLR-2 interest rate to a JIBOR + 0.85% margin per year interest rate with a repayment period of up to 12 months and JIBOR + 0.95% margin per year with a repayment period of more than 12 months.

On December 4, 2023, the credit agreement was amended again based on the Fourth Amendment to the Credit Agreement to extend the term of the TLR-1 credit facility until December 9, 2025.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 886/PK/FI/1020 tanggal 22 Oktober 2020, Bank telah memperoleh Fasilitas Kredit Berjangka (Fasilitas KB) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) sebesar Rp500.000 dengan suku bunga yang ditentukan oleh konfirmasi dari Danamon. Jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan dan bersifat berulang (*revolving*). Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Bank.

Bank dan Danamon telah menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 508/PP/EB/0821 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai pengganti Perjanjian Kredit No. 886/PK/FI/1020 tanggal 22 Oktober 2020. Perubahan Perjanjian Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas KB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2021 sampai 22 Oktober 2022 (*revolving*); dan
2. Menambah plafon Fasilitas KB yang semula sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp1.000.000.

Bank dan Danamon telah menandatangani beberapa kali perubahan terhadap perjanjian kredit melalui surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit No. B .B.587/ARO/EB/1022 tanggal 18 Oktober 2022, dan mengalami perubahan kembali pada perjanjian kredit No. 189/PP/EB/0623 tanggal 22 Juni 2023. Perubahan Perjanjian Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas KB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2022 sampai 22 Oktober 2023 (revolving); dan
2. Menambah plafon Fasilitas KB yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp2.000.000.

Bank dan Danamon telah menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 433/PP/EB/1223 tanggal 22 Desember 2023. Perubahan Perjanjian Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas KB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2023 sampai 22 Oktober 2024 (revolving); dan
2. Mendapatkan fasilitas kredit berjangka 2 (Fasilitas KB 2) sebesar Rp1.000.000

23. Borrowings (continued)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on Credit Agreement No. 886/PK/FI/1020 dated October 22, 2020, the Bank has obtained a Term Credit Facility (KB Facility) from PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) in the amount of Rp500,000 with an interest rate determined by Danamon confirmation. The term of the facility is 12 (twelve) months and revolving. This facility is used to finance the Bank's working capital.

The Bank and Danamon signed an Amendment Agreement to Credit Agreement No. 508/PP/EB/0821 dated August 27, 2021 in lieu of Credit Agreement No. 886/PK/FI/1020 dated October 22, 2020. Changes to the Credit Agreement are as follows:

1. Extending the term of the KB Facility for a period of 12 (twelve) months from October 22, 2021 to October 22, 2022 (revolving); and
2. Increase the plafond of KB Facilities from Rp500,000 to Rp1,000,000.

The Bank and Danamon have signed several amendments to the credit agreement, including through the letter of credit term extension request No. B.B.587/ARO/EB/1022 dated October 18, 2022, and further amendments under credit agreement No. 189/PP/EB/0623 dated June 22, 2023. Changes to the Credit Agreement are as follows:

1. Extending the term of the KB Facility for a period of 12 (twelve) months from October 22, 2022 to October 22, 2023 (revolving); and
2. Increase the plafond of KB Facilities from Rp1,000,000 to Rp2,000,000.

The Bank and Danamon signed an Amendment Agreement to Credit Agreement No. 433/PP/EB/1223 dated December 22, 2023. Changes to the Credit Agreement are as follows:

1. Extending the term of the KB Facility for a period of 12 (twelve) months from October 22, 2023 to October 22, 2024 (revolving); and
2. Obtained term credit facility 2 (KB Facility 2) amounting to Rp1,000,000.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Selama periode perjanjian kredit, Bank harus memberitahukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Danamon untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

i. Denda atas keterlambatan pembayaran dan percepatan pembayaran masing-masing sebesar 3%;
ii. Memberikan laporan keuangan yang telah diaudit/in-house;
iii. Menginformasikan kepada Danamon apabila terjadi perubahan usaha/sesuatu yang dapat mengubah usaha atau kekayaan Bank, anggaran dasar dan perubahannya, perubahan kepemilikan dan modal disetor serta perubahan Dewan Komisaris & Direksi Bank;
iv. Tunduk pada BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit);
v. Memastikan kolektibilitas Bank pada masing-masing Kreditur tetap pada kolektibilitas 1; dan
vi. Menginformasikan jika Bank melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.

Pada tanggal 14 Juni 2023 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sehubungan dengan perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor PT Bank KB Bukopin Tbk .

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Selama tahun 2023 Bank melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp1.220.000 dan USD80.000.000 (angka penuh) (Rp1.231.760).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing pokok dan bunga kepada Danamon Indonesia adalah sebesar Rp1.500.000 dan Rp65.993, dan nihil dan Rp30.689.

h. PT Bank Shinhan Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 030/PFK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Bank telah memperoleh Fasilitas Kredit Korporasi (Modal Kerja) dari PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan) sebesar Rp200.000 dengan suku bunga menggunakan JIBOR 1 Tahun + Marjin 1,5% pertahun. Jangka waktu fasilitas 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari dan bersifat berulang (revolving). Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Bank.

23. Borrowings (continued)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

During the period of the Loan, the Bank should notify in writing and/or not in writing to Danamon to carry out the following activities, among others:

i. Penalty for late payment and accelerated payment of 3%, respectively;
ii. Provide audited/in-house financial statement;
iii. Inform Danamon if there is a change in business/something that may change the business or assets of the Bank, the articles of association and amendments, changes in ownership and paid-up capital as well as changes in the Board of Commisioners & Board of Director of Bank;
iv. Comply to Legal Lending Limit;
v. Ensure that the collectability of Bank on each Creditor remains at Collectability 1; and
vi. Inform if Bank conducts consolidation, merger, acquisitions or dissolution.

On June 14, 2023, the Bank has submitted a written notification to Danamon regarding the amendment to increase the issued/paid-up capital of PT Bank KB Bukopin Tbk.

Management believes that all compliance requirements have been met as of the date of the consolidated statement of financial position.

During 2023, the Bank drew down the loan amounting to Rp1,220,000 and USD80,000,000 (full amount) (Rp1,231,760).

For the year ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the principal and interest to Danamon Indonesia were Rp1,500,000 and Rp65,993 and nil and Rp30,689. respectively.

h. PT Bank Shinhan Indonesia

Based on Credit Agreement No. 030/PFK/V/2021 dated May 25, 2021, the Bank has obtained a Corporate Credit Facility (Working Capital) from PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan) amounting to Rp200,000 with an interest rate using JIBOR per annum + Margin of 1.5% per year. The term of the facility is 366 (three hundred sixty six) days and is revolving. This facility is used to finance the Bank's working capital.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

h. PT Bank Shinhan Indonesia (lanjutan)

Bank dan Shinhan telah menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 100/PPWK/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 sebagai pengganti Perjanjian Kredit No. 030/PFK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Mengubah suku bunga Fasilitas Kredit sebelumnya JIBOR 1 Tahun + Marjin 1,5% pertahun menjadi suku bunga 4,85% pertahun; dan
2. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022, untuk selanjutnya diperpanjang selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023.

Selama periode perjanjian kredit, Bank harus memberitahukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Bank Shinhan Indonesia untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

i. Menginformasikan melalui surat setiap perubahan status hukum Bank, AOA, komposisi pemegang saham dan apabila ada rencana perubahan kepemilikan KB Kookmin kurang dari 51% harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank;
ii. Memberikan laporan keuangan yang telah diaudit/in-house; dan
iii. Menginformasikan persyaratan keuangan setiap tahun dengan maksimum Rasio NPL 5% dan minimum KPMM 11%.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing pokok dan bunga kepada Shinhan adalah sebesar Rp200.000 dan Rp4.015, nihil dan Rp10.578.

Pada tanggal 29 Mei 2023 Perusahaan telah melakukan pelunasan atas fasilitas ini dan tidak melakukan perpanjangan.

23. Borrowings (continued)

h. PT Bank Shinhan Indonesia (continued)

The Bank and Shinhan have signed the Credit Term Extension Agreement No. 100/PPWK/V/2022 dated May 27, 2022 in lieu of Credit Agreement No. 030/PFK/V/2021 dated May 25, 2021. The Credit Term Extension Agreement is as follows:

1. Changing the interest rate on the previous Credit Facility 1 Year JIBOR + Margin 1.5% per year to an interest rate of 4.85% per annum; and
2. Extending the term of the Credit Facility which matures on May 28, 2022, to be further extended for 366 (three hundred sixty six) days from May 28, 2022 to May 29, 2023.

During the period of the Loan, the Bank should notify in writing and/or not in writing to Bank Shinhan Indonesia to carry out the following activities, among others:

i. Notify in letter of any change in the legal status of Bank, AOA, composition of shareholders and if there is a plan to change the ownership of KB Kookmin less than 51% must obtain prior approval from the Bank;
ii. Provide audited/in-house financial statement; and
iii. Submit financial covenant every annual review with maximum NPL Ratio 5% and minimum CAR 11%.

Management believes that all compliance requirements have been met as of the date of the consolidated statement of financial position.

For the years that ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the principal and interest to Shinhan were Rp200,000 and Rp4,015, nil and Rp10,578, respectively.

On May 29, 2023, the Bank has settled this facility and opted to not renew.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

i. International Finance Corporation

Pada tanggal 31 Mei 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman Obligasi Bank dari International Finance Corporation (IFC) untuk mendukung Operasi Pembiayaan Yang Relevan. Pinjaman ini terdiri dari tiga fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche* 1 senilai Rp178.680 dengan suku bunga 7,54% pertahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Fasilitas *Tranche* 2 senilai Rp148.200 dengan suku bunga 7,54% pertahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2022.
- Fasilitas *Tranche* 3 senilai Rp564.550 dengan suku bunga 7,66% pertahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 2 September 2022.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus - 2 September 2025. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan.

Persyaratan penting *Financial Covenant* dalam perjanjian ini atara lain sebagai berikut:

a. Rasio Kecukupan Modal Tertimbang Menurut Risiko yang tidak kurang dari 13,5%;
b. Rasio Ekuitas Terhadap Aset yang tidak kurang dari 5%;
c. Rasio Modal Inti terhadap Modal Total yang tidak kurang dari 7%;
d. Rasio Eksposur Kelompok Ekonomi yang tidak lebih 15%;
e. Keseluruhan Rasio Eskposur Besar yang tidak lebih dari 400%;
f. Rasio Eksposur Pihak Berelasi tidak lebih dari 15%;
g. Rasio Eksposur Kredit Terbuka yang tidak lebih dari 185% sampai dengan 31 Desember 2023; yang tidak lebih dari 150% sampai dengan 31 Maret 2023; dikurangi dengan 20% setiap triwulannya sampai dengan 30 September 2024; dan kemudian tidak lebih dari 25% untuk kedepannya;
h. Rasio Partisipasi Ekuitas Ditambah Aset Tetap yang tidak lebih dari 35%;
i. Keseluruhan Rasio Risiko Valuta Asing yang tidak lebih dari 25%;
j. Rasio Risiko Valuta Asing Mata Uang Tunggal yang tidak lebih dari 10%;
k. Rasio Risiko Tingkat Suku Bunga yang tidak lebih dari 35% sampai dengan 31 Maret 2023; dan kemudian dikurangi dengan 3% setiap triwulan dari setiap Tahun Buku sampai dengan mencapai 10%;

23. Borrowings (continued)

i. International Finance Corporation

On May 31, 2022, the Bank has signed a Bank Bond loan facility agreement from the International Finance Corporation (IFC) to support the Relevant Financing Operations. This loan consists of three facilities, namely:

- Tranche 1 facility amounting Rp178,680 with an interest rate of 7.54% per year. The bank has made all loan withdrawals on August 25, 2022.
- Tranche 2 facility amounting Rp148,200 with an interest rate of 7.54% per year. The bank has made all loan withdrawals on August 31, 2022.
- Tranche 3 facility amounting Rp564,550 with an interest rate of 7.66% per year. The bank has made all loan withdrawals on September 2, 2022.

This loan facility has a tenor of 3 (three) years and will mature on August 25 - September 2, 2025. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 6 months.

The important requirements Financial Covenant in this agreement are as follows:

a. Risk Weighted Capital Adequacy Ratio of not less than 13.5%;
b. Equity to Assets Ratio of not less than 5%;
c. Tier 1 Capital to Total Capital Ratio of not less than 7%;
d. Economic Group Exposure Ratio of not more than 15%;
e. Aggregate Large Exposure Ratio of not more that 400%;
f. Related Party Exposure Ratio of not more than 15%;
g. Open Credit Exposure Ratio of not more than 185% until December 31, 2023; not more than 150% until March 31, 2023; reduced by 20% every quarter until September 30, 2024; and then not more than 25% onwards;
h. Fixed Asstes Plus Equity Participations Ratio of not more than 35%;
i. Aggregate Foreign Exchange Risk Ratio of not more than 25%;
j. Single Currency Foreign Exchange Risk Ratio of not more that 10%;
k. Interest Rate Risk of not more than 35% untul March 31, 2023; and then reduced by 3% every quarter of each Financial Year until it reaches 10%;

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

i. International Finance Corporation (lanjutan)

l. Rasio Risiko Tingkat Suku Bunga yang tidak lebih dari 65%; dan kemudian dikurangi dengan 2% setiap triwulan sampai dengan mencapai 20%;
m. Rasio Senjang Jatuh Tempo Mata Uang Asing yang tidak kurang dari -150%; dan
n. Keseluruhan Rasio Senjang Jatuh Tempo Negatif yang tidak kurang dari -300%.

Bank tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Untuk tahun 31 Desember 2023 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing pokok dan bunga kepada IFC adalah sebesar nihil dan Rp72.098.

Untuk tahun 31 Desember 2022 tidak ada pembayaran pokok maupun bunga kepada IFC.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman, kecuali untuk pemenuhan rasio eksposur pihak berelasi sebesar 19% yang seharusnya tidak melebihi 15%.

Sampai pada tanggal laporan keuangan ini, Bank belum mendapatkan surat pemberitahuan *breach covenant* dari IFC atas rasio eksposur pihak berelasi sebesar 19%.

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch

Pada tanggal 10 Juni 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas peminjaman kembali dari Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch untuk mendukung Operasi Pembiayaan Yang Relevan. Pinjaman ini terdiri dari tiga fasilitas, yaitu:

- Fasilitas Tranche 1 senilai Rp714.720 dengan suku bunga 7,54% per tahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 29 Agustus 2022.
- Fasilitas Tranche 2 senilai Rp592.800 dengan suku bunga 7,54% per tahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 2 September 2022.
- Fasilitas Tranche 3 senilai Rp2.258.200 dengan suku bunga 7,66% per tahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 6 September 2022.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus - 6 September 2025. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan.

23. Borrowings (continued)

i. International Finance Corporation (continued)

l. Aggregate Interest Rate Risk Ratio of not more that 65%; and then reduced by 2% every quarter until it reaches 20%;
m. Foreign Currency Maturity Gap Ratio of not less than -150%; and
n. Aggregate Negative Maturity GAP Ratio of not less than -300%.

The Bank does not provide any collateral for this loan.

For the year ended December 31, 2023, the total payments made for principal and interest to IFC amounted to nil and Rp72,098, respectively.

For the year ended December 31, 2022 there has been no payment of either principal or interest to IFC.

As at December 31, 2023, the Company has fulfilled all obligations required under the loan agreement, except for the fulfillment of the related party exposure ratio of 19% which should not exceed 15%.

As at the date of this financial report, the Bank has not received a breach covenant notification letter from IFC on the related party exposure ratio of 19%.

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch

On June 10, 2022, the Bank has signed a loan facility agreement from the Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch to support the Relevant Financing Operations. This loan consists of three facilities, namely:

- Tranche 1 facility amounting Rp714,720 with an interest rate of 7.54% per year. The bank has made all loan withdrawals on August 29, 2022.
- Tranche 2 facility amounting Rp592,800 with an interest rate of 7.54% per year. The bank has made all loan withdrawals on September 2, 2022
- Tranche 3 facility amounting Rp2,258,200 with an interest rate of 7.66% per year. The bank has made all loan withdrawals on September 6, 2022

This loan facility has a tenor of 3 (three) years and will mature on August 29 - September 6, 2025. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 6 months.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch (lanjutan)

Bank tidak memberikan jaminan dan komitmen apapun atas pinjaman ini.

Untuk tahun 31 Desember 2023 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing pokok dan bunga kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch adalah sebesar nihil dan Rp286.514.

Untuk tahun 31 Desember 2022 tidak ada pembayaran pokok maupun bunga kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch.

k. Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch

Pada tanggal 29 Juni 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum dan memperkuat struktur permodalan jangka panjang. Jumlah plafon keseluruhan dari fasilitas sebesar Rp3.000.000.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 3 bulan.

Bank tidak memberikan jaminan dan komitmen apapun atas pinjaman ini.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 total pembayaran yang dilakukan atas bunga pinjaman kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch adalah sebesar Rp287.952 dan Rp142.923.

l. Lain-lain

Pinjaman lain-lain adalah pinjaman yang diterima oleh PT KB Bukopin Finance (entitas anak) dalam Rupiah yang berasal dari:

	2023	2022	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank MNC Internasional Tbk	-	12.791	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	-	3.226	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	1.748	PT Bank Sahabat Sampoerna
Total	**-**	**17.765**	**Total**

PT. Bank MNC Internasional Tbk

Pada tanggal 27 Desember 2023, Bank telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Bank MNC.

23. Borrowings (continued)

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch (continued)

The Bank does not provide any collateral and commitment for this loan.

For the year ended December 31, 2023 the total payments made for the principal and interest to Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch were nil and Rp286,514.

For the year ended December 31, 2022 there has been no payment of either principal or interest to Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch.

k. Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch

On June 29, 2022, the Bank has signed a loan facility agreement from Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch to finance general working capital needs and strengthen the long-term capital structure. The total plafond for the facility amounting Rp3,000,000.

This loan facility has a tenor of 7 (seven) years and will mature on June 30, 2029. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 3 months.

The Bank does not provide any collateral and commitment for this loan.

For the year ended December 31, 2023 and 2022 the total payments made for the interest payment to Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch Indonesia were Rp287,952 and Rp142,923.

l. Others

Other borrowings represent borrowings received by PT KB Bukopin Finance (a subsidiary) in Rupiah from:

PT. Bank MNC Internasional Tbk

On December 27, 2023, the Bank has fully paid all its loan to Bank MNC.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

I. Lain-lain (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (Victoria)

Pada tanggal 26 April 2023, Bank telah melunasi seluruh pinjaman yang tersisa (fasilitas kredit FL5) kepada Victoria.

PT Bank Sahabat Sampoerna (Sampoerna)

Pada tanggal 1 Agustus 2023, Bank telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Bank Sampoerna.

Pinjaman digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen dan dijamin oleh piutang pembiayaan konsumen dengan suku bunga bekisar 13% - 20% dan jangka waktu 4 - 5 tahun.

23. Borrowings (continued)

I. Others (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (Victoria)

On April 26, 2023, the Bank has fully paid all its remaining loan (FL5 credit facilities) to Victoria.

PT Bank Sahabat Sampoerna (Sampoerna)

On August 1, 2023, the Bank has fully paid all its loan to Bank Sampoerna.

The borrowings were for motor vehicle consumer financing which are guaranteed by consumer financing receivables with interest rate between 13% - 20% and maturity of 4 - 5 years.

24. Surat Berharga yang Diterbitkan

a. Berdasarkan jenis

	2023						
	Wali amanat/ *Arranger*	Peringkat/ *Rating*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Jangka waktu suku bunga/ *Interest rate period*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Februari 2024/ *February 28, 2024*	84	11	1.405.000	Shelf-registered Subordinated Bond II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017
Obligasi Senior Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idnAAA (Fitch)	9 September 2024/ *September 9, 2024*	36	6,25	1.000.000	Shelf-registered Senior Bond I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2026/ *September 9, 2026*	60	8	315.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 A Series
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2028/ *September 9, 2028*	84	8,9	685.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 B Series
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi						(7.412)	Less: Unamortized issuance cost
						3.397.588	

	2022						
	Wali amanat/ *Arranger*	Peringkat/ *Rating*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Jangka waktu suku bunga/ *Interest rate period*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Februari 2024/ *February 28, 2024*	84	11	1.405.000	Shelf-registered Subordinated Bond II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017
Obligasi Senior Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idnAAA (Fitch)	9 September 2024/ *September 9, 2024*	36	6,25	1.000.000	Shelf-registered Senior Bond I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2026/ *September 9, 2026*	60	8	315.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 A Series
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2028/ *September 9, 2028*	84	8,9	685.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 B Series
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi						(12.282)	Less: Unamortized issuance cost
						3.392.718	

a. By type

24. Surat Berharga yang Diterbitkan

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2015, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2015 sebesar Rp400.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 30 September 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II tahun 2017 sebesar Rp1.405.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 (Pada tanggal 27 Februari 2024 Perusahaan telah melunasi Obligasi tersebut)

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2024.

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri A sebesar Rp315.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

24. Marketable Securities Issued

a. By type (continued)

On June 30, 2015 the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond II Bank KB Bukopin Tranche I Year 2015 amounting to Rp400,000 which bears fixed interest rate of 12% per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange.

The bond's interest will be paid on quarterly basis. The first interest payment was made on September 30, 2015, while the last interest payment and due date of the bond's principal was made on June 30, 2022.

On February 28, 2017, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017 amounting to Rp1,405,000 which bears fixed interest rate of 11% per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis

The first interest payment was made on May 29, 2017, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on February 28, 2024 (On February 27, 2024, the Company has repaid the Bonds)

On September 9, 2021, the Bank issued Shelf-registered Bond I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 amounting to Rp1,000,000 which bears fixed interest rate of 6.25% per annum and has 3 (three) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

The first interest payment was made on December 9, 2021, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on September 9, 2024.

On September 9, 2021, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 Series A amounting to Rp315,000 which bears fixed interest rate of 8% per annum and has 5 (five) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

24. Surat Berharga yang Diterbitkan

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2026.

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri B sebesar Rp685.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2028.

Bank menerbitkan obligasi senior dan obligasi subordinasi untuk mengembangkan pembiayaan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank.

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian obligasi subordinasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman dan penerbitan obligasi.

Untuk 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Untuk 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah melakukan pembayaran bunga obligasi secara tepat waktu.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/PB.31/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan dari Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/ TPB1-4 tanggal 14 Maret 2012.

24. Marketable Securities Issued

a. By type (continued)

The first interest payment was made on December 9, 2021, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on September 9, 2026.

On September 9, 2021, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 Series B amounting to Rp685,000 which bears fixed interest rate of 8.9% per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

The first interest payment was made on December 9, 2021, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on September 9, 2028.

The Bank issued senior bond and subordinated bond to expand its financing and to strengthen long term funding structure of the Bank.

The subordinated bond is not guaranteed with specific collateral, but guaranteed with all assets of the Bank, that exist in the present or in the future, whether fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

The subordinated bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, borrowings and bonds issuance.

For December 31, 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the clauses related to the covenant and obligations according to the Bonds Trustee Agreements.

For December 31, 2023 and 2022, the Bank has paid the interest of the bond on a timely basis.

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the Subordinated Bond II is included as supplementary capital after the Bank received approval letter from Financial Services Authority No. S-56/PB.31/2015 dated July 7, 2015 and from Bank Indonesia No. 14/ 24/DPB1/TPB1-4 dated March 14, 2012.

24. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-212/PB.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

b. Berdasarkan mata uang

Semua surat berharga yang diterbitkan adalah dalam mata uang Rupiah.

24. Marketable Securities Issued (continued)

a. By type (continued)

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the Subordinated Bond III is included as supplementary capital after the Bank received approval letter from Financial Services Authority No. S-212/PB.31/2021 dated October 4, 2021.

b. By currency

All marketable securities issued are denominated in Rupiah.

25. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

a. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

	2023	2022	
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	19.672	20.221	Unused loans and sharia financing/receivables facilities
Bank Garansi yang diterbitkan	2.712	4.251	Bank Guarantees issued
L/C tidak dapat dibatalkan	318	229	Irrevocable L/C
	22.702	**24.701**	

25. Estimated Losses On Commitments and Contingencies

a. Estimated losses on commitments and contingencies

b. Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

	2023	2022	
Saldo awal	24.701	22.429	Beginning balance
Penyisihan pembentukan (pembalikan cadangan) selama tahun berjalan	(1.999)	2.272	Provision addition (reversal of allowance) during the year
Saldo akhir	**22.702**	**24.701**	**Ending balance**

b. Movements in the estimated losses on commitments and contingencies

26. Liabilitas Lain-Lain

26. Other Liabilities

	2023	2022	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			**Rupiah:**
Titipan debitur	380.088	288.652	Debtor's deposits
Utang kesejahteraan karyawan	206.372	137.269	Employee benefits payable
Bunga masih harus dibayar	151.367	155.540	Interest payables
Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan (Catatan 37)	100.344	127.787	Estimated liability for employee service entitlements (Note 37)
Setoran jaminan	30.700	40.038	Guarantee deposits
Lain-lain	669.941	554.916	Others
	1.538.812	1.304.202	
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Bunga masih harus dibayar	26.221	58.611	Interest payables
Setoran jaminan	130	132	Guarantee deposits
Lain-lain	4.977	4.585	Others
	31.328	63.328	
Total	**1.570.140**	**1.367.530**	**Total**

26. Liabilitas Lain-Lain (lanjutan)

Utang kesejahteraan karyawan meliputi pencadangan tunjangan, bonus dan tantiem.

Bunga masih harus dibayar merupakan beban bunga simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan.

Titipan debitur merupakan dana dari debitur untuk administrasi kredit, seperti biaya notaris dan asuransi, yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Setoran jaminan merupakan titipan debitur terkait dengan penerbitan Bank garansi, *Letters of Credit*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan *safe deposit box*.

Lain-lain terdiri dari pendapatan provisi *Letters of Credit* yang diamortisasi sesuai dengan jangka waktu dan lain-lain.

26. Other Liabilities (continued)

Employee benefits payable represents accrual for allowances, bonus and tantiem.

Interests payable represent interest expense for customer deposits, deposits from other banks, borrowings, and securities issued.

Debtor's deposit represents fund from debtors for loan administration, such as notary and insurance expenses, which will be paid to third parties.

Guarantee deposits represent debtor's funds for issuance of Bank guarantee, Letters of Credit, Domestic Letters of Credit (SKBDN), and safe deposit box.

Others consist of fees and commission from Letters of Credit which are amortized during the period and others.

27. Ekuitas

a. Modal saham

Dana Setoran Modal

Pada 19 Desember 2022, Perseroan mengirimkan Surat Permohonan kepada Otoritas Jasa keuangan dengan perihal Permohonan Persetujuan Pengakuan Dana Setoran Modal PUT VII sebagai Modal Inti (Tier 1), dan pada 20 Desember 2022 OJK menyetujui permohonan Perseroan untuk Dana Setoran Modal PUT VII sebagai Modal Inti (Tier 1).

Total Dana Setoran Modal yang disetujui OJK pada Modal Inti (Tier 1) adalah sebesar Rp3.000.000 yang akan dicatatkan pada Modal Inti (Tier 1) Perseroan. Dana Setoran Modal sebesar Rp3.000.000 tersebut telah disetorkan pada tanggal 19 Desember 2022 dan telah dicatat sebagai uang muka setoran modal. Pada tahun 2023 uang muka modal tersebut telah direalisasikan menjadi modal ditempatkan dan disetor.

Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII

Berdasarkan surat OJK No. S-113/D.04/2023 tanggal 5 Mei 2023, Bank telah mendapat Pernyataan Efektif pelaksanaan PUT VII dari OJK.

Bank menerbitkan 119.999.999.692 (nilai penuh) lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham dengan Harga Pelaksanaan Rp100 (nilai penuh) per lembar saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.999.999.969.200 (nilai penuh).

27. Equity

a. Share capital

Capital Deposit Fund

On December 19, 2022, the Company sent a Request for Approval Letter to the Financial Services Authority regarding the Approval Request for the Recognition of Deposit Funds for LPO VII Capital as Core Capital (Tier 1), and on December 20, 2022, OJK approved the Company's application for Deposit Funds for LPO VII Capital as Core Capital (Tier 1).

The total Capital Deposit Fund approved by OJK for Core Capital (Tier 1) is Rp3,000,000 which will be recorded in the Company's Core Capital (Tier 1). The Capital Deposit Fund of Rp3,000,000 was paid on December 19, 2022 and has been recorded as an advance for future shares subscription. on 2023 the capital advance had been realized into issued and paid-up capital.

Limited Public Offering (LPO) VII

Based on OJK's letter No. S-113/D.04/2023 dated May 5, 2023, the Bank has received an Effective Statement of LPO VII Implementation from OJK. On

The Bank issued 119,999,999,692 (full amount) class B shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share with Exercise Price of Rp100 (full amount) per share for a total of Rp11,999,999,969,200 (full amount)

27. Ekuitas (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII (lanjutan)

Dana yang berhasil dihimpun dalam PUT VII sebesar Rp11.999.999.969.200 (nilai penuh) yang dicatat dalam Modal Disetor di posisi ekuitas yang sudah termasuk uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.000.000 pada tanggal 5 Mei 2023.

Berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam akta notaris No. 33 tanggal 9 Juni 2023 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari 21.337.978 saham kelas A dengan total sebesar Rp213.379.780.000 (nilai penuh) dan 187.866.201.892 saham kelas B dengan total sebesar Rp18.786.620.189.200 (nilai penuh). Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0075748 tanggal 12 Juni 2023.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

27. Equity (continued)

a. Share capital (continued)

Limited Public Offering (LPO) VII (continued)

Total fund that have been gathered from LPO VII amounting to Rp11,999,999,969,200 (full amount) the fund recognized as Additional paid-in capital in Bank's Equity that has included the realized capital advance into issued and paid-up capital amounted to Rp3,000,000 at May 5, 2023.

Based on the decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners meetings which were covered by notarial deed No. 33 dated June 9, 2023 of Notary Aulia Taufani, SH, the number of fully paid capital consists of 21,337,978 common A shares with a total value of Rp213,379,780,000 (full amount) and 187,866,201,892 common B shares with a total value of Rp18,786,620,189,200 (full amount). These changes have been accepted by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0075748 dated June 12, 2023.

The Bank's shareholders as at December 31, 2023 are as follows:

	Jumlah Saham (Nilai Penuh)/ *Number of Shares (Full Amount)*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership Dec 31, 2023*	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Capital*	
I. Saham Biasa Kelas A (Rp10.000 (nilai penuh) per lembar saham)				**I. Common A Shares** (Rp10,000 (full amount) per share)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	0,00 %	47.363	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	16.601.723	0,01 %	166.017	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas A	**21.337.978**	**0,01 %**	**213.380**	Total common A shares
II. Saham Biasa Kelas B (Rp100 (nilai penuh) per lembar saham)				**II. Common B Shares** (Rp100 (full amount) per share)
Kookmin Bank Co., Ltd	125.655.736.951	66,87 %	12.565.574	Kookmin Bank Co., Ltd
STIC Eugene Star Holdings Inc	31.900.000.000	16,98 %	3.190.000	STIC Eugene Star Holdings Inc
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	0,55 %	103.423	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Woo Yeul Lee (Direktur Utama)	8.500.000	0,01 %	850	Woo Yeul Lee (President Director)
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia	5.382.249	0,00 %	538	Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
Seng Hyup Shin (Direktur)	2.300.000	0,00 %	230	Seng Hyup Shin (Director)
Robby Mondong (Wakil Direktur Utama)	1.107.000	0,00 %	111	Robby Mondong (Deputy President Director)
Dodi Widjajanto (Direktur)	1.000.088	0,00 %	100	Dodi Widjajanto (Director)
Yohanes Suhardi (Direktur)	574.800	0,00 %	57	Yohanes Suhardi (Director)
Helmi Fahrudin (Direktur)	482.951	0,00 %	48	Helmi Fahrudin (Director)
Henry Sawali (Direktur)	200.000	0,00 %	20	Henry Sawali (Director)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	29.256.685.477	15,58 %	2.925.669	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas B	**187.866.201.892**	**99,99 %**	**18.786.620**	Total common B shares
Total saham biasa	**187.887.539.870**	**100,00 %**	**19.000.000**	**Total common shares**

27. Ekuitas (lanjutan) / 27. Equity (continued)

a. Modal saham (lanjutan) / a. Share capital (continued)

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

The Bank's shareholders as at December 31, 2022 are as follows:

	Jumlah Saham (Nilai Penuh)/ *Number of Shares (Full Amount)*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership Dec 31, 2022*	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Capital*	
I. Saham Biasa Kelas A (Rp10.000 (nilai penuh) per lembar saham)				**I. Common A Shares** (Rp10,000 (full amount) per share)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	0,01 %	47.363	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	16.601.723	0,02 %	166.017	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas A	**21.337.978**	**0,03 %**	**213.380**	Total common A shares
II. Saham Biasa Kelas B (Rp100 (nilai penuh) per lembar saham)				**II. Common B Shares** (Rp100 (full amount) per share)
Kookmin Bank Co., Ltd	45.484.861.813	67,00 %	4.548.486	Kookmin Bank Co., Ltd
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	1,52 %	103.423	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Yohanes Suhardi (Direktur)	207.700	0,00 %	21	Yohanes Suhardi (Director)
Helmi Fahrudin (Direktur)	174.500	0,00 %	17	Helmi Fahrudin (Director)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	21.346.725.811	31,45 %	2.134.673	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas B	**67.866.202.200**	**99,97 %**	**6.786.620**	Total common B shares
Total saham biasa	**67.887.540.178**	**100,00 %**	**7.000.000**	**Total common shares**

Semua saham yang dikeluarkan oleh Bank adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 (satu) hak suara.

All shares issued by the Bank entitle the holder to have 1 (one) vote per share.

b. Tambahan modal disetor - neto / b. Additional paid-in capital - net

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The movements in additional paid in capital are as follow:

Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran saham perdana - neto	184.694	Additional paid-in-capital from IPO - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2006	**184.694**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2006**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	33.138	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2007	**217.832**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2007**

27. Ekuitas (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor - neto (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

27. Equity (continued)

b. Additional paid-in capital - net (continued)

The movements in additional paid in capital are as follow: (continued)

Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	578	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2008	**218.410**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2008**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I - neto	82.647	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering I - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	3.133	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2009	**304.190**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2009**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	55.439	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2010	**359.629**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December31, 2010**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas II - neto	727.852	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering II - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	6.838	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2011	**1.094.319**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2011**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	5.686	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2012	**1.100.005**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2012**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III - neto	281.522	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering III - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	3.915	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Pembalikan cadangan opsi saham yang telah gugur	8.599	Reversal of share option reverse which has been forfeited
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2013	**1.394.041**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2013**

27. Ekuitas (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor - neto

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III - neto	330.028
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2014	**1.724.069**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas IV - neto	1.199.869
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2018	**2.923.938**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V - neto	372.861
Tambahan modal disetor yang berasal dari PMTHMETD - neto	1.472.452
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2020	**4.769.251**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umun Terbatas VI - neto	3.517.177
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021	**8.286.428**
Penggunaan tambahan modal disetor yang digunakan untuk biaya Penawaran Umum Terbatas VII - neto	(60.661)
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2023	**8.225.767**

27. Equity (continued)

b. Additional paid-in capital - net

The movements in additional paid in capital are as follow:

Additional paid-in-capital from Limited Public Offering III - net	
Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2014	
Additional paid-in-capital from Limited Public Offering IV - net	
Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2018	
Additional paid-in-capital from Limited Public Offering V - net	
Additional paid-in-capital from Private Placement - net	
Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2020	
Additional paid-in-capital from Limited Public Offering VI - net	
Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2023 and December 31, 2021	
Use of additional paid-in capital used for Limited Public Offering costs VII - net	
Balance of additional paid-in-capital -net as of 31 December 2023	

Tambahan modal disetor berupa agio saham berasal dari penerbitan saham pada saat IPO, PUT I, PUT II, PUT III, PUT IV, PUT V, PMTHMETD, PUT VI dan PUT VII sebagai berikut:

Additional paid-in capital arise from issuance of shares in IPO, LPO I, LPO II, LPO III, LPO IV, LPO V, PP, LPO VI and LPO VII are as follow:

	Harga Penawaran (Nilai Penuh) per Saham/ *Offering Price (Full Amount)* per Share	**Jumlah Lembar Saham/ *Number of Shares***	
IPO	350	843.765.500	IPO
PUT I	415	286.050.768	LPO I
PUT II	520	1.787.960.495	LPO II
PUT III	660	1.106.252.141	LPO IIII
PUT IV	570	2.565.288.316	LPO IV
PUT V	180	4.660.763.499	LPO V
PMTHMETD	190	16.360.578.947	PP
PUT VI	200	35.214.288.984	LPO VI
PUT VII	100	119.999.999.692	LPO VII

28. Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

Movements in the non-controlling interest's share in the net assets of the subsidiaries are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	(4.828)	216	Beginning balance
Bagian kepentingan non-pengendali atas rugi bersih entitas anak	(21.318)	(5.044)	Net loss of subsidiaries attributable to non-controlling interest
Saldo akhir	**(26.146)**	**(4.828)**	**Ending balance**

29. Pendapatan Bunga Dan Syariah / Interest And Sharia Income

Pendapatan bunga diperoleh dari:

Interest income is derived from the following:

	2023	2022	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kredit yang diberikan	2.867.896	2.870.197	Loans
Surat-surat berharga	897.932	514.730	Marketable securities
Penempatan pada Bank			Placements with Bank
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	123.417	46.089	Purchased with agreements to resell Bank
Bank Indonesia dan bank lain	114.055	75.395	Indonesia and other banks
Giro pada Bank Indonesia	28.107	22.005	Bank Indonesia current account
Giro pada bank lain	1.230	276	Current account with other banks
Tagihan lainnya	135	143	Other receivables
Sub-total	4.032.772	3.528.835	Sub-total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kredit yang diberikan	252.183	89.363	Loans
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	58.135	66.537	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	31.270	36.542	Marketable securities
Giro pada bank lain	3	13	Current account with other banks
Tagihan lainnya	331	123	Other receivables
Sub-total	341.922	192.578	Sub-total
Total pendapatan bunga	4.374.694	3.721.413	Total interest income
Pendapatan syariah	486.942	407.257	Sharia income
Total	**4.861.636**	**4.128.670**	**Total**

Pendapatan bunga dan syariah berdasarkan klasifikasi aset keuangan adalah sebagai berikut:

Interest and sharia income based on the classification of financial assets are as follows:

	2023	2022	
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	4.575.624	4.026.451	Valued at amortized cost
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	230.219	73.507	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	55.793	28.712	Fair value through other comprehensive income
Total	**4.861.636**	**4.128.670**	**Total**

29. Pendapatan Bunga Dan Syariah

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan adalah provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit yang diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif masing-masing sebesar Rp61.738 dan Rp61.281 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Termasuk dalam pendapatan syariah adalah pendapatan atas pembiayaan syariah dan surat-surat berharga.

29. Interest And Sharia Income

Interest income from loan include fees and commission related to lending activities amortized using an effective interest rate method amounting to Rp61,738 and Rp61,281 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Sharia income includes income from sharia financing and marketable securities.

30. Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah berasal dari:

30. Interest Expense and Sharia Charges

Interest expense and sharia charges are derived from:

	2023	2022	
Rupiah:			**Rupiah:**
Deposito berjangka	1.747.716	1.399.243	Time deposits
Pinjaman yang diterima	852.041	404.988	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	308.086	332.225	Marketable securities issued
Tabungan	191.786	237.352	Savings deposits
Giro	36.462	36.328	Demand deposits
Simpanan dari bank lain	13.949	74.093	Deposits from other banks
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.525	26.953	Marketable securities sold with agreement to repurchase
Sub-total	3.154.565	2.511.182	Sub-total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Simpanan dari bank lain	427.869	180.602	Deposits from other banks
Deposito berjangka	123.030	90.149	Time deposits
Pinjaman yang diterima	39.216	42.460	Borrowings
Giro	1.034	1.631	Demand deposits
Tabungan	996	2.351	Savings deposits
Sub-total	592.145	317.193	Sub-total
Total beban bunga	3.746.710	2.828.375	Total interest expense
Beban syariah	306.044	250.792	Sharia charges
Total	**4.052.754**	**3.079.167**	**Total**

Sehubungan dengan liabilitas bank umum yang dijamin oleh Program Penjaminan Pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga independen berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004. Berdasarkan peraturan ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

In connection with the commercial bank obligations guaranteed by Government Guarantee Program, the Indonesian Government has established an independent institution in accordance with the Republic of Indonesia Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004. Under this Law, The Deposit Guarantee Institution (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) guarantees third parties deposits including deposits from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, saving deposits and/or other equivalent forms.

30. Beban Bunga dan Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Bank telah melakukan pembayaran premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum masing-masing sebesar Rp98.812 dan Rp118.790 untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat sebagai beban pembiayaan lainnya.

30. Interest Expense and Sharia Charges (continued)

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by LPS. Based on such regulation, the customers' guaranteed deposit in a Bank which was previously regulated under Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100,000,000 (full amount) was amended to a maximum of Rp2,000,000,000 (full amount). As at December 31, 2023 and 2022, the Bank was a participant of above guarantee program.

The Bank has paid the premium on the Government Guarantee Program for Obligation of Commercial Banks amounting to Rp98,812 and Rp118,790 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which was recorded as other financing charges.

31. Provisi dan Komisi Lainnya / 31. Other Fees and Commissions

	2023	2022	
Imbalan jasa	174.169	163.641	Fees
Jasa administrasi	72.428	82.057	Administrative service charges
Komisi merchant	5.702	8.332	Merchant commission
Lain-lain	81.433	69.310	Others
Total	**333.732**	**323.340**	**Total**

Imbalan jasa merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan atas pembayaran listrik, air, telepon, pajak, transaksi perdagangan, dan lain-lain melalui Bank dan pendapatan imbalan atas transaksi ATM dengan bank lain.

Fees represent fees for electricity, water, telephone, tax, trade financing, and other payments made through the Bank and fees from ATM transaction with other banks.

Lain-lain merupakan pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan oleh Bank yang antara lain meliputi pendapatan jasa pelayanan nasabah dan transaksi kartu kredit.

Others consist of fees from services provided by the Bank, which include among others income from customer service and credit card transactions.

32. Pemulihan Cadangan (Penyisihan) Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan / 32. Reversal of Allowance (Provision) For Impairment Losses On Financial Assets

	2023	2022	
Surat-surat berharga (Catatan 7i)	(33)	49	Marketable securities (Note 7i)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	(5.466.917)	(3.920.586)	Loans and Sharia financing/ receivables
Tagihan akseptasi	(1.402)	(145)	Acceptance receivables
Tagihan lainnya	(69.440)	(27.800)	Other Receivable
Total	**(5.537.792)**	**(3.948.482)**	**Total**

33. Beban Umum Dan Administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

	2023	2022	
Perbaikan dan pemeliharaan	198.995	286.640	Repairs and maintenance
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	193.415	242.263	Depreciation of fixed assets (Note 13)
Alih daya	151.973	187.256	Outsourcing
Sewa	130.118	106.838	Rent
Jasa profesional	108.739	102.116	Professional fees
Amortisasi piranti lunak (Catatan 14)	67.175	6.412	Amortization of software (Note 14)
Komunikasi	62.006	79.926	Communications
Transportasi	35.290	35.803	Transportation
Interchange dan keanggotaan kartu	28.426	22.126	Card interchange and membership
Listrik dan air	27.162	31.883	Electricity and water
Pendidikan dan pelatihan	26.192	13.072	Education and training
Iklan dan promosi	23.015	44.091	Advertising and promotion
Beban Bunga – Aset Sewa	15.795	11.040	Interest Expense – Lease
Transaksi ATM	11.750	1.082	ATM transactions
Perlengkapan kantor	10.982	16.749	Office supplies
Asuransi	5.835	6.185	Insurance
Representasi	4.499	5.994	Representation
Pengiriman uang	2.008	2.630	Cash delivery
Lain-lain	268.219	368.912	Others
Total	**1.371.594**	**1.571.018**	**Total**

Interchange kartu merupakan biaya yang timbul dari transaksi kartu kredit dan debit dengan Visa Electron dan MasterCard.

Lain-lain meliputi biaya kegiatan karyawan, biaya proses warkat kliring, biaya transaksi *payment point*, sumbangan dan hadiah dan lain-lain.

33. General And Administrative Expenses

General and administrative expenses consist of:

Card interchange is cost from the transaction of credit and debit cards with Visa Electron and MasterCard.

Others consist of employees' activities expense, clearing process expenses, payment point transaction expenses, social contribution and gifts, and others.

34. Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan

Beban gaji dan tunjangan karyawan terdiri dari:

	2023	2022	
Gaji, insentif, dan lembur	426.276	453.093	Salaries, incentives, and overtime payments
Tunjangan karyawan	240.938	217.756	Employee benefits
Asuransi Karyawan	50.254	41.636	Employee insurance
Dana Pensiun	43.921	31.683	Pension Benefits
Beban (penghasilan) imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lainnya (Catatan 37)	48.587	(9.736)	Provision for post employement and other long-term benefits expense (Note 37)
Total	**809.976**	**734.432**	**Total**

Berikut ini adalah beban gaji dan tunjangan-tunjangan untuk pengurus dan pejabat eksekutif (Catatan 38):

34. Salaries and Employee Benefits Expenses

Salaries and employee benefits expenses consist of:

Outlined below are salaries other benefits for the management and executive officers (Note 38):

34. Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan (lanjutan) / 34. Salaries and Employee Benefits Expenses (continued)

	2023	2022	
Dewan Komisaris	5.757	5.208	Board of Commissioners
Direksi	16.625	12.403	Board of Directors
Lain-lain *)	34.310	33.389	Others *)
	56.692	51.000	
Pajak	10.768	8.227	Tax
Total	**67.460**	**59.227**	**Total**

*) Termasuk pejabat eksekutif, komite audit, dan lain-lain.

*) Including executive officers, audit committee, and others.

35. Pendapatan (Beban) Non-operasional - Neto / 35. Non-operating Income (Expense) - Net

	2023	2022	
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset tetap (Catatan 13)	(5.700)	1.654	Gain (loss) on sale of fixed assets (Note 13)
Keuntungan (kerugian) dari penjualan agunan yang diambil alih	(5.674)	(24.680)	Gain (loss) on sale of foreclosed assets
Lain-lain - neto	(116.811)	(65.862)	Others - net
Total	**(128.185)**	**(88.888)**	**Total**

Lain-lain terdiri dari denda yang timbul dari transaksi perpajakan, komitmen kredit dan lain-lain.

Others consist of tax penalty, loan commitment penalty and others.

36. Informasi Segmen / 36. Segment Information

a. Bidang usaha / a. Business activities

Nama Perusahaan/Company	Bidang Usaha/Business Activities
PT Bank KB Bukopin Tbk	Perbankan konvensional/Conventional banking
PT Bank KB Bukopin Syariah	Perbankan syariah/sharia Banking
PT KB Bukopin Finance	Pembiayaan/Financing

b. Segmen operasi / b. Business segment

Segmen operasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pendapatan bunga dari salah satu konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga dan syariah Bank.

Berikut adalah informasi segmen usaha Grup berdasarkan segmen operasi:

Operating segment

For the years ended December 31, 2023 and 2022 there are no interest incomes from transactions with a single external customer amounted to 10% or more of the Bank's total interest and sharia.

Following is the Group business segment information by operating segment:

36. Informasi Segmen (lanjutan)

b. Segmen operasi (lanjutan)

Segmen operasi

(i) Pendapatan bunga dan syariah konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,70	4.355.568	89,37	3.677.797	Conventional banking
Pembiayaan	0,27	12.935	0,73	30.275	Financing
Syariah	10,03	486.942	9,90	407.257	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	4.855.445	100,00	4.115.329	Total before elimination
Eliminasi		6.191		13.341	Elimination
Pendapatan Bunga Konsolidasian		**4.861.636**		**4.128.670**	**Consolidated interest income**

(ii) Rugi operasional konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	91,41	(6.088.071)	98,51	(4.987.160)	Conventional banking
Pembiayaan	0,26	(17.443)	0,03	(1.687)	Financing
Syariah	8,33	(554.401)	1,46	(73.945)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(6.659.915)	100,00	(5.062.792)	Total before elimination
Eliminasi		713		6.024	Elimination
Rugi operasional konsolidasian		**(6.659.202)**		**(5.056.768)**	**Consolidated Operating loss**

(iii) Rugi bersih konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	90,99	(5.510.780)	98,58	(4.966.957)	Conventional banking
Pembiayaan	0,31	(18.571)	0,06	(2.941)	Financing
Syariah	8,70	(527.065)	1,36	(68.630)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(6.056.416)	100,00	(5.038.528)	Total before elimination
Eliminasi		713		6.024	Elimination
Rugi bersih konsolidasian		**(6.055.703)**		**(5.032.504)**	**Consolidated net loss**

(iv) Total aset konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	90,39	78.842.594	91,93	84.703.740	Conventional banking
Pembiayaan	0,53	459.661	0,46	424.491	Financing
Syariah	9,08	7.920.474	7,61	7.013.225	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	87.222.729	100,00	92.141.456	Total before elimination
Eliminasi		(2.915.429)		(2.146.104)	Elimination
Total aset konsolidasian		**84.307.300**		**89.995.352**	**Total consolidated assets**

36. Segment Information (continued)

b. Business segment (continued)

Operating segment

(i) Consolidated interest income and sharia

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,70	4.355.568	89,37	3.677.797	Conventional banking
Pembiayaan	0,27	12.935	0,73	30.275	Financing
Syariah	10,03	486.942	9,90	407.257	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	4.855.445	100,00	4.115.329	Total before elimination
Eliminasi		6.191		13.341	Elimination
Pendapatan Bunga Konsolidasian		**4.861.636**		**4.128.670**	**Consolidated interest income**

(ii) Consolidated operating loss

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	91,41	(6.088.071)	98,51	(4.987.160)	Conventional banking
Pembiayaan	0,26	(17.443)	0,03	(1.687)	Financing
Syariah	8,33	(554.401)	1,46	(73.945)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(6.659.915)	100,00	(5.062.792)	Total before elimination
Eliminasi		713		6.024	Elimination
Rugi operasional konsolidasian		**(6.659.202)**		**(5.056.768)**	**Consolidated Operating loss**

(iii) Consolidated net loss

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	90,99	(5.510.780)	98,58	(4.966.957)	Conventional banking
Pembiayaan	0,31	(18.571)	0,06	(2.941)	Financing
Syariah	8,70	(527.065)	1,36	(68.630)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(6.056.416)	100,00	(5.038.528)	Total before elimination
Eliminasi		713		6.024	Elimination
Rugi bersih konsolidasian		**(6.055.703)**		**(5.032.504)**	**Consolidated net loss**

(iv) Total consolidated assets

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	90,39	78.842.594	91,93	84.703.740	Conventional banking
Pembiayaan	0,53	459.661	0,46	424.491	Financing
Syariah	9,08	7.920.474	7,61	7.013.225	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	87.222.729	100,00	92.141.456	Total before elimination
Eliminasi		(2.915.429)		(2.146.104)	Elimination
Total aset konsolidasian		**84.307.300**		**89.995.352**	**Total consolidated assets**

36. Informasi Segmen (lanjutan)

b. Segmen operasi (lanjutan)

Segmen operasi

(v) Total liabilitas konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,95	64.080.008	91,63	73.377.904	Conventional banking
Pembiayaan	0,01	10.277	0,38	299.351	Financing
Syariah	10,04	7.151.658	7,99	6.399.153	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	71.241.943	100,00	80.076.408	Total before elimination
Eliminasi		(1.044.806)		(1.297.661)	Elimination
Total liabilitas konsolidasian		**70.197.137**		**78.778.747**	**Total consolidated liabilities**

36. Segment Information (continued)

b. Business segment (continued)

Operating segment

(v) Total consolidated liabilities

c. Segmen geografis

Berikut ini adalah informasi segmen usaha Grup berdasarkan daerah geografis:

(i) Pendapatan bunga konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	69,65	3.381.976	61,44	2.528.513	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	13,48	654.485	18,38	756.328	Java other than Jabodetabek
Sumatera	6,67	324.025	7,83	322.090	Sumatera
Kalimantan	1,87	90.653	2,30	94.924	Kalimantan
Lain-lain	8,33	404.306	10,05	413.474	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	4.855.445	100,00	4.115.329	Total before elimination
Eliminasi		6.191		13.341	Elimination
Pendapatan bunga konsolidasian		**4.861.636**		**4.128.670**	**Consolidated interest income**

c. Geographic segment

Following is the Group business segment information by geographical area:

(i) Consolidated interest income

(ii) Rugi operasional konsolidasian

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	66,82	(4.450.328)	74,94	(3.794.169)	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	22,73	(1.513.717)	22,26	(1.127.194)	Java other than Jabodetabek
Sumatera	3,99	(265.686)	1,09	(55.249)	Sumatera
Kalimantan	1,33	(88.722)	3,66	(185.371)	Kalimantan
Lain-lain	5,13	(341.468)	(1,95)	99.191	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	(6.659.915)	100,00	(5.062.792)	Total before elimination
Eliminasi		713		6.024	Elimination
Rugi operasional konsolidasian		**(6.659.202)**		**(5.056.768)**	**Consolidated operating loss**

(ii) Consolidated operating loss

36. Informasi Segmen (lanjutan)

36. Segment Information (lanjutan)

c. Segmen geografis (lanjutan)

c. Geographic segment (continued)

(iii) Rugi bersih konsolidasian

(iii) Consolidated net loss

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	67,17	(4.067.817)	81,65	(4.113.729)	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	22,29	(1.349.764)	15,95	(803.558)	Java other than Jabodetabek
Sumatera	4,45	(269.318)	1,18	(59.267)	Sumatera
Kalimantan	1,47	(88.786)	3,67	(185.592)	Kalimantan
Lain-lain	4,62	(280.731)	(2,45)	123.617	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	(6.056.416)	100,00	(5.038.529)	Total before elimination
Eliminasi		713		6.024	Elimination
Rugi bersih konsolidasian		**(6.055.703)**		**(5.032.505)**	**Consolidated net loss**

(iv) Total aset konsolidasian

(iv) Total consolidated assets

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	70,52	61.507.271	68,44	63.059.098	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	12,95	11.298.679	15,36	14.157.351	Java other than Jabodetabek
Sumatera	6,66	5.807.490	6,64	6.122.616	Sumatera
Kalimantan	1,71	1.492.026	1,87	1.716.400	Kalimantan
Lain-lain	8,16	7.117.263	7,69	7.085.991	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	87.222.729	100,00	92.141.456	Total before elimination
Eliminasi		(2.915.429)		(2.146.104)	Elimination
Total aset konsolidasian		**84.307.300**		**89.995.352**	**Total consolidated assets**

(v) Total liabilitas konsolidasian

(v) Total consolidated liabilities

	2023		2022		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	55,61	39.617.023	55,75	44.640.738	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	19,89	14.171.176	22,50	18.023.304	Java other than Jabodetabek
Sumatera	8,78	6.251.866	8,40	6.724.622	Sumatera
Kalimantan	4,26	3.033.770	4,06	3.250.300	Kalimantan
Lain-lain	11,46	8.168.108	9,29	7.437.444	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	71.241.943	100,00	80.076.408	Total before elimination
Eliminasi		(1.044.806)		(1.297.661)	Elimination
Total liabilitas konsolidasian		**70.197.137**		**78.778.747**	**Total consolidated liabilities**

37. Kesejahteraan Karyawan

Imbalan Pensiun

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap sejak 1 April 2010. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi sesuai dengan Surat Keputusan terbaru No. 1218 Tahun 2013. Keputusan penyempurnaan program iuran pasti disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Direksi Adendum II SK No. 0961 Tahun 2016 bahwa pembayaran iuran program pensiun iuran pasti inlkmi dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank KB Bukopin Tbk yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/NB.1/2016. Program ini berlaku untuk karyawan yang diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal efektif perubahan program pensiun Manfaat Pasti oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program ini juga berlaku untuk karyawan yang sebelumnya merupakan peserta program manfaat pasti yang telah dihentikan programnya seperti yang disebutkan di atas.

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp48.587 dan (Rp9.736).

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan meliputi uang jasa, uang pisah, pesangon, tunjangan cuti besar dan kompensasi lainnya, dikompensasikan dengan imbalan pensiun.

Sejak tanggal 20 Desember 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 (dua) tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Manfaat-manfaat asuransi diberikan melalui sistem penggantian kepada karyawan.

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Penyisihan untuk imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020. Penyisihan telah dibuat sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) tentang Imbalan Kerja. Asumsi aktuarial dan metode yang digunakan untuk mengukur liabilitas pasca kerja, beban dan liabilitas kerja karyawan telah memadai dan disajikan menurut estimasi terbaik kami atas kondisi masa depan.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan Bank saja pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan atas laporan dari KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan, tertanggal 16 Mei 2024 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

37. Employee Service Entitlements

Pension Benefits

The Bank provides a defined contribution pension plan for employees who become permanent employees since April 1, 2010. The decision has been approved by the Board of Directors in accordance with the latest Decree No. 1218 of 2013. The decision to improve the defined contribution program was re-perfected with a Decree of Directors Addendum II SK No. 0961 of 2016 that contribution payments managed by Financial Institution Pension Fund PT Bank KB Bukopin Tbk which has been approved by the Financial Services Authority Number KEP-32/NB.1/2016. This program applies to employee who is appointed as permanent employees from the effective date of the change to the defined benefit pension plan by the Financial Services Authority. The program also applied for employee who previously was a member of the defined benefit pension plan that has been terminated as mention above.

Defined contribution pension expense that was charge to profit or loss as for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp48,587 and (Rp9,736), respectively.

Employees' Service Entitlements

Employees' service entitlements consist of service payments, severance payments, termination benefits, long leave benefits and other compensation, compensated with retirement benefits.

Starting December 20, 2013, the Bank provides pension health insurance for employees and their spouses during 2 (two) years after the employee's pension date. Insurance benefits are granted by reimbursement system to the employees.

Post-Employment Benefits Liability

Provision for employee benefits in accordance with the Job Creation Law No. 11/2020 dated November 2, 2020. Provision has been made in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) regarding employee benefits. The actuarial assumptions and methods used to measure post-employment liabilities, expenses, and employees' employment liabilities are adequate and are presented according to our best estimate of future conditions.

The actuarial calculation of the estimated liability for the welfare of the Bank's employees only as at December 31, 2023 was based on reports from KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Co, dated May 16, 2024 using the Projected Unit Credit method.

37. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja (lanjutan)

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan KBBS pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan atas laporan dari KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan tertanggal 22 Maret 2024 dengan metode *Projected Unit Credit.*

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan untuk KBBF pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan atas laporan dari KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan tertanggal 16 Mei 2024 dengan metode *Projected Unit Credit.*

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Beban jasa kini	13.861	13.255	Current service cost
Beban masa lalu	(13.122)	(8.840)	Past service cost
Beban bunga	8.684	10.627	Interest expense
Kerugian atas penyelesaian	59.697	2.055	Losses on settlement
Pengakuan keuntungan aktuaria	(20.533)	(26.833)	Actuarial gains
Total	**48.587**	**(9.736)**	**Total**

Rekonsiliasi perubahan liabilitas selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Liabilitas pada awal tahun	127.787	172.927	Liability at beginning of the year
Penyisihan (Pembalikan) tahun berjalan (Catatan 34)	48.587	(9.736)	Provision (reversal) during the year (Note 34)
Pembayaran selama tahun berjalan	(67.390)	(9.668)	Payment during the year
Jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(8.640)	(25.736)	Total amount recognized in other comprehensive income
Liabilitas pada akhir tahun	**100.344**	**127.787**	**Liability at the end of year**

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo pada awal tahun	127.787	172.927	Balance at beginning of year
Beban jasa kini	13.861	13.255	Current service cost
Beban masa lalu	(13.122)	(8.840)	Past service cost
Beban bunga	8.684	10.627	Interest cost
Kerugian atas penyelesaian	59.698	2.055	Losses on settlement
Manfaat yang dibayarkan	(67.390)	(9.668)	Benefit paid
Kerugian/(keuntungan) pada kewajiban aktuari:			Actuarial (gains)/losses on obligation:
Asumsi demografi	7.420	17.412	Demographic assumption
Experience adjustment	(36.594)	(69.981)	Experience adjustment
Liabilitas pada akhir tahun	**100.344**	**127.787**	**Liability at the end of year**

37. Employee Service Entitlements (continued)

Post-Employment Benefits Liability (continued)

The actuarial calculation for estimated employee service entitlement liabilities of KBBS as at December 31, 2023 was based on reports from KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Co dated March 22, 2024 using the Projected Unit Credit method.

The actuarial calculation for estimated employee service entitlement liabilities of KBBF as at December 31, 2023 was based on reports from KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Co dated May 16, 2024 using the Projected Unit Credit method.

The expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income were as follows:

The movements of estimated post-employment benefits liability in the consolidated statements of financial position were as follows:

The movements in the present value of liabilites for employee benefits were follows:

37. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan:

	2023	2022	
Tingkat diskonto			Discount rate
Tingkat diskonto +1%	(9.989)	(11.795)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	11.720	13.819	Discount rate -1%
Tingkat kenaikan gaji			Salary increment rate
Tingkat kenaikan gaji +1%	14.622	15.445	Salary increment rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	(11.911)	(13.081)	Salary increment rate -1%

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pasca-kerja yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	3.756	13.360	Within the next 12 months
Antara 1 dan 5 tahun	15.603	35.030	Between 1 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	56.052	86.962	Between 5 and 10 years
Di atas 10 tahun	501.731	934.101	Beyond 10 years
Total	**577.142**	**1.069.453**	**Total**

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk Tahun dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	2023		2022		
	Bank	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bank	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto	6,50% per tahun/ *6.50% per annum*	6,50% per tahun/ *6.50% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	6,75-7,00% per tahun/ *6.75-7.00% per annum*	Discount rate
Tingkat rata-rata kenaikan penghasilan	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum/*	Average salary increase rate
Tingkat kenaikan harga emas	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	- -	7,00% per tahun/ *7,00% per tahun/*	- -	Gold price increase rate
Asumsi lainnya:					Other assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun/ *56 years*	56 tahun/ *56 years*	56 tahun/ *56 years*	56 tahun/ *56 years*	Normal retirement age
Tingkat kematian	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Mortality rate
Tingkat kecacatan	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	*4% pertahun sampai* usia 30 tahun kemudian menurun linear menjadi 0,1% pertahun di usia 49 tahun dan 1% pertahun untuk usia 50 sampai usia 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% ages 50 to 54*	*4% pertahun sampai* usia 30 tahun kemudian menurun linear menjadi 0,1% pertahun di usia 49 tahun dan 1% pertahun untuk usia 50 sampai usia 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% ages 50 to 54*	*4% pertahun sampai* usia 30 tahun kemudian menurun linear menjadi 0,1% pertahun di usia 49 tahun dan 1% pertahun untuk usia 50 sampai usia 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% ages 50 to 54*	*4% pertahun sampai* usia 30 tahun kemudian menurun linear menjadi 0,1% pertahun di usia 49 tahun dan 1% pertahun untuk usia 50 sampai usia 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% ages 50 to 54*	Resignation rate

37. Employee Service Entitlements (continued)

Post-Employment Benefits Liability (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate amounting to 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits liability:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

The assumptions used in actuarial calculation for the Year and year ended December 31, 2023 and December 31, 2022 are as follows:

37. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja Lainnya

Pada tahun 2021, Bank melaksanakan Program G-Pro. Program ini merupakan Program Penawaran Pengakhiran Hubungan Kerja secara Sukarela sebagai bagian dari strategi peningkatan pelayanan kepada nasabah. Program ini merupakan program bagi semua karyawan, semua dapat berpartisipasi, tidak dibatasi oleh masa kerja dan usia, dan bahkan mendapat kompensasi lebih baik. Program ini diumumkan pada tahun 2021 dan direalisasikan di awal tahun 2022 dengan liabilitas yang dicadangkan oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp98.113 dan Rp208.513. Pembayaran untuk program ini sudah diselesaikan pada bulan September 2022.

37. Employee Service Entitlements (continued)

Other Post-Employment Benefits Liability

In 2021, the Bank implemented G-Pro Program. This program is a Voluntary Termination of Employment Offer Program as part of a strategy to improve services to customers. This program is a program for all employees, anyone can participate regardless of years of services or age, and they are even better compensated. This program will be generalized in 2021 and implemented in early 2022, with liabilities by the Bank for the year ending December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp98,113, and Rp208,513, respectively. Payment for this program has been completed in September 2022.

38. Transaksi Dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi.

38. Transactions And Balances With Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties.

	2023	2022	
Giro pada Bank lain			Current account in other Bank
KB Kookmin Bank (Catatan 5)	6.377	75.647	KB Kookmin Bank (Note 5)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang Syariah - bruto (Catatan 9l):			Loans and Sharia financing/ receivables - gross (Note 9l):
PT KB Finansia Multi Finance	499.791	250.000	PT KB Finansia Multi Finance
PT Sunindo KB Finance	119.988	120.000	PT Sunindo KB Finance
PT Haka Sarana Investama	-	121.048	PT Haka Sarana Investama
PT Dalle Mineral Papua	-	55.309	PT Dalle Mineral Papua
Dinasti Batubara Indonesia	-	46.278	Dinasti Batubara Indonesia
PT Bosowa Amal Taksi	-	28.891	PT Bosowa Amal Taksi
PT Bosowa Utama	-	27.519	PT Bosowa Utama
PT Mallomo	-	27.012	PT Mallomo
PT Bosowa Berlian Motor	-	26.081	PT Bosowa Berlian Motor
Kopelindo Infrastruktur Indonesia	-	15.934	Kopelindo Infrastruktur Indonesia
PT Makassar Capital	-	7.369	PT Makassar Capital
PT Kurnia Oryza Abadi	-	4.878	PT Kurnia Oryza Abadi
PT Gerin Surya Gemilang	-	3.348	PT Gerin Surya Gemilang
PT Bosowa Tambang Indonesia	-	32	PT Bosowa Tambang Indonesia
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	20.867	27.634	Directors, Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers
Total aset untuk pihak berelasi	**647.023**	**836.980**	**Total related parties assets**
Persentase terhadap total aset	**0,77%**	**0,93%**	**Percentage to total assets**

38. Transaksi Dan Saldo dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Transactions And Balances with Related Parties (continued)

	2023	2022	
Liabilitas			**Liabilities**
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)	7.699.413	10.121.907	Deposit from other banks (Note 20)
Pinjaman yang diterima (Catatan 23)	6.544.886	6.533.582	Borrowing (Note 23)
Dana pensiun Bank KB Bukopin	61.700	51.700	KB Bukopin Bank pension fund
Deposito berjangka (Catatan 19)	40.311	55.847	Time deposits (Note 19)
Tabungan (Catatan 18)	18.491	9.870	Savings deposits (Note 18)
Giro (Catatan 17)	9.094	260.318	Demand deposits (Note 17)
Total liabilitas untuk pihak berelasi	**14.373.895**	**17.033.224**	**Total related parties liabilities**
Persentase terhadap total liabilitas	**20,48%**	**21,62%**	**Percentage to total liabilities**
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak berelasi	22.592	13.157	Interest and sharia income from related parties
Persentase terhadap pendapatan bunga dan syariah	0,46%	0,32%	Percentage to total interest and sharia income
Pendapatan operasional lainnya			Other operating income
Pendapatan dan komisi lainnya dari pihak berelasi	-	255	Other fees and commission from related parties
Persentase terhadap pendapatan operasional lainnya	0,00%	0,05%	Percentage to other operating income
Beban bunga dan syariah dari pihak berelasi	899	7.253	Interest expense and sharia charges from related parties
Persentase terhadap beban bunga dan Syariah	0,02%	0,24%	Percentage to total interest and Sharia income
Beban operasional lainnya			Other operating expenses
Gaji dan tunjangan karyawan, pengurus, dan pejabat eksekutif (Catatan 34)	67.460	59.227	Salaries and benefits for employees, management and executive officer (Note 34)
Persentase terhadap Beban operasional lainnya	2,74%	2,44%	Percentage to other operating expenses

Hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The relationships with related parties are as follows:

Sifat dari hubungan/*Nature of Relationship*	Pihak berelasi/*Related parties*
Pemegang saham pengendali/*Controlling Shareholder*	KB Kookmin Bank Co., Ltd
Dikendalikan/dibawah pengaruh signifikan salah satu pemegang saham utama Bank/ *Controlled by/under significant influence of one of major shareholder*	PT Haka Sarana Investama Kopelindo Infrastruktur Indonesia PT Bosowa Berlian Motor PT Bosowa Amal Taksi PT Mallomo PT Bosowa Utama PT Makassar Capital PT Bosowa Tambang Indonesia PT KB Finansial Multi Finance PT Sunindo KB Finance PT Kurnia Oryza Abadi PT Dalle Mineral Papua

38. Transaksi Dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

38. Transactions And Balances With Related Parties (continued)

Sifat dari hubungan/*Nature of Relationship*	Pihak berelasi/*Related parties*
Dikendalikan oleh keluarga terdekat dari manajemen/*Controlled by a close member of the management's family*	Dinasti Batubara Indonesia
Manajemen kunci yang sama/*Same key management*	PT Gerin Surya Gemilang
Dana pensiun Bank/*The Bank's pension fund*	Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Manajemen dan karyawan kunci/*Management and key employees*	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif/*Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers*

39. Komitmen Dan Kontinjensi

39. Commitments And Contingencies

Bank memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

The Bank has commitments and contingencies as follows:

	2023	2022	
Komitmen			**Commitments**
Tagihan Komitmen			**Commitments Receivables**
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	595.903	1.242.120	Outstanding spot and derivative purchased
Liabilitas Komitmen			**Commitments Liabilities**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	(4.822.935)	(4.215.885)	Unused loans and Sharia financing/receivable facilities
SKBDN yang masih berjalan	-	(52.283)	Outstanding SKBDN
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan pihak ketiga	(88.205)	(11.744)	Outstanding irrevocable L/C third parties
Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	(971.552)	(818.770)	Outstanding spot and derivative sold
Total Liabilitas Komitmen	(5.882.692)	(5.098.682)	Total Commitments Liabilities
Total Komitmen - Neto	**(5.286.789)**	**(3.856.562)**	**Total Commitments - Net**
Kontinjensi			**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi			**Contigent Receivables**
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.038.667	4.066.581	Interest Income on non-performing loans
Liabilitas Kontinjensi			**Contingent Liablities**
Bank garansi Pihak ketiga	(1.337.709)	(3.161.179)	Bank Guarantees Third Parties
Total Liabilitas Kontinjensi	(1.337.709)	(3.161.179)	Total Contingent Liabilities
Total Kontinjensi - Neto	**2.700.958**	**905.402**	**Total Contingencies - Net**
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - Neto	**(2.585.831)**	**(2.951.160)**	**Commitments and Contingent Liabilities - Net**

40. Manajemen Risiko

Bank senantiasa memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran risiko *(risk awareness)* dan memperkuat budaya risiko *(risk culture)* bagi seluruh jenjang karyawan Bank, agar dapat menerapkan pengelolaan risiko dengan baik dan secara menyeluruh dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Oleh karena itu, Bank berupaya menerapkan manajemen risiko yang efektif dan komprehensif sebagai aspek penting bagi Bank dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Bank.

Pengelolaan risiko yang baik dan efektif menjadi salah satu faktor penting atas keberhasilan Bank dalam menjalankan strategi dan upaya meningkatkan kinerja. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan arahan yang telah dicanangkan. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka bagi pemegang saham.

Manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam pengelolaan risiko Bank dan bersifat proaktif serta *forward looking* dalam mendukung pertumbuhan dan kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi kejadian, baik yang diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak diperkirakan *(unexpected)* yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap entitas anak.

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank memiliki Komite Pemantau Risiko sebagai komite risiko tertinggi di tingkat Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan atas pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko Bank.

40. Risk Management

Bank continuously make some efforts to improve risk awareness and strengthen risk culture at all levels of employees, in order to implement risk management properly and thoroughly in daily banking activities. Therefore, Bank seeks to implement an effective and comprehensive risk management as an important aspect of the Bank in managing the various risks faced by the Bank.

An effective and good risk management is one of the important factors for the success of the Bank in carrying out strategies and efforts to improve performance. The management aims to protect the Bank from losses that may arise as a result of its various activities, as well as to maintain the level of risk in accordance with the business strategy and directives that have been announced. Therefore, the Bank maintains a balance between risks and benefits in order to generate long-term value growth for shareholders.

Risk management has an important role in managing the Bank's risk and is proactive and forward looking in supporting the Bank's growth and business activities in a sustainable manner. Risk in the banking context is a potential event, both expected and unexpected, which has a negative impact on the bank's income and capital.

In the implementation of risk management, Bank refers to Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 and Circular Letter No. 34/ SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and OJK Regulation No.38/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Consolidated Risk Management for Banks that control subsidiaries.

The organization of the risk management of the Bank involves oversight from the Board of Commissioners and Directors.

The Risk Oversight Committee is a highest risk committee at the Board of Commissioners' level that responsible to oversight the implementation of risk management strategies and policies and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and risk management working unit in the Bank.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi dan bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen risiko, mengelola risiko secara keseluruhan di Bank, serta perbaikan atas pelaksanaan strategi, kebijakan dan evaluasi atas permasalahan risiko yang signifikan. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris didukung oleh satuan kerja manajemen risiko yang independen dan secara jelas terlepas dari semua bisnis dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap bisnis.

Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

Penilaian dan pengukuran eksposur risiko (dampak potensial dari suatu kejadian risiko) harus objektif, konsisten dan mengacu pada hal yang spesifik. Kualitas dari informasi risiko memegang peranan penting dalam menentukan kualitas bisnis.

Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui fungsi kerja Risk sebagai Lini Pertahanan Kedua, dimana bertanggungjawab untuk menyusun dan melakukan kaju ulang secara berkala atas berbagai kebijakan limit, dan perangkat manajemen risiko. Fungsi kerja Risk juga berperan dalam melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kepada Lini Pertahanan Pertama atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hal ini termasuk dalam hal melakukan pelaporan atas risiko Bank secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha yang sejalan dengan rencana bisnis bank, maka Bank secara terus menerus melakukan pemantauan risiko secara berkala serta pengendalian internal yang komprehensif dari sisi kebijakan, prosedur, maupun penetapan limit. Hal ini diperkuat dengan adanya internalisasi atas ketentuan eksternal yang berlaku, antara lain terkait dengan penetapan kebijakan dasar manajemen risiko dan *risk appetite*.

40. Risk Management (continued)

The Board of Commissioners delegate authority to the Directors to implement the risk management strategy. The Risk Management Committee is established at the Directors' level and is responsible in providing recommendation to the President Director to develop the risk management strategy and policy, manage overall risk in the Bank, and improve the implementation of strategies, policies and evaluate significant risk issues. The Risk Management Committee is chaired by the President Director.

In carrying out these tasks, Directors and Board of Commissioners are supported by an independent risk management work unit, which clearly separated with no reporting line or responsibility to business.

The risk management process includes identifying, measuring, monitoring and controlling risks in all products and activities of the Bank.

Assessment and measurement of risk exposures (the potential impact of risk events) must be objective, consistent and context specific. The quality of risk information plays an important role in determining the quality of business.

Bank runs a risk identification, measurement, monitoring and control process as well as a Risk Management Information System through the Risk Group as the second line of defense, that responsible for establishing and conducting periodic reviews of various risk management policies, limit, and tools. Risk Group also plays a role in monitoring and providing recommendation to the First Line of Defense on the implementation of risk management carried out by each working unit. This includes reporting on the overall risk of the Bank to the Board of Commissioners and the Directors on a regular basis.

To adapt to business developments that are in line with the bank's business plan, Bank continuously conducts periodic risk monitoring and comprehensive internal controls to the policies, procedures, and limit setting. This is reinforced by the internalization of applicable external regulations, among others related to the establishment of basic risk management policies and risk appetite.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risk appetite Bank diartikan sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Dimana tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko, Bank mengelola 8 (delapan) tipe risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Profil Risiko

Laporan profil risiko merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank wajib menyampaikan laporan tersebut secara individual dan konsolidasi disampaikan kepada OJK secara triwulanan (posisi Maret, Juni, September dan Desember). Laporan profil risiko disusun secara *self-assessment* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian profil risiko terdiri dari menjadi penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penilaian Risiko *Inheren* merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank.

Karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makroekonomi.

Penilaian atas Risiko Inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*) dan peringkat 5 (*high*).

40. Risk Management (continued)

Bank's risk appetite is the level and type of risk that Bank is willing to take in order to achieve the Banks's objectives. The level of risk to be taken is reflected in the strategy and objectives of the business.

In accordance with the Risk Management Policy, Bank manages 8 (eight) main types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.

Risk Profile

The risk profile report is one of the factors in the assessment of the Bank's soundness level. Banks are required to submit these reports individually and the consolidated reports are submitted to the OJK on a quarterly basis (positions in March, June, September, and December). The risk profile report is prepared by self-assessment as stipulated in the OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Assessment of Commercial Bank Soundness Level.

The risk profile assessment consists of assessment of inherent risk assessment and assessment of the Quality of Risk Management Implementation (QRMI).

Inherent Risk Assessment is an assessment of the risks inherent in the Bank's business activities, both quantifiable and non-quantifiable, that have the potential to affect the Bank's financial position.

The Bank's inherent risk characteristics are determined by internal and external factors, including business strategy, business characteristics, complexity of the Bank's products and activities, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions.

Assessment of Inherent Risk is carried out by taking into account quantitative and qualitative parameters/indicators. The determination of the level of inherent risk for each type of risk refers to the general principles of assessing the Soundness of Commercial Banks. The determination of the level of inherent risk for each type of risk is categorized into rank 1 (low), rank 2 (low to moderate), rank 3 (moderate), rank 4 (moderate to high), and rank 5 (high).

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Penilaian kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan system pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling berkaitan, yaitu:

1. Tata Kelola Risiko;
2. Kerangka Manajemen Risiko;
3. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Dari hasil penilaian laporan profil risiko (*self assessment*) yang disampaikan kepada OJK, untuk posisi Desember 2023, peringkat risiko komposit Bank yaitu Peringkat 2 (*low to moderate*).

Selain menyampaikan laporan profil risiko, Bank juga menyampaikan laporan keuangan grup dengan entitas anak yang dilaporkan secara semesteran sebagai bentuk pemantauan rutin entitas utama terhadap entitas anak.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada sebagian besar Bank, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam tingkatan yang dapat diterima.

Dalam peningkatan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit, Bank telah menetapkan struktur organisasi yang telah menggambarkan secara jelas pemisahan antara fungsi lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua dan lini pertahanan ketiga.

40. Risk Management (continued)

Risk Profile (continued)

Assessment of the quality of Risk Management Implementation reflects an assessment of the adequacy of the risk control system covering all pillars of Risk Management implementation as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority (OJK). Assessment of the quality of Risk Management Implementation is an assessment of 4 (four) interrelated aspects, namely:

1. Risk Governance;
2. Risk Management Framework;
3. Risk Management Process, Adequacy of Human Resources and Adequacy of Management Information Systems; and
4. Adequacy of the Risk Control System, taking into account the characteristics and complexity of the Bank's business.

Based on quarterly risk profile report (self assessment) submitted to OJK for December 2023 position, The Bank's composite risk is rated at 2 (low to moderate).

In addition to submitting risk profile reports, the Bank also submits financial group reports with subsidiaries which are reported on a semi-annual basis as a form of routine monitoring of the main entity to subsidiaries.

Credit Risk

Credit risk is the risk of loss due to the failure of other parties to fulfill their obligations.

Credit risk can be sourced from various business activities of the Bank. In most banks, lending is the biggest source of credit risk. In addition to credit, the Bank faces credit risk from various financial instruments such as securities, acceptances, inter-bank transactions, trade finance transactions, exchange rate transactions and derivatives as well as commitments and contingencies liabilities.

Credit risk exposure may also increase due to the concentration of credit on debtors, geographic areas, products, types of financing or certain business sector. The purpose of credit risk management is to control and manage credit risk exposure at an acceptable level.

In increasing the prudential aspect in managing credit risk, the Bank has organizational structure that has clearly described the separation between the functions of the first line of defense, second line of defense, and third line of defense.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Bank memiliki kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah *Wholesale*, SME dan Retail, serta kebijakan dan prosedur dalam rangka penempatan antar bank maupun kegiatan *trade finance*. Kebijakan dan pedoman terkait perkreditan tersebut dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Regulator, Peraturan Eksternal lainnya, serta perubahan bisnis.

Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada debitur atau proyek, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laba rugi dan arus kas nasabah;
ii. Riwayat hubungan kredit;
iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah;
iv. Posisi nasabah dalam persaingan di industri sejenis; dan
v. Kondisi ekonomi secara umum.

Proses persetujuan fasilitas kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas harus diproses melalui Komite Kredit. Pengambilan keputusan dalam komite kredit telah mengedepankan prinsip kehati-hatian dimana untuk segmen *Wholesale* dan SME, fungsi Bisnis dan fungsi Kredit memiliki memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan kredit. Sedangkan untuk segmen Retail pengambilan keputusan kredit dilakukan oleh fungsi kredit.

Dalam pengelolaan mitigasi risiko kredit, Bank telah menggunakan *credit rating* baik untuk segmen SME dan *Wholesale* yang dibangun pada sistem khusus, dimana Bank terus melakukan upaya yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem tersebut.

Selanjutnya dalam hal mendukung proses kredit Retail, Bank menggunakan aplikasi teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Kredit Mikro (SIKM) yang didalamnya terdapat credit scoring untuk memperkuat proses analisa pemberian kredit retail.

Berdasarkan Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit, tugas lembaga Komite Kredit paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi;

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

The Bank has policies and procedures in providing loans to Wholesale, SME and Retail customers, as well as policies and procedures for interbank placements and trade finance activities. The policies and guidelines related to credit are reviewed and improved periodically in accordance with the provisions of the Regulator, other External Regulations, and business changes.

The Bank evaluates the credit risk level related to financing to customers or projects by considering various factors, among others:

i. Historical and projected financial condition, including statement of financial position, income statements, and cash flows of customers;
ii. Credit history;
iii. Quality, performance, and experience of the customers' management;
iv. Customers' competitive position in the similar industries and
v. General economic condition.

The credit facility approval process is carried out based on the principle that each facility must be processed through the Credit Committee. Decision making in the credit committee has prioritized the principle of prudence where for the Wholesale and SME segments, the Business function and the Credit function have the same voting rights in making credit decisions. Meanwhile, for the Retail segment, credit decisions are made by the credit function.

In managing credit risk mitigation, the Bank has used credit ratings for the SME and Wholesale segments which are built on a spesific system, where the Bank continues to make the necessary efforts to improve the system.

Furthermore, in terms of supporting the Retail credit process, the Bank also uses information technology applications, namely the Micro Credit Information System (SIKM), which includes credit scoring to strengthen the retail credit analysis process.

Based on the Credit Committee Guideline and Credit Limit Authority Provision, the duties of the Credit Committee at least include the following:

i. Approve or reject credit of financing in accordance with the limits of authority or type of credit or financing set by the directors;

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

ii. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan. Dalam hal ALCO belum ada, komite Kredit harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit atau pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi;
iii. Memahami aspek legal/hukum, aspek bisnis/usaha, aspek keuangan dan aspek kewajaran dari kredit yang dikomitekan; dan
iv. Bila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan unit/fungsi didalam Bank terkait dengan kompetensinya.

Bank mengimplementasikan berbagai model sesuai dengan standar regulasi Bank Indonesia maupun best practice internasional. Bank mengembangkan model secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk menjaga agar kualitas kredit tetap terjaga, Bank telah melakukan pemantauan rutin dan konsisten baik untuk setiap jenis kredit (Komersial, SME, Konsumer) maupun portofolio kredit secara keseluruhan melalui *Portfolio Quality Review* (PQR) yang diselenggarakan tiap bulan bersama dengan direktur terkait. Selain itu, Bank juga melakukan monitoring debitur baru khususnya melalui Analisa *vintage* yang berbasis pada pregerakan kolektabilitas dan *day past due*.

Dalam rangka mengurangi eksposur risiko kredit yang bermasalah dilakukan langkah penyehatan kredit antara lain melalui restruktur, atau penyelesaian kredit melalui pengambil alihan jaminan hingga pelaksanaan hapus buku. Proses pengelolaan kredit bermasalah diatur dalam kebijakan yang bersifat khusus. Selain itu Bank telah memperkuat fungsi khusus untuk pengelolaan atas penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah yaitu melalui *Special Asset Management* yang dipimpin oleh SEVP yang membawahkan beberapa Divisi dan Departemen.

Untuk mengetahui ketahanan Bank dalam menghadapi suatu skenario kejadian ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan *stress test* secara berkala sehingga dapat melakukan antisipasi lebih awal. Sebagai upaya Bank dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak pelemahan makroekonomi akibat pandemi COVID-19 terhadap kualitas aset dan ketahanan permodalan, Bank telah melakukan *stress testing* dan telah disampaikan kepada Direksi dan regulator.

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

ii. Coordinating with the Assets and Liabilities Committee (ALCO) in the aspect of Credit or Financing funding. In the event that ALCO does not yet exist, the Credit Committee must evaluate the aspects of credit or financing funding and periodically report in writing to the board of directors;
iii. Understand legal aspects, business aspects, financial aspects and fairness aspects of the credit that are discussed in the committee; and
iv. If necessary, it can coordinate with units/functions within the Bank regarding their competence.

The Bank has implemented various models to fulfill the Bank Indonesia regulation standard or international best practices. The Bank has developed the models independently or by entering into an agreement with third parties.

To maintain credit quality, the Bank has carried out regular and consistent monitoring for each type of credit (Commercial, SME, Consumer) and the overall loan portfolio through the Portfolio Quality Review (PQR) which is held monthly together with the relevant directors. In addition, the Bank also monitors new debtors, particularly through vintage analysis based on collectability movements and day past due.

To reduce non-performing credit risk exposure, credit restructuring measures are taken, including among others through restructuring, or credit settlement through taking over guarantees to carrying out write-offs. The process of managing non-performing loans is regulated in special policies. Moreover the Bank has strengthened its special function in order to managing the credit restructuring and settlement through Special Asset Management led by SEVP which oversees several Division and Department.

To understand the Bank's resilience in facing a scenario of extreme events that may occur, the Bank conducts stress tests regularly as part of early anticipation effort. As an effort of the Bank in identifying and measuring the impact of macroeconomic weakness due to COVID-19 pandemic on asset quality and capital resilience, the Bank has conducted stress testing and has been submitted to Board of Directors and regulator.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk memperkuat pengendalian risiko kredit, Bank menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada risk taking unit namun juga pada unit kerja pendukung seperti fungsi Analis Kredit dan fungsi *Quality Assurance*. Fungsi analis kredit yaitu melakukan analisis terhadap proposal pengajuan kredit sementara fungsi *Quality Assurance* dan *Credit Examination* yaitu memastikan pelaksanaan manajemen risiko di risk taking unit terutama yang berkaitan dengan kredit telah berjalan sebagaimana mestinya.

Bank juga telah mengembangkan fungsi *Credit Examination* yang berperan sebagai lini pertahanan kedua di risiko kredit yang melakukan pemeriksaan kredit *(post-fact)* secara independen terhadap seluruh portofolio kredit Bank baik pada *Wholesale*, SME, dan Retail. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan portofolio kredit Bank dijalankan sesuai prinsip manajemen risiko dan telah memenuhi seluruh ketentuan perkreditan baik internal maupun eksternal.

Penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana dan sejak awal proses kredit. Terkait dengan hal tersebut, Bank melakukan pemisahan fungsi analis kredit dalam proses pengambilan keputusan kredit dengan adanya pemisahan *Account Officer Sales* dan *Account Officer Analyst*. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan perubahan atas Pedoman Manajemen Risiko Kredit sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kredit. Ketentuan dan prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank.

Selain itu, Bank terus berupaya meningkatkan kesadaran risiko *(risk awareness)* pada seluruh karyawan Bank.

a. Risiko kredit maksimum

Dalam aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas L/C atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan terjadi atau terealisasi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati *(committed)* kepada nasabah.

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

To strengthen credit risk control, the Bank applies risk management not only to risk taking units but also to supporting work units such as Credit Analyst functions and Quality Assurance functions. The function of the credit analyst is to analyze the loan application proposals, while the function of Quality Assurance and Credit Examination is to ensure that the implementation of risk management in the risk taking unit, especially those related to credit, has been running properly.

The Bank also developed a Credit Examination function, which acts as a second line of defense in credit risk, which conducts independent credit examination (post-fact) on the entire Bank's loan portfolio on Wholesale, SME and Retail segments. The examination aims to ensure that the Bank's credit portfolio is carried out in accordance with risk management principles and has complied with all credit provisions, both internal and external.

The application of precautionary principle must be carried out effectively in every type of fund provision and from the beginning of the loan process. In this regard, the Bank separates the functions of credit analysts in the credit decision making process with the separation of Account Officer Sales and Account Officers Analysts. In line with this, changes have been made to the Credit Risk Management Guidelines as an effort to increase understanding and awareness of risks for all parties involved in the credit process. These provisions and procedures are an integral part of the Bank's risk management policy.

In addition, the Bank continues to increase risk awareness among all Bank employees.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the consolidated statements of financial position, the maximum exposure to credit risk generally equals their carrying amount. For bank guarantees and irrevocable Letters of Credit issued or SKBDN, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees and irrevocable Letters of Credit issued or SKBDN are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the unused committed loan facilities granted to customers.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit maksimum (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan *(on-balance sheet)* dan rekening administratif *(off-balance sheet)*, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

	2023	2022	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	342.581	743.970	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	12.180.830	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga:			Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	5.322.930	3.362.099	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.067.387	588.835	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	9.145.823	8.058.944	Measured at amortized cost
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.572.152	-	Marketable securities purchased with agreement to resell
Tagihan derivatif	3.040	9.254	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	45.835.782	48.956.758	Loans and sharia financing/ receivables
Tagihan akseptasi	130.964	17.135	Acceptances receivable
Penyertaan saham	15	15	Investments in shares
Aset lain-lain	1.272.119	807.707	Other assets
Rekening Administratif			**Administrative Accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	4.822.935	4.215.885	Unused loans and sharia financing/ receivables facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	88.205	64.027	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	1.337.709	3.161.179	Bank guarantees issued
Total	**79.280.828**	**86.307.069**	**Total**

b. Risiko konsentrasi kredit

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik sejenis.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai geografis dan sektor industri, mencerminkan profil risiko yang seimbang dan sehat dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Bank telah menetapkan limit konsentrasi industri yang menentukan berdasarkan tingkat risiko sektor industri, proyeksi pertumbuhan kredit dan juga ketersediaan modal.

40. Risk Management (continued)

a. Maximum credit risk (continued)

The following table presents the maximum exposure to credit risk of on-balance sheet financial instruments and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancement:

b. Credit concentration risk

Concentration of credit risk by geography

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics.

The bank encourages the diversifications of its credit portfolio among a variety of geographic areas and industries, reflecting a well-balanced and healthy risk profile, and to focus marketing efforts toward potential industries and customers in order to minimize the credit risk. The Bank has sets its industry concentration limit based on industry risk level, projection of loan growth and availability of capital.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik sejenis.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai geografis dan sektor industri, mencerminkan profil risiko yang seimbang dan sehat dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Bank telah menetapkan limit konsentrasi industri yang menentukan berdasarkan tingkat risiko sektor industri, proyeksi pertumbuhan kredit dan juga ketersediaan modal.

Diversifikasi portofolio kredit didasarkan rencana strategi bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan dan proyeksi pertumbuhan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

40. Risk Management (continued)

b. Credit concentration risk (continued)

Concentration of credit risk by geography

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics.

The bank encourages the diversifications of its credit portfolio among a variety of geographic areas and industries, reflecting a well-balanced and healthy risk profile, and to focus marketing efforts toward potential industries and customers in order to minimize the credit risk. The Bank has sets its industry concentration limit based on industry risk level, projection of loan growth and availability of capital.

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections.

As at December 31, 2023 and 2022, the disclosure on the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreement is as follow:

	2023						
	Jabotabek	Jawa Selain Jabotabek/ *Java Other than Jabotabek*	Sumatera	Kalimantan	Lain-Lain/ *Others*	Total	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian							**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	-	-	-	-	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	342.567	6	8	-	-	342.581	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	-	-	-	-	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	-	-	-	-	5.322.930	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.067.387	-	-	-	-	3.067.387	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan							Measured at
Amortisasi	9.145.823	-	-	-	-	9.145.823	Amortized cost
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.572.152	-	-	-	-	2.572.152	Marketable securities sold with agreement to ressell receivable
Tagihan derivatif	3.040	-	-	-	-	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	28.781.905	8.418.724	3.263.034	1.087.484	4.284.635	45.835.782	Loans and sharia financing/receivables
Tagihan akseptasi	130.964	-	-	-	-	130.964	Acceptances receivable
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	15	Investments in shares
Aset lain-lain	1.223.039	23.767	9.342	1.901	14.070	1.272.119	Other assets

40. Manajemen Risiko (lanjutan) / 40. Risk Management (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / b. Credit concentration risk (continued)

	2023						
	Jabotabek	Jawa Selain Jabotabek/ *Java Other than Jabotabek*	Sumatera	Kalimantan	Lain-Lain/ *Others*	Total	
Rekening Administratif							**Administrative Accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang belum digunakan	4.558.701	111.418	114.932	25.336	12.548	4.822.935	Unused loans and sharia financing/ receivables facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	85.649	2.556	-	-	-	88.205	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	1.023.828	233.912	20.989	16.169	42.811	1.337.709	Bank guarantees issued
Total	**61.597.186**	**8.790.383**	**3.408.305**	**1.130.890**	**4.354.064**	**79.280.828**	**Total**

	2022						
	Jabotabek	Jawa Selain Jabotabek/ *Java Other than Jabotabek*	Sumatera	Kalimantan	Lain-Lain/ *Others*	Total	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian							**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	-	-	-	-	4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	743.069	15	54	-	832	743.970	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.180.830	-	-	-	-	12.180.830	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	-	-	-	-	3.362.099	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	588.835	-	-	-	-	588.835	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan							Measured at
Amortisasi	8.058.944	-	-	-	-	8.058.944	Amortized cost
Tagihan derivatif	9.254	-	-	-	-	9.254	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	29.880.480	9.672.817	3.478.565	1.096.378	4.828.518	48.956.758	Loans and sharia financing/receivables
Tagihan akseptasi	17.135	-	-	-	-	17.135	Acceptances receivable
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	15	Investments in shares
Aset lain-lain	763.347	21.984	7.418	2.346	12.612	807.707	Other assets
Rekening Administratif							**Administrative Accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang belum digunakan	3.838.707	192.102	99.476	25.692	59.908	4.215.885	Unused loans and sharia financing/ receivables facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	64.027	-	-	-	-	64.027	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	2.220.230	492.676	190.030	10.401	247.842	3.161.179	Bank guarantees issued
Total	**65.867.403**	**10.379.594**	**3.775.543**	**1.134.817**	**5.149.712**	**86.307.069**	**Total**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan industri

Concentration of credit risk by industry

2023

	Keuangan/ *Financial*	Pemerintah/ *Government*	Konsumsi/ *Consumers*	Perdagangan/ *Trade*	Konstruksi/ *Construction*	Manufaktur/ *Manufacturing*	Lain-Lain/ *Other*	Total	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian									**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	-	-	-	-	-	-	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	342.581	-	-	-	-	-	-	342.581	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	-	-	-	-	-	-	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga									Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.917	13	-	-	-	-	-	5.322.930	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	3.067.387	-	-	-	-	-	3.067.387	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.573.646	7.572.177	-	-	-	-	-	9.145.823	Measured at amortized cost
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	2.572.152	-	-	-	-	-	2.572.152	Marketable securities purchased with agreement to resell
Tagihan derivatif	3.040	-	-	-	-	-	-	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	15.863	-	11.520.707	14.451.355	4.563.046	5.494.925	9.789.886	45.835.782	Loans and sharia financing/ receivables
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	130.964	-	130.964	Acceptances receivable
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	-	-	15	Investment in shares
Aset lain-lain	289.254	-	68.963	523.095	179.578	203.345	7.884	1.272.119	Other assets
Rekening Administratif									**Administrative accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	11	-	2.807.181	792.861	244.359	247.389	731.134	4.822.935	Unused loans and Sharia financing/ receivable facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	-	-	88.205	-	-	88.205	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.337.709	-	-	1.337.709	Bank guarantees issued
Total	**12.886.513**	**13.211.729**	**14.396.851**	**15.767.311**	**6.412.897**	**6.076.623**	**10.528.904**	**79.280.828**	**Total**

2022

	Keuangan/ *Financial*	Pemerintah/ *Government*	Konsumsi/ *Consumers*	Perdagangan/ *Trade*	Konstruksi/ *Construction*	Manufaktur/ *Manufacturing*	Lain-Lain/ *Other*	Total	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian									**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	-	-	-	-	-	-	4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	743.970	-	-	-	-	-	-	743.970	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.180.830	-	-	-	-	-	-	12.180.830	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga									Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	-	-	-	-	-	-	3.362.099	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10.125	578.710	-	-	-	-	-	588.835	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	125.798	7.933.146	-	-	-	-	-	8.058.944	Measured at amortized cost
Tagihan derivatif	9.254	-	-	-	-	-	-	9.254	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	269.342	16	13.566.056	1.343.569	304.909	1.904.918	31.567.948	48.956.758	Loans and sharia financing/ receivables
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	17.135	-	17.135	Acceptances receivable
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	-	-	15	Investment in shares
Aset lain-lain	37.127	-	6.737	23.576	24.451	12.538	703.278	807.707	Other assets
Rekening Administratif									**Administrative accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	1.206.477	-	2.801.388	-	-	178.148	29.872	4.215.885	Unused loans and Sharia financing/ receivable facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	-	-	63.835	192	-	64.027	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	10.448	-	-	-	18.580	2.803.855	328.296	3.161.179	Bank guarantees issued
Total	**22.095.916**	**8.511.872**	**16.374.181**	**1.367.145**	**411.775**	**4.916.786**	**32.629.394**	**86.307.069**	**Total**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit, antara lain dengan meminta agunan sebagai jaminan pelunasan kredit jika jaminan berupa sumber pembayaran utama debitur berdasarkan arus kas tidak terpenuhi. Bank dapat menerima beragam jenis agunan yang diatur oleh kebijakan mitigasi risiko. Nilai agunan ditentukan berdasarkan hasil penilaian pada saat kredit diberikan dan ditinjau ulang secara berkala dan konsisten.

Untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *Secured loans*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:
a. *Physical collateral*, antara lain tanah, bangunan dan BPKB kendaraan bermotor;
b. *Cash collateral*, antara lain simpanan (tabungan, giro dan deposito berjangka), emas, *financial collateral* (surat berharga); dan
c. Lainnya, antara lain garansi, jaminan pemerintah, dan jaminan dari Lembaga penjamin.

Agunan merupakan sumber terakhir pelunasan kredit *(secondary source of credit repayment)* dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit berasal dari hasil usaha dan hasil analisa kemampuan debitur.

d. Kualitas aset keuangan

Kualitas aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan panduan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diungkapkan pada Catatan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian.

40. Risk Management (continued)

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank implements policies to mitigate credit risk, among others, by asking for collateral as guarantee for repayment of credit if the collateral is the main source of payment of the debtor based on cash flow is not fulffiled. The Bank can accept various types of collateral that are regulated by risk mitigation policies. The collateral value is determined based on the results of the appraisal at the time the credit is given and is regularly and consistently reviewed.

For the loans, Bank uses the collateral to minimize the credit risk. Loans in Bank are classified into two major categories as follows:

1. Secured loans
2. Unsecured loans

For secured loans, Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows:
a. Physical collateral, such as land, buildings and proof of vehicle ownership;
b. Cash collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposit), gold, financial collateral (securities); and
c. Others, such as guarantees, government guarantees, and guarantees from guarantee/insurance institution.

Collateral is a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations and capability analysis the borrowers.

d. Quality of financial assets

The financial assets quality is managed by the Bank using the guidance from Financial Services Authority and disclosed in Notes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 to the consolidated financial statements.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

d. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Bank memiliki kebijakan terkait tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* untuk mempertahankan peringkat risiko di seluruh portofolio aset keuangan secara akurat dan konsisten, sehingga Bank fokus atas risiko dengan peringkat tertentu dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar sebagai masukan utama untuk pengukuran risiko pihak lawan *(counterparty)*. Peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia yang dinilai dan diperbaharui secara berkala.

e. Evaluasi penurunan nilai

Di samping itu, Bank telah menerapkan PSAK 71 dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terutama dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Metodologi perhitungan CKPN dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kolektif dan individual. Metode penurunan nilai ini digunakan untuk menghitung CKPN fasilitas kredit yang terkait dengan *significant loan* dan *non-significant loan*. Minimum kriteria yang termasuk dalam kategori *significant loan* dan *non-significant loan* mengacu kepada Pedoman Penurunan Nilai Aset Keuangan Bank.

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan (tidak termasuk tagihan dari cabang-cabang lain) berdasarkan *staging* dan peringkat kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

40. Risk Management (continued)

d. Quality of financial assets (continued)

Bank has policy related to risk appetite and risk tolerance to maintain risk rating over all financial asset portfolios accurately and consistently, therefore the Bank will focused on the risks with certain rating and the comparison of credit exposures across all business lines, geographic regions, and products. The rating system is supported by a various financial analytics, combined with processed market information to provide the main inputs of counterparty risk measurement. The risk rating is adjusted to various categories and is determined in accordance with the Bank Indonesia rating guidelines which are assessed and updated regularly.

e. Impairment assessment

Moreover, Bank has implemented PSAK 71 in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN) especially in the calculation of Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

CKPN Calculation methodology grouped into 2 categories, those are collective and individual. This method used to calculate CKPN for significant and non-significant loan. Minimum criteria that describe significant and non-significant loan refers to Bank's Financial Asset Impairment Policy.

The following table presents the financial assets (not include due from other branches), based on stage and credit grading as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023									
	Giro pada Bank Indonesia/ *Current Accounts with Bank Indonesia*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Efek-efek/ *Securities*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Penyertaan Saham/ *Investments in Shares*	Aset keuangan lainnya/ *Other financial assets*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi										**Financial assets at amortized cost**
Stage 1	3.205.619	342.881	2.133.567	9.145.932	132.577	40.965.293	15	1.531.016	57.456.900	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	3.940.999	-	-	3.940.999	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	4.512.324	-	-	4.512.324	Stage 3
	3.205.619	342.881	2.133.567	9.145.932	132.577	49.418.616	15	1.531.016	65.910.223	
Aset keuangan - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain										**Financial assets - fair value through other comprehensive income**
Stage 1	-	-	-	3.067.387	-	-	-	-	3.067.387	Stage 1

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

e. Impairment assessment (continued)

2023

	Giro pada Bank Indonesia/ *Current Accounts with Bank Indonesia*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Efek-efek/ *Securities*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Penyertaan Saham/ *Investments in Shares*	Aset keuangan lainnya/ *Other financial assets*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan - nilai wajar melalui laba rugi										**Financial assets - fair value through profit or loss**
Stage 1	-	-	-	5.322.930	-	-	-	-	5.322.930	Stage 1
Jumlah aset keuangan	**3.205.619**	**342.881**	**2.133.567**	**17.536.249**	**132.577**	**49.418.616**	**15**	**1.531.016**	**74.300.540**	**Total financial assets**
Cadangan kerugian penurunan nilai										**Allowance for impairment losses**
Stage 1	-	300	-	109	1.613	911.306	-	51.597	913.328	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	496.517	-	-	496.517	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	2.175.011	-	-	2.226.608	Stage 3
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**300**	**-**	**109**	**1.613**	**3.582.834**	**-**	**51.597**	**3.636.453**	**Total allowance for impairment losses**
Jumlah – bersih	**3.205.619**	**342.581**	**2.133.567**	**17.536.140**	**130.964**	**45.835.782**	**15**	**1.479.419**	**70.664.087**	**Total - net**

2022

	Giro pada Bank Indonesia/ *Current Accounts with Bank Indonesia*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Efek-efek/ *Securities*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Penyertaan Saham/ *Investments in Shares*	Aset keuangan lainnya/ *Other financial assets*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi										**Financial assets at amortized cost**
Stage 1	4.140.431	744.059	12.180.830	8.059.020	17.346	45.503.113	15	893.939	71.538.753	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	1.634.341	-	-	1.634.341	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	3.445.980	-	-	3.445.980	Stage 3
	4.140.431	744.059	12.180.830	8.059.020	17.346	50.583.434	15	893.939	76.619.074	
Aset keuangan - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain										**Financial assets - fair value through other comprehensive income**
Stage 1	-	-	-	588.835	-	-	-	-	588.835	Stage 1
				588.835					**588.835**	
Aset keuangan - nilai wajar melalui laba rugi										**Financial assets - fair value through profit or loss**
Stage 1	-	-	-	3.362.099	-	-	-	-	3.362.099	Stage 1
Jumlah aset keuangan	**4.140.431**	**744.059**	**12.180.830**	**12.009.954**	**17.346**	**50.583.434**	**15**	**893.939**	**80.570.008**	**Total financial assets**
Cadangan kerugian penurunan nilai										**Allowance for impairment losses**
Stage 1	-	89	-	76	211	535.853	-	3.001	539.230	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	104.609	-	-	104.609	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	986.214	-	-	986.214	Stage 3
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**89**	**-**	**76**	**211**	**1.626.676**	**-**	**3.001**	**1.630.053**	**Total allowance for impairment losses**
Jumlah – bersih	**4.140.431**	**743.970**	**12.180.830**	**12.009.878**	**17.135**	**48.956.758**	**15**	**890.938**	**78.939.955**	**Total - net**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Dalam menentukan kualitas kredit berdasarkan segmen nasabah, untuk portofolio Komersial, UMKM dan Konsumer, eksposur dianalisis berdasarkan peringkat risiko kredit yang memainkan peranan utama dalam penilaian kualitas dan pengawasan risiko. Semua kredit diberikan peringkat risiko kredit yang ditelaah ulang secara sistematis dan diubah berdasarkan perubahan keadaan atau perilaku debitur. Risiko kredit diklasifikasi berdasarkan kolektibilitas dan lama tunggakan (DPD). Adapun kredit dengan kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 dengan DPD kurang dari sama dengan 30 hari diklasifikasikan pada *stage* 1. Kredit dengan kolektibilitas 2 dengan DPD lebih dari sama dengan 31 hari sampai dengan kurang dari sama dengan 90 hari diklasifikasikan pada *stage* 2. Sementara kredit dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5 diklasifikasikan pada *stage* 3.

40. Risk Management (continued)

e. Impairment assessment (continued)

In determining credit quality by client segment for Commercial, SME and Consumer banking portfolios. Exposures are analyzed by credit grade which plays a central role in the quality assessment and monitoring of risk. All loans are assigned a credit grade which is reviewed periodically and amended in light of changes in the borrower's circumstances or behavior. Credit grading is classified based on collectibility and Day Past Due (DPD). In case of loans with collectibility 1 and collectibility 2 with DPD less than 30 days are classified on stage 1. Loans with collectibility 2 with DPD more than 31 days up to less than 90 days days are classified on stage 2. While loans with collectibility 3, 4 and 5 are classified on stage 3.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Tabel berikut adalah instrumen aset keuangan (tidak termasuk tagihan dari cabang-cabang lain) berdasarkan *stage* dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap instrumen dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

40. Risk Management (continued)

e. Impairment assessment (lanjutan)

This table shows financial assets instruments (not include due from other branches) by stage with the allowance for impairment losses against each financial instruments under classification of amortized cost and fair value through other comprehensive income as at December 31, 2023 and 2022 are as follow:

2023

	Stage 1			*Stage* 2			*Stage* 3			Jumlah/*Total*			
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	-	3.205.619	-	-	-	-	-	-	3.205.619	-	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	342.881	(300)	342.581	-	-	-	-	-	-	342.881	(300)	342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	-	2.133.567	-	-	-	-	-	-	2.133.567	-	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other bank - net
Surat - surat Berharga	17.536.249	(109)	17.536.140	-	-	-	-	-	-	17.536.249	(109)	17.536.140	Marketable Securities
Tagihan akseptasi	132.577	(1.613)	130.964	-	-	-	-	-	-	132.577	(1.613)	130.964	Acceptance receivables
Kredit yang diberikan	40.965.293	(911.306)	40.053.987	3.940.999	(496.517)	3.444.482	4.512.324	(2.175.011)	2.337.313	49.418.616	(3.582.835)	45.835.781	Loans
Penyertaan Saham	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15	Investment in shares
Aset keuangan lainnya	1.531.016	-	1.531.016	-	-	-	-	(51.597)	(51.597)	1.531.016	(51.597)	1.479.419	Other financial assets
	65.847.217	**(913.328)**	**64.933.889**	**3.940.999**	**(496.517)**	**3.444.482**	**4.512.324**	**(2.226.608)**	**2.285.716**	**74.300.540**	**(3.636.454)**	**70.664.086**	

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

e. Impairment assessment (lanjutan)

2022

	Stage 1			*Stage* 2			*Stage* 3			Jumlah/*Total*			
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	-	4.140.431	-	-	-	-	-	-	4.140.431	-	4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	744.059	(89)	743.970	-	-	-	-	-	-	744.059	(89)	743.970	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.180.830	-	12.180.830	-	-	-	-	-	-	12.180.830	-	12.180.830	Placements with Bank Indonesia and other bank - net
Surat-surat Berharga	12.009.954	(76)	12.009.878	-	-	-	-	-	-	12.009.954	(76)	12.009.878	Marketable Securities
Tagihan akseptasi	17.346	(211)	17.135	-	-	-	-	-	-	17.346	(211)	17.135	Acceptance receivables
Kredit yang diberikan	45.503.113	(535.853)	44.967.260	1.634.341	(104.609)	1.529.732	3.445.980	(986.214)	2.459.766	50.583.434	(1.626.676)	48.956.758	Loans
Penyertaan Saham	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15	Investment in shares
Aset keungan lainnya	893.939	(3.001)	890.938	-	-	-	-	-	-	893.939	(3.001)	890.938	Other financial assets
	75.489.687	**(539.230)**	**74.950.457**	**1.634.341**	**(104.609)**	**1.529.732**	**3.445.980**	**(986.214)**	**2.459.766**	**80.570.008**	**(1.630.053)**	**78.939.955**	

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the borrowers.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang tidak sesuai dengan posisi yang diambil oleh Bank baik pada posisi aset dan liabilitas keuangan dan rekening administratif, termasuk risiko perubahan harga *option*. Aktivitas Bank secara kesuluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas dan harga komoditas. Dalam rangka meminimalisasi potensi kerugian yang dapat terjadi dari volatilitas pergerakan variabel pasar tersebut, maka diperlukan adanya pemantauan yang ketat terhadap posisi Bank yang terekspos.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas *treasury* serta bisnis yang terpapar risiko tersebut. Pengendalian risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga Bank pada *trading book* antara lain melalui analisis risiko dan limit untuk aktivitas *trading* seperti transaksi *money market, foreign exchange* dan *fixed income securities* (surat-surat berharga). Selain itu, dilakukan proses *marked to market* untuk posisi *trading book, monitoring* posisi devisa neto dan *Value at Risk* (VaR) atas posisi tersebut.

Risiko suku bunga

Dalam rangka mengidentifikasi risiko secara lebih akurat pada produk dan aktivitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga pasar yang dapat memengaruhi tingkat risiko Bank dan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat maka Bank perlu mengelola risiko suku bunga yang tidak hanya terbatas pada komponen *trading book* namun juga pada komponen *banking book* sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan risiko suku bunga dalam *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) dilakukan dengan memperhatikan pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

IRRBB bersumber dari 3 (tiga) aspek dasar yang terkait dengan tingkat dan karakteristik struktur suku bunga, serta dampak dari tingkat dan karakteristik tersebut terhadap perubahan atas kurva imbal hasil *(yield curve)*. Ketiga aspek dasar dimaksud adalah *gap risk, basis risk* dan *option risk*.

40. Risk Management (continued)

Market Risk

Market risk is the risk of losses that arise due to changes in market factors that are not in accordance with position taken by Bank both in the position of financial assets and liabilities and administrative accounts, including the risk of changes in option prices. The overall activity of the Bank will be influenced by movements in market variables such as interest rates, exchange rates, equity prices and commodity prices. In order to minimize the potential losses that may occur due to the volatility of such market variable movements, it is necessary to perform strict monitoring of the Bank's exposure.

The overall market risk management is performed based on the policies and procedures related to the products, services and activities in the treasury and business exposed to that risk. The management of foreign exchange rate and interest rate risks in the trading book is performed through risk and limit analysis for trading activities such as money market, foreign exchange, and fixed income securities transactions (marketable securities). Furthermore, the trading book position has been marked-to-market and the net open position and Value at Risk (VaR) on that position are monitored.

Interest rate risk

In order to identify the risk potential more accurately towards the Bank's products and activity that were affected by market's interest rate which may affect risk level of the Bank and to make a good sound practice, the Bank needs to manage interest rate risk for both components either in the trading book or Banking book component according to the conservatism principles.

The Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) management is performed by monitoring the movement of interest rate in market not in same direction with Banking Book Position that may impact the Bank's capital and earning, in current condition and the future.

IRRBB comes from three basic aspects related to characteristic and structure of interest rate, and also the impact of yield curve changes. The basic aspects are gap risk, basis risk and option risk.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam melakukan pengukuran risiko, Bank melakukan *stress test* dengan beberapa skenario, termasuk skenario terburuk (*worst case scenario*) untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank dalam menghadapi berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Hasil *stress test* tersebut digunakan sebagai pertimbangan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit risiko pasar. *Stress testing* dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi abnormal. Bank melakukan *back testing* untuk validasi pada metodologi, formula, model dan penggunaan asumsi pada setiap skenario dalam model pengukuran risiko.

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur risiko suku bunga Bank atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak untuk diperdagangkan pada 31 Desember 2023 dan 2022 (Bank saja).

40. Risk Management (continued)

Market Risk (continued)

In measuring risks, the Bank has performed stress tests based on several scenarios, including the worst case scenario. This is intended to assess the Bank's ability during various levels of market movements to abnormal market conditions. The stress test results was used as a consideration in determining changes in policies and limit related to market risk. Stress testing is done every 3 (three) months or whichever is earlier in case there is an abnormal condition. The Bank periodically performs back testing to validate methodology, formula, model and assumptions used on each scenario of risk measurement model.

The table below summarizes the Bank's interest rate risk exposure on non-trading financial assets and liabilities as at December 31, 2023 and 2022 (Bank only).

	2023					
	Total	Kurang Dari 3 Bulan/ *Less Than 3 Months*	3 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih Dari 1 - 5 Tahun/ *More Than 1 - 5 Years*	Lebih dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years*	
Aset						**Assets**
Giro pada Bank Indonesia	2.655.765	2.655.765	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	367.341	367.341	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	738.617	738.617	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga						Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	-	-	4.434.321	888.609	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.477.939	-	76.255	2.897.332	504.352	Fair value through other comprehensive
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	8.808.097	1.277.302	193.121	7.337.674	-	Measured at amortized cost
Tagihan derivatif	3.040	3.040	-	-	-	Derivative receivable
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-	Marketable securities purchased receivables with/ agreemetns to resell
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	44.183.228	3.513.641	7.869.650	15.523.202	17.276.735	Loans and sharia/ financing/receivables
Tagihan akseptasi	132.577	96.953	35.624	-	-	Acceptance receivables
	65.689.534	**8.652.659**	**8.174.650**	**30.192.529**	**18.669.696**	
Liabilitas						**Liabilities**
Simpanan nasabah	39.036.634	31.493.700	7.349.532	193.402	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.761.176	7.758.176	3.000	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	-	-	-	-	-	Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross
Pinjaman yang diterima	11.654.712	1.231.760	2.247.547	8.175.405	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	-	3.397.588	-	Securities issued
	61.850.110	**40.483.636**	**9.600.079**	**11.766.395**	**-**	
Neto	**3.839.424**	**(31.830.977)**	**(1.425.429)**	**18.426.134**	**18.669.696**	***Net***

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

	2022					
	Total	Kurang Dari 3 Bulan/ *Less Than 3 Months*	3 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih Dari 1 - 5 Tahun/ *More Than 1 - 5 Years*	Lebih dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years*	
Aset						Assets
Giro pada Bank Indonesia	3.743.790	3.743.790	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	766.734	766.734	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.081.830	11.051.830	30.000	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga						Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	74.639	85.541	3.043.336	158.583	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.090.347	501.512	51.127	282.598	255.110	Fair value through other comprehensive
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	7.661.041	949.580	1.041.954	2.239.020	3.430.487	Measured at amortized cost
Tagihan derivatif	9.254	9.254	-	-	-	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	45.984.992	806.856	3.881.117	15.881.248	25.415.771	Loans and sharia/ financing/receivables
Tagihan akseptasi	17.346	9.258	8.088	-	-	Acceptance receivables
	73.717.433	**17.913.453**	**5.097.827**	**21.446.202**	**29.259.951**	
Liabilitas						Liabilities
Simpanan nasabah	46.696.050	33.923.898	12.261.431	510.721	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	10.374.005	10.374.005	-	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto						Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross
Pinjaman yang diterima	11.132.586	500.000	2.700.000	7.900.564	32.022	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.717	-	-	2.707.717	685.000	Securities issued
	71.595.358	**44.797.903**	**14.961.431**	**11.119.002**	**717.022**	
Neto	**2.122.075**	**(26.884.450)**	**(9.863.604)**	**10.327.200**	**28.542.929**	

Manajemen risiko suku bunga atas limit *repricing gap* dilakukan dengan memonitor sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank atas berbagai skenario tingkat bunga baik standar dan non-standar. Analisis sensitivitas Bank atas kenaikan atau penurunan tingkat bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil dan posisi laporan posisi keuangan yang tetap, adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The management of interest rate risk against repricing gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Bank's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. An analysis of the Bank's sensitivity to an increase or decrease in market interest rates, assuming no asymmetrical movement in curves and a constant position of statement of financial position, is as follows (unaudited):

	2023		
	Kenaikan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel increase*	**Penurunan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel decrease***	
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(224.021)	224.021	Sensitivity of projected interest income - net

	2022		
	Kenaikan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel increase*	**Penurunan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel decrease***	
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(57.727)	57.727	Sensitivity of projected interest income - net

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar

Penilaian risiko nilai tukar mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan Posisi Devisa Neto (PDN) dan volatilitas mata uang asing yang dikelola Bank. Pengendalian risiko dilakukan melalui monitoring mutasi transaksi valuta asing di seluruh kantor cabang dan unit bisnis. Informasi mengenai PDN diungkapkan pada Catatan 43.

Tabel berikut mengindikasikan posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang tidak untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dimana Bank memiliki eksposur signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisa tersebut menghitung dampak pergerakan nilai tukar wajar yang mungkin terjadi terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel dianggap konstan, terhadap laba rugi (akibat perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak untuk diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) (tidak diaudit).

40. Risk Management (continued)

Market Risk (continued)

Foreign exchange risk

The foreign exchange risk valuation is performed by monitoring the Net Open Position (NOP) and foreign exchange volatility maintained by the Bank. Risk control is performed through monitoring the foreign exchange transaction movement in all branches and business units. The information related with NOP is disclosed in Note 43.

The table below indicates the foreign currencies position of non-trading monetary in assets and liabilities as at December 31, 2023 and December 31, 2022, which the Bank has significant exposure against its forecast cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the profit or loss (due to change in the fair value of currency sensitive non-trading monetary assets and liabilities) (unaudited).

	2023			
	Kenaikan (penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase (decrease) in exchange rate*	**Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity in profit or loss***	**Sensitivitas terhadap ekuitas/ *Sensitivity in equity***	
Mata uang				**Currency**
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	(89,69)/89.69	-	United States Dollar
Euro Eropa	10/(10)	(1,65)/1.65	-	European Euro
Dolar Australia	10/(10)	6,30/(6.30)	-	Australian Dollar
Yen Jepang	10/(10)	(29,37)/29.34	-	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	10/(10)	9,77/(9.77)	-	Hong Kong Dollar
Dolar Singapura	10/(10)	47,01/(47.01)	-	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	10/(10)	6,83/(6.83)	-	Great Britain Poundsterling
Won Korea	10/(10)	2,22/(2.22)	-	Korean Won
Yuan China	10/(10)	4,31/(4.31)	-	Chinese Yuan

	2022			
	Kenaikan (penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase (decrease) in exchange rate*	**Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity in profit or loss***	**Sensitivitas terhadap ekuitas/ *Sensitivity in equity***	
Mata uang				**Currency**
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	60,38/(60.38)	-	United States Dollar
Euro Eropa	10/(10)	4,89/(4.89)	-	European Euro
Dolar Australia	10/(10)	1,44/(1.44)	-	Australian Dollar
Yen Jepang	10/(10)	25,83/(25.83)	-	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	10/(10)	2,81/(2.81)	-	Hong Kong Dollar
Dolar Singapura	10/(10)	45,61/(45.61)	-	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	10/(10)	12,90/(12.90)	-	Great Britain Poundsterling
Won Korea	10/(10)	0,43/(0.43)	-	Korean Won
Yuan China	10/(10)	10,83/(10.83)	-	Chinese Yuan

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas juga berkaitan dengan optimalisasi struktur neraca dan risiko struktural terhadap ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Pengelolaan risiko likuiditas Bank berupaya agar dapat mengelola risiko likuiditas dalam perspektif jangka pendek maupun struktural.

Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

a. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan mengelola Rasio Kecukupan Likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu (bank saja) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

Selain itu, Bank juga menghitung rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dan Kas, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Terkait dengan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum, Bank menyampaikan laporan NSFR secara triwulanan (individual) ke Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan NSFR triwulanan (individual) pada situs web Bank.

Berdasarkan perhitungan, NSFR Bank Periode Triwulan IV 2023 adalah sebesar 104,39% (secara individual) dan 103,74% (secara konsolidasi). Atas hal tersebut, Bank telah memenuhi rasio NSFR sesuai ketentuan (> 100%).

40. Risk Management (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the inability of the Bank to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

Liquidity risk is the also related to the optimization of the balance sheet structure and structural risk of dependence on certain funding sources. The Bank's liquidity risk management strives to be able to manage liquidity risk form both a short-term and structural perspective.

The size of the liquidity risk is determined, among others:

a. Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, which includes observing the fund rate volatility;
b. The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
c. The availability of asset that is ready to be converted into cash;
d. Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.

In order to improve liquidity resilience, Bank calculates liquidity adequacy ratios namely Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) and manages the Liquidity Adequacy Ratio according to regulatory provisions, both individually (bank only) and consolidated with subsidiary companies.

In addition, the Bank also calculates the Bank's minimum Statutory Reserves (GWM) at Bank Indonesia and Cash, Macroprudential Liquidity Buffer (PLM), and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM).

Related with the regulation of the Financial Services Authority No. 50/POJK.03/2017 concerning the Obligation of Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks, the Bank has submitted NSFR report on quarterly (individual) to Financial Services Authority and published NSFR report to Bank's website.

Based on the calculation, NSFR for Quartal IV 2023 is 104.39% (individual) and 103.74% (consolidated). For this reason, the Bank has already fulfilled the NSFR ratio in accordance with the provisions (> 100%).

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dalam hal ini Bank akan terus melakukan upaya-upaya strategis untuk dapat mempertahankan rasio likuiditas. Beberapa strategi yang telah dan akan terus dilakukan Bank antara lain:

- Meningkatkan DPK Terutama DPK yang mempunyai kategori stabil dan mempunyai tenor menengah - jangka panjang.
- Menjaga Kecukupan Aset Likuid Bank.
- Memelihara dan meningkatkan Pendanaan Antar Bank terutama jangka panjang.
- Dukungan sumber pendanaan dari Kookmin sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP)
- Program pemasaran pendanaan yang berfokus pada jangka waktu menengah 6-12 bulan

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ekspektasi arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang terdekat pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

40. Risk Management (continued)

Liquidity Risk (continued)

In this regard, the Bank will continue to make strategic efforts to be able to maintain the liquidity ratio. Some of the strategies that have been and will continue to be carried out by the Bank include:

- Increase TPF, especially TPF which has a stable category and has a medium – long term tenor.
- Maintaining the adequacy of Liquid Assets.
- Maintain and enhance Interbank Funding especially long-term maturity.
- Support funding sources from Kookmin as Controlling Shareholder (PSP).
- Funding marketing programs focused on a medium term of 6-12 months

Residual contractual maturities of financial liabilities

The table below shows the expected undiscounted cash flows on the Bank's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity as at the consolidated statement of financial position date.

	2023					
	Total	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 - 12 bulan/ *months*	Lebih dari 1 - 5 tahun/ *More than 1 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Liabilitas segera	431.402	431.402	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	44.789.143	32.415.350	12.180.392	193.401	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.886.721	7.883.721	3.000	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	219.631	219.631	-	-		Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	-	-	3.397.588	Securities issued
Liabilitas derivatif	808	808	-	-	-	Derivative payable
Liabilitas akseptasi	132.577	96.953	35.624	-	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	11.704.492	1.231.760	2.297.327	8.175.405	-	Borrowings
Liabilitas Lain-lain	1.570.140	1.263.423	206.372	-	100.345	Other liabilities
Neto	**70.132.502**	**43.543.048**	**14.722.715**	**8.368.806**	**3.497.933**	**Net**
Komitmen dan Kontinjensi						**Commitment and Contigencies**
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.822.935	2.934.857	1.195.554	676.892	15.632	Unused Loan Facilities
Irrevocable letter of credit yang masih harus berjalan	88.205	78.074	10.131	-	-	Outstanding Irrevocable Letters of Credit
Garansi yang diterbitkan	1.337.709	775.909	480.463	81.337	-	Guarantee Issued
Total	**6.248.849**	**3.788.840**	**1.686.148**	**758.229**	**15.632**	**Total**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

	2022					
	Total	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 - 12 bulan/ *months*	Lebih dari 1 - 5 tahun/ *More than 1 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Liabilitas segera	388.522	388.522	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	51.962.370	38.576.511	12.870.049	513.228	2.582	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	10.381.375	10.381.375	-	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	-	-	-	-	-	Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	-	-	1.989.922	1.402.796	Securities issued
Liabilitas derivatif	12.259	12.259	-	-	-	Derivative payable
Liabilitas akseptasi	17.346	9.258	8.088	-	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	11.200.131	500.000	2.700.000	7.900.564	99.567	Borrowings
Liabilitas Lain-lain	1.367.530	1.119.467	130.458	-	117.605	Other liabilities
Neto	**78.722.251**	**50.987.392**	**15.708.595**	**10.403.714**	**1.622.550**	**Net**
Komitmen dan Kontinjensi						**Commitment and Contigencies**
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.215.885	3.056.850	1.065.614	71.507	21.914	Unused Loan Facilities
Irrevocable letter of credit yang masih harus berjalan	64.027	58.979	482	3.829	737	Outstanding Irrevocable Letters of Credit
Garansi yang diterbitkan	3.161.179	2.429.607	430.652	300.920	-	Guarantee Issued
Total	**7.441.091**	**5.545.436**	**1.496.748**	**376.256**	**22.651**	**Total**

Secara berkala Bank melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan limit risiko likuiditas. Selain itu, Bank memiliki kebijakan *contingency funding plan* sebagai pedoman bagi Bank untuk mengantisipasi situasi krisis likuiditas. Untuk mengetahui dampak perubahan pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas yang dapat berdampak pada kecukupan modal Bank, Bank melakukan *stress test* terhadap posisi likuiditas Bank secara regular, sehingga Bank dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang pemulihan likuiditas. Informasi mengenai jatuh tempo aset dan liabilitas sesuai kontrak diungkapkan pada Catatan 41.

The Bank on a regular basis reviews the liquidity risk management policy and its limit. Futhermore, the Bank has contigency funding plan policy as a guidance for the Bank to overcome the situiation of liquidity crisis. In determining impact of changes in market and internal factors in extreme conditions (crisis) to the liquidity conditions that could impact the Bank's capital adequacy, the Bank performs stress test on Bank's funding liquidity position on a regular basis. By applying stress test, the Bank can anticipate early and take control measures as well as calculate the most optimal solution per short-term strategy and long-term recovery of liquidity. The information related to the maturity profile of assets and liabilities is disclosed in Note 41.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Bank. Kebijakan manajemen risiko operasional secara Bank *wide* digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini bisnis, fungsi pendukung dan entitas anak dalam mengelola risiko operasional. Pendekatan Bank terhadap manajemen risiko operasional adalah dengan menentukan strategi mitigasi guna memperoleh keseimbangan yang optimal antara paparan risiko operasional, efektivitas mekanisme kontrol dan pembuatan *risk appetite* sebagai salah satu strategi bank dengan melakukan implementasi konsisten atas Manajemen Risiko Operasional.

Operational Risk

Operational risk is a risk due to insufficiency and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external factors that have the potential to cause financial and non-financial losses to the Bank. Bank wide Operational Risk Management Policy is used as a main reference for all line of businesses, support functions and subsidiaries in managing their operational risk. The Bank's approach to Operational Risk management is to define the best mitigation strategy to get optimum balance between operational risk exposure, effectiveness of control mechanism, and creating risk appetite as a Bank strategy by a consistent implementation of a comprehensive Operational Risk Management.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di Bank mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup 4 pilar yakni pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit Risiko, kecukupan proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal.

Hal ini juga termasuk pengkajian atas produk dan/atau aktivitas baru atau pengembangan yang meningkatkan profil risiko produk dan/atau aktivitas Bank.

Pengelolaan risiko operasional yang dilakukan secara efektif dapat mengurangi potensi kerugian risiko operasional.

Manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengelolaan risiko operasional yang dilakukan secara efektif dapat mengurangi potensi kerugian risiko operasional.

Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* dan penetapan limit Risiko Operasional. Di dalam mengelola risiko operasional, risk taking unit bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara atas pengendalian risiko operasional diatur dalam suatu kebijakan Bank secara menyeluruh yang mencakup ketentuan dan prosedur operasional untuk setiap unit dan dilakukan reviu secara berkala.

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

Management of operational risk exposures at Bank includes legal risk exposures, reputation, compliance and strategic risk exposure that occur in every business process and operational activity.

The Implementation of Operational Risk Management is carried out by referring to the Regulation of Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, which requires the implementation of risk management toward 4 pillars, that cover active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners, adequacy of risk management policy, procedure, and establishment of risk limit, adequacy of risk management process, and internal control system.

In addition, it includes the assessment of new or development products and/or activities that increase the risk profile of the products and/or activities of the Bank.

Effective operational risk management can reduces the potential of operational risk losses.

Risk management policies and procedures, set of the risk limits, adequacy of risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control processes, and a comprehensive risk management information system and an internal control system as well. Effective operational risk management can reduces the potential of operational risk loss.

The Bank has an Operational Risk Management Policy, setting of risk appetite and risk tolerance, and Operational Risk Limits. In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in their respective units.

The operational risk management procedures are regulated in a comprehensive Bank's policy for each unit that includes provisions and procedures and reviewed periodically.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Bank telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengelolaan risiko operasional, yaitu:

i. Menetapkan *risk governance* pengelolaan risiko operasional;
ii. Menetapkan kebijakan dan prosedur serta melakukan reviu secara berkala sebagai landasan penerapan manajemen risiko;
iii. Menetapkan operational *risk appetite* dan *risk tolerance;*
iv. Menyusun metodologi dan perangkat pengelolaan risiko operasional;
v. Membangun *Risk Awareness* di seluruh lini organisasi termasuk mewujudkan *Risk Culture* dalam aktivitas bisnis Bank;
vi. Menjalankan implementasi pengelolaan risiko operasional ke seluruh unit kerja Kantor Pusat dan *Branch* termasuk implementasi *Operational Risk Management* (ORM) *Tools* yang meliputi aplikasi *Loss Event Database* (LED) dan Aplikasi *Risk Control Self-Assesment* (RCSA);
vii. Menyusun *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian termasuk kejadian bencana;
viii. Melalukan penilaian risiko sendiri terhadap penerapan ketahanan dan keamanan siber;
ix. Melakukan penilaian tingkat maturitas untuk keamanan siber dan perbankan digital;
x. Melakukan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi;
xi. Melakukan penilaian risiko (*risk-assessment*) kecukupan pengelolaan risiko atas rencana pengembangan Produk dan/atau layanan Bank;
xii. Melakukan perhitungan atas Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional;
xiii. Menyediakan kajian risiko terkait dengan proses bisnis, aktivitas operasional dan transaksional;
xiv. Melaksanakan peningkatan atas kapabilitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, menyusun *Blue Print* Sumber Daya Manusia, menyusun *Man Power Planning*, dan Peningkatan komposisi SDM di Unit Bisnis;
xv. Pelaksanaan Komite Pengendalian Internal secara rutin untuk membahas suatu permasalahan yang dapat meningkatkan eksposur risiko Bank;
xvi. Melaksanakan monitoring secara berkala atas keamanan sistem teknologi informasi yang digunakan;

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

The Bank has done several things in order to manage operational risk, as follows:

i. Stipulate risk governance for operational risk management;
ii. Stipulate policies and procedures and conduct periodic reviews as a basis for implementing risk management;
iii. Stipulate operational risk appetite and risk tolerance;
iv. Develop operational risk management methodologies and tools;
v. Building Risk Awareness in all lines of organization including realizing Risk Culture in Bank's business activities;
vi. Carry out the implementation of operational risk management to all Headquarters and Branch work units including the implementation of Operational Risk Management Tools (ORM Tools) which include the Loss Event Database (LED) application and the Risk Control Self-Assessment (RCSA) application;
vii. Develop a Disaster Recovery Plan as an anticipatory measure for internal and external events that have the potential to cause losses; including events of disasters;
viii. Self Risk Assessment for Cyber Security Implementation;
ix. Maturity Level Assessment for Cyber Security and Digital Banking;
x. Vulnerability Assessment and Penetration Test;
xi. Conduct a risk assessment of management adequacy of the Bank's products and/or services development plan;
xii. Calculate the Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk;
xiii. Provide the risk studies related to business process, operational, and transactional activities;
xiv. Improves the ability of Human Resources regularly, preparation of the Human Resources Blue Print, development of Man Power Planning and Improve HR composition in Business Units;
xv. Conduct Internal Control Committee to discuss issues that have the potential to increase the risk of bank exposure;
xvi. Carry out periodic monitoring of the security of information technology systems used;

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Bank telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengelolaan risiko operasional, yaitu: (lanjutan)

xvii. Melaksanakan *monitoring limit* risiko dan pelaporan internal maupun eksternal (Regulator);
xviii. Penyempurnaan dan penguatan program strategi *anti-fraud*, antara lain melalui sosialisasi *anti-fraud* kepada seluruh karyawan, pemantauan penerapan sanksi terhadap pelaku, dan pengembangan unit *anti-fraud* menjadi departemen;
xix. Perbaikan kelemahan dalam kegiatan operasional dan TI;
xx. Pelaksanaan monitoring atas penanganan pengaduan nasabah, peningkatan, kompetensi petugas Bank dalam penaganan pengaduan nasabah;

Bank telah menerapkan *operational risk governance*, melalui:

i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
ii. Pelaksanaan pengelolaan atas risiko operasional melalui model *three line of defense*, yaitu:
- *Risk taking* unit sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan langsung dari masing- masing unit kerja;
- *Second line of defense* yang menjalankan fungsi oversight; dan
- Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

iii. Melakukan peninjauan ulang dan pembenahan terhadap kebijakan dan pedoman internal Bank yang ada guna menunjang kegiatan usaha Bank.
iv. Melakukan sosialisasi kebijakan/pedoman internal untuk meningkatkan pemahaman kepada karyawan.

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional, Bank telah mengembangkan:

i. Aplikasi *Risk Control Self Assessment* (RCSA) berbasis web yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko operasional pada setiap unit kerja secara berkala;

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

The Bank has done several things in order to manage operational risk, as follows: (continued)

xvii. Monitor the risk limit and provide the internal and external report (Regulator);

xviii. Improvement and strengthening of the anti-fraud strategy program, including through anti-fraud socialization to all employees, monitoring the implementation of sanctions against perpetrators, and developing anti-fraud units into departments;
xix. Improvement of weaknesses in operational and IT activities;
xx. Implementation of handling customer complaints monitoring, increasing the competence of Bank officers in handling custumer complaints;

The Bank has implemented operational risk governance, through:

i. Active supervision by the Board of Commissioners and Directors;
ii. Implementation of the operational risk management through models named as three line of defense that consist of:
- Risk taking unit as a risk owner is the first line of defense that is responsible for direct management of each work unit;
- The second line of defense that runs the oversight function; and
- Internal Audit as the third line of defense that carries out the independent assurance function.

iii. Conduct review and revamp the internal policies and guidelines of the Bank to support the Bank's business activities.
iv. Conduct socialization of internal policies/guidelines to increase understanding to employees.

In order to manage operational risk, the Bank has developed:

i. The web based of Risk Control Self Assessment (RCSA) application, that is used to identify, measure, and monitor the operational risk in each unit on a regular basis;

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

ii. Aplikasi *Loss Event Data* (LED) berbasis web yang digunakan untuk pencatatan data kerugian Bank yang sudah terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, baik atas kerugian finansial maupun non finansial;
iii. *Action Plan* sebagai langkah-langkah mitigasi risiko operasional;
iv. *Dashboard* Manajemen Risiko Operasional yang digunakan sebagai indikator tingkat risiko operasional dalam suatu aktivitas perbankan.

Setiap kejadian atau indikasi dari terjadinya risiko operasional atau kelemahan yang teridentifikasi oleh alat-alat risiko operasional akan ditindaklanjuti melalui perbaikan-perbaikan. Proses pelaporan dan eskalasi akan dilakukan mulai dari setiap unit bisnis dan unit pendukung sampai dengan Komite Manajemen Risiko. Departemen *Operational Risk* dan *IT Management* secara proaktif telah melakukan sosialisasi atau kampanye yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran tentang Risiko Operasional ke seluruh unit di Bank, melalui berbagai informasi atas kejadian berisiko dan rekomendasi atas perbaikan proses.

Sebagai bagian dari pemantauan Risiko Operasional, Bank juga mengelola Risiko Teknologi Informasi dengan memiliki tata kelola terkait dengan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Fokus pemantauan risiko operasional terkait risiko teknologi informasi antara lain adalah *Risk Register Information Technology* yang mana saat ini Bank fokus pada pembangunan NGBS (*New Generation Banking System*), kemudian *Risk Register e-channel* serta digital yang merupakan transformasi yang dicanangkan oleh pemerintah

Bank telah melakukan penyusunan dan pemantauan pelaksanaan penyelesaian isu risiko yang berpontensi tinggi dalam dampak kerusakan terutama pada daftar utama RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) dari RTU (*Risk Taking Unit*) serta melakukan umpan balik berupa opini terhadap kewajaran dan ketepatan dari penilaian yang telah dilakukan oleh RTU. Selain itu terkait kontrol internal, Bank melakukan pengkinian *Risk Issue* secara rutin dan juga menjaga limit risiko di aktivitas operasional agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis tetapi tetap aman dari risiko.

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

ii. The web based of Loss Event Data (LED), that is used to record and collect Bank's losses data that have occurred or have the potential to cause losses for the Bank, both in financial and non-financial losses;
iii. The Action Plan as an operational risk mitigation step;
iv. The Operational Risk Management Dashboard that is used as an indicator of operational risk level of banking activities.

Any events or indication of operational risk or weaknesses identified by operational risk tools will be followed up through improvements. The reporting and escalation process will start from each business unit and supporting unit up to the Risk Management Committee. Operational Risk and IT Management Department has proactively carried out ongoing campaigns or socialization to raise awareness concerning Operational Risk to all units within the Bank, through information sharing on risk events and recommendations for process improvement.

As part of Operational Risk monitoring, the Bank also manage Information Technology Risk by developing governance related to Information Technology Risk Management. Focus of operational risk monitoring related to information technology risk among others are Risk Register Information Technology, where the Bank is currently focusing on the development of the NGBS (New Generation Banking System), then the e-channel and digital Risk Registers, which are transformations launched by the government.

The Bank has prepared and monitored the implementation of the resolution of risk issues that have a high potential for damage, especially on the main list of RCSA (Risk Control Self-Assessment) from the RTU (Risk Taking Unit) as well as providing feedback in the form of opinions on the fairness and accuracy of the assessments that have been carried out by RTU. Related with internal control Bank did updating Risk Issues on a regular basis and also maintaining risk limits in operational activities in order to support business growth while remaining safe from risk.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Selain itu Bank juga telah melakukan pemantauan atas pencatatan data kerugian Bank yang sudah terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, baik atas kerugian finansial maupun non finansial yang dicatatkan kedalam aplikasi *Loss Event Database* (LED). Sebagai bentuk peningkatan atas penggunaan aplikasi LED (*Loss Event Database*) Bank telah melakukan pembaharuan terhadap pedoman aplikasi LED melalui Surat Edaran Direksi No.SE/048/DIR/2023 tentang Pedoman *Loss Event Database* PT Bank KB Bukopin Tbk.

Kejadian-kejadian berisiko selama tahun 2023 baik yang disebabkan karena faktor kelalaian karyawan, sistem, proses ataupun kejadian eksternal dinilai mengalami kerugian yang relatif tidak signifikan terhadap Bank. Bank menggunakan pendekatan indikator dasar untuk mengalokasi modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan data rata-rata 3 tahun terakhir dari pendapatan bruto Bank.

Bank telah melakukan perhitungan beban modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank dalam melakukan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Bank telah melakukan uji coba perhitungan beban modal risiko operasional berdasarkan *Basel III: Finalizing Post-Crisis Reforms* dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (*Standard Measurement Approach*) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

In addition, the Bank has also monitored the recording of data on Bank losses that have occurred or have the potential to cause losses to the Bank, both financial and non-financial losses that are recorded in the Loss Event Database (LED) application. As a form of increasing the use of the LED application (Loss Event Database) the Bank has updated the LED application guidelines through Directors Circular Letter No.SE/048/DIR/2023 concerning Loss Event Database Guideline PT KB Bank Bukopin, Tbk.

Risk events in 2023 either due to negligence of employees, system, processes, or external events are considered as having incurred relatively insignificant losses to the Bank. The Bank adopts basic indicator approach to allocate capital and Risk Weighted Assets (RWA) for operational risk using average data of the last 3 years of the Bank's gross income.

The Bank has calculated the operational risk capital charge under the Basel Committee on Banking Supervision and the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks. Based on these provisions, the Bank performs operational risk calculations using the Basic Indicator Approach.

The Bank has conducted a trial test on the calculation of operational risk capital costs based on Basel III: Finalizing of Post-Crisis Reforms and Financial Services Authority Circular Letter Number 6/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020, concerning Calculation of Operational RWA Using Standard Approaches for Commercial Banks which have been apply effective January 1, 2023.

Legal Risk

Legal risk is the risk due to legal claims and/or weaknesses in legal aspects which among others derived from the weaknesses in the Bank's engagements, the absence and/or changes in laws which result in the transaction executed by the Bank is not aligned with the current regulations, and litigation process both from third parties to the Bank and from the Bank to third parties.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Hukum (lanjutan)

Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan Bank, seluruh aktivitas Bank yang tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, *treasury*, *trade finance services*, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan produk/aktifitas baru, serta pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis lainnya melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Melalui Departemen Hukum Perusahaan dan Litigasi, Bank telah melakukan identifikasi risiko hukum yang memadai dengan memberikan legal *advisory*/legal opinion dan analisis yuridis kepada unit terkait untuk meningkatkan kualitas perjanjian kredit/Kerjasama agar tidak merugikan Bank, serta memperkuat standar perjanjian Kerjasama dan kebijakan manajemen risiko hukum sebagai bentuk mitigasi atas risiko yang akan muncul.

Selain itu Identifikasi serta pengukuran risiko hukum juga dilakukan melalui pemantauan penanganan kasus hukum, *potential loss* yang dihadapi Bank dari tuntutan hukum, serta pemantauan biaya legal. Pengelolaan risiko hukum Bank dilakukan oleh Departemen Hukum Perusahaan dan Litigasi dengan fokus kepada penyelesaian tuntutan hukum. Departemen tersebut bertanggung jawab untuk memastikan penguatan posisi Bank dalam kasus yang di hadapi oleh Bank.

Identifikasi risiko hukum juga dilakukan pada seluruh aktivitas Bank yang tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, *treasury, trade finance services*, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan produk/aktifitas baru, serta pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis lainnya.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, yang antara lain disebabkan adanya kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, serta hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

40. Risk Management (continued)

Legal Risk (continued)

The process of identifying legal risks is carried out by analyzing all sources of legal risks which at least are carried out on plans for implementing Bank products and/or services, all Bank activities that are not limited to fundraising activities, fund distribution, treasury, trade finance services, human resource management, development of new products/activities, as well as implementation of operational and other business activities through appropriate legal risk management control processes prior to their introduction or implementation.

Through the Corporate Legal and Litigation Department, the Bank has identified adequate legal risks by providing legal advisory, legal opinion, and juridical analysis to related units to improve the quality of credit and cooperation agreements so as not to harm the Bank, as well as strengthening Cooperation agreement standards and legal risk management policies as a form of mitigation of the risks that will arise.

In addition, the identification and measurement of legal risk is also carried out through monitoring the handling of legal cases, potential loss faced by the Bank from lawsuits, and monitoring legal costs. The Bank's legal risk management is carried out by the Corporate Legal and Litigation Department with a focus on resolving legal claims. This department is responsible for ensuring the strengthening of the Bank's position in cases faced by the Bank.

Legal risk identification is also carried out in all Bank activities which are not limited to fund raising, fund distribution, treasury, trade finance services, human resource management, new product/activity development, as well as the implementation of other operational and business activities.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to decrease in stakeholders' trust that comes from negative perception on the Bank, among others derived from events that resulting loss to the Bank, such as negative news in mass media, transgression of business ethics, customers complaints, and other matters resulting reputation risk, such as the weaknesses in corporate governance, corporate culture, and the Bank's business practices.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Karena risiko reputasi melekat pada berbagai kegiatan dan aspek, Bank bergantung pada perangkat dan mekanisme pengelolaan risiko operasional dalam mengelola risiko ini. Dengan demikian, Bank melakukan analisis atas setiap pengaduan nasabah ataupun persepsi negatif Bank yang disampaikan melalui media pemberitaan (media massa, media online, media TV dan media sosial) untuk memastikan penyebab dan penyelesaiannya.

Bank memiliki Departemen khusus yang memiliki bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko reputasi terkait dengan pengaduan nasabah, serta Departemen khusus yang bertanggung jawab terkait pengelolaan risiko reputasi atas komunikasi internal dan eksternal serta pemantauan dan pengelolaan media.

Pengelolaan risiko reputasi atas pengaduan/ keluhan nasabah atau pemberitaan negatif yang disampaikan secara langsung kepada Bank ataupun melalui media online serta media lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan melalui:

i. Penggunaan *Complaint Tracking System* sebagai aplikasi untuk monitoring dan pengelolaan atas penanganan serta penyelesaian pengaduan nasabah;
ii. Pelaksanaan pemantauan atas pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menggunakan sistem *dashboard* secara harian;
iii. Pelaksanaan fungsi pemantauan dan pengelolaan atas pemberitaan Bank di Media Massa oleh *Corporate Relation Department*
iv. Pelaksanaan fungsi pemantauan atas penyelesaian penanganan pengaduan nasabah oleh *Customer Experience and Development Department*;
v. Pelaksaan program pertemuan rutin tahunan dengan awak media sebagai bentuk menjaga relasi Perusahaan;
vi. Pengelolaan Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh *Compliance Development and Customer Protection Unit.*

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko reputasi, Bank menyediakan media komunikasi bagi nasabah apabila mengalami ketidaknyamanan dalam bertransaksi baik melalui media sosial, email maupun layanan telepon Halo Bukopin yang beroperasi selama 24 Jam.

Rating Bank berdasarkan Fitch dipertahankan pada tingkat AAA(idn) dan Pefindo pada idAAA.

40. Risk Management (continued)

Reputation Risk (continued)

Since reputational risk is inherent in various activities and aspects, the Bank relies on tools and mechanisms in operational risk management in managing such risk. Therefore, the Bank analyzes each customer complain or negative perception that is published through the news media (mass media, online media, TV program and social media) to ascertain the cause and its resolution.

The Bank has a special Department that is responsible for managing reputation risk related to customer complaints, as well as a special Department that is responsible for managing reputation risk for internal and external communications as well as media monitoring and management.

Reputation risk management of customer complaints or negative news that submitted directly to the Bank or through online media and other media is carried out continuously through:

i. Use of the Complaint Tracking System as an application to monitor and manage the handling and resolution of customer complaints;
ii. Implementation of monitoring of reporting in mass media, both print mass media and electronic, using a dashboard system on a daily basis;
iii. Implementation of the monitoring and management function of Bank reporting in the Mass Media by the Corporate Relations Department;
iv. Implementation of the monitoring function for the resolution of handling customer complaints by the Customer Experience and Development Department;
v. Implementation of a regular annual meeting program with media crew as a form of maintaining relationships as well as managing the Company's reputation;
vi. Consumer Protection Management carried out by the Compliance Development and Customer Protection Unit.

As part of the reputation risk management process, the Bank provides communication media for customers if they experience inconvenience in transactions either via the Bank's official social media, email or the Halo Bukopin telephone service which operates 24 hours.

Bank’s rating based on Fitch is maintained at AAA(idn) and Pefindo's rating at idAAA.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Untuk memastikan pengendalian risiko reputasi, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Penetapan alur proses secara jelas atas penyelesaian penanganan pengaduan nasabah;
- Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) di tiap unit kerja untuk memastikan aktivitas layanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar waktu;
- Melaksanakan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bank kepada nasabah.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara umum. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Selain itu, Bank juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan yang mengatur penjaminan simpanan, perseroan terbatas, perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara reputasi bank, sehingga sesuai dengan harapan dari seluruh pemangku kepentingan dan juga industri perbankan pada umumnya.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank juga merupakan salah satu cerminan dari penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Apabila Bank lalai dalam menjalankan fungsi kepatuhan maka Bank akan berhadapan langsung dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*).

Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Kepatuhan terhadap ketentuan dan/atau standar yang berlaku, seperti diantaranya pemenuhan ketentuan atas Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Penilaian Kualitas Aset Bank, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), Giro Wajib Minimum, *Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

40. Risk Management (continued)

Reputation Risk (continued)

To ensure reputation risk control, the Bank has taken steps including:

- Establishing a clear process flow for resolving customer complaints;
- Implementation of Service Level Agreement in all business units to ensure that the service activities meets the maximum service time standards;
- Conduct training for employees to improve the quality of Bank's services for customers.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk incurred due to the Bank has not complied and/or not implemented the applicable internal policies, laws, and regulations. In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by the Goverment and Bank Indonesia. In addition, the Bank is also required to comply with several other rules, such as regulation on deposit guarantee program, limited liability company, taxation and capital market Financial Services Authority (OJK).

In the conduct of its business activities, the Bank at all times maintains compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations and applicable laws and regulations to maintain the Bank's reputation, so as to align with the expectations of all stakeholders and also the banking industry in general.

The implementation of the Bank's Compliance Function also reflects the implementation of Good Corporate Governance. In the event the Bank is negligent in carrying out its compliance function, the Bank will directly encounter with compliance risk.

In practice, compliance risk is inherent to the Bank's activities that are related to regulations, prudential provisions, and other provisions, such as:

- Compliance with the prevailing regulations and/or standards, among others are Minimum Capital Requirement (CAR), Assessment of Bank Asset Quality, Formation of Allowance for Impairment Losses, Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) and Legal Lending Limit (LLL) regulations, Net Open Position (NOP), Minimum Statutory Reserves (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan

- Pemenuhan komitmen Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Risiko operasional terkait pemenuhan ketentuan terkait prinsip-prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
- Ketentuan terkait internal proses bisnis;
- Ketentuan pelaporan kepada regulator.

Kesalahan dalam melakukan interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan, juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan yang terjadi pada Bank dapat memengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja dan perkembangan usaha Bank.

Identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan secara berkala yang antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan melalui perhitungan risiko berdasarkan accounting loss data dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko kepatuhan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan merupakan tindakan yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bank memiliki *Divisi Compliance and Quality Assurance* yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir penerapan tata kelola Perusahaan, terwujudnya budaya kepatuhan, tersedianya kebijakan internal yang sesuai dengan regulasi eksternal dan memantau pemenuhan komitmen Bank ke Regulator, serta memastikan terselenggaranya penerapan strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Bank.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang antara lain disebabkan kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi yang kurang memadai, ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif.

Bank merumuskan dan menetapkan target dan strategi bisnis yang akan dicapai di dalam rencana bisnis (business plan) dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan visi dan misi Bank.

40. Risk Management (continued)

Compliance Risk

- Fulfillment the commitments of Bank's Business Plan regulation;
- Operational risks due to The Know Your Customer Principles (KYCP) and Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (APU-PPT);
- Regulation related to internal business process;
- Regulation related to regulatory report.

Misinterpretation in the statutory provisions also potentially create compliance risks. Compliance risk in the Bank can affect the reputation and public trust to the Bank, which in turn can affect the performance and business development of the Bank.

The identification and measurement of compliance risk is carried out on a regular basis which is based on, among other things, the experience of past losses caused by compliance risk through risk calculations based on accounting loss data and other measurements through compliance risk profile parameters.

The implementation of the compliance function is a preventive (ex-ante) action to ensure that the Bank's business activities are conducted in accordance with applicable laws.

The Bank has a Compliance and Quality Assurance Division which is responsible for coordinating the implementation of corporate governance, creating a culture of compliance, providing internal policies that are in accordance with external regulations and monitoring the fulfillment of the Bank's commitments to regulators, as well as ensuring the implementation of the Bank's anti-money laundering strategy and preventing the financing of terrorism.

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment, among others derived from the weaknesses in the strategy formulation process, inaccuracies in the formulation of strategy, inadequate information system, inaccuracies in strategy implementation, and setting the strategic goals that are too aggressive.

Bank formulates and defines the business targets and strategies to be achieved in the business plan by considering internal and external factors in accordance with Bank's vision and mission.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Stratejik

Bank merumuskan dan menetapkan target dan strategi bisnis yang akan dicapai di dalam rencana bisnis (business plan) dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan visi dan misi Bank.

Bank mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

Tujuan utama Bank dalam mengelola risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko stratejik dilaksanakan melalui monitoring, analisis dan evaluasi atas pencapaian target dan sasaran Bank secara detail dan rutin.

Bank secara rutin melakukan pengendalian risiko stratejik antara lain dengan memantau posisi Bank baik antar industri perbankan maupun antar peer group, pemantauan realisasi anggaran (rencana bisnis) dan pengukuran lainnya melalui parameter profil risiko stratejik dan dilanjutkan dengan mitigasi faktor penyebab kegagalan dan pelaksanaan pemantauan perkembangan kondisi makro ekonomi yang dapat berdampak pada bisnis Bank.

Bank telah memiliki Divisi Strategi Perusahaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan strategi Perusahaan serta keuangan berkelanjutan dan ESG.

40. Risk Management (continued)

Strategic Risk

Bank formulates and defines the business targets and strategies to be achieved in the business plan by considering internal and external factors in accordance with Bank's vision and mission.

The Bank manages strategic risks through a consideration, and decision-making process regarding every strategic policy in a collective and comprehensive manner performed by the established Directors and Committees.

The main objective of the Bank in managing strategic risk is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from inaccurate strategic decision making and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic risk management is carried out through monitoring, analysis and evaluation of the achievement of the Bank's goals and targets in detail and routinely.

The Bank routinely carries out strategic risk control including by monitoring the Bank's position both among the banking industry and among peer groups, monitoring the realization of the realization of the budget (business plan) and other measurements through strategic risk profile parameters and continued by mitigating the factors causing failure and implementing monitoring on developments in macroeconomic conditions that may have an impact to the Bank's business.

The Bank has a Corporate Strategy Division which is responsible for planning, managing and developing corporate strategy as well as sustainable finance and ESG.

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Berdasarkan Periode yang Tersisa

41. Maturity Profile Based on Remaining Period To Maturity

	2023							
	Total	≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Months*	> 1 - 3 Bulan/ *> 1 - 3 Months*	> 3 Bulan - 1 Tahun/ *> 3 Months - 1 Year*	> 1- 5 Tahun/ *> 1 - 5 Years*	> 5 Tahun/ *> 5 Years*	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *without Maturity*	
Kas	289.184	289.184	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	3.205.619	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bruto	342.881	342.881	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks - gross
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	2.133.567	2.133.567	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks - gross
Surat-surat berharga - bruto	17.536.249	661.413	336.640	353.954	6.089.466	10.096.776	-	Marketable securities - gross
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - net	2.572.152	2.388.117	48.404	135.631	-	-	-	Marketable securities receivable purchased with agreement to resell - net
Tagihan derivative	3.040	3.040	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	49.418.616	1.455.712	2.346.527	9.755.809	15.165.632	20.694.936	-	Loans and sharia financing/receivables - gross
Tagihan akseptasi - bruto	132.577	29.648	71.000	31.929	-	-	-	Acceptances receivable - gross
Penyertaan saham bruto	15	-	-	-	-	-	15	Investment in shares - gross

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Berdasarkan Periode Yang Tersisa (lanjutan)

41. Maturity Profile Based on Remaining Period To Maturity (continued)

2023

	Total	≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Months*	> 1 - 3 Bulan/ *> 1 - 3 Months*	> 3 Bulan - 1 Tahun/ *> 3 Months - 1 Year*	> 1- 5 Tahun/ *> 1 - 5 Years*	> 5 Tahun/ *> 5 Years*	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *without Maturity*	
Aset tetap - bersih	3.233.675	-	-	-	-	-	3.233.675	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan neto	2.670.542	-	-	-	-	-	2.670.542	Deferred tax assets net
Aset tak berwujud - neto	285.585	-	-	-	-	-	285.585	intangible assets - net
Aset lain-lain - bruto	6.068.454	1.064.632	-	-	-	-	5.003.822	Other assets -gross
Total	87.892.156	11.573.813	2.800.571	10.277.323	21.255.098	30.791.712	11.193.639	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.584.856)							Allowance for impairment losses
	84.307.300							
Liabilitas								**Liabilities**
Liabilitas segera	431.402	431.402	-	-	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	44.789.143	22.728.772	9.686.577	12.180.392	193.402	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.886.721	4.644.351	3.241.370	1.000	-	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	219.631	219.631	-	-	-	-	-	Marketable securities sold with agreement to repurchases - net
Liabilitas derivatif	808	808	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	132.577	29.648	71.000	31.929	-	-	-	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	11.704.492	1.231.760		2.297.327	8.175.405	-	-	Borrowings
Hutang pajak	64.635	-	-	-	-	-	64.635	Taxes Payable
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	-	-	3.397.588	-	-	Marketable securities
Liabilitas lain-lain	1.570.140	177.588	-	206.373	-	100.344	1.085.835	Other liabilities
Total	70.197.137	29.463.960	12.998.947	14.717.021	11.766.395	100.344	1.150.470	Total
Perbedaan jatuh tempo	17.695.019	(17.890.147)	(10.198.376)	(4.439.698)	9.488.703	30.691.368	10.043.169	Maturity gap
Aset neto	**14.110.163**							**Net assets**

2022

	Total	≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Months*	> 1 - 3 Bulan/ *> 1 - 3 Months*	> 3 Bulan - 1 Tahun/ *> 3 Months - 1 Year*	> 1- 5 Tahun/ *> 1 - 5 Years*	> 5 Tahun/ *> 5 Years*	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *without Maturity*	
Kas	524.320	524.320	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	4.140.431	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bruto	744.059	744.059	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks - gross
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	12.180.830	11.945.155	50.000	185.675	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks - gross
Surat-surat berharga - bruto	12.009.954	753.768	441.052	1.203.548	4.457.525	5.154.061	-	Marketable securities - gross
Tagihan derivatif	9.254	9.254	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	50.583.434	773.013	30.551	4.863.605	17.618.090	27.298.175	-	Loans and sharia financing/receivables - gross
Tagihan akseptasi - bruto	17.346	3.833	10.453	3.060	-	-	-	Acceptances receivable - gross
Penyertaan saham bruto	15	-	-	-	-	-	15	Investment in shares -gross gross
Aset tetap - bersih	3.396.202	-	-	-	-	-	3.396.202	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan neto	1.942.151	-	-	-	-	-	1.942.151	Deferred tax assets net
Aset tak berwujud - neto	201.994	-	-	-	-	-	201.994	intangible assets - net
Aset lain-lain - bruto	5.872.414	88.722	-	-	-	-	5.783.692	Other assets
Total	91.622.404	18.982.555	532.056	6.255.888	22.075.615	32.452.236	11.324.054	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.627.052)							Allowance for impairment losses
	89.995.352							
Liabilitas								**Liabilities**
Liabilitas segera	388.522	388.522	-	-	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	51.962.371	29.238.273	9.338.237	12.870.049	513.229	2.583	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	10.381.375	10.381.375	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	12.259	12.259	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	17.346	3.833	10.453	3.060	-	-	-	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	11.200.130	-	500.000	2.700.000	7.900.564	99.566	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.717	-	-	-	2.707.717	685.000	-	Marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	1.367.530	209.671	-	-	-	2.000.000	(842.141)	Other liabilities
Total	78.722.250	40.233.933	9.848.690	15.573.109	11.121.510	2.787.149	(842.141)	Total
Perbedaan jatuh tempo	12.900.154	(21.251.378)	(9.316.634)	(9.317.221)	10.954.105	29.665.087	10.481.913	Maturity gap
Aset neto	**5.732.755**							**Net assets**

42. Pengelolaan Permodalan

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham atau mengeluarkan saham baru.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan OJK untuk pengukuran tersebut terutama berdasarkan pengawasan atas hubungan antara kecukupan modal dengan ketersediaan modal.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 (dua) Tier yaitu Modal Tier 1 dan Modal Tier 2.

Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal Tier 3 sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

42. Capital Management

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to that structure to changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may adjust the amount of dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue capital securities.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital. OJK`s approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital adequacy to availability of capital resources.

The Bank calculated its capital adequacy requirements using the prevailing OJK regulation, where the regulatory capital is classified into 2 (two) tiers, Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of Tier 3 Capital under prevailing OJK regulation.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) calculations for the Bank only as at December 31, 2023 and 2022 in accordance with the prevailing Financial Services Authority Regulations are as follow:

	2023		2022		
	Entitas Induk/ *Parent Only*	**Konsolidasi/ *Consolidated***	**Entitas Induk/ *Parent Only***	**Konsolidasi *Consolidated***	
Modal					Capital
Tier I	7.847.606	9.813.056	5.726.315	6.750.289	Tier I
Tier II	4.317.559	4.392.073	4.778.737	4.788.685	Tier II
Jumlah Modal	**12.165.165**	**14.205.129**	**10.505.052**	**11.538.974**	**Total Capital**
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit	42.683.771	48.289.880	52.182.469	55.820.223	Risk Weighted Assets for Credit Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional	2.098.314	2.344.395	2.547.386	3.068.047	Risk Weighted Assets for Operational Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar	197.195	197.195	317.510	317.510	Risk Weighted Assets for Market Risk
Rasio CET 1	17,45%	19,31%	10,40%	11,40%	CET 1 Ratio
Rasio Tier 1	17,45%	19,31%	10,40%	11,40%	Tier 1 Ratio
Rasio Tier 2	9,60%	8,64%	8,68%	8,09%	Tier 2 Ratio
Total KPMM	27,05%	27,95%	19,08%	19,49%	Total CAR
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	10-11%	10-11%	10-11%	10-11%	Minimum Capital Adequacy Ratio required
Capital conservation buffer	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Capital conservation buffer
Countercyclical buffer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Countercyclical buffer
Capital surcharge untuk bank sistemik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Capital surcharge for systemic bank

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

42. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)*, sebagai berikut:

a. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga *(buffer)* apabila terjadi kerugian pada periode krisis;
b. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;
c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB) adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)* yang wajib dibentuk oleh Bank adalah:

a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti KBMI 2 atau KBMI 3 yang pemenuhannya secara bertahap:
   - 0,625% dari ATMR mulai 1 Januari 2016;
   - 1,25% dari ATMR mulai 1 Januari 2017;
   - 1,875% dari ATMR mulai 1 Januari 2018;
   - 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019.
b. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi seluruh Bank.
c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR Bank yang berdampak sistemik.

Pemenuhan modal sebagai penyangga *(buffer)* harus dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama *(Common Equity Tier 1)*.

Berdasarkan PBI No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCB) ditetapkan bahwa besaran CCB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pertama kali, yaitu mulai 1 Januari 2016 adalah sebesar 0% dan berlaku untuk seluruh bank, baik bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

42. Capital Management (continued)

Based on POJK No.34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 concerning Capital Adequacy Ratio, the Bank is required to establish additional capital as a buffer, as follows:

a. Capital Conservation Buffer is an additional capital which serves as a buffer in the event of a loss in the period of crisis;
b. Countercyclical Buffer is an additional capital which serves to anticipated losses in the event of excessive credit growth and thus potentially disrupt the stability of the financial system;
c. Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) is an additional capital which serves to reduce the negative impact on the stability of the financial system and economy in the event of Bank failure which has systemic effect through an increase in the Bank's ability to absorb losses.

Additional capital as a buffer which shall be established by the Bank are:

a. Capital Conservation Buffer amounting to 2.5% of RWA to the Bank classified to KBMI 2 or KBMI 3 whose fulfillment gradually:
   - 0.625% from RWA since January 1, 2016;
   - 1.25% from RWA since January 1, 2017;
   - 1.875% from RWA since January 1, 2018;
   - 2.5% from RWA since January 1, 2019.
b. Countercyclical Buffer in the amount of 0% (zero percent) up to 2.5% (two point five percent) from RWA for the whole Bank.
c. Capital Surcharge for D-SIB in the amount of 1% (one percent) to 2.5% (two point five percent) from RWA of Banks with systemic impact.

Fulfillment of capital as a buffer should be met by using components of common equity Tier 1.

Based on PBI No. 17/22/PBI/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment of Countercyclical Buffer Obligation stipulated that the amount of CCB set by Bank Indonesia for the first time, starting January 1, 2016 amounted to 0% and applying to all banks, both conventional commercial bank and islamic banks, including branches of banks domiciled abroad.

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

42. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Evaluasi terhadap besaran CCB akan dilakukan secara berkala, yaitu paling kurang 1 kali dalam 6 bulan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan bahwa besaran CCB tidak berubah maka Bank Indonesia akan mengeluarkan pengumuman di website Bank Indonesia dan apabila ditetapkan ada perubahan, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran mengenai perubahan tersebut.

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia akan menetapkan SIB dan Capital Surcharge untuk SIB. Bank yang ditetapkan sebagai SIB wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk SIB.

Penetapan SIB dan *Capital Surcharge* untuk SIB dilakukan secara semesteran setiap tahun pada:
a. Bulan Maret dengan menggunakan data pada bulan Desember tahun sebelumnya; dan
b. Bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan *Capital Surcharge* untuk SIB dalam 5 kelompok *bucket*:
a. 1% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 1;
b. 1,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 2;
c. 2% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 3;
d. 2,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 4;
e. 3,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 5.

Untuk pertama kali, OJK akan menetapkan SIB dalam 4 kelompok dimana pemenuhannya dilakukan secara bertahap:

1. SIB bagi kelompok *(bucket)* 1 sebesar:
   a. 0,25% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

2. SIB bagi kelompok *(bucket)* 2 sebesar:
   a. 0,375% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,125% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

42. Capital Management (continued)

The evaluation of the amount of CCB would be done regularly, i.e. at least 1 time within 6 months. In the case that based on the evaluation determined where the magnitude of the CCB does not change, then Bank Indonesia will issue an announcement on the website of Bank Indonesia and, if specified changes, then Bank Indonesia will issue a Circular Letter regarding such change.

According to POJK No. 46/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning the Stipulation of Systemically Important Banks and Capital Surcharge, the Financial Services Authority in coordination with Bank Indonesia will set SIB and Capital Surcharge for SIB. Banks are defined as SIB is required to establish Capital Surcharge for SIB.

Determination of SIB and Capital Surcharge for SIB conducted biannually on:
a. March using data in December of the previous year; and
b. September using data in June of the previous year.

Financial Services Authority (FSA) establish Capital Surcharge for SIB in 5 Banks of bucket:
a. 1% from RWA for SIB, which classified as bucket 1;
b. 1.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 2;
c. 2% from RWA for SIB, which classified as bucket 3;
d. 2.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 4;
e. 3.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 5.

For the first time, the FSA will set the SIB into 4 buckets where fulfillment is done gradually:

1. SIB for bucket 1 amounted to:
   a. 0.25% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.5% from RWA since January 1, 2017;
   c. 0.75% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1% from RWA since January 1, 2019.

2. SIB for bucket 2 amounted to:
   a. 0.375% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.75% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.125% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1.5% from RWA since January 1, 2019.

42. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

3. SIB bagi kelompok *(bucket)* 3 sebesar:
   a. 0,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 2% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

4. SIB bagi kelompok *(bucket)* 4 sebesar:
   a. 0,625% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 1,25% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,875% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 2,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

42. Capital Management (continued)

3. SIB for bucket 3 amounted to:
   a. 0.5% from RWA since January 1, 2016;
   b. 1% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.5% from RWA since January 1, 2018;
   d. 2% from RWA since January 1, 2019.

4. SIB for bucket 4 amounted to:
   a. 0.625% from RWA since January 1, 2016;
   b. 1.25% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.875% from RWA since January 1, 2018;
   d. 2.5% from RWA since January 1, 2019.

43. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

Rasio Posisi Devisa Neto secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam akun administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

43. Net Open Position

The Net Open Position calculations for the Bank only are based on Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on such regulation, the Bank is only required to maintain the overall net open position at a maximum of 20% from total capital.

The overall Net Open Position ratio is the sum of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency, which are stated in Rupiah.

Net Open Positions for the Bank as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Nilai Neto/ *Net Value***	
Mata uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				**Currency Overall (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet)**
Dolar Amerika Serikat	15.069.997	15.159.688	89.691	United States Dollar
Yen Jepang	3.851	33.225	29.374	Japanese Yen
Euro Eropa	13.960	15.610	1.650	European Euro
Dolar Australia	9.475	3.179	6.296	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	7.177	349	6.828	Great Britain Poundsterling
Dolar Singapura	49.788	2.781	47.007	Singapore Dollar
Lain-lain*)	28.966	12.661	16.305	Others*)
	15.183.214	15.227.493	197.151	
Total Modal			12.295.211	**Total Capital**
Rasio Posisi Devisa Neto (Keseluruhan)			**1,60**	**Net Open Position Ratio (Overall)**

43. Posisi Devisa Neto (lanjutan) / 43. Net Open Position (continued)

	2022			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Nilai Neto/ *Net Value*	
Mata uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				**Currency Overall (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet)**
Dolar Amerika Serikat	15.833.310	15.772.931	60.379	United States Dollar
Yen Jepang	10.730	36.562	25.832	Japanese Yen
Euro Eropa	7.620	12.509	4.889	European Euro
Dolar Australia	7.419	8.861	1.442	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	13.265	362	12.903	Great Britain Poundsterling
Dolar Singapura	67.099	21.488	45.611	Singapore Dollar
Lain-lain*)	25.040	10.977	14.063	Others*)
	15.964.483	15.863.690	165.119	
Total Modal			**11.538.974**	**Total Capital**
Rasio Posisi Devisa Neto (Keseluruhan)			**1,43**	**Net Open Position Ratio (Overall)**

44. Perjanjian-Perjanjian Signifikan / 44. Significant Agreements

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut di bawah ini:

a. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp35.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

   Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

b. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) pada tanggal 7 Juni 2018 mengenai Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

   Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT BTPN sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

c. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk pada tanggal 21 Juli 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

The Bank entered into several significant agreements as follows:

a. Joint Agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dated June 29, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and pension loans Joint Financing. The maximum limit of financing is Rp35,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

   The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Pembangunan Daerah at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

b. Joint Agreement with PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dated June 7, 2018 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Transfer of Pension Loans Receivables. The maximum limit of financing is Rp2,000,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

   The portion of joint financing that has been agreed upon is PT BTPN at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

c. Joint Agreement with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dated July 21, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and pension loans Joint Financing. The maximum limit of financing is Rp500,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

44. Perjanjian-Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

d. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi pada tanggal 26 September 2019 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi sebesar 95% dan Bank sebesar 5% dari total pembiayaan bersama.

e. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada tanggal 8 Juli 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

f. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank KB Bukopin Syariah pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai perjanjian tentang Investasi Mudharabah Subordinasi. PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan investasi sebesar Rp275.000.000.000 (nilai penuh) kepada PT Bank KB Bukopin Syariah.

Kedua pihak sepakat dan mengikatkan diri atas penyediaan dana dengan Mudharabah (bagi hasil) dengan nisbah bagi hasil dengan porsi masing-masing pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk sebesar 70% dan PT Bank KB Bukopin Syariah sebesar 30%.

g. Transaksi penjualan kredit portofolio LAR (Loan at Risk) ke SPC IDMB United Pte Ltd di Singapura. Kredit nominal Rp4.135.377.534.505 (nilai penuh) dan Bank ditunjuk sebagai *collecting agent* dengan imbalan mendapat *Collection Fee* sebesar 1% dari nominal penagihan dan Management Fee sebesar 0,25% dari *outstanding principal*.

44. Significant Agreements (continued)

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

d. Joint Agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi dated September 26, 2019 regarding the Sale and Purchase of Receivables and pension loans Joint Financing. The maximum limit of financing is Rp5,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi at 95% and Bank at 5% of the total joint financing.

e. Joint Agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dated July 8, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Joint Financing with pension loans. The maximum limit of financing is Rp500,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

f. Cooperation Agreement with PT Bank KB Bukopin Syariah on December 29, 2020 regarding the agreement regarding Subordinated Mudharabah Investment. PT Bank KB Bukopin Tbk provides an investment of Rp275,000,000,000 (full amount) to PT Bank KB Bukopin Syariah.

Both parties agreed and committed themselves to providing funds with Mudharabah (profit sharing) with a profit sharing ratio with each party's portion, namely PT Bank KB Bukopin Tbk at 70% and PT Bank KB Bukopin Syariah at 30%.

g. LAR (Loan at Risk) portofolio credit sales transaction to SPC IDMB United Pte Ltd in Singapore. Credit nominal Rp4,135,377,534,505 (full amount) and Bank appointed as collecting agent in exchange for a Collection Fee of 1% of nominal collection and Management Fee of 0.25% of outstanding principal.

44. Perjanjian-Perjanjian Signifikan (lanjutan)

h. Transaksi penjualan kredit portofolio LAR (Loan at Risk) ke SMMK Pte Ltd di Singapura. Kredit nominal Rp3.813.072.530.214 (nilai penuh) dan KB Bukopin ditunjuk sebagai collecting agent dengan imbalan mendapat Collection Fee sebesar 1% dari nominal penagihan dan *Management Fee* sebesar 0,25% dari *outstanding principal*.

i. Pada tanggal 28 September 2022 Bank membeli surat berharga syariah yaitu Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp2.432.000 dengan jangka waktu 15 tahun (28 September 2022 - 28 September 2037) dan imbal hasil senilai 0,75% per tahun.

44. Significant Agreements (continued)

h. LAR (Loan at Risk) portofolio credit sales transaction to SMMK Pte Ltd in Singapore. Credit nominal Rp3,813,072,530,214 (full amount) and KB Bukopin appointed as collecting agent in exchange for a Collection Fee of 1% of nominal collection and Management Fee of 0.25% of outstanding principal.

i. On September 28, 2022 Bank acquired sharia marketable securities Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar issued by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) amounting to Rp2,432,000 with maturity date to 15 years (September 28, 2022 - September 28, 2037) and yield of 0.75% per annum.

45. Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100 diubah menjadi maksimum Rp2.000.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009, Perusahaan Pemerintah pengganti undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

45. Government Guarantee for The Payment of Obligations of Commercial Banks

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by Lembaga Penjaminan Simpanan. Based on such Regulation, the guaranteed deposit amount in a Bank which previously according to Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100 was amended to a maximum amount of Rp2,000.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2009, Government Regulation in lien of law on Lembaga Penjaminan Simpanan has been set into law since January 13, 2009.

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

46. Fair Value of Financial Instruments

The table presents the comparison, of the carrying amounts and fair value of the Group financial instruments that are recognized in the consolidated financial statements:

	2023					
	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ *Fair Value through Profit or Loss*	Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Fair Value through Other Comprehensive Income*	Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized Cost*	Total Nilai Tercatat/ *Total Carrying Amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset						**Assets**
Kas	-	-	289.184	289.184	289.184	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	3.205.619	3.205.619	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	-	-	342.581	342.581	342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	2.133.567	2.133.567	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks - net

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan) / 46. Fair Value of Financial Instruments (continued)

2023

	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ *Fair Value through Profit or Loss*	Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Fair Value through Other Comprehensive Income*	Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized Cost*	Total Nilai Tercatat/ *Total Carrying Amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Surat-surat berharga - neto	5.322.930	3.067.387	9.145.823	17.536.140	17.536.140	Marketable securities - net
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	-	2.572.152	2.572.152	2.572.152	Marketable securities sold with agreement to ressel receivable - net
Tagihan derivatif	-	-	3.040	3.040	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	-	-	45.835.782	45.835.782	45.835.782	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	-	-	130.964	130.964	130.964	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham - neto	-	-	15	15	15	Investments in shares - net
Aset lain-lain	-	-	1.272.119	1.272.119	1.272.119	Other asset
Total	**5.322.930**	**3.067.387**	**64.930.846**	**73.321.163**	**73.321.163**	**Total**
Liabilitas						**Liabilities**
Liabilitas segera	-	-	431.402	431.402	431.402	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	-	-	44.789.143	44.789.143	44.789.143	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	7.886.721	7.886.721	7.886.721	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	808	808	808	Derivatives payable
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	-	219.631	219.631	219.631	Marketable securities sold with agreement to ressel receivable - net
Liabilitas akseptasi	-	-	132.577	132.577	132.577	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	-	-	11.704.492	11.704.492	11.704.492	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.397.588	3.397.588	3.397.588	Marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	-	-	1.570.140	1.570.140	1.570.140	Other Liabilities
Total	**-**	**-**	**70.132.502**	**70.132.502**	**70.132.502**	**Total**

2022

	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ *Fair Value through Profit or Loss*	Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Fair Value through Other Comprehensive Income*	Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized Cost*	Total Nilai Tercatat/ *Total Carrying Amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset						**Assets**
Kas	-	-	524.320	524.320	524.320	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	4.140.431	4.140.431	4.140.431	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	-	-	743.970	743.970	743.970	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	12.180.830	12.180.830	12.180.830	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Surat-surat berharga - neto	3.362.099	588.835	8.058.944	12.009.878	12.009.878	Marketable securities - net
Tagihan derivatif	9.254	-	-	9.254	9.254	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	-	-	48.956.758	48.956.758	48.956.758	Loans and sharia financing/ receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	-	-	17.135	17.135	17.135	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham - neto	-	-	15	15	15	Investments in shares - net
Aset lain-lain	-	-	807.707	807.707	807.707	Other asset
	3.371.353	**588.835**	**75.430.110**	**79.390.298**	**79.390.298**	

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

46. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	2022					
	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ *Fair Value through Profit or Loss*	Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Fair Value through Other Comprehensive Income*	Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized Cost*	Total Nilai Tercatat/ *Total Carrying Amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Liabilitas						**Liabilities**
Liabilitas segera	-	-	388.522	388.522	388.522	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	-	-	51.962.370	51.962.370	51.962.370	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	10.381.375	10.381.375	10.381.375	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	12.259	-	-	12.259	12.259	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	-	-	17.346	17.346	17.346	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	-	-	11.200.131	11.200.131	11.200.131	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.392.718	3.392.718	3.392.718	Marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	-	-	1.367.530	1.367.530	1.367.530	Other Liabilities
Total	**12.259**	**-**	**78.709.992**	**78.722.251**	**78.722.251**	**Total**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain surat berharga yang diukur melalui harga perolehan yang diamortisasi dan biaya perolehan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Nilai wajar dari surat berharga yang diukur melalui harga perolehan yang diamortisasi dan biaya perolehan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai wajar instrumen keuangan berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

a. Tingkat 1: Dikutip dari harga di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
b. Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);
c. Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat di observasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair values of certain financial assets and liabilities other than securities measured at amortised cost and acquisition cost marketable securities, borrowings, and securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments, due to the interest rate is at market rate and carried at fair value.

The fair value of marketable securities amortized cost and acquisition cost marketable securities is determined on the basis of quoted market price as at December 31, 2023 and December 31, 2022.

The fair value of borrowings and securities issued is calculated using discounted cash flows using market rate.

The table below shows the fair value of financial instruments based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

a. Level 1: Quoted prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
b. Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);
c. Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

46. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	2023				
	Pengukuran Nilai Wajar pada Tanggal Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement as at Reporting Date Using:*				
	Nilai Tercatat/ ***Carrying Amount***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset measured at fair value**
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					Fair value through profit or loss:
Tagihan derivatif	3.040	3.040	-	-	Derivative receivables
Surat-surat berharga	5.322.930	13	5.322.917	-	Marketable securities
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Fair value through other comprehensive income:
Surat-surat berharga	3.067.387	3.067.387	-	-	Marketable securities
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial asset of which the Fair value is disclosed**
Biaya perolehan di amortisasi:					Amortized cost:
Surat-surat berharga	9.145.823	7.811.762	-	1.334.061	Marketable securities
Kredit yang diberikan dan piutang:					**Loans and receivables:**
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	45.835.782	-	45.835.782	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**which the fair value is disclosed**
Biaya perolehan diamortisasi:					Amortized cost:
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	3.397.588	-	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	11.704.492	-	11.704.492	-	Borrowings

	2022				
	Pengukuran Nilai Wajar pada Tanggal Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement as at Reporting Date Using:*				
	Nilai Tercatat/ ***Carrying Amount***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset measured at fair value**
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					Fair value through profit or loss:
Tagihan derivatif	9.254	9.254	-	-	Derivative receivables
Surat-surat berharga	3.362.099	716.047	2.646.052	-	Marketable securities
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Fair value through other comprehensive income:
Surat-surat berharga	588.835	588.835	-	-	Marketable securities
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial asset of which the Fair value is disclosed**
Biaya perolehan di amortisasi:					Amortized cost:
Surat-surat berharga	8.058.944	6.804.733	-	1.254.211	Marketable securities
Kredit yang diberikan dan piutang:					Loans and receivables:
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	48.956.758	-	48.956.758	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial liabilities of which the fair value is disclosed**
Biaya perolehan diamortisasi:					Amortized cost:
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	-	3.392.718	-	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	11.200.131	-	11.200.131	-	Borrowings

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditransfer dari/ke tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

As at December 31, 2023 and 2022 there is no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 2 and/or level 3.

47. Analisa Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan *(forward-looking)*.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Grup menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:
- pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *Probability of Default* (PD);
- indikator kualitatif.

Credit Risk Grades

Grup mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk* grades berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan *rating* risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

47. Credit Quality Analysis

Measurement of Expected Credit Losses

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Group considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- Probability of Default (PD) for the remaining age at the reporting date; with
- Probability of Default (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).

The Group use these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit:
- quantitative test based on movement in PD;
- qualitative indicators.

Credit Risk Grades

The Group allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

***Credit Risk Grades* (lanjutan)**

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Grup mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Grup dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

Grup menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Credit Risk Grades (continued)

Determination of the Probability of Default Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or, relevant property prices.

Determination of Significant Increase in Credit Risk

The Group uses several criteria for determining that credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using quantitative and qualitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Group can also use the judgement of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in comprehensive manner on a timely manner.

The Group determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

***Credit Risk Grades* (lanjutan)**

Grup memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat ini. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Credit Risk Grades (continued)

The Group monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in termination of recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:

- PD remainder life at reporting date based on modified provision; with
- Residual PD throughout the estimated age based on data at initial recognition and initial contractual provisions.

The Bank considers financial assets as default when:

- The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or
- The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Bank.

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);
- Quantitative such as arrears status; and
- Based on data developed internally and obtained from external sources.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)*

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar *(base case)* tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran *(output)* yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar *(base case)* mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

47. Credit Quality Analysis (continued)

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimates published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

	2023	2024	
Tingkat pengangguran	dasar 8%/*base 8%* Kisaran antara 7 hingga 10%/ *Range between 7 and 10%*	dasar 8%/*base 8%* Kisaran antara 7 hingga 10%/ *Range between 7 and 10%*	*Unemployment rate*
Suku bunga	dasar 1%/*base 1%* Kisaran antara 0,5 hingga *2%/Range between 0.5 and 2%*	dasar 1%/*base 1%* Kisaran antara 0,5 hingga *2%/Range between 0.5 and 2%*	*Interest rates*
Pertumbuhan PDB	dasar 1,5%/*base 1.5%* Kisaran antara 0 hingga 2,5%/ *Range between 0 and 2.5%*	dasar 1,5%/*base 1.5%* Kisaran antara 0 hingga 2,5%/ *Range between 0 and 2.5%*	*GDP growth*

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :
- *Probability of Default (PD)*
- *Loss of Given Default (LGD)*
- *Exposure at Default (EAD)*

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:
- Probability of Default (PD)
- Loss of Given Default (LGD)
- Exposure at Default (EAD)

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur.

a. Analisis risiko kredit berdasarkan internal *rating grades*:

47. Credit Quality Analysis (continued)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

PD estimation is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- type of instrument;
- credit risk rating;
- type of collateral;
- date of initial recognition;
- remaining due date;
- industry; and
- debtor's geographical location.

a. Credit risk analysis based on internal rating grades:

	2023					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
Grade 1	39.904.538	614.341	160.916	-	40.679.795	Grade 1
Grade 2	1.056.648	3.326.041	2.009	-	4.384.698	Grade 2
Grade 3	-	-	410.030	-	410.030	Grade 3
Grade 4	-	-	348.669	-	348.669	Grade 4
Grade 5	-	-	3.595.424	-	3.595.424	Grade 5
Total	40.961.186	3.940.382	4.517.048	-	49.418.616	Total

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

	2023					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Cadangan kerugian kredit	(908.096)	(498.218)	(2.176.520)	-	(3.582.834)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**40.053.090**	**3.442.164**	**2.340.528**	**-**	**45.835.782**	**Carrying Amount**

	2022					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
Grade 1	45.330.369	531.223	46.770	-	45.908.362	Grade 1
Grade 2	172.744	1.103.118	227	-	1.276.089	Grade 2
Grade 3	-	-	415.888	-	415.888	Grade 3
Grade 4	-	-	372.500	-	372.500	Grade 4
Grade 5	-	-	2.610.595	-	2.610.595	Grade 5
Total	45.503.113	1.634.341	3.445.980	-	50.583.434	Total
Cadangan kerugian kredit	(535.853)	(104.609)	(986.214)	-	(1.626.676)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**44.967.260**	**1.529.732**	**2.459.766**	**-**	**48.956.758**	**Carrying Amount**

Cadangan kerugian kredit untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak diakui pada laporan posisi keuangan karena nilai tercatat aset keuangan tersebut adalah nilai wajar.

Allowance for credit losses for financial assets classified as fair value through other comprehensive income is not recognized in the statement of financial position because the carrying value of the financial assets is the fair value.

b. Analisis risiko kredit berdasarkan *probability of default:*

b. Credit risk analysis based on probability of default:

	2023					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
0,00-0,10	40.961.186	-	72.497	-	41.030.683	0.00-0.10
0,11-0,40	-	3.940.382	11.447	-	3.951.829	0.11-0.40
0,41-1,00	-	-	4.433.104	-	4.433.104	0.41-1.00
Total	40.961.186	3.940.382	4.517.048	-	49.418.616	Total

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

	2023					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Cadangan kerugian kredit	(908.096)	(498.218)	(2.176.520)	-	(3.582.834)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**40.053.090**	**3.442.164**	**2.340.528**	**-**	**45.835.782**	**Carrying Amount**

	2022					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/						Loans at amortized cost
0,00-0,10	45.503.113	973.589	2.501.999	-	48.978.701	0.00-0.10
0,11-0,40	-	531.916	182.934	-	714.850	0.11-0.40
0,41-1,00	-	128.836	761.047	-	889.883	0.41-1.00
Total	45.503.113	1.634.341	3.445.980	-	50.583.434	Total
Cadangan kerugian kredit	(535.853)	(104.609)	(986.214)	-	(1.626.676)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**44.967.260**	**1.529.732**	**2.459.766**	**-**	**48.956.758**	**Carrying Amount**

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions

Rasio Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Aset Keuangan Pada 31 Desember 2023/ *ECL Ratio to Financial Assets at December 31, 2023*	Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Financial asset Measured at Amortized Cost*	Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income*	Total/ *Total*	
Kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan	3.582.834	-	3.582.834	Reported ECL
Nilai tercatat bruto	49.418.616	-	49.418.616	Gross carrying amount
Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto	7,25%	-	7,25%	ECL ratio to gross carrying amount

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions (continued)

	2023	2024	2025	2026	2027	
Skenario Moderat						Moderate Scenario
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	91,58%	105,12%	117,06%	127,84%	137,76%	Current Account (% GDP Yearly)
Tingkat Inflasi	-4,54%	-5,15%	-5,70%	-6,19%	-6,64%	Inflation Rate
Anggaran Pemerintah (% PDB)	37,41%	38,59%	39,16%	39,41%	39,46%	Fiscal Balance (% GDP)
BI Rate	23,94%	24,15%	24,13%	24,03%	-23,92%	BI Rate
Index Keyakinan Konsumer	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	Consumer Confidence Index
Pembentukan Modal Tetap Bruto	70,95%	71,09%	71,11%	71,12%	71,12%	Gross Fixed Capital Formation
Belanja Pemerintah	10,54%	10,45%	10,28%	10,08%	9,88%	Government Expenditure
Index Harga Konsumen	7,32	-4,44	14,79	24,16	-83,31	Consumer Price Index
Produksi Industri	5,89%	6,21%	6,44%	6,61%	6,73%	Industrial Production
Harga Minyak	83,92	90,10	95,26	99,68	103,53	Oil Price
Hutang Rumah Tangga	9,73%	9,65%	9,59%	9,52%	9,47%	Household Debt
Skenario Optimis						Upside Scenario
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	152,63%	175,21%	195,09%	213,07%	229,61%	Current Account (% GDP Yearly)
Tingkat Inflasi	-7,56%	-8,59%	-9,49%	-10,31%	-11,07%	Inflation Rate
Anggaran Pemerintah (% PDB)	62,35%	64,31%	65,27%	65,68%	65,77%	Fiscal Balance (% GDP)
BI Rate	39,90%	40,25%	40,22%	40,05%	-39,86%	BI Rate
Index Keyakinan Konsumer	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	Consumer Confidence Index
Pembentukan Modal Tetap Bruto	118,25%	118,48%	118,52%	118,53%	118,53%	Gross Fixed Capital Formation
Belanja Pemerintah	17,57%	17,41%	17,13%	16,80%	16,47%	Government Expenditure
Index Harga Konsumen	12,20	-7,39	-24,66	-40,26	138,85	Consumer Price Index
Produksi Industri	9,82%	10,35%	10,73%	11,01%	11,22%	Industrial Production
Harga Minyak	139,87	150,17	158,76	166,13	172,56	Oil Price
Hutang Rumah Tangga	16,22%	16,09%	15,98%	15,87%	15,78%	Household Debt
Skenario Pesimis						Downside Scenario
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	61,05%	70,08%	78,04%	85,23%	91,84%	Current Account (% GDP Yearly)
Tingkat Inflasi	-3,02%	-3,44%	-3,80%	-4,13%	-4,43%	Inflation Rate
Anggaran Pemerintah (% PDB)	24,94%	25,72%	26,11%	26,27%	26,31%	Fiscal Balance (% GDP)
BI Rate	15,96%	16,10%	16,09%	16,02%	-15,94%	BI Rate
Index Keyakinan Konsumer	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	Consumer Confidence Index
Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,30%	47,39%	47,41%	47,41%	47,41%	Gross Fixed Capital Formation
Belanja Pemerintah	7,03%	6,96%	6,85%	6,72%	6,59%	Government Expenditure
Index Harga Konsumen	4,88	-2,96	-9,86	-16,10	55,54	Consumer Price Index
Produksi Industri	3,93%	4,14%	4,29%	4,40%	4,49%	Industrial Production
Harga Minyak	55,95	60,07	63,50	66,45	69,02	Oil Price
Hutang Rumah Tangga	6,49%	6,44%	6,39%	6,35%	6,31%	Household Debt

48. Rugi Per Saham

Berikut adalah perhitungan rugi bersih per saham dasar dan dilusian:

48. Loss Per Share

The following presents the computations of basic and diluted loss per share:

	2023			
	Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Loss for the Period Attributable to Equity Holders The Parent Entity*	**Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Dasar/ *Weighted Average Number of Ordinary Shares Outstanding***	**Rugi per Saham (Nilai Penuh)/ *Loss per Share (Full Amount)***	
Rugi per saham dasar/ dilusian	(6.034.077)	98.277.584.070	(61)	Basic/ diluted loss per share

48. Rugi Per Saham (lanjutan) / 48. Loss Per Share (continued)

	2022			
	Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Loss for the Period Attributable to Equity Holders The Parent Entity*	Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Dasar/ *Weighted Average Number of Ordinary Shares Outstanding*	Rugi per Saham (Nilai Penuh)/ *Loss per Share (Full Amount)*	
Rugi per saham dasar/ dilusian	(5.027.460)	67.887.540.178	(74)	Basic/ diluted loss per share

49. Transaksi Non-Kas / 49. Non-Cash Transaction

2023	2022	
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	4.938	(54.704) Unrealized gain from fair value through other comprehensive income marketable securities - net
Revaluasi aset tetap	-	77.837 Revaluation of fixed assets
Reklasifikasi aset tetap ke aset terbengkalai	24.151	- Reclassification of fixed assets to abandoned assets

50. Informasi Tambahan / 50. Additional Information

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 informasi tambahan untuk Bank adalah sebagai berikut (Bank saja):

As at December 31, 2023 and 2022 additional information regarding the Bank is as follows (Bank only):

2023	2022	
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	6,37%	4,09% Non-performing assets to total earning assets ratio
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga	113,18%	98,48% Loans to third party fund ratio
Rasio total beban operasional terhadap total pendapatan operasional	223,28%	222,62% Total operating expenses to total operating income ratio
Rasio kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit yang diberikan	46,92%	53,51% Small micro business loans to total loans ratio

Sesuai dengan peraturan POJK No. 38/ POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, batas maksimum penyediaan dana kepada pihak terkait, satu peminjam yang bukan pihak terkait dan satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait masing-masing tidak melebihi 10%, 20%, dan 25% dari modal Bank.

Based on OJK regulation No. 38/POJK.03/2019 related to the Changes of POJK No. 32/ POJK.03/2018 related to Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, the maximum lending limit to related parties, one non-related party debtor, and one non-related party group of debtors shall not exceed 10%, 20%, and 25% of the Bank's capital, respectively.

50. Informasi Tambahan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat pelampauan BMPK. Pada 31 Desember 2021 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak penurunan Modal Inti yang dialami oleh Bank. Pelampauan BMPK ini telah diselesaikan pada Januari 2022.

50. Additional Information (continued)

As at December 31, 2023 there is no excess of the LLL. As at December 31, 2021, there was an excess of the LLL related to loan guarantees in the context of implementing Credit Risk Management techniques. The excess of the LLL is an impact of the declining in Core Capital experience by the Bank. This excess of the LLL has been resolved in January, 2022.

51. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

51. Assets and Liabililities in Foreign Currencies

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows :

	2023		2022		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
ASET					**ASSETS**
Kas:					Cash:
Dolar Amerika Serikat	560	8.627	482	7.337	United States Dollar
Euro Eropa	112	1.901	116	1.734	European Euro
Dolar Singapura	46	540	119	1.263	Singapore Dollar
Dolar Australia	19	201	23	228	Australian Dollar
Lain-lain (ekuivalen USD)	102	1.575	11	170	Others (USD equivalent)
Sub-total		12.844		10.732	Sub-total
Giro pada Bank Indonesia:					Current accounts with Bank Indonesia:
Dolar Amerika Serikat	7.563	116.440	13.689	208.441	United States Dollar
Giro pada bank lain:					Current accounts with other banks:
Dolar Amerika Serikat	9.952	153.231	36.902	561.918	United States Dollar
Dolar Singapura	3.837	44.801	5.258	55.969	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	4.959	9.774	1.437	2.788	Hong Kong Dollar
Euro Eropa	481	8.193	143	2.141	European Euro
Dolar Australia	731	7.689	282	2.790	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	358	7.018	770	13.100	Great Britain Poundsterling
Yuan Cina	2.624	5.694	3.026	6.495	Chinese Yuan
Won Korea	186	2.211	38.422	409	Korean Won
Yen Jepang	16.550	1.804	97.147	10.250	Japanese Yen
Sub-total		240.415		655.860	Sub-total
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:					Placements with Bank Indonesia and other banks:
Dolar Amerika Serikat	22.000	338.734	206.510	3.144.635	United States Dollar
Surat-surat berharga:					Marketable securities:
Dolar Amerika Serikat	388.446	5.980.901	307.689	4.685.333	United States Dollar
Yuan China	1.292	2.803	2.475	5.312	Chinese Yuan
Sub-total		5.983.704		4.690.645	Sub-total
Tagihan akseptasi:					Acceptance receivables:
Dolar Amerika Serikat	6.644	102.298	468	7.134	United States Dollar
Yuan Cina	4.090	8.875	4.758	10.212	Chinese Yuan
Sub-total		111.173		17.346	Sub-total
Tagihan derivatif:					Derivative receivables:
Dolar Amerika Serikat	197	3.040	608	9.254	United States Dollar

51. Aset Dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

51. Assets And Liabililities In Foreign Currencies (continued)

	2023		2022		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:					Loans and sharia financing/receivables:
Dolar Amerika Serikat	326.533	5.027.636	215.246	3.277.656	United States Dollar
Euro Eropa	128	2.185	142	2.127	European Euro
Sub-total		5.029.821		3.279.783	Sub-total
Aset lain-lain:					Other assets:
Dolar Amerika Serikat	1.282	19.793	1.962	29.872	United States Dollar
Total aset		**11.855.964**		**12.046.568**	**Total assets**
LIABILITAS					**LIABILITIES**
Liabilitas segera:					Liabilities immediately payable:
Dolar Amerika Serikat	96	1.471	1.357	20.659	United States Dollar
China Yuan	183	398	101	216	Chinese Yuan
Dolar Hongkong	197	388	-	-	Hong Kong Dollar
Euro Eropa	20	341	-	-	European Euro
Yen Jepang	2.560	279	-	-	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	8	149	8	143	Great Britain Poundsterling
Dolar Singapura	0	3	565	6.014	Singapore Dollar
Dolar Australia	-	-	1	9	Australian Dollar
Sub-total		3.029		27.041	Sub-total
Liabilitas akseptasi:					Acceptance liabilities:
Dolar Amerika Serikat	6.644	102.298	468	7.134	United States Dollar
Yuan Cina	4.090	8.875	4.758	10.212-	Chinese Yuann
Sub-total		111.173		-	Sub-total
Giro:					Demand deposits:
Dolar Amerika Serikat	27.138	417.845	23.507	357.951	United States Dollar
Yen Jepang	295.789	32.241	332.928	35.127	Japanese Yen
Dolar Singapura	62	722	328	3.491	Singapore Dollar
Dolar Australia	41	432	44	439	Australian Dollar
Euro Eropa	15	262	26	383	European Euro
Poundsterling Inggris	2	35	3	48	Great Britain Poundsterling
Sub-total		451.537		397.439	Sub-total
Tabungan:					Saving deposits:
Dolar Amerika Serikat	3.369	51.876	7.398	112.659	United States Dollar
Euro Eropa	64	1.087	72	1.083	European Euro
Dolar Singapura	18	210	64	684	Singapore Dollar
Dolar Australia	27	319	34	335	Australian Dollar
Yen Jepang	1.963	214	2.840	300	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	1	7	1	8	Great Britain Poundsterling
Sub-total		53.713		115.069	Sub-total
Deposito berjangka:					Time deposits:
Dolar Amerika Serikat	226.658	3.489.847	206.890	3.150.417	United States Dollar
Dolar Australia	80	842	371	3.674	Australian Dollar
Euro Eropa	139	2.376	154	2.312	European Euro
Dolar Singapura	54	635	78	826	Singapore Dollar
Yen Jepang	-	-	464	49	Japanese Yen
Sub-total		3.493.700		3.157.278	Sub-total

51. Aset Dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

51. Assets And Liabililities In Foreign Currencies (continued)

	2023		2022		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Simpanan dari bank lain:					Deposit from other banks:
Dolar Amerika Serikat	500.000	7.698.500	664.513	10.118.875	United States Dollar
Pinjaman yang diterima:					Borrowings:
Dolar Amerika Serikat	81.249	1.251.005	3.834	58.378	United States Dollar
Liabilitas derivatif:					Derivative payables:
Dolar Amerika Serikat	53	808	805	12.259	United States Dollar
Liabilitas lain-lain:					Other liabilities:
Dolar Amerika Serikat	2.034	31.320	4.158	63.323	United States Dollar
Dolar Australia	-	-	0	3	Australian Dollar
Dolar Singapura	-	-	0	1	Singapore Dollar
Euro Eropa	0	1	0	1	European Euro
Yuan Cina	0	7		-	Chinese Yuan
		31.328		63.328	
Total liabilitas		**13.094.793**		**13.967.013**	**Total liabilities**

52. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan dan direvisi

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material;
- Amendemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal;
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah";

52. Issued and revised statements of financial accounting standards (SFAS) and Interpretation Of Financial Accounting Standards (IFAS)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)

Adopted during 2023

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2023 and relevant for the Company, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the current or prior year's financial statements:

- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies;
- Amendment to SFAS No. 16, Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use;
- Amendment to SFAS No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Erros: Definition of Accounting Estimates;
- Amendment to SFAS No. 46, Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction;
- Amendment to SFAS No. 107, "Ijarah Accounting";

52. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan dan direvisi (lanjutan)

- PSAK 1 (Amendemen): "Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- PSAK 1 (Amendemen): "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- PSAK 16 (Amendemen): "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- PSAK 25 (Amendemen): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi";
- PSAK 46 (Amendemen): "Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction";
- PSAK 73 (Amendemen): "Sewa: terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik";
- PSAK 107 (Amendemen): "Akuntansi Ijarah".

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

1 Januari 2024

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- Standar Akuntansi Keuangan Internasional

1 Januari 2025

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 74 (Amandemen): "Kontrak Asuransi: Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"
- Amandemen PSAK No. 10, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran"

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

52. Issued and revised statements of financial accounting standards (SFAS) and Interpretation Of Financial Accounting Standards (IFAS) (continued)

- SFAS 1 (Amendment): "Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current";
- SFAS 1 (Amendment): "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies";
- SFAS 16 (Amendment): "Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use";
- SFAS 25 (Amendment): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates";
- SFAS 46 (Amendment): "Income Tax: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction";
- SFAS 73 (Amendment): "Leases: regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions";
- SFAS 107: "Ijarah Accounting".

Issued but not yet effective

January 1, 2024

- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to SFAS No. 73, "Leases" regarding Lease Liabilities in Sale-and-lease Back Transaction
- International Financial Accounting Standard

January 1, 2025

- SFAS No. 74, "Insurance Contracts"
- SFAS No. 74 (Amendment): "Insurance Contracts: Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"
- Amendment to SFAS No. 10, "Impact on Changes in Foreign Currency: Lack of Exchangeability".

As at the date of authorization of these financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of the above amendments to SFAS and has not yet determined the related effects on the financial statements.

53. Informasi Tambahan Arus Kas

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

53. Additional Information on Cash Flow

Reconciliation of liabilities that arising from financing activities is as follows:

	31 Desember/ *December 31* 2022	Arus Kas/ *Cash flows*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Amortisasi Biaya Emisi/ *Amortization of Issuance Cost*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange* Rate	31 Desember/ *Desember 31,* 2023	
Obligasi subordinasi	2.395.776	-	3.075	-	2.398.851	Subordinated bonds
Pinjaman yang diterima	11.200.131	504.361	-	-	11.704.492	Borrowings
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	219.631	-	-	219.631	Marketable securities sold with agreements to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan	996.942	-	1.795	-	998.737	Marketable Securities issued
Total	**14.592.849**	**723.992**	**4.870**	**-**	**15.321.711**	**Total**

	31 Desember/ *December 31* 2021	Arus Kas/ *Cash flows*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Amortisasi Biaya Emisi/ *Amortization of Issuance Cost*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange* Rate	31 Desember/ *Desember 31,* 2022	
Obligasi subordinasi	2.792.450	-	(396.674)	-	2.395.776	Subordinated bonds
Pinjaman yang diterima	2.426.241	8.887.273	(113.383)	-	11.200.131	Borrowings
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.399.726	(2.399.726)	-	-	-	Marketable securities sold with agreements to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan	995.258	-	1.684	-	996.942	Marketable Securities issued
Total	**8.613.675**	**6.487.547**	**(508.373)**	**-**	**14.592.849**	**Total**

54. Informasi Keuangan Tersendiri Bank

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama, informasi keuangan tambahan PT Bank KB Bukopin Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk menganalisa hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Bank KB Bukopin Tbk (Entitas Induk) berikut ini (Lampiran I - Lampiran V) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan Entitas Anak.

54. Financial Information of The Bank

The Bank published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (Parent Entity) which account for investment in Subsidiaries using the cost method, and have been prepared in order that the parent entity's result of operations can be analyzed. The supplementary financial information of PT Bank KB Bukopin Tbk (Parent Entity) (Attachment I - Attachment V) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and Subsidiaries.

55. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Asset Bulk Sales

Asset Bulk Sales merupakan skema dari rangkaian transaksi yang terdiri dari:

Penjualan Kredit

Bank melakukan penjualan kredit kepada TLDC PTE LTD dengan total baki debet Rp2.868.932 yang dibeli dengan harga Rp1.621.790 pada 28 Maret 2024.

55. Events After Reporting Date

Asset Bulk Sales

Asset Bulk Sales is a scheme of a series of transactions consisting of:

Loan Sales

The Bank sold credit to TLDC PTE LTD with a total debit balance of IDR 2,868,932 purchased at a price of Rp1,621,790 on March 28, 2024.

55. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (lanjutan)

***Asset Bulk Sales* (lanjutan)**

Akuisisi *Private Bond*

Bank telah melakukan pembelian *private bond* dari TLDC PTE LTD dengan nominal sebesar USD106 juta pada 28 Maret 2024 dengan jangka waktu 5 tahun dan Bunga floating berdasarkan *US Treasury Bills* 5y + margin variabel 0,8% (tahun ke-1 & tahun ke-2)/0,9% (tahun ke-3)/1% (tahun ke 4 & tahun ke-5).

Pinjaman yang Diterima

Berdasarkan dokumen Perjanjian Pinjaman pada tanggal 1 April 2024, fasilitas pinjaman diterima oleh PT Bank KB Bukopin Tbk dari The Korea Development Bank, cabang Singapura dengan nominal USD300.000.000.

56. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Direksi untuk terbit pada tanggal 20 Mei 2024.

55. Events After Reporting Date (continued)

Asset Bulk Sales (continued)

Private Bond Acquisition

The Bank has purchased a private bond of TLDC PTE LTD with a nominal value of USD106 million on March 28, 2024 which will be due in 5 years and floating interest rate based on US Treasury Bills 5y + variable margin 0.8% (year 1-year 2)/0.9% (year 3)/1% (year 4-year 5).

Borrowings

Based on the Loan Agreement document dated April 1, 2024, the loan facility was received by PT Bank KB Bukopin Tbk from The Korea Development Bank, Singapore branch, with a nominal amount of USD300,000,000.

56. Responsibilities and Authorized Issuance of Consolidated Financial Statements

Management of the Bank is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are authorized by Directors for issuance on May 20, 2024.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Financial Position
As at December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
ASET			**ASSETS**
Kas	254.501	490.328	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.655.765	3.743.790	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	367.341	766.734	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	738.617	11.081.830	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga			Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	3.362.099	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.477.939	1.090.347	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	8.808.097	7.661.041	Measured at amortized cost
	17.608.966	12.113.487	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(109)	(76)	Less: Allowance for impairment losses
Surat-surat berharga - neto	17.608.857	12.113.411	Marketable securities - net
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	2.572.152	-	Marketable securities receivable purchased with agreements to resell - net
Tagihan derivatif	3.040	9.254	Derivative receivables
Kredit yang diberikan	44.183.228	45.984.992	Loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.353.299)	(1.419.124)	Less: Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan - neto	40.829.929	44.565.868	Loans - net
Tagihan akseptasi	132.577	17.346	Acceptances receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.613)	(211)	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan akseptasi - neto	130.964	17.135	Acceptances receivables - net
Penyertaan saham	2.313.180	1.032.615	Investments in shares
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai goodwill	(106.229)	(106.229)	Accumulated amortization and impairment losses of goodwill
Penyertaan saham - neto	2.206.951	926.386	Investments in shares - net
Aset tetap	4.322.260	4.360.811	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.300.473)	(1.185.651)	Less: Accumulated depreciation
Aset tetap - neto	3.021.787	3.175.160	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	2.558.816	1.858.834	Deferred tax assets - net
Aset tak berwujud	338.304	187.538	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(243.063)	(176.339)	Less: Accumulated amortization
Aset tak berwujud - neto	95.241	11.199	Intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	5.798.633	5.943.811	Other assets - net
TOTAL ASET	**78.842.594**	**84.703.740**	**TOTAL ASSETS**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Financial Position (continued)
As at December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS			**LIABILITIES**
Liabilitas segera	430.154	389.384	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	39.036.634	46.696.050	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.761.176	10.374.005	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	808	12.259	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	132.577	17.346	Acceptances payables
Pinjaman yang diterima	11.654.712	11.132.586	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	3.392.717	Subordinated bond
Utang pajak	59.039	52.208	Taxes payables
Liabilitas lain-lain	1.607.185	1.311.221	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**64.079.873**	**73.377.776**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS			**EQUITY**
Modal saham			Share capital
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)			Common A shares - Rp10,000 (full amount) par value
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)			Common B shares - Rp100 (full amount) par value
Modal dasar			Authorized capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham			Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 207.866.202.200 saham			Common B shares - 207,866,202,200 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh			Issued and fully paid capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham			Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 187.866.201.892 saham per 31 Desember 2023 dan 67.866.202.200 saham per 31 Desember 2022	19.000.000	7.000.000	Common B shares - 187,866,201,892 shares as at December 31, 2023 and 67,866,202,200 shares as at December 31, 2022
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.286.428	Additional paid-in capital
Uang muka setoran modal	-	3.000.000	Advance for future shares subscription
Surplus revaluasi aset	1.557.366	1.559.122	Asset revaluation surplus
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7.563	2.625	Unrealized gain (loss) on fair value through other comprehensive income marketable securities
Akumulasi rugi	(14.027.975)	(8.522.211)	Accumulated deficit
TOTAL EKUITAS	**14.762.721**	**11.325.964**	**TOTAL EQUITY**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**78.842.594**	**84.703.740**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income
For the Year Ended December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			**INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS**
Pendapatan bunga	4.347.708	3.674.535	Interest income
Beban bunga	(3.738.512)	(2.828.247)	Interest expense
Pendapatan bunga - neto	609.196	846.288	Interest income - net
Pendapatan operasional lainnya			Other operating income
Provisi dan komisi lainnya	310.805	266.695	Other fees and commissions
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	(8.899)	13.082	Gain on sale of marketable securities - net
Keuntungan selisih kurs - neto	29.265	31.815	Gain on foreign exchange - net
Lain-lain	98.562	116.955	Others
Total pendapatan operasional lainnya	429.733	428.547	Total other operating income
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(4.979.817)	(3.856.675)	Provision allowance for impairment losses on financial assets - net
Beban estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(1.999)	(2.272)	Provision for allowance for Commitments and Contingencies -net
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(268.218)	(84.127)	Provision for allowance for impairment losses non-financial assets - net
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155.384	(147.542)	Gain (loss) from in fair value of financial assets
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5.235	(1.919)	Gain (loss) from foreign exchange transactions - net
Umum dan administrasi	(1.247.117)	(1.442.582)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(706.146)	(623.497)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan pemerintah	(86.843)	(106.404)	Premium on government guarantee program
Total beban operasional lainnya	(2.040.106)	(2.172.483)	Total operational expenses
RUGI OPERASIONAL	**(6.088.072)**	**(4.990.183)**	**LOSS FROM OPERATIONS**
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	**(125.498)**	**(74.508)**	**NON-OPERATING LOSS - NET**
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(6.213.570)**	**(5.064.691)**	**LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			**INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)**
Tangguhan	702.789	94.711	Deferred
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	702.789	94.711	Income tax (expense) benefit - net
RUGI TAHUN BERJALAN	**(5.510.781)**	**(4.969.980)**	**LOSS FOR THE YEAR**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			**OTHER COMPREHENSIVE INCOME:**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	6.432	23.760	Remeasurement loss on defined benefit
Perubahan surplus revaluasi aset	(1.756)	77.837	Changes in asset revaluation surplus
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.415)	(5.227)	Income tax related to items that not be reclasified to profit or loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi: ke laba rugi:			Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.330	(70.134)	Changes in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.392)	15.429	Income tax related to items that will be reclasified to profit or loss
Total penghasilan komprehensif lain - neto	8.199	41.665	Total other comprehensive income - net
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(5.502.582)	(4.928.315)	Total comprehensive loss for the year
RUGI PER SAHAM			**LOSS PER SHARE**
Dasar/dilusian (nilai penuh)	(56)	(73)	Basic/diluted (full amount)

PT BANK KB BUKOPIN TBK (ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK (PARENT ONLY)
Statements Of Changes In Equity
For the Year Ended December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains on Fair Value Through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax*	Akumulasi Rugi/ *Accumulated Deficit*	Total
Saldo per 1 Januari 2022/ *Balance as of January 1, 2022*	7.000.000	8.286.428	-	1.481.285	57.330	(3.570.765)	13.254.278
Uang muka setoran modal/ *Advance for future shares subscription*	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
Surplus revaluasi aset/ *Assets revaluation surplus*	-	-	-	77.837	-	-	77.837
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ *Unrealized loss on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*	-	-	-	-	(54.705)	-	(54.705)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan *Remeasurement on defined benefit plans – net of deferred tax*	-	-	-	-	-	18.534	18.534
Rugi tahun berjalan/*Loss for the year*	-	-	-	-	-	(4.969.980)	(4.969.980)
Saldo per 31 Desember 2022/ *Balance as of December 31, 2022*	**7.000.000**	**8.286.428**	**3.000.000**	**1.559.122**	**2.625**	**(8.522.211)**	**11.325.964**

PT BANK KB BUKOPIN TBK (ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Perubahan Ekuitas (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK (PARENT ONLY)
Statements Of Changes In Equity (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains on Fair Value Through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax*	Akumulasi Rugi/ *Accumulated Deficit*	Total
Saldo per 1 Januari 2023/ *Balance as of January 1, 2023*	7.000.000	8.286.428	3.000.000	1.559.122	2.625	(8.522.211)	11.325.964
Uang muka setoran modal/ *Advance for future shares subscription*	3.000.000	-	(3.000.000)	-	-	-	-
Penerimaan dana PUT VII dan penempatan pribadi	9.000.000	(60.661)	-	-	-	-	8.939.339
Penghentian revaluasi aset/ *Dececognation assets revaluation*	-	-	-	(1.756)	-	-	(1.756)
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ *Unrealized loss on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan *Remeasurement on defined benefit plans – net of deferred tax*	-	-	-	-	4.938	5.017	9.955
Rugi tahun berjalan/*Loss for the year*	-	-	-	-	-	(5.510.781)	(5.510.781)
Saldo per 31 Desember 2023/ *Balance as of December 31, 2023*	**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.557.366**	**7.563**	**(14.027.975)**	**14.762.721**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Cash Flow
For the Year Ended
December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan bunga	4.417.801	3.566.202	Receipts from interest
Pembayaran bunga	(3.948.183)	(2.789.351)	Payments of interest expense
Pendapatan operasional lainnya	325.797	193.350	Other operating income
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	179.698	84.763	Recoveries from written-off loans
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(727.681)	(845.329)	Payments of salaries and employee benefits
Beban operasional lainnya	(1.112.903)	(1.731.424)	Other operating expenses
Beban non operasional	(119.192)	(74.727)	Non operating expenses
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(984.663)	(1.596.516)	Cash out before changes before in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan	(2.011.721)	(30.000)	Placements with other banks with maturities of more than 3 months from acquisition date
Surat-surat berharga - diperdagangkan	2.929.462	3.747.558	Marketable securities - trading
Surat-surat berharga - kredit yang diberikan dan piutang	495.880	724.074	Marketable securities - loans and receivables
Kredit yang diberikan	(1.423.577)	1.891.553	Loans
Tagihan akseptasi	113.828	11.783	Acceptances receivable
Aset lain-lain	(158.276)	(1.582.602)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	40.770	100.139	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah:			Deposits from customers:
Giro	(464.823)	127.514	Demand deposits
Tabungan	(88.679)	(1.901.335)	Savings deposits
Deposito berjangka	(7.105.913)	(2.775.137)	Time deposits
Simpanan dari bank lain	(2.612.829)	783.085	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	115.231	11.928	Acceptances payable
Utang pajak	13.160	13.930	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	527.169	66.919	Other liabilities
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(10.614.981)	(407.107)	Net cash used in operating activities

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Arus Kas (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Cash Flow (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	260.000	1.099.665	Receipts from sale of marketable securities - fair value through other comprehensive income
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo	11.665.372	4.106.018	Receipts from matured marketable securities
Pembelian surat-surat berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan pada biaya perolehan diamortisasi	(21.294.342)	(12.558.187)	Purchase of marketable securities - fair value through other comprehensive income and at amortized cost
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo	57.780.679	33.774.734	Receipts from matured marketable securities purchased with agreement to resell
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(60.352.831)	(33.525.187)	Payments of marketable securities purchased with agreement to resell
Pembelian aset tetap	(45.775)	(47.065)	Purchase of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	22.395	7.624	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian piranti lunak	(150.766)	(105)	Purchase of software
Penurunan penyertaan saham	1.280.565	-	Decrease in investment in shares
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(10.834.703)	(7.142.503)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.907.903	10.806.560	Receipts from marketable securities sold with agreement to repurchase
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(8.907.903)	(13.183.397)	Payments of matured marketable securities sold with agreement to repurchase
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	1.246.361	8.886.990	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	(724.234)	(80.196)	Payment of borrowings
Biaya penerbitan surat berharga yang diterbitkan			Cost of issuance of securities issued
Penerimaan dana setoran modal	-	3.000.000	future shares subscription
Penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas VII	8.939.339	-	Receipts from Limited Public Offering VII
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	9.461.466	9.429.957	Net cash provided by financing activities

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Arus Kas (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Cash Flow (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(11.988.218)**	**1.880.347**	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(48.240)	(422.198)	Effect of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**16.052.682**	**14.594.533**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**4.016.224**	**16.052.682**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents consist of:
Kas	254.501	490.328	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.655.765	3.743.790	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	367.341	766.734	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	738.617	11.051.830	Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date
Total	**4.016.224**	**16.052.682**	**Total**

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Parent are separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Daftar Investasi Pada Entitas Anak

2. Schedule Of Investment In Subsidiaries

2023

Nama Entitas/ *Entity Name*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya perolehan 1 Jan. 2023/ *Acquisition Cost Jan. 1, 2023*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Biaya Perolehan 31 Des. 2023/ *Carrying Value Dec. 31, 2023*
PT KB Bukopin Finance	99,24%	190.600	600.565	-	791.165
PT Bank KB Bukopin Syariah	95,92%	842.000	680.000	-	1.522.000
Total		1.032.600	1.280.565	-	2.313.165
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai *goodwill/ Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*					(106.229)
					2.206.936

2022

Nama Entitas/ *Entity Name*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya perolehan 1 Jan. 2022/ *Acquisition Cost Jan. 1, 2022*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Biaya Perolehan 31 Des. 2022/ *Carrying Value Dec. 31, 2022*
PT KB Bukopin Finance	97,03%	190.600	-	-	190.600
PT Bank KB Bukopin Syariah	92,78%	842.000	-	-	842.000
Total		1.032.600	-	-	1.032.600
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai *goodwill/ Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*					(106.229)
					926.371

2023 Laporan Tahunan

Strengthening a Solid Business Foundation

KB Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk

Kantor Pusat
Gedung KB Bank
Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770
+6221-7988266, 7989837
+6221-7980625, 7980238, 7980244
corsec@kbbank.co.id
www.kbbank.co.id
kbbukopin